# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR




# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
# NOMOR 2 TAHUN 2025
# TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029











BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**SALINAN**

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang .

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Datar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2025-2029.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan target kinerja pembangunan Daerah tahun 2030.

Pasal 3

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati.
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

(3) RPJMD ...

(3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

(4) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

(5) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah membidangi perencanaan pembangunan daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6 ..

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT : 2/43/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, Tujuan, kebijakan, Sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan Tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. Perencanaan pembangunan daerah disusun atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati terpilih harus menyusun RPJMD sebagai penjabaran dari visi dan misinya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up).* Selanjutnya RPJMD nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: penjabaran RPJMD yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah, dan perubahan RPJMD yang tata caranya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

# DAFTAR ISI


| | | Hal |
|---|---|---|
| DAFTAR ISI | | i |
| DAFTAR TABEL | | iv |
| DAFTAR GAMBAR | | x |
| BAB I | PENDAHULUAN | I-1 |
| | 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| | 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | I-3 |
| | 1.3. Hubungan Antar Dokumen | I-5 |
| | 1.3.1. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 Dengan RPJPD Tahun 2025-2045 | I-6 |
| | 1.3.2. Hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 Dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN tahun 2025-2029 | I-7 |
| | 1.3.3. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 Dengan RPJMN Tahun 2025-2029 | I-7 |
| | 1.3.4. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 Dengan RTRW Kabupaten Tanah Datar 2022-2042 | I-8 |
| | 1.3.5. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 Dengan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 | I-9 |
| | 1.3.6. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 Dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 | I-9 |
| | 1.3.7. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 Dengan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 | I-9 |
| | 1.3.8. Hubungan Antara RPJMD tahun 2025-2029 Dengan RKPD | I-11 |
| | 1.3.9. Hubungan Antara RPJMD 2025-2029 dengan Renstra perangkat daerah | I-11 |
| | 1.3.10. Hubungan Antara RPJMD 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Daerah Lain. | I-11 |
| | 1.4. Maksud Dan Tujuan | I-11 |
| | 1.4.1. Maksud | I-11 |
| | 1.4.2. Tujuan | I-12 |
| | 1.5. Sistematika Penulisan | I-12 |
| BAB II | Gambaran Umum Daerah | II-1 |
| | 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah | II-1 |
| | 2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi | II-1 |
| | 2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah | II-2 |

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam II-10
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-15
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-17
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas II-22
2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-26
2.1.1.7 Demografi II-27
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-34
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-34
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua II-50
2.1.2.3 Pendidikan Berkualita yang Merata II-54
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang adaptif II-58
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-61
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesejahteraan Gender dan Masyarakat Inklusif II-63
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-65
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia II-65
2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi II-65
2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-79
2.1.3.4 Transformasi Digital II-81
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-82
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-84
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro II-85
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-91
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-91
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan,Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Subtansial II-95
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-97
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah (Indikator Kinerja Kunci) II-98
2.1.5 Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2021-2026 Tahun Rencana Berjalan II-126
2.1.6 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimum 2020-2024 II-143
2.1.7 Evaluasi Terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) II-148
2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah II-150
2.2.1 Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2020-2024 II-151
2.2.2 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020-2024 II-152
2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2020-2024 II-164
2.2.4 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030 II-167
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II-191
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-192

2.3.2 Isu Strategis Daerah II-203
2.3.2.1 Isu Strategi Tujuan Global II-204
2.3.3 Isu Strategis Pembangunan Nasional II-208
2.3.4 Isu Strategis Regional Sumatera II-211
2.3.5 Isu Strategis Kabupaten Tanah Datar II-211
2.3.6 Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) II-213

Bab III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1
3.1.1 Pembangunan Jangka Panjang Tanah Datar Tahun 2025-2045 III-1
3.1.1.1 Visi RPJMD Tahun 2025-2045 III-1
3.1.1.2 Misi RPJMD Tahun 2025-2045 III-2
3.1.1.3 Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-204 III-4
3.1.2 Visi, Misi, dan Sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 III-11
3.1.3 Visi, Misi, dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat III-12
3.1.4 RPJMD Kabupaten Tanah Datar III-14
3.1.4.1 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Datar III-14
3.1.4.2 Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Datar III-17
3.1.4.3 Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Dan RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2029 III-18
3.1.4.4 RPJMD Kabupaten/ Kota Tetangga III-20
3.1.4.5 Tujuan dan Sasaran III-21
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan III-28
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran III-28
3.2.2 Arah kebijakan dan program pembangunan daerah terhadap fokus prioritas RPJMN tahun 2025-2029 III-38
3.2.2.1 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan III-38
3.2.2.2 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia III-39
3.2.2.3 Arah dan Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan III-41
3.2.3 Pentahapan pembangunan (arah kebijakan) Kabupaten Tanah Datar tahun 2026-2030 III-44
3.2.4 Prioritas pembangunan daerah III-226
3.2.4.1 Program Unggulan III-226
3.2.4.2 Program Strategis III-228
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1

4.1 Program Perangkat Daerah IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-119
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-119
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) IV-125
BAB V PENUTUP V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan V-1
5.1.1 Sistem Insentif V-1
5.1.2 Mekanisme Perubahan V-1
5.1.3 Komunikasi Publik V-1
5.1.4 Konsistensi Perencanaan Dan Pendanaan V-1
5.2 Kerangka pengendalian dan evaluasi yang efektif melalui manajemen resiko V-2
5.3 Tata kelola satu data Indonesia tingkat kabupaten /kota V-3
5.4 Pembiayaan pembangunan V-4

DAFTAR TABEL


| | | Hal |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Luas wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar | II-2 |
| Tabel 2.2 | Batas Wilayah Kabupaten Tanah Datar | II-3 |
| Tabel 2.3 | Ketinggian Wilayah di Kabupaten Tanah Datar Per kecamatan | II-3 |
| Tabel 2.4 | Luas Kelerengan di Kabupaten Tanah Datar | II-4 |
| Tabel 2.5 | Luas Jenis Tanah di Kabupaten Tanah Datar | II-5 |
| Tabel 2.6 | Nama Sungai Besar dengan Lebar, Panjang, Dan Luas Sungai di Kabupaten Tanah Datar | II-6 |
| Tabel 2.7 | Luas Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Tanah Datar | II-7 |
| Tabel 2.8 | Guna Lahan Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 | II-8 |
| Tabel 2.9 | Luas Guna Lahan Di Kabupaten Tanah Datar Per Kecamatan (Ha) | II-9 |
| Tabel 2.10 | Daya Dukung Air | II-16 |
| Tabel 2.11 | Konsumsi listrik Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 | II-17 |
| Tabel 2.12 | Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap (%) Tahun 2020-2024 | II-20 |
| Tabel 2.13 | Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) Tahun 2020-2024 | II-21 |
| Tabel 2.14 | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-22 |
| Tabel 2.15 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-23 |
| Tabel 2.16 | Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 – 2024 (dalam ribu) | II-27 |
| Tabel 2.17 | Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 – 2024 | II-28 |
| Tabel 2.18 | Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 | II-28 |
| Tabel 2.19 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur (Ribu Jiwa) Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-30 |
| Tabel 2.20 | Angka Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Tanah Datar Per Kecamatan pada tahun 2024 | II-33 |
| Tabel 2.21 | Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 | II-34 |
| Tabel 2.22 | Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (Persen) | II-35 |
| Tabel 2.23 | Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 – 2024 | II-36 |
| Tabel 2.24 | Nilai PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 – 2024 (Miliar) | II-37 |
| Tabel 2.25 | Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 – 2024 (%) | II-38 |
| Tabel 2.26 | PDRB ADHB menurut Pengeluaran) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 – 2024 (Juta Rupiah) | II-39 |
| Tabel 2.27 | Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020-2024 | II-40 |
| Tabel 2.28 | Persentase Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Kab/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2021-2024 | II-42 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.29 | PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 | II-43 |
| Tabel 2.30 | Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Datar 2020–2024 | II-44 |
| Tabel 2.31 | Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 | II-45 |
| Tabel 2.32 | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2020-2024 | II-46 |
| Tabel 2.33 | Kondisi Indeks Gini Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2022 - 2024 | II-47 |
| Tabel 2.34 | IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024 | II-49 |
| Tabel 2.35 | Jumlah hafiz/hafizah yang bersertifikat di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-59 |
| Tabel 2.36 | Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-59 |
| Tabel 2.37 | Capaian Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-61 |
| Tabel 2.38 | Capaian Jumlah Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-62 |
| Tabel 2.39 | Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-63 |
| Tabel 2.40 | Rasio Ketergantungan Tahun 2020-2024 | II-65 |
| Tabel 2.41 | Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan Kabupaten Tanah Datar 2020-2024 | II-66 |
| Tabel 2.42 | Jumlah Tamu Wisatawan Domestik (orang) Kabupaten Tanah Datar 2020-2024 | II-69 |
| Tabel 2.43 | Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang) Yang Menginap Di Kabupaten Tanah Datar 2020-2024 | II-70 |
| Tabel 2.44 | Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-72 |
| Tabel 2.45 | Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2024 | II-78 |
| Tabel 2.46 | Jumlah Penelitian yang dilaksanakan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-78 |
| Tabel 2.47 | Persentase Inovasi yang diterapkan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-79 |
| Tabel 2.48 | Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024 | II-82 |
| Tabel 2.49 | Nilai PMTB di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 (milyar rupiah) | II-83 |
| Tabel 2.50 | Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 (milyar rupiah) | II-83 |
| Tabel 2.51 | Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-87 |
| Tabel 2.52 | Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-92 |
| Tabel 2.53 | Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-92 |
| Tabel 2.54 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024 | II-99 |
| Tabel 2.55 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 | II-100 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.56 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 | II-101 |
| Tabel 2.57 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 | II-102 |
| Tabel 2.58 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 | II-104 |
| Tabel 2.59 | Perkembangan Indikator Tahun 2020-2024 | II-105 |
| Tabel 2.60 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024 | II-106 |
| Tabel 2.61 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 | II-107 |
| Tabel 2.62 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2020-2024 | II-107 |
| Tabel 2.63 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020-2024 | II-108 |
| Tabel 2.64 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 | II-108 |
| Tabel 2.65 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024 | II-109 |
| Tabel 2.66 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024 | II-110 |
| Tabel 2.67 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 | II-111 |
| Tabel 2.68 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024 | II-111 |
| Tabel 2.69 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 | II-112 |
| Tabel 2.70 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2020-2024 | II-112 |
| Tabel 2.71 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 2020-2024 | II-113 |
| Tabel 2.72 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2020-2024 | II-114 |
| Tabel 2.73 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 2020-2024 | II-114 |
| Tabel 2.74 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 2020-2024 | II-115 |
| Tabel 2.75 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 2020-2024 | II-115 |
| Tabel 2.76 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 2020-2024 | II-116 |
| Tabel 2.77 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 2020-2024 | II-117 |
| Tabel 2.78 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 2020-2024 | II-118 |
| Tabel 2.79 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024 | II-119 |
| Tabel 2.80 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024 | II-119 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.81 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2020-2024 | II-120 |
| Tabel 2.82 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024 | II-121 |
| Tabel 2.83 | Perkembangan Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2020-2024 | II-121 |
| Tabel 2.84 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan Tahun 2020-2024 | II-122 |
| Tabel 2.85 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan Tahun 2020-2024 | II-122 |
| Tabel 2.86 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Pengadaan Tahun 2020-2024 | II-123 |
| Tabel 2.87 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian Tahun 2020-2024 | II-123 |
| Tabel 2.88 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 | II-124 |
| Tabel 2.89 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2020-2024 | II-124 |
| Tabel 2.90 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Manjemen Keuangan Tahun 2020-2024 | II-124 |
| Tabel 2.91 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Transparansi dan Partisipasi Publik Tahun 2020-2024 | II-125 |
| Tabel 2.92 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Pengawas Tahun 2020-2024 | II-125 |
| Tabel 2.93 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan Tahun 2020-2024 | II-126 |
| Tabel 2.94 | Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024 | II-126 |
| Tabel 2.95 | Perkembangan Realiasasi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 sampai dengan RKPD Tahun 2024 | II-127 |
| Tabel 2.96 | Hasil Evaluasi atas Indikator Misi 1 | II-128 |
| Tabel 2.97 | Hasil Evaluasi atas Indikator Misi 2 | II-131 |
| Tabel 2.98 | Hasil Evaluasi atas Indikator Misi 3 | II-134 |
| Tabel 2.99 | Hasil Evaluasi atas Indikator Misi 4 | II-136 |
| Tabel 2.100 | Hasil Evaluasi atas Indikator Misi 5 | II-138 |
| Tabel 2.101 | Hasil Evaluasi atas Indikator Sasaran 1 Misi 6 | II-141 |
| Tabel 2.102 | Realisasi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024 | II-144 |
| Tabel 2.103 | Realisasi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024 | II-144 |
| Tabel 2.104 | Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 | II-145 |
| Tabel 2.105 | Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 | II-146 |
| Tabel 2.106 | Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 | II-146 |
| Tabel 2.107 | Realisasi SPM Urusan Bencana Daerah Tahun 2020-2024 | II-147 |
| Tabel 2.108 | Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2020-2024 | II-147 |
| Tabel 2.109 | Capaian Indikator TPB | II-149 |
| Tabel 2.110 | Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-152 |
| Tabel 2.111 | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Tingkat Capaian Realisasi, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Tahun 2020-2024 | II-153 |
| Tabel 2.112 | Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 | II-154 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.113 | Kontribusi Masing-Masing Komponen Dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-155 |
| Tabel 2.114 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024 (%) | II-156 |
| Tabel 2.115 | Target dan Realisasi Belanja Daerah, Tingkat Capaian Realisasi, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Tahun 2020-2024 | II-157 |
| Tabel 2.116 | Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2020-2024 | II-158 |
| Tabel 2.117 | Kontribusi Komponen Belanja Daerah Tahun 2020-2024 | II-160 |
| Tabel 2.118 | Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Datar 2020-2024 | II-161 |
| Tabel 2.119 | Realisasi Pembiayaan selama tahun 2020-2024 | II-162 |
| Tabel 2.120 | Neraca pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Rata-Rata Pertumbuhan Masing-Masing Komponen Neraca Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah) | II-163 |
| Tabel 2.121 | Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar 2026-2030 | II-169 |
| Tabel 2.122 | Proyeksi Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026-2030 | II-170 |
| Tabel 2.123 | Proyeksi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Tahun 2026-2030 | II-172 |
| Tabel 2.124 | Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026-2030 | II-178 |
| Tabel 2.125 | Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026-2030 | II-180 |
| Tabel 2.126 | Proyeksi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026-2030 | II-184 |
| Tabel 2.127 | Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026-2030 | II-185 |
| Tabel 2.128 | Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Tanah Datar tahun 2026-2030 | II-189 |
| Tabel 2.129 | Proyeksi Rasio Belanja Pegawai dan Belanja Infrastruktur Kabupaten Tanah Datar tahun 2026-2030 | II-190 |
| Tabel 2.130 | Proyeksi Rasio Belanja Infrastruktur pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar tahun 2026-2030 | II-190 |
| Tabel 2.131 | Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026-2030 | II-191 |
| Tabel 2.132 | Pemetaan Permasalahan Belum Optimalnya Peningkatan Kehidupan Beragama, Beradat Dan Berbudaya | II-192 |
| Tabel 2.133 | Pemetaan Permasalahan Belum Optimalnya Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | II-194 |
| Tabel 2.134 | Pemetaan Permasalahan Belum Optimalnya Transformasi Ekonomi Yang Berbasis Pertanian, Pariwisata, Usaha Mikro Dan Peningkatan Investasi | II-195 |
| Tabel 2.135 | Pemetaan Permasalahan Belum Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif Dan Efisien | II-198 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.136 | Pemetaan Permasalahan Belum Optimalnya Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan | II-199 |
| Tabel 2.137 | Pemetaan Permasalahan Belum Optimalnya Keamanan Daerah, Demokrasi Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | II-200 |
| Tabel 2.138 | Pemetaan Permasalahan Belum Optimalnya Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan | II-200 |
| Tabel 2.139 | Identifikasi Permasalahan Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 | II-201 |
| Tabel 2.140 | Identifikasi Permasalahan Terkait Hasil Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | II-202 |
| Tabel 2.141 | Isu strategis daerah | II-216 |
| Tabel 3.1 | Sasaran visi Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2045 | III-2 |
| Tabel 3.2 | Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 | III-5 |
| Tabel 3.3 | Indikator Sasaran Pembangunan Nasional | III-11 |
| Tabel 3.4 | Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Sumatera Barat 2025-2029 | III-13 |
| Tabel 3.5 | Sasaran Visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 | III-16 |
| Tabel 3.6 | Penjelasan Misi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 | III-17 |
| Tabel 3.7 | Keterkaitan antara Visi RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 | III-18 |
| Tabel 3.8 | Persandingan Misi RPJMN, Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 | III-18 |
| Tabel 3.9 | Tujuan, Sasaran, dan Indikator berdasarkan Misi | III-22 |
| Tabel 3.10 | Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan misi | III-29 |
| Tabel 3.11 | Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar untuk Periode Tahun 2025-2030 | III-39 |
| Tabel 3.12 | IPM Kabupaten Tanah Datar periode 2025-2030 | III-40 |
| Tabel 3.13 | LPE Kabupaten Tanah Datar periode 2025-2030 | III-41 |
| Tabel 3.14 | Pentahapan Pembangunan (Arah kebijakan) Tahun 2026-2030 berdasarkan Misi, Sasaran dan Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 | III-44 |
| Tabel 3.15 | Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 | III-62 |
| Tabel 4.1 | Pagu anggaran perangkat daerah tahun 2025-2030 | IV-2 |
| Tabel 4.2 | Program Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2030 | IV-5 |
| Tabel 4.3 | Indikator Makro Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024-2030 | IV-120 |
| Tabel 4.4 | Target Indikator Kinerja Utama Sasaran Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2030 | IV-121 |
| Tabel 4.5 | Target Indikator Kinerja Utama Sasaran Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2030 | IV-122 |
| Tabel 4.6 | Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030 | IV-126 |
| Tabel 4.7 | Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030 | IV-135 |

DAFTAR GAMBAR


| | | Hal |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan | I-6 |
| Gambar 2.1 | Peta Administrasi Kabupaten Tanah Datar | II-2 |
| Gambar 2.2 | Topografi Kabupaten Tanah Datar | II-4 |
| Gambar 2.3 | Peta Jenis Tanah Di Kabupaten Tanah Datar | II-4 |
| Gambar 2.4 | Peta Hidrologi Kabupaten Tanah Datar | II-6 |
| Gambar 2.5 | Peta Klimatologi Kabupaten Tanah Datar | II-8 |
| Gambar 2.6 | Peta Tutupan Lahan | II-9 |
| Gambar 2.7 | Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanah Datar | II-15 |
| Gambar 2.8 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tanah Datar, Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024 | II-18 |
| Gambar 2.9 | Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-19 |
| Gambar 2.10 | Kapasitas Air Baku Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 ($m^3$/detik) | II-20 |
| Gambar 2.11 | Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-23 |
| Gambar 2.12 | Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-24 |
| Gambar 2.13 | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-25 |
| Gambar 2.14 | Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-26 |
| Gambar 2.15 | Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-26 |
| Gambar 2.16 | Persentase Distribusi Penduduk Kabupaten Tanah Datar | II-29 |
| Gambar 2.17 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur (Ribu Jiwa) Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 | II-31 |
| Gambar 2.18 | Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar 2020-2024 | II-32 |
| Gambar 2.19 | Rasio Jenis Kelamin Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-32 |
| Gambar 2.20 | Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-35 |
| Gambar 2.21 | Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (%) | II-35 |
| Gambar 2.22 | Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional 2020-2024 (%) | II-39 |
| Gambar 2.23 | Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa) | II-41 |
| Gambar 2.24 | Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-41 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.25 | Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Dan Nasional Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah) | II-43 |
| Gambar 2.26 | 6 Sektor Yang Memiliki Kontribusi Terbesar Terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 | II-44 |
| Gambar 2.27 | Perbandingan Perkembangan Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Tanah Datar , Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 220-2024 | II-45 |
| Gambar 2.28 | Indeks gini Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 | II-46 |
| Gambar 2.29 | Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2019-2023 | II-48 |
| Gambar 2.30 | Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2020-2024 | II-49 |
| Gambar 2.31 | Angka harapan hidup Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2020-2024 | II-50 |
| Gambar 2.32 | Angka kematian ibu Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 | II-51 |
| Gambar 2.33 | Prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2024 (%) | II-52 |
| Gambar 2.34 | Perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 (%) | II-53 |
| Gambar 2.35 | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 (%) | II-53 |
| Gambar 2.36 | Persentase kepesertaan masyarakat pada sistem jaminan sosial (SJSN) bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 | II-54 |
| Gambar 2.37 | Capaian literasi membaca Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2024 | II-55 |
| Gambar 2.38 | Capaian numerasi Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2024 | II-55 |
| Gambar 2.39 | Rata-rata lama sekolah tahun 2020-2024 (tahun) | II-56 |
| Gambar 2.40 | Harapan lama sekolah tahun 2020-2024 | II-56 |
| Gambar 2.41 | Persentase penduduk 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 | II-57 |
| Gambar 2.42 | Perkembangan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2018-2022 | II-58 |
| Gambar 2.43 | Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-60 |
| Gambar 2.44 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-64 |
| Gambar 2.45 | Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2024 | II-65 |
| Gambar 2.46 | Rasio Perkembangan Kontribusi Industri Pengolahan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-67 |
| Gambar 2.47 | Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-68 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.48 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-68 |
| Gambar 2.49 | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-71 |
| Gambar 2.50 | Proporsi Jumlah IKM di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-72 |
| Gambar 2.51 | Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-73 |
| Gambar 2.52 | Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-74 |
| Gambar 2.53 | *Return on Asset* Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022 | II-74 |
| Gambar 2.54 | Nilai Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal di Kabupaten Tanah Datar | II-75 |
| Gambar 2.55 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (ADHB) di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-76 |
| Gambar 2.56 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (ADHK) di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-76 |
| Gambar 2.57 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-77 |
| Gambar 2.58 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-77 |
| Gambar 2.59 | Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-80 |
| Gambar 2.60 | Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 (Juta/Orang) | II-81 |
| Gambar 2.61 | Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2024 | II-82 |
| Gambar 2.62 | Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-84 |
| Gambar 2.63 | Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-85 |
| Gambar 2.64 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-85 |
| Gambar 2.65 | Laju Inflasi Kabupaten Tanah Datar , Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2020–2024 | II-86 |
| Gambar 2.66 | Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-87 |
| Gambar 2.67 | Nilai Transaksi Saham Perkapita di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 – 2024 | II-88 |
| Gambar 2.68 | Perkembangan Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-89 |
| Gambar 2.69 | Jumlah Realisasi Investasi (Miliar Rupiah) | II-89 |
| Gambar 2.70 | Rasio PDRB Jasa Keuangan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 (%) | II-91 |
| Gambar 2.71 | Capaian Indeks SPBE Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-93 |
| Gambar 2.72 | Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-94 |
| Gambar 2.73 | Nilai Survey Penilaian Integritas Kab. Tanah Datar Tahun 2021-2024 | II-95 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.74 | Rasio Angka Kriminalitas di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-96 |
| Gambar 2.75 | Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Tanah Datar pada Pilpres dan Pileg Tahun 2019, 2024 | II-96 |
| Gambar 2.76 | Persentase Kerjasama Wajib Dilaksanakan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-97 |
| Gambar 2.77 | Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-98 |
| Gambar 2.78 | Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 | II-156 |
| Gambar 2.79 | Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Datar 2020-2024 (%) | II-161 |
| Gambar 2.80 | Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2026-2030 | II-1171 |
| Gambar 2.81 | Proyeksi Pertumbuhan Belanja 2026-2030 | II-177 |
| Gambar 2.82 | Analisa Proyeksi Pembiayaan Daerah | II-183 |
| Gambar 5.1 | Sumber-Sumber Pendanaan Daerah | V-5 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu, sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel.

Perencanaan pembangunan Daerah tersebut, disusun secara berjenjang sesuai dengan periodisasi dan substansinya, terdiri dari :

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahunan;
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan;
3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJPD. RPJMD Tahun 2025 - 2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi manusia bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 khususnya pada tahapan 5 (lima) tahun pertama yaitu tahun 2025-2029, sehingga tujuan dan target pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada target RPJPD di tahun berkenaan. Berdasarkan RPJPD Tahun 2025- 2045, terdapat sasaran pokok visi yang perlu mendapat perhatian karena merupakan sasaran periode pertama RPJPD, yaitu:

Sasaran Pokok 1: Peningkatan pendapatan perkapita
Sasaran Pokok 2: Kemiskinan dan ketimpangan berkurang
Sasaran Pokok 3: Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah Daerah
Sasaran Pokok 4: Daya saing sumber daya manusia meningkat
Sasaran Pokok 5: Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dilaksanakan pasca pelantikan Eka Putra, SE, MM dan Ahmad Fadly, S.Psi sebagai Bupati Tanah Datar dan Wakil Bupati Tanah Datar berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara, dengan masa bakti yang berlaku selama periode 2025–2030.

Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk menjabarkan visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik ke dalam arah pembangunan Tanah Datar 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025–2045, sehingga menjadi momentum penting untuk merefleksikan pencapaian selama lima tahun. Oleh karena itu, RPJMD Tahun 2025–2029 tidak hanya menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional, tetapi juga harus mampu menyiapkan fondasi transformasi daerah yang lebih adaptif, inklusif dan berdaya saing tinggi.

Penyusunan RPJMD merupakan amanat konstitusional dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMD menjadi acuan dalam menyusun dokumen RKPD, Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Selanjutnya target RPJMD diturunkan menjadi target tahunan dalam RKPD, demikian pula target Renstra diturunkan dalam target tahunan Renja Perangkat Daerah. Dengan demikian, keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut akan menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk melakukan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan

lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Arah pembangunan daerah tidak hanya mengejar capaian jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan di masa depan.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

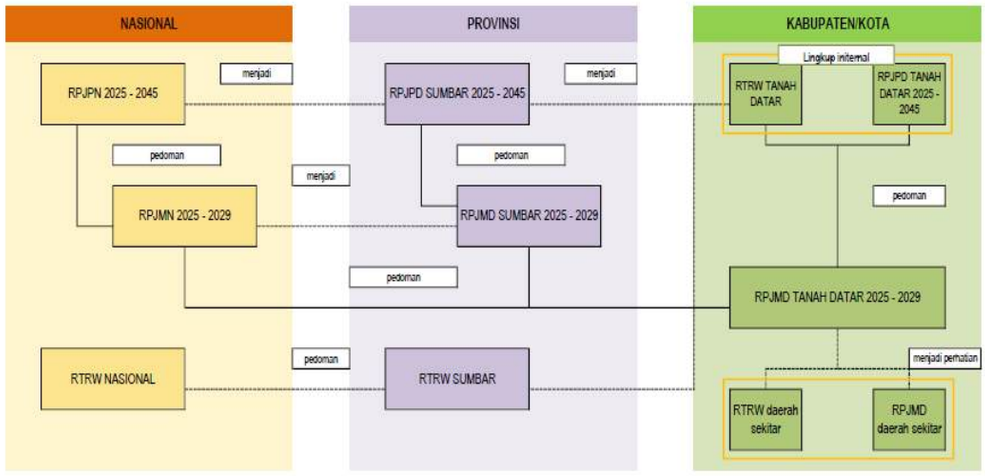
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58).

Selain peraturan tersebut di atas, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi ini memberikan arahan strategis dan operasional dalam proses penyusunan RPJMD, termasuk penyesuaian dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, integrasi visi-misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan, serta penajaman indikator kinerja pembangunan daerah. Meskipun tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, Instruksi ini menjadi rujukan penting yang bersifat operasional dan digunakan sebagai aturan tambahan internal guna menjamin keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dengan pembangunan nasional.

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025–2029 harus diselaraskan dengan RPJPD Tahun 2025–2045, RTRW Tahun 2022-2042 dan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar I.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan




1.3.1. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025–2045

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan, visi, dan misi pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Dokumen ini menjadi pedoman strategis yang bersifat makro dan berfungsi sebagai landasan utama bagi seluruh perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh kepala daerah terpilih. RPJMD berperan sebagai penjabaran operasional dari RPJPD, yang memuat program, sasaran, dan indikator kinerja secara lebih terukur dan realistis sesuai periode pemerintahan.

Keterkaitan keduanya bersifat hierarkis dan mengikat. RPJMD wajib berpedoman pada RPJPD agar setiap langkah pembangunan yang ditempuh konsisten dengan arah pembangunan jangka panjang yang telah disepakati. Dengan demikian, RPJPD menetapkan tujuan besar pembangunan daerah, sedangkan RPJMD mengatur tahapan strategis untuk mencapainya dalam siklus 5 (lima) tahunan. Tanpa keterpaduan antara keduanya, pembangunan berisiko kehilangan kesinambungan dan berpotensi tidak mencapai target yang diharapkan.

Guna menjamin keselarasan dan konsistensi antara dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 maka pembangunan 5 (lima) tahunan pertama (tahun 2025–2029) perlu difokuskan pada pencapaian sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045. Periode pertama merupakan Periode Perkuatan Pondasi (Tahap I), dengan sasaran pokok pada masing-masing misi sebagai berikut:

1. Sasaran Pokok Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Sasaran Pokok Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Sasaran Pokok Misi 3 Mewujudkan Transformasi tata kelola
4. Sasaran Pokok Misi 4 Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro
5. Sasaran Pokok Misi 5 Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

### 1.3.2. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, maka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki sinergi melalui penyelarasan dan sinkronisasi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029. Sehingga terjaminnya integrasi, dan sinergi antar fungsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 diselaraskan dalam kerangka arah pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dan penjabaran konkrit dari RPJMN Tahun 2025-2029 di tingkat daerah, yang harus selaras dalam visi, misi, sasaran, program, dan indikator kinerja pembangunan demi mewujudkan sinergi pembangunan nasional dan daerah secara efektif dan berkelanjutan serta selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, termasuk mendukung proyek strategis nasional dan prioritas pembangunan yang menjadi fokus pemerintah pusat. Hal ini memastikan sinergi dan harmonisasi antara pembangunan nasional dan daerah. RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 berorientasi pada pencapaian target-target makro pembangunan nasional seperti penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 harus berpedoman pada indikator makro RPJMN Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan. RPJMN tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 menjadi dasar hukum dan pedoman utama dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar wajib mengikuti pedoman ini agar pembangunan Kabupaten Tanah Datar dapat berkontribusi optimal dalam pencapaian visi nasional "Indonesia Emas 2045”.

### 1.3.3. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional, pembangunan di daerah tidak dapat berdiri sendiri. RPJMD Tahun 2025-2029 harus selaras dan terpadu dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan harus menjamin integrasi dan sinergi antara pusat dan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 juga menegaskan bahwa :

1. RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun adalah rencana pembangunan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN terhitung sejak Tahun 2025-2029.
2. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJMN.
3. RPJMN wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

Secara substansi RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang memuat arah pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Namun dalam penyusunannya, RPJMD tetap harus mengacu pada visi Indonesia Emas 2045 dan Visi RPJMN Tahun 2025–2045 sebagai arah pembangunan nasional yang kemudian dijabarkan dalam Astacita. Sehingga setiap program prioritas daerah dalam RPJMD harus mencerminkan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap target nasional, dalam bentuk indikator kinerja daerah yang mendukung indikator makro nasional.

Untuk itu maka, antara RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 memiliki nilai strategis antara lain menjamin konsistensi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, meningkatkan peluang alokasi pendanaan nasional ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta memastikan bahwa pembangunan daerah memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan nasional dan memperkuat daya saing daerah dalam kerangka pembangunan nasional dan global.

RPJMD Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi pedoman pembangunan lima tahunan di tingkat daerah, tetapi juga merupakan bagian integral dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2045 dalam skala nasional. Sinkronisasi keduanya menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin keberhasilan pembangunan nasional yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### 1.3.4. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025–2029 dengan RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042

RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2042 merupakan rencana umum tata ruang yang akan digunakan sebagai pedoman pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan serta pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan daerah. Dokumen RTRW Tahun 2022-2042 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029. RTRW Tahun 2022-2042 berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang kabupaten yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan utilitas, rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya, kawasan-kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama, arahan pengendalian

pemanfaatan ruang yang berisi indikasi arahan peraturan sistem zonasi kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.

1.3.5. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai acuan awal menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 yang substansinya memuat tentang permasalahan dan isu-isu strategis daerah serta rekomendasi arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029 yang merujuk kepada RPJPD Tahun 2025-2045 dan RTRW Tahun 2022-2042. Selain itu, dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 untuk melihat gambaran capaian indikator makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta capaian kinerja program prioritas, sehingga menjadi landasan utama menentukan kerangka logis penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dalam perumusan tujuan, sasaran, prioritas Pembangunan lima tahun, strategi, arah kebijakan dan program prioritas untuk pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029.

1.3.6. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, maka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki sinergi melalui penyelarasan dan sinkronisasi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Sehingga terjaminnya integrasi, dan sinergi antar fungsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 diselaraskan dalam kerangka arah pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

1.3.7. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

RPJMD Tahun 2025-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam konteks perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. KLHS merupakan proses analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang bertujuan memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD. KLHS menjadi landasan penting yang memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara komprehensif, sehingga isu-isu strategis terkait keberlanjutan dapat diidentifikasi dan diakomodasi dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dalam RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, KLHS membantu mengarahkan pembangunan agar tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini penting untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dan keselamatan generasi sekarang dan yang akan datang. KLHS juga memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat preventif dan

adaptif terhadap dampak lingkungan, sehingga RPJMD yang disusun dapat mengantisipasi risiko lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

KLHS merupakan instrumen untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 wajib dilengkapi dan disusun secara simultan dengan KLHS, agar perencanaan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS bahwa RPJMD merupakan salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disertai dengan KLHS, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dokumen RPJMD harus memuat hasil integrasi dari dokumen KLHS dan hasil analisis pembangunan berkelanjutan.

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan adalah alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, berupa target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan pembangunan berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya tambahan dengan memperhatikan pencapaian target tanpa upaya tambahan, pencapaian target yang ditetapkan secara nasional, potensi, daya saing dan inovasi daerah, daya dukung dan daya tampung daerah dan pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Hubungan substantif antara RPJMD dan KLHS adalah sebagai berikut:

1. KLHS berfungsi sebagai dasar ilmiah dan pertimbangan strategis dalam menyusun tujuan, sasaran, dan arah kebijakan RPJMD.
2. KLHS menyajikan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta identifikasi isu strategis lingkungan hidup dan keberlanjutan sosial ekonomi.
3. Hasil dan rekomendasi KLHS wajib diintegrasikan ke dalam RPJMD, baik pada tingkat perumusan visi dan misi, maupun dalam penentuan prioritas program, lokasi kegiatan, dan indikator kinerja.

Perintegrasian RPJMD dengan KLHS bertujuan untuk menjamin pembangunan berlangsung secara adil dan berkelanjutan, meminimalkan risiko dan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah, hal ini agar arah kebijakan pembangunan di RPJMD dapat berkualitas, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim, bencana, serta ketimpangan sosial.

1.3.8. Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RKPD

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode pemerintahan kepala daerah. RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi penjabaran dari RPJMD, berisi prioritas pembangunan, rencana program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Hubungan antara RPJMD dan RKPD bersifat langsung dan mengikat, di mana RKPD berfungsi sebagai instrumen operasional tahunan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, RKPD memastikan bahwa arah dan langkah pembangunan tahunan tetap selaras dengan sasaran jangka menengah daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan konsisten, terukur, dan berkesinambungan.

1.3.9. Hubungan Antara RPJMD 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan lima tahunan yang memandu pembangunan daerah secara makro, tetapi juga menjadi acuan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra masing-masing. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Keterkaitan keduanya bersifat sinkron dan saling menguatkan, di mana setiap Renstra harus diselaraskan secara substansial dengan RPJMD agar program sektoral yang dijalankan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Keselarasan ini memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor berjalan terpadu, menghindari tumpang tindih, serta memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

1.3.10. Hubungan Antara RPJMD 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Daerah Lain.

Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya agar terjaminnya keselarasan arah pembangunan jangka menengah daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama RPJMD Tahun 2025-2029 daerah tetangga. Oleh karena itu, perumusan substansi RPJMD Tahun 2025-2029 mempunyai hubungan yang saling terkait, agar terjaminnya keselarasan perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Maksud dan Tujuan

I.4.1. Maksud

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029 yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045.
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan lima tahun ke depan yang berkelanjutan.
3. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan empat aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain; hasil evaluasi capaian pembangunan daerah lima tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data yang disajikan diantaranya adalah: (a) Aspek geografi dan demografi, (b) Aspek kesejahteraan masyarakat, (c) Aspek daya saing daerah (d) Aspek pelayanan umum, (e) Gambaran keuangan daerah, (f) Permasalahan dan isu strategis.

Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk kurun waktu lima tahun ke depan yang disertai dengan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pada bab ini memuat daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029 beserta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM DAERAH

## 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo merupakan asal mula orang Minangkabau. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris karena sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan maupun perikanan yang semuanya telah berjalan secara turun temurun. Sektor lain yang berkembang pada dasarnya juga berbasis pertanian seperti industri kecil dan industri pengolahan di samping juga sektor pariwisata.

Masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang mayoritas penduduknya beragama Islam sangat kuat memegang teguh ajaran agama Islam dan adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Filosofi inilah yang menjadi landasan kehidupan masyarakat termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gambaran umum kondisi daerah meliputi beberapa aspek yang terdiri dari aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sudut pandang pada bagian tertentu untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan pendekatan lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Hal ini mencakup berbagai aspek fisik dan sosial yang membentuk karakteristik suatu wilayah, termasuk luas dan batas administratif, letak geografis, kondisi topografi, klimatologi, geologi, serta hidrologi. Selain itu, geografi juga menelaah pola penggunaan lahan, potensi pengembangan wilayah, serta tingkat kerawanan terhadap bencana alam, yang semuanya berperan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Sementara itu, aspek demografi merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sudut pandang pada bagian tertentu untuk mengkaji dinamika kependudukan, mencakup struktur, distribusi, dan perubahan populasi dalam suatu wilayah. Struktur kependudukan dianalisis berdasarkan parameter seperti jumlah penduduk, persebaran spasial, komposisi berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status ekonomi. Perubahan demografi terjadi akibat interaksi antara tiga variabel utama, yakni fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi.

Fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk tingkat kesehatan masyarakat, kebijakan kependudukan serta faktor sosial-ekonomi seperti pendidikan dan kesejahteraan. Mortalitas berkaitan dengan faktor medis, sanitasi, serta akses terhadap layanan kesehatan. Migrasi merupakan fenomena mobilitas penduduk yang dapat bersifat internal (dalam satu negara) maupun eksternal (antarnegara) yang sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Kombinasi antara studi geografi dan demografi memberikan wawasan mendalam tentang keterkaitan antara kondisi lingkungan dengan dinamika populasi manusia. Analisis ilmiah dalam kedua bidang ini berkontribusi pada perumusan kebijakan tata ruang, mitigasi

bencana, perencanaan pembangunan berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya yang berbasis pada data empiris dan pendekatan multidisipliner. Dalam melihat kondisi umum Kabupaten Tanah Datar dari aspek kondisi geografis dan demografis dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Kondisi Geografi dan Administrasi

Secara astronomis Kabupaten Tanah Datar terletak pada 00°17" - 00°39" Lintang Selatan dan 100°19" - 100°51" Bujur Timur. Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.377,19 Km² (137.719 Ha) atau sekitar 3,26% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42.297,30 Km²). Hal ini menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 19.929 Ha atau 14,47% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjuang Baru dengan luas 2.631 Ha atau 1,91% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Komposisi luas wilayah berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Luas wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

| No. | Kecamatan | Luas | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | % | Nagari | Jorong |
| 1 | X Koto | 14.869 | 10,80 | 9 | 41 |
| 2 | Batipuh | 10.118 | 7,35 | 8 | 49 |
| 3 | Batipuah Selatan | 16.679 | 12,11 | 4 | 17 |
| 4 | Pariangan | 5.830 | 4,23 | 6 | 21 |
| 5 | Rambatan | 12.939 | 9,40 | 5 | 33 |
| 6 | Lima Kaum | 3.064 | 2,22 | 5 | 33 |
| 7 | Tanjung Emas | 12.875 | 9,35 | 4 | 19 |
| 8 | Padang Ganting | 6.861 | 4,98 | 2 | 7 |
| 9 | Lintau Buo | 11.065 | 8,04 | 4 | 22 |
| 10 | Lintau Buo Utara | 19.929 | 14,47 | 5 | 63 |
| 11 | Sungayang | 6.837 | 4,96 | 5 | 14 |
| 12 | Sungai Tarab | 8.387 | 6,09 | 10 | 32 |
| 13 | Salimpaung | 5.635 | 4,09 | 6 | 27 |
| 14 | Tanjuang Baru | 2.631 | 1,91 | 2 | 17 |
| Jumlah | | 137.719 | 100,00 | 75 | 395 |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tanah Datar



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Berdasarkan letak administrasi, Kabupaten Tanah Datar mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Batas Wilayah Kabupaten Tanah Datar

| Batas | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| Utara | Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota |
| Selatan | Kabupaten Solok |
| Barat | Kabupaten Padang Pariaman |
| Timur | Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

2. Kondisi Topografi

Kabupaten Tanah Datar terletak di sekitar kaki Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago, dan Gunung Tandikek, serta memiliki lima sungai besar dan Danau Singkarak yang berada di Kecamatan Batipuah Selatan dan Rambatan. Wilayah ini memiliki variasi ketinggian yang terbagi dalam lima kategori, mulai dari 200 mdpl hingga lebih dari 2.600 mdpl. Beberapa kecamatan yang berada di ketinggian lebih dari 1.400 mdpl antara lain Kecamatan X Koto, Batipuh, Batipuah Selatan, Pariangan, Lintau Buo Utara, Sungayang, Sungai Tarab, Salimpaung, dan Tanjuang Baru.

Tinggi wilayah Kabupaten Tanah Datar dari permukaan laut dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

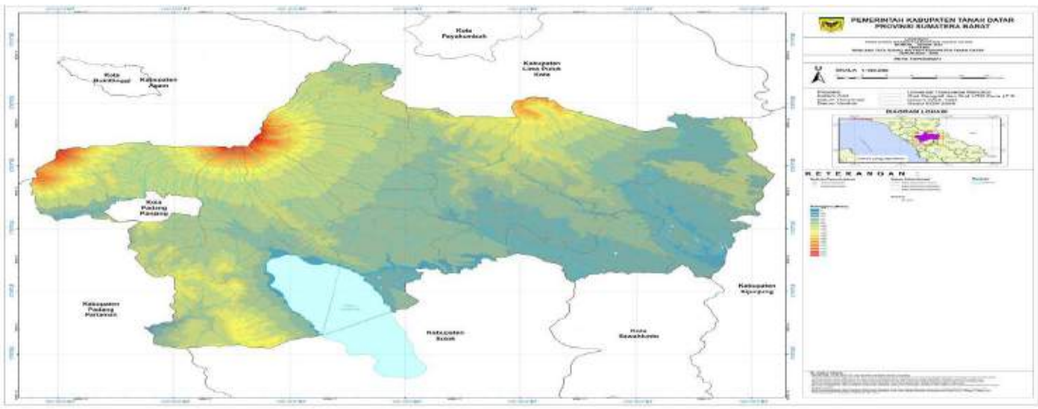
Tabel 2.3
Ketinggian Wilayah di Kabupaten Tanah Datar Per Kecamatan

| No. | Kecamatan | Klasifikasi (Mdpl) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 200-800 | 801-1400 | 1401-2000 | 2001-2600 | 2601-3200 |
| 1 | X Koto | 2.397 | 9.781 | 2.166 | 903 | 117 |
| 2 | Batipuh | 4.412 | 4.785 | 624 | 306 | 52 |
| 3 | Batipuah Selatan | 8.613 | 7.685 | 921 | - | - |
| 4 | Pariangan | 1.846 | 3.012 | 698 | 244 | 30 |
| 5 | Rambatan | 1.3591 | 39 | - | - | - |
| 6 | Lima Kaum | 2.809 | 255 | - | - | - |
| 7 | Tanjung Emas | 12.592 | 284 | - | - | - |
| 8 | Padang Ganting | 6.862 | - | - | - | - |
| 9 | Lintau Buo | 11.259 | 92 | - | - | - |
| 10 | Lintau Buo Utara | 13.112 | 4.823 | 1.134 | 136 | - |
| 11 | Sungayang | 3.924 | 2.798 | 115 | - | - |
| 12 | Sungai Tarab | 3.232 | 3.569 | 1.001 | 430 | 155 |
| 13 | Salimpaung | 11.21 | 4.028 | 421 | 65 | |
| 14 | Tanjuang Baru | 1.191 | 1.352 | 107 | - | - |
| Total Luas | | 86.960 | 42.502 | 7.187 | 2.083 | 354 |
| Persentase | | 62,52% | 30,56% | 5,17% | 1,50% | 0,25% |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Dari tabel di atas, sebaran ketinggian wilayah di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa wilayah dengan ketinggian 200-800 mdpl memiliki luas terbesar, yaitu 86.960 ha (62,52% dari total luas). Sementara itu, wilayah dengan ketinggian 2.601-3.200 mdpl memiliki luas terkecil, yaitu 354 ha (0,25% dari total luas). Selanjutnya gambar berikut menggambarkan topografi Kabupaten Tanah Datar.

Gambar 2.2
Topografi Kabupaten Tanah Datar



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Kabupaten Tanah Datar mempunyai kemiringan yang beragam. Terdapat tujuh jenis kemiringan lereng (kelerengan) yang tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Datar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Luas Kelerengan di Kabupaten Tanah Datar

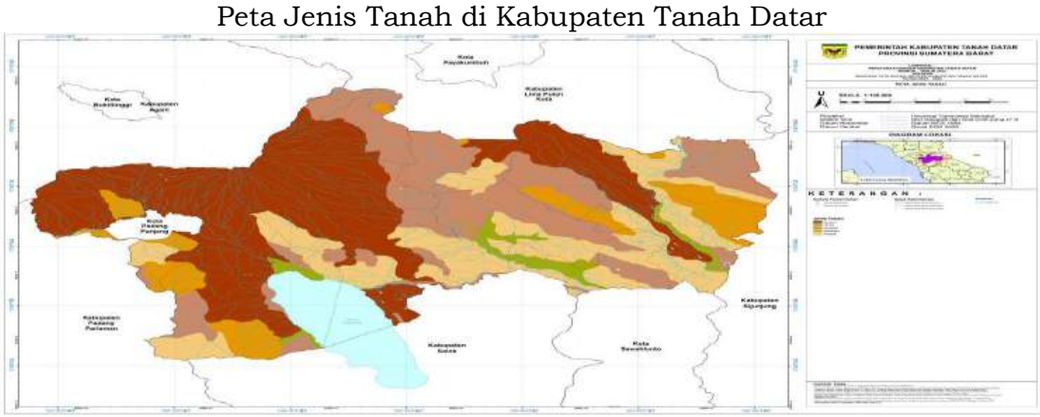
| No | Kemiringan Lereng (%) | Keterangan | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 | Datar | 14.921 |
| 2 | 3-7 | Agak Landai | 15.533 |
| 3 | 8-13 | Landai | 22.025 |
| 4 | 14-20 | Agak Curam | 50.321 |
| 5 | 21-55 | Curam | 11.634 |
| 6 | 56-140 | Sangat Curam | 22.628 |
| 7 | >140 | Terjal | 625 |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa luas kelerengan yang paling besar adalah kelerengan dengan interval 14-20% dengan luas daerah 50.321 Ha dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tanah Datar sedangkan untuk luas kelerengan paling kecil adalah kelerengan dengan interval >140% dengan luas daerah 625 Ha dari total luas keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Dari segi jenis tanah di Kabupaten Tanah Datar, terdapat lima jenis tanah, yaitu Andosol, Gleisol, Kambisol, Mediteran, dan Podsolik. Kelima jenis tanah ini dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah di Kabupaten Tanah Datar



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Keberagaman jenis tanah sebagaimana diuraikan di atas dapat dijelaskan secara rinci berdasarkan luas dan lokasi di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Luas Jenis Tanah di Kabupaten Tanah Datar

| Kecamatan | Klasifikasi Jenis Tanah (ha) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Andosol | Danau | Gleisol | Kambisol | Mediteran | Podsolik | Total |
| X koto | 11.112 | 0 | 0 | 229 | 2.457 | 1.071 | 14.869 |
| Batipuh | 7.750 | 0 | 33 | 401 | 1.163 | 772 | 10.119 |
| Batipuah Selatan | 3.857 | 3.881 | 846 | 2.877 | 2.483 | 2.735 | 16.679 |
| Pariangan | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 5.830 |
| Rambatan | 4.582 | 2.940 | 0 | 1.315 | 0 | 4.102 | 12.939 |
| Lima Kaum | 2.001 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 40 | 3.064 |
| Tanjung Emas | 0 | 0 | 1.282 | 6.470 | 94 | 5.030 | 12.875 |
| Padang Ganting | 0 | 0 | 1.150 | 1.874 | 28 | 3.809 | 6.862 |
| Lintau Buo | 1.448 | 0 | 775 | 750 | 3.342 | 4.750 | 11.065 |
| Lintau Buo Utara | 6.288 | 0 | 0 | 7.779 | 2.750 | 3.112 | 19.929 |
| Sungayang | 1.142 | 0 | 0 | 4.188 | 63 | 1.443 | 6.837 |
| Sungai Tarab | 6.819 | 0 | 0 | 1.568 | - | - | 8.387 |
| Salimpaung | 2.387 | 0 | 0 | 3.202 | 46 | 0 | 5.635 |
| Tanjuang Baru | 665 | 0 | 0 | 1.843 | 123 | 0 | 2.631 |
| Jumlah | 52.614 | 6.820 | 4.086 | 33.518 | 12.548 | 28.132 | 137.719 |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jenis tanah yang paling luas adalah Andosol dengan luas sebesar 52.614 Ha dari luas keseluruhan jenis tanah yang berada di Kabupaten Tanah Datar sedangkan jenis tanah yang memiliki daerah paling kecil adalah gleisol dengan luas daerah sebesar 4.086 Ha.

3. Kondisi Hidrologi

Hidrologi merupakan data yang berkaitan dengan kondisi keairan baik air permukaan maupun air tanah yang ada pada suatu wilayah. Kondisi hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kelerengan dan kondisi tutupan lahan. Kondisi hidrologi yang ada di Kabupaten Tanah Datar cukup baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sumber air baik di Kabupaten Tanah Datar. Pola pengaliran umumnya bersifat dendritik.

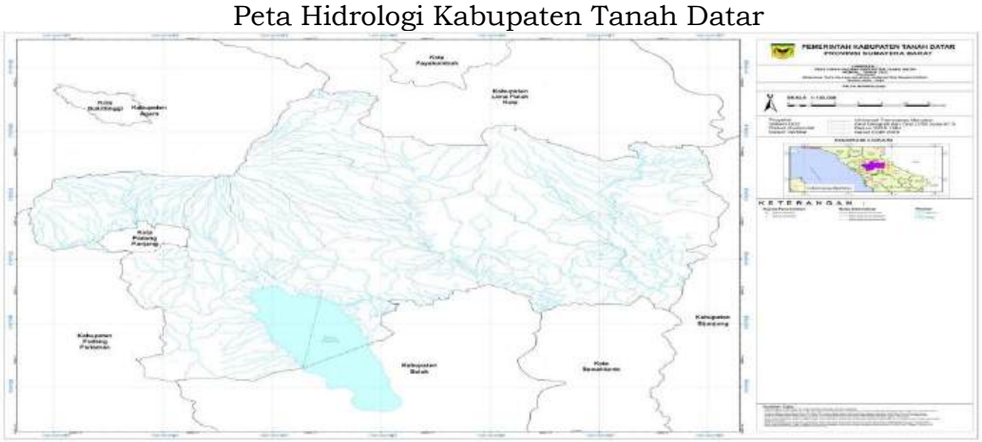
Kondisi hidrologi Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

a. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti mata air, danau, sungai dan rawa. Potensi air permukaan dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan material penyusun tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktivitas manusia. Potensi air permukaan sebagian besar berasal dari berbagai mata air yang banyak terdapat di kawasan ini mengalir melalui sungai-sungai kecil di sekitar perbukitan dengan pola aliran berbentuk radial serta berbentuk dendritik untuk cabang-cabang sungai besar.

Kabupaten Tanah Datar memiliki lima sungai besar dan 208 (dua ratus delapan) sungai kecil yang tersebar di seluruh kecamatan. Sebagian besar dari air sungai tersebut bersumber dari lereng Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago, Gunung Tandikek serta Gugusan Bukit Barisan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke arah timur yaitu DAS Indragiri dengan pola dendritik, namun untuk sungai di sekitar Danau Singkarak pola aliran sungai yang terbentuk adalah pola rectangular dengan sungai utama adalah Batang Ombilin. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kabupaten Tanah Datar



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Tanah Datar dapat diklasifikasikan berdasarkan ukurannya yaitu lebar dan panjang sungai. Tabel berikut memuat nama sungai dengan lebar, panjang sungai dan luas sungai.

Tabel 2.6
Nama Sungai Besar dengan Lebar, Panjang dan Luas Sungai
Di Kabupaten Tanah Datar

| No. | Nama Sungai | Wilayah yang Di Aliri | Lebar Sungai (m) | Panjang Sungai (m) | Luas Sungai ($m^2$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batang Anai | Kecamatan X Koto | 8 | 99 | 792 |
| 2 | Batang Selo | Kecamatan Tanjung Emas | 10 | 59.880 | 598.800 |
| 3 | Batang Sinamar | Kecamatan Lintau Buo | 10 | 160.399 | 1.603.990 |
| 4 | Batang Ombilin | Kecamatan Rambatan | 10 | 25.393 | 253.930 |
| 5 | Batang Sumpur | Kecamatan Batipuah Selatan | 8 | 1.383 | 11.064 |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nama sungai besar dengan lebar, panjang dan luas sungai di Kabupaten Tanah Datar. Sungai yang paling luas adalah Batang Sinamar yang berada di Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara dengan luas 1.603.990 $m^2$. Sedangkan sungai yang paling kecil luasnya adalah Batang Anai yang berada di Kecamatan X Koto dengan luas 792 $m^2$.

b. Air Tanah

Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur gali. Potensi air tanah dapat diketahui dari kedalaman sumur gali

masyarakat dan sifat fisik tanah/batuan dalam kaitannya sebagai lapisan pembawa air.

Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar sebagian kecil masih menggunakan sumur gali sebagai cadangan persediaan air bersih pada saat air PDAM mengalami gangguan. Masyarakat yang menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih tersebar di Kabupaten Tanah Datar khususnya daerah permukiman.

c. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar terbagi menjadi dua yaitu DAS Indragiri dan DAS Anai yang membentang di Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tanah Datar

| No. | DAS | Luas | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| 1 | DAS Indragiri | 122.039 | 89 |
| 2 | DAS Anai | 15.679 | 11 |
| Jumlah | | 137.719 | 100 |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa DAS yang paling luas adalah DAS Indragiri dengan luas kawasan 122.039 Ha atau 89% dari total luas aliran sungai di Kabupaten Tanah Datar (137.719 Ha), sedangkan luas DAS Anai hanya 15.679 Ha atau 11%.

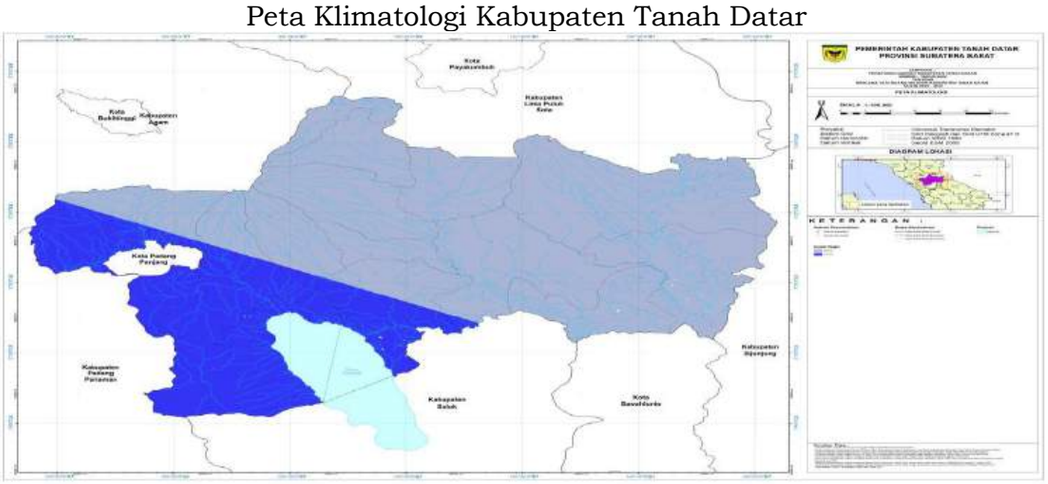
4. Kondisi Klimatologi

Curah hujan di Kabupaten Tanah Datar relatif merata di sepanjang tahun mempunyai sebaran antara 1.750–4.000 mm per tahun dengan sebaran wilayahnya sebagai berikut:

1. Wilayah dengan curah hujan antara 3.000–4.000 mm per tahun tanpa ada bulan kering meliputi wilayah di sekitar pinggang Gunung Marapi yang meliputi wilayah di Kecamatan X Koto dan Pariangan;
2. Wilayah dengan curah hujan antara 2.500–3.000 mm per tahun dengan bulan kering kurang dari 2 bulan meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Lintau Buo, Batipuh dan Batipuah Selatan;
3. Wilayah dengan curah hujan antara 2.000–2.500 mm per tahun dengan bulan kering 4 sampai 6 bulan meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Batipuh, Batipuah Selatan, Salimpaung, Sungai Tarab, Sungayang dan bagian utara kecamatan Tanjung Emas; dan
4. Wilayah dengan curah hujan antara 1.750–2.000 mm per tahun meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Batipuh, X Koto dan Rambatan.

Berdasarkan agroklimat Provinsi Sumatera Barat (zona iklim menurut Odeman), zona agroklimat Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 2.5
Peta Klimatologi Kabupaten Tanah Datar




Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Berdasarkan peta klimatologi Kabupaten Tanah Datar diatas, Kabupaten Tanah Datar mempunyai beberapa zona agroklimat, yaitu:

a. Wilayah bagian barat mempunyai zona iklim A dan B1 dimana zona iklim A mempunyai bulan basah lebih dari 9 bulan/tahun dan bulan kering kurang dari 2 bulan/tahun sedangkan zona iklim B1 mempunyai bulan basah 7-9 bulan/tahun dan bulan kering kecil 2 bulan/tahun (bulan basah: curah hujan besar dari 200 mm/bulan dan bulan kering: curah hujan kecil dari 100 mm/bulan);
b. Wilayah bagian tengah dan utara mempunyai zona iklim C1 dengan bulan basah 5-6 bulan/tahun dan bulan kering kurang dari 2 bulan /tahun, dan zona iklim D1 dengan bulan basah 3-4 bulan/tahun dengan bulan keringnya kurang 2 bulan/tahun; dan
c. Wilayah bagian timur dan selatan mempunyai zona iklim D2 dengan bulan basah 3-4 bulan/tahun dengan bulan kering 2-3 bulan/tahun.

5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan data tahun 2021 terdiri dari Danau/Situ, Empang, Hutan Rimba, Perkebunan/Kebun, Permukiman dan Tempat Kegiatan, Rawa, Sawah, Semak Belukar, Sungai, Tegalan/Ladang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Guna Lahan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

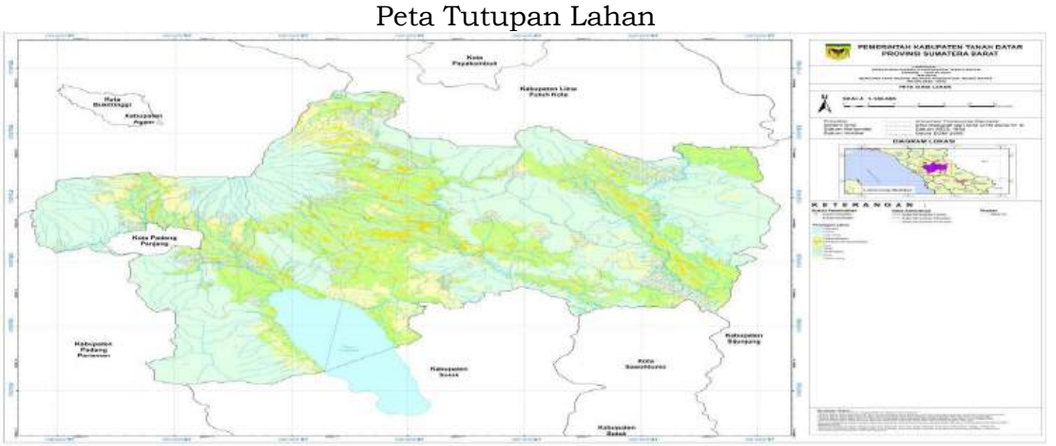
| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Danau/Situ | 6.860 |
| 2 | Empang | 6 |
| 3 | Hutan Rimba | 60.253 |
| 4 | Perkebunan/Kebun | 18.184 |
| 5 | Permukiman dan tempat kegiatan | 3.989 |
| 6 | Rawa | 35 |
| 7 | Sawah | 24.850 |
| 8 | Semak Belukar | 10.828 |
| 9 | Sungai | 365 |
| 10 | Tegalan/Ladang | 12.349 |
| | Total Luas | 137.719 |

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Pada tabel tersebut, dapat dilihat penggunaan lahan di Kabupaten Datar terdiri dari sepuluh jenis tutupan lahan, dengan

luas keseluruhan tutupan adalah 137.719 Ha. Tutupan lahan yang memiliki daerah paling luas adalah Hutan Rimba dengan luas kawasan yaitu 60.253 (43,75 %) Ha, sedangkan tutupan lahan yang memiliki luasan paling sedikit adalah empang dengan luas kawasan 6 Ha (0,004 %). Peta tutupan lahan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.6
Peta Tutupan Lahan



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 – 2042

Tabel 2.9
Luas Guna Lahan di Kabupaten Tanah Datar Per Kecamatan (ha)

| Kecamatan | Klasifikasi Tutupan Lahan | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Danau / Situ | Empang | Hutan Rimba | Perkebunan / Kebun | Permukiman dan Tempat Kegiatan | Rawa | Sawah | Semak Belukar | Sungai | Tegalan / Ladang | Total |
| X Koto | 5 | 0 | 8.731 | 42 | 308 | 0 | 2.131 | 1.671 | 20 | 1.961 | 14.869 |
| Batipuh | 0 | 2 | 4.738 | 1.263 | 269 | 0 | 2.268 | 1.183 | 16 | 379 | 10.118 |
| Batipuah Selatan | 3.881 | 2 | 9.265 | 1.450 | 148 | 0 | 582 | 191 | 10 | 1.149 | 16.679 |
| Pariangan | 0 | 0 | 2.746 | 424 | 197 | 0 | 2.263 | 177 | 0 | 24 | 5.830 |
| Rambatan | 2.954 | 0 | 904 | 3.550 | 361 | 0 | 1.968 | 233 | 22 | 2.946 | 12.939 |
| Lima Kaum | 0 | 0 | 0 | 779 | 463 | 0 | 1.691 | 26 | 0 | 105 | 3.064 |
| Tanjung Emas | 0 | 0 | 6.496 | 1.967 | 330 | 0 | 1.814 | 1.192 | 50 | 1.026 | 12.875 |
| Padang Ganting | 7 | 0 | 2.326 | 1.076 | 97 | 0 | 1.475 | 656 | 55 | 1.169 | 6.861 |
| Lintau Buo | 6 | 0 | 5.227 | 2.122 | 422 | 35 | 1.643 | 1.060 | 112 | 439 | 11.065 |
| Lintau Buo Utara | 0 | 0 | 10.691 | 3.355 | 392 | 0 | 2.694 | 1.874 | 67 | 854 | 19.929 |
| Sungayang | 1 | 0 | 4.267 | 644 | 178 | 0 | 1.418 | 309 | 10 | 12 | 6.837 |
| Sungai Tarab | 0 | 2 | 2.920 | 1.140 | 372 | 0 | 2.713 | 891 | 0 | 349 | 8.387 |
| Salimpaung | 5 | 0 | 1.630 | 129 | 334 | 0 | 1.381 | 983 | 0 | 1.174 | 5.635 |
| Tanjuang Baru | 1 | 0 | 312 | 243 | 120 | 0 | 808 | 382 | 2 | 762 | 2.631 |
| Total | 6.860 | 6 | 60.253 | 18.184 | 3.989 | 35 | 24.850 | 10.828 | 365 | 12.349 | 137.719 |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

Dari tabel diatas dapat dilihat kecamatan dengan total penggunaan lahan tertinggi adalah Kecamatan Lintau Buo Utara seluas 19.929 Ha (14,47%), sedangkan kecamatan dengan total penggunaan lahan terendah adalah Kecamatan Tanjuang Baru seluas 2.631 Ha (1,9 %).

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

1. Kawasan Strategis Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam wilayah yang memiliki beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang diprioritaskan penataan ruangnya karena nilai strategisnya secara nasional. Beberapa kawasan tersebut antara lain Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang yang strategis dari sisi pertahanan dan keamanan, Hutan Lindung Bukit Batabuh serta Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga daya dukung lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, serta kawasan pulau-pulau kecil terluar seperti Pulau Simuk dan Sinyaunyau yang penting untuk menjaga kedaulatan wilayah negara.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 – 2032 ditetapkan tiga kawasan yaitu:

1) Kawasan Poros Barat-Timur yaitu koridor jalan nasional dari Kota Padang sampai batas Provinsi Riau yang berada di Wilayah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan ini masuk pada kategori kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi;
2) Kawasan Strategis Batusangkar dan sekitarnya di Kabupaten Tanah Datar dikembangkan untuk kawasan strategis dari sudut pandang budaya meliputi Batu Batikam, Batu Basurek, Kuburan Panjang, dan Istano Basa Pagaruyung; dan
3) Kawasan strategis Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Kawasan strategis Danau Singkarak sebagai kawasan strategis dari sudut pandang daya dukung lingkungan dan diarahkan untuk kawasan wisata alam.

Kawasan strategis wilayah kabupaten menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

2. Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten berupa aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

1. Potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
3. Potensi ekspor;
4. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
6. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
7. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; dan

8. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi di Kabupaten Tanah Datar adalah Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Koto Baru, Kawasan Tabek Patah, Kawasan Andaleh, dan Kawasan Tigo Jangko.

a) Kawasan Danau Singkarak

Danau Singkarak merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera dengan luas 107,8 km² yang membentang diantara dua Kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok dalam empat Kecamatan dan tiga belas Nagari. Dua Kecamatan di Tanah Datar adalah Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Batipuah Selatan serta enam Nagari yakni Nagari Padang Laweh Malalo, Guguak Malalo, Sumpur, Batu Taba, Simawang dan III Koto.

Potensi Danau Singkarak tidak hanya panorama alam yang indah, tetapi juga memiliki potensi sumber daya air yang dapat dikembangkan menjadi energi listrik maupun sumber air baku untuk pertanian. Air Danau Singkarak bersumber dari Batang Sumani di Kabupaten Solok dan Batang Sumpur di Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar. Debit air yang cukup berlimpah dialirkan dari Danau Singkarak melalui terowongan selanjutnya dimanfaatkan untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak yang berada di dekat Lubuk Alung. Untuk limpasan alamiah, air Danau Singkarak mengalir ke batang Ombilin dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku pertanian dan sumber air bersih terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Batang Ombilin.

Danau yang terletak pada ketinggian 362,5 m dari permukaan laut juga kaya akan perikanan tangkap. Berbagai jenis ikan air tawar hidup di danau ini. Setidaknya saat ini terdapat 19 (sembilan belas) jenis ikan, seperti ikan bilih, asang, piyek, balingka, baung, dan ikan sasau. Ikan bilih (*mystacoleucus padangensis)* merupakan ikan langka yang hanya satu-satunya di dunia. Saat ini ikan bilih telah diolah oleh masyarakat setempat menjadi ikan kering dan telah dipasarkan hingga ke luar Provinsi Sumatera Barat bahkan telah menembus pasar mancanegara yaitu Malaysia dan Singapura.

Potensi ekonomi lainnya yang ada di daratan sekitar Danau Singkarak adalah potensi pariwisata, ekonomi berupa perdagangan, dan *home industry* (ikan bilih basah dan kering, pensi, pangek sasau dan lamang pisang). Potensi yang dimiliki oleh Danau Singkarak merupakan sektor unggulan yang dapat menggerakan roda perekonomian yang ada di Kabupaten Tanah Datar, maka kawasan Danau Singkarak dijadikan sebagai kawasan strategis Kabupaten Tanah Datar.

b) Kawasan Koto Baru

Kawasan Koto Baru dan *hinterland*nya merupakan kawasan sentra produksi sayur-sayuran yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Agribisnis Sayuran Organik (KASO) untuk wilayah Sumatera Barat dan sebagai kawasan agropolitan serta kawasan pusat kerajinan. Kawasan Strategis Agropolitan memiliki nilai strategis untuk dikembangkan sebagai salah satu wilayah percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar, karena didukung aksesibilitas yang baik yaitu berada pada poros Barat-

Timur yang dilewati jalan nasional dari Kota Padang sampai batas Provinsi Riau serta kawasan Koto Baru menghasilkan komoditi potensial yaitu sayuran dataran tinggi. Kawasan ini direncanakan sebagai sentra pengembangan kegiatan pertanian (agro), dan merupakan *outlet* bagi penjualan produk pertanian ke kabupaten sekitarnya ataupun Kabupaten lain di Sumatera Barat.

c) Kawasan Tabek Patah

Kawasan Tabek Patah dan *hinterland*-nya merupakan sentra tanaman tomat dan pisang. Khusus untuk komoditas pisang telah dikembangkan menjadi barang olahan berupa pisang sale dengan sistem *home* industri. Potensi ini akan dijadikan sebagai nilai tambah untuk pengembangan objek wisata panorama Tabek Patah. Di samping itu dalam rangka menggerakan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang ditunjang oleh jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi maka Kawasan Tabek Patah harus dikembangkan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi.

d) Kawasan Andaleh

Kawasan Andaleh dijadikan kawasan strategis dari segi ekonomi karena pada kawasan ini terdapat potensi yang tidak dimiliki oleh kawasan lain, yaitu lokasi sebagai sentra tanaman hias. Kondisi cuaca yang cukup dingin menjadi potensial untuk pengembangan budidaya tanaman bunga. Dari segi pemasaran, bunga-bunga cantik yang tumbuh dan dibiakkan di Andaleh umumnya dipasarkan di Padang Panjang dan di Andaleh sendiri bahkan dengan pengembangan yang lebih terencana akan berpotensi untuk diekspor. Dengan pengelolaan yang baik sektor unggulan ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar khususnya Andaleh.

e) Kawasan Tigo Jangko

Kawasan Tigo Jangko merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan tenun. Salah satu upaya untuk pengembangan sentra industri tenun ini adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan ke masyarakat. Jenis pelatihan yang dilakukan antara lain menjahit, teknik pencelupan, pemintalan benang, menenun, menyulam dan merenda songket.

3. Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan:

a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
d. tempat perlindungan peninggalan budaya;
e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Berdasarkan kriteria dan ketentuan tersebut diatas kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya di Kabupaten Tanah Datar adalah Istano Basa Pagaruyung, Kawasan Nagari Tuo Pariangan dan Kawasan Pendidikan Bukit Gombak.

a. Istano Basa Pagaruyung

Istano Basa Pagaruyung adalah salah satu bangunan situs budaya yang terletak di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas. Istano ini merupakan obyek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat bahkan sampai ke mancanegara. Bangunan Istano Basa didirikan pada tahun 1451 oleh Raja Sutan Rajo Bakilap Alam atau Alif Khalifatullah di atas Bukit Batu Patah. Istano Basa yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika, karena istano basa asli yang terletak di atas Bukit Batu Patah terbakar habis pada sebuah kerusuhan berdarah pada tahun 1804. Istano tersebut kemudian didirikan kembali namun kembali terbakar tahun 1966. Proses pembangunan kembali Istano Basa dilakukan dengan peletakan tonggak tuo (tiang utama) pada tanggal 27 Desember 1976 oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu Bapak Harun Zain. Bangunan baru ini tidak didirikan di tapak istano lama, tetapi di lokasi baru di sebelah selatannya tepatnya masih di lokasi yang ada sekarang.

Pada tanggal 27 Februari 2007, Istano Basa mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar di puncak istano. Akibatnya, bangunan tiga tingkat ini rata dengan tanah. Ikut terbakar juga sebagian dokumen, serta kain-kain hiasan. Diperkirakan hanya sekitar 15 persen barang-barang berharga yang selamat.

Istano Basa Pagaruyung telah dibangun kembali setelah kebakaran dan dilakukan peletakan "*tonggak tuo*" (tiang utama) yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2007, yang menandai dimulainya proses pembangunan kembali istano tersebut. Istano ini akhirnya selesai dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Oktober 2013.

Mengingat kawasan Istano Basa Pagaruyung merupakan titik tolak dalam perkembangan sosial budaya masyarakat Minangkabau oleh karena Istano Basa Pagaruyung merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan agar dapat memberikan perlindungan terhadap peninggalan budaya. Untuk itu kawasan Istano Basa Pagaruyung dijadikan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya.

b. Kawasan Nagari Tuo Pariangan

Nagari Tuo Pariangan memiliki posisi istimewa di Minangkabau sebagai daerah yang merupakan asal usul lahirnya kebudayaan dan adat di Minangkabau. Di Nagari Pariangan terdapat peninggalan sejarah yang masih terlihat dan terjaga saat ini. Peninggalan tersebut terkait dengan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan dan adat Minangkabau seperti tempat sawah pertama di Minangkabau yang dikenal dengan "Sawah Satampang Baniah", Medan Nan Bapaneh yang merupakan susunan batu untuk melakukan sidang, Batu Tungku Tigo Sajarangan, Makam Arsitek Balairung Sari "Tantejo Gurhano" sepanjang ± 25 meter, Prasasti Pariangan yang menandakan bahwa Adityawarman pernah bermukim di nagari ini, dan rumah gadang tuo yang masih banyak terlihat hingga saat ini. Bahkan konon pernah ditemukan tapak candi yang menjadi nama daerah ditempat ini daerah kecil di Pariangan ini dikenal dengan nama "Biaro" atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan "Biara" yang merupakan tempat beribadah agama Budha.

Ada dua hal yang bisa dipelajari dari Nagari Pariangan sebagai kawasan pelestarian cagar budaya yaitu:

1) Nagari Pariangan sebagai sebuah kawasan *landscape* sejarah.

   Terkait dengan sejarah atau cerita asal usul nenek moyang Minangkabau yang turun dari Gunung Marapi dan membangun pemukiman/nagari awal di Pariangan. Hal ini direpresentasikan melalui tinggalan fisik seperti Situs Sandi Laweh, Makam Tantejo Gurhano, Makam-makam Keramat, Balai Katiak, Balai Pasujian, Galundi Nan Baselo, Sawah Satampang Baniah, Batu Lantak Tigo, Prasasti Pariangan dan Lesung Gadang.

2) Nagari Pariangan sebagai sebuah kawasan *landscape* budaya.

   Terkait dengan Nagari Pariangan sebagai representasi sebuah pemukiman tradisional Minangkabau lengkap dengan komponen pembentuk nagari yang masih utuh. *Basasok bajarami* (batas wilayah dengan tanda-tanda tertentu), *bapandam pakuburan* (kuburan), *balabuah batapian* (jalan dan sarana MCK), *barumah batanggo* (rumah tempat tinggal), *bakorong bakampuang* (kelompok pemukiman), *basawah baladang* (kawasan pertanian), *babalai bamusajik* (balai adat dan masjid), *pakan* (pasar) nagari serta *galanggang* (lapangan terbuka).

c. Kawasan Pendidikan Bukit Gombak

Kawasan Bukit Gombak dahulunya merupakan kawasan pendidikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang merupakan cikal bakal IKIP Padang yang sekarang telah berubah menjadi Universitas Negeri Padang (UNP) dengan luas kawasan perencanaan 150 Ha. Kawasan yang terletak di jalan provinsi ruas jalan Batusangkar – Guguak Cino saat ini dimanfaatkan sebagai lokasi SMP Negeri 5 Batusangkar, SMK Negeri 2 Batusangkar, dan SMA Negeri 3 Batusangkar yang berasrama. Pengembangan kawasan Bukit Gombak yang diarahkan sebagai kawasan pendidikan bertaraf nasional dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta dapat menjadi pendorong dalam peningkatan kualitas sosial budaya.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berstandar nasional akan dapat diwujudkan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang handal dan berkualitas serta optimalisasi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu kawasan Bukit Gombak dijadikan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya.

4. Kawasan Strategis Dari Sudut Daya Dukung Lingkungan

Kawasan strategis dilihat dari sudut daya dukung lingkungan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti:

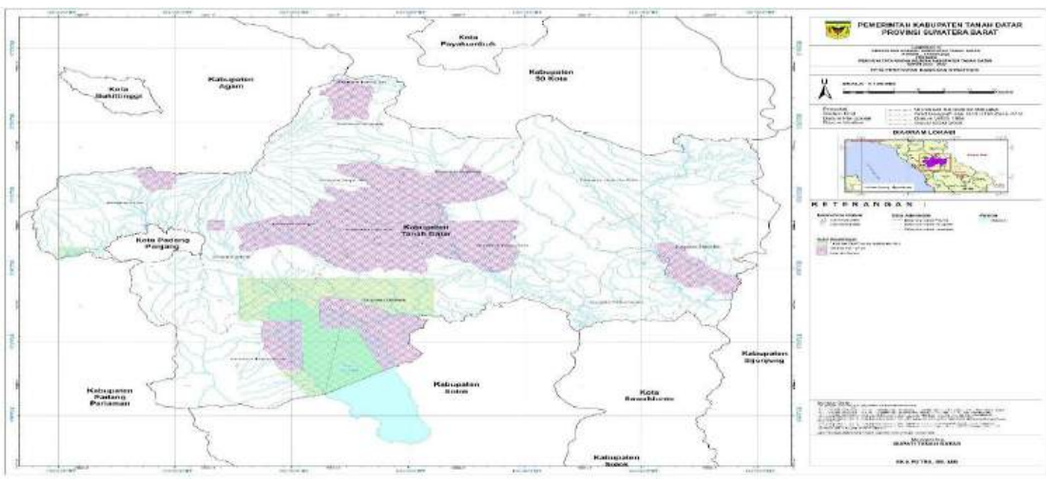
1) Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2) Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

5) Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6) Kawasan rawan bencana alam; dan
7) Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Salah satu ikon pariwisata di Provinsi Sumatera Barat, terletak di pinggir jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi, tepatnya di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 38 km dari arah Batusangkar. Kawasan konservasi cagar alam Lembah Anai yang ditetapkan semenjak kolonial Belanda. Cagar Alam Lembah Anai adalah kawasan hutan lindung yang berada di Sumatera Barat yang memiliki hutan tropis yang lebat dengan beraneka jenis flora dan fauna. Keindahan alam serta flora dan fauna yang langka adalah daya tarik dari Lembah Anai, keindahan alam tersebut di antaranya terdapat air terjun dan satu telaga yang airnya berwarna kebiru-biruan.

Air terjun Lembah Anai terletak di pinggir jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi, dua kota yang menjadi sentra bagi tata pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya yang tepat berada di sisi jalan, membuat air terjun ini mampu menarik perhatian para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air terjun ini termasuk ke dalam kawasan konservasi cagar alam Lembah Anai, dimana Cagar Alam Lembah Anai berfungsi sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati maka kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis di Kabupaten Tanah Datar. Pengelolaan Cagar Alam Lembah Anai dan termasuk kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Mega Mendung pengelolaannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Gambar 2.7
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanah Datar



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2022-2042

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain.

1. Daya dukung lingkungan hidup
   a. Kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya

b. Jumlah maksimum manusia yang dapat didukung oleh bumi dengan sumberdaya alam yang tersedia
c. Jumlah maksimum organisme dalam suatu populasi yang dapat ditopang oleh suatu wilayah
d. Bergantung pada sumber daya yang tersedia

2. Daya tampung lingkungan hidup
a. Kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain
b. Kemampuan optimum lingkungan untuk memberikan kehidupan yang baik dan memenuhi syarat kehidupan terhadap penduduk yang mendiami lingkungan tersebut.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Keduanya menjadi salah satu muatan kajian dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan daya dukung dan daya tampung air karena air merupakan salah satu komponen penting dalam sistem lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup mencakup kemampuan ekosistem secara keseluruhan untuk mendukung kehidupan, di mana ketersediaan air yang cukup dan berkualitas menjadi faktor utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan makhluk hidup. Berikut adalah distribusi daya dukung dan daya tampung air untuk setiap kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.10
Daya Dukung Air

| Kecamatan | Daya Dukung Air | |
|---|---|---|
| | Belum Terlampaui | Terlampaui |
| Batipuah Selatan | 13.37% | 0.68% |
| Batipuh | 6.85% | 11.91% |
| Lima Kaum | 1.39% | 9.83% |
| Lintau Buo | 8.44% | 4.38% |
| Lintau Buo Utara | 13.72% | 21.31% |
| Padang Ganting | 5.00% | 4.81% |
| Pariangan | 3.53% | 10.60% |
| Rambatan | 9.69% | 6.69% |
| Salimpaung | 4.51% | 0.31% |
| Sungai Tarab | 5.86% | 8.18% |
| Sungayang | 5.25% | 2.35% |
| Tanjuang Baru | 1.77% | 3.14% |
| Tanjung Emas | 9.40% | 8.87% |
| X Koto | 11.22% | 6.93% |
| Total Keseluruhan | 100,00% | 100,00% |

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Menurut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, Daya Dukung dan Daya Tampung Air adalah analisis yang membandingkan ketersediaan air dengan kebutuhan air untuk kegiatan di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Sumber ketersediaan air dapat berasal dari air permukaan serta air tanah yang tidak tertekan atau bebas. Penghitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Air dilakukan melalui analisis spasial dengan menggunakan sistem grid yang memperhatikan kebutuhan air. Sistem grid ini mampu merepresentasikan daya dukung dan daya tampung air secara spasial. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air terlampaui menunjukkan kondisi dimana kebutuhan air melebihi ketersediaannya, dan

sebaliknya. Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, dinyatakan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Tanah Datar belum terlampaui.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Konsumsi Listrik Perkapita

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (*kilo Watt hours*) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melihat penggunaan listrik perkapita di Kabupaten Tanah Datar pada periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Konsumsi Listrik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Konsumsi Listrik (KWH) | 120.831.122,00 | 143.038.492,56 | 146.372.210,15 | 151.425.383,15 | 159.884.862,39 |
| Jumlah Penduduk (ribu jiwa) | 371,7 | 373,7 | 376,3 | 383,7 | 388,2 |
| Konsumsi Listrik Perkapita (KWH/kapita) | 325,07 | 382,76 | 388,98 | 394,64 | 411,86 |

Sumber: PLN Cabang Sumatera Barat, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat total konsumsi listrik Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020 sampai tahun 2024 selalu mengalami peningkatan, begitu juga dengan konsumsi Listrik perkapita tahun 2020 sampai tahun 2024 juga mengalami peningkatan.

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

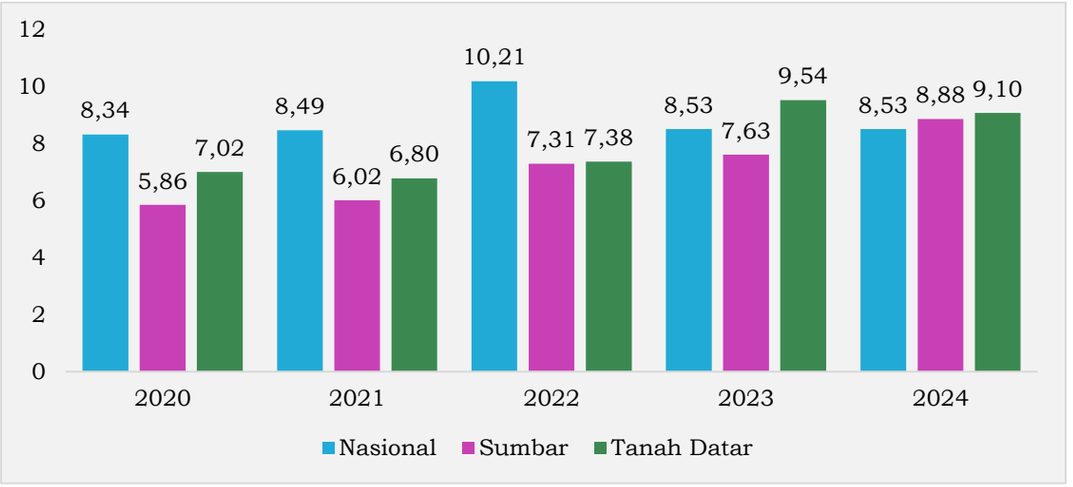
Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidakcukupan konsumsi pangan).

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan,

dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui Situasi Pangan dan Gizi suatu wilayah.

Gambar 2.8
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tanah Datar,
Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024




Sumber: BPS, 2025

Dari grafik diatas secara umum, *Prevalence of Undernourishment* di Kabupaten Tanah Datar periode 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi angka prevalensi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka prevalensi berada di 7,02% dan membaik pada 2021 menjadi 6,80%. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 7,38% dan pada 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 9,54.

Memasuki tahun 2024, angka prevalensi berhasil ditekan menjadi 9,10%, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan periode 2020–2022. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi perbaikan di awal periode, lonjakan pada 2023 menjadi tantangan besar yang memerlukan intervensi berkelanjutan. Upaya peningkatan ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan pemerataan akses makanan bergizi menjadi kunci untuk menurunkan angka prevalensi di masa mendatang.

3. Indeks Ketahanan Pangan

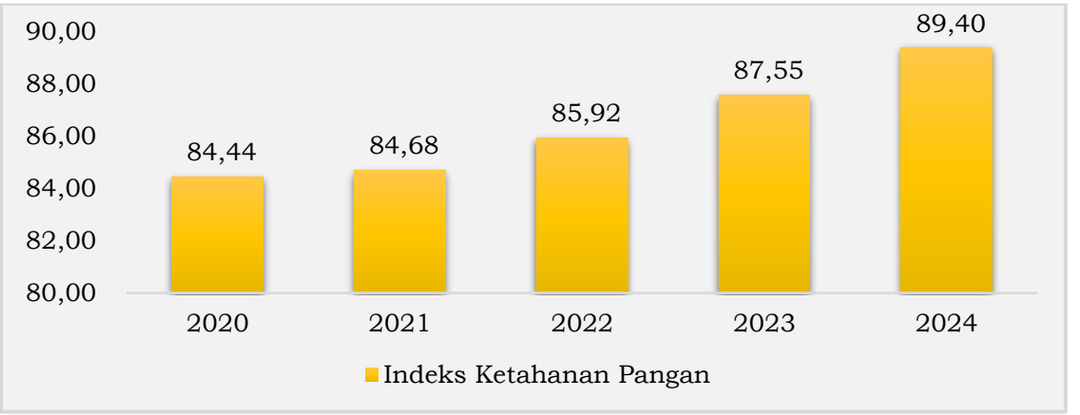
Indeks Ketahanan Pangan adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu negara atau wilayah dalam menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan bagi seluruh penduduknya. Indeks ini mencakup berbagai aspek penting seperti produksi pangan lokal, distribusi pangan, ketersediaan gizi, serta stabilitas pasokan pangan dalam jangka panjang. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa siap suatu negara menghadapi tantangan seperti krisis pangan, bencana alam, perubahan iklim, atau gejolak ekonomi yang bisa mengancam ketahanan pangan.

Komponen utama dalam penyusunan indeks ini biasanya mencakup tiga pilar, yaitu ketersediaan pangan (*availability*), akses pangan (*access*), dan pemanfaatan pangan (*utilization*). Ketersediaan mencakup produksi dan impor pangan, akses mencerminkan

kemampuan masyarakat membeli pangan dengan harga terjangkau, sedangkan pemanfaatan berfokus pada aspek gizi dan kesehatan masyarakat. Beberapa indeks juga menambahkan aspek stabilitas sebagai pilar keempat, yaitu sejauh mana kondisi pangan tetap stabil dari waktu ke waktu.

Dengan menggunakan Indeks Ketahanan Pangan, pemerintah dan lembaga internasional dapat memantau kondisi ketahanan pangan dari waktu ke waktu dan antar wilayah. Indeks ini juga sangat bermanfaat dalam perumusan kebijakan pangan yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Negara dengan indeks ketahanan pangan yang tinggi umumnya memiliki sistem pertanian yang kuat, jaringan distribusi yang efisien, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan pangan masyarakat luas.

Gambar 2.9
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Pada tahun 2020 hingga 2024, nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tidak menunjukkan ketahanan pangan Tanah Datar tetap kuat. Penghargaan TPID Award 2020 dan tingginya produksi padi menjadi sinyal positif yang diikuti dengan pencapaian IKP tahun 2021. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan ketahanan yang tetap terjaga meski produksi menurun akibat banjir bandang (galodo). Tahun 2024, pasca dampak banjir bandang, Kabupaten Tanah Datar masih mampu menjaga surplus pangan yang ditandai dengam nilai IKP yang masih cukup tinggi.

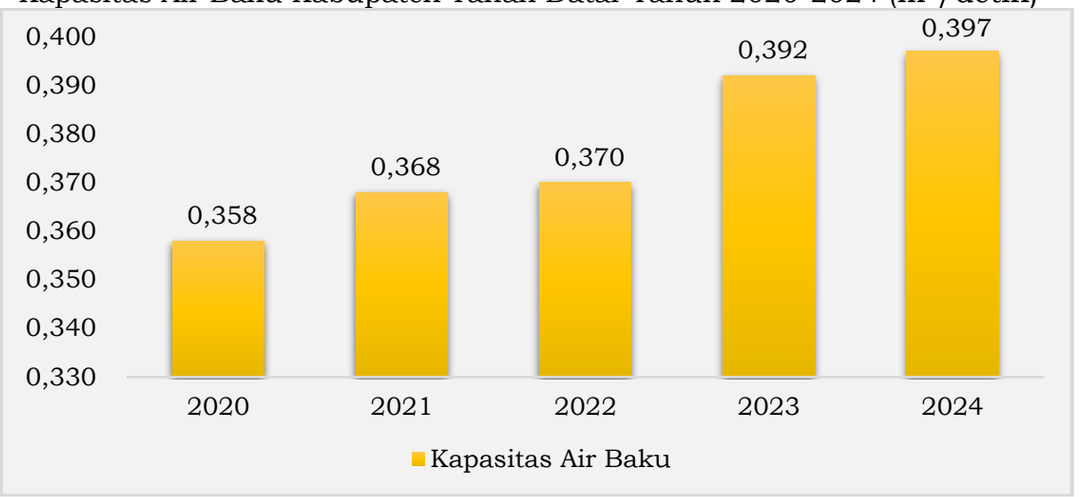
4. Kapasitas Air Baku

Air Baku adalah istilah bagi sumber air yang digunakan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan air minum serta kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga lainnya. Air baku dapat berasal dari berbagai sumber, seperti air permukaan, cekungan air tanah, hingga mata air yang memenuhi mutu tertentu sebagai air baku. Karena sifatnya yang vital, terdapat beberapa standar tertentu yang harus dipenuhi air baku, seperti kejernihan, tingkat keasaman, kandungan bakteri, bau dan warna, dan lain-lain.

Pemilihan sumber yang tepat untuk air harus memperhatikan tiga komponen, yakni kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Prosedur ekstraksi air mempertimbangkan beberapa faktor, yakni kemudahan pengambilan air, jarak transmisi dari sumber ke pelanggan, dan biaya konstruksi sistem. Semakin tingginya kapasitas air baku menunjukkan ketersediaan air untuk pemanfaatan keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain dapat terpenuhi secara maksimal.

Untuk kapasitas air baku di Kabupaten Tanah Datar dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 kapasitas air baku sebesar 0,358 m³/detik menjadi 0,397 m³/detik pada tahun 2024 atau naik sebesar 0,039 m³/detik. Untuk data lebih rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.10
Kapasitas Air Baku Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 (m³/detik)




Sumber: Dinas PUPRP, 2025

5. Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap (%)

Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap merupakan indikator penting yang mengukur proporsi panjang jalan di suatu wilayah yang berada dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat. Tingginya persentase jalan mantap menunjukkan efektivitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan oleh pemerintah, yang berdampak langsung pada kelancaran transportasi, peningkatan konektivitas antar daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya jalan yang berkualitas, distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, risiko kecelakaan dapat diminimalkan, dan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas publik menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, peningkatan persentase jalan dengan kondisi mantap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung kesejahteraan dan produktivitas masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2.12
Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap (%)
Tahun 2020-2024

| No. | Tahun | Panjang Jalan (KM) | Panjang Jalan Kondisi Mantap (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | 1.503,22 | 76,67 |
| 2. | 2021 | 1.503,22 | 77,67 |
| 3. | 2022 | 1.503,22 | 77,54 |
| 4. | 2023 | 1.503,22 | 78,10 |
| 5. | 2024 | 1.138,66 | 69,89 |

Sumber: Dinas PUPRP, 2025

Berdasarkan tabel diatas, sampai tahun 2023 panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 1.503,22 km sesuai Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 620/164/DPU-2016 tanggal 11 April 2016, namun mulai tahun 2024 panjang jalan kewenangan kabupaten menjadi 1.138,66 km, sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.3.3.2/571/PUPRP-2024 tanggal 30 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena sebagian jalan kewenangan kabupaten dikembalikan menjadi jalan kewenangan nagari.

Melihat tabel di atas, persentase panjang jalan dengan kondisi mantap menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu dari 76,67% pada 2020 naik menjadi 78,10% pada 2023, Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang konsisten dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan menjadi 69,89%, yang disebabkan oleh kerusakan akibat bencana alam, sebagian besar jalan yang diserahkan kembali ke nagari adalah jalan dalam kondisi mantap.

6. Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)

Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) merupakan indikator penting yang menunjukkan seberapa besar jaringan irigasi di suatu kabupaten yang terawat dengan baik dan berfungsi optimal untuk mendukung kegiatan pertanian. Tingginya persentase ini mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi oleh pemerintah daerah, yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Kondisi irigasi yang baik memungkinkan distribusi air yang merata dan tepat waktu kepada lahan pertanian, sehingga mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal dan mengurangi risiko gagal panen. Oleh karena itu, peningkatan persentase irigasi dalam kondisi baik menjadi prioritas dalam upaya pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani di kabupaten tersebut.

Tabel 2.13
Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)
Tahun 2020-2024

| No. | Tahun | Capaian (%) |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | 56,06 |
| 2. | 2021 | 59,37 |
| 3. | 2022 | 56,06 |
| 4. | 2023 | 65,98 |
| 5. | 2024 | 58,74 |

Sumber: Dinas PUPRP 2025 (data diolah)

Berdasarkan data tabel diatas, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian persentase berada di angka 56,06%, meningkat menjadi 59,37% pada 2021, namun kemudian kembali turun ke angka awal 56,06% pada 2022. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan hingga mencapai 65,98%, menandakan adanya perbaikan dan pemeliharaan irigasi yang lebih optimal pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2024, persentase kembali menurun menjadi 58,74%. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi masih menghadapi tantangan, seperti kerusakan infrastruktur atau keterbatasan sumber daya.

7. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Daya Air Minum Aman

Sumber air minum aman adalah sumber air yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan). Air minum aman juga bebas dari kontaminasi patogen dan senyawa kimia prioritas. Sumber air minum aman dapat berasal dari air ledeng, sumur bor atau sumur tabung, sumur gali yang dilindungi, mata air yang dilindungi, air hujan, air kemasan atau air yang disalurkan. Selain sumber air, kualitas air juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam air minum aman. Beberapa ciri air minum aman adalah:

1) Bisa langsung dikonsumsi dari keran.

2) Bebas dari kontaminasi patogen dan senyawa kimia prioritas.
3) Memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Tabel 2.14
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024

| No. | Tahun | Capaian (%) |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | - |
| 2. | 2021 | 45,98 |
| 3. | 2022 | 56,96 |
| 4. | 2023 | 49,69 |
| 5. | 2024 | 76,55 |

Sumber: Dinas PUPRP, 2025

Akses rumah tangga terhadap sumber air minum aman di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, capaian akses baru berada di angka 45,98%, kemudian mengalami kenaikan menjadi 56,96% pada tahun 2022, mencerminkan adanya perbaikan dalam infrastruktur dan layanan dasar. Meski sempat menurun pada tahun 2023 menjadi 49,69%, capaian ini melonjak tajam pada tahun 2024 hingga mencapai 76,55%. Kenaikan ini menunjukkan manfaat dari program peningkatan akses air bersih yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) menunjukkan persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memperoleh air minum aman dan layak konsumsi melalui jaringan perpipaan resmi, seperti yang dikelola oleh PDAM atau penyedia layanan air lainnya. Air siap minum di sini memenuhi standar kesehatan sesuai peraturan, sehingga aman diminum tanpa pengolahan tambahan. Indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) belum dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar dan baru melaksanakan perhitungan terhadap indikator Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Daya Air Minum Aman.

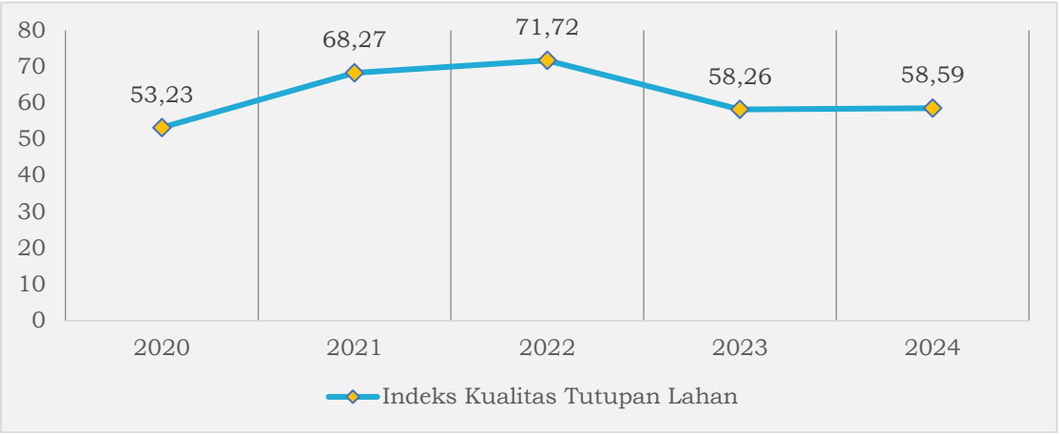
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Tutupan Lahan

Indeks tutupan lahan merupakan keadaan biofisik dari permukaan bumi dan lapisan dibawahnya yang digunakan dalam pemetaan dan pemantauan lahan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis tutupan lahan yang berbeda di suatu wilayah. Ini adalah alat yang penting dalam studi geografi, ekologi, dan manajemen sumber daya alam. Indeks tutupan lahan mencakup berbagai jenis tutupan lahan.

Indeks kualitas tutupan lahan mengalami fluktuasi yang signifikan, dimana indeks ini melonjak menjadi 71,72 pada 2022, sebelum turun kembali ke 58,59 pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan berkurangnya luas atau keberagaman jenis-jenis tutupan lahan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti *deforestasi* (penggundulan hutan), pembangunan infrastruktur, kebakaran hutan, bencana alam, serta aktivitas manusia lainnya yang mempengaruhi lingkungan.

Gambar 2.11
Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas Perkim LH, 2025

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kualitas lingkungan di suatu wilayah. IKLH terdiri dari sub indeks yaitu Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). IKLH Kabupaten Tanah Datar berdasarkan data laporan terakhir mengalami penurunan dari 77,19 pada tahun 2020 menjadi 65,32 pada tahun 2024. Indeks kualitas air menunjukkan penurunan signifikan dari 77,5 pada 2020 menjadi hanya 40,71 pada 2024. Indeks kualitas udara relatif stabil, bahkan sedikit meningkat dari 89,83 pada 2020 menjadi 91,82 pada 2024. Indeks kualitas tutupan lahan mengalami fluktuasi yang signifikan, setelah stagnan di angka 53,23 pada 2020 dan 2021, indeks ini melonjak menjadi 71,72 pada 2022, sebelum turun kembali ke 58,59 pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 77,19 | 71,6 | 74,17 | 71,99 | 65,32 |
| 2. | Hasil pengukuran indeks kualitas air | 77,5 | 52 | 57,39 | 60,87 | 40,71 |
| 3. | Hasil pengukuran indeks kualitas udara | 89,83 | 89,83 | 91,06 | 89,74 | 91,82 |
| 4. | Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan | 53,23 | 53,23 | 71,72 | 58,26 | 58,59 |

Sumber: Dinas Perkim dan LH, 2025

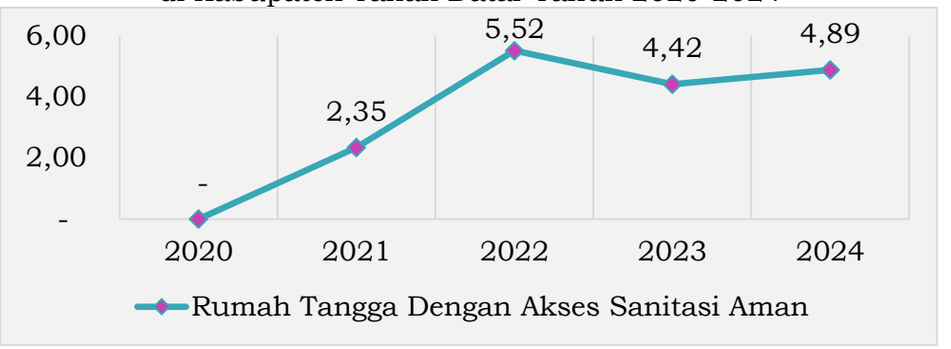
3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam lima tahun terakhir dan diolah dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), atau tersambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman di Kabupaten Tanah Datar selama empat tahun terakhir berfluktuasi. Tahun 2021 sebesar 2,35%, kemudian pada tahun 2022 menjadi 5,52% atau mengalami kenaikan sebesar 3,17% dibandingkan dari tahun 2021, dan pada tahun 2023 sebesar 4,42% atau mengalami penurunan di sebesar 1,1% jika dibandingkan tahun 2022, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 4,89% atau mengalami kenaikan sebesar 0,47% jika dibandingkan dengan tahun 2023, sebagaimana yang tergambar pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.12
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024

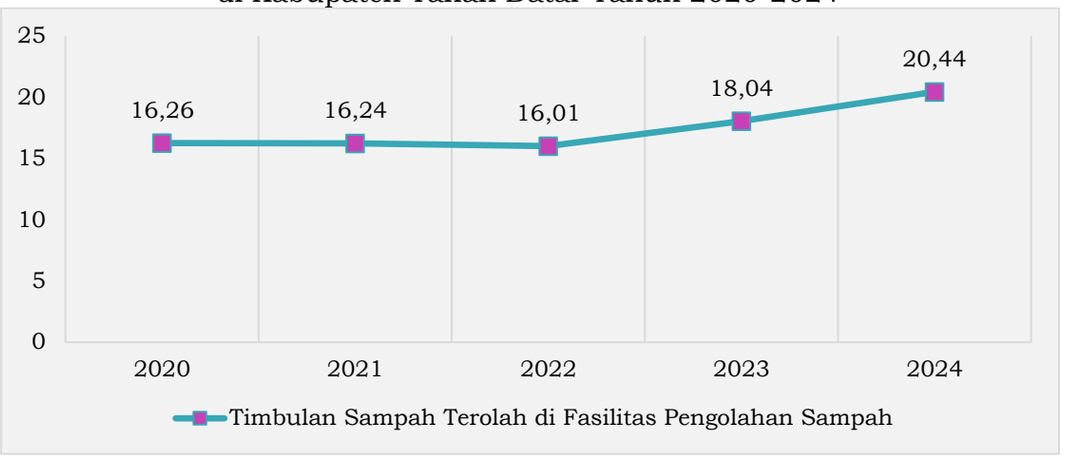



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2025

4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah

Penanganan sampah merupakan proses pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan dan berpotensi merugikan kesehatan manusia. Ini meliputi pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pembuangan akhir limbah secara aman dan bertanggung jawab. Penanganan sampah yang efektif merupakan bagian penting dari upaya perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan sampah yang baik maka dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi kita semua.

Gambar 2.13
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas Perkim dan LH,2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Tanah Datar mengalami tren peningkatan positif dari 16,26% pada 2020 menjadi 20,44% pada 2024. Hal ini menandakan terjadi peningkatan kapasitas pengolahan sampah dan kemungkinan peran serta masyarakat dalam melakukan penanganan sampah.

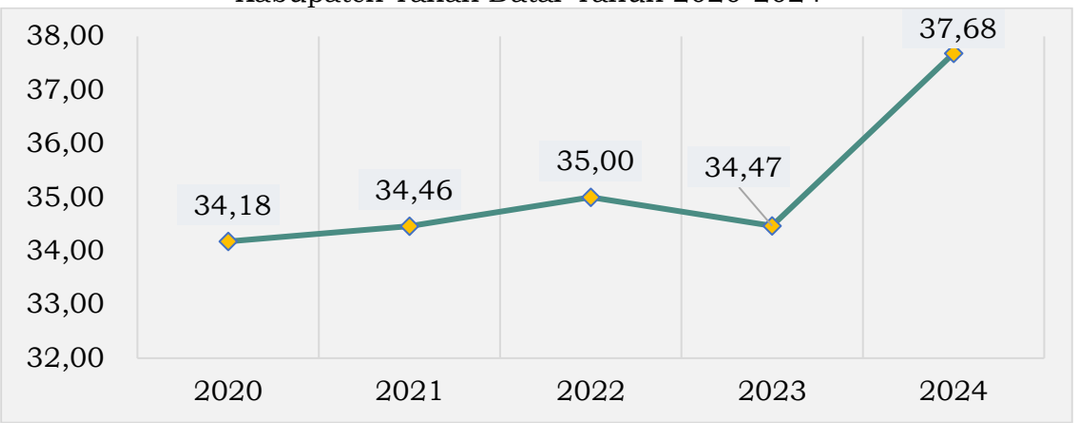
5. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu atau memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Untuk proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Tanah Datar selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 36% dimana ini menunjukkan peningkatan sebesar 2% jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 34% pada tahun 2023. Untuk data lebih rinci dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.14
Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas Perkim dan LH, 2024

2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

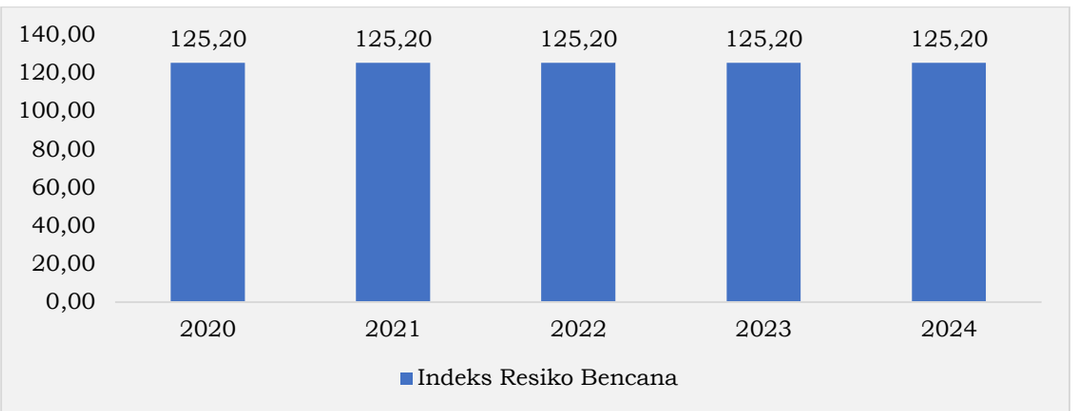
1. Indeks Resiko Bencana

Indeks Resiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat tiga komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: lndeks <13 adalah rendah, lndeks 13-144 adalah sedang dan Indeks >144 adalah Tinggi.

Indeks risiko bencana Kabupaten Tanah Datar periode Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 125,20 yang berarti bahwa indeks resiko bencana Kabupaten Tanah Datar berada pada tingkat sedang.

Gambar 2.15
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: BPBD Sumatera Barat, 2025

2. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya.

IKD Kabupaten Tanah Datar baru dilakukan penghitungan pada tahun 2024. IKD Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 adalah 0,27 yang berarti bahwa Kabupaten Tanah Datar memiliki tingkat ketahanan yang rendah terhadap bencana, untuk itu Kabupaten Tanah Datar perlu meningkatkan kapasitas dalam hal kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul.

2.1.1.7 Demografi

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020 – 2024 (dalam ribu)

| No. | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Penduduk | 371,7 | 373,7 | 376,3 | 383,7 | 388,2 |

Sumber: BPS 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diantara peningkatan tertinggi yakni terjadi dari tahun 2022-2023, yakni sebanyak 7,4 ribu jiwa, sedangkan peningkatan jumlah penduduk terendah terjadi pada tahun 2020-2021 yakni sebanyak 1,9 jiwa.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk pertahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020 – 2024

| No | Kecamatan | Tahun (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | X Koto | 1,20 | 0,53 | 0,68 | 1,20 | 1,19 |
| 2 | Batipuh | 0,92 | 0,25 | 0,40 | 0,92 | 0,91 |
| 3 | Batipuah Selatan | 1,00 | 0,33 | 0,48 | 1,00 | 0,99 |
| 4 | Pariangan | 0,93 | 0,21 | 0,37 | 0,93 | 0,92 |
| 5 | Rambatan | 1,30 | 0,70 | 0,85 | 1,30 | 1,29 |
| 6 | Lima Kaum | 1,05 | 0,22 | 0,38 | 1,05 | 1,04 |
| 7 | Tanjung Emas | 1,70 | 1,02 | 1,18 | 1,70 | 1,69 |
| 8 | Padang Ganting | 1,10 | 0,28 | 0,44 | 1,10 | 1,09 |
| 9 | Lintau Buo | 1,45 | 0,77 | 0,93 | 1,45 | 1,44 |
| 10 | Lintau Buo Utara | 1,06 | 0,39 | 0,54 | 1,06 | 1,05 |
| 11 | Sungayang | 1,26 | 0,59 | 0,75 | 1,26 | 1,26 |
| 12 | Sungai Tarab | 1,37 | 0,69 | 0,85 | 1,37 | 1,36 |
| 13 | Salimpaung | 1,52 | 0,84 | 1,00 | 1,52 | 1,51 |
| 14 | Tanjuang Baru | 1,30 | 0,78 | 0,94 | 1,30 | 1,29 |
| Tanah Datar | | 1,25 | 0,92 | 0,54 | 0,69 | 1,21 |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah tertentu, biasanya dinyatakan dalam jumlah jiwa per kilometer persegi. Tingginya kepadatan penduduk sering kali terjadi di daerah perkotaan atau pusat kegiatan ekonomi karena adanya daya tarik berupa lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini dapat memberikan keuntungan seperti kemudahan akses terhadap layanan publik dan berkembangnya sektor ekonomi lokal, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan seperti kemacetan, polusi, dan keterbatasan ruang hunian.

Di sisi lain, kepadatan penduduk yang terlalu tinggi dapat menekan ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur. Permasalahan seperti sanitasi yang buruk, kualitas udara yang menurun, dan sulitnya mendapatkan air bersih menjadi isu yang sering dihadapi di wilayah padat penduduk. Untuk mengatasi hal ini, perencanaan tata ruang yang baik, pengendalian urbanisasi, dan peningkatan kualitas infrastruktur menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pertumbuhan penduduk tetap sejalan dengan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.18
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2024

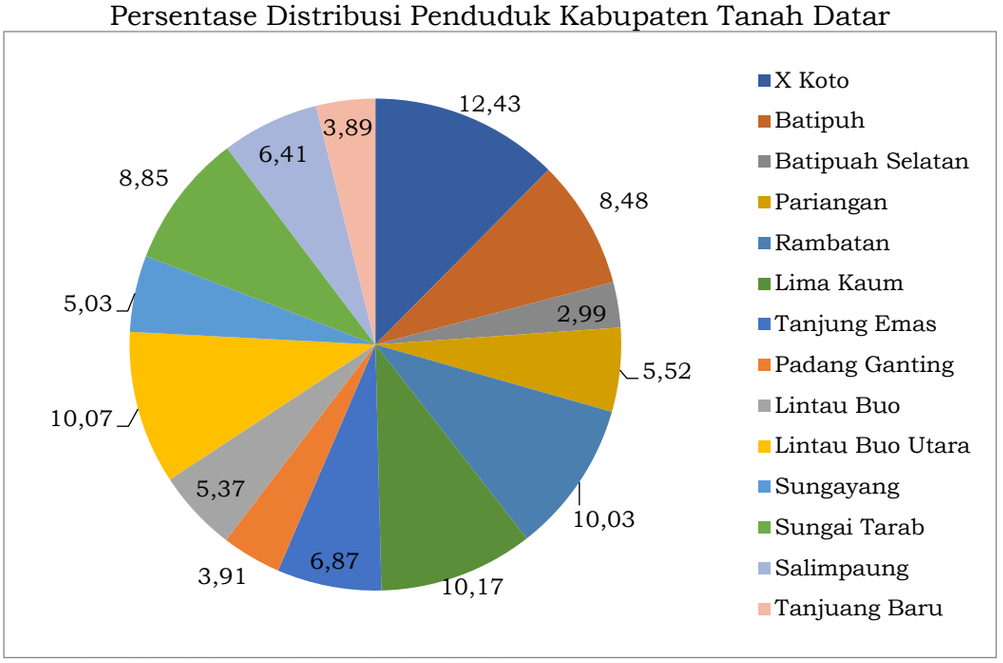
| No. | Kecamatan | Luas ($Km^2$) | Penduduk (ribu jiwa) | Persentase Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk (jiwa/$Km^2$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | X Koto | 148,69 | 48,24 | 12,43% | 324,43 |
| 2. | Batipuh | 101,18 | 32,91 | 8,48% | 325,26 |
| 3. | Batipuah Selatan | 166,79 | 11,62 | 2,99% | 69,67 |
| 4. | Pariangan | 58,3 | 21,42 | 5,52% | 367,41 |
| 5. | Rambatan | 129,39 | 38,95 | 10,03% | 301,03 |
| 6. | Lima Kaum | 30,64 | 39,48 | 10,17% | 1288,51 |
| 7. | Tanjung Emas | 128,75 | 26,66 | 6,87% | 207,07 |
| 8. | Padang Ganting | 68,61 | 15,17 | 3,91% | 221,10 |
| 9. | Lintau Buo | 110,65 | 20,84 | 5,37% | 188,34 |
| 10. | Lintau Buo Utara | 199,29 | 39,08 | 10,07% | 196,10 |
| 11. | Sungayang | 68,37 | 19,54 | 5,03% | 285,80 |

| No. | Kecamatan | Luas (Km²) | Penduduk (ribu jiwa) | Persentase Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Sungai Tarab | 83,87 | 34,35 | 8,85% | 409,56 |
| 13. | Salimpaung | 56,35 | 24,89 | 6,41% | 441,70 |
| 14. | Tanjuang Baru | 26,31 | 15,09 | 3,89% | 573,55 |
| Total | | 1.377,19 | 388,24 | 100% | 5.199,53 |

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Lima Kaum sebesar 1.288,51 jiwa/Km² (10,17%). Sementara kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Batipuah Selatan sebesar 69,67 jiwa/ Km² (2,99%). Angka kepadatan penduduk mengacu pada jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu dibagi dengan luas wilayah tersebut. Ini memberikan indikasi seberapa padat atau rapat populasi suatu daerah. dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.16
Persentase Distribusi Penduduk Kabupaten Tanah Datar




Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa Kecamatan X Koto memiliki jumlah proporsi penduduk paling tinggi di Kabupaten Tanah Datar dengan angka 12,43%. Sementara Kecamatan Batipuah Selatan menjadi Kecamatan yang memiliki jumlah proporsi penduduk paling rendah dengan angka 2,99%. Perbedaan angka yang cukup jauh ini memperlihatkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Tanah Datar belum merata.

3. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama (Said Rusli, 1983 dalam Mantra 1985). Komposisi penduduk yang dapat dibuat yaitu komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur (Ribu Jiwa)
Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024.

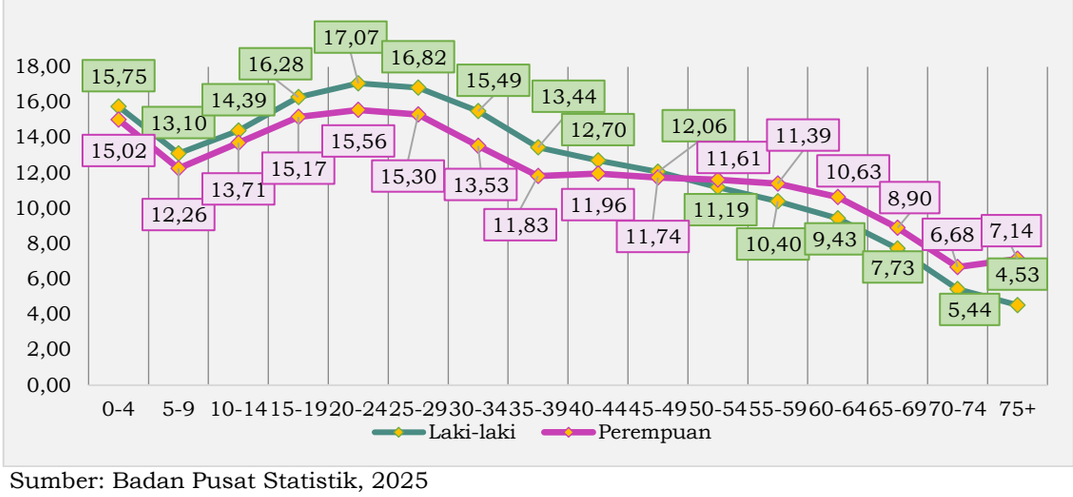
| Kelompok Umur | Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur (Ribu Jiwa) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laki-Laki | | | | | Perempuan | | | | | Jumlah | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0-4 | 12,86 | 12,81 | 12,77 | 14,97 | 15,75 | 12,12 | 12,06 | 12,03 | 14,22 | 15,02 | 24,98 | 24,87 | 24,81 | 29,19 | 30,77 |
| 5-9 | 13,83 | 13,63 | 13,53 | 13,20 | 13,10 | 13,30 | 13,16 | 13,08 | 12,46 | 12,26 | 27,13 | 26,79 | 26,61 | 25,66 | 25,36 |
| 10-14 | 15,80 | 15,51 | 15,18 | 14,74 | 14,39 | 14,89 | 14,67 | 14,45 | 14,02 | 13,71 | 30,69 | 30,19 | 29,63 | 28,76 | 28,10 |
| 15-19 | 16,91 | 16,80 | 16,73 | 16,49 | 16,28 | 15,62 | 15,52 | 15,46 | 15,31 | 15,17 | 32,53 | 32,32 | 32,19 | 31,80 | 31,45 |
| 20-24 | 16,77 | 16,62 | 16,49 | 17,05 | 17,07 | 15,68 | 15,53 | 15,39 | 15,64 | 15,56 | 32,45 | 32,14 | 31,87 | 32,69 | 32,63 |
| 25-29 | 15,52 | 15,58 | 15,61 | 16,57 | 16,82 | 14,01 | 13,95 | 13,90 | 15,06 | 15,30 | 29,54 | 29,53 | 29,51 | 31,63 | 32,12 |
| 30-34 | 13,50 | 13,58 | 13,68 | 14,95 | 15,49 | 11,96 | 12,03 | 12,11 | 13,05 | 13,53 | 25,46 | 25,61 | 25,79 | 28,00 | 29,01 |
| 35-39 | 12,70 | 12,83 | 12,96 | 13,17 | 13,44 | 11,94 | 12,01 | 12,11 | 11,79 | 11,83 | 24,65 | 24,84 | 25,07 | 24,96 | 25,27 |
| 40-44 | 12,21 | 12,31 | 12,43 | 12,57 | 12,70 | 11,83 | 11,91 | 12,00 | 11,93 | 11,96 | 24,05 | 24,23 | 24,43 | 24,50 | 24,65 |
| 45-49 | 11,44 | 11,61 | 11,80 | 11,89 | 12,06 | 11,76 | 11,87 | 12,01 | 11,72 | 11,74 | 23,20 | 23,48 | 23,81 | 23,61 | 23,80 |
| 50-54 | 10,74 | 10,91 | 11,08 | 11,06 | 11,19 | 11,66 | 11,80 | 11,94 | 11,62 | 11,61 | 22,41 | 22,70 | 23,02 | 22,68 | 22,81 |
| 55-59 | 10,20 | 10,44 | 10,68 | 10,35 | 10,40 | 11,27 | 11,44 | 11,64 | 11,38 | 11,39 | 21,48 | 21,88 | 22,32 | 21,73 | 21,79 |
| 60-64 | 8,81 | 9,02 | 9,24 | 9,28 | 9,43 | 9,81 | 10,02 | 10,22 | 10,43 | 10,63 | 18,62 | 19,04 | 19,45 | 19,71 | 20,05 |
| 65-69 | 6,89 | 7,19 | 7,47 | 7,57 | 7,73 | 8,06 | 8,38 | 8,68 | 8,74 | 8,90 | 14,96 | 15,57 | 16,15 | 16,31 | 16,63 |
| 70-74 | 4,01 | 4,30 | 4,61 | 5,09 | 5,44 | 4,98 | 5,27 | 5,61 | 6,23 | 6,68 | 8,98 | 9,57 | 10,22 | 11,32 | 12,12 |
| 75+ | 3,88 | 4,06 | 4,29 | 4,27 | 4,53 | 6,67 | 6,88 | 7,11 | 6,90 | 7,14 | 10,55 | 10,94 | 11,40 | 11,17 | 11,67 |
| Jumlah | 186,13 | 187,20 | 188,55 | 193,22 | 195,79 | 185,57 | 186,50 | 187,73 | 190,50 | 192,44 | 349,38 | 373,69 | 376,28 | 383,72 | 388,23 |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data dari tabel diatas mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Tanah Datar selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya pertumbuhan penduduk yang stabil. Jumlah total penduduk meningkat dari 349,38 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 388,23 ribu jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, meskipun selisihnya tetap relatif seimbang setiap tahunnya. Kelompok umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun merupakan dua kelompok usia dengan jumlah penduduk terbanyak dalam periode ini, menunjukkan struktur penduduk yang masih didominasi oleh usia produktif.

Sementara itu, kelompok umur lansia (65 tahun ke atas) juga mengalami peningkatan setiap tahun, yang mengindikasikan pergeseran demografis menuju penuaan penduduk. Misalnya, kelompok umur 70-74 tahun meningkat dari 9,57 ribu jiwa pada 2021 menjadi 12,12 ribu jiwa pada 2024. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan kebijakan sosial dan layanan kesehatan untuk mengantisipasi kebutuhan populasi lansia yang semakin besar. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk usia 0-4 tahun dari 24,87 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 30,77 ribu jiwa pada tahun 2024 juga menandakan adanya regenerasi yang berkelanjutan.

Gambar 2.17
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur (Ribu Jiwa) di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

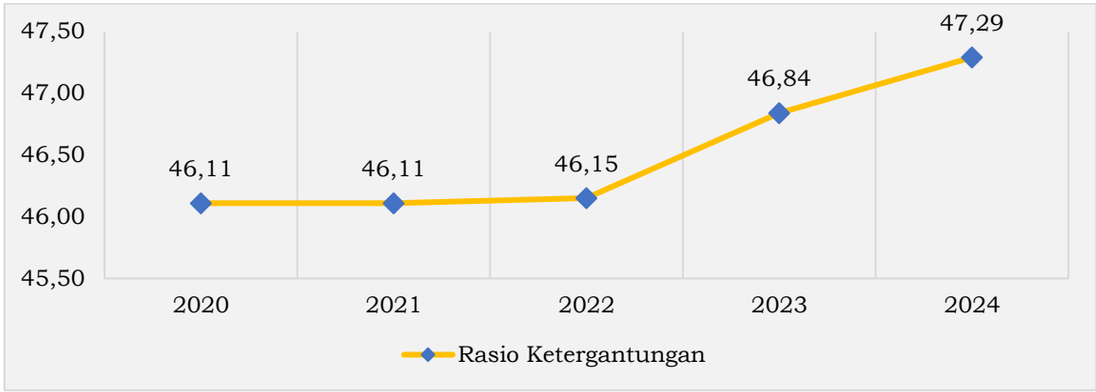



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

4. Rasio Ketergantungan Panduduk

Rasio ketergantungan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (biasanya usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun), yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan beban tanggungan yang harus ditanggung oleh setiap 100 (seratus) orang penduduk usia produktif terhadap penduduk yang secara ekonomi dianggap tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, dan sebaliknya semakin rendah rasio ini menunjukkan beban yang lebih ringan. Rasio ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam perencanaan pembangunan, terutama untuk kebijakan tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan.

Gambar 2.18
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024



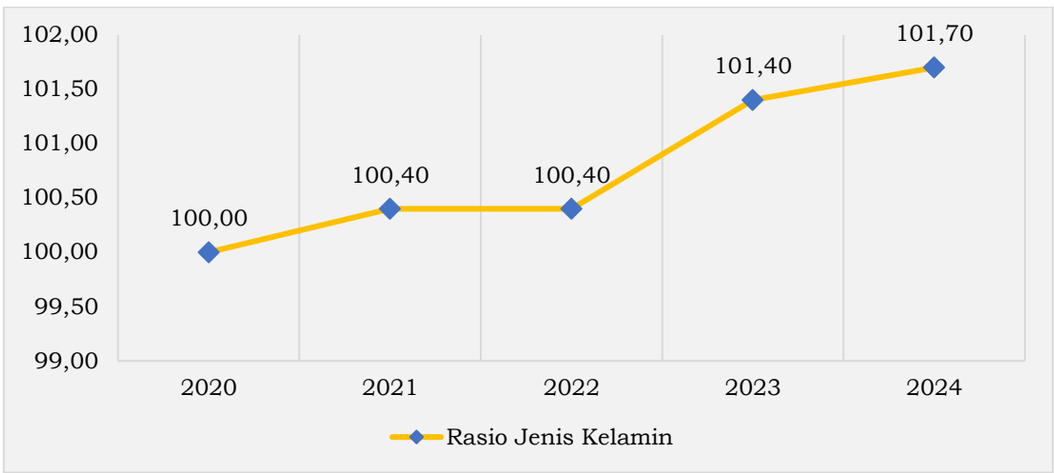

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Tanah Datar periode 2020–2024, terlihat tren yang cenderung meningkat. Pada 2020 dan 2021, rasio berada pada angka yang sama yaitu 46,11%, kemudian naik tipis menjadi 46,15% pada 2022. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada 2023 dengan rasio 46,84% dan terus meningkat hingga mencapai 47,29% pada 2024. Peningkatan rasio ketergantungan ini menunjukkan bahwa beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia nonproduktif semakin besar dari tahun ke tahun, yang dapat disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia anak-anak atau lansia, serta menuntut perhatian dalam perencanaan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan di daerah.

5. Rasio Jenis Kelamin Penduduk

Rasio Jenis Kelamin (RJK) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data dan informasi rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pencapaian pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Gambar 2.19
Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

6. Komponen Utama Pertumbuhan Penduduk

Komponen utama pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar. dapat dilihat dari tingkat kelahiran bayi (fertilitas) dan tingkat kematian bayi (mortalitas). Fertilitas adalah sebagai peristiwa melahirkan anak lahir hidup dari seorang perempuan. Istilah ini sama dengan kelahiran hidup (*live birth*) yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan (BPS, 2023). Sedangkan mortalitas adalah kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (WHO). Angka fertilitas dan mortalitas Kabupaten Tanah Datar per kecamatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Angka Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Tanah Datar
Per Kecamatan pada tahun 2024

| No | Kecamatan | Jumlah Kelahiran Bayi (jiwa) | Jumlah Kematian Bayi (jiwa) | Jumlah Kematian Ibu (jiwa) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X Koto | 510 | 4 | 2 |
| 2 | Batipuh | 285 | 1 | 0 |
| 3 | Batipuah Selatan | 86 | 1 | 0 |
| 4 | Pariangan | 198 | 1 | 0 |
| 5 | Rambatan | 307 | 1 | 1 |
| 6 | Lima Kaum | 299 | 2 | 0 |
| 7 | Tanjung Emas | 261 | 8 | 1 |
| 8 | Padang Ganting | 136 | 2 | 0 |
| 9 | Lintau Buo | 221 | 3 | 0 |
| 10 | Lintau Buo Utara | 342 | 8 | 2 |
| 11 | Sungayang | 168 | 1 | 0 |
| 12 | Sungai Tarab | 299 | 6 | 1 |
| 13 | Salimpaung | 235 | 0 | 0 |
| 14 | Tanjuang Baru | 125 | 1 | 0 |
| | JUMLAH | 3.472 | 39 | 7 |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan dengan tingkat kelahiran bayi tertinggi adalah Kecamatan X Koto sebanyak 510 jiwa (14,69%), sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Batipuah Selatan sebesar 86 jiwa (2,47%).

Angka kematian bayi yang tertinggi adalah Kecamatan Tanjung Emas dan Lintau Buo Utara masing-masing sebanyak 8 jiwa (20,51%). Jumlah kematian ibu melahirkan dengan jumlah 7 jiwa yang tersebar pada lima kecamatan yaitu itu Kecamatan X Koto, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Sungai Tarab.

7. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk dimasa depan yang berdasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Penghitungan proyeksi penduduk menggunakan beberapa asumsi seperti asumsi kelahiran, asumsi kematian dan umur harapan hidup serta migrasi.

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 383.676 jiwa, pertumbuhan penduduk berlangsung sepanjang periode proyeksi. Jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 463.625 jiwa pada tahun 2045, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.21
Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029

| No | Indikator | Baseline 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Pendududuk | | | | | | |
| | Laki-laki (Jiwa) | 195.790,00 | 198.360,00 | 200.836,00 | 203.312,00 | 205.788,00 | 208.264,00 |
| | Perempuan (Jiwa) | 192.440,00 | 194.384,00 | 196.278,60 | 198.173,20 | 200.067,80 | 201.962,40 |
| 2 | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 1,21 | 1,16 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 |

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar, 2025

Nilai proyeksi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar yang menurun secara bertahap dari 1,16% pada tahun 2025 menjadi 1,08% pada tahun 2029 mencerminkan pertumbuhan populasi yang melambat. Dampak dari melambatnya pertumbuhan ini beragam. Di satu sisi, mengurangi tekanan terhadap kebutuhan infrastruktur dasar seperti pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan. Namun di sisi lain, laju pertumbuhan yang terlalu rendah bisa memunculkan tantangan di masa mendatang seperti berkurangnya jumlah penduduk usia produktif, meningkatnya proporsi lansia serta stagnasi konsumsi domestik dan tenaga kerja.

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

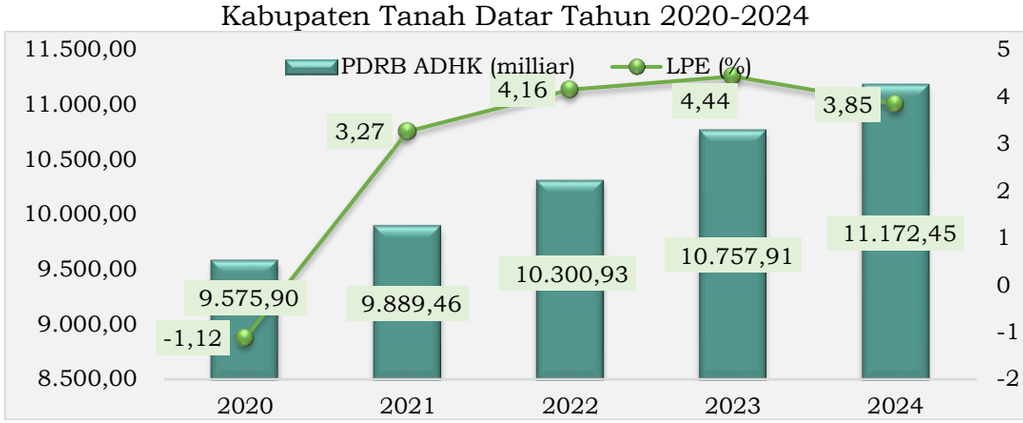
#### 2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara rill disuatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu wilayah yang timbul akibat berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penyusunan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Dalam periode tahun 2020–2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar menunjukkan fluktuasi. Secara umum pada periode tahun 2020–2023 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu dari -1,12% pada tahun 2020 menjadi 4,44% pada tahun 2023. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar yaitu -1,12% yang merupakan dampak dari Pandemi *Covid-19* yang dihadapi secara global namun di tahun 2021 dapat kembali meningkat menjadi 3,27%. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari tahun 2023 sebesar 0,59%. Perlambatan ini terjadi pada komoditi pertanian, kehutanan, perikanan dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini disebabkan karena terjadinya bencana alam banjir bandang/galodo dan erupsi gunung marapi serta rusaknya infrastruktur jalan.

Gambar 2.20
Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024

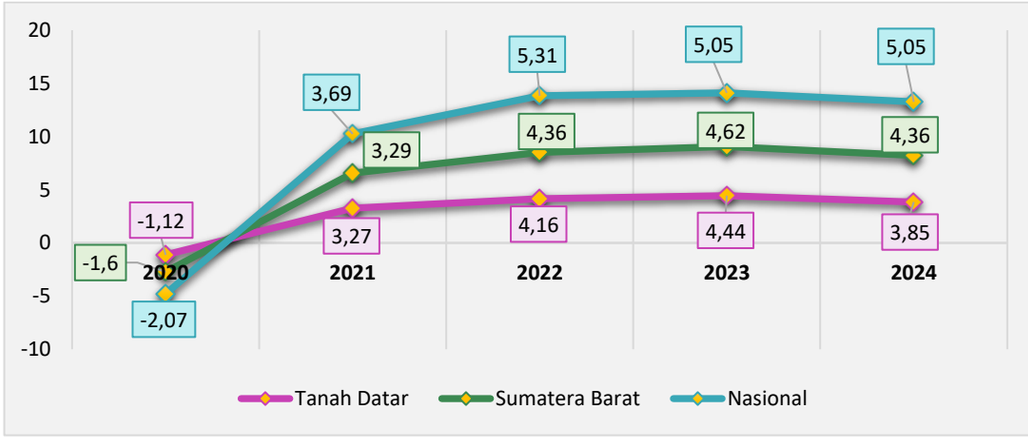



Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir nilai PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar relatif meningkat dari Rp9.575,90 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi Rp11.172,45 miliar rupiah tahun 2024.

Jika dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dengan nasional pada tahun 2024, maka capaian di Kabupaten Tanah Datar sebesar 3,85% berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu 4,36% dan 5,05%.

Gambar 2.21
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (%)




Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

Tabel 2.22
Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2020-2024 (Persen)

| NO. | KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | -1,85 | 2,87 | 4,94 | 4,04 | 3,97 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | -1,11 | 3,35 | 4,01 | 4,19 | 3,84 |
| 3 | Kab. Solok | -1,14 | 3,28 | 4,28 | 4,36 | 3,91 |
| 4 | Kab. Sijunjung | -1,10 | 3,14 | 3,93 | 4,26 | 3,89 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | -1,12 | 3,27 | 4,16 | 4,44 | 3,85 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | -10,46 | 2,15 | 6,83 | 5,46 | 4,57 |
| 7 | Kab. Agam | -1,37 | 3,70 | 4,21 | 4,52 | 4,12 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | -1,16 | 3,33 | 4,02 | 4,55 | 4,03 |
| 9 | Kab. Pasaman | -0,87 | 3,35 | 4,08 | 4,41 | 3,95 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | -1,24 | 3,32 | 4,01 | 4,57 | 4,09 |

| NO. | KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kab. Dharmasraya | -1,39 | 3,40 | 4,27 | 4,35 | 3,86 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | -1,34 | 3,71 | 4,13 | 4,33 | 4,08 |
| 13 | Kota Padang | -1,86 | 3,65 | 4,31 | 4,54 | 4,65 |
| 14 | Kota Solok | -1,42 | 3,55 | 4,60 | 4,81 | 4,55 |
| 15 | Kota Sawahlunto | -1,27 | 2,48 | 3,96 | 4,46 | 4,02 |
| 16 | Kota Padang Panjang | -1,44 | 3,46 | 4,39 | 4,84 | 4,52 |
| 17 | Kota Bukittinggi | -1,74 | 3,61 | 4,67 | 4,79 | 4,52 |
| 18 | Kota Payakumbuh | -1,65 | 3,58 | 4,51 | 4,70 | 4,53 |
| 19 | Kota Pariaman | -1,32 | 3,51 | 4,53 | 4,79 | 4,51 |
| | SUMATERA BARAT | -1,61 | 3,29 | 4,36 | 4,62 | 4,36 |
| | NASIONAL | -2,07 | 3,69 | 5,31 | 5,05 | 5,03 |

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel terlihat bahwa Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2024 yakni sebesar 4,57%. kemudian diikuti oleh Kabupaten Agam sebesar 4,12% diurutan kedua. Untuk perkotaan, Kota Padang memiliki pertumbuhan terbesar pada tahun 2024 yakni sebesar 4,65% dan diikuti oleh Kota Solok sebesar 4,55%. Jika dilihat pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar turun menjadi 3,85% pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,44%.

2. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besarnya ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp17.496,03 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar Rp1,04 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp16.459,56 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini sebagai akibat mulai menggeliatnya kegiatan ekonomi setelah pandemi *Covid-19*.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Tanah Datar didominasi lima lapangan usaha, diantaranya: pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan.

Tabel 2.23
Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 – 2024

| No. | Sektor PDRB | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 3.883,46 | 3.883,20 | 4.187,18 | 4.544,91 | 4.755,59 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 442,20 | 457,20 | 486,62 | 540,23 | 564,64 |
| 3. | Industri Pengolahan | 1.365,42 | 1.457,33 | 1.608,20 | 1.722,25 | 1.816,49 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 3,41 | 3,56 | 3,70 | 3,91 | 4,09 |

| No. | Sektor PDRB | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah | 14,73 | 15,21 | 16,42 | 17,66 | 18,53 |
| 6. | Konstruksi | 1.313,92 | 1.415,67 | 1.570,55 | 1.730,81 | 1.849,79 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.739,34 | 1.792,27 | 2.091,65 | 2.307,59 | 2.485,92 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 1.102,26 | 1.166,69 | 1.321,66 | 1.499,22 | 1.559,68 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 92,22 | 99,47 | 117,43 | 130,36 | 140,23 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 666,21 | 733,64 | 834,45 | 920,91 | 975,47 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 332,83 | 358,17 | 395,87 | 419,24 | 457,85 |
| 12. | Real Estate | 219,50 | 227,63 | 250,68 | 278,90 | 298,70 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 5,14 | 5,16 | 5,67 | 6,41 | 6,71 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 899,75 | 975,27 | 1.036,00 | 1.106,40 | 1.248,73 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 500,33 | 526,99 | 589,57 | 623,17 | 653,48 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 206,74 | 226,03 | 247,61 | 279,15 | 298,43 |
| 17. | Jasa lainnya | 235,66 | 247,45 | 291,96 | 328,44 | 361,71 |
| | PDRB | 13.023,11 | 13.590,94 | 15.055,23 | 16.459,56 | 17.496,03 |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas, angka PDRB Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 sebesar Rp16.459,56 miliar rupiah menjadi Rp17.496,03 miliar rupiah pada tahun 2024. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.

Tabel 2.24
Nilai PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020 – 2024 (Miliar)

| No. | Sektor PDRB | Nilai PDRB (Miliar) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2.858,76 | 2,951.57 | 3,043.87 | 3,140.34 | 3.151,72 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 271,84 | 277.30 | 282.83 | 294.32 | 308,12 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.083,19 | 1,106.80 | 1,142.70 | 1,174.76 | 1.201,10 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 1,94 | 2.01 | 2.07 | 2.14 | 2,24 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah | 11,47 | 11.81 | 12.17 | 12.60 | 12,89 |
| 6 | Konstruksi | 916,58 | 949.90 | 987.02 | 1,045.52 | 1.104,74 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.321,10 | 1,360.40 | 1,444.62 | 1,517.54 | 1.599,46 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 829,32 | 857.93 | 893.83 | 950.07 | 1.005,54 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 58,20 | 61.78 | 70.47 | 76.10 | 80,88 |

| No. | Sektor PDRB | Nilai PDRB (Miliar) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 623,44 | 661.56 | 708.87 | 765.30 | 809,71 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 239,20 | 249.60 | 261.87 | 272.11 | 288,46 |
| 12 | Real Estate | 149,98 | 151.49 | 158.81 | 168.77 | 178,62 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 3,46 | 3.47 | 3.69 | 3.94 | 4,12 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 604,42 | 615.55 | 615.29 | 629.45 | 684,53 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 305,65 | 316.95 | 334.92 | 340.71 | 351,53 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 141,31 | 150.24 | 157.56 | 169.35 | 177,62 |
| 17 | Jasa lainnya | 156,03 | 161.10 | 180.35 | 194.88 | 211,18 |
| | PDRB | 9.575,90 | 9,889.46 | 10,300.93 | 10,757.91 | 11.172,45 |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

Sementara itu pada tabel berikut menjelaskan laju pertumbuhan masing-masing sektor atau lapangan usaha. Jenis lapangan usaha yang memberikan peran besar pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,28%, Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,80%, jasa perusahaan 4,75%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,40 %. Sedangkan lapangan usaha pertanian yang dari sumbangan PDRB perkapita di Kabupaten Tanah Datar yang cukup dominan namun hanya memberikan 0,36% pada pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.25
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 – 2024 (%)

| No. | Sektor PDRB | Laju Pertumbuhan ADHK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1,06 | 3,25 | 3,13 | 3,17 | 0,36 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | -3,78 | 2,01 | 1,99 | 4,06 | 4,69 |
| 3. | Industri Pengolahan | -2,02 | 2,18 | 3,24 | 2,81 | 2,24 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | -6,52 | 3,72 | 2,58 | 3,78 | 4,36 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah. Limbah | 2,99 | 2,96 | 3,04 | 3,51 | 2,30 |
| 6. | Konstruksi | -5,01 | 3,64 | 3,91 | 5,93 | 5,66 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -0,32 | 2,98 | 6,19 | 5,05 | 5,40 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | -9,70 | 3,45 | 4,18 | 6,29 | 5,84 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -11,89 | 6,15 | 14,06 | 7,98 | 6,28 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 8,60 | 6,11 | 7,15 | 7,96 | 5,80 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,56 | 4,35 | 4,92 | 3,91 | 6,01 |
| 12. | Real Estate | 0,02 | 1,01 | 4,83 | 6,27 | 5,83 |
| 13. | Jasa Perusahaan | -4,66 | 0,16 | 6,58 | 6,56 | 4,75 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -0,69 | 1,84 | -0,04 | 2,30 | 8,75 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 4,10 | 3,70 | 5,67 | 1,73 | 3,17 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,18 | 6,32 | 4,87 | 7,49 | 4,88 |
| 17. | Jasa lainnya | -12,78 | 3,25 | 11,95 | 8,05 | 8,37 |
| | PDRB | -1,12 | 3,27 | 4,16 | 4,44 | 3,85 |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

3. PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB pengeluaran merupakan ukuran dasar yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktifitas produksi. PDRB pengeluaran menggambarkan hasil akhir dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah.

Pada tahun 2024 PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku naik mencapai Rp17.496,03 miliar rupiah. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan volume produksi karena berbagai kebijakan dan kondisi yang terjadi selama tahun 2024 akibat dari pemulihan ekonomi Indonesia yang berangsur membaik setelah masa pandemi pada tahun 2020, Kenaikan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Tabel 2.26
PDRB ADHB menurut Pengeluaran) Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020 – 2024 (Miliar Rupiah)

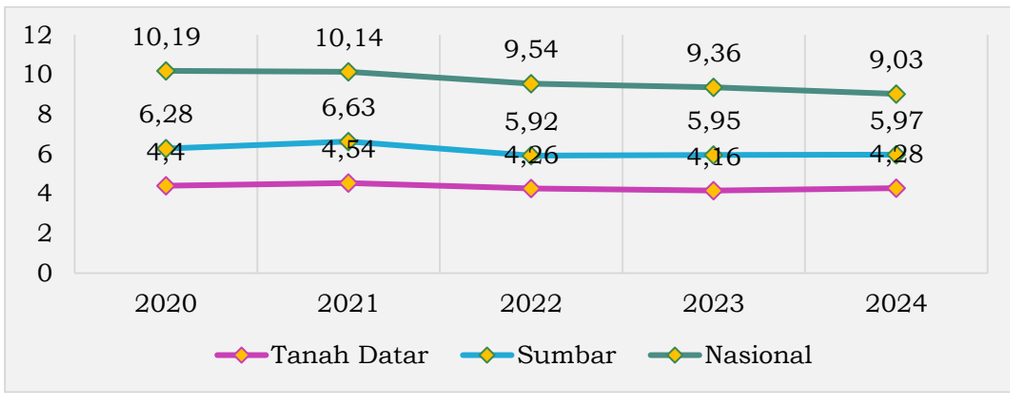
| No. | Jenis Pengeluaran | Nilai PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 7.492,54 | 7.862,38 | 8.757,72 | 9.365,33 | 9.973,14 |
| 2. | Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) | 165.52 | 172,21 | 179,96 | 201,98 | 222,60 |
| 3. | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1.504,78 | 1.556,57 | 1.591,79 | 1.611,91 | 1.696,66 |
| 4. | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 4.127,99 | 4.309,38 | 4.657,32 | 5.202,86 | 5.478,91 |
| 5. | Perubahan Inventory | 3,62 | 16,80 | 40,23 | -25,81 | -24,23 |
| 6. | Net Eksport Barang dan Jasa | -271,34 | -326,41 | -167,76 | 103,30 | 148,95 |
| 7. | PDRB | 13.023,11 | 13.590,94 | 15.059,26 | 16.459,56 | 17.496,03 |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka 2025.

4. Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar dalam beberapa tahun terakhir sudah memberikan hasil yang baik, dimana setiap tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan.

Gambar 2.22
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 2020-2024 (%)




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat kemiskinan Tanah Datar lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar cenderung menurun dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan beberapa program kegiatan yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 sebesar 4,28%, walaupun terjadi sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, namun angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat. Angka ini juga lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat 5,97% dan Nasional 9,03%.

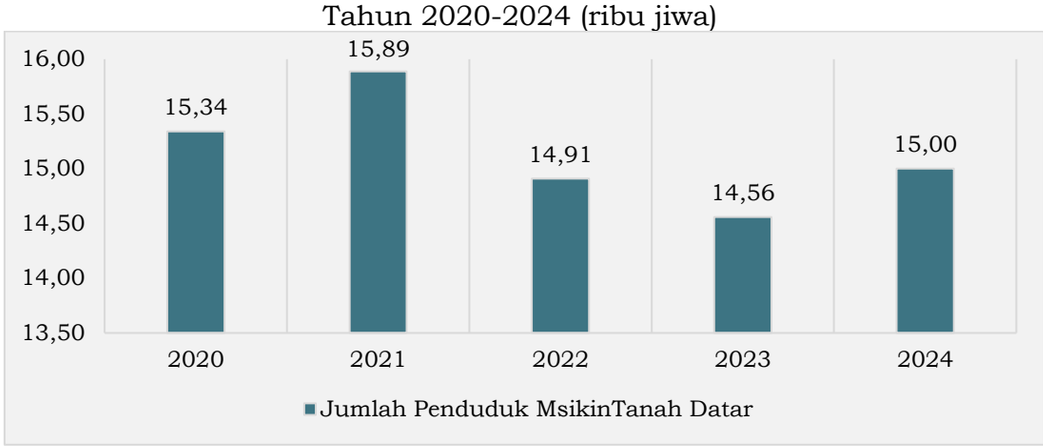
Tabel 2.27
Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

| NO. | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KABUPATEN | | | | | | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 14.35 | 14.84 | 13.97 | 13.72 | 13.89 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 7.61 | 7.92 | 7.11 | 7.34 | 7.49 |
| 3 | Kab. Solok | 7.81 | 8.01 | 7.12 | 7.13 | 7.31 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 6.78 | 6.80 | 6.00 | 5.88 | 5.78 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 4.40 | 4.54 | 4.26 | 4.16 | 4.28 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 6.95 | 7.22 | 6.25 | 6.34 | 6.27 |
| 7 | Kab. Agam | 6.75 | 6.85 | 6.22 | 6.60 | 6.83 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 6.86 | 7.29 | 6.59 | 6.80 | 6.92 |
| 9 | Kab. Pasaman | 7.16 | 7.48 | 6.85 | 6.80 | 6.74 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 7.15 | 7.52 | 6.51 | 6.45 | 6.56 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 6.23 | 6.67 | 5.56 | 5.56 | 5.32 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 7.04 | 7.51 | 6.93 | 6.92 | 7 |
| KOTA | | | | | | |
| 13 | Kota Padang | 4.40 | 4.94 | 4.26 | 4.17 | 4.06 |
| 14 | Kota Solok | 2.77 | 3.12 | 3.02 | 3.05 | 3.07 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 2.16 | 2.38 | 2.28 | 2.27 | 2.33 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 5.24 | 5.92 | 5.14 | 5.24 | 5.31 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 4.54 | 5.14 | 4.46 | 4.11 | 4.08 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 5.65 | 6.16 | 5.66 | 5.44 | 5.19 |
| 19 | Kota Pariaman | 4.10 | 4.38 | 4.13 | 4.20 | 4.26 |
| SUMATERA BARAT | | 6.28 | 6.63 | 5.92 | 5.95 | 5.97 |
| NASIONAL | | 10.19 | 10.14 | 9.57 | 9.36 | 9.03 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Untuk jumlah penduduk miskin selama kurun waktu 2020-2024 berfluktuatif dan cendrung menurun, dimana jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 14,56 ribu jiwa penduduk, sedangkan jumlah penduduk miskin paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 15,89 ribu jiwa penduduk. Sementara untuk tahun 2024 ini jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,44 ribu jiwa jika dibandingkan tahun 2023 seperti gambar dibawah ini:

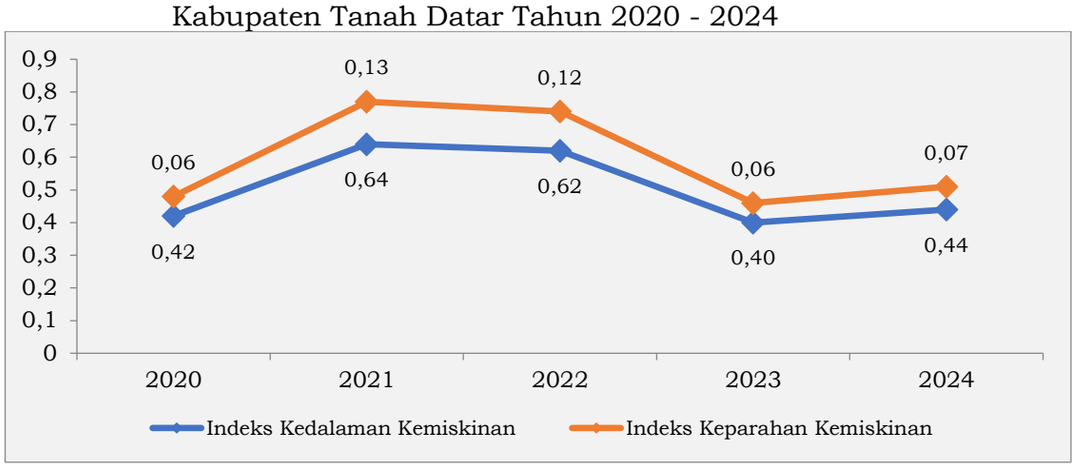
Gambar 2.23
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024 (ribu jiwa)




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari sisi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan selama kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun, tapi pada Tahun 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar sama-sama mengalami kenaikan. Dimana pada Tahun 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar masing-masing sebesar 0,44 dan 0,07, atau naik sebesar masing-masing 0,04 dan 0,01 jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2.24
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 - 2024




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar di atas, seiring meningkatnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar maka diikuti juga dengan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Selain itu kemiskinan ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan ekstrem yaitu setara dengan 1,9 USD PPP (*Purchashing Power Parity*) yang oleh Bank Dunia dengan membandingkan berbagai komoditas antar Negara atau bila dirupiahkan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkapita

perhari dan nilai tersebut setara penghasilan di bawah 80% garis kemiskinan perdesaan di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 2.28
Persentase Tingkat Kemiskinan Ekstrem Menurut Kab/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2021-2024

| No. | Kabupaten/Kota Provinsi/Nasional | Tahun (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 3,97 | 2,14 | 2,12 | 1,44 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 0,37 | 0,46 | 0,17 | 0,61 |
| 3 | Kab. Solok | 0,56 | 0,74 | 0,49 | 0,59 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 0,73 | 2,21 | 1,35 | 0,55 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 0,76 | 0,53 | 0,00 | 0,58 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 0,95 | 0,27 | 0,34 | 0,64 |
| 7 | Kab. Agam | 1,82 | 0,18 | 0,00 | 0,55 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 1,24 | 1,63 | 0,66 | 0,60 |
| 9 | Kab. Pasaman | 0,74 | 0,24 | 0,17 | 0,51 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 1,8 | 1,53 | 1,32 | 0,59 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 0,16 | 1,47 | 0,69 | 0,51 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 1,32 | 0,76 | 0,70 | 0,71 |
| 13 | Kota Padang | 0,45 | 0,64 | 0,15 | 0,40 |
| 14 | Kota Solok | 0,26 | 0,89 | 0,00 | 0,58 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 0,39 | 0,82 | 0,00 | 0,63 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 1,03 | 0 | 1,07 | 0,57 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 1,52 | 1,21 | 0,54 | 0,40 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 0,77 | 0,10 | 0,00 | 0,55 |
| 19 | Kota Pariaman | 0,34 | 0,31 | 0,00 | 0,51 |
| | Sumatera Barat | 0,91 | 0,77 | 0,41 | 0,57 |
| | Nasional | 2,14 | 2,04 | 1,12 | 0,83 |

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan tabel di atas, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 sebesar 0,58%. Angka menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tanah Datar kembali meningkat dari tahun sebelumnya sebelumnya sebesar 0,58%, dimana pada tahun 2023 angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Tanah Datar sudah nol atau tidak ada. Dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus melakukan upaya yang lebih tepat sasaran dan menyasar ke akar masalah kemiskinan ekstrem, bukan hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi rata-rata.

5. PDRB Perkapita

Pengukuran kinerja ekonomi daerah dapat diukur juga dengan menggunakan nilai PDRB Perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada akitifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

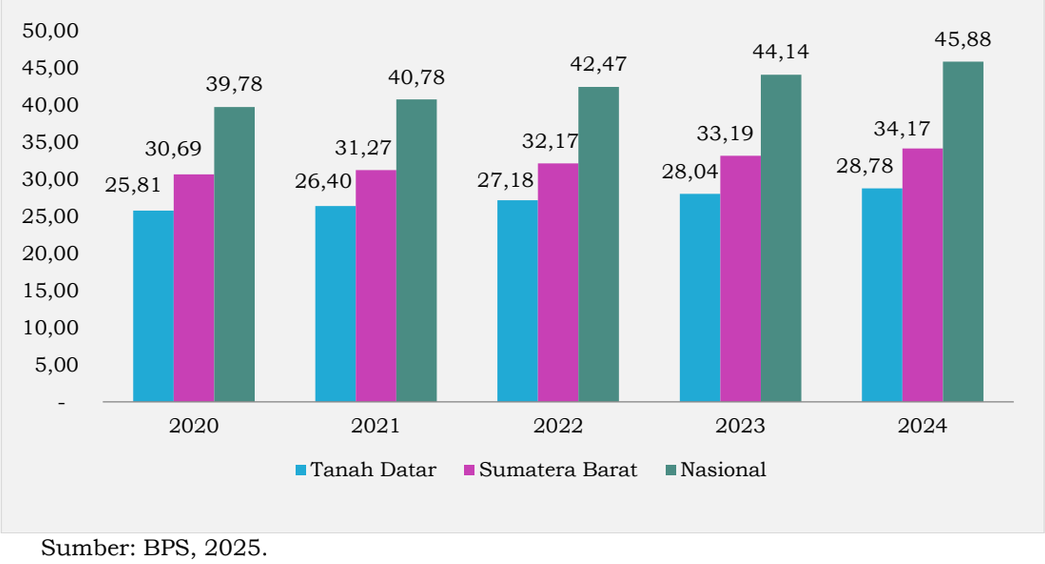
Tabel 2.29
PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | PDRB Perkapita ADHB (ribu rupiah) | 35.096,76 | 36.286,14 | 39.722,35 | 42.899,63 | 45.066,39 |
| 2. | PDRB Perkapita ADHK (ribu rupiah) | 25.806,67 | 26.403,64 | 27.171,12 | 28.039,06 | 28.778,07 |
| 3. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | -1,12 | 3,27 | 4,16 | 4,44 | 3,85 |

Sumber: BPS, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir nilai PDRB ADHK per kapita Kabupaten Tanah Datar meningkat dari Rp25.806,67 (ribu rupiah) pada tahun 2020 menjadi Rp28.778,07 (ribu rupiah) pada tahun 2024. Kondisi pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan PDRB ADHK per kapita terkontraksi ke angka Rp25.806,67 (ribu rupiah) pada tahun 2020 dan di tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi Rp26.403,64 (ribu rupiah). Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan tiap penduduk Tanah Datar secara rata-rata pada tahun 2023 sudah mencapai angka Rp28.039,06 rupiah. Namun angka ini masih dibawah PDRB ADHK per kapita di Sumatera Barat maupun Nasional.

Gambar 2.25
Perkembangan PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024 (dalam juta Rupiah)




Sumber: BPS, 2025.

Setiap sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis PDRB dengan melihat harga berlaku selama lima tahun kebelakang akan memperlihatkan seberapa besar kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar.

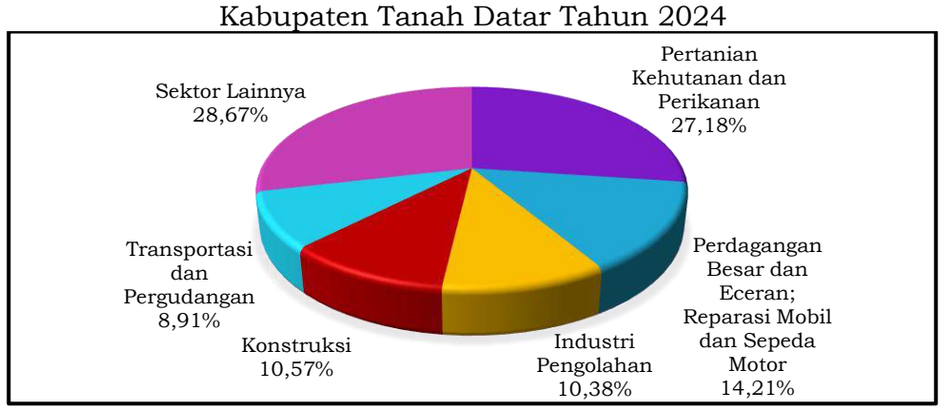
Tabel 2.30
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Datar 2020–2024

| No. | Lapangan Usaha | Tahun (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 29,82 | 28,57 | 27,80 | 27,61 | 27,18 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 3,40 | 3,36 | 3,23 | 3,28 | 3,23 |
| 3 | Industri Pengolahan | 10,48 | 10,72 | 10,68 | 10,46 | 10,38 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 6 | Konstruksi | 10,09 | 10,42 | 10,46 | 10,52 | 10.57 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 13,36 | 13,19 | 13,89 | 14,02 | 14.21 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 8,46 | 8,58 | 8,78 | 9,11 | 8.91 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,71 | 0,73 | 0,78 | 0,79 | 0.80 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 5,12 | 5,4 | 5,54 | 5,59 | 5.58 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,55 | 2,64 | 2,63 | 2,55 | 2.62 |
| 12 | Real Estate | 1,69 | 1,67 | 1,66 | 1,69 | 1.71 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0.04 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,91 | 7,18 | 6,88 | 6,72 | 7.14 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 3,84 | 3,88 | 3,91 | 3,79 | 3.74 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,59 | 1,66 | 1,64 | 1,70 | 1.71 |
| 17 | Jasa Lainnya | 1,81 | 1,82 | 1,94 | 2,00 | 2.07 |
| Produk Domestik Nasional Bruto | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

Dari tabel diatas, diketahui bahwa terdapat sektor yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 yaitu; pertanian kehutanan dan perikanan mencapai 27,18% selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,21% (naik dari 14,02% tahun 2023), selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 10,57% (naik dari 10,52% di tahun 2023) disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 10,38% (turun dari 10,46% di tahun 2023) serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 8,91%. Enam) sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.26
6 Sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024




Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2025

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu:

1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan,

2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru,
3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta
4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Datar nilainya berfluktuatif dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Tanah Datar sebesar 4,79%, turun menjadi 4,63% pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan tahun 2022 menjadi 5,91%, akan tetapi pada tahun 2023 ini mengalami penurunan menjadi 5,35% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 5,30%, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

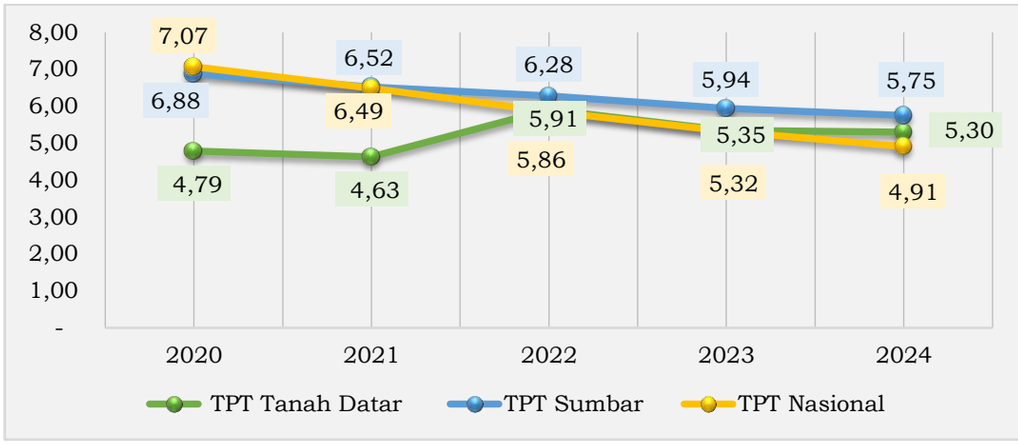
| No. | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angkatan Kerja (orang) | 179.341 | 173.734 | 185.104 | 208.879 | 217.070 |
| | - Bekerja (orang) | 170.744 | 165.683 | 174.164 | 197.708 | 205.564 |
| | - Pengangguran (orang) | 8.597 | 8.051 | 10.940 | 11.171 | 11.506 |
| 2 | TPT (%) | 4.79 | 4.63 | 5.91 | 5.35 | 5.30 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan angka pengangguran tersebut terjadi karena ada beberapa penyebab diantaranya;

1) terjadinya musim kemarau pada saat pencacahan yakni di bulan Agustus setiap tahunnya. Musim kemarau menyebabkan banyak petani yang tidak bekerja, sementara BPS menetapkan definisi bekerja adalah orang yang bekerja minimal 3 (tiga) jam dalam sehari dalam waktu seminggu, sehingga cukup banyak petani yang dihitung sebagai orang yang menganggur atau tidak bekerja,
2) Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya terlepas dari kondisi ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi *Covid-19*, oleh karena itu masih banyak masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

Gambar 2.27
Perbandingan Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar diatas TPT Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,30% pada tahun 2024, lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat dengan angka 5,75%, namun lebih tinggi dari angka nasional sebesar 4,91%. Dibandingkan dengan nilai TPT tahun 2022 Provinsi sebesar 6,28% nilai TPT Kabupaten Tanah Datar lebih rendah, tetapi jika

dibandingkan dengan nilai TPT Nasional nilainya lebih tinggi, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota
Se-Sumatera Barat Tahun 2020-2024

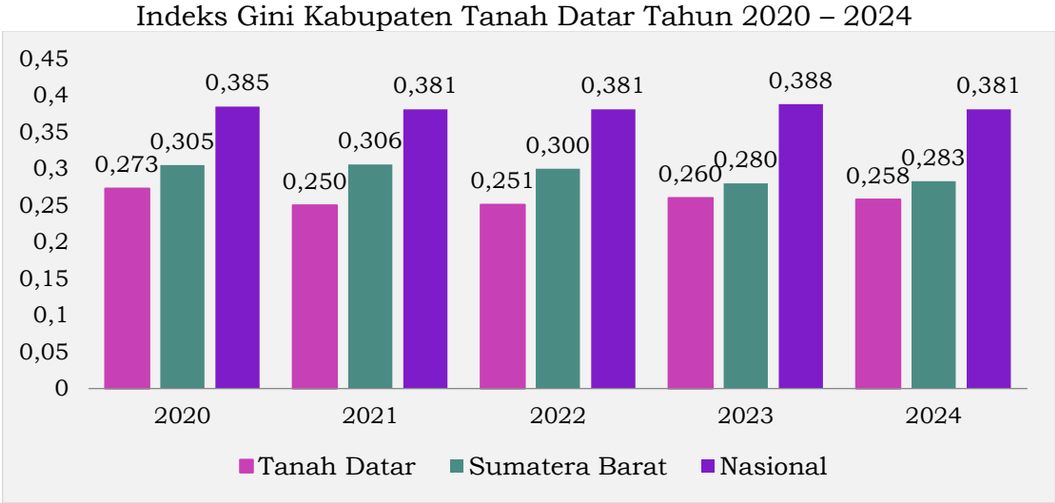
| No | Wilayah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Mentawai | 3.98 | 2.79 | 1.39 | 1.33 | 1.44 |
| 2 | Pesisir Selatan | 7.00 | 5.97 | 4.61 | 4.75 | 5.06 |
| 3 | Kab.Solok | 4.65 | 4.67 | 5.89 | 4.99 | 4.91 |
| 4 | Sijunjung | 5.30 | 3.57 | 4.87 | 4.71 | 4.73 |
| 5 | Tanah Datar | 4.79 | 4.63 | 5.91 | 5.35 | 5.3 |
| 6 | Padang Pariaman | 8.13 | 8.41 | 6.60 | 6.69 | 6.59 |
| 7 | Agam | 4.61 | 5.06 | 4.93 | 4.96 | 4.73 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 3.03 | 2.25 | 3.72 | 3.95 | 3.68 |
| 9 | Pasaman | 5.04 | 4.92 | 5.38 | 5.09 | 5.25 |
| 10 | Solok Selatan | 5.62 | 4.84 | 3.71 | 2.57 | 2.3 |
| 11 | Dharmasraya | 5.31 | 5.00 | 6.23 | 6.22 | 6.02 |
| 12 | Pasaman Barat | 4.69 | 5.02 | 6.33 | 6.01 | 6.34 |
| 13 | Padang | 13.64 | 13.37 | 11.69 | 10.86 | 9.88 |
| 14 | Kota Solok | 8.35 | 5.15 | 3.90 | 3.72 | 3.62 |
| 15 | Sawahlunto | 8.20 | 6.38 | 5.00 | 4.98 | 5.55 |
| 16 | Padang Panjang | 7.22 | 4.90 | 4.84 | 5.49 | 4.94 |
| 17 | Bukittinggi | 7.51 | 6.09 | 4.90 | 4.99 | 4.72 |
| 18 | Payakumbuh | 6.68 | 6.47 | 5.16 | 4.84 | 4.87 |
| 19 | Pariaman | 5.73 | 6.09 | 5.19 | 5.68 | 5.32 |
| | SUMATERA BARAT | 6.88 | 6.52 | 6.28 | 5.94 | 5.75 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

7. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan masyarakat adalah koefisien gini atau gini rasio. Rasio ini merupakan salah satu ukuran untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi pada suatu wilayah. Indeks gini ini memiliki kisaran angka dari 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yang berarti setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama. Angka 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yang berarti seseorang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah"; angka antara 0,3-0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 -1 berada dalam kategori ketimpangan tinggi.

Gambar 2.28
Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 – 2024




Sumber: BPS, 2025

Selama tahun 2020 – 2024 Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar berfluktuatif, dimana pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari 0,273 pada Tahun 2020 menjadi 0,250 pada Tahun 2021. Namun pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 kembali naik menjadi masing-masing pada angka 0,251 dan 0,260, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 pada angka 0,258. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar masuk dalam kategori rendah dan membaik dari tahun sebelumnya, lebih baik dari provinsi dan nasional.

Tabel 2.33
Kondisi Indeks Gini Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2022 - 2024

| NO. | Kabupaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 0,273 | 0,321 | 0,233 | 0,259 | 0,267 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 0,264 | 0,253 | 0,246 | 0,259 | 0,224 |
| 3 | Kab. Solok | 0,277 | 0,246 | 0,243 | 0,235 | 0,241 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 0,269 | 0,270 | 0,243 | 0,263 | 0,239 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 0,273 | 0,250 | 0,251 | 0,260 | 0,258 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 0,257 | 0,269 | 0,245 | 0,257 | 0,253 |
| 7 | Kab. Agam | 0,278 | 0,272 | 0,298 | 0,255 | 0,249 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 0,222 | 0,244 | 0,208 | 0,194 | 0,220 |
| 9 | Kab. Pasaman | 0,310 | 0,248 | 0,230 | 0,243 | 0,217 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 0,307 | 0,277 | 0,253 | 0,271 | 0,313 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 0,280 | 0,268 | 0,287 | 0,291 | 0,233 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 0,258 | 0,261 | 0,277 | 0,238 | 0,240 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

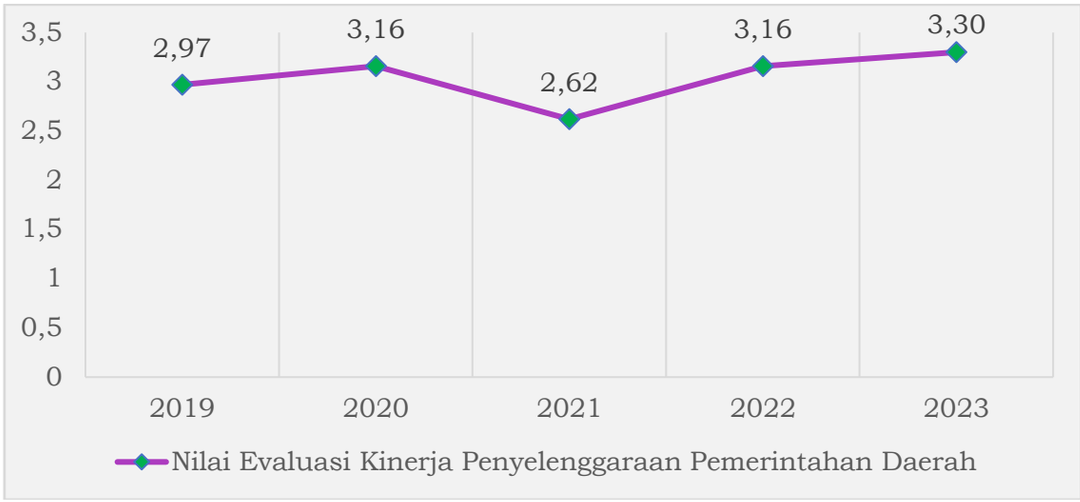
8. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.

Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk melihat keberhasilan dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengetahui pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambil dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas Pemerintahan Daerah.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Tanah Datar periode 2019–2023 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Dimulai dari 2,97 pada 2019, kinerja daerah meningkat ke 3,16 di tahun 2020, menandakan peningkatan performa. Namun, tahun 2021 mengalami penurunan signifikan menjadi 2,62, kemungkinan karena adaptasi kebijakan baru atau tantangan pelaporan selama pandemi. Kinerja kembali pulih di tahun 2022 dengan nilai 3,16, dan terus meningkat mencapai puncaknya di 3,30 pada 2023, nilai positif yang memperlihatkan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara adaptif terhadap tantangan. Nilai EPPD Kabupaten Tanah Datar periode 2019–2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.29
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 – 2023




Sumber: Sekretariat Daerah 2025

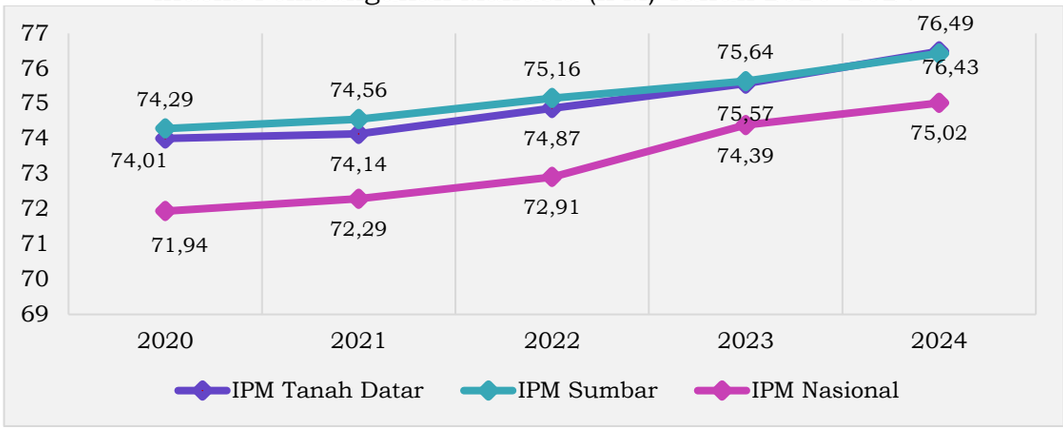
Di skala nasional, menurut data Kementerian Dalam Negeri, skor di atas 3,5 masuk kategori tinggi, sementara kisaran 3,0–3,5 tergolong sedang. Dengan nilai 3,30 pada 2023, Kabupaten Tanah Datar berhasil mempertahankan status "sedang" namun mendekati ambang tinggi, hal ini menunjukkan perbaikan pemerintahan yang mencerminkan implementasi perbaikan perencanaan, pelaporan, dan akuntabilitas serta sejalan dengan upaya penguatan SAKIP dan pengakuan publik akan layanan pemerintah daerah.

9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2020.

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan khususnya dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak.

Gambar 2.30
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020–2024




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari gambar di atas, secara umum capaian IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020–2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 nilai IPM Kabupaten Tanah Datar sebesar 76,49 berada diatas nilai Provinsi Sumatera Barat sebesar 76,43 dan berada diatas nasional dengan nilai IPM 75,02. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat, IPM Kabupaten Tanah Datar merupakan nilai IPM paling tinggi dibanding dengan kabupaten lain.

Tabel 2.34
IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024

| NO. | Kabupaten/Kota | IPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| KABUPATEN | | | | | | |
| 1 | Kep. Mentawai | 63.71 | 63.98 | 64.83 | 65.79 | 66.67 |
| 2 | Pesisir Selatan | 70.87 | 71.01 | 71.72 | 72.24 | 72.87 |
| 3 | Solok | 70.44 | 70.60 | 71.39 | 71.92 | 72.29 |
| 4 | Sijunjung | 70.36 | 70.48 | 71.32 | 72.30 | 72.88 |
| 5 | Tanah Datar | 74.01 | 74.14 | 74.87 | 75.57 | 76.49 |
| 6 | Padang Pariaman | 72.80 | 72.92 | 73.67 | 74.54 | 74.90 |
| 7 | Agam | 73.11 | 73.20 | 73.84 | 74.44 | 75.08 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 70.82 | 71.03 | 71.64 | 72.05 | 72.51 |
| 9 | Pasaman | 68.35 | 68.48 | 69.12 | 69.85 | 70.61 |
| 10 | Solok Selatan | 70.69 | 70.88 | 71.36 | 72.24 | 73.17 |
| 11 | Dharmasraya | 72.30 | 72.65 | 73.19 | 73.87 | 74.82 |
| 12 | Pasaman Barat | 70.30 | 70.57 | 71.39 | 72.03 | 72.78 |
| KOTA | | | | | | |
| 13 | Padang | 83.22 | 83.30 | 83.69 | 83.98 | 84.38 |
| 14 | Kota Solok | 78.41 | 78.53 | 79.35 | 79.66 | 80.06 |
| 15 | Sawah Lunto | 73.97 | 74.35 | 75.21 | 75.91 | 76.88 |
| 16 | Padang Panjang | 78.43 | 78.52 | 79.28 | 79.76 | 80.60 |
| 17 | Bukittinggi | 80.68 | 80.79 | 81.52 | 81.88 | 82.61 |
| 18 | Payakumbuh | 79.06 | 79.24 | 79.70 | 80.14 | 80.76 |
| 19 | Pariaman | 78.55 | 78.72 | 79.31 | 79.76 | 80.49 |
| SUMATERA BARAT | | 74.29 | 74.56 | 75.16 | 75.64 | 76.43 |

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dari data IPM Kabupaten Tanah Datar tahun 2020–2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan, mulai dari 74,01 pada tahun 2020 menjadi 76,49 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan kemajuan yang stabil dalam dimensi dasar pembangunan manusia, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Kenaikan tahunan yang konsisten

menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan, akses pendidikan serta pendapatan dan pengeluaran riil masyarakat turut mengalami perbaikan.

Peningkatan IPM Tanah Datar ini juga sejalan dengan kecenderungan yang terjadi di wilayah Sumatera Barat secara umum, di mana IPM provinsi naik dari sekitar 75,64 pada 2023 menjadi 76,43 pada 2024. Peningkatan tersebut bukan hanya angka dalam statistik, tetapi mencerminkan hasil nyata dari program pemerintah daerah, seperti upaya peningkatan layanan pendidikan (angka harapan dan rata-rata lama sekolah meningkat), layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, serta penerapan berbagai strategi ekonomi berbasis nagari.

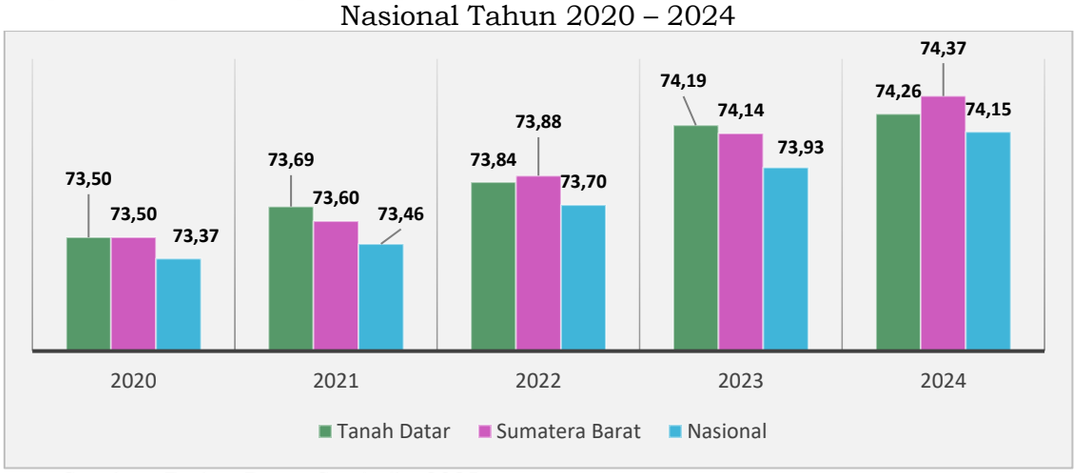
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah dimasa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan. kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Selama periode 2020 hingga 2024 Kabupaten Tanah Datar telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,76 tahun yaitu dari angka 73,50 pada Tahun 2020 menjadi angka 74,26 pada tahun 2024. Selama periode tersebut secara rata-rata Angka Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,15 persen per tahun. Perbandingan capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.31
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024



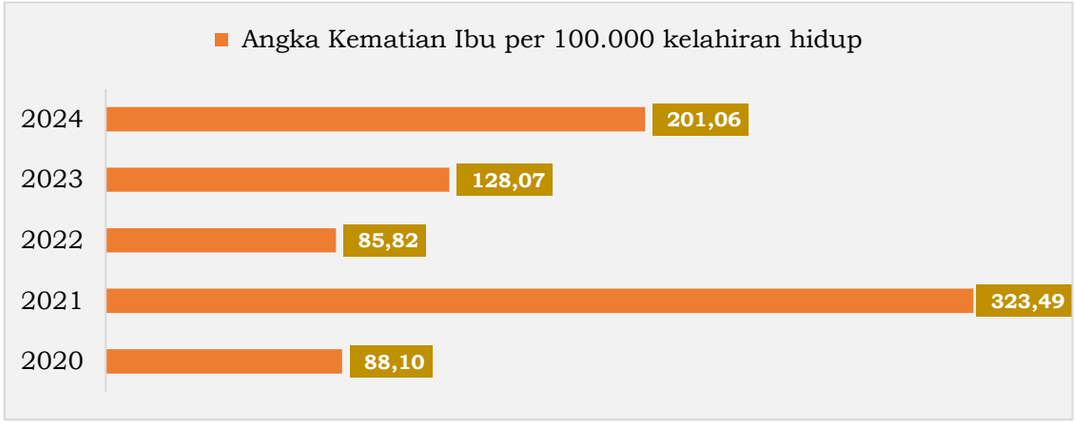

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan. Bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan. Melahirkan dan dalam

masa nifas 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.32
Angka Kematian Ibu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 (jiwa)




Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

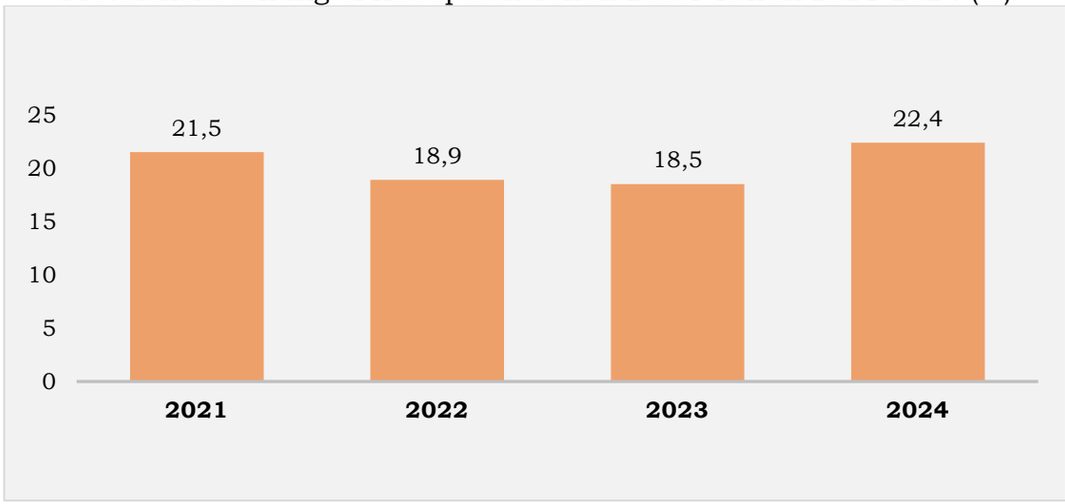
Kabupaten Tanah Datar memiliki angka kematian ibu yang cukup tinggi (target SDGs yaitu 70 per 100.000). Pada tahun 2020 AKI di Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 88.10/100.000 kelahiran hidup dan naik menjadi menjadi 201.06/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Akan tetapi angka tahun ini lebih rendah atau turun jika dibandingkan dengan angka pada Tahun 2021 yaitu 323.49/100.000 kelahiran hidup.

Penurunan capaian persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan disebabkan antara lain: masih adanya kasus pandemi *Covid*-19 pada tahun 2022 yang menyerang ibu melahirkan. masih adanya persalinan di Polindes. kesulitan akses ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang pada umumnya disebabkan oleh faktor geografis, tenaga kesehatan yang tidak berada ditempat, kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal serta masih adanya persalinan yang dilakukan oleh dukun.

3. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

*Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Penyebab *stunting* antara lain yaitu asupan gizi dan status kesehatan yang meliputi ketahanan pangan (ketersediaan keterjangkauan dan akses pangan bergizi), lingkungan sosial (norma, makanan bayi dan anak, *hygiene*, pendidikan dan tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses, pelayanan preventif dan kuratif) dan lingkungan pemukiman (air, sanitasi dan kondisi bangunan). Pengukuran capaian Prevalensi *Stunting* Kabupaten Tanah Datar baru dilakukan pada tahun 2021. Capaian prevalensi *stunting* Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.33
Prevalensi Stunting di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2024 (%)




Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2025

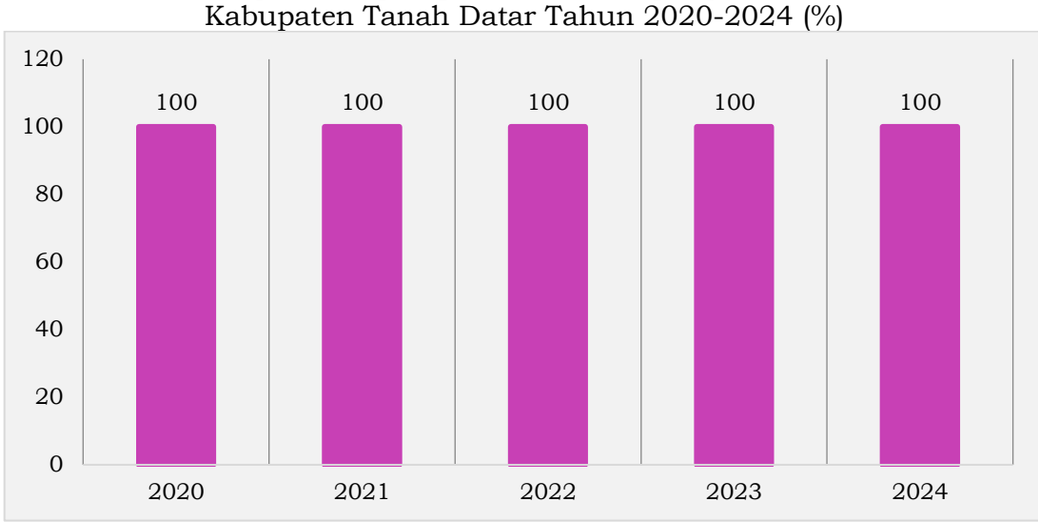
Berdasarkan gambar diatas prevalensi *stunting* Kabupaten Tanah Datar menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021, nilai yang tercatat berada pada angka 21,5, namun mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 18,9. Tren kenaikan ini masih berlanjut meskipun lebih landai pada tahun 2023, dengan nilai sebesar 18,5. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya tantangan atau hambatan yang memengaruhi capaian indikator pada dua tahun tersebut. Terbukti pada tahun 2024 dengan penurunan capaian menjadi 22,4 %. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pemulihan atau intervensi kebijakan yang belum optimal, baik dalam bentuk program, strategi penguatan, atau peningkatan dukungan pada sektor terkait. Pola naik-turun ini memberikan sinyal penting bagi pemangku kebijakan untuk terus mengevaluasi faktor-faktor penyebab penurunan dan memperkuat program yang terbukti efektif dalam mendorong peningkatan.

4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB di Kabupaten Tanah Datar sebesar 100%. Sedangkan Perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.34
Perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 (%)



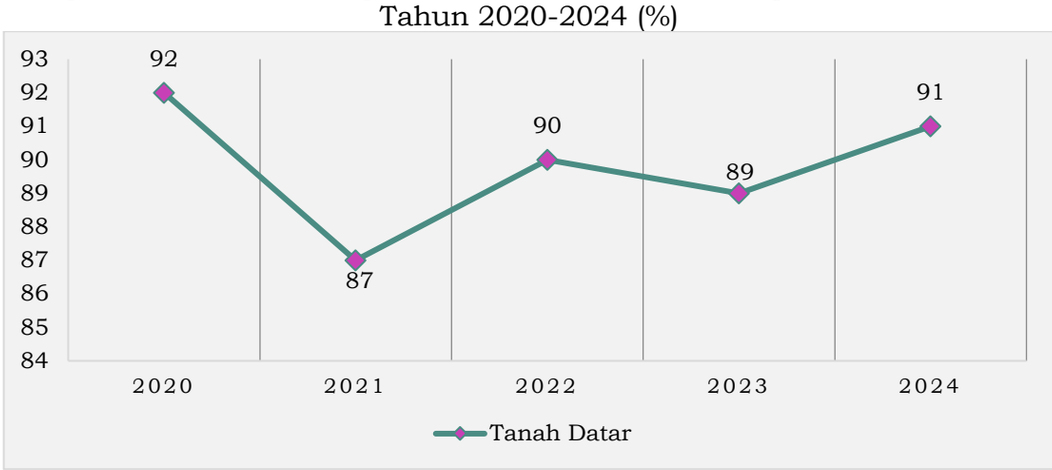

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Pemerintah pusat telah menargetkan sebesar 90% untuk cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis, sementara data cakupan Tanah Datar pada tahun 2024 sebesar 100%.

5. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate*) (%)

Angka keberhasilan pengobatan TB dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2020 angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 92%, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 89% dan pada tahun 2024 ini kembali naik menjadi 91%, sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 2.35
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024 (%)

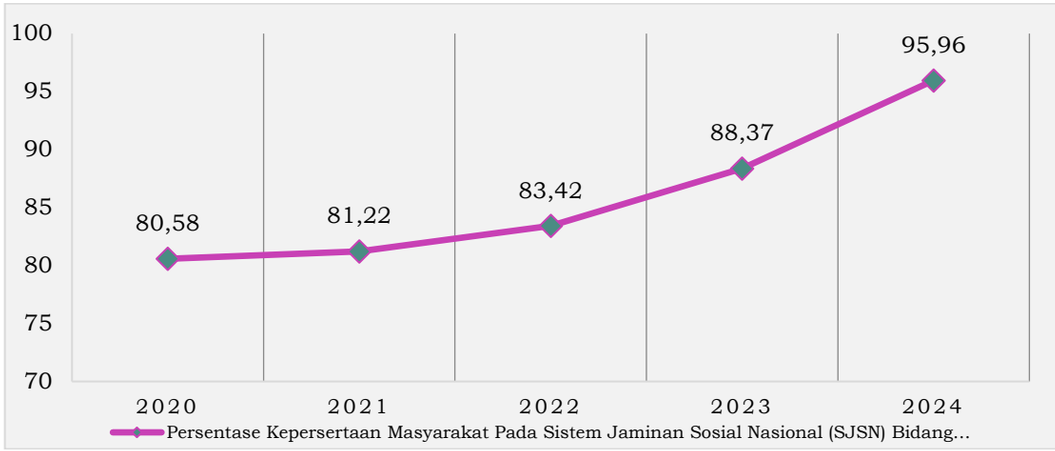



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

6. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)

*Universal Health Coverage* (UHC) atau Cakupan Kesehatan Universal adalah konsep yang menekankan bahwa setiap individu dan masyarakat harus memiliki akses yang setara dan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial saat mengaksesnya. Prinsip utama dari UHC adalah bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis, harus dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa risiko finansial yang tidak terjangkau.

Gambar 2.36
Persentase Kepersertaan Masyarakat Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas Kesehatan 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase kepesertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 mencapai angka 95,96%. Ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 15,38% dari tahun 2020.

Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional telah tergabung pada suatu Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN merupakan suatu program negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional

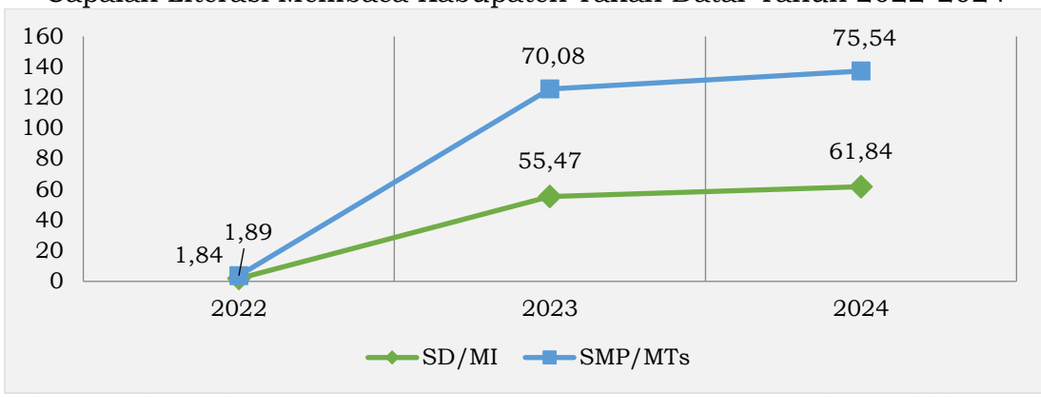
Jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, kelas VIII, dan kelas XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1) Perlu intervensi khusus;
2) Dasar;
3) Cakap; dan
4) Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

a. Literasi Membaca

Literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam mengolah dan memahami informasi yang diperoleh melalui aktivitas membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah. Pengukuran literasi membaca baru dimulai pada tahun 2022. Capaian Literasi Membaca Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.37
Capaian Literasi Membaca Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024



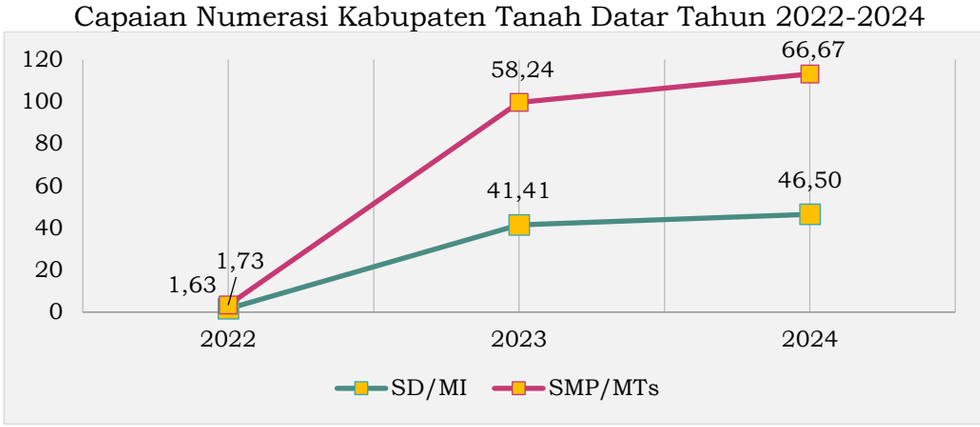

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar, 2025

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa capaian literasi membaca Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2022 sampai tahun 2024 selalu terjadi peningkatan. Hal ini menandakan bahwa semakin tingginya minat membaca dan ditunjang dengan fasilitas perpustakaan yang representative.

b. Numerasi

Numerasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan konsep bilangan dan operasi hitung bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran capaian Numerasi secara nasional dimulai pada tahun 2022. Capaian Numerasi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.38
Capaian Numerasi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024



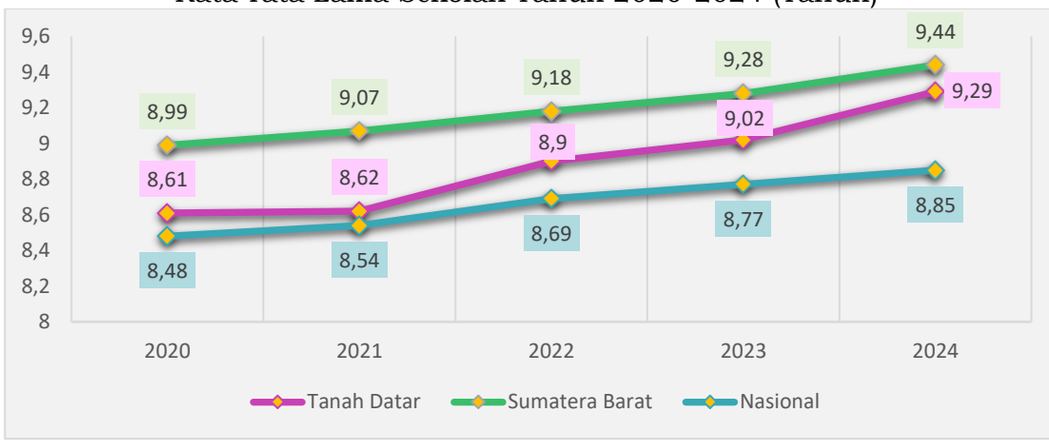

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar 2025

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa capaian Numerasi Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2022 sampai tahun 2024 terjadi peningkatan.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-Rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi mengenai partisipasi sekolah. jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki. ijazah tertinggi yang dimiliki. dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Analisis ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal menempuh pendidikan formal.

Gambar 2.39
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024 (Tahun)




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

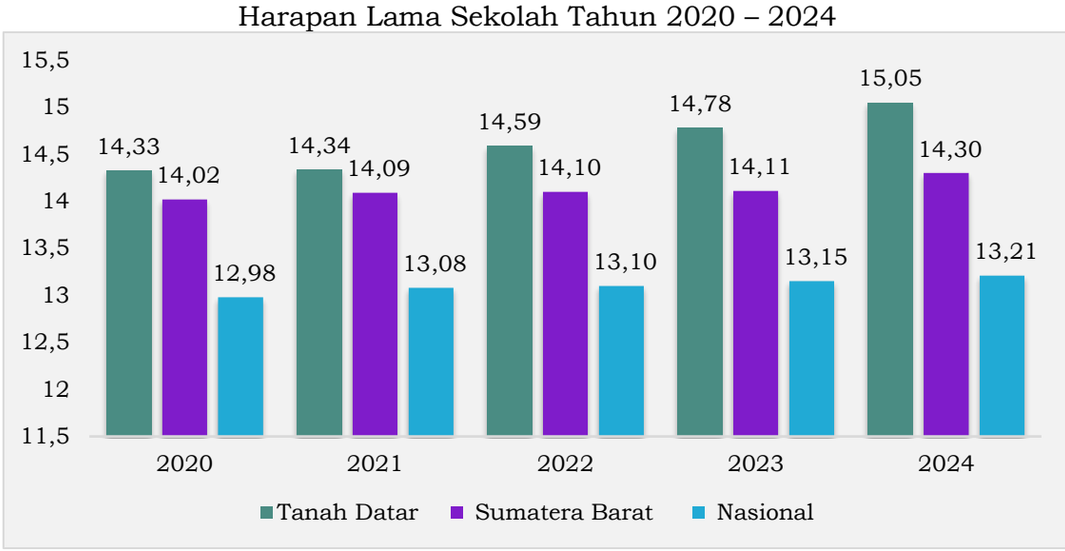
Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan dari 8,61 pada tahun 2020 menjadi 9,29 pada tahun 2024. namun nilai ini masih di bawah angka rata-rata lama sekolah pada tingkat provinsi tetapi sudah diatas angka rata-rata nasional.

3. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di daerah.

HLS di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan dari 14,33 pada tahun 2020 menjadi 15,05 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan HLS Provinsi maupun Nasional angka HLS Kabupaten Tanah Datar sudah berada lebih tinggi.

Gambar 2.40
Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 – 2024



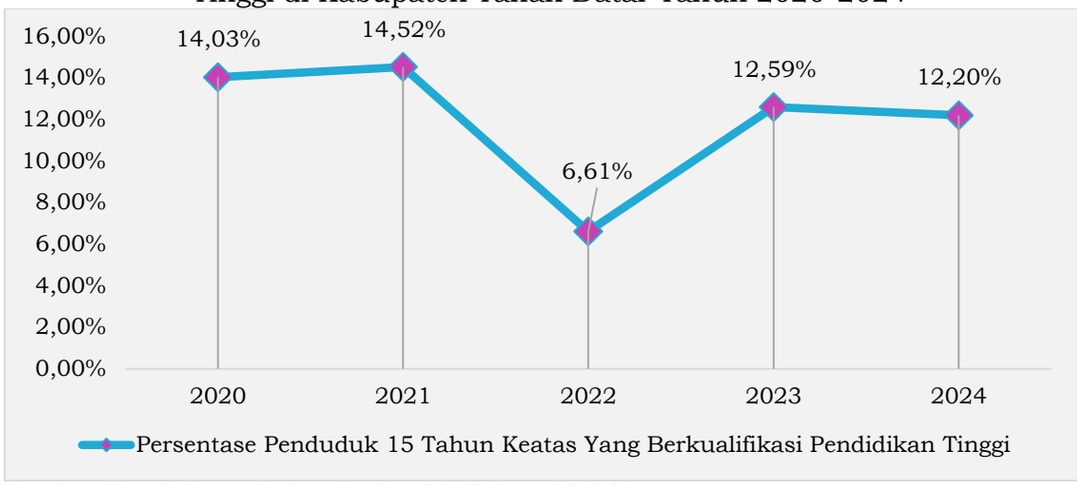

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

4. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 terjadi fluktuasi jumlah penduduk yang merupakan lulusan pendidikan tinggi. Angka ini menurun cukup signifikan menjadi 6,61% di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 14,52% yang merupakan persentase terbesar dalam kurun lima tahun tersebut. Sedangkan untuk tahun 2024 ini juga mengalami penurunan menjadi 12,20% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 12,59%.

Gambar 2.41
Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024



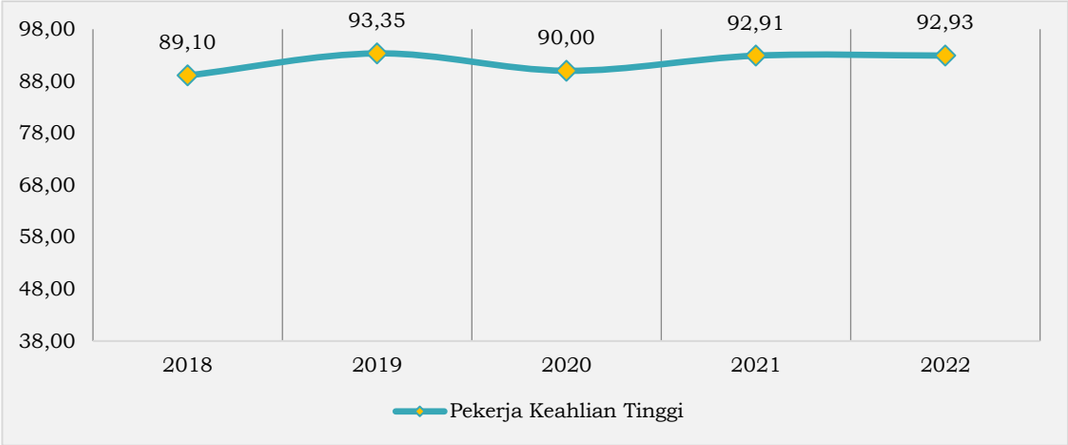

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025 (Data Diolah)

5. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi dan bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas dilakukannya pekerjaan sehingga menyelesaikan tugas yang yang mampu sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan *(supply*) dan lapangan kerja *(demand)* dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

Gambar 2.42
Perkembangan Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2022




Sumber: BPS (Data Diolah)

Perkembangan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kabupaten Tanah Datar selama periode 2018–2022 menunjukkan kecenderungan meningkat. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 93,35%, sementara angka terendah tercatat pada tahun 2020 yaitu 90,00%, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19* terhadap pasar kerja. Setelah itu, persentase kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 92,91% dan 92,93%. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas lulusan pendidikan menengah tinggi di Kabupaten Tanah Datar mampu terserap di bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, menunjukkan keterkaitan yang cukup baik antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

### 2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Jumlah hafiz/hafizah yang bersertifikat

Indikator Jumlah Hafiz/Hafizah yang Bersertifikat mencerminkan jumlah individu yang telah berhasil menghafal Al-Qur'an secara lengkap dan memperoleh sertifikat resmi sebagai pengakuan atas pencapaian tersebut. Sertifikasi ini tidak hanya menunjukkan kualitas dan validitas hafalan, tetapi juga mendorong motivasi bagi para penghafal Al-Qur'an untuk terus mengembangkan kemampuan mereka secara sistematis dan terstandarisasi. Peningkatan jumlah hafiz dan hafizah bersertifikat menjadi cerminan keberhasilan program pembinaan keagamaan dan pendidikan Islam di suatu wilayah, serta memperkuat peran komunitas agama dalam membangun karakter dan moral generasi muda. Oleh karena itu, indikator ini penting dalam mendukung upaya pelestarian nilai-nilai agama dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis spiritual.

Tabel 2.35
Jumlah hafiz/hafizah yang bersertifikat di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

| No. | Tahun | Jumlah hafiz/hafizah yang bersertifikat |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | - |
| 2. | 2021 | 1466 |
| 3. | 2022 | 1314 |
| 4. | 2023 | 1265 |
| 5. | 2024 | 1000 |

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, data jumlah hafiz/hafizah bersertifikat dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan penurunan. Tahun 2020 tidak memiliki data, disebabkan karena program wisuda hafiz/hafizah terdampak pandemi. Pada 2021, jumlah peserta mencapai puncaknya dengan 1.466 orang, namun kemudian terus menurun menjadi 1.314 pada 2022, 1.265 pada 2023, dan hanya 1.000 pada 2024. Penurunan total dalam kurun waktu tersebut mencapai 466 orang atau sekitar 31,78%.

2. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.

Tabel 2.36
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

| No | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peserta | (%) | Peserta | (%) | Peserta | (%) | Peserta | (%) | Peserta | (%) |
| 1 | Sektor Pekerja Formal | 7.733 | 4,53 | 6.000 | 3,62 | 10.946 | 6,28 | 8.670 | 4,39 | 26.667 | 13,49 |
| 2 | Sektor Pekerja Informal | 2.832 | 1,66 | 4.600 | 2,78 | 7.423 | 4,26 | 10.081 | 5,10 | 8.681 | 4,39 |
| 3 | Sektor Pekerja Jasa Konstruksi | 5.099 | 2,98 | 3.086 | 1,86 | 6.836 | 3,93 | 9.852 | 4,98 | 2.321 | 1,17 |
| | Total | 15.664 | 9,17 | 13.686 | 8,26 | 25.205 | 14,47 | 28.603 | 14,47 | 37.669 | 19,05 |

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Datar, 2025

Dari data diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Tanah Datar adalah sebesar 19,05% peserta aktif. Artinya pada tahun 2024 terdapat 19,05% pekerja yang dengan jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 37.669 jiwa. Jika dibandingkan dari tahun 2020 sebesar 9,17 % dan mengalami kenaikan sebesar 9,88% pada tahun 2024.

3. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)

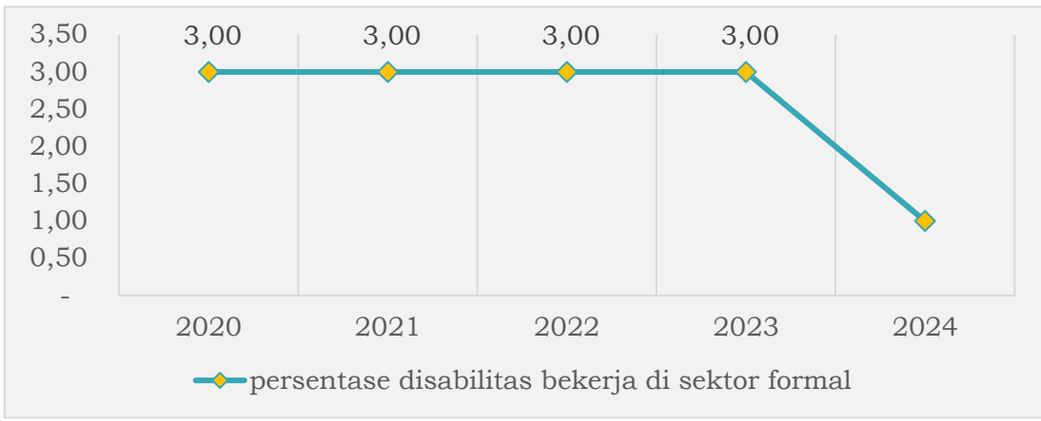
Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya; gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah.

Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.

Untuk persentase disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 sebesar 1% dari total angkatan kerja penyandang disabilitas. Angka ini menurun dibandingkan dengan 4 (empat) tahun terakhir yang berada pada angka 3%.

Gambar 2.43
Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas Nakerin, 2025

4. Fasilitasi Penanganan konflik sosial

Indikator Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya preventif, responsif, dan solutif dalam menangani potensi maupun kejadian konflik sosial di masyarakat. Fasilitasi ini mencakup berbagai kegiatan seperti mediasi, dialog antar kelompok, penguatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta koordinasi dengan aparat keamanan dan

tokoh masyarakat. Tingginya capaian indikator ini menunjukkan adanya kesiapsiagaan dan komitmen pemerintah dalam menciptakan stabilitas sosial, menjaga harmoni antar kelompok, serta mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, fasilitasi penanganan konflik sosial menjadi komponen penting dalam mewujudkan ketentraman dan keamanan yang berkelanjutan di tengah masyarakat yang majemuk. Indikator ini tidak memiliki data capaian untuk tahun-tahun sebelumnya.

5. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika

   Indikator Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika mengukur sejauh mana peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung upaya nasional memerangi ancaman narkotika melalui pendekatan preventif, edukatif, dan represif. Fasilitasi ini mencakup kegiatan seperti sosialisasi bahaya narkoba, pembentukan relawan anti-narkoba, kerja sama lintas sektor dengan BNN, aparat penegak hukum, serta rehabilitasi pengguna. Tingginya capaian indikator ini mencerminkan komitmen daerah dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba, sekaligus menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan zat adiktif. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menjaga ketahanan sosial dan memperkuat kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Indikator ini tidak memiliki data capaian untuk tahun-tahun sebelumnya.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Persentase Cagar Budaya ditetapkan (%)

   Cagar budaya yang ditetapkan adalah cagar budaya/entitas budaya atau situs tertentu yang telah diakui secara resmi dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai cagar budaya diwilayahnya. Semakin banyak jumlah cagar budaya ditetapkan oleh pemerintah daerah, semakin besar perhatian dan komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelestarian budaya di wilayahnya.

   Saat ini terdapat 68 (enam puluh delapan) cagar budaya yang ditetapkan di Kabupaten Tanah Datar. Sementara Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) ada sebanyak 300 (tiga ratus) objek. Kabupaten Tanah Datar selalu berusaha untuk meningkatkan ODCB menjadi Cagar Budaya sebagai bentuk langkah perlindungan warisan budaya kebendaan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar capaian jumlah cagar budaya yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Capaian Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

| No. | Tahun | Jumlah Cagar Budaya Ditetapkan |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | 38 |
| 2. | 2021 | 38 |
| 3. | 2022 | 68 |
| 4. | 2023 | 68 |
| 5. | 2024 | 68 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025

Berdasarkan data capaian jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan di Kabupaten Tanah Datar selama lima tahun terakhir, terlihat adanya perkembangan signifikan pada tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan tetap berada di angka 38 (tiga puluh delapan) situs. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan jumlah cagar budaya yang ditetapkan menjadi 68 (enam puluh delapan) situs, mencerminkan adanya upaya intensif dalam pelestarian dan penetapan warisan budaya daerah. Jumlah tersebut kemudian tetap stabil hingga tahun 2024. Stabilitas angka ini menunjukkan bahwa setelah pencapaian besar pada tahun 2022, fokus kemungkinan bergeser pada pengelolaan dan pelestarian situs-situs yang telah ditetapkan.

Kabupaten Tanah Datar menyimpan banyak cagar budaya penting. Salah satu di antaranya adalah Masjid Rao-rao di Nagari Rao Rao, dibangun pada tahun 1908–1918 dengan perpaduan arsitektur Minangkabau, Persia, dan Eropa, serta menjadi ikon sejarah masyarakat setempat. Selain itu, Rumah Gadang Kampai Nan Panjang, yang didirikan pada abad ke-18 di Rambatan, merupakan contoh arsitektur adat khas Minangkabau yang menjadi bagian dari inventaris Balai Pelestarian Kebudayaan. Tak kalah penting adalah Benteng *Van Der Capellen*, peninggalan kolonial Belanda yang mulai dibangun sekitar tahun 1822–1826.

Selain itu, Kabupaten Tanah Datar juga memiliki Istano Basa Pagaruyung, bekas istano kerajaan Pagaruyung yang kini menjadi museum budaya dari era Raja Adityawarman sekitar Tahun 1804. Prasasti Kubu Rajo di Lima Kaum, yang menunjukkan simbol kebesaran masa lampau. Selain bangunan dan prasasti, terdapat situs seperti Batu Batikam, batu leluhur yang dianggap sakral dalam adat Minangkabau dan berfungsi sebagai tempat bermusyawarah para tetua. Beragam cagar budaya ini menunjukkan kekayaan warisan sejarah dan budaya Tanah Datar yang kuat dan terus dipelihara.

2. Jumlah Warisan Tak Benda yang ditetapkan

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi, serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya terkait yang diakui sebagai bagian dari warisan budaya nusantara. Semakin banyak jumlah WBTB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, semakin besar perhatian dan komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelestarian warisan budaya tak benda yang ditetapkan diwilayahnya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, capaian Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Jumlah Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Berdasarkan tabel diatas capaian penetapan WBTB di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, terdapat 4 (empat) unsur WBTB yang telah ditetapkan. Jumlah ini

meningkat menjadi 7 (tujuh) unsur pada tahun 2021 dan terus bertambah menjadi 8 (delapan) unsur pada tahun 2022. Hingga tahun 2023, jumlah tersebut tetap bertahan, sebelum kembali meningkat menjadi 9 (sembilan) unsur pada tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pelestarian kekayaan budaya lokal, khususnya warisan budaya yang bersifat tak benda, seperti tradisi, ekspresi lisan, kesenian, adat istiadat, dan pengetahuan lokal. Meskipun peningkatannya bersifat bertahap, hal ini menunjukkan proses pendokumentasian dan pengusulan yang terus berjalan secara berkelanjutan.

3. Tingkat Moderasi Beragama

Tingkat moderasi beragama merupakan pembentukan dan pembinaan kepada masyarakat melalui kelompok kelembagaan agama dan pesantren di setiap Nagari/Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan karena seorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan.

Kabupaten Tanah Datar belum melakukan pengukuran tingkat moderasi beragama, pengukuran tsingkat moderasi beragama di Kabupaten Tanah Datar baru dimulai pada tahun 2025.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Nilai IPK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir capaian IPK Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari 55,53 pada tahun 2022 menjadi 62,42 pada tahun 2024, ini menunjukkan bahwa kualitas keluarga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.39
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

| No. | Tahun | Indeks Pembangunan Keluarga |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | - |
| 2. | 2021 | - |
| 3. | 2022 | 55,53 |
| 4. | 2023 | 60,14 |
| 5. | 2024 | 62,42 |

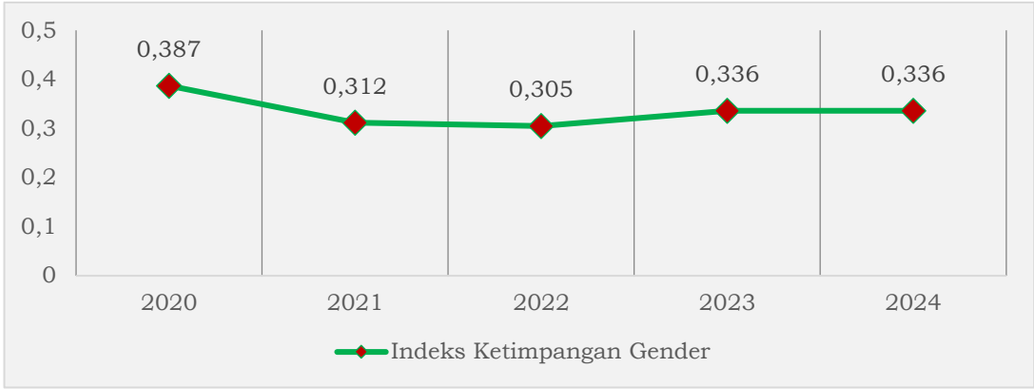
Sumber: Dinas PMD PPKB, 2025

2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK Perempuan.

IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.

Gambar 2.44
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024



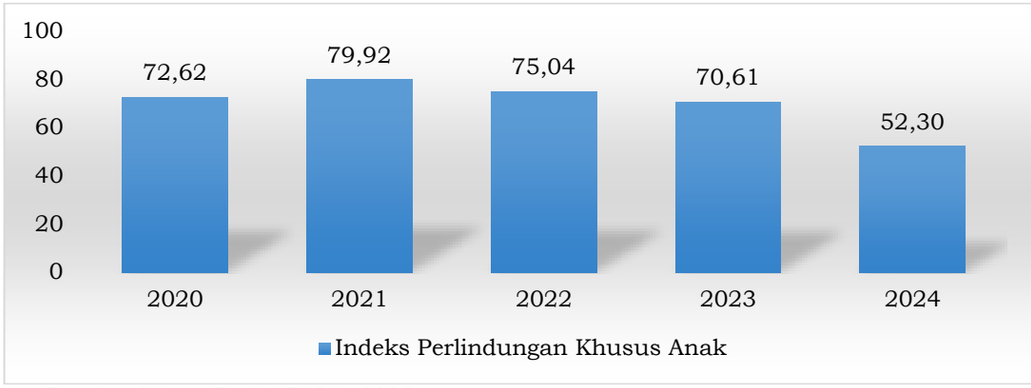

Sumber: Dinas Sosial PPP, 2025

Indeks Ketimpangan Gender Tanah Datar sejak tahun 2020 hingga 2024 berfluktuatif dan cenderung menurun. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tanah Datar tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,387 dan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,305 poin yang utamanya dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Dan untuk tahun 2024 ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik.

3. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Nilai Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.45
Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2021-2024




Sumber:Dinas Sosial PPPA, 2025

Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Tanah Datar selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 79,92, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 ini yaitu sebesar 52,30. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak kembali meningkat.

### 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Tabel 2.40
Rasio Ketergantungan Tahun 2020-2024

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah Penduduk usia < 15 tahun | 82.810 | 81.846 | 81.045 | 83.610 | 84.230 |
| 2. | Jumlah Penduduk usia > 64 tahun | 34.495 | 36.084 | 37.764 | 38.800 | 40.420 |
| 3. | Jumlah Penduduk usia tdk produktif (1) & (2) | 117.304 | 117.930 | 118.813 | 122.410 | 124.650 |
| 4. | Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun | 254.299 | 255.763 | 257.463 | 261.310 | 263.580 |
| 5. | Rasio ketergantungan | 46,13% | 46,11% | 46,15% | 46,84% | 47,29% |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Tanah Datar cukup tinggi yang berarti beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi masih cukup tinggi. Angka rasio ketergantungan cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 46,13% menjadi 47,29% pada tahun 2024.

#### 2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1. Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan adalah indikator ekonomi yang menggambarkan rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam suatu rumah tangga selama satu bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengeluaran ini mencakup berbagai kategori seperti makanan, perumahan, transportasi,

pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Data ini biasanya dihitung dengan membagi total pengeluaran rumah tangga dalam sebulan dengan jumlah anggota rumah tangga, dan kemudian dirata-ratakan antar rumah tangga dalam suatu wilayah atau populasi tertentu.

Indikator ini penting untuk memahami tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu parameter utama dalam mengukur garis kemiskinan. Dengan mengetahui pengeluaran rata-rata per kapita, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, perbandingan antarwilayah atau antarperiode waktu dari indikator ini dapat memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan dan perubahan daya beli masyarakat.

Tabel 2.41
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan
Kabupaten Tanah Datar 2020-2024

| No. | Tahun | Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan (Rp) |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | 1.108.024 |
| 2. | 2021 | 1.139.988 |
| 3. | 2022 | 1.219.561 |
| 4. | 2023 | 1.318.619 |
| 5. | 2024 | 1.362.746 |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

Data pengeluaran daerah per kapita per bulan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp1.108.024 (satu juta seratus delapan ribu dua puluh empat rupiah) dan meningkat menjadi Rp1.139.988 (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut di tahun 2022 dengan angka Rp1.219.561 (satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), lalu naik lagi menjadi Rp1.318.619 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah) pada 2023. Di tahun 2024, pengeluaran per kapita per bulan mencapai Rp1.362.746 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah). Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan daya beli masyarakat serta kemungkinan terjadinya inflasi yang turut mempengaruhi biaya kebutuhan hidup.

Peningkatan pengeluaran per kapita per bulan ini dapat diartikan sebagai sinyal positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen penting dalam produk domestik regional bruto (PDRB). Namun demikian, tren ini juga perlu dilihat dalam konteks perubahan harga barang dan jasa, serta ketimpangan pengeluaran antarwilayah. Jika peningkatan pengeluaran ini diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi mengalami perbaikan. Sebaliknya, jika kenaikan pengeluaran lebih disebabkan oleh inflasi, maka perlu diwaspadai dampaknya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

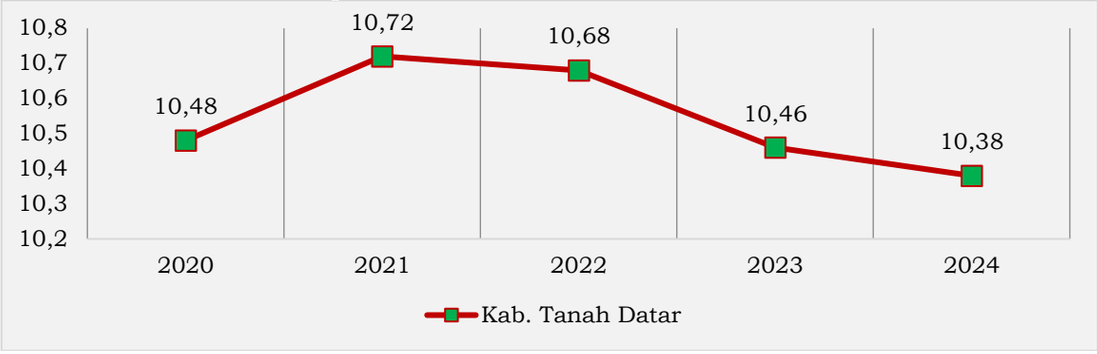
2. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang menjadi penunjang ekonomi dalam wilayah. Dari data statistik, Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu diantara daerah yang pertumbuhan

ekonominya cukup baik diketahui dari sektor-sektor yang membentuk PDRB dan pertumbuhan PDRB Tanah Datar.

Kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 cenderung mengalami penurunan dari 10,48 pada tahun 2020 menjadi 10,38 pada Tahun 2024.

Gambar 2.46
Rasio Perkembangan Kontribusi Industri Pengolahan
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Tahun 2025

Berdasarkan data Rasio Perkembangan Kontribusi Industri Pengolahan di Kabupaten Tanah Datar periode 2020–2024, terlihat bahwa kontribusi sektor ini mengalami tren penurunan setelah sempat meningkat pada awal periode. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 10,48% dan naik menjadi 10,72% pada tahun 2021, yang merupakan titik tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun, mulai tahun 2022 rasio sedikit menurun menjadi 10,68%, diikuti penurunan tajam pada tahun 2023 menjadi 10,46%, dan kembali turun ke level terendah 10,38% pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan melemahnya daya saing industri pengolahan di daerah, yang mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan bahan baku lokal, kurangnya inovasi teknologi, berkurangnya investasi, atau persaingan dengan produk dari luar daerah. Tren ini menunjukkan perlunya strategi revitalisasi industri pengolahan, termasuk peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, dan penguatan rantai pasok untuk mendorong kembali kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah.

3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

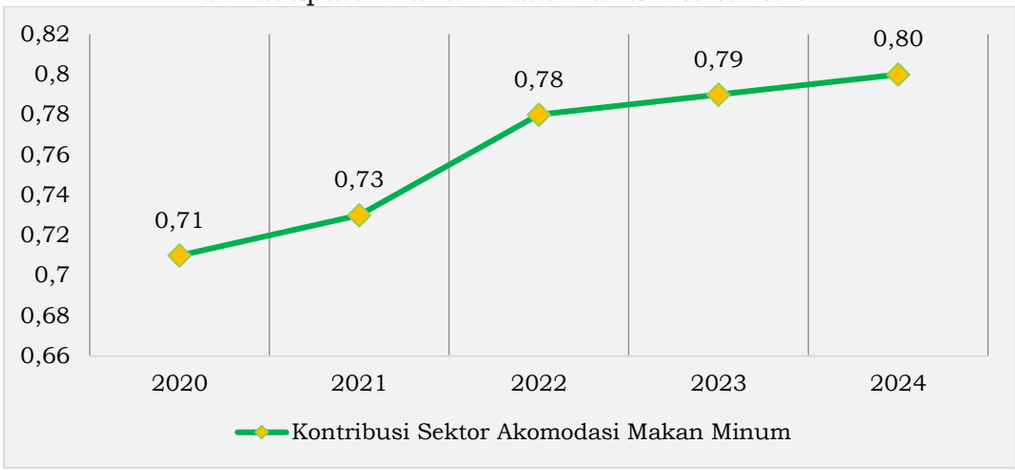
Sektor akomodasi makan minum merupakan salah satu faktor pendukung dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB khususnya bidang pariwisata di Kabupaten Tanah Datar.

Rasio PDRB akomodasi makan minum merupakan perbandingan antara nilai tambah bruto dari sektor akomodasi makan minum dalam suatu wilayah dengan total nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, sektor akomodasi makan minum mencakup bisnis-bisnis seperti hotel, restoran, kafe, kantin, dan layanan makanan lainnya.

Rasio PDRB akomodasi makan minum memberikan gambaran tentang kontribusi sektor akomodasi makan minum terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ini, semakin signifikan kontribusi sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB wilayah tersebut.

Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan dari 0,71% pada tahun 2020 menjadi 0,80% pada tahun 2024.

Gambar 2.47
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: BPS, 2025

4. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)

Jumlah Tamu Wisatawan mancanegara adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara di luar tempat tinggalnya. *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) mendefinisikan wisatawan mancanegara sebagai orang yang berkunjung ke suatu negara untuk beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Gambar 2.48
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas Parpora Kabupaten Tanah Datar, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 sebanyak 39.201 (tiga puluh sembilan ribu dua ratus satu) orang. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena telah pulihnya pandemi *Covid-19* dan seiring dengan adanya perbaikan ekonomi dengan pembukaan kembali pintu masuk wisatawan asing ke Sumatera Barat dan dibukanya kembali penerbangan luar negeri yang langsung ke Sumatera Barat.

5. Jumlah Tamu Wisatawan Domestik (orang)

Jumlah tamu wisatawan domestik merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kunjungan masyarakat lokal ke destinasi wisata di suatu daerah dalam periode tertentu. Tingginya jumlah wisatawan domestik menandakan bahwa daerah tersebut memiliki daya tarik wisata yang kuat, serta fasilitas dan aksesibilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan pariwisata. Selain menjadi tolok ukur keberhasilan promosi dan pengelolaan sektor pariwisata, peningkatan jumlah tamu domestik juga berdampak langsung pada perekonomian lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro dan menengah di sektor akomodasi, kuliner, transportasi, serta industri kreatif. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.42
Jumlah Tamu Wisatawan Domestik (orang)
Kabupaten Tanah Datar 2020-2024

| No. | Tahun | Jumlah Tamu Wisatawan Domestik (orang) |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | 656.178 |
| 2. | 2021 | 691.161 |
| 3. | 2022 | 955.024 |
| 4. | 2023 | 1.108.151 |
| 5. | 2024 | 1.166.652 |

Sumber: Dinas Parpora Kabupaten Tanah Datar, 2025

Berdasarkan tabel diatas, jumlah tamu wisatawan domestik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan tercatat sebanyak 656.178 (enam ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan) orang dan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 691.161 (enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh satu) orang di tahun 2021, lalu melonjak tajam menjadi 955.024 (sembilan ratus lima puluh lima ribu dua puluh empat) orang di tahun 2022. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah 1.108.151 (satu juta seratus delapan ribu orang seratus lima puluh satu), dan diperkirakan mencapai 1.166.652 (satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua) orang pada tahun 2024. Peningkatan signifikan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dan pelaku pariwisata dalam memperbaiki infrastruktur, memperluas promosi destinasi, serta meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Selain itu, tren ini juga menunjukkan adanya pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi *Covid*-19, sekaligus mengindikasikan bahwa minat masyarakat terhadap wisata domestik semakin tinggi. Pertumbuhan ini diharapkan dapat terus didorong dengan inovasi produk wisata dan penguatan daya saing destinasi lokal untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor pariwisata daerah.

6. Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Menginap

Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Menginap menggambarkan banyaknya turis asing yang menghabiskan setidaknya satu malam di akomodasi resmi seperti hotel, penginapan, atau *homestay* di suatu daerah dalam periode tertentu. Data ini menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai daya tarik destinasi wisata, kualitas layanan pariwisata, serta kontribusinya terhadap perekonomian lokal melalui pengeluaran wisatawan pada sektor akomodasi, kuliner, transportasi, dan hiburan. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang menginap biasanya menunjukkan

keberhasilan promosi, peningkatan aksesibilitas, dan perbaikan fasilitas pariwisata, sementara penurunannya dapat mengindikasikan adanya tantangan seperti menurunnya minat pasar, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mempengaruhi kunjungan.

Tabel 2.43
Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang) Yang Menginap
Di Kabupaten Tanah Datar 2020-2024

| No. | Tahun | Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang) |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | - |
| 2. | 2021 | - |
| 3. | 2022 | 18 |
| 4. | 2023 | 25 |
| 5. | 2024 | - |

Sumber: Dinas Parpora Kabupaten Tanah Datar, 2025

Berdasarkan data Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Menginap di daerah tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2020, 2021, dan 2024 tidak tercatat adanya wisatawan asing yang menginap, sementara pada tahun 2022 mulai tercatat sebanyak 18 (delapan belas) orang dan meningkat menjadi 25 (dua puluh lima) orang pada tahun 2023. Kondisi tanpa data pada tahun 2020 dan tahun 2021 dipengaruhi oleh pembatasan perjalanan internasional akibat pandemi *Covid*-19 serta penutupan akses pariwisata. Peningkatan pada tahun 2022 dan tahun 2023 menunjukkan adanya pemulihan sektor pariwisata internasional, meskipun jumlahnya masih relatif kecil dibanding potensi yang ada. Ketiadaan data pada tahun 2024 bisa disebabkan oleh belum tersedianya laporan resmi atau adanya penurunan kunjungan akibat faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan visa, atau daya tarik destinasi yang belum optimal bagi pasar mancanegara.

7. Jumlah Objek Wisata Yang dikembangkan

Indikator jumlah objek wisata yang dikembangkan menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah atau pihak terkait melakukan pengembangan terhadap potensi destinasi wisata yang ada, baik melalui peningkatan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendukung, maupun promosi dan pengelolaan destinasi secara berkelanjutan. Semakin banyak objek wisata yang dikembangkan, semakin besar pula peluang untuk menarik kunjungan wisatawan, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Indikator ini juga mencerminkan komitmen terhadap pelestarian budaya dan alam lokal melalui pengelolaan destinasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan objek wisata tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan daya tariknya agar mampu bersaing serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Indikator ini merupakan indikator baru yang belum ada data capaiannya.

8. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)

PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 (tujuh belas) subsektor yang termasuk:

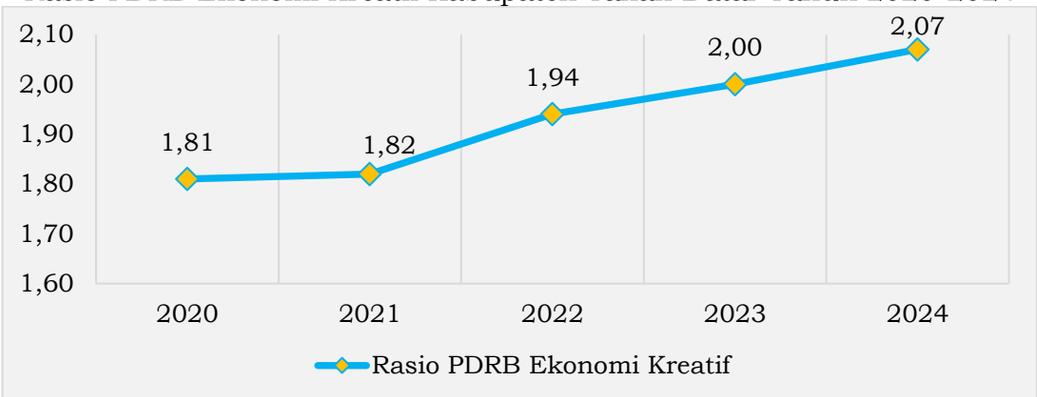
1) *Fashion*;
2) Kuliner;
3) Kriya;
4) Film, Animasi dan Video;
5) Pengembang Permainan;
6) Aplikasi;
7) Musik;
8) Seni Pertunjukan;
9) Fotografi;
10) Desain Komunikasi Visual;
11) Televisi dan Radio;
12) Seni Rupa;
13) Desain Produk;
14) Periklanan;
15) Penerbitan;
16) Arsitektur; dan
17) Desain Interior.

Di Kabupaten Tanah Datar yang menjadi sektor unggulan pada aktifitas ekonomi kreatif adalah seni pertunjukan.

Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh sektor jasa lainnya (sub sektor ekonomi kreatif), semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB sub sektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.

Untuk nilai rasio ekonomi kreatif Kabupaten Tanah Datar dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 rasio ekonomi kreatif Kabupaten Tanah Datar sebesar 1,81%, menjadi 2,07% sampai dengan tahun 2024. Untuk data lebih rinci data dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2.49
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

9. Proporsi jumlah Usaha Mikro nonpertanian (%)

Proporsi jumlah usaha mikro nonpertanian di Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, tercatat proporsi tertinggi sebesar 80,66%, yang menunjukkan dominasi signifikan sektor usaha mikro nonpertanian terhadap keseluruhan unit usaha di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam menjadi 64,65%, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemulihan pasca-pandemi serta pergeseran minat usaha ke sektor pertanian.

Setelah penurunan tersebut, proporsi usaha mikro non pertanian mengalami peningkatan menjadi 66,67% pada tahun 2023, namun kembali turun ke 65,88% pada tahun 2024. Meskipun tidak sebesar penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022, hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam perkembangan sektor usaha mikro non pertanian. Data ini dapat menjadi indikator perlunya intervensi kebijakan atau program penguatan ekonomi lokal, khususnya dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mikro non pertanian di Kabupaten Tanah Datar. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024

| No. | Tahun | Proporsi jumlah Usaha Mikro non pertanian |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | - |
| 2. | 2021 | 80,66 |
| 3. | 2022 | 64,65 |
| 4. | 2023 | 66,67 |
| 5. | 2024 | 65,88 |

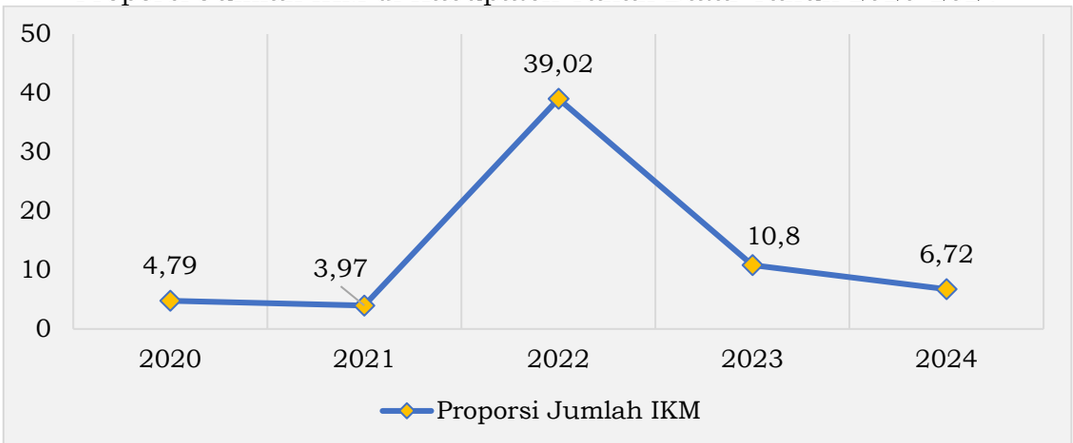
Sumber: Dinas KUKMP, 2024

10. Proporsi jumlah IKM (%)

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2022 merupakan capaian tertinggi yaitu sebesar 39,02% dan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 3,97%. Sedangkan untuk tahun 2024 ini terjadi penurunan sebesar 4,08% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dari 10,8% pada tahun 2023 menjadi 6,72% pada tahun 2024, untuk lebih rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.50
Proporsi Jumlah IKM di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024



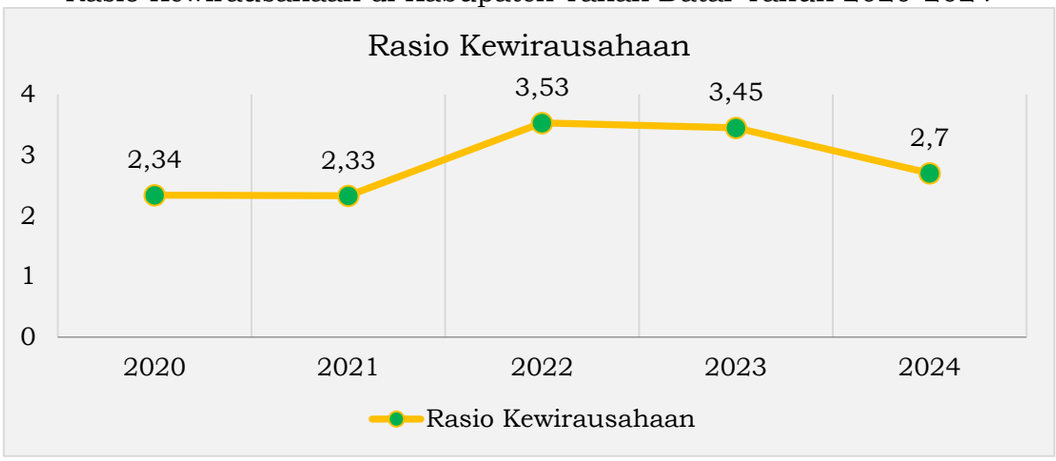

Sumber: Dinas Nakerin, 2025

11. Rasio Kewirausahaan (%)

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 (lima belas) tahun dan lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Gambar 2.51
Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: BPS, 2025 (Data diolah),

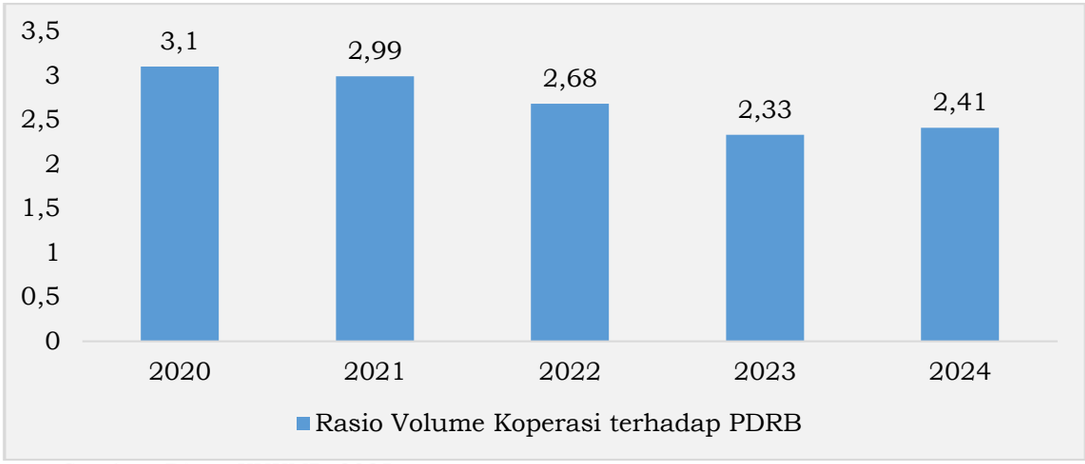
Pengembangan rasio kewirausahaan di Kabupaten Tanah Datar selama periode 2020-2024 berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 sebesar 2,34%, kemudian sejak tahun 2021-2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 3,53%. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 2,7%. Hal ini terjadi karena akibat bencana alam dan penurunan produksi sektor pertanian yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat sehingga banyak wirausaha yang mengalami kerugian.

12. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Kontribusi Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya dimana pada tahun 2020 sebesar 3,1 menjadi 2,41 pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,69 selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh koperasi bergerak di sektor riil tidak terlalu berdampak dikarenakan koperasi yang bersifat simpan pinjam.

Gambar 2.52
Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024



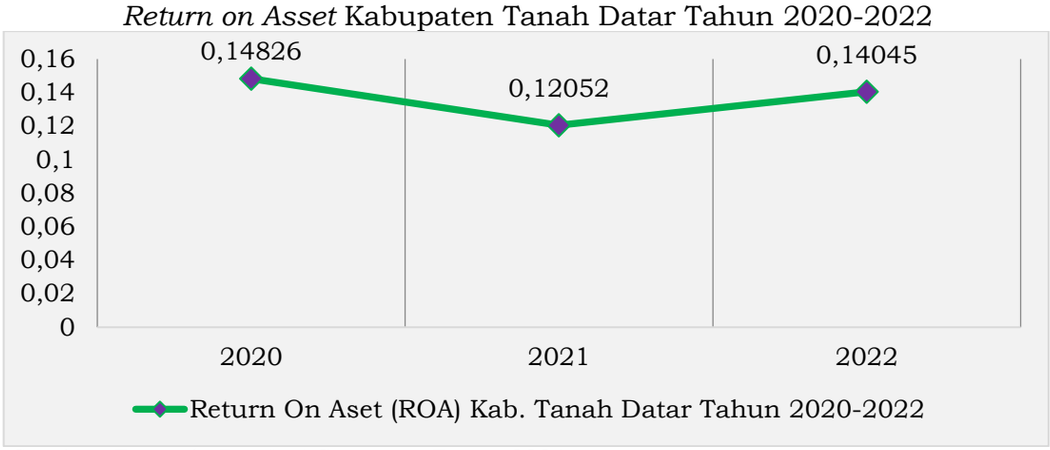

Sumber: Dinas KUKMP, 2025

13. RoA BUMD (%)

*Return On Asset* adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Sehingga *Return On Asset* dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total nilai aset yang dimiliki perusahaan.

*Return On Asset* (RoA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat RoA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Sehingga data RoA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

Gambar 2.53
*Return on Asset* Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022




Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Nilai RoA Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2020–2022 mengalami fluktuasi dimana dari 0,14826 pada tahun 2020 menjadi 0,12052 di tahun 2021, lalu kembali naik ke 0,14045 pada tahun 2022.

Penurunan RoA pada tahun 2021 dipengaruhi oleh pandemi dan implementasi kebijakan fiskal yang lebih konservatif. Namun, pulihnya RoA di tahun 2022 memperlihatkan daya tahan keuangan daerah serta efektivitas strategi pemulihan. Untuk peningkatan lebih lanjut, perlu difokuskan pada optimalisasi aset seperti meningkatkan pemanfaatan

aset produktif dan pengawasan biaya operasional untuk menjaga kinerja ke depan.

14. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan kerja formal.

Untuk nilai proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kabupaten Tanah Datar selama lima tahun terakhir berfluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2020 nilai proporsi penciptaan lapangan kerja formal berada pada angka 21,99% menjadi 27,09% di tahun 2024. Data ini dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.54
Nilai Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024



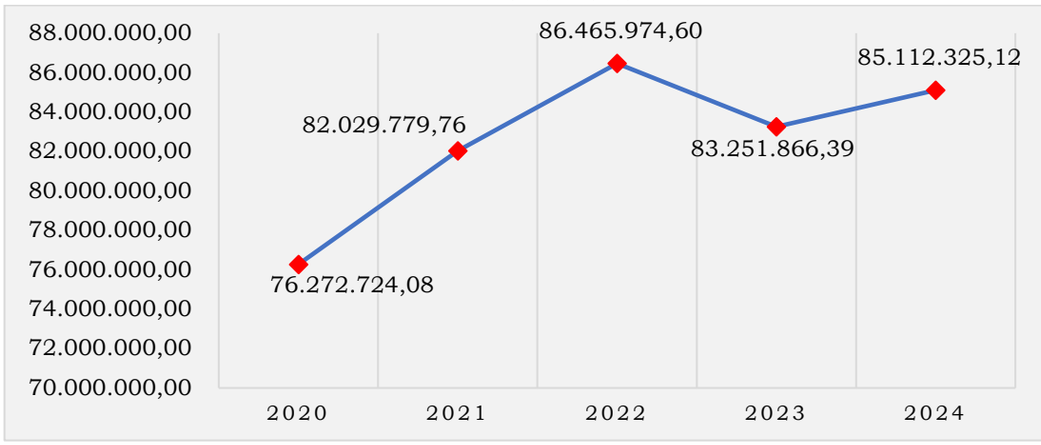

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2025 (data diolah)

15. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.

Tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi dan cendrung meningkat dengan peningkatan sebesar 11,59% atau rata-rata 2,32% pertahun.

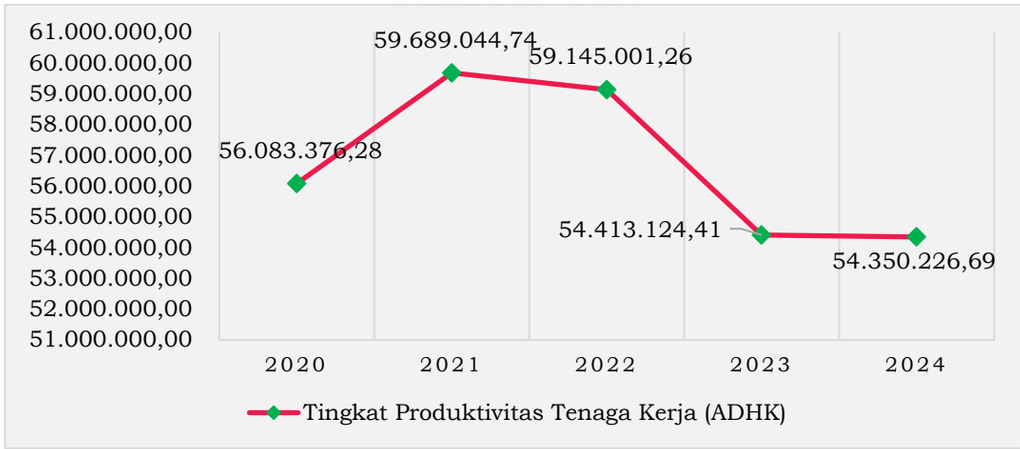
Gambar 2.55
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (ADHB) di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024




Sumber: Tanah Datar Dalam Angka (Data diolah)

Sedangkan tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi dan cenderung menurun dengan penurunan sebesar 3,09% atau rata-rata 0,62% pertahunnya.

Gambar 2.56
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (ADHK) di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024




Sumber: Tanah Datar Dalam Angka (Data diolah)

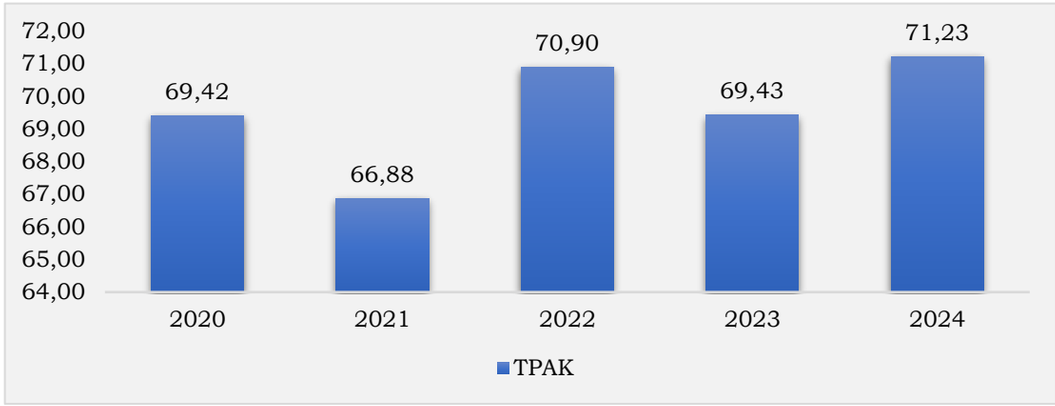
Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja ini adalah karena sudah banyaknya pekerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, penggunaan teknologi dan peralatan yang lebih modern, lingkungan kerja yang nyaman dan motivasi dan semangat kerja tinggi.

16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 (lima belas) tahun ke atas.

TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja.

Gambar 2.57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

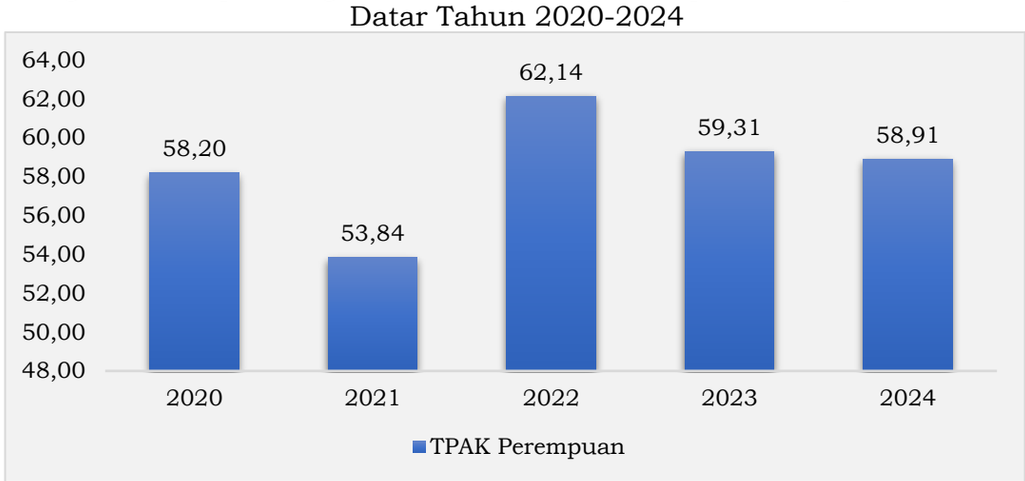



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar, 2025

Berdasarkan grafik diatas, terlihat fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 69,42% kemudian menurun cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 66,88%. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan tajam hingga mencapai 70,90%, sedangkan tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 69,43%, sebelum akhirnya kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 71,23%, sekaligus menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perkembangan ini menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, peluang kerja, dan kebijakan pemberdayaan perempuan, di mana tren peningkatan pada tahun 2022 dan tahun 2024 mengindikasikan membaiknya keterlibatan perempuan di pasar kerja daerah.

Selama periode tahun 2020-2024, TPAK Perempuan Kabupaten Tanah Datar berfluktuasi dan cenderung meningkat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 62,14% dan capaian paling rendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 53,84%. Sedangkan untuk tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar 0,4% dari tahun 2023. Capaian TPAK Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.58
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas Nakerin, 2025

17. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu inovasi tata kelola pemerintah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan pengukuran dan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri, maka capaian skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.45
Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2024

| No | Tahun | Skor Indeks | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 41,21 | Inovatif |
| 2 | 2022 | 50,27 | Inovatif |
| 3 | 2023 | 46,44 | Inovatif |
| 4 | 2024 | 45,95 | Inovatif |

Sumber: Bappedalitbang, 2025

18. Jumlah Penelitian yang dilaksanakan

Indikator jumlah penelitian yang dilaksanakan mencerminkan tingkat aktivitas riset dan pengembangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, perguruan tinggi, maupun pihak swasta dalam suatu wilayah atau institusi. Semakin tinggi jumlah penelitian yang dilakukan, semakin besar kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indikator ini juga menjadi cerminan dari budaya ilmiah dan kapasitas sumber daya manusia yang mendorong kemajuan daerah atau sektor tertentu. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penelitian perlu didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, kemitraan strategis, serta sistem diseminasi hasil riset yang efektif agar hasil penelitian dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan.

Tabel 2.46
Jumlah Penelitian yang dilaksanakan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

| No | Tahun | Jumlah Penelitian yang dilaksanakan |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | - |
| 2 | 2021 | - |
| 3 | 2022 | 2 |
| 4 | 2023 | 3 |
| 5 | 2024 | 3 |

Sumber: Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan data dalam tabel, jumlah penelitian yang dilaksanakan mulai tercatat pada tahun 2022 dengan sebanyak 2 (dua) penelitian, lalu mengalami peningkatan menjadi 3 (tiga) penelitian pada tahun 2023 dan tetap stabil di angka yang sama pada tahun 2024.

Peningkatan jumlah penelitian pada tahun 2022 menunjukkan adanya awal komitmen terhadap pengembangan riset, meskipun jumlahnya masih relatif rendah.

19. Persentase Inovasi yang diterapkan

Indikator Persentase Inovasi yang diterapkan mengukur proporsi jumlah inovasi baik berupa kebijakan, teknologi, produk, maupun layanan yang telah berhasil diimplementasikan oleh instansi pemerintah, pelaku usaha, atau lembaga lainnya dalam kurun waktu tertentu. Tingginya persentase inovasi yang diterapkan mencerminkan tingkat responsivitas dan adaptabilitas suatu daerah atau organisasi terhadap tantangan dan perubahan, serta menunjukkan komitmen terhadap peningkatan efisiensi, kualitas pelayanan, dan daya saing. Indikator ini juga mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan solusi-solusi kreatif yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan indikator ini menjadi cerminan dari kemajuan budaya inovasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.47
Persentase Inovasi yang diterapkan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

| No | Tahun | Persentase Inovasi yang Diterapkan |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 38,74 |
| 2 | 2021 | 34,23 |
| 3 | 2022 | 10,00 |
| 4 | 2023 | 20,00 |
| 5 | 2024 | 77,55 |

Sumber: Bappedalitbang, 2025

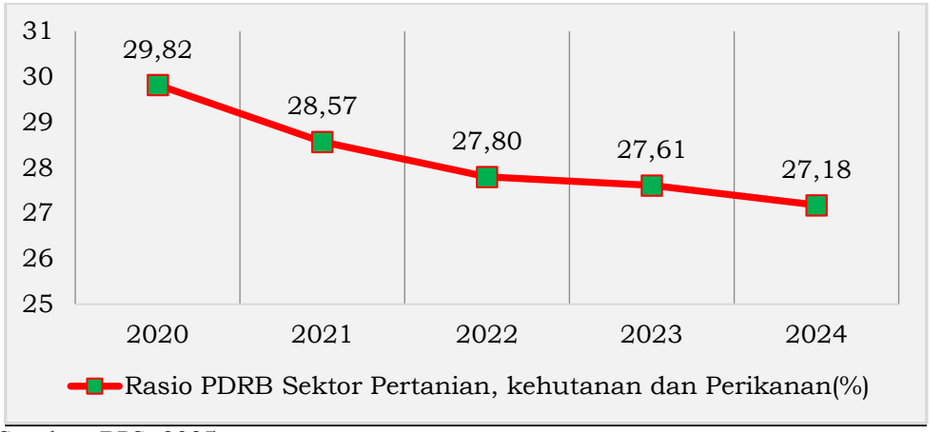
Berdasarkan data pada tabel, persentase inovasi yang diterapkan mengalami fluktuasi yang cukup tajam selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, capaian persentase inovasi mencapai 38,74%, namun menurun menjadi 34,23% di tahun 2021, dan anjlok tajam ke angka 10,00% pada 2022. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam implementasi inovasi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan kebijakan, atau belum optimalnya sistem manajemen inovasi. Meskipun ada sedikit peningkatan di tahun 2023 menjadi 20,00%, angka tersebut masih jauh dari kondisi ideal. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 77,55%, yang menunjukkan adanya perbaikan besar dalam strategi dan eksekusi penerapan inovasi.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan(%)

Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 29,82% pada tahun 2020 menjadi 27,18% pada tahun 2024. Jika dikalkulasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi penurunan sebesar 2,64%.

Gambar 2.59
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: BPS, 2025

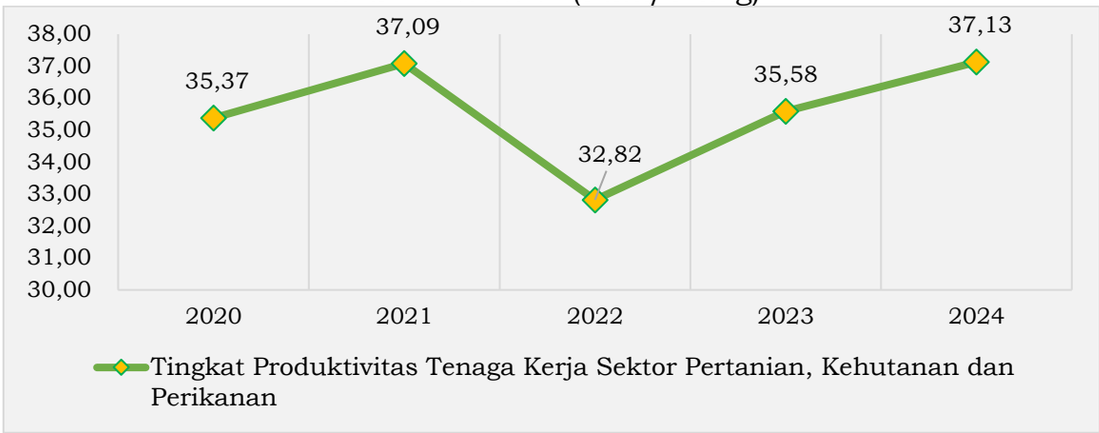
2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Juta/orang)

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan. Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 bergerak fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang bergerak pada sektor pertanian juga bersifat fluktuatif yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Di sisi lain, fluktuasi produktivitas tenaga kerja mengindikasikan bahwa efisiensi atau *output* per tenaga kerja tidak stabil, yang dapat dipengaruhi oleh faktor musiman, perubahan teknologi, kebijakan, atau dinamika pasar.

Kondisi ini menjadi indikasi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Penurunan kontribusi sektor ini terhadap PDRB meskipun ada kalanya produktivitas tenaga kerja meningkat, menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor secara keseluruhan. Bisa jadi produktivitas naik hanya di sub sektor tertentu, atau terjadi efisiensi tenaga kerja tanpa didukung oleh nilai *output* yang tinggi.

Gambar 2.60
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024 (Juta/orang)




Sumber: Dinas Nakerin, 2025

Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Tanah Datar antara tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan terjadinya pemulihan pada dua tahun terakhir. Nilai produktivitas (juta/orang) mengalami peningkatan dari 35,37 di tahun 2020 menjadi 37,90 pada 2021, lalu turun ke 32,82 pada tahun 2022. Hal ini diakibatkan oleh dampak pandemi *Covid*-19, kemudian pulih ke 35,58 di tahun 2023 dan kembali meningkat ke 37,13 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan kondisi ekonomi lokal yang rentan terhadap gangguan eksternal seperti pandemi, namun juga menunjukkan adanya kapasitas adaptasi dan pemulihan setelah situasi membaik. Di sisi lain, fluktuasi produktivitas tenaga kerja mengindikasikan bahwa efisiensi atau *output* per tenaga kerja tidak stabil, yang dapat dipengaruhi oleh faktor musiman, perubahan teknologi, kebijakan, atau dinamika pasar.

Kondisi ini bisa menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan dinamika sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Penurunan kontribusi sektor ini terhadap PDRB meskipun ada kalanya produktivitas tenaga kerja meningkat, bisa menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor secara keseluruhan.

2.1.3.4 Transformasi Digital

1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Survey IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan kembali dilaksanakan di tahun 2023 dan tahun 2024.

Capaian IMDI di Kabupaten Tanah Datar dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi fluktuasi, dimana pada tahun 2022 sebesar 41,75%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,43%. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun 2023 yaitu sebesar 6,91%. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.48
Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2022-2024

| No. | Tahun | Indeks Masyarakat Digital Indonesia |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | - |
| 2. | 2021 | - |
| 3. | 2022 | 41,75 |
| 4. | 2023 | 50,18 |
| 5. | 2024 | 43,27 |

Sumber: Dinas Kominfo, 2025

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

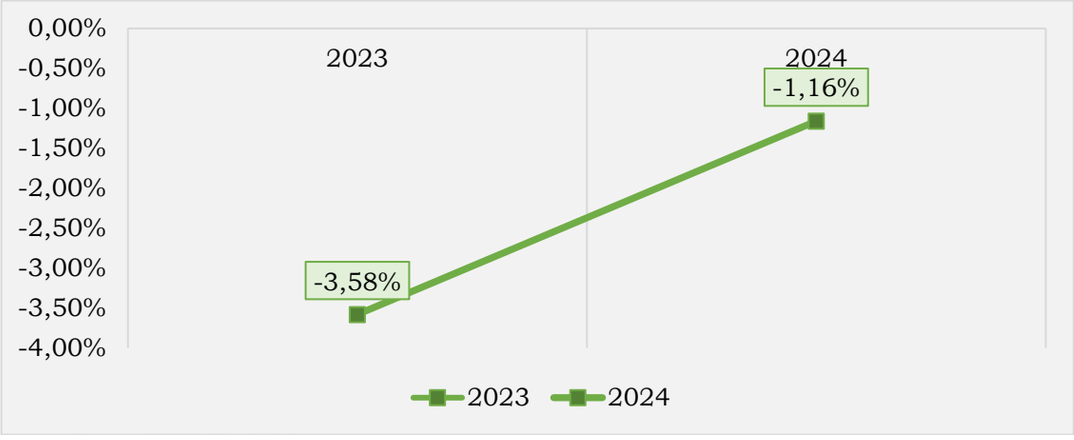
1. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Pokok (%)

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok adalah data yang menggambarkan variasi harga barang kebutuhan pokok pada satu rentang waktu, yang mencakup 11 (sebelas) barang yaitu beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar.

Semakin kecil hasil dari persentase koefisien variasi harga antar waktu berarti mengindikasikan variasi harga barang kebutuhan pokok selama tahun tersebut di suatu wilayah adalah rendah atau memiliki disparitas harga sesuai harapan (stabil).

Kabupaten Tanah Datar baru melakukan penghitungan Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok sejak tahun 2023, dimana pada tahun 2023 sebesar –3,58% dan pada tahun 2024 sebesar -1,16% seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.61
Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2024




Sumber: Dinas KUKMP, 2025

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan *share* PMTB terhadap PDRB.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Tabel 2.49
Nilai PMTB di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK) | 2.777,57 | 2.806,07 | 2.893,10 | 3.111,85 | 3.208,14 |
| 2. | PDRB ADHK | 9.575,90 | 9.889,46 | 10.300,93 | 10.757,91 | 11.172,45 |
| 3. | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 29,01 | 28,37 | 28,09 | 28,93 | 28,71 |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka 2025 (data diolah)

Selama lima tahun terakhir, nilai PMTB tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 29,01%, dan terendah pada tahun 2022 sebesar 28,09%. Komponen PMTB tercatat mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan PMDN di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dan sektor konstruksi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah tetap terjaga didorong oleh peningkatan realisasi belanja operasional, belanja tidak terduga, dan belanja transfer seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.

Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB.

Tabel 2.50
Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Nett ekspor barang dan jasa | 827,25 | 998,65 | 1.104,01 | 1.203,16 | 1.292,44 |
| 2. | PDRB ADHK | 9.575,90 | 9.889,46 | 10.300,93 | 10.757,91 | 11.172,45 |
| 3. | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 8,64 | 10,10 | 10,72 | 11,18 | 11,57 |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025 (data diolah)

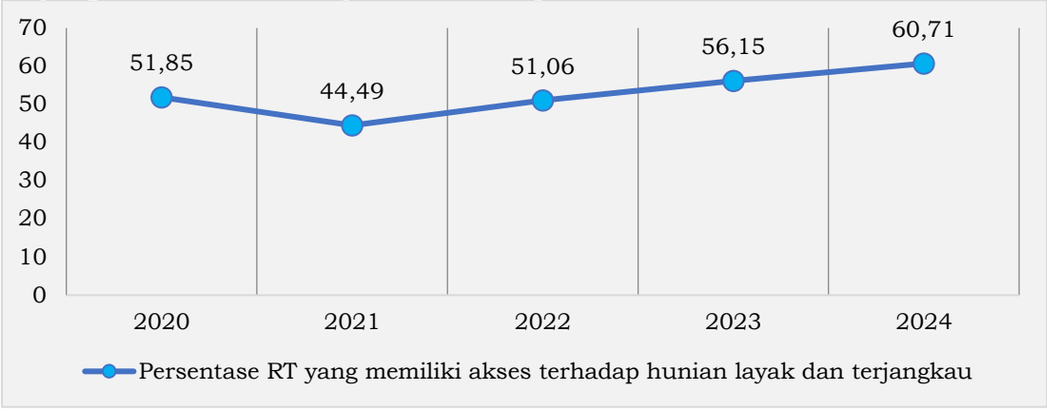
Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dimana dari 8,64% tahun 2020 menjadi 11,57% ditahun 2024.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau dan berkelanjutan

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Gambar 2.62
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas Perkim dan LH, 2025

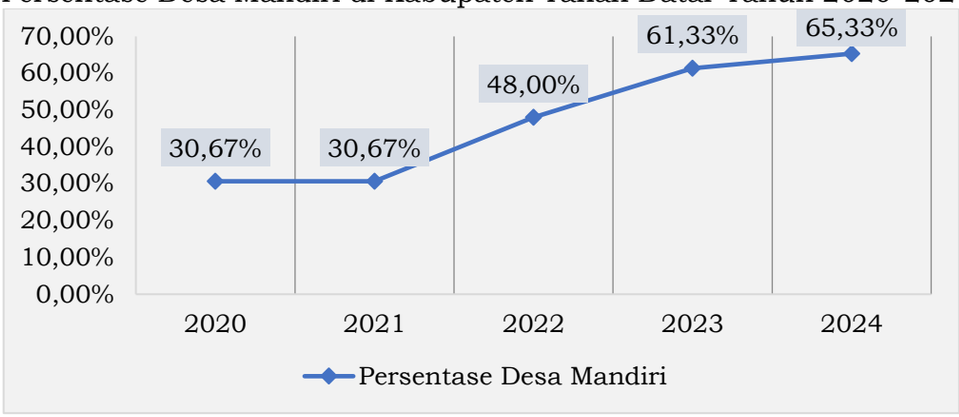
Rumah yang layak huni merupakan hak dasar setiap individu dan keluarga, serta merupakan komponen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya-upaya untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni merupakan bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan pada tahun 2024 sebesar 60,71% mengalami peningkatan sebesar 4,56% dari tahun 2023 (56,15%).

2. Persentase Desa Mandiri (%)

Desa/Nagari Mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

Persentase nagari mandiri mengacu pada proporsi nagari atau wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau sumber daya dari luar. Ini mencerminkan kemampuan suatu nagari untuk mengatur dan mengelola sumber daya lokalnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakatnya.

Gambar 2.63
Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas PMDPPKB Tanah Datar, 2025

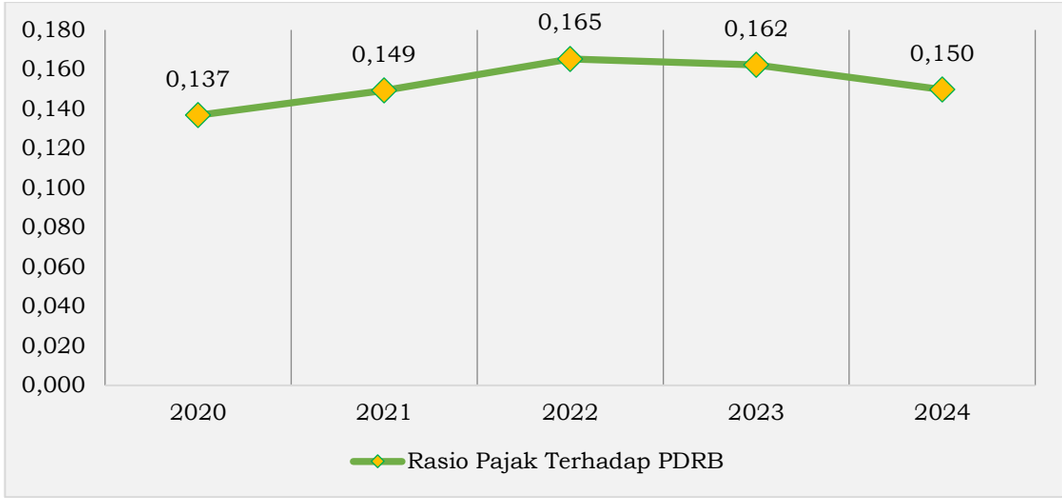
Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Persentase Desa/Nagari Mandiri di Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dari 30,67% pada tahun 2020 menjadi 65,33% pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2024 dari 75 (tujuh puluh lima) nagari yang ada sebanyak 49 (empat puluh sembilan) nagari sudah mandiri.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah, persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan didaerah.

Gambar 2.64
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024




Sumber: BPS, 2025

Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB selama lima tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2024 ini hanya berada pada angka 0,150 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,162. Tetapi capaian selama lima tahun terakhir ini masih berada di bawah 1%. Jika dibandingkan dengan nilai tambah

yang tercipta di Kabupaten Tanah Datar, kontribusi yang diberikan dari Pajak Daerah terhadap PDRB masih sangat kecil.

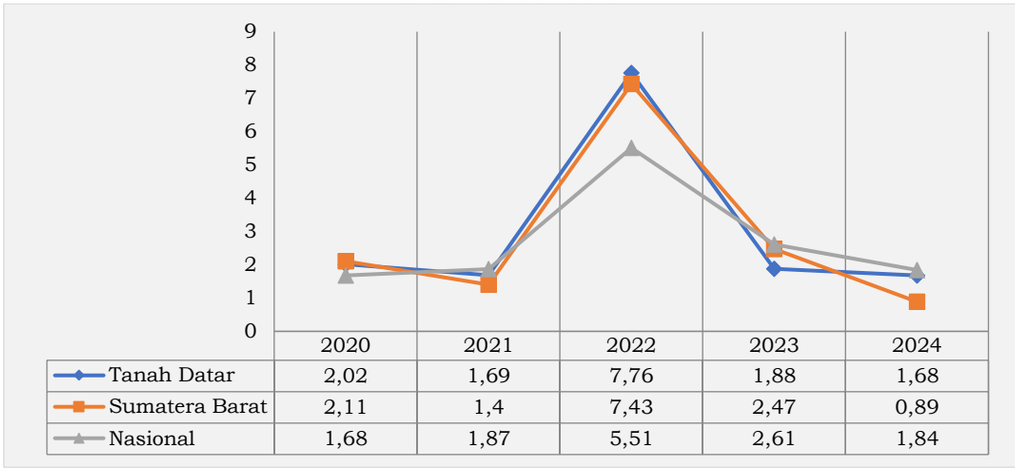
2. Tingkat Inflasi (%)

Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara terus menerus dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi dapat ditunjukkan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK dilakukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari harga barang/jasa yang mencerminkan daya beli masyarakat.

Penghitungan IHK di Provinsi Sumatera Barat hanya dilakukan pada Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Dengan demikian, kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar secara umum dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada wilayah terdekat yaitu Kota Bukittinggi.

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 sebesar 1,68% (mengacu inflasi Kota Bukittinggi). Sedangkan tahun 2023 tingkat inflasi sebesar 1,88%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Tanah Datar menurun dari tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya inflasi ini adalah, pertama pasokan komoditas yang tetap memadai meskipun adanya kenaikan permintaan konsumen cukup menahan inflasi, kestabilan harga yang terus terjaga dan terakhir karena koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Gambar 2.65
Laju Inflasi Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Nasional
Tahun 2020–2024




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanah Datar | 2,02 | 1,69 | 7,76 | 1,88 | 1,68 |
| Sumatera Barat | 2,11 | 1,4 | 7,43 | 2,47 | 0,89 |
| Nasional | 1,68 | 1,87 | 5,51 | 2,61 | 1,84 |

Sumber: BPS , 2025

3. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah

jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB tersebut pada suatu waktu tertentu.

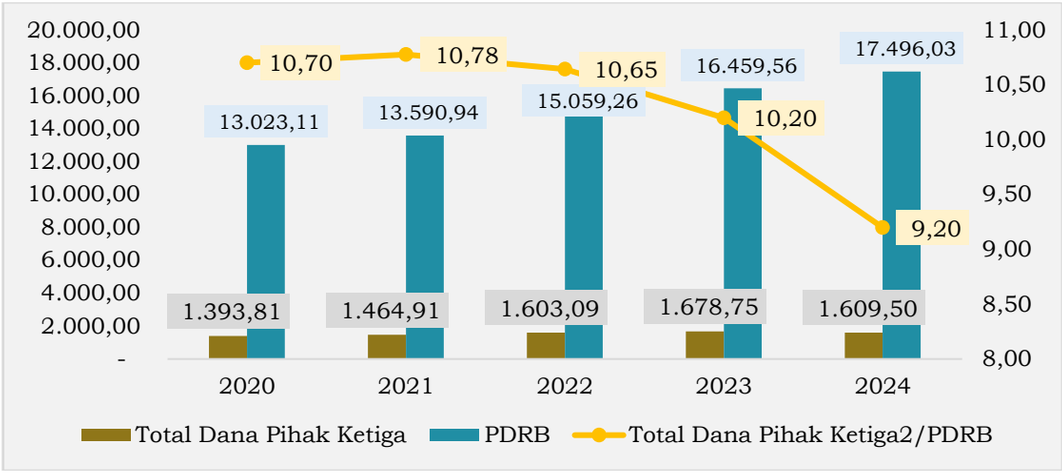
Total dana pihak ke tiga dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup konstan dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada gambar berikut.

Tabel 2.51
Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

| Tahun | Total Dana Pihak Ketiga | PDRB | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.393,81 | 13.023,11 | 10,70 |
| 2021 | 1.464,91 | 13.590,94 | 10,78 |
| 2022 | 1.603,09 | 15.059,26 | 10,65 |
| 2023 | 1.678,75 | 16.459,56 | 10,20 |
| 2024 | 1.609,50 | 17.496,03 | 9,20 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Gambar 2.66
Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

4. Nilai Transaksi Saham Perkapita

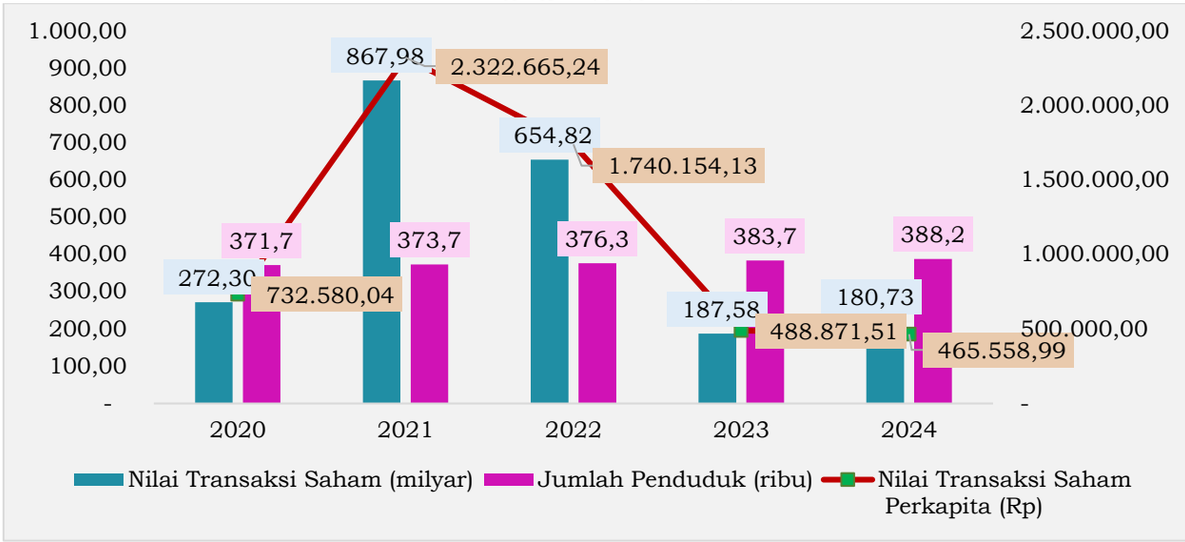
Nilai Transaksi saham per Kabupaten adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili. Nilai Transaksi Saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

Nilai transaksi saham perkapita Kabupaten Tanah Datar selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2020 nilai transaksi saham perkapita sebesar Rp732.580,04 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp2.322.655,24 miliar rupiah, tetapi pada tahun 2022-2024 nilai transaksi saham perkapita mengalami penurunan dari Rp1.740.154,13 miliar rupiah menjadi Rp465.558,99 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam transaksi saham antara lain Kinerja

keuangan Perusahaan yang kurang baik, kurangnya akses terhadap informasi dan layanan investasi saham, masih kuatnya stigma atau kekhawatiran terhadap resiko investasi saham dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang investasi saham dan pasar modal.

Untuk lebih jelasnya perkembangan transaksi saham perkapita dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.67
Nilai Transaksi Saham Perkapita di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020 – 2024




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

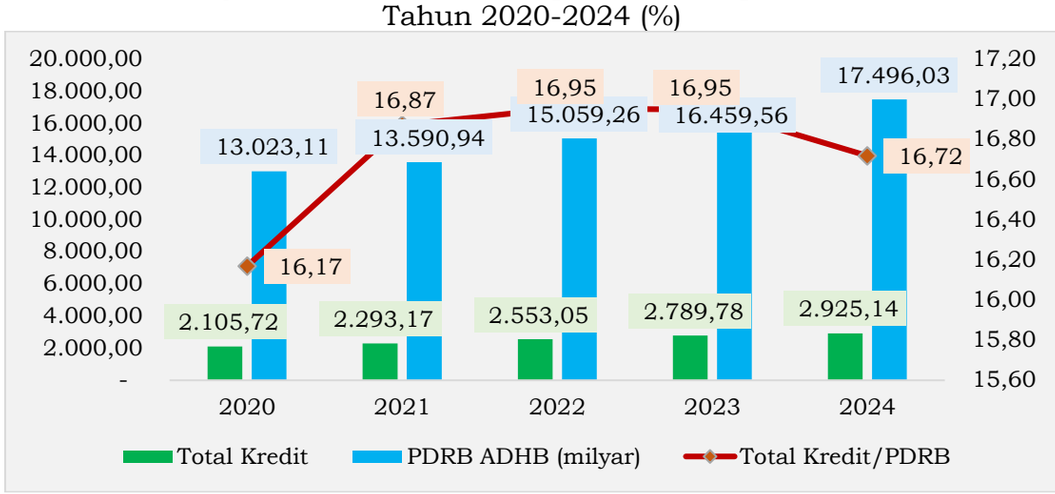
5. Total Kredit/PDRB (%)

Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk bank umum syari'ah dan unit usaha syari'ah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah. Total kredit per PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.

Total Kredit per PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut.

Perkembangan total kredit terhadap PDRB Kabupaten selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 total kredit terhadap PDRB sebesar 16,17, kemudian terjadi kenaikan sejak tahun 2021-2023 yaitu dari 16,87 menjadi 16,95. Tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 16,72, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal, antara lain penurunan permintaan kredit, pengetatan kebijakan perbankan, pertumbuhan PDRB yang lebih cepat daripada kredit, masalah struktural sektor keuangan, krisis ekonomi global dan bencana alam. Secara lebih rinci perkembangan total kredit terhadap PDRB sejak tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.68
Perkembangan Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024 (%)

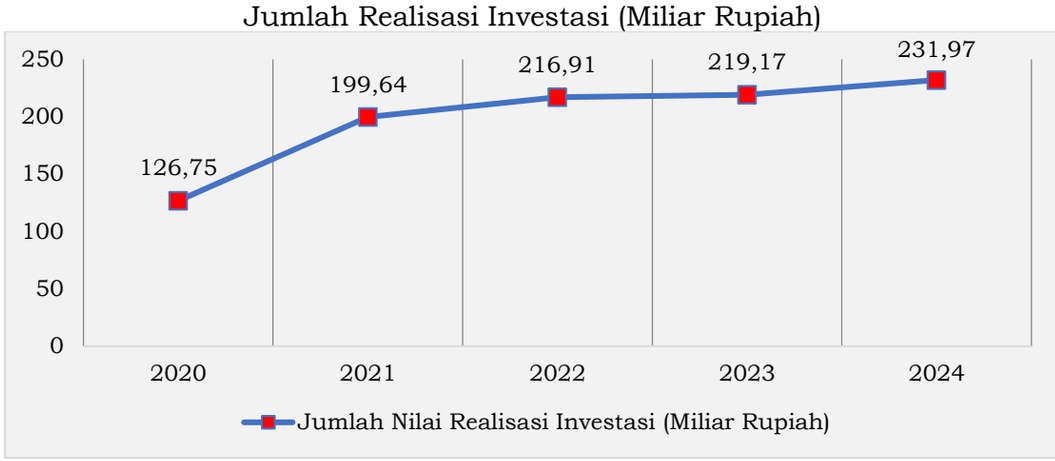



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat, 2024

6. Jumlah Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)

Jumlah Realisasi Investasi merupakan total nilai modal yang telah ditanamkan oleh investor dalam suatu wilayah atau sektor dalam periode tertentu, yang mencerminkan tingkat kepercayaan dan minat investor terhadap potensi ekonomi daerah atau negara tersebut. Angka ini menjadi indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi, karena semakin tinggi nilai realisasi investasi, semakin besar kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah biasanya menggunakan data ini sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong iklim investasi yang kondusif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Gambar 2.69
Jumlah Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)




Sumber: Dinas PMPTSP, 2025

Dari gambar diatas, terlihat bahwa Jumlah Nilai Realisasi Investasi mengalami tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai realisasi investasi tercatat sebesar Rp126,75 miliar rupiah, kemudian naik tajam pada tahun 2021 menjadi Rp199,64 miliar rupiah. Setelah itu, peningkatan nilai investasi terus berlanjut dengan laju yang lebih stabil, yaitu Rp216,91 miliar rupiah pada tahun 2022, Rp219,17 miliar rupiah pada tahun 2023, dan diperkirakan mencapai Rp231,97 miliar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kepercayaan yang semakin kuat dari investor terhadap potensi ekonomi, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

7. Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Syari'ah

Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Syariah mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memperkuat sektor keuangan berbasis syariah sebagai bagian dari sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan jumlah lembaga jasa keuangan syariah, seperti bank syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan unit usaha syariah, menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menyediakan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan yang halal dan adil. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Selain itu, peningkatan jumlah lembaga jasa keuangan syariah di RPJMD juga berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dengan bertambahnya lembaga keuangan syariah, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, tabungan, dan layanan keuangan lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika Islam. Indikator ini merupakan indikator baru dan belum memiliki data capaian untuk tahun-tahun sebelumnya. Direncanakan akan dimulai dilakukan perhitungan pada tahun 2025.

8. Jumlah Koperasi syariah

Indikator Jumlah Koperasi Syariah menunjukkan jumlah lembaga koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasionalnya, seperti sistem bagi hasil, larangan riba, dan keadilan dalam transaksi. Meningkatnya jumlah koperasi syariah mencerminkan pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah yang inklusif dan berkeadilan, serta tingginya minat masyarakat terhadap alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip agama. Koperasi syariah juga berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, khususnya di sektor mikro dan menengah, karena mampu menyediakan akses pembiayaan yang adil dan terjangkau. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah di tingkat daerah. Indikator ini merupakan indikator baru dan belum memiliki data capaian untuk tahun-tahun sebelumnya. Direncanakan akan dimulai dilakukan perhitungan pada tahun 2025.

9. Persentase jumlah pelaku usaha mikro ekonomi digital

Indikator Persentase Jumlah Pelaku Usaha Mikro Ekonomi Digital menunjukkan proporsi pelaku usaha mikro yang telah memanfaatkan platform digital dalam menjalankan usahanya, seperti melalui *e-commerce*, media sosial, aplikasi pembayaran digital, atau sistem pemasaran online lainnya. Tingginya persentase ini mencerminkan tingkat adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha kecil sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemanfaatan ekonomi digital oleh usaha mikro berperan penting dalam memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat lokal. Indikator ini merupakan indikator baru dan belum memiliki data capaian untuk tahun-tahun sebelumnya. Direncanakan akan dimulai dilakukan perhitungan pada tahun 2025.

10. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) bersertifikat Halal

Indikator jumlah IKM Bersertifikat Halal mencerminkan jumlah pelaku usaha kecil dan menengah yang telah memperoleh sertifikasi halal atas produk yang mereka hasilkan, sebagai bentuk jaminan kepatuhan terhadap standar kehalalan dan kebersihan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Peningkatan jumlah IKM bersertifikat halal menunjukkan kesadaran dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi tuntutan pasar, khususnya konsumen Muslim yang mengutamakan aspek halal dalam konsumsi. Selain itu, indikator ini juga menjadi bagian dari strategi penguatan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional, sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal nasional. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu terus mendukung fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM agar produk mereka memiliki nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas. Indikator ini merupakan indikator baru dan belum memiliki data capaian untuk tahun-tahun sebelumnya. Direncanakan akan dimulai dilakukan perhitungan pada tahun 2025.

11. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Rasio PDRB jasa keuangan adalah perbandingan antara nilai PDRB sektor jasa keuangan dengan nilai PDRB total suatu wilayah dalam periode tertentu.

Rasio PDRB jasa Keuangan terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif, dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,64%, sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,55%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.70
Rasio PDRB Jasa Keuangan di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024 (%)




Sumber: Tanah Datar Dalam Angka, 2025

## 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

### 2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Indeks reformasi hukum merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat reformasi dan keberhasilan dalam melakukan perubahan dalam sistem hukum suatu negara. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana negara tersebut

telah melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, transparansi, dan perlindungan hukum.

Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah baru mulai dilaksanakan pada tahun 2022, dan sampai saat ini nilai Indeks Reformasi Hukum yang sudah dipublikasikan mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024.

Tabel 2.52
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024

| No. | Tahun | Nilai |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | - |
| 2. | 2021 | - |
| 3. | 2022 | 79,05 |
| 4. | 2023 | 86,85 |
| 5. | 2024 | 98,58 |

Sumber: Kemenkumham RI, 2024

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tanah Datar dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan reformasi hukum di Kabupaten Tanah Datar semakin baik.

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah telah melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata kelola birokrasi, termasuk aspek efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Indeks ini mencerminkan kemampuan birokrasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui pengukuran ini, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Tabel 2.53
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

| No. | Tahun | Nilai |
|---|---|---|
| 1. | 2020 | 62,32 |
| 2. | 2021 | 63,04 |
| 3. | 2022 | 64,51 |
| 4. | 2023 | 66,72 |
| 5. | 2024 | 78,05 |

Sumber: Kemenpan RB, 2024

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Datar dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa proses perbaikan dalam tata kelola birokrasi berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Peningkatan indeks tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dari instansi pemerintah.

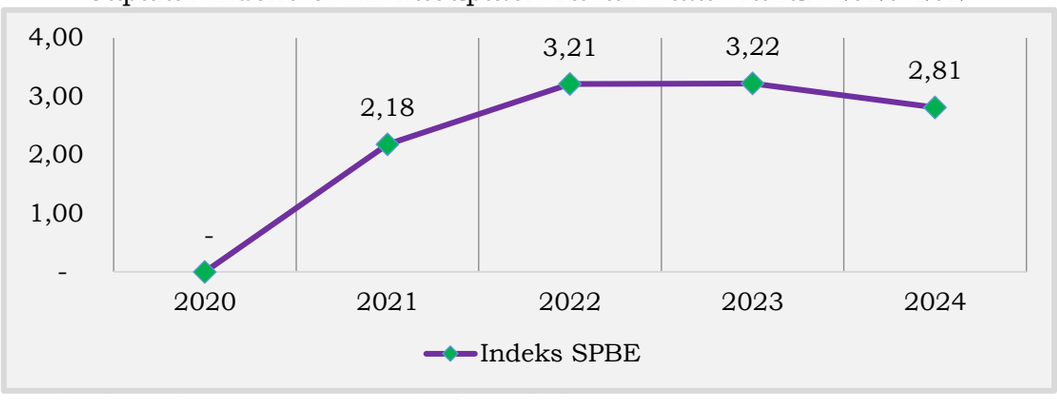
3. Indek Pemerintah Digital

Indikator Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) merupakan ukuran yang mencerminkan tingkat kematangan dan efektivitas pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan berbasis data. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi, interoperabilitas layanan, serta kebijakan pendukung transformasi digital. Semakin tinggi nilai indeks Pemdi, semakin baik kemampuan pemerintah dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan indeks ini menjadi tolok ukur penting dalam mewujudkan birokrasi modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Indikator ini belum memiliki data capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik.

Gambar 2.71
Capaian Indeks SPBE Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Dinas Kominfo Tanah Datar, 2025

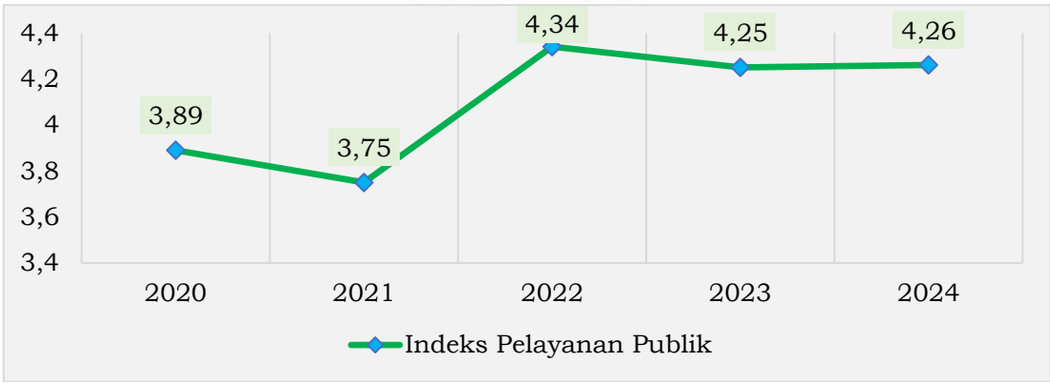
Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa capaian indeks SPBE Kabupaten Tanah Datar di tahun 2020 tidak dilakukan penilaian capaian indeks SPBE dikarenakan oleh Pandemi *Covid-19*. Selanjutnya dari tahun 2021 sampai tahun 2023 capaian indeks SPBE Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan menjadi 3,22 tetapi pada tahun

2024 mengalami penurunan menjadi 2,81, hal ini disebabkan adanya tantangan dalam konsistensi penerapan tata kelola pemerintahan digital di Kabupaten Tanah Datar. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pembaruan pada infrastruktur teknologi informasi, minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, serta belum optimalnya integrasi sistem antar instansi. Selain itu, lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE juga dapat menyebabkan stagnasi atau bahkan kemunduran dalam efisiensi dan kualitas layanan digital publik. Penurunan nilai indeks ini perlu menjadi perhatian serius, karena SPBE merupakan fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

5. Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan meningkatnya pelayanan publik, maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman dalam mendapatkan pelayanan (pelayanan prima). Capaian nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.72
Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024



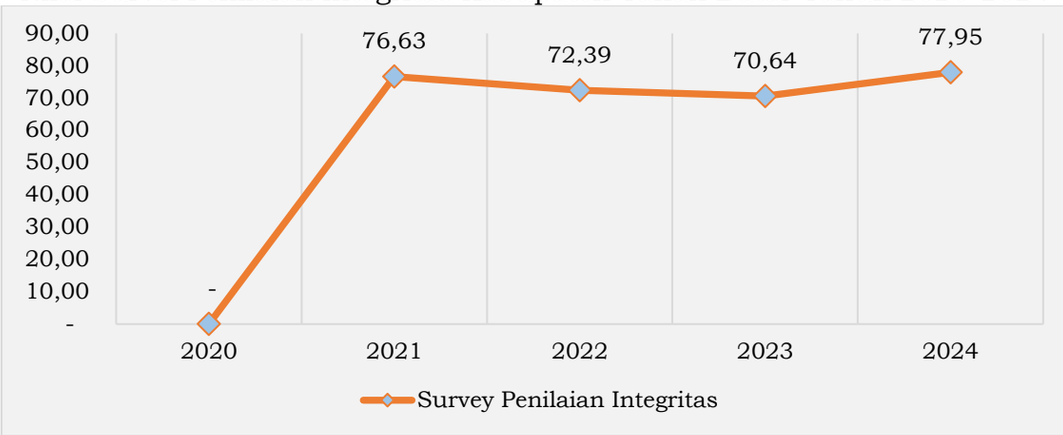

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 merupakan nilai tertinggi yaitu 4,34. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi Peluk Tanda Diri (Pelayanan Publik di Tanah Datar di Ujung Jari) yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

6. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilaksanakan oleh KPK dengan tujuan untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli *(expert).* Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi tersebut.

Gambar 2.73
Nilai Survei Penilaian Integritas Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Inspektorat Daerah KabupatenTanah Datar, 2025

Berdasarkan data gambar diatas nilai Survei Penilaian Integritas Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2024 naik menjadi 77,95 jika dibandingkan tahun 2023 yaitu 70,64, ini menunjukkan bahwa risiko korupsi di Kabupaten Tanah Datar sudah menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Subtansial

1. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Trantibum

Penyelesaian kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Trantibum) di Indonesia biasanya melibatkan proses hukum sesuai dengan peraturan daerah atau nasional yang berlaku. Proses ini dapat mencakup pengumpulan data, investigasi, dan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Di Kabupaten Tanah Datar, penyelesaian kasus pelanggaran trantibum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2020-2024) sebesar 100%.

2. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM di Kabupaten Tanah Datar mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil merealisasikan program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia sesuai dengan rencana aksi nasional. Capaian ini biasanya diukur melalui indikator-indikator terukur, seperti penyediaan layanan publik yang inklusif, pemenuhan hak-hak kelompok rentan, peningkatan akses terhadap keadilan, serta pelaksanaan kegiatan yang mendorong kesetaraan dan nondiskriminasi. Semakin tinggi persentase capaian yang diraih, semakin menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya secara optimal untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, baik melalui kebijakan maupun implementasi program yang efektif. Kabupaten Tanah Datar menunjukkan performa kuat sebagai wilayah peduli HAM, dengan capaian nilai tertinggi (100) di akhir periode penilaian Tahun 2023.

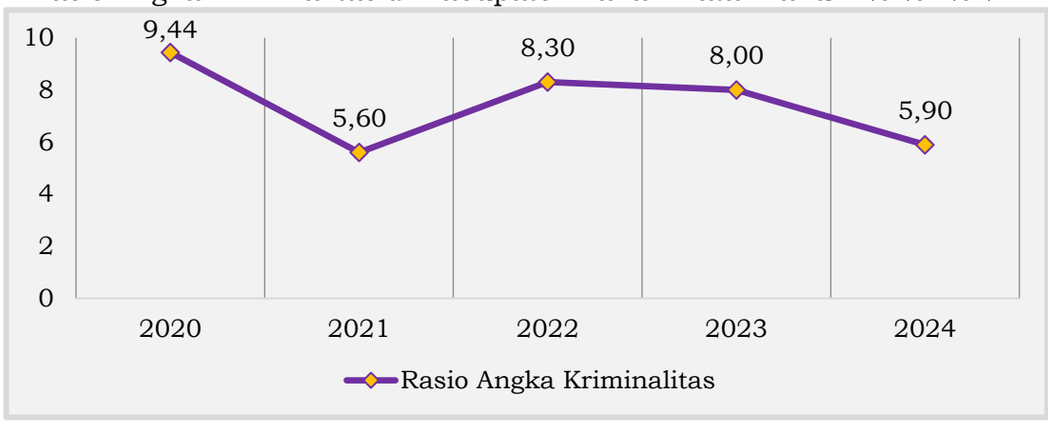
Di sisi lain, fluktuasi atau capaian yang belum maksimal dapat menjadi sinyal adanya tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program HAM. Oleh karena itu, peningkatan capaian Aksi HAM memerlukan langkah strategis, antara lain memperkuat komitmen pemerintah daerah, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas aparatur dalam perspektif HAM, serta

memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi. Upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa implementasi Aksi HAM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

3. Rasio Angka Kriminalitas

Rasio Angka Kriminalitas merupakan jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan dikalikan 100.000. Rasio Angka Kriminalitas Kabupaten Tanah Datar selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 rasio angka kriminalitas sebesar 9,44 menjadi 5,90 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan tingkat kriminalitas cenderung menurun di Kabupaten Tanah Datar, selain itu juga menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah yang aman.

Gambar 2.74
Rasio Angka Kriminalitas di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024

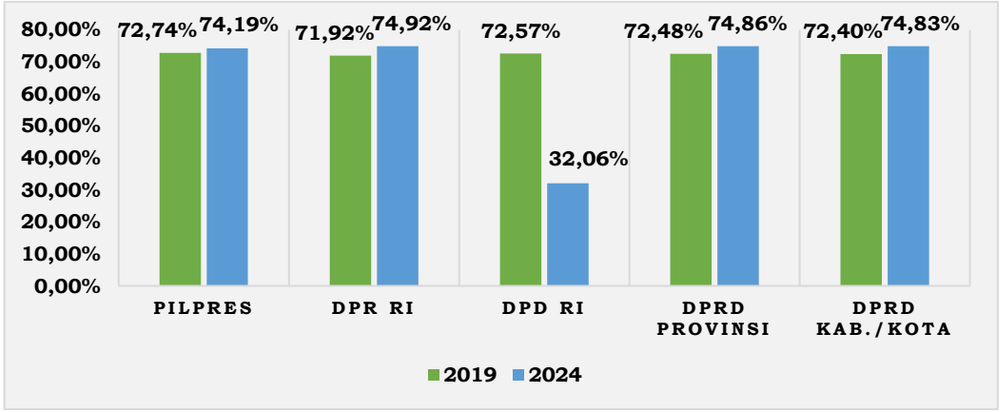



Sumber: Badan Kesbangol Tanah Datar 2025

4. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu

Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2024 secara umum mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg tahun 2019, akan tetapi tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Tanah Datar untuk pemilihan anggota DPD RI pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilihan anggota DPD RI pada tahun 2019, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.75
Tingkat Pasrtisipasi Pemilih Kabupaten Tanah Datar pada Pilpres dan Pileg Tahun 2019- 2024




Sumber: Kesbangpol, 2025

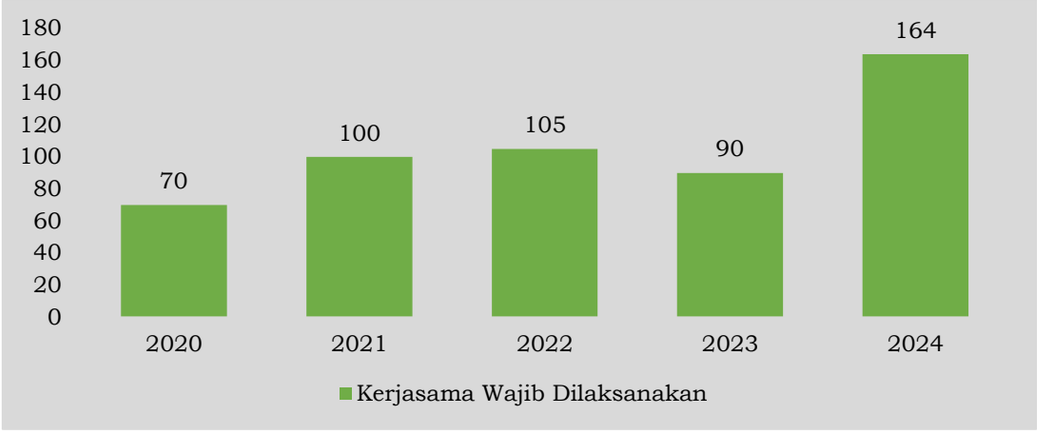
Sedangkan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Tanah Datar sebesar 61,01%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 59,25%. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 ini lebih rendah jika dibandingkan terhadap pemilihan umum presiden dan legislatif.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Persentase Kerja Sama Wajib yang Dilaksanakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerja sama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama wajib dilaksanakan merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Gambar 2.76
Persentase Kerja sama Wajib Dilaksanakan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024




Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, 2025

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir persentase kerja sama wajib dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar berfluktuatif, dimana lebih cenderung naik jika dibandingkan dari tahun 2020. Kenaikan paling tinggi terjadi di tahun 2024 ini yaitu sebesar 164 (serratus enam puluh empat).

2. Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana

Menurut Badan Pusat Statistik tingkat penyelesaian tindak pidana mengacu pada persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:

1) berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan;
2) dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
3) telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan asas *plichmatigheid* (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum);
4) kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian;
5) tersangka meninggal dunia; dan
6) kasus kadaluwarsa.

Untuk Tingkat penyelesaian tindak pidana selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi, dimana pada tahun 2024 sebesar 92,00%, untuk data lebih rinci dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.77
Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024




Sumber: BPS Sumatera Barat, 2025

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah (Indikator Kinerja Kunci)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan sejauh mana suatu kabupaten atau kota berhasil melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. IKK digunakan untuk mengevaluasi capaian daerah terhadap urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketenteraman, dan sosial berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspek pelayanan umum selama kurun waktu 2020-2024 secara umum memperlihatkan perkembangan belum siginifikan karena adanya peningkatan atau penurunan indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang masing-masing yang diklasifikasikan berdasarkan urusan dan unsur pemerintahan daerah. Perkembangan indikator-indikator kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah Tahun 2020-2024, dapat dijelaskan berikut ini.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan pendidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan konkuren. Urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk menggambarkan capaian urusan wajib pendidikan akan di analisis beberapa indikator urusan wajib pendidikan diantaranya; Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama dan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Tingkat partisipasi penduduk usia tertentu menggambarkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Perkembangan tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun pada jenjang pendidikan PAUD periode tahun 2020-2024 cenderung

menurun dari 75,20 tahun 2020 turun menjadi 67,79 tahun 2024. Sedangkan tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang pendidikan dasar periode tahun 2020-2024 menunjukkan pencapaian angka yang menurun pada tahun 2024 sebesar 97,32. Sementara itu, tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang pendidikan menengah pertama cenderung menurun dari 97,70 tahun 2020 turun menjadi 81,85 di tahun 2024. Perkembangan tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang pendidikan kesetaraan periode tahun 2021-2024 cenderung meningkat, tetapi pada tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Perkembangan indikator urusan pemerintahan bidang pendidikan tahun 2020-2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 75,20 | 88,85 | 69,82 | 78,27 | 67,79 |
| 2. | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 101,37 | 98,69 | 94,68 | 91,88 | 97,32 |
| 3. | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | 97,70 | 96,70 | 80,12 | 79,91 | 81,85 |
| 4. | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 61,21 | 97,98 | 96,19 | 79,51 | 29,15 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator urusan pemerintahan di bidang pendidikan menunjukkan nilai fluktuatif. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan anggaran, rotasi tenaga pendidik, kendala infrastruktur serta dampak kondisi eksternal seperti bencana atau pandemi. Selain itu, belum meratanya kualitas dan akses layanan pendidikan antarwilayah juga turut memengaruhi stabilitas capaian indikator tersebut. Ketidakstabilan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh dan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan urusan pendidikan agar pencapaian indikator dapat lebih konsisten dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan secara merata.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya. Dalam kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata dan inklusif. Derajat kesehatan dilihat dari indikator rasio daya tampung RSUD dan status akreditasi RSUD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi, anak-anak dan lansia, penderita penyakit menular seperti TBC dan HIV, penderita diabetes dan penderita ODGJ.

Secara umum perkembangan kinerja urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020-2024 sudah menunjukkan hasil yang lebih baik, hal ini tergambar dari akses dan layanan Kesehatan yang meningkat, walaupun belum tercapai secara optimal. Sehingga perlu menjadi perhatian dalam perumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar jangka menengah.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang kesehatan tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan | 0,08 | 0,08 | 0,79 | 0,77 | 0,76 |
| 2. | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | 74,38 | 97,62 | 100,00 | 100,00 | 97,96 |
| 4. | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 90,01 | 97,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 85,90 | 99,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6. | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 47,22 | 97,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7. | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 0,00 | 66,28 | 93,36 | 100,00 | 31,21 |
| 8. | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 42,49 | 86,22 | 90,83 | 22,01 | 20,58 |
| 9. | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 39,14 | 95,82 | 62,19 | 41,02 | 59,98 |
| 10. | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 50,60 | 90,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11. | Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12. | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 66,62 | 99,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13. | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14. | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Pencapaian indikator urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang nilainya cenderung baik menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar berjalan dengan cukup efektif. Hal ini tercermin dari membaiknya indikator-indikator seperti persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dan persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Capaian yang positif ini juga mencerminkan keberhasilan dalam penguatan sistem pelayanan kesehatan primer, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta efektivitas program promotif dan preventif yang menjangkau masyarakat luas. Tren capaian yang konsisten ini menjadi sinyal bahwa tata kelola sektor kesehatan di daerah berada pada jalur yang tepat, dan perlu terus didorong agar lebih merata serta berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejak tahun 2020-2024 secara umum sudah membaik tetapi belum optimal, dan merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah secepatnya dan perlu penanganan yang lebih serius.

Untuk perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Tahun 2020-2024, dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 2.56
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota | 65,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 7,62 |
| 2. | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 49,39 | 57,94 | 54,65 | 24,67 | 31,08 |
| 4. | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan | 72,32 | 73,81 | 75,55 | 76,51 | 76,55 |

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%) | | | | | |
| 5. | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 13,50 | 14,20 | 15,10 | 16,00 | 85,97 |
| 6. | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7. | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | 76,67 | 77,67 | 77,54 | 78,10 | 69,89 |
| 8. | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 42,11 | 100,00 | 70,10 | 78,69 | 6,73 |
| 9. | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Pencapaian indikator urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang menunjukkan nilai fluktuatif, hal ini disebabkan oleh belum optimalnya dalam pelaksanaan program infrastruktur dasar seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase serta penyediaan air bersih dan sanitasi. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan dalam manajemen proyek, peningkatan kapasitas pelaksana teknis, serta komitmen anggaran yang berkelanjutan agar pencapaian indikator pekerjaan umum dapat lebih konsisten dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kemampuan pemerintah dalam menyediaan rumah layak huni, lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU serta tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini terlihat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota. Secara umum kinerja terhadap penyediaan rumah layak huni sudah membaik.

Perkembangan capaian indikator pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini selama tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2. | Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani | 2,87 | 2,71 | 9,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | 1,409 | 768 | 8,909 | 10,909 | 10,679 |
| 5. | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | 0,78 | 8,99 | 11,22 | 10,52 | 10,25 |
| 6. | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 54,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 19,27 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Pencapaian indikator urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menunjukkan nilai fluktuatif hal ini memperlihatkan adanya tantangan dalam penyediaan hunian layak dan penataan lingkungan permukiman secara berkelanjutan. Capaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan serta kendala dalam pendataan rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran program. Selain itu, faktor eksternal seperti bencana alam atau perubahan kebijakan juga dapat memengaruhi stabilitas capaian indikator dari tahun ke tahun.

Sampai dengan tahun 2025, terdapat 20 (dua puluh) kompleks perumahan yang terdata pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Dari 20 (dua puluh) kompleks tersebut baru 2 (dua) kompleks perumahan (Perumahan Bintang Rizano Regency dan Bukit Bintang Rizano) yang sudah memenuhi kewajiban menyerahkan aset PSU kepada pemerintah daerah, sisanya masih dalam proses penyerahan. Berikut ini adalah data perumahan yang dimaksud:

1) Bintang Rizano Regency;
2) Bukit Bintang Rizano;
3) Permata Rizano II;
4) Taman Rizano;
5) Livialand Residence;
6) Aldi Residence I;
7) Aldi Residence II;
8) Aldi Residence III;
9) Aldi Residence IV;
10) Vistaria Residence;
11) Aldi Residence V;
12) Villa Taman Mutiara;
13) Sukohill;
14) Melia Garden;
15) Bukik Sangok Permai;
16) Baringin Asri;
17) Pagaruyung Asri;
18) Polak Lowe Residence;
19) Bellirum Indah 1; dan

20) Terra Maxima Residence.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2020-2024 yang diukur berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja masing-masing indikator sudah sesuai dengan target SPM.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,13 |
| 3. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 225.000 | 208.937 | 100 | 100 | 95,55 |
| 4. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 2.250 | 1.650 | 100 | 100 | 0,57 |
| 5. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 14.200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 | 100 | 98,23 | 94,52 | 71,23 |
| 7. | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | 6,67 | 8,15 | 7,06 | 5,93 | 11,16 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Pencapaian indikator urusan pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang menunjukkan nilai yang cukup baik. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Capaian ini juga didukung oleh peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan pengawasan. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, hasil yang cukup baik ini menjadi indikator positif bahwa upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem keamanan dan perlindungan masyarakat mulai menunjukkan hasil yang nyata dan berdampak langsung terhadap kehidupan warga.

f. Urusan Wajib Sosial

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang sosial tahun 2020-2024 yang diukur berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar

pada tahun 2024 sebesar 100%. Perkembangan indikator urusan wajib sosial yang sudah mencapai 100% yaitu, persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar. Perkembangan indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Perkembangan Indikator Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator Kinerja Kunci SPM) | 12,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Pencapaian indikator urusan pemerintahan di bidang sosial yang menunjukkan nilai yang cenderung baik mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada kelompok rentan secara efektif dan tepat sasaran. Nilai yang baik ini menunjukkan bahwa program-program seperti rehabilitasi sosial, bantuan sosial serta perlindungan bagi lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan korban bencana sosial telah berjalan dengan baik dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Capaian ini juga tidak lepas dari peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), peningkatan kapasitas tenaga sosial serta sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya, dan masyarakat. Hasil ini menjadi bukti bahwa upaya membangun sistem pelayanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Capaian indikator kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja secara umum dapat dilihat dari: 1) persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja, 2) persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, 3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, 4) persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak, dan 5) persentase tenaga kerja yang ditempatkan. Capaian indikator persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja pada tahun 2024 menurun dari 100% tahun 2023 turun menjadi 33,33 % tahun 2024, hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya daerah. Sedangkan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi pada tahun 2024 menurun secara signifikan dari 6,44% pada tahun 2023 menjadi 0,14%. Disisi lain, capaian kinerja dalam peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan dari 11,41% tahun 2023 turun menjadi 12,84% tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan sulitnya lapangan kerja bagi angkatan kerja mendapatkan kesempatan kerja pada industri atau lapangan kerja formal. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang tenaga kerja tahun 2020-2024.

Perkembangan indikator kinerja bidang urusan tenaga kerja sebagai berikut.

Tabel 2.60
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 33,33 |
| 2. | PersentaseTenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 0,01 | 0,92 | 0,13 | 6,44 | 0,14 |
| 3. | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Orang/ Tahun) | 56,08 | 59,69 | 59,14 | 54,41 | 54,35 |
| 4. | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 55,82 | 55,82 | 15,84 | 5,08 | 0,42 |
| 5. | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | 9,14 | 9,70 | 8,12 | 11,41 | 12,84 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020-2024 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Hal ini ditandai indikator persentase ARG terhadap APBD pada tahun 2024 sebesar 2,47% atau naik dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,23%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pengalokasian anggaran responsif terhadap pemberdayaan perempuan. Sementara angka kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 10,46 per 100.000 penduduk hingga tahun 2024 atau naik secara signifikan dari tahun 2023 sebesar 5,74. Hal ini memperlihatkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan cukup tinggi. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani sudah mencapai 100 persen yang artinya seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan sudah tertangani dengan baik.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | 21,96 | 0,01 | 3,49 | 1,24 | 2,47 |
| 2. | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota | 100,00 | 0,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | 3,21 | 4,27 | 1,06 | 4,72 | 10,46 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Indikator persentase ketersediaan pangan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 sebesar 17,63%. Angka tersebut, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 33,88% sehingga menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Tanah Datar kurang aman. Kondisi ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat beragam dan bergizi seimbang cenderung rendah. Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | 18,20 | 21,50 | 29,63 | 33,88 | 17,63 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, aset bangsa. Manajemen aset tanah sangat penting dirasakan bagi mereka yang berpendapatan sebagai pengusaha daripada sebagai pegawai atau buruh. Begitu pentingnya manajemen aset tanah, sehingga pada awalnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dalam konsideran telah mengamanatkan bahwa dengan diundangkanya UUPA, Pemerintah/Negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah. Keberhasilan kinerja urusan bidang pertanahan dapat digambarkan melalui persentase penyelenggaraan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan, persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dan persentase penanganan sengketa tanah ulayat melalui mediasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | 100,00 | 0,00 | 94,63 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | 100,00 | 0,00 | 90,06 | 6,04 | 589,81 |
| 3. | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal | 100,00 | 0,00 | 88,50 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tersedianya tanah untuk masyarakat | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hingga tahun 2024 sebesar 65,32 atau turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 71,99. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan terjadinya pencemaran air, karena adanya aktivitas kegiatan masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sehingga berdampak terhadap kualitas air secara langsung. Sedangkan nilai indeks tutupan lahan mengalami penurunan karena belum optimalnya dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sementara itu, kualitas udara di kategori tinggi karena Kabupaten Tanah Datar didominasi kawasan hutan yang masih terjaga keasriannya. Disisi lain, pengelolaan persampahan belum optimal karena keterbatasan sumber daya pemerintahan daerah, sehingga tingkat penanganan dan pengurangan sampah hingga tahun 2024 tercapai sebesar 56,43%. Perkembangan capaian kinerja Bidang Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | 77,19 | 64,62 | 74,17 | 71,99 | 65,32 |
| 2. | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%) | 51,98 | 52,85 | 53,28 | 54,20 | 56,43 |

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3. | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | 46,67 | 32,43 | 45,10 | 40,38 | 42,00 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk merupakan salah satu modal utama pembangunan yang perlu mendapat perhatian yang serius agar penerapan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi penting dalam perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indinesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Kependudukan (SIAK). Kemudian untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem tersebut maka pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Namun demikian, kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil periode 2020-2024 sudah baik.

Capaian rasio penduduk usia 17 tahun memiliki KTP-el sebanyak 98,08% pada tahun 2024, kondisi ini sedikit mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 98,62%. Sedangkan untuk persentase anak usia 1-17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 93,48% atau naik dibanding tahun 2023 sebesar 50,66%. Angka tersebut, telah melebihi target Nasional sebesar 30%, sehingga kepemilikan KIA untuk tahun berikutnya perlu dijadikan prioritas utama, disamping kepemilikan KTP-el yang capaiannya belum 100%. Sedangkan pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah hingga Tahun 2024 sudah mencapai 97,56%.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Perekaman KTP elektronik | 95,28 | 100,00 | 100,00 | 98,62 | 98,08 |
| 2. | Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 23,84 | 31,64 | 51,02 | 50,66 | 93,48 |
| 3. | Kepemilikan akta kelahiran | 94,29 | 96,58 | 97,93 | 98,31 | 99,64 |
| 4. | Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | 25,64 | 41,03 | 100,00 | 97,50 | 97,56 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian indikator-indikator yang digunakan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk membangun nagari/desa cukup tinggi di bidang ekonomi sosial dan lingkungan. Kondisi ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan sangat kuat.

Peningkatan status Nagari/Desa Mandiri pada tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan dari 46,15% tahun 2021 naik menjadi 100% tahun 2024. Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun 2020-2024, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase pengentasan desa tertinggal | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Persentase peningkatan status desa mandiri | 0,00 | 46,15 | 71,43 | 100 | 100 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhasil dapat dilihat dari indikator Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR), Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), dan Persentase Kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi. Angka Kelahiran Total /*Total Fertility Rate* (TFR) hingga Tahun 2024 menurun pada diangka 0,18 dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,41. Artinya, rata rata jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga di Kabupaten Tanah Datar adalah 0,18. Sedangkan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi tahun 2020–2024 cenderung fluktuatif. Hal ini ditandai pada tahun 2020 terdapat 14,69% kebutuhan ber-KB yang tidak terepenuhi dan tahun 2021 - 2022 terus mengalami kenaikan menjadi masing-masing 22,99% dan 27,24%, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 14,02% dan 8,44% kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi.

Perkembangan indikator kinerja urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | TFR (Angka Kelahiran Total) | 3,20 | 2,20 | 2,02 | 0,41 | 0,18 |
| 2. | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR) | 70,94 | 51,98 | 59,06 | 64,85 | 66,96 |
| 3. | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) | 14,69 | 22,99 | 27,24 | 14,02 | 8,44 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Perkembangan Rasio konektivitas kabupaten/kota pada tahun 2024 sebesar 0,44% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 12,00%. Sementara itu untuk indikator Kinerja lalu lintas kabupaten/kota pada tahun 2024 sebesar 0,14% atau turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,15%.

Tabel 2.68
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Rasio konektivitas kabupaten/kota | 12,00 | 1,00 | 0,10 | 12,00 | 0,44 |
| 2. | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |

Sumber: Dinas Perhubungan 2025

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan didalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Cakupan layanan internet di wilayah Kabupaten Tanah Datar sebarannya didominasi oleh jaringan nirkabel dengan suplai bandwith dari BTS (*Base Transceiver Station*) operator baik GSM maupun CDMA / WCDMA.

Secara fisik sebaran BTS sudah hampir merata di setiap wilayah kabupaten Tanah Datar terutama lokasi-lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Namun karena kondisi geografi dan topografi yang berbukit-bukit maka yang menjadi faktor pembatas jangkauan BTS bukan hanya masalah jarak tetapi juga keterhalangan oleh topografi yang berbukit-bukit. Masih banyak lokasi yang sebenarnya jaraknya cukup dekat dengan BTS tetapi tidak dapat menerima signal internet. Sedangkan persentase Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah telah mencapai 100%. Sedangkan persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah sudah berada pada angka

100% pada tahun 2024 atau mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 67,05%.

Perkembangan indikator kinerja urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 60,00 | 43,75 | 20,00 | 36,17 | 76,47 |
| 3. | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | 4,43 | 95,26 | 93,51 | 67,05 | 100,00 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu barometer ekonomi daerah yang berbasiskan ekonomi kerakyatan. Keberhasilan urusan Wajib Koperasi dan UMKM dapat dilihat dari capaian indikator persentase koperasi yang berkualitas dan Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi wirausahaan. Perkembangan indikator kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | 31,56 | 8,37 | 66,67 | 61,23 | 13,33 |
| 2. | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha | 4,56 | 0,89 | 1,67 | 2,28 | 0,46 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Indikator meningkatnya koperasi yang berkualitas diukur dari persentase koperasi aktif yang memenuhi kriteria sehat atau berkinerja baik, namun data dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, persentasenya mencapai 31,56%, lalu mengalami penurunan tajam menjadi 8,37% pada 2021. Tahun 2022 mencatat lonjakan drastis hingga 66,67%, mengindikasikan adanya upaya perbaikan atau pembinaan koperasi yang berhasil. Namun, tren ini tidak konsisten karena persentase kembali menurun menjadi 13,33% di tahun 2024.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Peningkatan realisasi investasi penanaman modal selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, hal ini ditandai pada tahun 2020 tercapai sebesar 10,93% dan naik pada tahun 2021 sebesar 26,32%, selanjutnya mengalami penurunan secara signifikan sampai pada tahun 2023 sebesar 1,04% dan kembali naik pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 5,84%. Berfluktuasinya peningkatan realisasi PMDN ini mencerminkan belum stabilnya stabilitas ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat. Selain indikator-indikator diatas, keberhasilan urusan wajib penanaman modal juga diukur dengan lama proses perizinan dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan. Lama proses perizinan selama tahun 2020-2024 telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yaitu paling lambat lima hari kerja.

Perkembangan indikator urusan pemerintahan bidang penanaman modal Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.71
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | 10,93 | 26,32 | 8,65 | 1,04 | 5,84 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Untuk keberhasilan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat diukur dari capaian indikator; 1) tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; 2) tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan 3) peningkatan prestasi olahraga. Perkembangan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kabupaten Tanah Datar cenderung menurun, dari 2,97% tahun 2023 menjadi 2,21% tahun 2024, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Datar cenderung meningkat terlihat dari 3,46% tahun 2020 naik menjadi 5,55% tahun 2024. Peningkatan angka tersebut, dikarenakan meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi. Sedangkan peningkatan prestasi olahraga pada tahun 2024 terjadi peningkatan dari 34,00 tahun 2023 naik menjadi 45,00 tahun 2024 melalui even olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat regional.

Perkembangan indikator-indikator urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 0,15 | 0,18 | 0,50 | 2,97 | 2,21 |
| 2. | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | 3,46 | 5,16 | 6,55 | 5,88 | 5,55 |
| 3. | Peningkatan prestasi olahraga | 0,00 | 17,00 | 107,00 | 34,00 | 45,00 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Statistik menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni; a) statistik dasar, b) statistik sektoral dan statistik khusus. Sesuai penyelenggaraannya, Badan Pusat Statistik (BPS) menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri.

Data statistik yang menjadi urusan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah statistik sektoral. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Untuk indikator di bidang statistik Kabupaten Tanah ada 2 yaitu 1) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan 2) Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. Dari kedua indikator tersebut sejak tahun 2020-2024 capaian sudah 100% seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan pemerintahan bidang persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antara Perangkat Daerah. Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka keamanan informasi dan dokumen menjadi isu krusial. Sehingga peran persandian menjadi sangat penting. Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet.

Kondisi saat ini, hampir semua transaksi dilakukan melalui media internet, baik urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun yang sifatnya pribadi. Saat ini memang Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar belum mengambil kebijakan penggunaan sertifikat digital untuk keseluruhan dokumen. Implementasi sertifikat digital saat ini diantaranya adalah dokumen Laporan Harian Kerja, aplikasi dan dokumen e-*planning* dan aplikasi dan dokumen monev. Indikator kinerja untuk urusan persandian ini adalah persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan data sistem dengan persandian hingga tahun 2024 tercapai 3,68%, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Keberhasilan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dapat dilihat dari indikator terlestarikannya cagar budaya yang dilestarikan. Perkembangan indikator terlestarikannya cagar budaya sejak 2020-2024 sudah tercapai sebesar 100%, salah satu yang menjadi faktor pendorong capaian indikator ini adalah terkelolanya pemanfaatan dan pelestarian seni budaya dan cagar budaya secara efektif dan terstruktur.

Tabel 2.75
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Terlestarikannya Cagar Budaya | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana definisi perpustakaan adalah sebuah wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberhasilan tujuan tersebut, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari nilai 0,00 tahun 2020 naik menjadi nilai 67,81 tahun 2024 walaupun sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kondisi menunjukkan bahwa pemerataan layanan perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan yang dibina, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakan dan jumlah anggota perpustakaan di Kabupaten Tanah Datar cenderung membaik, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga tujuan keberadaan perpustakaan sebagai wahana belajar tercapai, namun belum tercapai secara optimal.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Dimensi utama penilaiannya adalah frekuensi membaca, durasi membaca dan jumlah buku yang dibaca. Perkembangan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 sudah mencapai angka 62,07. Kondisi ini menunjukkan terjadi peningkatan frekuensi membaca, durasi membaca dan jumlah buku yang dibaca oleh masyarakat di Tanah Datar. Perkembangan indikator urusan pemerintahan bidang perpustakaan Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Perpustakaan 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 0,00 | 7,55 | 7,55 | 76,89 | 67,81 |
| 2. | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,07 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan akan memberikan jaminan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta dapat mendinamiskan sistem kearsipan.

Indikator pembangunan urusan pemerintahan bidang kearsipan terkait dengan persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas juga mengalami fluktuatif, dimana tahun 2020 masih 0,00 naik menjadi 100 pada tahun 2021, namun kembali turun sejak tahun 2022-2024 menjadi 75,06. Sementara itu untuk indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat mengalami penurunan pada tahun ini menjadi 50,00 dimana pada tahun 2020 sudah mencapai 100. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan kualitas unit pengelola arsip yang berada di Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari mulai menyelenggarakan kearsipannya sesuai kaidah dan standar kearsipan.

Perkembangan capaian kinerja pembangunan urusan kearsipan Kabupaten Tanah Datar 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Kearsipan 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) | 0,00 | 100,00 | 75,10 | 75,09 | 75,06 |
| 2. | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1669,50 | 50,00 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

3. Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Capaian Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari indikator Pembangunan Jumlah Total Produksi perikanan (budidaya dan tangkap). Produksi perikanan melalui program budidaya selama periode 2020-2024 yang tertinggi pada tahun 2023 tercatat sebesar 13.002 ton/tahun dan terendah pada Tahun 2024 dengan produksi 11.050 ton/tahun. Penurunan ini tentu tidak terlepas dari belum optimalnya program dan kegiatan di Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Tanah Datar.

Perkembangan capaian kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Tanah Datar 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Kelautan dan Perikanan 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) | 12.209,29 | 12.084,50 | 131,18 | 100,37 | 100 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Indikator pembangunan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar antara lain kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, Tingkat hunian akomodasi, persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang dan Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.

Perkembangan sektor pariwisata tahun 2020-2024 sudah menunjukkan hasil yang baik sehingga memberi dampak yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Hal ini ditandai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 15,29% dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 5,39%. Sedangkan persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan dari 38,18% tahun 2022 turun menjadi 5,28% tahun 2024. Sehingga berdampak terhadap menurunnya tingkat hunian akomodasi dari 17,62% tahun 2022 turun menjadi 13,63% tahun 2024. Hal ini disebabkan karena dominannya wisatawan domestik yang datang dibandingkan dengan mancanegara. Sehingga ini berdampak terhadap pola belanja dari wisatawan seperti rendahnya belanja penginapan. Selain itu, belum optimalnya jumlah even-even pariwisata yang dapat diselenggarakan skala regional dan nasional, sehingga berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi ini menunjukkan sektor pariwisata belum berkembang secara optimal, sehingga perlu dijadikan skala prioritas lima tahun mendatang.

Perkembangan indikator urusan pemerintahan bidang pariwisata Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | -77,40 | -99,83 | 13,87 | 11,57 | 44,30 |
| 2. | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota | -44,21 | 5,33 | 38,18 | 16,03 | 5,28 |
| 3. | Tingkat hunian akomodasi | 369,05 | 19,71 | 17,62 | 14,46 | 13,63 |
| 4. | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | 18,69 | 14,68 | 15,10 | 1,55 | 15,29 |
| 5. | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | 3,85 | 3,106 | 5,78 | 0,64 | 5,39 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota bernilai negatif disebabkan adanya Pandemi *Covid*-19 yang menyebabkan ditutupnya seluruh destinasi wisata pada tahun 2020 dan pembatasan kunjungan wisatawan pada tahun 2021.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian mempunyai pengaruh yang besar pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha utama sebagian besar masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Di kabupaten Tanah Datar Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu berada pada angka 585,09 per tahun sebagaiman terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanian Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun | 660,68 | 653,52 | 675,74 | 648,08 | 585,09 |
| 2. | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus *zoonosis* kab/ kota (%) | 6,77 | -39,59 | 56,10 | 25,00 | 158,46 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular serta *zoonosis* di kabupaten/kota menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 6,77%, namun pada tahun 2021 justru mencatat penurunan negatif (-39,59%). Tahun 2022 mencatat perbaikan dengan penurunan sebesar 56,10%, diikuti oleh penurunan sebesar 25,00% pada tahun 2023. Namun, pada tahun

2024 terjadi lonjakan penurunan kasus sebesar 158,46%, yang dapat disebabkan oleh penanganan intensif, vaksinasi massal, atau peningkatan sistem pengawasan dan respons cepat terhadap wabah hewan menular.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam negeri di Kabupaten Tanah Datar terlihat dari persentase pelaku usaha yang memiliki izin dan persentase alat-alat ukur, takar, timbang, persentase kinerja realisasi pupuk dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku. Selama lima tahun terakhir data persentase pelaku usaha yang memiliki izin, hingga tahun 2024 tercatat sebesar 100%. Angka ini menunjukkan capaian yang optimal dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk UMKM dan ekonomi kreatif. Sedangkan Persentase kinerja realisasi pupuk sejak tahun 2020-2024 sudah mencapai 36,73%, capaian ini sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, untuk perkembangan persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku hingga tahun 2024 tercapai 3,62% atau menurun dibandingkan sejak tahun 2020-2023.

Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang perdagangan tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | 100,00 | 100,00 | 97,66 | 98,65 | 100,00 |
| 2. | Persentase kinerja realisasi pupuk | 30,13 | 21,06 | 20,58 | 0,06 | 36,73 |
| 3. | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 4,70 | 5,68 | 5,88 | 7,85 | 3,62 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang perindustrian Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020-2024 belum menunjukkan hasil yang optimal, sehingga kinerja di bidang perindustrian ini perlu ditingkatkan dan dijadikan skala prioritas lima tahun mendatang. Perkembangan capaian indikator kinerja Urusan pemerintahan bidang perindustrian tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota | 5,03 | 6,96 | 64,00 | 12,11 | 7,20 |
| 2. | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 15,00 |
| 3. | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 71,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | 1,00 | 125,00 | 90,00 | 95,00 | 105,00 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Capaian indikator kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020-2024 sudah menunjukkan hasil yang baik walaupun belum optimal seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Perkembangan Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | 62,32 | 63,04 | 64,51 | 66,72 | 78,05 |
| 2. | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 3,16 | 2,62 | 3,16 | 3,30 | - |
| 3. | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat kelengkapan DPRD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Unsur Perencanaan

Capaian indikator kinerja Unsur Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020-2024 sudah menunjukkan hasil yang baik seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Kualitas Perencanaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase Keselarasan Renstra dengan RPJMD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Persentase Keselarasan Renja dengan RKPD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Bappedalitbang, 2025

b. Unsur Keuangan

Capaian indikator kinerja Unsur Keuangan Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020-2024 seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan | 32,38 | 30,54 | 31,16 | 23.71 | 35.25 |
| 2. | Rasio PAD | 1,31 | 0,89 | 12,31 | 12,02 | 12,27 |
| 3. | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum | 66,86 | 88,20 | 16,04 | 82,67 | 88,32 |

Sumber: BPKD, 2025

c. Unsur Pengadaan

Capaian indikator kinerja Unsur Pengadaan Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020-2024 dapat dilihat dari beberapa indikator seperti persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif, rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

Indikator persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif mengalami fluktuasi sejak tahun 2020-2024, dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 15,57%, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 7,36%. Capaian indikator Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro juga berfluktuatif selama lima tahun terakhir dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 85,31, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 0,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur
Pengadaan Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | 15,42 | 13,02 | 15,57 | 7,36 | 7,96 |
| 3. | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | 24,24 | 15,20 | 8,99 | 8,31 | 8,52 |
| 4. | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | 0,00 | 85,31 | 7,70 | 76,35 | 10,82 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

d. Unsur Kepegawaian

Capaian kinerja unsur kepegawaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) yang diukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi terhadap pendidikan menengah/dasar dan rasio pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan dan Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi belum menunjukkan capaian yang optimal. Hal ini terlihat perkembangan rasio pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya penyetaraan jabatan struktural eselon IV menjadi jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021. Sedangkan perkembangan rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap menengah/dasar cenderung meningkat, karena adanya keinginan ASN untuk meningkatkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik melalui tugas belajar maupun izin belajar dan Penerimaan Calon ASN lebih mengutamakan pendidikan D3 ke atas, walaupun di tahun 2024 ini mengalami penrurunan dari tahun 2023. Sementara itu untuk Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi mengalami fluktuasi. Perkembangan indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur
Kepegawaian Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 63,25 | 294,78 | 75,08 | 76,50 | 80,58 |
| 2. | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 7,19 | 25,59 | 28,15 | 30,77 | 26,68 |
| 3. | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS | 44,85 | 100,00 | 10,86 | 29,50 | 39,91 |

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | | | | | |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

e. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan capaian indikator unsur pendidikan dan pelatihan Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020-2024 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.88
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Profesionalitas ASN | - | 70,58 | 73,37 | 79,8 | 84,56 |

Sumber: BKPSDM, 2025

f. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Perkembangan capaian indikator unsur penelitian dan pengembangan Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020-2024 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.89
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Inovasi Daerah (IID) | - | 41,21 | 50,27 | 46,44 | 45,95 |
| 2. | Jumlah Kajian | - | - | 2 | 3 | 3 |

Sumber: Bappedalitbang, 2025

g. Unsur Manajemen Keuangan

Perkembangan capaian indikator unsur manajemen keuangan Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.90
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Manajemen Keuangan Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | 28,17 | 9,35 | 8,53 | 6,60 | 2,41 |
| 2. | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | 25,91 | 6,84 | 13,30 | 1,59 | 6,97 |
| 3. | Manajemen Aset | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| 4. | Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya | 6,15 | 5,96 | 6,81 | 7,24 | 6,04 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

h. Unsur Transparansi dan Partisipasi Publik

Unsur transparansi dan partisipasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi berarti keterbukaan informasi dan tindakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik, sedangkan partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Capaian indikator unsur transparansi dan partisipasi publik di Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020-2024 sudah baik seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.91
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Unsur Transparansi dan Partisipasi Publik Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | 100,00 | 90,33 | 93,30 | 93,40 | 94,53 |
| 2. | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

6. Unsur Pengawas

Perkembangan capaian indikator unsur pengawas Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020-2024 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.92
Perkembangan Indikator Unsur Pengawas Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 3,00 | 3,24 | 2,60 | 2,48 | 2,80 |
| 2. | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 3,00 | 3,00 | 2,62 | 3,00 | 3,00 |
| 3. | Opini Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

7. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan merupakan unsur pembantu kegiatan pemerintahan di kecamatan yang berada di dalam suatu kabupaten. Kegiatan pemerintahan di kecamatan berperan dalam membantu program pemerintah daerah di wilayah kecamatan. Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh 14 (empat belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Indikator Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 2.93
Perkembangan Indikator Unsur Kewilayahan Tahun 2020-2024

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Kecamatan X Koto | - | 90,46 | 91,83 | 96,14 | 96,87 |
| 2. | Kecamatan Batipuh | - | 81,39 | - | 85,73 | 92,86 |
| 3. | Kecamatan Rambatan | - | 93,39 | 95,59 | 90,83 | 92,58 |
| 4. | Kecamatan Lima Kaum | - | 86,14 | 90,03 | 96,32 | 96,97 |
| 5. | Kecamatan Tanjung Emas | - | 87,45 | 89,12 | 93,49 | 96,29 |
| 6. | Kecamatan Lintau Buo | - | 88,55 | 88,62 | 96,38 | 97,03 |
| 7. | Kecamatan Sungayang | - | 88,38 | 89,05 | 96,70 | 97,48 |
| 8. | Kecamatan Sungai Tarab | - | 92,35 | 93,80 | 94,11 | 95,05 |
| 9. | Kecamatan Pariangan | - | 91,28 | 93,35 | 94,19 | 94,64 |
| 10. | Kecamatan Salimpaung | - | 88,43 | 88,43 | 90,81 | 95,89 |
| 11. | Kecamatan Padang Ganting | - | 88,94 | 89,15 | 95,82 | 95,04 |
| 12. | Kecamatan Tanjuang Baru | - | 88,22 | 88,97 | 90,38 | 90,72 |
| 13. | Kecamatan Lintau Buo Utara | - | 89,83 | 89,86 | 95,08 | 96,87 |
| 14. | Kecamatan Batipuah Selatan | - | 91,34 | 90,41 | 93,82 | 93,87 |

Sumber: Sekretaiat Daerah, 2025

8. Unsur Pemerintahan Umum

Perkembangan capaian indikator unsur pemerintahan umum Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2020-2024 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.94
Perkembangan Indikator Unsur Pemerintahan Umum
Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Kunci | Capaian | |
|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2024 |
| 1. | Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu | 72,42 | 66,17 |
| | a. Pilpres | 72,74 | 74,19 |
| | b. Pileg | - | - |
| | c. DPR RI | 71,92 | 74,92 |
| | d. DPD RI | 72,57 | 32,06 |
| | e. DPRD Provinsi | 72,48 | 74,86 |
| | f.DPRD Kabupaten | 72,40 | 74,83 |
| | b. Pilkada | - | 59,25 |

Sumber: Badan Kesbangpol, 2025

2.1.5 Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2021-2026 Tahun Rencana Berjalan

Evaluasi terhadap realisasi kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 tahun rencana berjalan sampai dengan Tahun 2024 meliputi; 1) perkembangan capaian indikator makro pembangunan dan 2) perkembangan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah.

1. Perkembangan Capaian Indikator Makro Pembangunan

Evaluasi capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Tanah Datar sampai dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang belum siginifikan. Hal ini ditandai terdapat sebagian besar capaian indikator makro yang tidak memenuhi target karena disebabkan antara lain; a) adanya perubahan perhitungan terhadap dimensi indikator yang digunakan oleh BPS) terjadinya pencapaian target diluar asumsi proyeksi yang digunakan saat penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026.

Perkembangan tingkat capaian kinerja indikator makro pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 sampai dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.95
Perkembangan Realiasasi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 sampai dengan RKPD Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja | Target Akhir RPJMD 2026 | Capaian Kinerja Hasil Pelaksanaan RKPD | | | | Tingkat Capaian s/d RKPD 2024 (%) | Interpretasi Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1. | Pertumbuhan PDRB/LPE | 4,58 | 3,27 | 4,16 | 4,44 | 3,85 | 84,24% | Tidak tercapai |
| 2. | PDRB menurut lapangan usaha ADHB | 17.726.747,01 | 13.590.940,00 | 15.059.260,00 | 16.459.560,00 | 17.496.030,00 | 98% | Akan tercapai |
| 3. | Indeks Gini | 0,244 | 0,250 | 0,251 | 0,260 | 0,258 | 105% | Tercapai |
| 4. | Persentase penduduk di atas garis kemiskinan | 96,21 | 95,46 | 95,74 | 95,84 | 95,72 | 99,49% | Akan tercapai |
| 5. | Tingkat Kemiskinan (%) | 3,79 | 4,54 | 4,26 | 4,16 | 4,28 | 88,55% | Akan tercapai |
| 6. | Indeks Pembangunan Manusia | 76,59 | 74,14 | 74,87 | 75,57 | 76,49 | 99,86 | Akan tercapai |
| 7. | Angka rata-rata lama sekolah | 9,29 | 8,62 | 8,9 | 9,02 | 9,29 | 100,97% | Tercapai |
| 8. | Angka/Usia harapan hidup | 71,60 | 73,69 | 73,84 | 74,19 | 74,26 | 103,71 | Tercapai |
| 9. | Harapan Lama Sekolah | 15,94 | 14,34 | 14,59 | 14,78 | 15,05 | 94,41% | Akan tercapai |
| 10. | Pengeluaran per kapita (ribu) | 11.703 | 10.616 | 10.695 | 10.905 | 11.223 | 95,89% | Akan tercapai |

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat 2 (dua) indikator makro pembangunan ekonomi yang diindikasikan tidak tercapai pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026. Kondisi ini menunjukkan penguatan sektor ekonomi menjadi salah satu skala prioritas dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah periode berikutnya.

2. Perkembangan Capaian Indikator Misi RPJMD 2021 – 2026

Evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan untuk mencapai sasaran misi daerah tahun 2021 – 2026 dilakukan terhadap capaian atas 26 indikator sasaran per misi untuk kurun waktu 2021 – 2024. Capaian/realisasi indikator tersebut selanjutnya diukur capaian kinerjanya dengan membandingkan antara realisasi dengan target akhir RPJMD dengan mengacu pada formulasi penghitungan indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026. Data yang

digunakan adalah capaian/realisasi tahun 2021 – 2024, sedangkan tingkat capaian per misi diukur dengan cara menghitung rata-rata tingkat capaian seluruh indikator pada masing-masing misi setelah membandingkan capaian/realisasi tahun 2024 dengan target akhir RPJMD. Capaian indikator sasaran per misi diuraikan sebagai berikut:

a. Capaian Misi 1: Meningkatkan Kehidupan Beragama, Beradat dan Berbudaya

Misi satu terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator. Evaluasi terhadap hasil capaian Misi 1 pada masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.96
Hasil Evaluasi atas Indikator Misi 1

| No. | Indikator/ Sasaran | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Tingkat Capaian |
| Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat | | | | | | | | | |
| 1. | Jumlah hafiz/ hafizah yang diwisuda | 7.000 | 7.909 | 8.000 | 9.174 | 9.000 | 10.174 | 11.000 | 92,49% |
| 2. | Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat | 11.113.072.796 | 10.822.145.722 | 11.326.785.734 | 10.508.322.486 | 11.540.498.673 | 12.266.406.140 | 11.967.924.549 | 102,49% |
| Sasaran 2: Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS SBK | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif | 66,3% | 90,38% | 71,01% | 90,45% | 75,72% | 96,39% | 85,14% | 113,21% |

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026, 2025

1) Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda

Dalam RPJMD 2021 – 2026 ditetapkan target 1.000 (seribu) hafiz/hafizah yang diwisuda per tahun. Untuk mewujudkan sasaran ini, pemerintah Kabupaten Tanah Datar melaksanakan program Wakaf 1.000 (seribu) hafiz yang pada tahun 2024 telah memasuki tahun ke-9. Program ini sendiri merupakan lanjutan dari RPJMD periode sebelumnya yang tetap dipertahankan karena dinilai sejalan dengan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah.
Secara akumulatif, sampai dengan tahun 2024 telah diwisuda sebanyak 10.174 (sepuluh ribu seratus tujuh empat) hafiz/hafizah, melampaui target tahun 2024 yang ditetapkan sebanyak 9.000 (sembilan ribu) hafiz/hafizah dengan tingkat capaian 113,04%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 11.000 (sebelas ribu) hafiz/hafizah, tingkat capaiannya sebesar 92,49%. Dari hasil capaian sampai dengan tahun 2024 ini maka diindikasikan bahwa target akhir RPJMD dapat tercapai.

Faktor pendukung capaian indikator jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda adalah sebagai berikut:

a) Perkembangan jumlah Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan rumah tahfiz serta jumlah guru tahfiz yang semakin meningkat, sampai dengan tahun 2024 terdapat 240 (dua ratus empat puluh) TPA dan 110 (seratus sepuluh) rumah tahfiz binaan Pemerintah Daerah, dengan jumlah guru tahfiz lebih dari 1.000 (seribu) orang dengan jumlah siswa mencapai lebih 16.000 (enam belas ribu) orang;
b) Penyelenggaran Program Gerakan Wakaf 1.000 (seribu) Hafiz;
c) Pemberian *reward* kepada hafiz/hafizah yang hafal Alquran lebih dari 10 (sepuluh) juz, sebagai contoh hadiah Umrah untuk hafiz/hafizah yang hafal Alquran 15 (lima belas) juz;
d) Gerakan Pemasangan Stiker "Satu Rumah Satu Hafiz", sampai dengan tahun 2024 telah memasang stiker sebanyak 6.275 (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima) buah, yang berarti jumlah rumah yang telah memiliki Hafiz/Hafizah di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 6.275 (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima) rumah;
e) Pembagian Kartu Tanda Anggota (KTA) Guru Tahfiz. Pada tahun 2024 telah disiapkan sebanyak 722 (tujuh ratus dua puluh dua) kartu untuk diserahkan kepada guru-guru tahfiz. Pemegang KTA Guru Tahfiz memperoleh keuntungan atau fasilitas dari pemerintah, di antaranya adalah pemegang KTA dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai pengajar tahfiz, mendapatkan fasilitas kesehatan prioritas bagi yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah daerah, serta mendapatkan prioritas untuk menerima manfaat dari program-program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar; dan
f) Program "Maghrib Menghantar Berkah", yaitu mengaji bersama para penghafal Alquran yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Tanah Datar, diawali dengan sholat Maghrib berjamaah, Tasmi' Alquran, dialog dengan Bupati Tanah Datar, dan ditutup dengan sholat Isya' berjamaah. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 55 (lima puluh lima) rumah tahfiz telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ini.

2) Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh amil zakat

Indikator "Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima amil zakat" dihitung dari data zakat yang disetorkan oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada BAZ (Badan Amil Zakat) Tanah Datar. Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp11.540.322.486 (sebelas milyar lima ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). Berdasarkan data Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar yang bersumber dari Badan Amil Zakat (BAZ) Tanah Datar, zakat yang terkumpul adalah sebesar Rp12.266.406.140 (dua belas miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus enam ribu seratus empat puluh rupiah). Berdasarkan data tersebut tingkat capaian indikator ini sebesar 106,29%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar Rp11.967.924.549 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan) tingkat capaiannya adalah sebesar 102,49% atau telah melampaui target RPJMD.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain:

a) Menggalakkan pembayaran zakat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagian besar zakat yang terkumpul bersumber dari zakat

yang dibayarkan oleh ASN. Di samping itu, zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Tanah Datar juga berasal dari zakat pegawai pada instansi vertikal, badan usaha, dan lainnya;

b) Sosialisasi pengelolaan zakat bagi seluruh Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar; dan
c) Pendampingan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di nagari untuk mengoptimalkan pelaksanaan 5 (lima) Program Baznas, yaitu bantuan kesehatan bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan, bantuan modal serta bantuan dakwah dan advokasi.

3) Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif

Untuk indikator Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif hingga tahun 2024 ini telah melebihi capaian target akhir RPJMD 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK" dilakukan fasilitasi lembaga adat budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Capaian indikator ini didukung oleh:

a) Pelaksanaan program unggulan daerah Satu Nagari Satu Event yang bertujuan melestarikan budaya, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui program ini, keberadaan sanggar seni dan budaya menjadi lebih hidup karena mendapatkan tempat untuk mengekspresikan diri melalui pementasan berbagai kesenian dan budaya yang berkembang di masing-masing nagari, seperti seni tari, sholawat dulang, randai, alu katentong, talempong, pasambahan, kesenian Dikia Mundam, dan lain sebagainya. Program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022 ini, pada tahun 2024, sebanyak 22 (dua puluh dua) nagari turut serta mensukseskan event ini. Dari 22 (dua puluh dua) nagari tersebut, 9 (sembilan) nagari telah melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun 2023 dan kembali berpartisipasi dalam event ini pada tahun 2024. Sebanyak 13 (tiga belas) nagari baru mulai berpartisipasi menyemarakkan event tersebut di tahun 2024;
b) Peningkatan kompetensi dan pembinaan lembaga KAN serta Fasilitasi kegiatan LKAAM Kabupaten Tanah Datar oleh Dinas PMD PPKB;
c) Pembangunan Balai Adat Nagari Andaleh Kecamatan Sungayang;
d) Program Niniak Mamak turun ke sekolah;
e) Pembinaan terhadap komunitas budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
f) Pembinaan seni melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
g) Penyelenggaraan Atraksi seni budaya (seni kreatif) secara rutin yang dilaksanakan di Lapangan Cindua Mato oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

b. Capaian Misi 2: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Dan Perluasan Lapangan Kerja Yang Berbasis Pertanian, Industri Dan UMKM

Misi 2 terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator. Evaluasi terhadap hasil capaian Misi 2 pada masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.97
Hasil Evaluasi atas Indikator Misi 2

| No. | Indikator/ Sasaran | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Tingkat Capaian |
| Sasaran 1: Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian | | | | | | | | | |
| 1. | Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB | 30,10% | 27,80% | 30,13% | 27,61% | 30,19% | 27,18 | 30,35% | 89,56% |
| 2. | Nilai Tukar Petani/NTP | <100 | >100 | >100 | 115,36 | >100 | 102,96 | >100 | 102,96% |
| Sasaran 2: Meningkatnya daya saing UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif | | | | | | | | | |
| 1. | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | 11,33% | 11,19% | 11,38% | 14,02% | 11,40% | 10,38% | 11,51% | 90,18% |
| 2. | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 13,79% | 13,75% | 13,85% | 13,83% | 13,95% | 14,21% | 14,08% | 100,92% |
| Sasaran 3: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | | | | | | | | | |
| 1. | Jumlah wirausaha baru | 1.000 | 843 | 1.000 | 993 | 1.000 | 1061 | 1000 | 106,10% |

Sumber Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026, 2025

1) Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

Dari sisi kontribusi terhadap PDRB, lapangan usaha pertanian dan perikanan adalah penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2024 kontribusinya mencapai 27,18%. Sejak tahun 2021, kontribusi lapangan usaha pertanian dan perikanan cenderung menurun walaupun laju pertumbuhannya menunjukkan hal yang sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indikator kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB pada tahun 2024 belum memenuhi target RPJMD. Apabila dibandingkan target akhir RPJMD, kontribusi sektor ini masih dibawah target, tetapi secara nilai dan produksinya terus meningkat setiap tahun. Hal ini terjadi karena diharapkan pada sektor lain yang menjadi prioritas daerah kontribusi dan nilainya naik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB adalah sebagai berikut:

a) Bencana alam yang terjadi beberapa kali, seperti banjir bandang dan erupsi Gunung Marapi cukup mempengaruhi produksi pertanian dan perikanan, karena berakibat pada rusaknya lahan pertanian dan penurunan luas tanam yang mempengaruhi luas panen. Di samping itu, bencana alam yang terjadi juga mempengaruhi ketersediaan pakan ternak. Bencana alam banjir bandang yang terjadi pada tahun 2024 mengakibatkan kematian ternak dalam jumlah yang cukup besar;
b) Harga benih untuk beberapa komoditi mengalami kenaikan sehingga berpengaruh pada luas tanam dan luas panen;
c) Alih fungsi lahan pertanian; dan
d) Serangan hama dan penyakit.

2) Nilai Tukar Petani (NTP)

Capaian indikator NTP diukur dengan menggunakan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS, NTP Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebesar 132,16 (>100) yang diperoleh dari hasil pemantauan harga-harga di pedesaan seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Barat (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) pada Desember 2024. NTP>100 mengindikasikan Indeks Harga yang diterima oleh petani lebih besar daripada Indeks Harga yang dibayar oleh petani. Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan. Artinya daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal telah cukup baik.

Jika dilihat sejak tahun 2022, Nilai Tukar Petani Kabupaten Tanah Datar selalu berada diatas 100, dan ini sudah mencapai target akhir NTP RPJMD. Dan di indikasikan pada akhir periode RPJMD sudah melebihi target.

Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai NTP >100 adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Kacang Tanah);
b) Peningkatan Produksi Tanaman hortikultura (Cabe, Tomat, Bawang dan jeruk);
c) Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Karet, Tebu, Kopi dan Cassiavera);
d) Peningkatan Produksi Peternakan (Daging Sapi, Daging Kerbau, Daging Kambing, Daging Ayam dan Telur); dan
e) Peningkatan populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas).

3) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2024 masih belum mencapai target. Tetapi jika dilihat dari tren realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, diindikasikan target akhir RPJMD indikator ini tercapai.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB antara lain:

a) Peningkatan SDM dan daya saing IKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian antara lain Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha, Pelatihan teknis dan/atau pendampingan produksi, Pendampingan Pengembangan dan Diversifikasi Produk, Pendampingan Persiapan Dokumen GMP dan HACCP, Pendampingan Persiapan Dokumen ISO 9001, serta sosialisasi sertifikasi Halal dan TKDN yang diikuti oleh sebanyak 140 IKM;
b) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM yang meliputi Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM dan Layanan Proses Bisnis Sentra IKM yang diikuti 100 IKM;
c) Pelaksanaan pembangunan sentra olahan komoditi hortikultura di Kecamatan Salimpaung;
d) Fasilitasi standarisasi produk dan pelaku IKM (sertifikat halal, sertifikat TKDN dan HKI merek); dan

e) Fasilitasi promosi produk IKM (promosi pameran Dekranasda Provinsi, *Inacraft*, Bazar Cindua Mato) Bantuan peralatan bagi kelompok IKM).

4) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Selama lima tahun terakhir, sektor perdagangan menyumbang lebih dari 13% terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tanah Datar dan nilainya juga cenderung naik setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan.

Untuk mendukung peningkatan kontribusi sektor perdagangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan upaya melalui Dinas KUKMP sebagai berikut:

a) Melakukan pengelolaan pasar serikat C Batusangkar yang memfasilitasi 257 (dua ratus lima puluh tujuh) pedagang dan pembinaan terhadap Pasar Nagari. Kegiatan ini didukung oleh Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
b) Pemantauan harga 15 (lima belas) bahan pokok dan sembilan barang penting pada Pasar Rakyat dan distributor utama untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah. Kegiatan ini didukung oleh Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
c) Dalam rangka meningkatkan nilai perdagangan produk dan komoditi unggulan Daerah melalui pemasaran digital, pada tahun 2024 Dinas KUKMP memfinalisasikan *Website* Etalase Digital Produk dan komoditi kebanggaan (EPIK) Kabupaten Tanah Datar. Sejalan dengan hal tersebut juga dilakukan Fasilitasi dan evaluasi 30 (tiga puluh) peserta yang sudah mendapatkan pelatihan ekspor pada tahun 2021-2023 dalam rangka penguatan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor. Kegiatan ini didukung oleh program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
d) Melaksanakan pengawasan perdagangan sesuai kewenangan daerah yang meliputi pengawasan tertib niaga, pengawasan metrologi legal, barang dan jasa pada Pasar Nagari, Pelaku Usaha SPBU/Pertashop, agen dan pangkalan LPG 3 kg, distributor dan pengecer pupuk dan pestisida bersubsidi, pelaku usaha barang dalam keadaan terbungkus serta edukasi dan literasi peraturan perdagangan kepada siswa SMP dan Pelaku Usaha Mikro. Kegiatan ini didukung oleh program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
e) Penyelenggaraan pelayanan publik wajib daerah berupa tera/tera ulang terhadap 270 (dua ratus tujuh puluh) alat-alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di pasar serikat C Batusangkar dan 16 (enam belas) SPBU/Pertashop untuk memastikan terjaminnya kebenaran ukuran bagi konsumen/masyarakat. Kegiatan ini didukung oleh program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

5) Jumlah Wirausahaan Baru

Indikator ini merupakan salah satu program unggulan daerah dimana jumlah yang wirausaha baru yang ditargetkan adalah sebanyak 1.000 (seribu) orang per tahun. Pada tahun 2024 ditargetkan 1.000 (seribu) orang wirausaha baru dan tercapai sebanyak 1.061 (seribu enam puluh satu) orang. Melihat tren dari

tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diindikasikan bahwa target akhir RPJMD akan tercapai.

Beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya menumbuhkan wirausaha baru antara lain:

a) Fasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri;
b) Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan pembuatan souvenir, pembuatan kue dan roti, pemasangan jaringan listrik, Teknik informatika komputer, menjahit, *digital marketing*, servis motor konvensional, manajemen pemasaran dan manajemen usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 304 (tiga ratus empat) pencari kerja;
c) Pelatihan kompetensi yang bersumber dari APBN, seperti pelatihan *practical office*, asisten pembuat pakaian, pembuatan roti dan kue, pemasangan instalasi listrik yang dilaksanakan oleh BLK Batusangkar;
d) Pelatihan keterampilan dasar bagi calon wirausaha baru yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e) Memfasilitasi pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kementerian Tenaga Kerja Repubik Indonesia di Padang; dan
f) Pelatihan tenun, menjahit, sulaman, mendesain motif yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

c. Capaian Misi 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi 3 terdiri dari dua sasaran dan enam indikator. Evaluasi terhadap hasil capaian Misi 3 pada masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.98
Hasil Evaluasi atas Indikator Misi 3

| No. | Indikator/Sasaran | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Tingkat Capaian |
| Sasaran 1: Meningkatnya mutu Pendidikan | | | | | | | | | |
| 1. | Rata-rata lama sekolah | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,02 | 9,02 | 9,29 | 9,2 | 100,98% |
| Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | | | | | | | | |
| 1. | Umur harapan hidup | 70,5 | 73,84 | 70,78 | 74,19 | 71,05 | 74,26 | 71,6 | 103,72% |
| 2. | Prevalensi stunting | 17,1 | 18,9 | 16,4 | 18,5 | 16,8 | 22,4 | 16,5 | 135,75% |
| 3. | Angka Kemiskinan | 4,32 | 4,26 | 4,19 | 4,16 | 4,06 | 4,28 | 3,79 | 87,07% |
| 4. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 98 | 59,7 | 98 | 58,53 | 98,1 | 59,46 | 98,10 | 60,61% |
| 5. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 98,82 | 97,58 | 98,9 | 97,62 | 98,9 | 97,7 | 98,92 | 98,80% |

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026, 2025

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 sebesar 9,29 tahun. Dengan kata lain, penduduk di Kabupaten Tanah Datar baru bisa menikmati pendidikan rata-rata sampai kelas 3 SLTP. Angka tersebut sudah melewati target Program Wajib Belajar yang dicanangkan pemerintah yaitu menyelesaikan pendidikan

dasar selama 9 (sembilan) tahun. Jika dilihat dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2024, angka ini terus meningkat setiap tahunnya.

Besarnya pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang cukup tinggi terjadi di tahun 2022–2024 yaitu sebesar 0,22 poin. Sedangkan dari tahun 2023 ke tahun 2024 angka ini meningkat sebesar 0,27 poin. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih mengupayakan peningkatan pembangunan pendidikan agar masyarakat termotivasi untuk bersekolah. Dengan capaian tersebut diindikasikan bahwa target akhir RPJMD dapat tercapai.

Untuk mendukung capaian target kinerja indikator Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah didukung oleh upaya yang dilakukan, antara lain:

a) Meningkatkan Akreditasi sekolah;
b) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik;
c) Meningkatkan Angka Partisipasi Murni dan Kasar;
d) Bantuan Pendidikan; dan
e) Inovasi di Bidang Pendidikan.

2) Umur Harapan Hidup

Selama periode tahun 2022 hingga tahun 2024, Kabupaten Tanah Datar telah berhasil meningkatkan umur harapan hidup dari 73,84 tahun pada tahun 2022 menjadi 74,26 pada tahun 2024. Selama periode tersebut secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 1,53 persen per tahun. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian umur harapan hidup pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan.

Dari sisi kesehatan, dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung capaian indikator Umur harapan hidup, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

a) Pencapaian UHC pada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar;
b) Kegiatan penjaringan kesehatan pada lansia dengan posyandu lansia;
c) Kegiatan aksi bergizi pada anak sekolah kegiatannya berupa makan bersama, olahraga dan makan tablet tambah darah untuk remaja putri; dan
d) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar berupa Kegiatan penjaringan kesehatan pada anak sekolah.

3) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita

Capaian indikator prevalensi *stunting* pada tahun 2024 pada saat evaluasi ini selesai disusun belum bisa diperoleh. Diperkirakan, prevalensi *stunting* tahun 2024 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 14%.

Dalam rangka mengejar target nasional prevalensi *stunting* sebesar 14% pada tahun 2024, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar antara lain:

a) Audit kasus *stunting* untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus *stunting*;
b) Pendataan kasus *stunting* sampai ke tingkat Nagari, untuk memastikan status masing-masing nagari, mana yang kasus stuntingnya turun atau justru meningkat;
c) Pemantauan status gizi masyarakat, khususnya balita; dan
d) Meningkatkan kualitas pelayanan ibu hamil, baik di Puskesmas, Pustu, maupun Polindes. Hal ini dilaksanakan mengingat salah satu penyebab stunting adalah kegagalan tumbuh kembang janin

dan balita pada seribu hari pertama yang terpengaruh langsung oleh asupan gizi.

4) Angka Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam dokumen Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024, pada tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar adalah 4,28. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian persentase penduduk miskin tahun 2024 masih di bawah target yang ditetapkan dan diindikasikan target akhir RPJMD belum tercapai pada akhir periode RPJMD. Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya menurunkan kemiskinan melalui pelaksanaan berbagai program seperti program perlindungan sosial, program bantuan bajak gratis, program makan rendang untuk mengatasi masalah rentenir dan bantuan untuk UMKM serta pengendalian inflasi.

5) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Untuk capaian IDG Kabupaten Tanah Datar sampai dengan tahun 2024 masih sebesar 59,46. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini masih berada dibawah target. Dan untuk sampai dengan tahun RPJMD ini diindikasikan target belum tercapai.

6) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian IPG Kabupaten Tanah sampai dengan tahun 2024 ini sebesar 97,7, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian ini masih berada dibawah target. Namun jika melihat tren beberapa tahun sebelumnya, target akhir RPJMD diindikasikan tercapai pada tahun akhir RPJMD.

d. Capaian Misi 4: Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan yang Berbasis Adat, Budaya, dan Sumber Daya Alam

Misi 4 terdiri dari satu sasaran dan dua indikator. Evaluasi terhadap hasil capaian Misi 4 pada masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.99
Hasil Evaluasi atas Indikator Misi 4

| No. | Indikator/ Sasaran | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Tingkat Capaian |
| Sasaran 1: Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial | | | | | | | | | |
| 1. | Jumlah kunjungan wisatawan | 769.976 | 957.200 | 980.000 | 1.135.317 | 990.441 | 1.205.853 | 1.485.661 | 81,17% |
| 2. | Lama tinggal wisatawan (hari) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,33% |

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026, 2025

1) Jumlah kunjungan wisatawan

Kondisi pariwisata di Kabupaten Tanah Datar sempat mengalami tekanan yang cukup berat ketika wabah *Covid*-19 melanda di tahun 2019 – 2021. Sebelum pandemi, kunjungan wisatawan ke Tanah Datar mencapai 1,2 juta wisatawan per tahun. Pada saat pandemi turun drastis kurang lebih sebesar 50% menjadi hanya 600 ribuan

wisatawan. Kondisi berangsur-angsur membaik pasca dicabutnya PPKM level 3 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 – 2024, kunjungan wisatawan ke Tanah Datar menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meningkat cukup tinggi bila dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2021 yang hanya mencapai 691.177 (enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh) wisatawan. Dengan melihat kenaikan yang terjadi sejak 2022 – 2024 diindikasikan target akhir RPJMD akan tercapai di tahun akhir periode RPJMD.

Beberapa upaya yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Tanah Datar antara lain:

a) Festival Pesona Minangkabau merupakan agenda tahunan yang beranjak dari program unggulan Satu Nagari Satu Event. Kabupaten Tanah Datar sebagai wilayah tertua dan sebagai tempat asal usul etnis Minangkabau, ikut bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Pada tahun 2024 Festival Pesona Minangkabau dilaksanakan di Istano Basa Pagaruyung dan Lapangan Cindua Mato. Adapun rangkaian kegiatan acara Festival Pesona Minangkabau tahun 2024 yaitu acara dibuka oleh Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Fahmy Akmal, mewakili Menteri Pariwisata. Acara menampilkan berbagai sajian, seperti kuliner Minangkabau tempo dulu, kampung kopi, lomba fotografi, makan bajamba, pasar UMKM Minangkabau, dan Pacu Jawi. Acara ditutup oleh Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra pada hari Minggu sore dengan penampilan tari kolosal dari Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarab dan Nagari Tanjuang Barulak, Kecamatan Tanjung Emas;
b) Melaksanakan kegiatan *Launching Calender of Event* pada tahun 2022 dan 2023 untuk mempromosikan *event* wisata yang digelar di Tanah Datar;
c) Pelaksanaan *event Gowes* Bareng Luhak Nan Tuo yang sudah memasuki tahun ke-2 pelaksanaan pada tahun 2024;
d) Pagaruyung *Islamic Art Festival*, *event* Wisata bernuansa religi yang digelar di Istano Basa Pagaruyung;
e) Sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*) untuk dua obyek wisata, yaitu Istano Basa Pagaruyung dan Panorama Puncak Pato; dan
f) Pacu Jawi merupakan atraksi budaya anak nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Pacu Jawi merupakan olahraga budaya lokal yang sudah *go international*. Pelaksanaan Alek Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan secara bergiliran pada 4 (empat) Kecamatan yaitu, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Rambatan.

2) Lama tinggal wisatawan (hari)

Capaian indikator lama tinggal wisatawan dihitung dengan menggunakan sampel data hunian pada Hotel Emersia yang berada di tengah kota Batusangkar. Hotel Emersia diambil sebagai sampel selain sebagai satu-satunya hotel dengan kapasitas hunian yang cukup besar dan representatif, juga hotel dengan tingkat hunian yang cukup tinggi sehingga dipandang cukup untuk dijadikan sebagai sampel. Pada tahun 2024, rata-rata lama tinggal wisatawan adalah satu hari. Hal ini masih belum memenuhi target RPJMD, yaitu dua hari. Dan diindikasikan target akhir RPJMD sampai dengan tahun akhir belum tercapai.

Secara umum, dari sisi daya tarik fasilitas yang ada di Kota Batusangkar memang masih tertinggal apabila dibandingkan dengan kota/kabupaten tetangga seperti Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh (+/- satu jam perjalanan), bahkan Kota Padang yang jaraknya kurang lebih tiga jam dari Kota Batusangkar. Sementara itu, untuk menarik wisatawan masih sangat tergantung pada keberadaan Istano Basa Pagaruyung.

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya capaian kinerja indikator Lama Tinggal wisatawan adalah dari sisi daya tarik fasilitas yang ada di Kota Batusangkar memang masih tertinggal apabila dibandingkan dengan kota/kabupaten tetangga seperti Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh (+/- satu jam perjalanan), bahkan Kota Padang yang jaraknya kurang lebih tiga jam dari Kota Batusangkar. Sementara itu, untuk menarik wisatawan masih sangat tergantung pada keberadaan Istano Basa Pagaruyung.

e. Capaian Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Misi 5 terdiri dari tiga sasaran dan tujuh indikator. Evaluasi terhadap hasil capaian Misi 5 pada masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.100
Hasil Evaluasi atas Indikator Misi 5

| No. | Indikator/ Sasaran | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Tingkat Capaian |
| Sasaran 1: Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | | | | | | | | | |
| 1. | Opini BPK atas laporan keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 100% |
| 2. | Indeks Pengawasan Kearsipan | 80 | 54,06 | B | B | A | BB | A | 78,95 |
| 3. | Nilai SAKIP | 69 | 66,02 | 71 | 66,93 | 75 | 67,6 | 80 | 84,50% |
| Sasaran 2: Meningkatnya birokrasi yang kapabel | | | | | | | | | |
| 1. | Indeks SPBE | 2,1 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 2,3 | 2,81 | 2,5 | 112,40% |
| 2. | Indeks Profesionalitas ASN | 75,00 | 73,37 | 77,00 | 78,98 | 79,00 | 84,56 | 83 | 101,88% |
| 3. | Skor dan status kinerja pemerintah daerah | 3,25 | 3,478 | 3,5 | 3,16 | 3,75 | 3,2 | 3,125 | 102,40% |
| Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89,39 | 83,51 | 90,39 | 94,57 | 91,39 | 95,27 | 92,39 | 103,11% |

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026, 2025

1) Opini BPK atas laporan keuangan

Capaian indikator “Opini BPK atas laporan keuangan” dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan opini WTP sehingga diasumsikan, meskipun hasil audit belum keluar, capaian tahun 2024 diperkirakan akan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu WTP. Dan untuk target akhir RPJMD diindikasikan tercapai pada tahun akhir RPJMD.

Dalam rangka mempertahankan Opini BPK, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan beberapa hal, diantaranya:

a) Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah; dan
b) Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah, perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi para pengelola keuangan dan aset daerah.

2) Indeks Pengawasan Kearsipan

Capaian Indeks Pengawasan Kearsipan dari tahun 2021 – 2024 menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan pengawasan kearsipan pada setiap perangkat daerah.
Faktor pendukung capaian kinerja indikator Indeks Pengawasan Kearsipan adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah dan nagari dengan melakukan sosialisasi serta penilaian setiap tahun dan pemberian *reward* (berkelanjutan);
b) Peningkatan nilai IPK yaitu pelatihan terhadap SDM (tenaga arsiparis);
c) Pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip; dan
d) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan arsip pada Depo arsip yang menjadi salah satu aspek penilaian dalam pengawasan kearsipan eksternal, serta lembaga kearsipan daerah melengkapi regulasi kearsipan sesuai dengan instrument yang telah ada.

3) Nilai SAKIP

Capaian indikator “Nilai SAKIP”, meskipun secara umum nilai/skor yang diperoleh terus meningkat setiap tahun, namun masih belum mencapai target akhir RPJMD, yaitu “A”. Pada tahun 2024, nilai yang diraih adalah 67,60 dan masuk ke dalam kategori “B”. diindikasikan target akhir RPJMD belum dapat dicapai hingga akhir periode RPJMD, namun upaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja melalui penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan terus dilakukan. Verifikasi dan reviu atas dokumen perencanaan perangkat daerah untuk menjamin konsistensi dan keselarasan dengan dokumen perencanaan kabupaten secara konsisten terus dilakukan. Monitoring dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam berbagai bentuk.
Faktor yang menyebabkan belum tercapainya target nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

a) Belum ada implementasi integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Saat ini, sistem yang digunakan adalah SIPD yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, SIPD baru mengintegrasikan antara perencanaan dengan keuangan, belum mengakomodasi kebutuhan pengelolaan akuntabilitas kinerja;
b) Belum seluruh elemen berada pada level komitmen yang sama dalam penyelenggaraan SAKIP; dan

c) Masih dijumpai pimpinan perangkat daerah yang tidak terlibat secara intensif dalam penyelenggaraan SAKIP, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja. Sumber Daya Manusia aparatur yang menangani atau bertanggung jawab pada perencanaan belum seluruhnya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya, baik secara akademik maupun secara teknis.

4) Indeks SPBE

Indeks SPBE merupakan hasil pengukuran terhadap tingkat kematangan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Capaian indikator "Indeks SPBE" pada tahun 2024 adalah 2,81 terjadi penurunan dari capaian tahun 2023 sebesar 3,22. Beberapa penyebab terjadi penurunan Indeks SPBE yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih belum memiliki kebijakan internal arsitektur dan peta rencana SPBE serta Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum menerapkan manajemen SPBE yang terencana dan terarah. Dalam pengukuran Indeks SPBE salah satu indikator yang harus dipenuhi adanya regulasi yang mengikat Perangkat Daerah atau masyarakat yang berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan SPBE yaitu dikeluarkannya Peraturan Daerah pendukung SPBE.
Untuk melayani kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, hingga akhir tahun 2024 tercatat sebanyak 50 (lima puluh) aplikasi layanan administrasi Pemerintahan dan layanan publik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Jika dilihat dengan target akhir RPJMD, capaian saat ini sudah melebihi target yang ditentukan.

5) Indeks Profesionalitas ASN

Indikator "Indeks Profesionalitas ASN" digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan SDM Aparatur di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2024, nilai IP ASN Kabupaten Tanah Datar adalah 84,56, meningkat dari nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 (78,98). Nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 telah melebihi target akhir RPJMD yang ditetapkan, yaitu 83.
Untuk mencapai target kinerja ini, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a) Peningkatan kualifikasi Pendidikan, melalui pemberian izin belajar dan tugas belajar, pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, dan MoU pendidikan kedinasan;
b) Peningkatan kompetensi pendidikan melalui pelaksanaan Diklat dan pengiriman ASN untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga/Pemerintah/ Pemda lainnya;
c) Peningkatan kinerja ASN melalui implementasi sistem e-Kinerja; dan
d) Peningkatan disiplin ASN.

6) Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Skor dan Status Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2024 sebesar 3,2 dan sudah mencapai target akhir dari RPJMD yaitu 3,125.

7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian indikator indeks kepuasan masyarakat dihitung berdasarkan hasil survey di seluruh unit pelayanan publik, dengan

hasil IKM Tahun 2024 adalah 95,27 (Sangat Baik), meningkat dari capaian tahun 2023 (94,57 atau Sangat Baik). Untuk mendukung upaya tersebut, sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan pembinaan dan evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Pada tahun 2024, berdasarkan evaluasi dari Ombudsman RI, hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan nilai 93,51 (zona hijau) masuk kategori A (kualitas tertinggi). Pada tahun 2024 sebanyak 6 (enam) unit layanan di lingkungan pemerintah kabupaten Tanah Datar yang di evaluasi oleh Ombudsman RI, adapun hasil evaluasi penilaian kepatuhan tersebut yaitu: Puskesmas Sungayang dengan nilai 97,59 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Puskesmas Tanjung Emas dengan nilai 93,98 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 93,45 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Dinas Sosial PPPA dengan nilai 92,95 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 92,15 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 90,97 (Kategori A, zona Hijau, opini Kualitas Tertinggi).

Pelaksanaan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 melalui pihak eksternal, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang dilaksanakan pada 41 (empat puluh satu) perangkat daerah. Pada tahun 2024 juga dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB, dimana ada 3 (tiga) Unit Lokus Evaluasi (ULE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu Dinas Sosial PPPA sebagai cerminan pelayanan barang dengan nilai 3,86. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M Ali Hanafiah SM Batusangkar sebagai perwakilan pelayanan jasa dengan nilai 4,40. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perwakilan pelayanan administrasi dengan nilai 4,53. Maka hasil Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 adalah 4,26. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nilai A- dan hasil penilaian oleh Ombudsman Republik Indoneisa.

f. Capaian Misi 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi 6 terdiri dari tiga sasaran dan tiga indikator. Evaluasi terhadap hasil capaian Misi 6 pada masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.101
Hasil Evaluasi atas Indikator Sasaran 1 Misi 6

| No. | Indikator/Sasaran | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Tingkat Capaian |
| Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas | 74,86 | 72,14 | 75,87 | 76,27 | 76,78 | 73,16 | 78,01 | 93,78% |
| Sasaran 2: Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup | | | | | | | | | |

| No. | Indikator/Sasaran | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Tingkat Capaian |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 68,01 | 74,17 | 74,14 | 71,99 | 68,81 | 65,32 | 69,91 | 93,84% |
| Sasaran 3: Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase bencana yang ditangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026, 2025

1) Persentase infrastruktur wilayah yang berkualitas

Indikator presentase infrastruktur wilayah yang berkualitas diukur dari persentase panjang jalan dalam kondisi baik, persentase ketersediaan jembatan kondisi baik, persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik, persentase cakupan pelayanan air minum, dan Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak. Capaian tahun 2024 dengan realisasi 73,16 masih belum memenuhi target akhir RPJMD sebesar 78,01%. Tingkat capaian tahun 2024 bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 93,78%.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pada indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik yaitu kondisi Kabupaten Tanah Datar yang memiliki bentang alam bervariasi seperti posisinya yang berada pada dua gunung yang masih aktif yaitu Gunung Marapi dan Tandikek, morfologi bergelombang, banyak dilalui sungai-sungai besar serta dilalui sesar besar jalur Sumatera (sesar semangko) menyebabkan Kabupaten Tanah Datar rentan terhadap bencana, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kegiatan jalan dan jembatan dengan kondisi baik adalah:

a) Melakukan survei terhadap kondisi jalan dan jembatan untuk mengetahui *existing* jalan saat ini yang dijadikan dasar perencanaan ditahun selanjutnya agar bisa menentukan prioritas perbaikan jalan yang akan dikerjakan;
b) Melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin untuk mencegah kerusakan yang lebih berat; dan
c) Mengupayakan untuk mendapatkan program pembangunan bidang jalan ke pemerintah pusat dan provinsi.

2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan kinerja tahun lalu mengalami kenaikan. Untuk pencapaian target indikator yang telah ditetapkan perlu adanya peran berbagai pihak dan melibatkan multi sektor dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dalam pemenuhan pencapaian target Indeks Kualitas Udara bukan hanya pada aspek pemantauan dan pengukuran kualitas lingkungan hidup saja tetapi juga diperlukan program/kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan. Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan menggunakan *Metode Passive Sampler*:

Indeks kualitas lahan memiliki hubungan erat dengan indeks kualitas lingkungan hidup karena kondisi lahan yang baik mendukung fungsi ekologis, produktivitas, dan keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. Capaian indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2023, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan

luas tutupan vegetasi terutama luas tutupan lahan dan luas lahan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengolahan, rehabilitasi serta pengendalian ekosistem di Kabupaten Tanah Datar serta adanya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan kualitas lahan. Diindikasikan target akhir dapat dicapai pada periode akhir RPJMD.

3) Persentase bencana yang ditangani

Kabupaten Tanah Datar dikenal sebagai wilayah rawan bencana alam. Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi gempa bumi karena berada pada jalur sesar aktif Sumatera yaitu Sesar Semangko. Topografi di sepanjang zona patahan Sesar Semangko yang dikelilingi oleh bukit barisan juga berpotensi memicu tanah longsor. Dominasi tanah yang dilapisi abu vulkanik semakin memperkuat efek guncangan gempa, sehingga masyarakat harus tetap selalu waspada dan ditunjang dengan pembangunan infrastruktur dalam rangka menanggulangi efek dari bencana gempa bumi dan tanah longsor.

Selain itu, Kabupaten Tanah Datar juga rawan terkena bencana erupsi gunung berapi. Gunung Marapi yang ada di Kabupaten Tanah Datar telah mengalami beberapa kali erupsi. Pada bulan Desember 2023 erupsi Gunung Marapi telah menyebabkan korban jiwa mencapai lebih dari 20 (dua puluh) orang dan belasan lainnya luka-luka. Puncak dari bencana tersebut adalah terjadinya banjir lahar dingin yang melanda Kabupaten Tanah Datar pada Mei 2024. Dengan banyaknya pemukiman yang berada di sekitaran lereng gunung Marapi tentu memerlukan penanggulangan bencana yang menyeluruh. Saat ini Kabupaten Tanah Datar hanya memiliki 2 (dua) sabodam dan hanya satu yang berfungsi. Kekurangan sabodam ini adalah masalah terbesar dalam mengantisipasi bencana yang disebabkan oleh erupsi gunung api.
Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk capaian indikator Persentase Bencana yang Ditangani:

a) Merespon seluruh laporan kejadian bencana yang masuk baik dari masyarakat atau dari pihak lain dan melakukan penanganan kejadian bencana dengan semaksimal mungkin dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait serta satgas nagari bencana untuk memperbaiki kinerja *Response Time* (Waktu Respon); dan
b) Dikembangkan dan diterapkan Inovasi yang telah dilakukan oleh BPBD adalah membuat aplikasi SIPELANA (Sistem Pelayanan Kebencanaan) yang merupakan aplikasi untuk memudahkan dalam penanganan kebencanaan. Aplikasi ini pada tahun 2024 telah mulai digunakan, tetapi masih ada kendala dalam pengaplikasiannya seperti dalam mengakses formulir laporan bencana masih membingungkan bagi masyarakat.

### 2.1.6 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimum Tahun 2020-2024

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas. Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayanannya,

disusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah, karena pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan dasar ini harus mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam SPM yang ditetapkan masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L).

Penerapan SPM di Kabupaten Tanah Datar menjadi sangat urgent dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Di setiap Unit Kerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya sudah diberikan koridor berupa tugas dan fungsi yang menggambarkan cakupan kegiatan yang harus dijalankan pendanaan yang tertuang dalam APBD/APBN. Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM, hanya beberapa kegiatan pokok yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai kegiatan masing-masing unit kerja. Berdasarkan hasil pelaporan SPM melalui sistem pelaporan secara elektronik Departemen Dalam Negeri melalui aplikasi https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, dapat dilihat capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2024 adalah 100 % kategori Tuntas Paripurna. Hal ini menunjukkan konsistensinya Pemerintah Daerah untuk selalu mewujudkan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Rincian capaian SPM Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

1. Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 2.102
Realisasi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini | 54,49 | 88,44 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Pendidikan Dasar | 93,92 | 93,21 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan | 27,55 | 53,00 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan menunjukkan nilai positif dengan nilai capaian yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan terpenuhi secara merata dan berkualitas. Capaian yang semakin tinggi menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek ketersediaan fasilitas, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perluasan akses pendidikan dasar bagi seluruh anak usia sekolah. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan efektivitas sinergi antara kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program pendidikan di tingkat lokal, yang secara bertahap membawa dampak positif terhadap kualitas pendidikan dan pemerataan layanan di seluruh wilayah.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Tabel 2.103
Realisasi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 74,38 | 97,6 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 85,56 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita | 47,22 | 97,67 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | 0 | 10,5 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | 31,12 | 64,28 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | 64,02 | 97,8 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi | 21,62 | 87,79 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Militus | 65,59 | 92,13 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | 48,56 | 77,86 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB | 26,25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV | 46,04 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terlihat pada tabel diatas, bidang kesehatan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dengan nilai capaian yang meningkat setiap tahunnya. Nilai positif ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan capaian SPM kesehatan didorong oleh berbagai upaya, seperti perluasan cakupan imunisasi, peningkatan layanan ibu dan anak, penguatan program pencegahan penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Kemajuan ini juga menunjukkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan primer, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2.104
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari | 98,27 | 73,81 | 76,34 | 82,34 | 100 |
| 2. | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | 75,14 | 75,67 | 80,70 | 80,80 | 100 |

Sumber: LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Dari tabel diatas, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pekerjaan umum menunjukkan nilai capaian yang fluktuatif. Dimana terjadi penurunan capaian pada indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2021.

Selanjutnya, peningkatan capaian lainnya mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang memadai seperti akses terhadap jalan mantap, sistem drainase yang berfungsi serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kenaikan capaian tersebut juga merupakan hasil dari perencanaan yang lebih baik, penguatan koordinasi antar instansi serta optimalisasi penggunaan anggaran dan sumber daya. Dengan meningkatnya capaian SPM pekerjaan umum, kualitas pelayanan kepada masyarakat pun semakin baik, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 2.105
Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah | 100 | - | 100 | 100 | 100 |

Sumber: LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan perumahan rakyat menunjukkan peningkatan capaian yang konsisten setiap tahunnya, mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin akses masyarakat terhadap hunian layak. Peningkatan ini terlihat dari bertambahnya jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan perumahan, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, serta tersedianya infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan drainase di kawasan permukiman. Capaian yang terus naik juga menunjukkan bahwa program-program seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah baru bagi masyarakat miskin berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini menjadi indikator positif dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap tempat tinggal yang aman dan sehat.

5. Bidang Urusan Ketenetraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.106
Realisasi SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | |
| | - Pelayanan Pengobatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - Pelayanan Kerugian Materi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | | | | | |
| | - Layanan *Respon Time* Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit | 91,04 | 100 | 100 | 95,5 | - |
| | - Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian kebakaran | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| | - Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia Operasi Darurat NonKebakaran | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| | - Layanan Pemberdayaan Masyarakat/ relawan Kebakaran | 0 | 100 | 100 | 100 | - |
| | - Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Sumber: LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Pelaksanaan SPM pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan peningkatan capaian yang stabil setiap tahunnya, mencerminkan efektivitas peran pemerintah daerah dalam menjaga rasa aman dan nyaman bagi warganya. Peningkatan ini tercermin dari respons cepat terhadap kejadian gangguan ketertiban, meningkatnya kesiapsiagaan dan kapasitas personel linmas serta semakin luasnya jangkauan edukasi dan sosialisasi terkait penanggulangan bencana dan kedaruratan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pengawasan turut mendorong efisiensi pelayanan di bidang ini. Kenaikan capaian ini

menandakan bahwa upaya preventif dan kuratif dalam menjaga ketertiban serta perlindungan masyarakat terus mengalami perbaikan, yang berdampak langsung pada meningkatnya rasa aman dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

6. Bidang Urusan Bencana Daerah

Tabel 2.107
Realisasi SPM Urusan Bencana Daerah Tahun 2020-2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | | | | | |
| | - Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| | - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana | 55,54 | 56 | 100 | 100 | 96 |
| 2. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | | |
| | - Penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) | 0 | 80 | - | - | 100 |
| | - Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon) | 100 | 80 | - | - | 50 |
| | - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi | 33,33 | 100 | 100 | 28,57 | 5,18 |
| | - Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 0 | 100 | | - | 0 |
| | - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Saran Prasarana kesiapsiagaan Terhadap bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | |
| | - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah *Zoonosis* Prioritas | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | - Respon Cepat Darurat Bencana | 100 | 100 | 0 | - | 100 |
| | - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| | - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Pada tabel diatas dapat pada urusan kebencanaan masih menghadapi tantangan, terlihat dari adanya beberapa indikator capaian yang masih bernilai nol. Hal ini menunjukkan bahwa daerah belum memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan layanan dasar kebencanaan secara optimal seperti penyediaan sistem peringatan dini, pelatihan kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana. Tidak tercapainya target di beberapa aspek ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga terlatih serta bergantung pada sejauh mana kebijakan penanggulangan bencana dilaksanakan secara konsisten, terukur dan responsif terhadap risiko bencana yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

7. Bidang Urusan Sosial

Tabel 2.108
Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2020-2024

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang penyandang disabilitas terlantar luar panti | 22,21 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti | 9,12 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis uar panti | 55,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: LPPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan SPM pada urusan sosial menunjukkan tercapainya target setiap tahun. Hal ini, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan korban bencana sosial. Kenaikan capaian ini didukung oleh semakin intensifnya pendataan, penjangkauan, serta penyediaan layanan rehabilitasi sosial dan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat turut memperkuat pelaksanaan program-program pelayanan dasar sosial. Peningkatan ini menjadi indikator positif dalam pembangunan sosial yang inklusif, serta memperlihatkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan semakin membaik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa capaian SPM Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 yang berada pada kategori indeks pencapaian SPM tuntas paripurna. Meskipun capaian SPM Kabupaten Tanah Datar telah mencapai 100% dengan kategori indeks pencapaian SPM Tuntas Paripurna, namun masih ditemukan berbagai permasalahan atau kendala yang dihadapi Perangkat Daerah Pengampu SPM dalam pemenuhan dan penginputan SPM Tahun 2024. Hal ini dikarenakan pemenuhan SPM pada masing masing urusan memiliki metode dan pendekatan yang berbeda yang diterapkan oleh Perangkat Daerah Pengampu, umumnya juga merupakan kendala yang bersifat teknis yang bermuara kembali pada Perangkat Daerah Pengampu SPM.

Adapun permasalahan atau kendala lainnya yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Pengampu dalam pemenuhan SPM antara lain:

a. Terjadi perubahan anggaran dan revisi target akibat refocusing sehingga anggaran belum mencukupi atau terbatas untuk mencapai target;
b. Pelaporan masih ada yang tidak sesuai juknis (petunjuk teknis) disebabkan karena pemahaman tentang SPM yang tidak sama antar petugas;
c. Masih belum samanya persepsi dalam pengisian laporan SPM setiap triwulan di aplikasi e-spm; dan
d. Terlalu banyak aplikasi dengan output yang sama, dengan contoh kasus Kementerian A mempunyai aplikasi pelaporan SPM dan Kementerian B juga mempunyai aplikasi pelaporan SPM, sebaiknya adanya koordinasi antar kementerian terkait sehingga laporan bisa terintegrasi.

### 2.1.7 Evaluasi Terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) indikator dari 94 (sembilan puluh empat) target/sasaran global dan 17 (tujuh belas) goals. Dari 319 (tiga ratus sembilan belas) indikator TPB Indonesia 21 (dua puluh satu) indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 (dua ratus sembila puluh delapan) indikator bersifat umum. sehingga setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya. Indikator-indikator TPB dibagi dalam 4 (empat) kewenangan meliputi:

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat : 308;
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi : 235;
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten : 220; dan
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota : 222

Beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah:

1. Wewenang;
2. Kekhususan indikator;
3. Kondisi geografis; dan
4. Ketentuan indikator RPJMD.

Selain itu, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah daerah khusus yang meliputi indikator, kondisi geografis dan ketentuan indikator berdasarkan RPJMD.

Kabupaten Tanah Datar telah melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB);
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB);
4. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA).

Indikator capaian target diperoleh berdasarkan capaian masing-masing indikator pilar TPB. Adapun masing-masing pencapaian pada tiap pilar dapat dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.109
Capaian Indikator TPB

| No | Nama TPB | Indikator | Capaian | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SS | SB | BB | NA |
| 1 | Tanpa Kemiskinan | 23 | 11 | 10 | 2 | 0 |
| 2 | Tanpa Kelaparan | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | Kehidupan sehat dan Sejahtera | 34 | 12 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | Pendidikan berkualitas | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | Kesetaraan gender | 14 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | Air bersih dan sanitasi layak | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 7 | Menjamin akses energi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak | 19 | 2 | 14 | 0 | 3 |
| 9 | Infrastruktur, industri dan inovasi | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Mengurangi kesenjangan | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Kota dan pemukiman berkelanjutan | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Penanganan perubahan iklim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudra dan Maritim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | Kemitraan untuk mencapai tujuan | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 |
| Total | | 204 | 87 | 72 | 21 | 24 |
| Persentase | | | 42,6% | 35,3% | 10,3% | 11,8% |

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tanah Datar, 2024

Capaian tersebut dapat dijelaskan antara lain:

a. Indikator Target TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS).

   Secara keseluruhan, indikator yang masuk pada kategori ini sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) indikator atau bila dipersentasekan menjadi 42,6% dari 204 (dua ratus empat) indikator yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Capaian tertinggi terdapat pada tujuan ke 17 (tujuh belas) yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan sebanyak 13 (tiga belas) indikator pencapaian, sedangkan pada tujuan lainnya yang mencapai target hanya berkisar pada 2 (dua) hingga 12 (dua belas) target saja. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target pada tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan telah dilaksanakan dengan baik.

b. Indikator target TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB)

   Secara keseluruhan yang termasuk pada kategori ini hanya 72 (tujuh puluh dua) indikator dengan persentase capaian sebesar 35,3%. Indikator terbanyak pada kategori ini berada pada tujuan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak yang mencapai 14 (empat belas) indikator.

c. Indikator target TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB)

   Indikator pada kategori ini setelah dianalisa dan dilakukan verifikasi data merupakan TPB kewenangan dari provinsi atau pusat sehingga data capaiannya tidak dapat disediakan. Secara keseluruhan, indikator yang bukan kewenangan kabupaten berjumlah 21 (dua puluh satu) indikator atau sebesar 10,3% dari total keseluruhan indikator. Secara umum, indikator yang bukan kewenangan kabupaten ini berada pada tujuan 3 (tiga) yaitu kehidupan sehat dan sejahtera sebanyak 8 (delapan) indikator.

d. Indikator target TPB yang tidak/belum memiliki data (NA)

   Indikator pada kategori ini tidak dapat mendukung penjelasan capaiannya. Namun secara keseluruhan, indikator yang tidak memiliki data berada pada tujuan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh, yaitu sebanyak 6 (enam) indikator.

## 2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merupakan semua hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik pemerintah Kabupaten Tanah Datar sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Analisis gambaran keuangan daerah pada subbab ini dimaksud untuk menghasilkan gambaran tentang kinerja dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pada bab ini analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBD dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama lima tahun sebelumnya.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merinci APBD terdiri dari komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana pada tahun 2025 dimulai pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Prinsip pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada bab ini juga disajikan gambaran kinerja dan kebijakan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir dan kerangka pendanaan proyeksi APBD beserta kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama periode RPJMD Tahun 2025-2029.

### 2.2.1 Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2020-2024

Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang khususnya dalam memproyeksikan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya dapat diketahui rata-rata pertumbuhan dan kontribusi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator. Data yang disajikan pada realisasi tahun 2020 sampai tahun 2024 merupakan data yang telah diaudit oleh BPK yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tanah Datar.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan indikator menganalisis kemampuan keuangan daerah yang diukur melalui kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini juga terkait dengan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam membiayai pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.110
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

| Tahun | Pendapatan | PAD | DOFD (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.194.818.538.888 | 122.247.542.343 | 10,23 |
| 2021 | 1.251.060.500.704 | 121.384.958.232 | 9,70 |
| 2022 | 1.173.573.895.007 | 144.522.245.749 | 12,31 |
| 2023 | 1.255.732.645.591 | 150.888.841.206 | 12,02 |
| 2024 | 1.330.452.829.181 | 163.268.531.407 | 12,27 |
| Rata-rata | | | 11,31 |

Sumber: Bappenda Kabupaten Tanah Datar 2025, data diolah

Dari Tabel diatas tampak bahwa DOFD Kabupaten Tanah Datar periode 2020-2024 rata-rata sebesar 11,31%. Secara keseluruhan DOFD Kabupaten Tanah Datar fluktuatif dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan PAD di daerah Kabupaten Tanah Datar terutama di sektor pariwisata. Melihat perkembangan nilai DOFD Kabupaten Tanah Datar periode 2020-2024 yang fluktuatif dengan tingkat kemandirian yang belum tinggi namun menunjukkan tren positif dalam aspek kemandirian. Hal ini menunjukkan sedang terjadinya perkembangan ekonomi yang membaik. Tingkat kemandirian yang masih rendah tersebut merupakan hal yang wajar khususnya bagi daerah yang sedang berkembang dan membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah. Namun demikian tantangan terbesar Kabupaten Tanah Datar kedepan adalah bagaimana meningkatkan DOFD Kabupaten Tanah Datar agar lebih mandiri dalam membiayai pembangunan daerah.

### 2.2.2 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Komponen APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah pada periode anggaran. Sedangkan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kinerja Pendapatan Daerah

   Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pendapatan Daerah terdiri dari:

   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
      1) Pendapatan Pajak Daerah;
      2) Pendapatan Retribusi Daerah;
      3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
      4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

   b. Pendapatan transfer, meliputi:
      1) Pendapatan Transfer pemerintah pusat, terdiri atas:
         a) Dana Transfer Umum, terdiri dari:
            - Bagi Hasil Pajak

- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum

b) Dana transfer khusus, terdiri dari:
- Dana Alokasi Khusus Fisik
- Dana Alokasi khusus non fisik

c) Dana Insentif Daerah

d) Dana Desa

2) Pendapatan Transfer antar daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan dana hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah provinsi

b) Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi

c) Bantuan keuangan dari pemerintah lainnya

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi:

1) Pendapatan Hibah;
2) Dana Darurat; dan
3) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar selama lima tahun terakhir yakni tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi. Rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,72% dan dari segi capaian realisasi pendapatan terhadap target rata-rata selama lima tahun mencapai 98,21%. Berikut disajikan pada Tabel realisasi capaian pendapatan daerah dan tingkat pertumbuhan dan anggaran selama tahun 2020-2024.

Tabel 2.111
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Tingkat Capaian Realisasi, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi
Tahun 2020-2024

| Tahun | Anggaran | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | Pertumbuhan Anggaran (%) | Pertumbuhan Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.213.102.819.688 | 1.194.818.538.888 | 98,49 | -13,46 | -10,81 |
| 2021 | 1.263.943.445.644 | 1.251.060.500.704 | 98,98 | 4,19 | 4,71 |
| 2022 | 1.187.138.974.089 | 1.173.573.895.007 | 98,86 | -6,08 | -6,19 |
| 2023 | 1.266.540.689.506 | 1.255.732.645.591 | 99,15 | 6,69 | 7,00 |
| 2024 | 1.365.620.353.728 | 1.330.452.829.181 | 97,42 | 7,82 | 5,95 |
| Rata-Rata | 1.259.269.256.531 | 1.241.127.681.874 | 98,58 | -0,17 | 0,13 |

Sumber: BPKD Kabupaten Tanah Datar 2025, data diolah

Dari Tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2020-2024 tingkat capaian hampir 100%. Pada tahun 2020 target tidak tercapai sesuai yang ditetapkan, hal ini disebabkan efek dari pandemi Covid-19. Selain itu adanya perubahan regulasi dan kebijakan baik untuk PAD, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah sehingga membuat realisasi pendapatan dibawah 100%.

Berikut realisasi penerimaan pendapatan daerah selama tahun 2020-2024 yang disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.112
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

| No. | Uraian | Reliasasi (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | PENDAPATAN | 1.194.818.538.888 | 1.251.060.500.704 | 1.173.573.895.007 | 1.255.732.645.591 | 1.330.452.829.181 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 122.247.542.343 | 121.384.958.232 | 144.522.245.749 | 150.888.841.206 | 163.268.531.407 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 17.810.752.983 | 20.288.890.718 | 24.805.993.021 | 26.713.135.251 | 26.212.093.645 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 5.498.289.936 | 6.054.111.528 | 7.882.010.329 | 8.002.633.451 | 100.115.028.810 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 19.307.769.675 | 16.380.266.527 | 21.145.408.969 | 24.131.036.246 | 26.819.370.914 |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 79.630.729.750 | 78.661.689.460 | 90.688.833.431 | 92.042.036.258 | 10.122.038.038 |
| 1.2. | Pendapatan Transfer | 1.026.076.615.331 | 1.077.614.071.754 | 1.025.167.694.258 | 1.101.638.302.975 | 1.166.508.813.774 |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Daerah Pemerintah Pusat | 982.847.544.138 | 1.023.372.352.545 | 955.189.907.914 | 1.044.587.601.851 | 1.084.949.309.436 |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya | 43.229.071.193 | 54.241.719.209 | 69.977.786.344 | 57.050.701.124 | 81.559.504.338 |
| | | - | - | - | - | |
| 1.3. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 46.494.381.214 | 52.061.470.718 | 3.883.955.000 | 3.205.501.410 | 675.484.000 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 46.494.381.214 | 1.400.702.425 | 3.867.074.000 | 3.157.882.000 | 600.000.000 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | - | - | - | |
| 1.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan | - | 50.660.768.293 | 16.881.000 | 47.619.410 | 75.484.000 |
| 1.3.4 | Pendapatan dari Pengembalian Hibah | - | | | | |

Sumber: Bappenda dan BPKD Kabupaten Tanah Datar 2025

Pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020-2024 cenderung mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2022. Dalam rentang lima tahun tersebut, pendapatan transfer cenderung mengalami fluktuasi. Adapun penyebab terjadinya fluktuasi pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Pada Tahun 2020 terjadi penurunan besaran realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat untuk Kabupaten Tanah Datar dari sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp1.094.301.650.000,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp982.847.540.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau turun sebesar 10,19%. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi bencana non-alam pandemi *Covid*-19 yang mengganggu perekonomian nasional dan daerah. Pada tahun 2022 juga terjadi penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp68.182.444.631,00 (enam puluh delapan miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah); dan
2) Penurunan penerimaan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya (dana bagi hasil provinsi) pada tahun 2020 sebesar Rp43.229.070.000,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) dari sebelumnya Rp62.849.960.000,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau turun sebesar 31,2%.

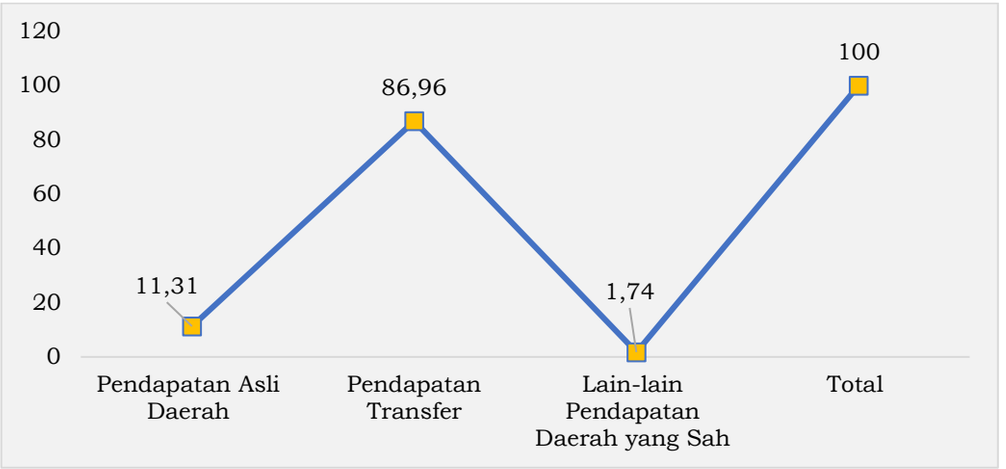
Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 didominasi oleh pendapatan transfer dengan porsi rata-rata sebesar 86,96%, pendapatan asli daerah sebesar 11,31% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1,74%. Walaupun kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat namun masih menunjukkan struktur pendapatan daerah yang masih belum kokoh karena tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer yang sangat tinggi. Berikut disajikan kontribusi masing-masing komponen dalam pendapatan daerah tahun 2020-2024 pada Tabel dan Gambar di bawah ini.

Tabel 2.113
Kontribusi Masing-Masing Komponen Dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024

| Uraian | Kontribusi Terhadap Pendapatan Daerah (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata |
| Pendapatan Asli Daerah | 10,23 | 9,70 | 12,31 | 12,02 | 12,27 | 11,31 |
| Pendapatan transfer | 85,88 | 86,14 | 87,35 | 87,73 | 87,68 | 86,96 |
| Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 3,89 | 4,16 | 0,33 | 0,26 | 0,05 | 1,74 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Bappenda Kabupaten Tanah Datar 2025, data diolah

Gambar 2.78
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024




Sumber: Bappenda dan BPKD Kabupaten Tanah Datar 2025, data diolah

Tabel 2.114
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024 (%)

| Tahun | PDRB ADHB | Pajak Daerah (Rp) | Rasio Pajak terhadap PDRB (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13.023.110.000.000 | 17.810.752.983 | 0,14 |
| 2021 | 13.590.940.000.000 | 20.288.890.718 | 0,15 |
| 2022 | 15.055.230.000.000 | 24.805.993.021 | 0,16 |
| 2023 | 16.459.560.000.000 | 26.713.135.251 | 0,16 |
| 2024 | 17.496.030.000.000 | 26.212.093.645 | 0,15 |

Sumber: Bappenda Kabupaten Tanah Datar, 2025 (data diolah)

Sementara itu rasio pajak daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap PDRB ADHB selama lima tahun terakhir berada pada angka 0,15. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.

2. Kinerja Belanja Daerah

Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan daerah Kabupaten Tanah Datar selama periode 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja daerah periode 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.115
Target dan Realisasi Belanja Daerah, Tingkat Capaian Realisasi, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi
Tahun 2020-2024

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Tingkat Capaian (%) | Pertumbuhan Anggaran (%) | Pertumbuhan Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.134.730.320.340 | 1.185.202.602.007 | 104,45 | -11,03 | -14,07 |
| 2021 | 1.332.019.634.616 | 1.207.540.100.532 | 90,65 | 17,39 | 4,06 |
| 2022 | 1.288.136.563.234 | 1.186.934.494.81 | 92,14 | -3,29 | -1,70 |
| 2023 | 1.353.250.990.374 | 1.263.875.980.296 | 93,40 | 5,05 | 6,48 |
| 2024 | 1.444.187.319.890 | 1.365.213.503.622 | 94,53 | 6,72 | 8,02 |
| Rata-rata | 1.310.464.966.691 | 1.241.753.336.255 | 95,03 | 2,97 | 0,56 |

Sumber : BPKD Kabupaten Tanah Datar 2025, data diolah

Selama tahun 2020-2024 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan yakni dari Rp1.185.202.602.007,00 (satu triliun seratus delapan puluh lima miliar dua ratus dua juta enam ratus dua ribu tujuh rupiah) pada tahun 2020 menjadi Rp1.365.213.503.622,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) pada tahun 2024 dengan pertumbuhan realisasi sebesar 0,56% dalam kurun waktu lima tahun. Tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja daerah sebesar 95,03% seperti terlihat pada tabel di atas. Berikut realisasi belanja daerah kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024:

Tabel 2.116
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2020-2024

| No | Uraian | Realisasi (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 2. | BELANJA | 1.185.202.602.007,00 | 1.207.540.100.532,00 | 1.186.934.494.819,00 | 1.263.875.980.296,00 | 1.365.213.503.621,00 |
| 2.1. | BELANJA OPERASI | 897.949.318.515,00 | 911.571.581.053,00 | 917.865.291.852,00 | 955.299.324.197,00 | 1.056.186.174.986,00 |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 576.053.769.522,00 | 601.752.758.242,00 | 586.563.868.053,00 | 580.584.953.955,00 | 663.256.952.520,00 |
| 2.1.2. | Belanja Barang Jasa | 262.011.572.764,00 | 283.101.777.092,00 | 297.692.417.640,00 | 324.792.448.240,00 | 342.756.603.810,00 |
| 2.1.3. | Belanja Subsidi | | | 6.284.167,00 | 128.028.333,00 | 94.063.333,00 |
| 2.1.4. | Belanja Hibah | 56.071.195.568,00 | 18.346.239.719,00 | 28.455.301.092,00 | 43.388.767.947,00 | 45.995.605.600,00 |
| 2.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 3.812.780.661,00 | 8.370.806.000,00 | 5.147.420.900,00 | 6.405.125.722,00 | 4.082.949.723,00 |
| 2.1.6. | Belanja Bantuan Keuangan | - | | | | - |
| 2.2. | BELANJA MODAL | 107.785.756.266,00 | 142.518.736.749,00 | 112.271.747.688,00 | 139.528.482.640,00 | 143.408.477.344,00 |
| 2.2.1. | Belanja Modal Tanah | 56.100.000,00 | 801.887.000,00 | 885.474.662,00 | 29.713.000,00 | 1.615.869.600,00 |
| 2.2.2. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 43.343.485.114,00 | 30.510.440.890,00 | 30.645.393.407,00 | 43.919.250.537,00 | 26.945.755.401,00 |
| 2.2.3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 21.514.533.738,00 | 57.459.920.032,00 | 20.340.217.759,00 | 35.180.680.265,00 | 11.858.545.807,00 |
| 2.2.4. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 39.707.183.600,00 | 49.387.457.519,00 | 56.375.421.694,00 | 56.677.602.560,00 | 98.522.462.047,00 |
| 2.2.5. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.636.573.114,00 | 4.359.031.308,00 | 4.025.240.166,00 | 3.689.612.188,00 | 4.268.771.204,00 |

| No | Uraian | Realisasi (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 2.2.6. | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 527.880.700,00 | | | 31.624.090,00 | 197.073.285,00 |
| 2.3. | BELANJA TAK TERDUGA | 41.888.585.937,00 | 1.133.039.075,00 | 3.005.442.078,00 | 954.498.507,00 | 6.149.873.219,00 |
| 2.3.1 | Belanja Tak Terduga | 41.888.585.937,00 | 1.133.039.075,00 | 3.005.442.078,00 | 954.498.507,00 | 6.149.873.219,00 |
| 3. | BELANJA TRANSFER | 137.578.941.289,00 | 152.316.743.655,00 | 153.792.013.201,00 | 168.093.674.952,00 | 159.468.978.073,00 |
| 3.1.1 | Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 2.235.845.563,00 | 3.546.107.942,00 | 3.599.471.388,00 | 2.365.943.652,00 | 3.908.158.473,00 |
| 3.1.2 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 446.212.092,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Belanja Bantuan Keuangan | 134.896.883.634,00 | 148.770.635.713,00 | 150.192.541.813,00 | 165.727.731.300,00 | 155.560.819.600,00 |
| | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : BPKD Kab. Tanah Datar 2025

Ditinjau dari kontribusi komponen pembentuk belanja daerah tahun 2020-2024 bahwa belanja operasi memiliki proporsi terbesar yakni 76,30%, diikuti belanja modal 11,34%, belanja transfer 12,74% dan belanja tak terduga 0,19%. Sementara itu belanja pegawai memiliki kontribusi terbesar terhadap belanja operasi yakni rata-rata sebesar 63,53% dan diikuti belanja barang dan jasa dengan rata-rata 31,82%. Tabel 2.92 dibawah merupakan kontribusi komponen belanja daerah Tanah Datar tahun 2020-2024.

Belanja pegawai merupakan proporsi terbesar dalam komponen belanja operasi yakni sebesar rata-rata 63,53%, sementara itu jika dibandingkan dengan total APBD belanja pegawai memiliki proporsi sebesar 48,84% dari total belanja APBD. Belanja barang dan jasa memiliki proporsi rata-rata 31,82% dari total belanja operasi, dan jika dibandingkan dengan total belanja APBD belanja barang dan jasa memiliki proporsi sebesar 25,1% pada tahun 2024. Belanja subsidi dan belanja hibah memiliki proporsi masing-masing sebesar 0,004% dan 4,05% dari komponen belanja operasi.

Belanja modal memiliki proporsi rata-rata 10,38% dari total belanja APBD. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan memiliki proporsi terbesar diantara komponen belanja modal lainnya yakni sebesar 46,20% diikuti komponen belanja modal peralatan dan mesin sebesar 27,84% serta belanja modal gedung dan bangunan dengan proporsi sebesar 22,38%. Belanja tidak terduga memiliki proporsi sebesar 0,19% dari total belanja APBD dan belanja transfer memiliki proporsi sebesar 12,74%.

Tabel 2.117
Kontribusi Komponen Belanja Daerah Tahun 2020-2024

| Uraian | Kontribusi Komponen Belanja Daerah (%) | | | | | Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| BELANJA OPERASI | 75,76 | 75,49 | 77,33 | 75,58 | 77,36 | 76,30 |
| Belanja Pegawai | 64,15 | 66,01 | 63,91 | 60,78 | 62,80 | 63,53 |
| Belanja Barang Jasa | 29,18 | 31,06 | 32,43 | 34,00 | 32,41 | 31,82 |
| Belanja Subsidi | - | - | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
| Belanja Hibah | 6,24 | 2,01 | 3,10 | 4,54 | 4,35 | 4,05 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,42 | 0,92 | 0,56 | 0,67 | 0,39 | 0,59 |
| Belanja Bantuan Keuangan | - | - | - | - | - | - |
| BELANJA MODAL | 9,09 | 11,80 | 9,46 | 11,04 | 10,50 | 10,38 |
| Belanja Modal Tanah | 0,05 | 0,56 | 0,79 | 0,02 | 1,13 | 0,51 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 40,21 | 21,41 | 27,30 | 31,48 | 18,79 | 27,84 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 19,96 | 40,32 | 18,12 | 25,21 | 8,27 | 22,38 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 36,84 | 34,64 | 50,21 | 40,62 | 68,70 | 46,20 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2,45 | 3,06 | 3,59 | 2,64 | 2,98 | 2,94 |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0,49 | - | - | 0,02 | 0,14 | 0,13 |

| Uraian | Kontribusi Komponen Belanja Daerah (%) | | | | | Rata-Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| BELANJA TAK TERDUGA | 0,098 | 0,094 | 0,253 | 0,076 | 0,45 | 0,19 |
| Belanja Tak Terduga | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 |
| BELANJA TRANSFER | 13,13 | 12,61 | 12,96 | 13,30 | 11,68 | 12,74 |
| Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 2,33 | 2,33 | 2,34 | 1,41 | 2,45 | 2,17 |
| Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | | | | | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 97,67 | 97,67 | 97,66 | 98,59 | 97,55 | 97,83 |

Sumber: BPKD Kabupaten Tanah Datar 2025

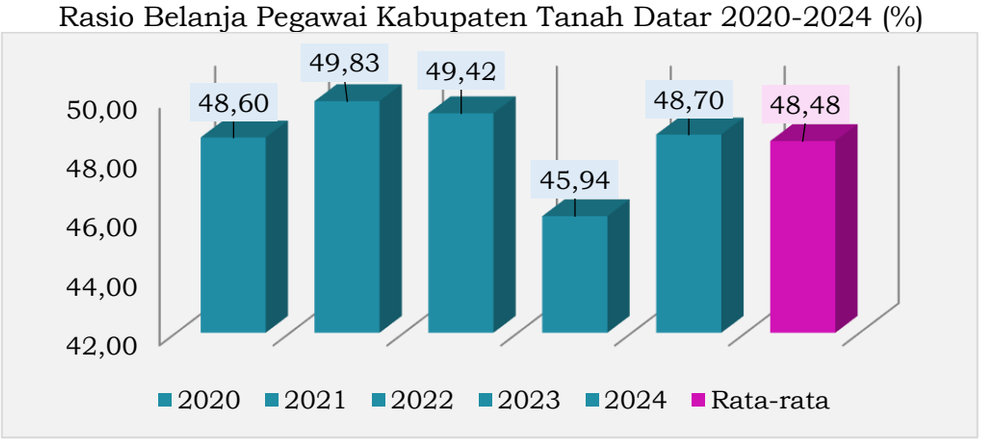
Sementara itu pada tabel 2.100 merupakan rasio belanja pegawai (termasuk belanja guru) Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024. Pada tabel terlihat rasio belanja pegawai masih tinggi yakni sebesar 48,48% (rata-rata). Pemerintah pusat sendiri telah mengamanatkan bahwa rasio belanja pegawai minimal 30% diluar Tunjangan Profesi Guru dibanding APBD pada tahun 2027, hal ini tentu menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah untuk merampingkan struktur belanja pegawainya.

Tabel 2.118
Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Datar 2020-2024

| Uraian | Realisasi | | | | | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| Total Belanja (Rp Juta) | 1,185,202.60 | 1,207,540.10 | 1,186,934.49 | 1,263,875.98 | 1,444,187.32 | 1,257,548.1 |
| Belanja Pegawai (Rp Juta) | 576,053.77 | 601,752.76 | 586,563.87 | 580,584.95 | 703,354.28 | 609,661.93 |
| Rasio Belanja Pegawai (%) | 48.60 | 49.83 | 49.42 | 45.94 | 48.70 | 48.48 |

Sumber: BPKD Kabupaten Tanah Datar 2025

Gambar 2.79
Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Datar 2020-2024 (%)




Sumber: BPKD Kabupaten Tanah Datar 2025, data diolah

3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Analisis terhadap pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2020-2024 terhadap surplus atau defisit belanja daerah sebagai bahan untuk

menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dan dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan netto dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Kebijakan yang dibuat dalam penganggaran adalah kebijakan anggaran berimbang. Hal ini berarti semua SiLPA tahun sebelumnya direncanakan untuk digunakan untuk mendanai pembangunan pada tahun berikutnya. SiLPA juga menunjukkan adanya upaya efisiensi oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA dan penerimaan hutang daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan bersumber dari penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Berikut disajikan pada Tabel dibawah realisasi pembiayaan dan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2019-2023:

Tabel 2.119
Realisasi Pembiayaan selama tahun 2020-2024

| Uraian | Realisasi (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| Pendapatan | 1.194.818.538.888 | 1.251.060.500.704 | 1.173.573.895.007 | 1.255.732.645.591 | 1,330,452,829,181 |
| Belanja | 1.185.202.602.007 | 1.207.540.100.532 | 1.186.934.494.819 | 1.263.875.980.296 | 1,365,213,503,622 |
| Defisit Surplus | 34.439.110.000 | 43.540.400.000 | (13.360.600.000) | (8.143.340.000) | (34,760,674,441) |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 67.510.250.000 | 70.626.180.000 | 111.596.590.000 | 87.710.300.000 | 78,566,966,162 |
| Penggunaan SiLPA | 67.510.250.000 | 70.626.180.000 | 111.596.590.000 | 87.710.300.000 | 78,566,966,162 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 6.500.000.000 | 2.550.000.000 | 10.525.690.000 | 1.000.000.000 | |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 6.500.000.000 | 2.550.000.000 | 10.525.690.000 | 1.000.000.000 | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 61.010.250.000 | 68.076.190.000 | 101.070.900.000 | 86.710.300.000 | 78,566,966,162 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 70.626.190.000 | 111.596.590.000 | 87.710.300.000 | 78.566.970.000 | 43.806.291.722 |

Sumber: BPKD Kabupaten Tanah Datar 2025

Dari Tabel terlihat bahwa pada tahun 2022, 2023 dan 2024 pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalami defisit anggaran namun defisit tersebut masih dapat ditutupi oleh pembiayaan neto yang ada, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalami surplus anggaran.

4. Neraca Daerah

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Setiap elemen utama neraca kemudian dijabarkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2020-2024 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.120
Neraca pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Rata-Rata Pertumbuhan Masing-Masing Komponen Neraca
Tahun 2020-2024 (dalam Rupiah)

| Uraian | Neraca pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan rata-rata pertumbuhan (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
| Aset | | | | | | |
| Aset lancar | 139.862.613.797,74 | 161.784.721.455,30 | 147.169.312.543,80 | 153.343.752.043,42 | 118.899.231.884,13 | (2,08) |
| Investasi jangka panjang | 142.929.930.225,54 | 145.766.801.379,09 | 157.139.325.063,41 | 156.959.834.564,46 | 156.009.147.813,20 | 2,57 |
| Aset tetap | 1.013.674.113.712,31 | 987.548.072.750,40 | 927.785.585.421,39 | 906.970.693.481,21 | 850.478.514.487,71 | (3,73) |
| Aset lainnya | 12.511.336.681,63 | 19.195.797.873,70 | 18.310.777.128,85 | 18.766.248.741,33 | 7.122.018.822,35 | (2,74) |
| Jumlah aset | 1.308.977.994.417,22 | 1.314.295.393.458,49 | 1.250.405.000.157,45 | 1.236.040.528.830,42 | 1.132.508.913.007,39 | (2,94) |
| Kewajiban | | | | | | |
| Kewajiban jangka pendek | 26.957.690.860,48 | 23.303.089.913,23 | 28.133.941.002,81 | 32.229.934.852,31 | 38.925.813.518,07 | 14,04 |
| Kewajiban jangka panjang | - | - | - | - | | |
| Jumlah kewajiban | 26.957.690.860,48 | 23.303.089.913,23 | 28.133.941.002,81 | 32.229.934.852,31 | 38.925.813.518,07 | 14,04 |
| Ekuitas | | | | | | |
| Ekuitas | 1.282.020.303.556,74 | 1.290.992.303.545,26 | 1.222.271.059.154,64 | 1.203.810.593.978,11 | 1.093.583.099.489,32 | (3,30) |
| Jumlah kewajiban dan ekuitas | 1.308.977.994.417,22 | 1.314.295.393.458,49 | 1.250.405.000.157,45 | 1.236.040.528.830,42 | 1.132.508.913.007,39 | (2,94) |

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset daerah dikelompokkan menjadi (1) Aset Lancar, (2) Investasi Jangka Panjang, (3) Aset Tetap, (4) Dana Cadangan dan (5) Aset lainnya. Bila dilihat dari komponen aset, aset lancar mengalami pertumbuhan minus 1,21% dalam jangka waktu lima tahun. Untuk Investasi jangka panjang terjadi kenaikan pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 2.57%.

Aset tetap memiliki pertumbuhan yang cenderung menurun dari tahun 2020 sampai 2024 dengan penurunan rata-rata sebesar 3,73%. Sementara itu investasi jangka panjang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,57%. Aset lainnya memiliki pertumbuhan dan berfluktuatif setiap tahunnya namun cenderung menurun pada tahun 2024.

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Komponen kewajiban adalah kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam rentang tahun 2020-2024 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sampai tahun 2024 adalah berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki saldo sebesar Rp1.093.583.099.489,32 (satu triliun sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah) atau mempunyai pertumbuhan sebesar minus 3,30 % per tahun. Ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan bersih Pemerintah Daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

### 2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2020-2024

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil; dan
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber- sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:
   a) Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan. Dengan ekstensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif tapi belum terdaftar, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan secara intensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pembenahan manajemen data penerimaan terkait PAD, melakukan evaluasi dan revisi peraturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan;
   b) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di Badan Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil, Kecamatan serta Nagari;
   c) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
   d) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
   e) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah yang berpotensi menghasilkan PAD; dan
   f) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan transfer dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:
   a) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21;
   b) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam pendapatan transfer;
   c) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pendapatan transfer.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan dengan secara efektif, efisien dan ekonomis;
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
4. Pemenuhan belanja pegawai dan mengantisipasi kenaikan gaji PNS/PPPK;
5. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan;
6. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
7. Mempercepat capaian target-target program dan kegiatan yang merupakan agenda nasional.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah: Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal BUMD; dan
2. Penyertaan modal untuk penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah PDAM yang bersumber dari pemanfaatan laba bersih dalam rangka penambahan, peningkatan, perluasan sarana, prasarana serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

Kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu diarahkan pada upaya meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan Keuangan Daerah pada bantuan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat terlihat dari data yang ditampilkan pada bagian kinerja keuangan masa lalu di atas, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi peningkatan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

### 2.2.4 Proyeksi Keuangan Daerah tahun 2026-2030

Dalam menetapkan perencanaan program pembangunan daerah disertai dengan adanya kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan atau proyeksi merupakan kemampuan penerimaan daerah baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan daerah serta proyeksi belanja daerah. Proyeksi merupakan pagu indikatif yang dalam pelaksanaannya ke depan akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan pendekatan yang sebenarnya. Adapun proyeksi tersebut di atas dengan melakukan analisis dari pertumbuhan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya. Mengingat proyeksi dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi sehingga proyeksi penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah sudah memperhitungkan untuk proyeksi sampai pada perubahan APBD.

Untuk melakukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah postur APBD terutama pada struktur belanja daerah sangat berbeda dibandingkan dengan postur APBD pada masa lalu. Postur APBD yang digunakan dalam melakukan proyeksi APBD telah menggunakan struktur APBD sesuai yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga dan Belanja Transfer.

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

   Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:
   a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
   b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
   c. Kebijakan di bidang keuangan negara dan daerah.

   Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Proyeksi ini

menggunakan tahun dasar tahun 2024 serta identifikasi potensi Pendapatan Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat, proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.121
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar 2026-2030

| Uraian | Realisasi 2024 | Baseline | Proyeksi/Target (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 |
| -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | | | |
| PENDAPATAN | 1.330.452.829.181 | 1.273.348.800.416 | 1.318.597.091.139 | 1.420.064.172.886 | 1.464.306.630.220 | 1.580.886.651.436 | 1.743.888.404.648 |
| Pendapatan Asli Daerah | 163.268.531.407 | 185.345.177.383 | 231.681.471.729 | 334.235.469.096 | 379.563.755.133 | 497.228.519.225 | 661.313.930.569 |
| Pajak Daerah | 26.212.093.645 | 55.766.686.000 | 71.821.256.236 | 91.212.995.420 | 117.664.764.091 | 154.140.840.960 | 205.007.318.476 |
| Retribusi Daerah | 100.115.028.810 | 97.572.079.383 | 120.474.365.299 | 193.002.443.930 | 197.373.152.669 | 258.558.829.997 | 343.883.243.896 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 26.819.370.914 | 27.500.000.000 | 32.435.406.042 | 41.192.965.673 | 53.138.925.719 | 69.611.992.691 | 92.583.950.280 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 10.122.038.038 | 4.506.412.000 | 6.950.444.152 | 8.827.064.073 | 11.386.912.654 | 14.916.855.577 | 19.839.417.917 |
| Pendapatan Transfer | 1.166.508.813.774 | 1.088.003.623.033 | 1.086.915.619.410 | 1.085.828.703.791 | 1.084.742.875.087 | 1.083.658.132.212 | 1.082.574.474.079 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.084.949.309.436 | 1.046.875.182.000 | 1.045.828.306.818 | 1.044.782.478.511 | 1.043.737.696.033 | 1.042.693.958.337 | 1.041.651.264.378 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 81.559.504.338 | 41.128.441.033 | 41.087.312.592 | 41.046.225.279 | 41.005.179.054 | 40.964.173.875 | 40.923.209.701 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 675.484.000 | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Hibah | 600.000.000 | - | - | | - | - | - |
| Dana Darurat | | | - | | - | - | - |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan | 75.484.000 | - | | | - | - | - |
| Pendapatan dari Pengembalian Hibah | | | | | - | - | - |

Sumber : Tim Penyusun RPJMD 2025-2029

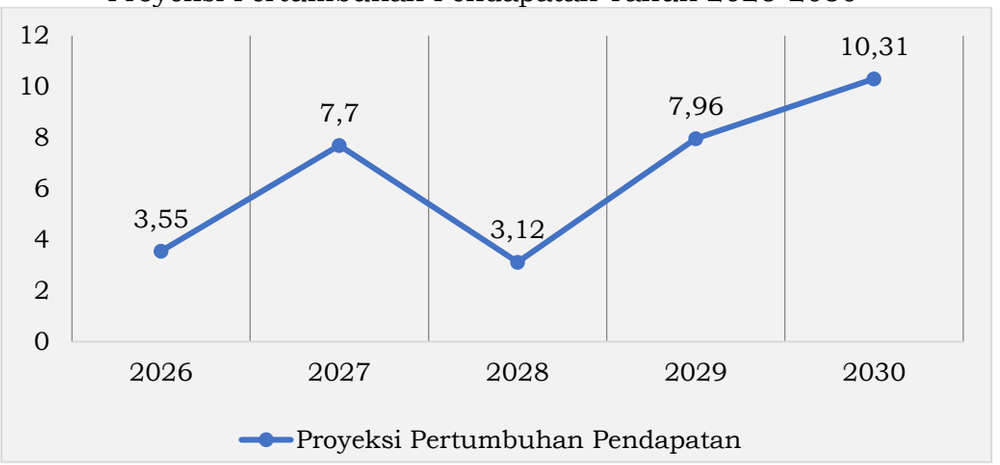
Tabel 2.122
Proyeksi Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026-2030

| No. | Uraian | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Proporsi | Pertumbuhan | Proporsi | Pertumbuhan | Proporsi | Pertumbuhan | Proporsi | Pertumbuhan | Proporsi | Pertumbuhan |
| | | (%) | | (%) | | (%) | | (%) | | (%) | |
| 1 | PENDAPATAN | | 3,55 | | 7,70 | | 6,10 | | 7,96 | | 10,31 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 17,57 | 25,00 | 23,54 | 44,27 | 25,92 | 29,00 | 31,45 | 31,00 | 37,92 | 33,00 |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 31,00 | 28,79 | 27,29 | 27,00 | 31,00 | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 33,00 |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | 52,00 | 23,47 | 57,74 | 60,20 | 52,00 | 29,00 | 52,00 | 31,00 | 52,00 | 33,00 |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 14,00 | 17,95 | 12,32 | 27,00 | 14,00 | 29,00 | 14,00 | 31,00 | 14,00 | 33,00 |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang Sah | 3,00 | 54,23 | 2,64 | 27,00 | 3,00 | 29,00 | 3,00 | 31,00 | 3,00 | 33,00 |
| 1.2. | Pendapatan Transfer | 82,43 | -0,10 | 76,46 | -0,10 | 74,08 | -0,10 | 68,55 | -0,10 | 62,08 | -0,10 |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Daerah Pemerintah Pusat | 96,22 | -0,10 | 96,22 | -0,10 | 96,22 | -0,10 | 96,22 | -0,10 | 96,22 | -0,10 |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya | 3,78 | -0,10 | 3,78 | -0,10 | 3,78 | -0,10 | 3,78 | -0,10 | 3,78 | -0,10 |
| 1.3. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.3.4 | Pendapatan dari Pengembalian Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Sumber : Tim Penyusun RPJMD 2025-2029, Data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2026-2030 direncanakan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2026 ditargetkan jumlah pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp1.318.597.091.139,00 (satu triliun tiga ratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan pada tahun berikutnya diproyeksikan naik rata-rata sebesar 6,53% dengan memperhatikan potensi penerimaan pendapatan daerah. Pada tahun 2030 ditargetkan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp1.743.888.404.648,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) atau naik 10,31% dibanding tahun sebelumnya. Berikut perbandingan proyeksi pertumbuhan pendapatan tahun 2026-2030 yang disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.80
Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2026-2030




Sumber: Tim Penyusun RPJMD 2025 - 2029, data diolah

Berikut analisis proyeksi dan kontribusi/proporsi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2026-2030 direncanakan bersumber dari 4 (empat) sumber PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah, disajikan proyeksi PAD Kabupaten Tanah Datar tahun 2026-2029 sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2026-2030 ditargetkan mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan persentase rata-rata 29,37% setiap tahunnya dengan memperhatikan potensi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar. Ditargetkan pada tahun 2026, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar berhasil mencapai angka sebesar Rp231.681.471.729.00 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) Proyeksi PAD pada tahun 2026 tidak terlepas dari kondisi pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 telah dikeluarkan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, sehingga diharapkan dengan regulasi tersebut bisa membuat potensi pendapatan daerah meningkat. Peningkatan PAD Tanah Datar akan terus dilakukan mengingat masih banyak potensi-potensi pendapatan daerah yang belum dioptimalisasi. Pada tahun 2030 ditargetkan sebesar Rp661.313.930.569,00 (enam ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau naik sebesar 33% dibanding tahun sebelumnya. Porsi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata sebesar 26%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kemandirian keuangannya.

Jika ditinjau dari proporsi sumber PAD, sektor retribusi daerah dan pajak daerah menjadi andalan utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penerimaan PAD tahun 2026-2030. Proporsi pajak daerah terhadap total PAD rata-rata per tahun sebesar 30,26%, disusul oleh Retribusi Daerah rata-rata sebesar 53,15%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 14% dan terakhir lain-lain PAD berkontribusi rata-rata sebesar 3%.

Tabel berikut merupakan proyeksi rasio pajak daerah terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Tabel 2.123
Proyeksi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Tahun 2026-2030

| Tahun | PDRB ADHB | Pajak Daerah (Rp) | Rasio Pajak terhadap PDRB (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18.418.460.939.272,70 | 71.821.256.236 | 0,39 |
| 2027 | 19.201.537.370.545,50 | 91.212.995.420 | 0,48 |
| 2028 | 19.984.613.801.818,20 | 117.664.764.091 | 0,59 |
| 2029 | 20.767.690.233.090,90 | 154.140.840.960 | 0,74 |
| 2030 | 21.550.766.664.363,60 | 205.007.318.476 | 0,95 |

Sumber: Tim Penyusun RPJMD 2025 - 2029, data diolah

Dalam menentukan target Pendapatan Asli Daerah perlu memperhatikan beberapa asumsi dibawah ini, yaitu :

1) Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya;
2) Potensi pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya; dan
3) Arah kebijakan makroekonomi daerah ataupun Nasional untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

b. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Pendapatan

Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya dan Bantuan Keuangan. Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer pada tahun 2026-2030 diproyeksikan menurun setiap tahunnya seiring dengan kebijakan nasional terkait efisiensi belanja dan tuntutan untuk kemandirian fiskal daerah yang lebih tinggi. Dari segi proporsi terhadap pendapatan, pendapatan transfer diproyeksikan menurun setiap tahunnya yang disebabkan kenaikan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih memiliki kontribusi terbesar sebagai sumber pendapatan. Walaupun secara nilai besarnya pendapatan transfer mengalami penurunan, dan secara proporsi ditargetkan turun setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tanah Datar.

2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, *e-wallet,* dan aplikasi *mobile banking*. Semua jenis pajak dan retribusi harus bisa dibayarkan melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat;
2. Penyempurnaan basis data pajak dan retribusi serta penyempurnaan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan membangun analisis data besar (*big data analytics*) untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. *Tax intelligence* berbasis data ini akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi pajak tinggi namun masih belum dimaksimalkan. Dengan menggunakan alat analisis data dan model prediksi, pengelolaan pajak daerah akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah;
3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui program literasi pajak untuk masyarakat dan pelaku usaha;
4. Optimalisasi aset daerah untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan :
   a. Memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan pihak ketiga;
   b. Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan; dan
   c. Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk *public-private partnership* (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
5. Meningkatkan jumlah kepemilikan Saham pada BUMD;
6. Meningkatkan Kinerja BUMD dan mengembangkan BUMD yang efektif dan efisien;

7. Optimalisasi *Cash Management* Kas Daerah;
8. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah dengan melakukan implementasi dashboard monitoring pendapatan secara real time yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah;
9. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Insentif Fiskal, Hibah dan reward lainnya bagi daerah serta melakukan kerja sama dengan Pihak Swasta.
    a. Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta (kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU) dalam pengelolaan proyek besar yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerjasama untuk pengelolaan layanan publik; dan
    b. Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan.
10. Peningkatan SDM Pengelola Pajak Daerah melalui diklat untuk Pejabat Penilai, Penagihan, Pemeriksa dan Juru Sita;
11. Menerapkan *performance-Based Revenue Targeting* per Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki *key performance indicators* (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur. Penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis pada pencapaian target PAD akan memastikan setiap Perangkat Daerah memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk memantau, mengevaluasi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak;
12. Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat Online untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan;
13. Selain mengoptimalkan PAD diatas maka Pemerintah Daerah juga harus menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan melalui pengelolaan fiskal yang efisien (*Smart Fiscal Management*), melalui langkah-langkah yang dapat diambil yakni :
    a. *Fixed Cost Discipline and Variable Cost Agility* yakni Pemerintah Daerah harus menjaga keseimbangan antara *fixed cost dan variable cost*, dengan fokus pada efisiensi anggaran. Rasio *fixed cost* harus dijaga agar tidak melebihi 50% dari total anggaran belanja daerah. Untuk anggaran variable cost, prioritas harus diberikan pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi; dan
    b. *Full Implementation of E-Budgeting and E-Monitoring*, yakni sebuah sistem yang diimplementasikan secara penuh dan komprehensif antara *e-budgeting* dan *e-monitoring* dalam memastikan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Dengan sistem *real-time data analytics*, Pemerintah Daerah akan lebih mudah memantau alokasi anggaran dan memastikan

bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

3. Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan, pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Pada awal tahun 2025, pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk melihat kembali program-program dan anggaran yang telah disusun sebelumnya untuk dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk proyeksi belanja daerah prinsip efisiensi dan efektivitas akan selalu diterapkan ke depannya. Pada tahun 2026-2030 diasumsikan total belanja sama dengan total pendapatan, yang berarti seluruh perencanaan belanja daerah sudah disesuaikan dengan perencanaan pendapatan daerah.

Mulai tahun 2027, rasio belanja pegawai diterapkan sebesar 30% dari APBD dan rasio belanja infrastruktur 40% dari APBD (diluar belanja transfer) serta belanja pendidikan sebesar 20% dari APBD. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penundaan dan Pemotongan Tranfer Keuangan Daerah akibat tidak memenuhi belanja wajib Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu perlu arah kebijakan keuangan yang tepat dalam pengelolaan anggaran daerah.

Dalam melakukan proyeksi belanja daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2026-2030, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Dari sisi Belanja Daerah diproyeksi berdasarkan pertimbangan realisasi masa lalu dan diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Nilai belanja daerah tahun 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun tahun 2025, namun pada tahun 2027 hingga tahun 2030 terjadi peningkatan belanja daerah terutama dalam komponen belanja modal sebagai bentuk peningkatan infrastruktur daerah, sehingga bila pada tahun anggaran 2026 jumlah belanja daerah diproyeksi sebesar Rp1.318.597.091.138,00 (satu triliun tiga ratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) maka pada tahun 2030 di prediksi telah mencapai Rp1.743.888.404.468,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)

Kelompok belanja operasi diperkirakan tidak mengalami pertumbuhan, sementara itu secara umum komponen belanja operasi tidak mengalami peningkatan yang signifikan mengingat alokasi belanja operasi dialihkan untuk belanja infrastruktur. Bila pada tahun anggaran 2026 jumlah belanja operasi adalah sebesar Rp950.544.945.885,00 (sembilan ratus lima puluh miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) maka pada tahun anggaran 2030 diperkirakan jumlah belanja operasi diproyeksi sebesar Rp932.497.031.688,00 (sembilan ratus tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). Selain itu dalam kurun waktu tersebut diproyeksikan akan ada penambahan belanja hibah pada tahun 2029 karena adanya penyelenggaraan Pemilu Serentak. Belanja pegawai mulai tahun 2027 mengalami penurunan untuk memenuhi rasio belanja pegawai sesuai amanat Undang-Undang. Belanja subsidi dan belanja bantuan sosial diasumsikan sama dengan angka pada APBD tahun 2025.

Belanja Modal yang merupakan sebagai *mandatory spending* untuk pembangunan infrastruktur juga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 52,16%. Pada tahun 2026 anggaran belanja modal diproyeksi sebesar Rp199.538.190.928,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan pada tahun anggaran 2030 diproyeksi menjadi sebesar Rp647.493.646.345,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). Belanja modal terbesar dialokasikan untuk jalan, irigasi dan jaringan. Ini diperlukan dalam rangka perbaikan jalan-jalan dan jembatan yang rusak serta perbaikan irigasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Untuk belanja tidak terduga diprediksi tidak mengalami pertumbuhan hal ini mempertimbangkan realisasi belanja tidak terduga periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2026 sampai tahun anggaran 2030 belanja tak terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Belanja tidak terduga lebih diprioritaskan untuk sesuatu yang bersifat mendesak dan darurat.

Selanjutnya belanja transfer mengalami penurunan pada tahun anggaran 2026-2030. Mulai tahun 2027 dan seterusnya belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus merupakan komponen dari belanja transfer diasumsikan nol setiap tahunnya dan belanja tersebut dialihkan kepada belanja infrastruktur yang terletak pada komponen belanja modal sebagai bagian mencukupi rasio belanja infrastruktur pelayanan publik.

Gambar 2.81
Proyeksi Pertumbuhan Belanja 2026-2030




Sumber: Tim Penyusun RPJMD 2025 - 2029, data diolah

Tabel 2.124
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026-2030

| No | Uraian | Baseline Realisasi | Tahun Berjalan | Proyeksi/Target (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2024 | 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | | | |
| 2. | BELANJA | 1.365.213.503.622 | 1.371.381.995.926 | 1.318.597.091.138 | 1.420.064.172.886 | 1.464.306.630.220 | 1.580.886.651.436 | 1.743.888.404.648 |
| 2.1. | BELANJA OPERASI | 1.056.186.174.986 | 1.076.937.726.547 | 950.544.945.885 | 816.732.165.191 | 825.812.905.050 | 905.450.788.344 | 932.497.031.688 |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 663.256.952.520 | 759.066.661.768 | 684.155.964.090 | 605.595.964.090 | 617.936.537.772 | 653.736.537.772 | 701.736.537.772 |
| 2.1.2. | Belanja Barang Jasa | 342.756.603.810 | 292.379.586.023 | 253.851.259.695 | 203.598.479.001 | 200.338.645.178 | 226.222.771.816 | 223.222.771.816 |
| 2.1.3. | Belanja Subsidi | 94.063.333 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
| 2.1.4. | Belanja Hibah | 45.995.605.600 | 22.953.756.656 | 10.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 22.953.756.656 | 5.000.000.000 |
| 2.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 4.082.949.723 | 2.052.722.100 | 2.052.722.100 | 2.052.722.100 | 2.052.722.100 | 2.052.722.100 | 2.052.722.100 |
| 2.2. | BELANJA MODAL | 143.408.477.344 | 100.827.758.899 | 199.538.190.928 | 440.745.930.187 | 475.491.581.330 | 511.996.849.606 | 647.493.646.345 |
| 2.2.1. | Belanja Modal Tanah | 1.615.869.600 | - | 2.800.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| 2.2.2. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.945.755.401 | 63.911.399.520 | 12.484.670.509 | 14.484.670.509 | 15.484.670.509 | 16.484.670.509 | 17.484.670.509 |
| 2.2.3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 11.858.545.807 | 28.549.210.225 | 27.183.485.004 | 143.871.533.084 | 156.871.533.084 | 155.871.533.084 | 162.871.533.084 |
| 2.2.4. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 98.522.462.047 | 5.006.266.150 | 153.541.108.261 | 263.841.744.204 | 284.587.395.348 | 321.092.663.623 | 448.589.460.362 |
| 2.2.5. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.268.771.204 | 3.092.197.380 | 3.246.807.249 | 3.263.041.285 | 3.263.041.285 | 3.263.041.285 | 3.263.041.285 |
| 2.2.6. | Belanja Modal Aset Lainnya | 197.073.285 | 268.685.624 | 282.119.905 | 284.941.104 | 284.941.104 | 284.941.104 | 284.941.104 |
| 2.3. | BELANJA TAK TERDUGA | 6.149.873.219 | 30.479.940.581 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 2.3.1 | Belanja Tak Terduga | 6.149.873.219 | 30.479.940.581 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 2.4 | BELANJA TRANSFER | 159.468.978.073 | 163.136.569.899 | 158.513.954.326 | 152.586.077.509 | 153.002.143.839 | 153.439.013.486 | 153.897.726.615 |

| No | Uraian | Baseline Realisasi | Tahun Berjalan | Proyeksi/Target (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2024 | 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 3.394.731.231 | 6.564.077.134 | 6.892.280.991 | 7.236.895.040 | 7.598.739.792 | 7.978.676.782 | 8.377.610.621 |
| 2.4.1.1 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 513.427.242 | 983.611.400 | 1.032.791.970 | 1.084.431.569 | 1.138.653.147 | 1.195.585.804 | 1.255.365.094 |
| 2.4.1.2 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 155.560.819.600 | 155.588.881.365 | 150.588.881.365 | 144.264.750.900 | 144.264.750.900 | 144.264.750.900 | 144.264.750.900 |
| | Surplus (defisit) | (34.760.674.441) | (98.033.195.510) | - | - | - | - | - |

Sumber: Tim Penyusun RPJMD 2025 - 2029

Tabel 2.125
Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026-2030

| No. | Uraian | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Proporsi | Pertumbuhan | Proporsi | Pertumbuhan | Proporsi | Pertumbuhan | Proporsi | Pertumbuhan | Proporsi | Pertumbuhan |
| | | (%) | | (%) | | (%) | | (%) | | (%) | |
| 2. | BELANJA | | -3,85 | | 7,70 | | 3,12 | | 7,96 | | 10,31 |
| 2.1. | BELANJA OPERASI | 72,09 | -11,74 | 57,51 | -14,08 | 56,40 | 1,11 | 57,27 | 9,64 | 53,47 | 2,99 |
| 2.1.1. | Belanja Pegawai | 71,98 | -9,87 | 74,15 | -11,48 | 74,83 | 2,04 | 72,20 | 5,79 | 75,25 | 7,34 |
| 2.1.2. | Belanja Barang Jasa | 26,71 | -13,18 | 24,93 | -19,80 | 24,26 | -1,60 | 24,98 | 12,92 | 23,94 | -1,33 |
| 2.1.3. | Belanja Subsidi | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 2.1.4. | Belanja Hibah | 1,05 | -56,43 | 0,61 | -50,00 | 0,61 | 0,00 | 2,54 | 359,08 | 0,54 | -78,22 |
| 2.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 0,22 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 2.2. | BELANJA MODAL | 15,13 | 97,90 | 31,04 | 120,88 | 32,47 | 7,88 | 32,39 | 7,68 | 37,13 | 26,46 |
| 2.2.1. | Belanja Modal Tanah | 1,40 | 0,00 | 3,40 | 435,71 | 3,15 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 2,32 | 0,00 |
| 2.2.2. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6,26 | -80,47 | 3,29 | 16,02 | 3,26 | 6,90 | 3,22 | 6,46 | 2,70 | 6,07 |
| 2.2.3. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 13,62 | -4,78 | 32,64 | 429,26 | 32,99 | 9,04 | 30,44 | -0,64 | 25,15 | 4,49 |
| 2.2.4. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 76,95 | 2966,98 | 59,86 | 71,84 | 59,85 | 7,86 | 62,71 | 12,83 | 69,28 | 39,71 |
| 2.2.5. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1,63 | 5,00 | 0,74 | 0,50 | 0,69 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 2.2.6. | Belanja Modal Aset Lainnya | 0,14 | 5,00 | 0,06 | 1,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 2.3. | BELANJA TAK TERDUGA | 0,76 | -67,19 | 0,70 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 2.3.1 | Belanja Tak Terduga | 100,00 | 31,24 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.4 | BELANJA TRANSFER | 12,02 | -2,83 | 10,75 | -3,74 | 10,45 | 0,27 | 9,71 | 0,29 | 8,82 | 0,30 |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 4,35 | 5,00 | 4,74 | 5,00 | 4,97 | 5,00 | 5,20 | 5,00 | 5,44 | 5,00 |
| 2.4.1.1 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 0,65 | 5,00 | 0,71 | 5,00 | 0,74 | 5,00 | 0,78 | 5,00 | 0,82 | 5,00 |
| 2.4.1.2 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 95,00 | -3,21 | 94,55 | -4,20 | 94,29 | 0,00 | 94,02 | 0,00 | 93,74 | 0,00 |

Sumber: Tim Penyusun RPJMD 2025 - 2029, data diolah

Pada tabel diatas terlihat bahwa belanja operasi masih mendominasi dalam hal proporsi dari total belanja APBD. Tahun 2026 proporsi belanja operasi sebesar 72,09% dan tingkat pertumbuhan sebesar -11,74% dari tahun 2025. Dalam lima tahun ke depan proporsi dan pertumbuhan belanja operasi akan berkurang mengingat untuk memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur pada APBD. Belanja pegawai masih menjadi proporsi terbesar dalam komponen belanja operasi secara keseluruhan dengan tingkat persentase mencapai 73,68% secara rata-rata lima tahun. Namun secara keseluruhan proporsi belanja atau rasio belanja pegawai termasuk guru berada pada angka 43,66% dari total APBD. Belanja modal yang merupakan komponen utama dari belanja infrastruktur Pelayanan Publik juga mengalami peningkatan baik dari segi proporsi dan juga tingkat pertumbuhan belanja. Pada tahun 2026 proporsi belanja modal ditargetkan sebesar 15,13% dan terus ditingkatkan tahun 2030 menjadi 37,13%. Komponen belanja lainnya yakni belanja tidak terduga dan belanja transfer tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal proporsi maupun pertumbuhan belanja. Proyeksi belanja pegawai diluar tunjangan guru dan belanja infrastruktur pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel Proyeksi Rasio Belanja Pegawai dan Infrastruktur Pelayanan Publik.

4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk membiayai pengeluaran yang harus tetap dilakukan untuk menjaga kelangsungan operasional pemerintahan atau kewajiban jangka pendek yang tidak bisa ditunda termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN;
2. Pemenuhan alokasi belanja wajib sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undang diantaranya adalah Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah, dimana dalam APBD termasuk alokasi belanja untuk menandai Urusan Pemerintah Daerah tertentu yang besaran penggunaannya telah ditentukan meliputi:
   a. Belanja pendidikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD
   b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja Daerah paling lambat 1 januari 2027;
   c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa; dan

Selain itu berikut beberapa arah kebijakan belanja lainnya :

1) Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien serta menghindari defisit yang besar
2) Pengadaan barang/belanja modal dan pemeliharaan barang secara selektif sesuai dengan kebutuhan
3) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
5) Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
6) Belanja daerah dialokasikan untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar, alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan Usaha Mikro, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya yaitu pembangunan mental dan reformasi birokrasi.
7) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
8) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis nagari membangun', pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
9) Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
11) Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tanah Datar mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan Pendapatan Daerah.

12) Belanja Daerah dialokasikan untuk mendanai peningkatan infrastruktur dan penanggulangan pasca bencana, revitalisasi serta rekonstruksi.
13) Melengkapi infrastruktur pelayanan dasar, aksesibilitas dan konektivitas daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor unggulan seperti Pertanian, pariwisata dan UMKM.

5. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis atas proyeksi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran (SILPA). Analisis ini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA dimasa mendatang. Adapun data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA di masa mendatang digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.82
Analisa Proyeksi Pembiayaan Daerah




Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pada proyeksi tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, merencanakan adanya pinjaman daerah sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang bersumber dari pihak ketiga. Pinjaman daerah tersebut digunakan untuk pembangunan ruangan VVIP Rumah Sakit Daerah dan fasilitas kesehatan untuk pelayanan publik. Pinjaman tersebut diproyeksi berdampak pada peningkatan PAD Kabupaten Tanah Datar, khususnya retribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu dalam pembiayaan juga dilakukan penyertaan modal untuk perusahaan daerah atau rencana investasi penyertaan modal lainnya. Berikut disajikan proyeksi defisit dan pembiayaan Kabupaten Tanah Datar tahun 2026-2030.

Tabel 2.126
Proyeksi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026-2030

| No | Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Realisasi | Baseline | Proyeksi/Target (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2024 | Tahun Berjalan 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 3. | PEMBIAYAAN | | | | | | | |
| 3.1. | PENERIMAAN DAERAH | 78.566.966.162 | 98.033.195.510 | 45.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 78.566.966.162 | 98.033.195.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Pencairan dana cadangan | | | | | | | |
| 3.1.3. | Penerimaan pinjaman daerah | | | 45.000.000.000 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.2. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | - | - | 10.000.000.000 | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 |
| 3.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | | | | | | | |
| 3.2.2. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | - | - | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 3.2.3. | Pembayaran Pokok utang | | | | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 78.566.966.162 | 98.033.195.510 | 35.000.000.000 | - 22.000.000.000 | - 22.000.000.000 | - 22.000.000.000 | - 22.000.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN | 43.806.291.722,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Tim Penyusun RPJMD 2025 - 2029,

Tabel 2.127
Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026-2030

| NO | Uraian | Realisasi 2024 | Baseline | Proyeksi/Target (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | | | |
| A | PENDAPATAN DAERAH | 1.330.452.829.181 | 1.273.348.800.416 | 1.318.597.091.139 | 1.420.064.172.886 | 1.464.306.630.220 | 1.580.886.651.436 | 1.743.888.404.648 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 163.268.531.407 | 185.345.177.383 | 231.681.471.729 | 334.235.469.096 | 379.563.755.133 | 497.228.519.225 | 661.313.930.569 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 26.212.093.645 | 55.766.686.000 | 71.821.256.236 | 91.212.995.420 | 117.664.764.091 | 154.140.840.960 | 205.007.318.476 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 100.115.028.810 | 97.572.079.383 | 120.474.365.299 | 193.002.443.930 | 197.373.152.669 | 258.558.829.997 | 343.883.243.896 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 26.819.370.914 | 27.500.000.000 | 32.435.406.042 | 41.192.965.673 | 53.138.925.719 | 69.611.992.691 | 92.583.950.280 |
| 1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 10.122.038.038 | 4.506.412.000 | 6.950.444.152 | 8.827.064.073 | 11.386.912.654 | 14.916.855.577 | 19.839.417.917 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 1.166.508.813.774 | 1.088.003.623.033 | 1.086.915.619.410 | 1.085.828.703.791 | 1.084.742.875.087 | 1.083.658.132.212 | 1.082.574.474.079 |
| 2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.084.949.309.436 | 1.046.875.182.000 | 1.045.828.306.818 | 1.044.782.478.511 | 1.043.737.696.033 | 1.042.693.958.337 | 1.041.651.264.378 |
| 2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 81.559.504.338 | 41.128.441.033 | 41.087.312.592 | 41.046.225.279 | 41.005.179.054 | 40.964.173.875 | 40.923.209.701 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 675.484.000 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Pendapatan Hibah | 600.000.000 | - | - | | - | - | - |
| 3.2 | Dana Darurat | | | - | | - | - | - |
| 3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan | 75.484.000 | - | - | | - | - | - |
| 3.4 | Pendapatan dari Pengembalian Hibah | | - | - | | - | - | - |
| B | BELANJA | 1.365.213.503.622 | 1.371.381.995.926 | 1.318.597.091.139 | 1.420.064.172.886 | 1.464.306.630.220 | 1.580.886.651.436 | 1.743.888.404.648 |
| 4 | BELANJA OPERASI | 1.056.186.174.986 | 1.076.937.726.547 | 950.544.945.885 | 816.732.165.191 | 825.812.905.050 | 905.450.788.344 | 932.497.031.688 |
| 4.1 | Belanja Pegawai | 663.256.952.520 | 759.066.661.768 | 684.155.964.090 | 605.595.964.090 | 617.936.537.772 | 653.736.537.772 | 701.736.537.772 |
| 4.2 | Belanja Barang Jasa | 342.756.603.810 | 292.379.586.023 | 253.851.259.695 | 203.598.479.001 | 200.338.645.178 | 226.222.771.816 | 223.222.771.816 |
| 4.3 | Belanja Subsidi | 94.063.333 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
| 4.4 | Belanja Hibah | 45.995.605.600 | 22.953.756.656 | 10.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 22.953.756.656 | 5.000.000.000 |

| NO | Uraian | Realisasi 2024 | Baseline | Proyeksi/Target (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 |
| 4.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4.082.949.723 | 2.052.722.100 | 2.052.722.100 | 2.052.722.100 | 2.052.722.100 | 2.052.722.100 | 2.052.722.100 |
| 5 | BELANJA MODAL | 143.408.477.344 | 100.827.758.899 | 199.538.190.928 | 440.745.930.187 | 475.491.581.330 | 511.996.849.606 | 647.493.646.345 |
| 5.1 | Belanja Modal Tanah | 1.615.869.600 | - | 2.800.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| 5.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.945.755.401 | 63.911.399.520 | 12.484.670.509 | 14.484.670.509 | 15.484.670.509 | 16.484.670.509 | 17.484.670.509 |
| 5.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 11.858.545.807 | 28.549.210.225 | 27.183.485.004 | 143.871.533.084 | 156.871.533.084 | 155.871.533.084 | 162.871.533.084 |
| 5.4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 98.522.462.047 | 5.006.266.150 | 153.541.108.261 | 263.841.744.204 | 284.587.395.348 | 321.092.663.623 | 448.589.460.362 |
| 5.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.268.771.204 | 3.092.197.380 | 3.246.807.249 | 3.263.041.285 | 3.263.041.285 | 3.263.041.285 | 3.263.041.285 |
| 5.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 197.073.285 | 268.685.624 | 282.119.905 | 284.941.104 | 284.941.104 | 284.941.104 | 284.941.104 |
| 6 | BELANJA TAK TERDUGA | 6.149.873.219 | 30.479.940.581 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 6.1 | Belanja Tak Terduga | 6.149.873.219 | 30.479.940.581 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 7 | BELANJA TRANSFER | 159.468.978.073 | 163.136.569.899 | 158.513.954.326 | 152.586.077.509 | 153.002.143.839 | 153.439.013.486 | 153.897.726.615 |
| 7.1 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 3.394.731.231 | 6.564.077.134 | 6.892.280.991 | 7.236.895.040 | 7.598.739.792 | 7.978.676.782 | 8.377.610.621 |
| 7.2 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 513.427.242 | 983.611.400 | 1.032.791.970 | 1.084.431.569 | 1.138.653.147 | 1.195.585.804 | 1.255.365.094 |
| 7.3 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 155.560.819.600 | 155.588.881.365 | 150.588.881.365 | 144.264.750.900 | 144.264.750.900 | 144.264.750.900 | 144.264.750.900 |
| | Surplus (defisit) | (34.760.674.440.72) | (98.033.195.510) | - | - | - | - | - |
| C | PEMBIAYAAN | | | | | | | |
| 8 | PENERIMAAN DAERAH | 78.566.966.162 | 98.033.195.510 | 45.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 78.566.966.162 | 98.033.195.510 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Pencairan dana cadangan | | | | | | | |
| 8.3 | Penerimaan pinjaman daerah | | | 45.000.000.000 | | | | |
| 9 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | - | - | 10.000.000.000 | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 |
| 9.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | | | | |
| 9.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | - | - | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |

| NO | Uraian | Realisasi 2024 | Baseline | Proyeksi/Target (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2030 |
| 9.3 | Pembayaran Pokok utang | | | | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 78.566.966.162 | 98.033.195.510 | 35.000.000.000 | - 22.000.000.000 | - 22.000.000.000 | - 22.000.000.000 | - 22.000.000.000 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN | 43.806.291.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Sumber : Tim Penyusun RPJMD 2025 - 2029,

6. Arah Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah :

1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten; dan
2. Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
b. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
c. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
d. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan dilihat dari kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan tahun 2025-2030, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dan perlu melakukan inovasi dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi/diversifikasi BUMD dan PAD dari sektor hasil kekayaan dipisahkan.

7. Proyeksi Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Arah Kebijakan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

a. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan

setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti; (1) belanja pegawai Antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet; dan

b. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena selama ini Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak membuat kebijakan Dana Cadangan, dan tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang, maka pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* terdiri pada belanja operasi; gaji dan tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta operasional KDH/WKDH, belanja bagi hasil kepada Desa atau Nagari. Berikut proyeksi untuk belanja wajib dan mengikat Kabupaten Tanah Datar tahun 2026-2030 seperti terlihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.128
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Tanah Datar
Tahun 2026-2030

| No | Uraian | Target/Tahun (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Belanja Pegawai | 684.155.964.090 | 605.595.964.090 | 617.936.537.772 | 653.736.537.772 | 701.736.537.772 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 253.851.259.695 | 203.598.479.001 | 200.338.645.178 | 226.222.771.816 | 223.222.771.816 |
| 3 | Belanja Bagi hasil | 7.925.072.961 | 8.321.326.609 | 8.737.392.939 | 9.174.262.586 | 9.632.975.715 |
| 4 | Belanja Pemenuhan SPM | 29.848.638.686 | 30.147.125.072.86 | 30.448.596.323,59 | 30.753.082.286.82 | 31.060.613.109,69 |
| | **Total** | 975,780,935,432 | 847.662.894.773 | 857.461.172.213 | 919.886.654.461 | 965.652.898.413 |

Sumber : Tim Penyusun RPJMD 2025 -2029, Data diolah

Pada tahun 2027, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 146 ayat (1) yang menyatakan "Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD dan Pasal 147 ayat (1) yang menyatakan "Daerah wajib mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Oleh sebab itu pada tabel dibawah diberikan proyeksi untuk Rasio Belanja Pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik dengan asumsi sebagai berikut:

a. Tidak ada pertumbuhan jumlah pegawai dan peningkatan belanja dapat berubah apabila ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menaikkan gaji dan tunjangan ASN atau pengangkatan ASN;
b. Pertumbuhan ASN 0% (*Zero Growth*) yaitu penambahan ASN dilakukan untuk menggantikan ASN Pensiun. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga mengeluarkan Surat Edaran Bupati Tanah Datar Nomor 100.3.4.2/582/BKPSDM-2025 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Permohonan Pindah/Mutasi PNS Masuk ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar; dan

c. Belanja infrastruktur pelayanan publik diambil dari komponen belanja modal, dan belanja pemeliharaan serta belanja operasional terkait pelayanan publik

Tabel 2.129
Proyeksi Rasio Belanja Pegawai
Kabupaten Tanah Datar tahun 2026-2030

| Uraian | Target/Proyeksi (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Total Belanja | 1.318.597.091.138 | 1.420.064.172.886 | 1.464.306.630.220 | 1.580.886.651.436 | 1.743.888.404.648 |
| Belanja Pegawai (luar TPG guru) | 504.617.474.841 | 426.057.474.841 | 438.398.048.523 | 474.198.048.523 | 522.198.048.523 |
| Rasio Belanja Pegawai (Luar TPG guru) % | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Sumber: Tim Penyusun RPJMD 2025 -2029, Data diolah

Tabel 2.130
Proyeksi Rasio Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Kabupaten Tanah Datar tahun 2026-2030

| No. | Komponen Perhitungan | Tahun 2026 (Rp) | Tahun 2027 (Rp) | Tahun 2028 (Rp) | Tahun 2029 (Rp) | Tahun 2030 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah |
| | Total Belanja | 1.318.597.091.138 | 1.420.064.172.886 | 1.464.306.630.220 | 1.580.886.651.436 | 1.743.888.404.648 |
| 1 | Belanja Modal | 199.538.190.928 | 440.745.930.187 | 475.491.581.330 | 511.996.849.606 | 647.493.646.345 |
| | Belanja Modal Tanah | 2.800.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 12.484.670.509 | 14.484.670.509 | 15.484.670.509 | 16.484.670.509 | 17.484.670.509 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 27.183.485.004 | 143.871.533.084 | 156.871.533.084 | 155.871.533.084 | 162.871.533.084 |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 153.541.108.261 | 263.841.744.204 | 284.587.395.348 | 321.092.663.623 | 448.589.460.362 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.246.807.249 | 3.263.041.285 | 3.263.041.285 | 3.263.041.285 | 3.263.041.285 |
| | Belanja Modal Aset Lainnya | 282.119.905 | 284.941.104 | 284.941.104 | 284.941.104 | 284.941.104 |
| 2 | Belanja Pendukung Infrastruktur Pelayanan Publik | 123.967.770.914.94 | 66.182.215.113 | 53.284.410.693 | 60.839.779.472 | 75.324.555.244 |
| | Belanja Pemeliharaan | 13.967.673.364.94 | 30.852.215.113 | 33.284.410.693 | 35.839.779.472 | 45.324.555.244 |
| | belanja operasional Perangkat Daerah terkait Pelayanan Publik | 35.330.000.000 | 35.330.000.000 | 20.000.000.000 | 25.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 3 | Jumlah Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Jumlah 1 dan 2) | 323.505.961.843 | 506.928.145.300 | 528.775.992.024 | 572.836.629.078 | 722.818.201.589 |
| 4 | Belanja Transfer | 158.513.954.326 | 152.586.077.509 | 153.002.143.839 | 153.439.013.486 | 153.897.726.615 |
| 5 | Total Belanja dikurangi belanja transfer | 1.160.083.136.813 | 1.267.478.095.378 | 1.311.304.486.380 | 1.427.447.637.950 | 1.589.990.678.033 |
| 6 | Rasio Belanja Infrastruktur (%) | 28 | 40,00 | 40,32 | 40,13 | 45,46 |

Sumber: Tim Penyusun RPJMD 2025 -2029, Data diolah

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan optimalisasi belanja pegawai dan belanja infrastruktur melalui berbagai kebijakan antara lain:

a. Melakukan "*re-counting*" (penghitungan kembali) terkait kebutuhan jumlah pegawai di Kabupaten Tanah Datar
b. Penataan struktur organisasi, rasionalisasi jumlah Perangkat Daerah untuk mencegah pemborosan anggaran pegawai. Optimalisasi SDM melalui redistribusi kebutuhan riil, bukan sekedar penempatan formal
c. Efisiensi belanja pegawai, pengendalian tambahan penghasilan pegawai (TPP/Tamsil) berdasarkan kinerja dan beban kerja
d. Peningkatan PAD, optimalisasi belanja dari Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan transfer bersifat spesifik seperti DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah maupun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mendukung program-program prioritas tanpa menambah beban belanja pegawai.

8. Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana. Mengingat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempunyai hutang dan ada penyertaan modal sehingga dalam pengukuran kapasitas riil, pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah dikurangi dengan belanja yang bersifat wajib dan mengikat dan juga dikurangi pengeluaran pembiayaan serta yang menjadi prioritas utama. Kapasitas rill Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.131
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026-2030

| No | Uraian | Proyeksi/Target (Rp) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Pendapatan | 1.318.597.091.139 | 1.420.064.172.886 | 1.464.306.630.220 | 1.580.886.651.436 | 1.743.888.404.648 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penerimaan Pembiayaan | 45.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Penerimaan | 1.363.597.091.139 | 1.420.064.172.886 | 1.464.306.630.220 | 1.580.886.651.436 | 1.743.888.404.648 |
| | Dikurangi | | | | | |
| 4 | Belanja Wajib dan Mengikat | 975.780.935.432 | 847.662.894.773 | 857.461.172.213 | 919.886.654.461 | 965.652.898.413 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000.000 | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 | 22.000.000.000 |
| | Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan | 377.816.155.707 | 550.401.278.114 | 584.845.458.007 | 638.999.996.975 | 756.235.506.235 |

Sumber : Tim Penyusun RPJMD 2025 - 2029

## 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan sering kali muncul akibat adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang tercapai saat ini dengan apa yang direncanakan dan diharapkan di masa depan. Berdasarkan kondisi riil pada saat perencanaan, kesenjangan ini mencerminkan adanya perbedaan antara tujuan yang ingin dicapai dan realitas yang ada, yang kemudian mempengaruhi arah dan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah dapat timbul karena kekuatan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang tidak diperbaiki, peluang yang terlewatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi dengan baik.

Kajian terhadap isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan. Permasalahan pembangunan daerah digambarkan sebagai kondisi yang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup berbagai aspek, baik dari segi perekonomian, sosial maupun infrastruktur, yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan perkembangan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan permasalahan utama yang ditemukan, maka perlu dirumuskan isu strategis yang mencakup tantangan atau peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Isu

strategis ini memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian kondisi yang diinginkan di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk menyusun strategi yang tepat guna menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif untuk mengatasi potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang, dengan meminimalisir risiko dan memaksimalkan potensi yang ada. Dengan demikian, identifikasi permasalahan pembangunan dan rumusan isu strategis menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanah Datar, yang akan menentukan arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

### 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Tanah Datar mencerminkan ketidaksesuaian antara pencapaian yang diinginkan dan kondisi riil yang ada saat ini. Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam beberapa sektor, seperti infrastruktur dan perekonomian, tantangan besar tetap ada, termasuk rendahnya cakupan layanan dasar, ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta keterbatasan akses terhadap layanan publik yang merata. Hal ini berakar dari kekuatan daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dan kelemahan dalam pengelolaan sumber daya. Meskipun sektor pertanian dan pariwisata menunjukkan keberhasilan, masih ada potensi yang belum optimal, dan ketidakmerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang dapat mengatasi ketimpangan dan memaksimalkan potensi yang ada secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

1. Identifikasi Permasalahan
   a. Belum optimalnya peningkatan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.

Tabel 2.132
Pemetaan Permasalahan Belum Optimalnya Peningkatan Kehidupan Beragama, Beradat Dan Berbudaya

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1. | Menurunnya pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari | • Pengaruh modernisasi dan gaya hidup<br>• Kurangnya kesadaran dan pemahaman agama yang mendalam | • Dominasi media sosial dan teknologi yang membawa nilai-nilai sekuler<br>• Keterbatasan pendidikan agama yang aplikatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari |
| 2. | Menurunnya pemahaman dan penghayatan generasi muda terhadap nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau | • Terbatasnya kapasitas dan sumber daya lembaga adat seperti KAN, LKAAM, dan Bundo Kanduang dalam menjalankan peran strategisnya<br>• Belum berhasil mengandalkan modal budaya sebagai basis inovasi kreatif lewat teknologi informatika, misalnya dalam hal | • Kurangnya regulasi di tingkat daerah yang berporos pada pemajuan kebudayaan dengan semangat memperkaya keberagaman<br>• Belum optimalnya tata kelola sumber daya manusia kebudayaan.<br>• Masih rendahnya persentase peran |

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | pemanfaatan manuskrip, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.<br>• Masih rendahnya pelestarian warisan budaya. | lembaga adat dan budaya.<br>• Masih rendahnya perlindungan pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). |
| 3. | Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga | • Kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam keluarga<br>• Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga,<br>• Keterbatasan akses terhadap program pembinaan dan pendampingan keluarga | • Masih belum optimalnya dukungan dalam mengawal tumbuh kembang anak, termasuk di dalamnya dukungan ibu hamil, nutrisi yang memadai bagi anak, pendidikan hingga anak mampu tumbuh kembang dan berkarya.<br>• Masih perlunya pengelolaan yang optimal bagi anak-anak terlantar, yatim piatu, juga kelompok lansia sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Kabupaten Tanah Datar.<br>• Belum optimalkan koordinasi lintas sektor dimana pendekatan untuk peningkatan kualitas keluarga masih dilakukan secara parsial padahal harus dilakukan secara holistik.<br>• Masih terjadinya perkawinan usia anak dibawah umur disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan.<br>• Masih tingginya prevelansi *stunting* yang merupakan salah satu faktor penentu penciptaan SDM Berkualitas untuk masa depan.<br>• Masih rendahnya persentase nagari ramah anak. |
| 4. | Masih adanya praktik diskriminasi gender yang membatasi peran dan kesempatan Perempuan | • Masih adanya kecenderungan perempuan mendapat stereotip yang merendahkan seperti, perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, tidak tahan banting.<br>• Masih adanya kemiskinan ekonomi terhadap | • Adanya perlakuan menomorduakan perempuan, pemimpin masyarakat hanya pantas dipegang oleh lelaki, perempuan hanya dapat menjadi pemimpin hanya sebatas pada kaumnya (sesama perempuan). |

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | perempuan terutama oleh perempuan desa yang berprofesi sebagai petani, hal ini berawal dari asumsi bahwa petani identik dengan profesi laki-laki. Di luar pekerjaan petani, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga berimbas pada perbedaan gaji yang diterima perempuan dan laki-laki. | • Tindak kekerasan (*violence*) terhadap perempuan karena perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk pemukulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual.<br>• Masih rendahnya persentase nagari ramah perempuan. |

b. Belum optimalnya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tabel 2.133
Pemetaan Permasalahan Belum Optimalnya Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1. | Belum Optimalnya Derajat Kesehatan Masyarakat | • Masih adanya kesenjangan akses layanan kesehatan<br>• Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan<br>• Masih tingginya Prevalensi Stunting | • Masih minimnya aksesibilitas layanan kesehatan maternal, kualitas perawatan selama kehamilan dan persalinan, pendidikan kesehatan ibu, dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu dapat mempengaruhi Angka Kematian Ibu<br>• Kurangnya pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang pola asuh dan gizi anak yang baik<br>• Masih kurangnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Tuberkulosis (*treatment coverage*)<br>• Keterbatasan sumber daya keuangan menjadi hambatan utama dalam mencapai UHC.<br>• Tidak meratanya distribusi kesehatan<br>• Belum optimalnya penerapan teknologi di bidang kesehatan |
| 2. | Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia | • Kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah<br>• Terbatasnya akses dan pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran di daerah terpencil dan kurang berkembang | • Kondisi sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah dan fasilitas belajar belum optimal.<br>• Masih banyaknya sekolah yang kekurangan guru, hal ini menyebabkan kualitas pengajaran menjadi kurang optimal dan siswa tidak dapat memperoleh |

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | • Kurangnya fasilitas dan dukungan untuk pendidikan inklusif<br>• Belum optimalnya efektivitas penyelenggaraan pendidikan | pendidikan yang berkualitas.<br>• Belum berkembangnya pendidikan berkarakter untuk menjadikan sumber daya manusia yang agamis.<br>• Belum optimalnya penerapan teknologi informasi (TI) dalam dunia Pendidikan.<br>• Sebagian besar angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah, yang berdampak pada rendahnya keterampilan, produktivitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.. |
| 3. | Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang inklusif | • Terbatasnya jangkauan program kesejahteraan sosial terhadap kelompok rentan dan marginal<br>• Data sosial yang belum mutakhir dan valid<br>• Masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan dalam masyarakat | • Belum maksimalnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan<br>• Kurangnya data yang berkualitas, perbedaan definisi disabilitas dan metodologi pengukuran.<br>• Kurangnya sosialisasi dan pengawasan kepada perusahaan ataupun dari pemerintah sendiri mengenai kebijakan untuk mempekerjakan disabilitas.<br>• Stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, umumnya dipandang sebelah mata dan diremehkan ditengah masyarakat..<br>• Minimnya akomodasi dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyandang disabilitas di lingkungan kerja. |

c. Belum optimalnya transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi.

Tabel 2.134
Pemetaan Permasalahan Belum Optimalnya Transformasi Ekonomi Yang Berbasis Pertanian, Pariwisata, Usaha Mikro Dan Peningkatan Investasi

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1. | Belum optimalnya peningkatan produktivitas ekonomi berbasis pertanian | • Terbatasnya hasil produksi pertanian<br>• Tidak optimalnya sistem pemasaran dan biaya produksi pertanian<br>• Belum maksimalnya penerapan | • Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan untuk perumahan dan industri.<br>• Semakin masifnya penjualan gabah dan beras keluar daerah sehingga dikhawatirkan |

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | kebijakan dan regulasi terkait pertanian<br>• Terbatasnya SDM bidang pertanian<br>• Kerentanan cadangan dan ketersediaan pangan daerah akibat bencana alam | menyebabkan kerawanan pangan<br>• Semakin berkurangnya animo generasi muda untuk bergerak dan berusaha dibidang pertanian<br>• Terjadinya degradasi dan penurunan kesuburan tanah pertanian<br>• Tingginya disparitas harga komoditi pertanian disebabkan oleh sistem pemasaran yang tidak efisien<br>• Infrastruktur pendukung budidaya dan pemasaran pertanian yang kurang memadai<br>• Masih tingginya biaya produksi pertanian<br>• Tingginya serangan hama penyakit pertanian<br>• Rendahnya penerapan teknologi pertanian dan kualitas SDM petani.<br>• Belum maksimalnya peran kelembagaan pertanian dalam pembiayaan budidaya dan pemasaran pertanian<br>• Masih tingginya kebutuhan terhadap pakan ternak komersial<br>• Masih tingginya kerentanan terhadap serangan penyakit hewan menular<br>• Pengaruh perubahan iklim global<br>• Tidak meratanya distribusi pangan<br>• Belum beragamnya konsumsi pangan |
| 2. | Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan kualitas perikanan | • Terbatasnya hasil produksi perikanan<br>• Tidak optimalnya sistem pemasaran dan biaya produksi perikanan<br>• Belum maksimalnya penerapan kebijakan dan regulasi terkait perikanan<br>• Terbatasnya SDM bidang perikanan<br>• Masih kurangnya upaya pelestarian sumber daya perikanan | • Rendahnya produktivitas sektor perikanan<br>• Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi sumberdaya perikanan.<br>• Belum optimalnya penyediaan benih ikan untuk usaha budidaya perikanan, sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang bersertifikat.<br>• Kapasitas nelayan perikanan tangkap masih di bawah standar, baik dari sisi alat penangkapan maupun jenis kapalnya sehingga perlu modernisasi.<br>• Pembinaan dan kualitas SDM kelompok pembudidaya ikan masih rendah. |

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | • Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan.<br>• Tingginya biaya produksi perikanan budidaya yang disebabkan oleh harga pakan yang selalu meningkat.<br>• Tingginya harga BBM untuk nelayan perikanan tangkap kawasan Danau Singkarak.<br>• Menurunnya jumlah kelompok nelayan atau kelompok pembudidaya |
| 3. | Belum meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis Koperasi, Usaha Mikro, Industri Pengolahan dan BUMD | • Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan SDM pelaku usaha<br>• Belum meningkatnya akses pembiayaan dan kemitraan<br>• Belum optimalnya digitalisasi usaha mikro dan akses pasar<br>• Belum optimalnya penguatan industri pengolahan<br>• Belum berkembangnya BUMD sebagai motor ekonomi daerah<br>• Masih terbatasnya sarana dan prasarana pasar rakyat<br>• Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana bagi pelaku ekonomi kreatif. | • Rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi.<br>• Rendahnya inovasi dan pengembangan produk pelaku usaha<br>• Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan dalam pembiayaan koperasi belum sepenuhnya terwujud.<br>• Rendahnya daya saing produk usaha mikro dan kecepatan penguasaan teknologi produk untuk memenuhi permintaan pasar (kepemilikan sertifikat strandarisasi, jaminan mutu produk usaha mikro).<br>• Terbatasnya kemampuan akses permodalan dan fasilitasi bantuan modal bagi usaha mikro kepada sumber-sumber pembiayaan perbankan dan non perbankan.<br>• Terbatasnya akses pemasaran produk usaha mikro ke konsumen.<br>• Kurangnya diversifikasi industri akibat ketergantungan pada beberapa jenis industri pengolahan yang berdampak signifikan pada kontribusi PDRB.<br>• Keterbatasan sumber daya manusia terlatih yang berpengaruh produktivitas dan daya saing industri<br>• Tingkat teknologi yang rendah dalam penggunaan teknologi yang terbaru dan efisien dalam proses produksi.<br>• Ketergantungan pada bahan baku eksternal dan pasokan bahan baku dari daerah lain |

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | • Beberapa jenis perizinan yang masuk kategori perizinan berusaha berisiko menengah-tinggi dan berisiko tinggi tetap memerlukan proses yang lebih panjang.<br>• Kurangnya adopsi teknologi modern dan otomatisasi dalam proses produksi dapat membatasi efisiensi dan produktivitas IKM<br>• Pasar yang tidak stabil, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan tren konsumen dapat memberikan dampak negatif pada produktivitas dan profitabilitas IKM.<br>• Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kepada pelaku ekonomi kreatif |

d. Belum terwujudnya transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Tabel 2.135
Pemetaan Permasalahan Belum terwujudnya transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1. | Belum optimalnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan | • Belum kuatnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif<br>• Belum optimalnya tata kelola dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). | • Belum optimalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi.<br>• Belum optimalnya Sumber Daya Manusia pengelola SPBE.<br>• Belum adanya dokumen rencana induk pengembangan TIK/SPBE<br>• Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPBE |
| 2. | Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik | • Masih adanya SDM pendukung yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya terkait dengan pelayanan publik.<br>• Masih terdapat pelayanan publik yang belum optimal dari segi *responsif, informatif, accessible*, koordinasi, dan *inefisiensi*.<br>• Belum optimalnya penerapan digitalisasi dalam pelayanan public. | • Penyusunan regulasi yang belum sepenuhnya berbasis pada digitalisasi yang bercirikan regulasi yang adaptif dan terintegrasi;<br>• Belum terintegrasinya regulasi ke dalam sistem yang baik sehingga regulasi terkesan tumpang tindih/*overla*p, bertolak belakang dan tidak saling menguatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<br>• Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.<br>• Belum meratanya kompetensi ASN dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang berbasis teknologi dan inovasi. |

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | | • Belum optimalnya maturitas SPIP |

e. Belum optimalnya infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Tabel 2.136
Pemetaan Permasalahan Belum Optimalnya Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1. | Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas | • Belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan dan irigasi<br>• Masih kurangnya kolaborasi dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur<br>• Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi<br>• Belum optimalnya cakupan layanan infrastruktur jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan | • Banyak kondisi jalan yang rusak<br>• Belum tersedianya data infrastruktur secara lengkap.<br>• Belum terlayani seluruh masyarakat akan air bersih yang layak dan aman<br>• Belum terlayani masyarakat akan pelayanan air limbah aman<br>• Belum ada instalasi pengolahan lumpur tinja.<br>• Masih adanya kebutuhan akan prasarana dan kelengkapan jalan |
| 2. | Belum optimalnya pelestarian fungsi lingkungan hidup | • Masih maraknya alih fungsi lahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan<br>• Minimnya edukasi dan kampanye lingkungan hidup di berbagai level masyarakat<br>• Pengelolaan sampah yang belum efektif<br>• Minimnya kualitas dan ketersediaan PSU yang ramah lingkungan | • Masih ada PSU yang belum diserahterimakan oleh pengembang ke Pemerintah Daerah<br>• Belum terdata ketersediaan PSU di setiap Perumahan dan kondisi PSU masing-masing perumahan.<br>• Masih terdapat kawasan kumuh<br>• Perlu menjaga dan meningkatkan indeks lingkungan hidup<br>• Pengelolaan persampahan kurang baik |
| 3. | Belum optimalnya ketahanan daerah terhadap bencana | • Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana | • Indeks Kerawanan Bencana masih tinggi<br>• Kesiapsiagaan daerah belum maksimal dari pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini, dan infrastruktur kesiapsiagaan<br>• Masih rendahnya sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana |
| 4. | Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak | • Banyak rumah tangga tinggal di bangunan semi permanen atau tidak permanen.<br>• Struktur bangunan tidak memenuhi standar | • Pendapatan rumah tangga yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu membeli atau membangun hunian yang layak. |

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | keamanan dan kenyamanan<br>• Pendapatan rumah tangga rendah sehingga tidak mampu membiayai pembangunan atau renovasi rumah. | |

f. Belum optimalnya keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah.

Tabel 2.137
Pemetaan Permasalahan Belum Optimalnya Keamanan Daerah, Demokrasi Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1. | Belum terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis | • Meningkatnya tindakan kriminal dan munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat.<br>• Maraknya tindakan melanggar hukum dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. | • Belum optimalnya peran lembaga terkait dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sosial yang aman dan harmonis<br>• Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang ketentraman dan ketertiban umum |
| 2. | Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum | • Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang hak, demokrasi, pemilu bersih dan partisipasi politik yang aktif | • Masih rendahnya tingkat partisipasi pemilihan umum ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 sebesar 59,25%. |
| 3. | Belum optimalnya peningkatan stabilitas ekonomi daerah | • Belum optimalnya pencapaian pendapatan asli daerah<br>• Masih lemahnya ekonomi dan keuangan syari'ah | • Kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan teknis yang menyebabkan proses pengumpulan dan pemungutan pajak kurang efisien dan efektif.<br>• Belum maksimalnya upaya optimalisasi pajak daerah untuk kestabilan fiskal di daerah.<br>• Kurangnya literasi dan edukasi keuangan syari'ah<br>• Belum optimalnya pengembangan usaha mikro syari'ah |

g. Belum optimalnya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Tabel 2.138
Pemetaan Permasalahan Belum Optimalnya Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1. | Belum terwujudnya nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi | • Masih terbatasnya infrastruktur pendukung dalam rangka mewujudkan nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi<br>• Belum optimalnya sarana dan prasarana | • Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi di nagari<br>• Belum seluruh potensi ekonomi lokal dapat tumbuh dan berkembang |

| No. | Masalah | Rincian Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| | | pendukung konektifitas antar wilayah | • Kurangnya inovasi nagari dalam pengembangan potensi lokal<br>• Kurangnya kerjasama antar nagari untuk pemerataan pembangunan |

2. Identifikasi Permasalahan Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 Tahun Berjalan

Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 tahun berjalan, terdapat beberapa permasalahan yang mendasar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.139
Identifikasi Permasalahan Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026

| No. | Misi | Permasalahan |
|---|---|---|
| 1. | Meningkatkan Kehidupan Beragama, Beradat Dan Berbudaya | 1. filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang selama ini menjadi pedoman dalam kehidupan adat dan budaya, telah mulai menurun pengamalannya di tengah masyarakat<br>2. Belum optimalnya pengamalan agama dan pelestarian adat istiadat serta pengembangan kebudayaan<br>3. Belum optimalnya peranan lembaga adat dan agama di masyarakat |
| 2. | Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Dan Perluasan Lapangan Kerja Yang Berbasis Pertanian, Industri Dan Umkm | 1. Masih tingginya tingkat pengangguran di Tanah Datar.<br>2. Lapangan kerja yang masih terbatas<br>3. Produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah<br>4. UMKM belum sepenuhnya dimaksimalkan potensinya untuk peningkatan perekonomian<br>5. Kurangnya daya saing UMKM. |
| 3. | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Secara umum, kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor pembangunan (pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata dan lain sebagainya) masih terbatas |
| 4. | Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Yang Berbasis Adat, Budaya Dan Sumber Daya Alam | 1. Potensi pariwisata yang unik dan beragam di Kabupaten Tanah Datar belum mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.<br>2. Pariwisata Kabupaten Tanah Datar masih sangat tergantung pada objek wisata/destinasi unggulan tertentu, yang jumlahnya cenderung belum bertambah. |
| 5. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif Dan Efisien | 1. Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan<br>2. Belum optimalnya tata kelola pelayanan publik |
| 6. | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan | 1. Pembangunan infrastruktur masih cenderung parsial, belum memperhatikan kaitan antar bidang atau sektor.<br>2. Permasalahan konektivitas yang belum terpecahkan. |

| No. | Misi | Permasalahan |
|---|---|---|
| | | 3. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak berkelanjutan belum optimal.<br>4. Pengelolaan persampahan belum optimal. |

3. Identifikasi Masalah Hasil Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Hasil pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sampai dengan Tahun 2030 dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.140
Identifiksi Permasalahan Terkait Hasil Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

| No. | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Permasalahan |
|---|---|---|
| 1 | Mengurangi Kemiskinan | Belum terintegrasinya upaya pengentasan kemiskinan |
| 2 | Menghilangkan kelaparan | Belum optimalnya implementasi pertanian yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan |
| 3 | Kehidupan sehat dan Sejahtera | Akses dan tata kelola pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan kelompok rentan belum komprehensif |
| 4 | Pendidikan berkualitas | Belum maksimalnya dalam mewuwujudkan pendidikan yang inklusif dan merata |
| 5 | Kesetaraaan gender | Belum terintegrasinya pembangunan kesetaraan gender |
| 6 | Jaminan air bersih dan Sanitasi | Belum meratanya masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak |
| 7 | Jaminan akses energi | Belum Optimalnya penggunaan energi terbarukan |
| 8 | Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan ekonomi saat ini belum menjamin terwujudnya pekerjaan layak dan pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan |
| 9 | Industri,inovasi dan infrastruktur | Belum berkembangnya sinergi antar pihak dalam mewujudkan industri,inovasi dan infrastruktur yang berkelanjutan |
| 10 | Berkurangnya kesenjangan | Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan inklusi sosial, ekonomi dan politik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi |
| 11 | Kota dan pemukiman yang berkelanjutan | Belum optimalnya permukiman inklusif,aman,tangguh bencana dan berkelanjutan. |
| 12 | Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab | Belum membudayanya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. |
| 13 | Mengatasi perubahan Iklim | Belum optimalnya penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam |
| 14 | Pelestarian ekosistem daratan | Belum terwujudnya integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam pemanfaatan ekosistem daratan |
| 15 | Perdamaian, keadilan danKelembagaanyangtangguh | Belumo ptimalnya kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif dalam menciptakan keadilan dankedamaian bagi masyarakat |
| 16 | Menguatkan kemitraan global | Kemitraan yang substantif dalam mencapai tujuan kesejahteraan belum terselenggara. |

Sumber: Laporan Awal KLHS RPJMD 2025-2029, 2025

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

1) Perlu adanya peningkatan Nilai IPM Kabupaten Tanah Datar (masih rendahnya usia harapan hidup, masih rendahnya rata-rata lama sekolah, perlunya peningkatan harapan lama sekolah, dan masih rendahnya pengeluaran perkapita);
2) Tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanah Datar;
3) Perlunya penurunan Angka Prevalensi *Stunting*;
4) Rendahnya Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja;
5) Rendahnya tingkat pendapatan Perkapita Kabupaten Tanah Datar (ADHB);
6) Masih adanya penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar;
7) Masih rendahnya Rasio PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar;
8) Masih rendahnya Rasio Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum);
9) Masih rendahnya Devisa Pariwisata (Jumlah tamu wisatawan mancanegara/kunjungan wisatawan asing) Kabupaten Tanah Datar;
10) Masih perlunya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;
11) Masih rendahnya Rasio Pajak Terhadap PDRB;
12) Masih rendahnya produktivitas tanaman pangan;
13) Belum optimalnya realisasi investasi;
14) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
15) Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang belum sesuai peruntukannya;
16) Tingginya alih fungsi lahan;
17) Tingginya timbulan sampah;
18) Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup;
19) Belum optimalnya pelestarian pengelolaan keaneka ragaman hayati;
20) Belum optimalnya mitigasi bencana;
21) Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum perpipaan;
22) Belum optimalnya peran lembaga adat dan budaya;
23) Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK);
24) Masih rendahnya warisan budaya yang dilestarikan;
25) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
26) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik; dan
27) Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### 2.3.2 Isu Strategis Daerah

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) membutuhkan kerangka analisis permasalahan dan isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas-batas administrasi negara, situasi nasional dan situasi regional. Keterkaitan antar isu strategis dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada. Karena itu penyusunan rencana jangka menengah daerah akan bergerak dari suatu realitas yang mencakup pembangunan di segala bidang secara lokal dengan memperhatikan perkembangan dan realitas lain di lingkungan sekitar sehingga mampu mengatasi berbagai masalah dan mencapai tujuan pembangunan.

2.3.2.1 Isu Strategis Tujuan Global

1. Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi dunia adalah salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat global. *World Population Prospect* (2022) menjelaskan bahwa saat ini dunia memiliki populasi sebesar 7 miliar jiwa. Hal ini diperkirakan mencapai 9,7 Miliar jiwa pada tahun 2050. Tantangan utama yang dihadapi dengan peningkatan populasi global tersebut adalah penyesuaian kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya lahan dan sumberdaya alam. Untuk itu diperlukan penyesuaian pada sektor produksi dalam ekonomi yang bertujuan untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin panjang. Meskipun jumlah penduduk dunia terus bertambah namun lajunya terjadi perlambatan.

PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2030 dan 2045 jumlah penduduk dunia mencapai 8,5 miliar dan 9,5 miliar jiwa. Kondisi ini bisa terjadi karena meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya tingkat kematian, penurunan angka kelahiran, terjadi penambahan penduduk usia tua, dan meningkatnya jumlah penduduk usia muda. Berkembangnya penggunaan teknologi memberikan dampak mikro terhadap mobilitas dan kualitas struktur keluarga. Penduduk dunia memiliki resiko tidak fenomena tidak memiliki anak, menunda pernikahan dan perilaku menyimpang sesama jenis yang berdampak terjadinya penurunan angka kelahiran.

Penduduk dunia dalam beberapa periode ke depan di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan beberapa negara dapat memainkan perekonomian global. Jumlah penduduk yang besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di kawasan tersebut. Beberapa negara di Asia akan memimpin dalam penguasaan teknologi dan inovasi dunia di masa datang.

2. Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global

Perkembangan geopolitik dan ekonomi adalah menjadi tantangan bagi semua negara di dunia dewasa ini. Salah satu tantangan geopolitik global yang perlu diantisipasi adalah eskalasi persaingan antara negara adidaya yang makin meluas yang dapat bermunculannya kekuatan baru yang mempengaruhi dan memicu ketegangan di suatu kawasan yang membutuhkan sikap Indonesia dalam hal tersebut.

Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina turut memberikan dampak terhadap keharmonisan antar bangsa di kawasan lainnya. Seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Persaingan politik seperti di kawasan Indo Pasifik yang makin meluas jelas akan memberikan dampak kepada Indonesia. Hal ini berkaitan dengan aspek zona kemaritiman yang diklaim strategis di masa datang.

Indonesia perlu menjadikan ASEAN sebagai wadah untuk *Outlook of Indo-Pacific* untuk meningkatkan kerjasama yang positif dan mampu meredam munculnya konflik antar kawasan. Selanjutnya belum tuntasnya permasalahan Palestina – Israel sampai hari ini turut menjadikan terganggu dan meluasnya dampak geopolitik yang ditimbulkan. Sampai saat ini, dampak dari konflik Palestina – Israel telah meluas sampai ke kawasan Laut Merah dengan terjadinya blokade kapal yang memiliki Afiliasi dengan Israel.

Aspek geoekonomi terjadi dewasa ini adalah makin mendominasinya negara berkembang terhadap total output ekonomi global. Sektor komoditas tidak menjadi faktor dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Kelembagaan ekonomi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Negara-negara berkembang memiliki peluang dan tantangan untuk memberikan peran yang luas dalam perekonomian kawasan.

Perekonomian global pada tahun 2050 diperkirakan akan mengalami peningkatan tiga kali lipat dari keadaan perekonomian sekarang.

3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga untuk mendapatkan sebuah informasi bisa lewat genggaman tangan kita. Perkembangan teknologi adalah proses perubahan teknologi dari teknologi sebelumnya. Sedangkan isu-isu global dunia industri adalah perubahan dunia industri yang mampu menyita perhatian masyarakat global, yang sekarang disebut perubahan industri 4.0.

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat juga harus direspon dengan tanggap oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur yang memadai khususnya jaringan telekomunikasi dan internet di kota-kota kecil dan pedesaan harus diprioritaskan. Ketersediaan jaringan internet yang bagus bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Penduduk usia produktif akan merasa betah dan nyaman tinggal di kota kecil dan pedesaan jika mereka bisa mendapatkan akses ke dunia luar untuk menjalin networking dan menjalankan bisnis online dengan lancar.

4. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Menurut PBB, lebih dari separuh populasi dunia tinggal di kota dan angka ini diperkirakan akan meningkat tiga miliar pada tahun 2050. Peringatan Hari Kota Sedunia dilakukan setiap tahun sebagai upaya mempromosikan keberhasilan urbanisasi maupun untuk menjawab tantangan khusus akibat dari urbanisasi, seperti yang diinformasikan di website resmi UN-Habitat.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Data proyeksi penduduk BPS menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan diprediksi jumlahnya akan semakin meningkat menjadi 66,6% di tahun 2035. Bank Dunia juga memperkirakan di tahun 2045 sebanyak 220 juta orang atau 70% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Pentingnya pendidikan kependudukan agar masyarakat semakin paham tentang isu-isu kependudukan dan ikut berperan aktif dalam pembangunan. Langkah konkrit lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di antaranya memberikan lebih banyak beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, memperluas kesempatan wirausaha, memberikan bantuan modal, memberikan pelatihan *soft skill* dan *hard skill* secara gratis.

Pemerintah daerah perlu membuat gerakan "anak muda kembali ke desa". Anak-anak muda yang sudah lulus sekolah atau kuliah di kota dipanggil kembali ke kampung halamannya dan anak-anak muda yang tinggal di perkotaan 'diundang' secara khusus untuk membangun desa. Suasana pedesaan yang masih alami, tentram, damai, dan jauh dari hiruk pikuk bisa menjadi magnet bagi generasi muda yang sudah jenuh

dengan kehidupan di kota besar. Generasi milenial dan generasi Z mempunyai potensi yang luar biasa. Libatkan mereka secara aktif dalam membangun dan mengembangkan industri kreatif, pariwisata, pertanian, pendidikan dan di sektor lainnya. Memberikan mereka kesempatan, kepercayaan dan dukungan sebesar-besarnya untuk berkontribusi nyata bagi pembangunan di daerah.

5. Konstelasi Perdagangan Global

Perdagangan global berada pada persimpangan bersejarah. Selama 60 tahun setelah Perang Dunia Kedua, perdagangan tumbuh lebih cepat dibandingkan output perekonomian, bukti nyata bahwa perekonomian dunia menjadi semakin terbuka dan terintegrasi, seiring dengan semakin banyaknya negara yang meruntuhkan hambatan ekonomi di antara mereka melalui serangkaian inisiatif multilateral dan regional. Selain itu, proses integrasi yang didorong oleh perdagangan atau globalisasi, tampaknya semakin cepat. Ekspansi perdagangan global tampaknya melambat, mulai dari pengaruh siklus jangka pendek, seperti dampak krisis keuangan terhadap permintaan yang berkepanjangan, hingga perubahan struktural jangka panjang, seperti melambatnya ekspansi rantai pasokan. Namun salah satu penjelasan yang secara mengejutkan hanya mendapat sedikit perhatian adalah cepatnya transformasi perdagangan global itu sendiri dan ketidakmampuan sistem yang ada, sejauh ini, untuk mengatasi batasan perdagangan terbaru ini.

6. Tata Kelola Keuangan Global

Meskipun terdapat risiko besar dan ketidakstabilan yang dapat menimpa perekonomian global, agak mengejutkan bahwa tata kelola keuangan global sebagian besar terdesentralisasi, dengan banyak sekali organisasi baik secara formal maupun informal yang mengatur sektor atau wilayah dunia keuangan global. Klasifikasi organisasi-organisasi yang terlibat ke dalam empat kategori: organisasi internasional formal, organisasi pengatur informal, organisasi antar pemerintah, dan organisasi bisnis/swasta, dan menguraikan secara mendalam lembaga-lembaga yang terlibat. Kami menemukan bahwa keuangan global tidak memiliki badan internasional yang terpusat untuk mengkoordinasikan dan menegakkan peraturan serta menengahi perselisihan. Fragmentasi dan kurangnya akuntabilitas dalam tata kelola global menjadikan perekonomian internasional lebih rentan terhadap krisis ekonomi di masa depan.

7. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

Kelas menengah atau *middle class* adalah sekelompok masyarakat yang mampu mencukupi dirinya sendiri. Mereka tidak masuk ke kelompok orang kaya atau kelompok orang miskin, mereka berada di tengah. Terkadang mereka juga mampu membeli keinginan yang di luar kebutuhan utama seperti melakukan liburan atau memiliki mobil.

Kelompok ini yang saat ini tengah mendominasi Indonesia. Menurut *Asian Development Bank*, *middles class* Indonesia adalah mereka yang punya pengeluaran mulai dari US$2-20 per harinya. Apabila menggunakan perhitungan ini ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia yang hidup di taraf ini, *middle class* ini berpengaruh terhadap perekonomian, itu dilihat dari penghasilan mereka yang berkecukupan, yang artinya mereka mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Adanya para *middle class* ini membuktikan bahwa semakin banyak penduduk Indonesia yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Jadi, semakin banyaknya kehadiran para *middle class* di Indonesia menandakan perekonomian Indonesia pun tengah menanjak naik.

8. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

   Persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam telah menjadi isu yang cukup kompleks di banyak negara, baik di negara maju maupun negara berkembang. Persaingan ini seringkali memicu konflik antara masyarakat yang berbeda, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Konflik ini dapat menjadi lebih kompleks dan berdampak buruk pada masyarakat jika tidak ditangani dengan tepat. Dalam beberapa kasus, persaingan sumber daya alam dapat memicu munculnya sikap tidak toleran antar masyarakat. Sikap intoleran ini dapat timbul dari rasa ketidakpuasan dan kecemburuan yang ditimbulkan oleh ketimpangan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks global, persaingan sumber daya alam telah menjadi salah satu masalah lingkungan paling penting dan menantang. Persaingan ini terjadi pada berbagai tingkat, dari tingkat internasional hingga tingkat lokal. Persaingan ini melibatkan sejumlah besar aktor yang berbeda, termasuk pemerintah, perusahan, dan masyarakat lokal. Persaingan ini seringkali dipicu oleh peningkatan permintaan akan sumber daya alam, dan dapat memicu konflik yang cukup serius.

9. Perubahan Iklim

   Perubahan iklim menjadi isu yang harus diperhatikan karena ini memiliki dampak dan resiko yang besar terlebih pada keberlangsungan makhluk hidup dan generasi di masa mendatang. Karenanya, perlu aksi pengendalian perubahan iklim yang konkret dari seluruh lapisan masyaraka akibat perubahan iklim, kejadian-kejadian ekstrem lebih kerap terjadi, terutama kekeringan dan banjir. Jika sebelumnya rentang waktu kejadian berkisar 50 - 100 tahun, maka kini rentang waktu menjadi semakin pendek atau frekuensinya semakin sering terjadi dengan intensitas yang lebih tinggi atau durasi yang semakin panjang. dampak perubahan iklim tidak hanya sebatas cuaca ekstrem, mencairnya salju di gunung, krisis air bersih, atau meningkatnya wabah penyakit. Lebih dari itu, kata dia, perubahan iklim membawa kerugian ekonomi dan juga politik. Intensitas bencana alam akan semakin sering terjadi. Sedangkan bencana alam itu sendiri erat kaitannya dengan kemiskinan. Tidak sedikit rumah tangga yang jatuh ke lingkaran kemiskinan akibat bencana alam. Apabila kondisi ini terus dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin tujuan mencapai Indonesia bebas dari kemiskinan semakin jauh.

10. Pemanfaatan *Outerspace* untuk perekonomian (*outerspace-economy*)

    Perkembangan sains dan teknologi dewasa ini turut memberikan andil dalam mengeksplorasi pemanfaatan *outerspace* sebagai sumber perekonomian. Luar angkasa dan udara yang ada merupakan warisan bersama umat manusia yang membutuhkan pengelolaan secara bijak dan dimanfaatkan secara strategis untuk kepentingan bersama. Pemanfaatan *outerspace* di masa datang tidak tunduk kepada kepentingan negara tertentu yang telah lebih dahulu menguasai teknologi antariksa. Terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan *outerspace* yaitu: 1) Ekonomi *Outerspace*, 2) kelestarian *outerspace*, dan 3) keamanan *outerspace*. Pemanfaatan *outerspace* untuk kebutuhan ekonomi global akan terus meningkat. Dewasa ini *outerspace* telah dapat

menghadirkan informasi yang bersifat *real time* untuk kebutuhan pembangunan dunia.

2.3.3 Isu Strategis Pembangunan Nasional

1. Kebijakan Ekonomi Nasional dan Proteksionisme Ekonomi Global

Beberapa dekade terakhir, Indonesia menganut kebijakan perekonomian yang terbuka. Hal ini memiliki resiko terhadap daya tahan terhadap kebijakan proteksionisme global. Pada saat terjadi gangguan pada pasar global, hal ini memberikan pengaruh terhadap lemahnya ekspor Indonesia, secara simultan juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki resiko terhadap lapangan pekerjaan nasional. Indonesia juga mengalami gangguan dalam hal aliran investasi asing. Investor lebih memilih negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang stabil daripada pasar yang terdampak perang dagang global.

Rendahnya investasi asing masuk ke Indonesia memberikan dampak melambatnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor manufaktur. Proteksionisme perdagangan global juga memberikan imbas terhadap sektor keuangan Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah memberikan imbas terjadinya inflasi yang tinggi. Harga produk impor menjadi mahal. Sehingga masyarakat menghadap penurunan daya beli semakin besar. Instrumen moneter dapat dilakukan dalam meredam inflasi dan mencapai stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satu langkahnya adalah menaikkan suku bunga oleh Bank Indonesia. Hal ini memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja sektor riil nasional yang berujung penurunan perekonomian nasional.

Terjadinya pelemahan nilai tukar Rupiah di awal tahun 2025 ini, memperlihatkan adanya tekanan yang kuat terhadap perekonomian nasional. Secara ekonomi dalam menghadapi situasi ini, investor membutuhkan kepastian pasar keuangan nasional. Di samping itu, perencanaan dan kebijakan fiskal pemerintah yang dipublikasi ke publik dibutuhkan lebih transparan, *akurable* dan *timetable.* Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Jika hal tersebut tidak terjadi dengan baik memberikan respon negatif terhadap perekonomian nasional baik dari pelaku ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini akan memberikan dampak terhadap terjadinya *capital fligth* dan menjadikan resiko mahalnya biaya intervensi dengan menguras cadangan devisa. Kedepan, Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan kepada modal asing dengan cara memperkuat industri dalam negeri dan diversifikasi ekspor.

Ketergantungan modal asing yang dimaksud adalah investasi asing jangka pendek yang rentan terhadap guncangan eksternal. Secara nasional, pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan nyaman terutama bagi investor domestik. Kebijkan fiskal perlu dilakukan dengan pengurangan terhadap pengeluaran terhadap barang impor strategis. Pemerintah harus dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dalam usaha melakukan substitusi impor. Hal ini dapat memperkuat nilai tukar Rupiah Guna mendorong peningkatan investasi nasional, perlu membangun kepastian pasar dimana pemerintah harus meluncurkan strategi yang jelas dalam menghadapi tekanan perekonomian global. Saat ini investor terus memonitor perkembangan dan situasi ekonomi nasional terutama dalam menjaga nilai tukar dan arus modal asing. Pemerintah harus memperkuat produksi dalam negeri agar ketergantungan impor bisa ditanggulangi. Sementara itu, perlu peningkatan daya saing ekspor nasional sebagai faktor utama untuk tidak

mengandalkan komoditas mentah tetapi mengembangkan industri bernilai tambah tinggi.

Transparansi dalam kebijakan dan informasi yang dibutuhkan publik dan investor sangat diperlukan untuk menghindari sentiment negatif pasar. Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat dan terukur guna mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tidak mesti pemerintah selalu mengandalkan Bank Indonesia untuk mempertahankan nilai tukar Rupiah. Namun kebijakan moneter perlu diimbangi secara efektif dengan kebijakan fiskal nasional.

2. Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Awal tahun 2025, yang menjadi sorotan publik adalah defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah terlihat meyakini bahwa target defisit APBN terhadap PDB tidak melampaui 2,54%. Namun perkembangan yang terjadi saat ini adalah melemahnya penerimaan pajak. Terlihat kecenderungan bahwa penurunan penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri.

Kebijakan pembatalan kenaikan tarif PPN 11% menjadi 12% memberikan dampak pendapatan negara dari pajak konsumsi tidak mengalami peningkatan sesuai harapan. Selanjutnya juga terjadi penurunan pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) badan secara drastis. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja koorporasi nasional terlihat melemah. Jika situasi ini tidak ditanggulangi dengan baik dapat untuk mencapai target penerimaan APBN nantinya. Sementara pada sisi belanja negara terlihat kecenderungan yang terjadi adalah mengalami peningkatan.

Hal ini di sebabkan oleh belanja non-kementerian dan lembaga (non K/L) memperlihatkan kenaikan yang sangat drastis. Indikasi yang terlihat pada bagian ini adalah alokasi yang besar untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Transfer keuangan pusat ke daerah juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan K/L. Jika hal ini terus berlanjut, dapat memberikan resiko defisit terhadap APBN. Meskipun saat ini pemerintah dapat menganggap bahwa defisit saat ini masih dalam batas aman. Dimana pemerintah memiliki ruang kebijakan fiskal untuk memotong belanja dengan agresif. Tetapi disisi pendapat memperlihatkan kecenderungan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemerintah perlu menemukan langkah-langkah alternatif untuk menutup kesenjangan tersebut dimana salah satu instrumennya adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintah harus mampu mengurangi beban hutang negara dalam menutup defisit anggaran. Jika hal ini tidak dilakukan maka biaya pembbayaran bunga terus meningkat.

Investor akan mencermati hal ini sebagai sebuah resiko fiskal yang makin meningkat dan dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo baru saja meluncurkan kebijakan untuk memberikan katalisator terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berupa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pemerintah menyatakan bahwa badan ini mengelola kekayaan negara terpisah dari APBN untuk mengoptimasi investasi sektor strategis.

Danantara sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Isu strategis nasional yang perlu dicermati provinsi Sumatera Barat adalah diluncurkannya Badan pengelola Investasi (BPI) Danantara. Beberapa harapan yang juga perlu dicermati Provinsi Sumatera Barat

adalah menjadikan lembaga ini sebagai katalis kebutuhan investasi yang mampu menggerakan perekonomian daerah. Lembaga ini dinyatakan pengelolaannya dilakukan secara terpisah dari APBN yang bertujuan untuk mengoptimalkan investasi strategis di Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan lembaga ini bertujuan untuk penguatan infrastruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri dan pengembangan energi terbarukan.

Pemerintah menyatakan bahwa Danantara ini mengacu kepada berbagai model sovereign wealth fund (SWF) yang telah dikembangkan dan sukses di beberapa negara diantaranya Singapura, dan Norwegia. Model yang dikembangkan ini diharapkan mampu menarik investasi asing, mengola aset negara yang lebih efisien dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai proyek strategis nasional. Danantara ini merupakan model konsolidasi dari beberapa BUMN yang juga termasuk Bank Himbara dimana tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi antara sektor keuangan dan sektor ril nasional.

Isu yang perlu dicermati adalah kehadiran Danantara terhadap stabilitas perbankan nasional dimana 3 perbankan nasional yang ada di dalamnya merupakan tulang punggung dari sistem keuangan nasional. Ketiga perbankan ini memiliki andil besar terhadap pembiayaan UMKM dan pengelolaan dana pihak ketiga nasional. Jika Danatara tidak dikelola secara baik dan profesional akan mengalami tekanan terhadap perekonomian nasional dan melemahkan daya saing perbankan nasional dalam jangka panjang.

3. Koperasi Desa Merah – Putih

Pemerintah berencana mengalokasikan pendanaan nasional untuk masing-masing desa di Indonesia melalui Koperasi Desa Merah – Putih dengan jumlah pendanaan yang lebih besar dari KUR BRI pada tahun 2024. Pendanaan ini mengubah konsep dan ekosistem pembiayaan mikto dan dapat mempengaruhi perbankan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Dalam pengelolaan dana secara efektif dengan kepemilikan koperasi di desa untuk mendapatkan modal usaha.

Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap permintaan kredit mikro ke perbankan yang akan mengalami penurunan. Perbaikan harus melakukan pengalihan fokus dan strategi dalam model pembiayaan wholesale lending kepada koperasi desa. Seandainya koperasi tidak mampu melakukan pengelolaan pendanaan dengan baik, masyarakat akan kembali ke perbankan untuk melakukan pinjaman usaha. Perbankan diharapkan cepat beradaptasi terhadap digitalisasi pelayanan, meningkatkan pinjaman berbasis teknologi dan memperkuat pengawasan terhadap koperasi penerima kredit.

Perubahan ini akan menggeser dominasi perbankan nasional maupun perbankan daerah dalam pembiayaan mikro dalam masyarakat dan menciptakan ekonomi yang berbasis koperasi. Apabila perbankan tidak segera melakukan adjustment secara cepat maka koperasi desa akan menjadi pemain utama dalam perekonomian mikro masyarakat yang dapat mengubah peta industri perbankan nasional dan daerah di Indonesia.

4. Program Tiga Juta Rumah

Program Tiga Juta Rumah adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membangun tiga juta unit rumah dalam jangka waktu tertentu, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk

mengatasi *backlog* perumahan dan menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan visi untuk pemerataan ekonomi.

Program ini tidak hanya mengurangi *backlog* perumahan tetapi juga menggerakkan sektor kontruksi, bahan bangunan, tenaga kerja dan investasi swasta, sehingga dampaknya terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

2.3.4 Isu Strategis Regional Sumatera

Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian terintegrasi dari perekonomian di Pulau Sumatera. Perekonomian Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan perekonomian skala regional Sumatera dalam 1 (satu) dekade terakhir memperlihatkan posisi berada pada papan tengah. PDRB Perkapita Harga Konstan Sumatera Barat berada pada peringkat 4 (empat) terbawah dari 11 (sebelah) provinsi yang ada di Sumatera dan di atas Bengkulu, Aceh dan Lampung. Untuk provinsi yang dikategorikan kaya di Sumatera adalah Kepulauan Riau dan Riau. Selanjutnya, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Sumatera Barat memperlihatkan perkembangan yang biasa saja yang tidak menonjol dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera. Tingkat pengangguran di Sumatera Barat tergolong tinggi dalam 1 dasawarsa terakhir berada pada posisi kedua tertinggi setelah Kepulauan Riau. Di samping itu persentase pekerja formal yang ada di Sumatera Barat berdasarkan perhitungan yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) berada pada peringkat ke 3 terakhir di atas Bengkulu dan Provinsi Lampung. Di samping itu, permasalahan industrialisasi di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2000 memperlihatkan keadaan yang memprihatinkan dimana terjadi de-industrialiasasi yang bersifat prematur yang makin lama proporsinya dalam PDRB semakin mengecil. Catatan sementara yang dapat dijelaskan bahwa Provinsi Sumatera Barat saat ini menghadapi kondisi dengan pendapatan perkapita yang rendah, dengan pertumbuhan ekonomi yang biasa-biasa saja, namun memiliki pengangguran yang tinggi serta proporsi tenaga kerja formal yang rendah dan terjadinya de-industrialisasi yang premature dengan keadaan semakin rendah. Namun dalam permasalahan demikian. Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin yang rendah pada peringkat ketiga terendah di Sumatera di atas Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.

2.3.5 Isu Strategis Kabupaten Tanah Datar

1. Kualitas dan daya saing SDM belum optimal

Sumber daya manusia merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu atau kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memperoleh kepuasannya. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan segala daya dan upaya manusia dapat berproduksi barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Faktor yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia antara lain pendidikan dan lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tanah Datar antara lain berfokus pada peningkatan Nilai IPM, masih rendahnya usia harapan hidup, masih rendahnya rata-rata lama sekolah, perlunya peningkatan harapan lama sekolah, masih tingginya angka kematian ibu, masih perlunya penurunan angka prevalensi *stunting*, masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Oleh karena itu perlunya pemerintah daerah

mendorong adanya langkah-langkah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

2. Pembangunan ekonomi yang belum optimal

Mencermati data realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar pada lima tahun terakhir, terlihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar relatif rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini mengindikasikan terjadinya pembangunan ekonomi yang belum optimal.

Salah satu penyebab permasalahan ini diantaranya struktur ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Namun kontribusi untuk sektor industri, pariwisata dan jasa sudah mengalami peningkatan walaupun belum signifikan. Hal ini menunjukan Kabupaten Tanah Datar sudah mengarah kepada daerah industri.

Pembangunan ekonomi yang belum optimal ini perlu mendapat perhatian dan intervensi terukur dimasa yang akan datang. Perhatian dan intervensi pemerintah daerah perlu dilakukan untuk peningkatan seluruh sektor lapangan usaha penyumbang peningkatan ekonomi.

3. Pembangunan lingkungan hidup belum optimal

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkenaan dengan upaya pendayagunaan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.

Pembangunan lingkungan hidup mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memperhatikan keberlanjutan ekonomi dan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempedomani tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan yaitu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan. Namun pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana secara optimal, antara lain terlihat dari munculnya beberapa permasalahan di bidang lingkungan hidup seperti pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan belum optimal, tingginya timbulan sampah, masih rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup, emisi gas rumah kaca (GRK) dan masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

4. Cenderung menurunnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat

Nilai sosial budaya merupakan nilai yang dianggap penting oleh masyarakat untuk menciptakan interaksi sosial dengan baik, sehingga kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat menjadi sebuah kebudayaan yang tercipta baik disengaja maupun tidak disengaja. Perubahan sosial budaya dapat dipengaruhi oleh perubahan teknologi, globalisasi, perubahan demografi dan perkembangan ekonomi.

Adat budaya Minangkabau berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan salah satu filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau yang menjadi landasan utama dalam pola perilaku nilai-nilai kehidupan. Penerapan nilai-nilai sosial budaya saat ini mengalami penurunan, tergambar dari cenderung

meningkatnya angka kriminalitas, belum optimalnya peran lembaga adat dan budaya, belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), dan masih rendahnya warisan budaya yang dilestarikan.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal

Tata kelola pemerintahan sebagai pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik dan administratif untuk menangani persoalan daerah dalam setiap tingkatan. Faktor yang menyebabkan belum berkualitasnya tata kelola pemerintahan adalah belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, di antaranya kualitas pelayanan publik, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), reformasi hukum, dan penyelenggaraan SAKIP. Dampak dari belum optimalnya tata kelola pemerintahan ini dapat menghambat pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan difokuskan pada pelayanan publik yang harus berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kebutuhan publik secara substatif dengan memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah.

2.3.6 Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 (tujuh belas) tujuan yaitu:

1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);
6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7) Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara Kesenjangan); (Berkurangnya Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman,

Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
11) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
12) Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
13) Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
14) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
15) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) );
16) Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Berdasarkan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 16 (enam belas) tujuan yang terkait dengan karakteristik daerah Kabupaten Tanah Datar. Tujuan melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan) tidak ada dikarenakan Tanah Datar tidak memiliki wilayah laut.

Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi isu strategis yang terbagi atas empat pilar antara lain:

1) Pilar Sosial:
   a) Pengentasan kemiskinan dan distribusi kesejahteraan;
   b) Penuntasan stunting dan peningkatan akses pangan yang aman, bergizi dan cukup untuk semua melalui kedaulatan pangan;
   c) Penuntasan segala penyakit untuk kualitas derajat kesehatan masyarakat;
   d) Peningkatan distribusi sarana prasarana untuk layanan kesehatan untuk semua;
   e) Peningkatan kualitas dan kesetaraan pendidikan menengah;
   f) Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender; dan
   g) Penguatan keluarga berencana untuk perwujudan keluarga berkualitas.
2) Pilar Ekonomi:
   a) Peningkatan distribusi akses dasar energi;
   b) Perwujudan pembangunan rendah karbon melalui mitigasi gas rumah kaca;
   c) Pengembangan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
   d) Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah; dan
   e) Peningkatan nilai tambah sektor industri; dan
   f) Penerapan instrumen lingkungan dalam pengelolaan ekonomi.
3) Pilar Lingkungan:
   a) Perlindungan sumber daya air untuk meningkatkan akses air bersih layak dan aman;

b) Peningkatan akses sanitasi yang memadai dan merata;
c) Perwujudan wilayah tangguh bencana;
d) Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu sampai hilir; dan
e) Peningkatan upaya konservasi lahan.

4) Pilar Hukum dan Tata Kelola:
a) Penguatan ketertiban dan perlindungan masyarakat;
b) Peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan; dan
c) Peningkatan akses teknologi informasi dan informasi publik secara akuntabel.

Tabel 2.141
Isu Strategis Daerah

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| Potensi Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Sosial Budaya | - Pengimpunan zakat belum terlaksana secara optimal. Sampai saat ini Baznas Kabupaten Tanah Datar secara umum mengimpun zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN), belum menyetuh muzakki di luar ASN.<br>- Menurunnya pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari<br>- Masih minimnya aksesibilitas layanan kesehatan maternal, kualitas perawatan selama kehamilan dan persalinan, pendidikan kesehatan ibu, dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu dapat mempengaruhi Angka Kematian Ibu<br>- masih tingginya prevalensi *stunting*<br>- masih kurangnya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Tuberkulosis (*treatment coverage*)<br>- Rata-rata lama sekolah masih rendah<br>- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi (TI) dalam dunia Pendidikan<br>- Kondisi sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah dan fasilitas belajar belum optimal<br>- Meningkatnya angka kemiskinan | | - Perkembangan Demografi Global<br>- Peningkatan Urbanisasi Dunia<br>- Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*) | | - Disparitas kualitas sumber daya manusia<br>- Prevalensi *stunting* masih relatif tinggi | - Cenderung menurunnya nilai-nilai sosial budaya Masyarakat<br>- Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal |
| Potensi Kawasan Strategis Dari Sudut Daya Dukung Lingkungan | - Masih ada PSU yang belum diserahterimakan oleh pengembang ke Pemerintah Daerah<br>- Belum terdata ketersediaan PSU di setiap Perumahan dan kondisi PSU masing-masing perumahan.<br>- Masih terdapat kawasan kumuh<br>- Perlu menjaga dan meningkatkan indeks lingkungan hidup | - Belum Optimalnya pengelolaan Sampah<br>- Peningkatan Alih Fungsi Lahan<br>- Tingginya potensi Bencana<br>- Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak. | - Perubahan Iklim | | - Degradasi lingkungan Masih realtif tingginya kerentanan dan potensi bencana di wilayah Sumatera (di pesisir barat yang masuk dalam rangkaian pegunungan bukit barisan)<br>- Dominasi Ekonomi pada Komoditas Primer (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan) dengan nilai tambah yang masih rendah dan rentan terhadap fluktuasi pasar global<br>- Diversifikasi dan hilirasasi masih belum optimal, investasi masih | Pembangunan lingkungan hidup belum optimal |

| POTENSI DAERAH | PERMASALAHAN | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS | | | ISU STRATEGIS DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| | | | | | lebih banyak terjadi pada *ekstraktif* dan industri hulu | |
| Potensi Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Ekonomi | - Rendahnya penerapan teknologi pertanian dan kualitas SDM petanian<br>- Rendahnya produktivitas sektor perikanan sebagai sumber protein hewani dan risiko kerentanan pangan global<br>- Rendahnya daya saing produk usaha mikro dan kecepatan penguasaan teknologi produk untuk memenuhi permintaan pasar (kepemilikan sertifikat strandarisasi, jaminan mutu produk usaha mikro).<br>- Kurangnya diversifikasi industri akibat ketergantungan pada beberapa jenis industri pengolahan yang berdampak signifikan pada kontribusi PDRB.<br>- Kurangnya keterampilan teknis, manajemen, dan pemasaran pada pekerja dan pemilik IKM dapat menghambat produktivitas.<br>- Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana bagi pelaku ekonomi kreatif. | - Peningkatan Alih Fungsi Lahan | - K*onstelasi* Perdagangan Global<br>- Perkembangan Teknologi<br>- Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global<br>- Tata Kelola Keuangan Global<br>- Pemanfaatan *Outerspace* untuk perekonomian *(outerspace-economy)*<br>- Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam | - Kebijakan Ekonomi Nasional dan *Proteksionisme* Ekonomi Global<br>- Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara<br>- Danantara sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi<br>- Koperasi Desa Merah – Putih | - Stok infrastruktur masih terbatas, masih ada kesenjangan infrastruktur di wilayah Sumatera, dan infrastruktur belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi<br>- Tingkat kemiskinan rata-rata Sumatera masih realtif tinggi (9%)<br>- Pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi unggulan belum bernilai tambah tinggi, serta infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan digital masih terbatas. | Pembangunan ekonomi yang belum optimal |

# BAB III
# VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

## 3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari keseluruhan tahapan yang disusun dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahun 2021-2026, RPJMD Tahun 2025-2029 ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2025-2030, melalui optimalisasi seluruh urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

### 3.1.1 PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TANAH DATAR TAHUN 2025-2045

#### 3.1.1.1 VISI RPJPD Tahun 2025-2045

"Tanah Datar Maju, Berkelanjutan dan Berbudaya Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maju, Kabupaten Tanah Datar memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi kebutuhan, pendapatan perkapita tinggi, tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan rendah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur yang baik dan harapan hidup tinggi sehingga memiliki daya saing tinggi untuk menciptakan inovasi dalam memecahkan solusi atas permasalahan sosial dan lingkungan dan mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat terhadap tantangan global di masa mendatang.
2. Berkelanjutan, Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan serta tata kelola yang baik.
3. Berbudaya, Masyarakat Tanah Datar yang cerdas dan berbudi, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Untuk terwujudnya visi Kabupaten Tanah Datar maju, berkelanjutan dan berbudaya berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, ditetapkan lima sasaran visi yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sasaran visi dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 1
Sasaran Visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045

| No | Sasaran Utama Visi/Indikator | 2025 (*Baseline*) | Target | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1. | Peningkatan pendapatan per kapita | | | | | |
| | PDRB per Kapita ADHB (Rp.Juta) | 44,44 | 108,33 | 172,33 | 236,27 | 255,55 |
| | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | 10,63 | 11,48 | 12,33 | 13,18 | 14,03 |
| 2. | Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang | | | | | |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 3,36- 3,69 | 2,58–3,02 | 1,82-2,26 | 0,97-1,41 | 0,03-0,47 |
| | Rasio Gini | 0,241 | 0,218 | 0,196 | 0,177 | 0,160 |
| | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,18 | 5,63 | 5,82 | 5,29 | 4,81 |
| 3. | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | | | | | |
| | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 3,168 | 3,182 | 3,195 | 3,209 | 3,223 |
| 4. | Peningkatan daya saing sumber daya manusia | | | | | |
| | Indeks Pembangunan Manusia | 76,06 | 78,64 | 81,37 | 84,26 | 87,36 |
| | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | 66,04 | 69,44 | 73,02 | 76,79 | 80,75 |
| 5. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 76,15 | 77,21 | 78,27 | 79,33 | 83,27 |

*Sumber : Bappedalitbang (Data Diolah)*

### 3.1.1.2 MISI RPJPD Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan delapan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial

   Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing diwujudkan dengan berfokus pada perubahan menyeluruh dalam struktur dan dinamika sosial agar masyarakat lebih maju, berdaya saing dan meningkatkan kualitas hidup. Mewujudkan transformasi sosial merujuk pada komitmen untuk melakukan perubahan dalam struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Misi tersebut diwujudkan dengan memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan berkualitas, pendidikan yang berkualitas dan merata serta menjamin sistem perlindungan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

   Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Inklusif, berkeadilan ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan perkapita yang tinggi, meningkatnya produktivitas, nilai tambah sektor strategis, investasi berbasis ekonomi hijau didukung infrastruktur yang baik dan meratanya pendapatan masyarakat. Transformasi ekonomi bergantung pada peningkatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penerapan digitalisasi yang dapat meningkatkan efisiensi, serta inovasi yang dapat mendorong produktivitas ekonomi, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, integrasi ekonomi domestik dan global serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti transportasi, energi, dan komunikasi.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

   Pemerintah memegang prinsip *good governance* dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tanggap, optimal dan adaptif. Untuk mewujudkan transformasi tata kelola perlu dibangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan inklusif. Hal ini berkaitan langsung dengan pengembangan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, kemampuan merespons perubahan, peningkatan kapasitas institusional, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, transformasi tata kelola yang baik merupakan kunci untuk mencapai regulasi yang efektif dan responsif, serta tata kelola yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan.

4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah

   Memperkuat keamanan di tingkat daerah yang mencakup berbagai aspek seperti peningkatan penegakan hukum, keamanan fisik, keamanan masyarakat, dan tanggapan terhadap bencana. Selanjutnya membangun pondasi ekonomi yang kuat dengan mengelola anggaran dengan baik, meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

   Pemerintah yang selalu memastikan partisipasi yang luas dari masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi pemerintah, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dengan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

   Terbangunnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang kuat, harmonis dan demokratis berlandaskan agama dan adat istiadat. Ketahanan sosial budaya dan ekologi dilaksanakan dengan pelaksanaan hukum yang adil dan memberikan fondasi bagi keamanan daerah yang tangguh dan demokrasi yang substansial, memastikan daerah terlindungi dari ancaman internal dan eksternal, menciptakan lingkungan yang stabil dan aman yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan demokrasi serta melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses politik dan pengambilan keputusan, yang memperkuat legitimasi pemerintah dan memperbaiki kualitas tata kelola agar terciptanya lingkungan yang stabil di daerah.

6. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

   Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terjadi secara merata di seluruh wilayah dengan memastikan bahwa semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap layanan dan infrastruktur dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang merata di seluruh wilayah dengan memastikan semua daerah memiliki akses yang sama untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

7. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

   Pembangunan sarana dan prasarana yang terencana dengan baik, mempertimbangkan lingkungan hidup yang terjaga dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin diantaranya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, meminimalisir bencana alam, mengelola sumber daya alam sesuai prinsip ekoefisiensi. Menyediakan infrastruktur yang terencana dengan baik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.

   Memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan dalam jangka panjang, dengan fokus pada mencapai tujuan dengan mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan strategi yang komprehensif untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada pembangunan yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kualitas hidup, pengelolaan lingkungan yang bijak, tata kelola pemerintahan yang baik, dan infrastruktur yang modern agar menjadi daerah yang maju, adil, dan makmur.

### 3.1.1.3 Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Visi dan Misi perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Datar dalam periode 20 (dua puluh) tahun diterjemahkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan. Sasaran pokok periode 20 (dua puluh) tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau lima tahunan yang merujuk pada RPJPN 2025-2045. Rumusan capaian sasaran visi, indikator dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3. 2
Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

| MISI | SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | BASE LINE | TARGET | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. Mewujudkan Transformasi Sosial | Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi | 1. Kesehatan Untuk Semua | 1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 75,14 | 76,29 | 77,44 | 78,59 | 79,74 | |
| | | | 2. Kesehatan ibu dan anak<br>a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 110 | 100 | 90 | 50 | 25 | |
| | | | b. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | |
| | | | 3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)<br>a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)* | 55,00 | 89,5 | 94,00 | 97,00 | 100,00 | |
| | | | b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate) (%)* | 93,00 | 94,00 | 96,00 | 98,00 | 100,00 | |
| | | | 4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) | 95,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | Terwujudnya Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata | 2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata | 5. | | | | | | |
| | | | a. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>a) Literasi Membaca | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 81,6 | |
| | | | b) Numerasi | 69,4 | 70,5 | 71,7 | 72,9 | 77,1 | |
| | | | b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9,42 | 10,20 | 10,97 | 11,73 | 12,49 | |
| | | | c. Harapan Lama Sekolah | 15,39 | 15,60 | 15,82 | 16,02 | 16,22 | |

| MISI | SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | BASE LINE | TARGET | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | | | | | | | |
| | | | 6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 13,16 | 13,58 | 14,01 | 14,43 | 14,85 | |
| | | | 7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 78,11 | 81 | 82 | 86,97 | 89,99 | |
| | Terwujudnya Perlindungan Sosial Yang Optimal | 3. Perlindungan Sosial Yang Adaptif | 8. Tingkat Kemiskinan (%) | 3,36-3,69 | 2,58-3,02 | 1,82-2,26 | 0,97-1,41 | 0,03-0,47 | |
| | | | 9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | 25,79 | 39,2 | 52,24 | 65,28 | 78,32 | |
| | | | 10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | 10,20 | 17,50 | 27,50 | 37,50 | 48,50 | |
| 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi | Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Ekonomi | 4. Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi | 11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 10,63 | 11,48 | 12,33 | 13,18 | 14,03 | |
| | | | 12. Pengembangan Pariwisata:<br>a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 0,89 | 1,07 | 1,17 | 1,28 | 1,41 | |
| | | | b. Jumlah tamu wisatawan mancanegara (orang) | 30.000 | 32.200 | 33.050 | 34.100 | 35.300 | |
| | | | 13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%) | 2,04 | 2,27 | 2,53 | 2,81 | 3,12 | |
| | | | 14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN<br>a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%) | 21,79 | 21,89 | 21,99 | 22,09 | 22,19 | |
| | | | b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (%) | 3,65 | 4,04 | 4,43 | 4,82 | 5,21 | |
| | | | c. Rasio kewirausahaan (%) | 4,26 | 5,26 | 6,76 | 8,46 | 9,66 | |

| MISI | SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | BASE LINE | TARGET | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | 1,67 | 2,13 | 2,68 | 3,24 | 3,79 | |
| | | | e. *Return on Aset* (ROA) BUMD (%) | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,39 | 0,41 | |
| | | | 15. a.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,19 | 4,79 | 4,39 | 3,99 | 3,59 | |
| | | | b.Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | 29,27 | 41,95 | 52,43 | 59,67 | 64,78 | |
| | | | 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 60,77 | 63,77 | 66,77 | 69,77 | 75,08 | |
| | | | 17. Indeks Inovasi Daerah | 49,23 | 56,61 | 65,10 | 74,87 | 86,10 | |
| | Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau | 5. Penerapan Ekonomi Hijau | 18. Penerapan Ekonomi Hijau<br>a. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%) | 26,65 | 24,41 | 22,35 | 20,47 | 18,74 | |
| | | | b. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang) | 35,75 | 37,59 | 39,53 | 41,57 | 43,71 | |
| | Terwujudnya Transformasi Digital | 6. Transformasi digital | 19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia | 56,14 | 62,11 | 68,07 | 74,04 | 80,00 | |
| | Terwujudnya Integritas Ekonomi Domestik dan Global | 7. Integrasi ekonomi domestik dan global | 20. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%) | -1,08 | -0,73 | -0,50 | -0,34 | -0,23 | |
| | | | 21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 32,11 | 32,55 | 33,29 | 33,43 | 33,88 | |
| | | | 22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 56,39 | 58,89 | 61,39 | 63,89 | 66,39 | |
| | Terwujudnya Nagari Sebagai Pusat Pertumbuhan | 8. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan | 23. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan | | | | | | |
| | | | a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses | 57,34 | 68,01 | 78,67 | 89,34 | 100 | |

| MISI | SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | BASE LINE | TARGET | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Ekonomi | ekonomi | terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) | | | | | | |
| | | | b. Persentase Desa Mandiri (%) | 8,75 | 12,75 | 16,75 | 21,14 | 26,14 | |
| 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola | Terwujudnya Penerapan Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif | 9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif | 24. Indeks Reformasi Hukum | 86,85 | 88 | 89 | 89,5 | 100 | |
| | | | 25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,22 | 3,67 | 4,11 | 4,56 | 5,00 | |
| | | | 26. Indeks Pelayanan Publik | 4,35 | 4,55 | 4,75 | 4,85 | 5,00 | |
| | | | 27. Survei penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai) | 72,50 | 74,50 | 76,50 | 78,50 | 80,60 | |
| 4. Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | Terwujudnya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan | 10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial | 28. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Trantibum | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | 29. Rasio Angka Kriminalitas | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | |
| | | | 30. Tingkat Partisipasi Pemilih<br>i. Pemilu (Pilpres & Pileg)<br>ii. Pilkada | <br>70<br>65 | <br>72<br>67 | <br>74<br>69 | <br>76<br>71 | <br>78<br>73 | |
| | Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Daerah | 11. Stabilitas ekonomi makro | 31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 0,21 | 0,31 | 0,47 | 0,70 | 1,04 | |
| | | | 32. Tingkat Inflasi (%) | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | |
| | | | 33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan<br>a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) | 6,04 | 20,00 | 39,97 | 60,03 | 80,02 | |
| | | | b. Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Kabupaten | 2.857.666 | 5.785.187 | 8.461.529 | 10.767.041 | 13.033.900 | |
| | | | c. Total Kredit/PDRB (%) | 18,28 | 23,46 | 28,70 | 33,39 | 38,44 | |
| | | | 34. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%) | 2,56 | 2,58 | 2,61 | 2,63 | 2,66 | |

| MISI | SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | BASE LINE | TARGET | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Terwujudnya Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan | 12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan | 35. Persentase Kerja sama wajib dilaksanakan (%) | 23,81 | 42,86 | 61,91 | 80,96 | 100 | |
| | | | 36. Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi | Terwujudnya Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya | 13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju | 37. a.Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (%) | 25,11 | 30,11 | 36,36 | 42,61 | 48,86 | |
| | | | b.Persentase Warisan Tak Benda yang ditetapkan (%) | 4,86 | 7,06 | 9,26 | 11,46 | 13,66 | |
| | | | 38. Tingkat Moderasi Beragama | 6,67 | 29,33 | 53,33 | 77,33 | 100 | |
| | Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif | 14. Keluarga bekualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif | 39. Indeks Pembangunan Keluarga | 60 | 62 | 63 | 63,8 | 64 | |
| | | | 40. a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,30-0,29 | 0,25-0,23 | 0,20-0,18 | 0,16-0,13 | 0,12-0,10 | |
| | | | b. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | 76,54 | 79,04 | 81,54 | 84,04 | 86,54 | |
| | Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas, Merata, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan | 15. Lingkungan hidup berkualitas | 41. Indeks Tutupan Lahan | 71,10 | 71,44 | 71,78 | 72,12 | 72,46 | |
| | | | 42. Kualitas Lingkungan Hidup<br>a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 76,15 | 77,21 | 78,27 | 79,33 | 80,39 | |
| | | | b. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman | 4,5 | 13,62 | 23,81 | 33,24 | 42,82 | |
| | | | c. Pengelolaan Sampah<br>- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 20,04 | 39,77 | 59,49 | 79,22 | 94 | |
| | | | - Proporsi Rumah Tangga | 37 | 44 | 54,50 | 73 | 100 | |

| MISI | SASARAN POKOK | ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | BASE LINE | TARGET | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | | | | | | |
| | Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan | 16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan | 43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan<br>a. Ketahanan Energi<br>- Konsumsi listrik per kapita | 367 | 546 | 728 | 895 | 1.071 | |
| | | | b. Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%) | 8,51 | 6,47 | 4,43 | 2,39 | 0,35 | |
| | | | c. Ketahanan Air<br>- Kapasitas Air Baku (m3/detik) | 0,442 | 0,542 | 0,642 | 0,692 | 0,732 | |
| | | | - Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Aman (%) | 23 | 30,5 | 38 | 45,5 | 53 | |
| | | 17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim | 44. Indeks Risiko Bencana (IRB) | 160 | 153,68-147,36 | 147,35-141,03 | 141,02-134,7 | 134,69-128,37 | |
| | | | 45. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 76,15 | 77,21 | 78,27 | 79,33 | 80,39 | |

### 3.1.2 VISI, MISI DAN SASARAN RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Visi Presiden Periode 2025 – 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang akan dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang tertuang dalam 8 (delapan) Asta Cita:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju
2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *zero emission*

Tabel 3. 3
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional

| Indikator | Kondisi sebelumnya | Target 2025 | Target 2029 |
|---|---|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi | 5,05% | 5,3% | 8% |
| GNI Perkapita | 4.879 USD | 5.410 USD | 8.000 USD |
| Kontribusi PDB Maritim | 7,9% | 8,1% | 9,1% |
| Kontribusi PDB Manufaktur | 18,67% | 20,8% | 21,9% |
| *Global Power Index* | Peringkat 34 | Peringkat 33 | Peringkat 29 |
| Tingkat Kemiskinan | 9,03% | 7,0% - 8% | 4,5% - 5% |
| Rasio Gini | 0,379 | 0,378 – 0,382 | 0,372 – 0,375 |
| Kontribusi PDRB KTI | 20,9% | 21,4% | 22,4% |
| Indeks Modal Manusia (IMM) | 0,54 | 0,56 | 0,59 |
| Emisi GRK | 34,09% | 35,53% | 45,17% |
| IKLH | 72,54 | 76,49 | 77,20 |

Asta Cita memuat 17 Program Prioritas sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk Sumber Daya Maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga

### 3.1.3 VISI, MISI DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT

Visi Gubernur Sumatera Barat tahun 2025-2029 yaitu “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan” yang akan dicapai melalui delapan misi sebagai berikut:

1. Pendidikan merata kesehatan berkualitas
2. Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan
3. Nagari/Desa sebagai basis kemajuan
4. Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat
5. Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana
6. Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas.
7. Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM.
8. Tata kelola pemerintah bersih dan pelayanan publik yang efektif.

Tabel 3. 4
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Barat 2025-2029

| Misi | Tujuan | Sasaran |
|---|---|---|
| 1. Pendidikan merata kesehatan berkualitas | Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing | 1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia<br>2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas |
| 2. Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan | Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan berbasis keberlanjutan<br>2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan |
| 3. Nagari/Desa sebagai basis kemajuan | Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing | 1. Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal<br>2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nagari/desa/kelurahan |
| 4. Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera bagian barat | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri dan inovasi | 1. Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah<br>2. Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas<br>3. Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah |
| 5. Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana | Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat | 1. Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim<br>2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan<br>3. Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur |
| 6. Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas | Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas | 1. Memperkuat nilai adat, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat<br>2. Meningkatnnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender<br>3. Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga yang berkualitas |
| 7. Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM | Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan | 1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah<br>2. Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM |
| 8. Tata kelola pemerintah bersih dan pelayanan publik yang efektif | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan pelayanan publik yang efektif | 1. Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan<br>2. Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah |

### 3.1.4 RPJMD KABUPATEN TANAH DATAR

#### 3.1.4.1 VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN TANAH DATAR

Kabupaten Tanah Datar mempunyai cita-cita besar untuk menjadi daerah yang maju dalam berbagai aspek kehidupan. Kabupaten Tanah Datar juga mempunyai impian besar untuk mengokohkan adat dan budaya sebagai sendi kehidupan, yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dengan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai landasannya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan dalam RPJPD Tahun 2025–2045 dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, visi pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025–2029 dirumuskan dengan mempedomani :

1. Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Amanat kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat serta RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045.
3. Adanya keinginan untuk melanjutkan dan menuntaskan program pembangunan periode sebelumnya yang terkait dengan isu strategis daerah dan prioritas pembangunan yang ditetapkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, visi pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

Makna yang terkandung dalam rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Madani | : | Adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi serta supremasi hukum. |
| Maju | : | Kabupaten Tanah Datar yang maju dalam arti mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendapatan perkapita tinggi, tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan rendah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas infrastruktur yang baik, dan harapan hidup tinggi, sehingga mampu berdaya saing dalam menciptakan inovasi untuk mengatasi permasalahan dan mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat terhadap tantangan global di masa mendatang, ditunjang oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). |
| Berkelanjutan | : | Berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak dan sumber daya untuk generasi mendatang. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan hidup. |

| | | |
|---|---|---|
| Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah | : | Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Merupakan filosofi hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan/atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. |

Sasaran Visi Pembangunan Daerah 2025-2029

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, ditetapkan lima sasaran Visi yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran pertama, peningkatan pendapatan per kapita mengacu pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai melalui upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pada peningkatan sektor pertanian, pariwisata, pengembangan industri pengolahan, pemberdayaan Usaha Mikro, pengolahan sampah dan peningkatan investasi di berbagai sektor.

Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, merupakan tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 adalah sebesar 4,28%, masih lebih baik dibandingkan angka provinsi dan nasional. Upaya pengentasan kemiskinan dapat melibatkan serangkaian kegiatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memberikan akses dalam pengembangan Usaha Mikro, menerapkan program perlindungan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.

Sasaran ketiga, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, melibatkan serangkaian langkah dan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah, Pentingnya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efisiensi dan pengelolaan sumber daya yang baik, peningkatan pembangunan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan tingkat kepuasan masyarakat, peningkatan keseimbangan dan pembangunan regional, pengembangan inovasi dan teknologi serta peningkatan citra dan reputasi daerah.

Sasaran keempat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, melibatkan peningkatan kualitas, keterampilan dan kapasitas individu serta kelompok dalam memenuhi tuntutan pasar kerja dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas, peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengembangan profesional, serta kewirausahaan dan inovasi.

Sasaran kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan aspek penting untuk mendukung kehidupan yang sehat dan berkelanjutan dan diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut diantaranya penyusunan kebijakan lingkungan, penegakan peraturan lingkungan, pengelolaan limbah efektif, promosi energi terbarukan,

pendidikan dan kesadaran masyarakat, pengembangan perekonomian hijau serta pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan.

Tabel 3. 5
Sasaran Visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029

| No. | Sasaran Utama Visi/Indikator | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Peningkatan pendapatan perkapita | | | | | | |
| | PDRB perkapita ADHB(Rp.Ribu) | 49.320 | 54.650 | 60.630 | 67.010 | 73.980 | 81.650 |
| | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | 8,45 | 8,66 | 8,87 | 9,08 | 9,30 | 11,48 |
| 2. | Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang | | | | | | |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 3,4 | 3,28 | 3,16 | 3,00 | 2,86 | 2,72 |
| | Rasio Gini | 0,256 | 0,255 | 0,254 | 0,253 | 0,252 | 0,251 |
| | Pertumbuhan Ekonomi | 3,98% | 5,54% | 6,73% | 6,91% | 7,18% | 5,78% |
| 3. | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | | | | | | |
| | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 3,168 | 3,171 | 3,173 | 3,176 | 3,179 | 3,182 |
| 4. | Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| | Indeks Pembangunan Manusia | 77,19 | 77,85 | 78,54 | 79,13 | 79,81 | 80,49 |
| | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | 66,04 | 66,72 | 67,40 | 68,08 | 68,76 | 69,44 |
| 5. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 76,15 | 76,36 | 76,58 | 76,79 | 77,00 | 77,21 |

### 3.1.4.2 MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN TANAH DATAR

Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi pembangunan jangka menengah yang menggambarkan strategi yang akan ditempuh sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 6
Penjelasan Misi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029

| Rumusan Misi | Penjelasan |
|---|---|
| Misi 1: | |
| Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya | Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya melalui peningkatan peran lembaga agama, adat dan budaya, untuk memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat guna memantapkan ketahanan sosial budaya. |
| Misi 2: | |
| Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing diwujudkan dengan membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera unggul dan berdaya saing. |
| Misi 3: | |
| Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi | Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan perkapita tinggi, meningkatnya produktivitas dan nilai tambah, meningkatnya investasi dan meratanya pendapatan masyarakat. Transformasi ekonomi didukung dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan digitalisasi, dan inovasi serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. |
| Misi 4: | |
| Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien | Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan inklusif serta berorientasi pelayanan. |
| Misi 5: | |
| Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan | Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan Menyediakan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, melestarikan lingkungan serta meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. |
| Misi 6: | |
| Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah | Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah dengan Memperkuat keamanan di tingkat daerah mencakup aspek penegakan hukum, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta membangun pondasi ekonomi yang kuat . |
| Misi 7: | |
| Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan | Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan, pembangunan nagari yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing tinggi. |

### 3.1.4.3 KETERKAITAN ANTARA RPJMD KABUPATEN TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJPD TAHUN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, DAN RPJMD PROVINSI SUMBAR TAHUN 2025-2029

Pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Visi Misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, dan Visi Misi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta Visi Misi RPJMN (Asta Cita) Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat, di mana kebijakan daerah memperkuat dan mengimplementasikan agenda-agenda prioritas nasional. Berikut analisis keterkaitan antara ketiga Visi Misi tersebut :

Tabel 3. 7
Keterkaitan antara Visi RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029
dengan Visi RPJMN 2025-2029, Visi RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2029
serta Visi RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045

| Visi RPJMN Tahun 2025–2029 | Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 | Visi RPJPD Tahun 2025-2045 | Visi RPJMD Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|
| Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 | Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan | Tanah Datar Maju, Berkelanjutan dan Berbudaya Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah | Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah |

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada misi RPJMN dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta misi RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. 8
Persandingan Misi RPJMN, Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat
dan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029

| Misi RPJMN 2025-2029 | Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 | Misi RPJPD Tahun 2025-2045 | Misi RPJMD Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|
| Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) | | | |
| Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan | Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah |
| Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang | Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana | Mewujudkan Dukungan Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan | Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan |

| Misi RPJMN 2025-2029 | Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 | Misi RPJPD Tahun 2025-2045 | Misi RPJMD Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|
| berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UKM | | |
| Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas | Pendidikan merata, kesehatan berkualitas | Mewujudkan Transformasi Sosial Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas | Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing |
| Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat | Mewujudkan Transformasi Ekonomi | Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi |
| Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | Nagari/Desa sebagai basis kemajuan | Memantapkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan | Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan |
| Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba | Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif | Mewujudkan Transformasi Tata Kelola | Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien |
| Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur | Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas | Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi | Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya |

### 3.1.4.4 RPJMD KABUPATEN/KOTA TETANGGA

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah Datar akan dipengaruhi oleh daerah tetangga. Oleh sebab itu dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Datar juga perlu memperhatikan keselarasan dengan RPJMD Kabupaten/Kota tetangga.

RPJMD Kota Padang Panjang

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 mengusung Visi : ”Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera dan Bermarwah” dengan misi :

1. Mewujudkan Sumber daya manusia berkualitas, kreatif, inovatif, berakhlak dan berdaya saing tinggi.
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif.
4. Mewujudkan masyarakat kota Padang Panjang yang rukun, aman, berbudaya dan berkarakter berbasis nilai agama, adat istiadat dan kearifan lokal.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menjadikan Padang Panjang Kota hijau berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Agam

Visi RPJMD Kabupatan Agam Tahun 2025-2029, ”Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera”, dengan Misi :

1. Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai.
2. Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing.
4. Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.
5. Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana.
6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

RPJMD Kabupaten 50 Kota

Visi RPJMD Kabupatan 50 Kota Tahun 2025-2029 yaitu : ”50 Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan Misi :

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Meningkatkan Sumber daya manusia yang handal, sehat, produktif dan kompetitif.
4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan.
5. Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing.
6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.

7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari.

RPJMD Kabupaten Sijunjung

Visi RPJMD Kabupatan Sijunjung Tahun 2025-2029 yaitu : ”Berkolaborasi mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing, dan Mandiri (Idaman)”, dengan misi :

1. Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif.
3. Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan.
5. Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan.

### 3.1.4.5 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran memiliki indikator yang dapat menggambarkan ketercapaian visi dan misi pada skala dampak/*impact*.

Visi dan misi yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran agar pencapaian masing-masing misi dapat terukur secara tahunan maupun lima tahunan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan konkuren pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, sasaran, indikator serta target RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3. 9
Tujuan, Sasaran, dan Indikator berdasarkan Misi

| VISI/MISI | TUJUAN/ INDIKATOR | | SASARAN | | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." | | | | | | | | | | | | | | |
| Misi 1 : Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya | 1 | Terwujudnya masyarakat yang beragama, beradat dan berbudaya berbasis keluarga berkualitas<br><br>Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga | 1 | Meningkatnya pembangunan keagamaan | Jumlah rumah tangga yang memiliki satu hafizh/hafizah | Rumah Tangga | 6.305 | 7.305 | 8.305 | 9.305 | 10.305 | 11.305 | 12.305 | |
| | | | | | Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan Umat | Unit | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| | | | | | Tingkat Moderasi Beragama | % | - | 6,67 | 13,3 | 20,00 | 26,67 | 33,33 | 40,00 | |
| | | | 2 | Meningkatnya pembangunan kebudayaan | Jumlah peraturan Nagari terkait adat salingka nagari yang ditetapkan | Jumlah | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 62 | 75 | |
| | | | 3 | Meningkatnya keluarga berkualitas, dan masyarakat inklusif | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 62,42 | 62,92 | 63,42 | 63,97 | 64.49 | 64.99 | 65.49 | |
| | | | 4 | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,336 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | |
| | | | | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 52,300 | 67,910 | 68,096 | 68,282 | 68,468 | 68,564 | 68,840 | |

| VISI/MISI | TUJUAN/ INDIKATOR | | SASARAN | | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." | | | | | | | | | | | | | | |
| Misi 2 : Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | 1 | Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing<br><br>Indikator : Indek Pembangunan Manusia (IPM) | 1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | Tahun | 74,26 | 74,58 | 74,76 | 75,01 | 75,20 | 75,45 | 75,64 | |
| | | | | | Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | % | 26,90 | 24,20 | 22,95 | 21,70 | 20,45 | 19,20 | 17,95 | |
| | | | 2 | Meningkatnya Pendidikan berkualitas yang merata | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,29 | 9,42 | 9,48 | 9,63 | 9,78 | 9,87 | 10,01 | |
| | | | | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,05 | 15,27 | 15,50 | 15,74 | 15,97 | 16,20 | 16,44 | |
| | | | 3 | Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif | Tingkat Kemiskinan (%) | % | 4,28 | 3,40 | 3,28 | 3,16 | 3,00 | 2,86 | 2,72 | |
| Misi 3 : Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi | 1. | Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah berbasis produk unggulan dan peningkatan investasi<br><br>Indikator : PDRB per kapita | 1. | Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pertanian | Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan | (Dalam Milyar) | 3.151,72 | 3.268,33 | 3.387,63 | 3.507,89 | 3.629,22 | 3.750,87 | 3.873,79 | |
| | | | 2. | Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pariwisata, dan ekonomi kreatif | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 0,8 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 1,07 | |
| | | | | | Kontribusi Sektor Pariwisata | Milyar Rupiah | 140,23 | 140,35 | 159,86 | 206,13 | 265,03 | 340,75 | 434,71 | |

| VISI/MISI | TUJUAN/ INDIKATOR | | SASARAN | | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis, Koperasi, Usaha Mikro/ IKM, Industri Pengolahan dan BUMD | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 10,38 | 8,45 | 8,66 | 8,87 | 9,08 | 9,30 | 11,48 | |
| | | | 4. | Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Juta/ Orang | 54,35 | 66,04 | 66,72 | 67,4 | 68,08 | 68,76 | 69,44 | |
| | | | 5. | Meningkatnya Investasi | Jumlah realisasi investasi daerah | (Rp Milyar/ tahun) | 231,97 | 232 | 265 | 325 | 326 | 327 | 328 | |
| | | | 6 | Terwujudnya Masyarakat digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi | Indeks Masyarakat Digital Indonesia | Indeks | 43,27 | 56,14 | 57,33 | 58,52 | 59,71 | 60,9 | 62,11 | |
| Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien | 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintah yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas | 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | Nilai | 78,05 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | |
| | | | | | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 45,95 | 49,23 | 50,71 | 52,18 | 53,66 | 55,13 | 56,61 | |

| VISI/MISI | TUJUAN/ INDIKATOR | | SASARAN | | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Visi : “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | |
| Misi 5 : Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan | 1 | Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas,tanggah bencana,dan ramah lingkungan<br><br>Indikator : IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur) | 1 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas | IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur | Indeks | - | 62,51-65,61 | 65,62-68,81 | 68,82-72,61 | 72,62-75,61 | 75,62-78,61 | 78,62-81,61 | |
| | | | 2 | Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 65,32 | 76,15 | 76,36 | 76,58 | 76,79 | 77,00 | 77,21 | |
| | | | 3 | Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bencana dan pasca bencana | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 125,2 | 123,92 | 123,91-122,64 | 122,63-121,36 | 121,35-120,08 | 120,07-118,8 | 118,79-117,52 | |

| VISI/MISI | TUJUAN/ INDIKATOR | | SASARAN | | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Visi : "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." | | | | | | | | | | | | | | |
| Misi 6 : Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah | 1 | Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah<br><br>Indikator : Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas | 1 | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas | Indeks | - | 50,01 | 55,01 | 60,01 | 65,01 | 70,01 | 75,01 | |
| | 2 | Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi Daerah<br><br>Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi | 1. | Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | % | 3,85 | 3,98 | 5,54 | 6,73 | 6,91 | 7,18 | 5,78 | |
| | | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | % | 5,3 | 5,01 | 4,85 | 4,68 | 4,56 | 4,43 | 4,32 | |
| | | | 2 | Meningkatnya kapasitas riil keuangan daerah | Rasio PAD terhadap total pendapatan/ Derajat Otonomi Fiskal | % | 12,27 | 14.56 | 17.57 | 21.32 | 25.92 | 31.45 | 37.92 | |
| | | | | | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | % | 0,15 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | |
| | | | 3 | Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah | Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Syariah | Unit | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |

| VISI/MISI | TUJUAN/ INDIKATOR | | SASARAN | | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Visi : “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” | | | | | | | | | | | | | | |
| Misi 7 : Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan | 1 | Terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan Indikator : Persentase Desa Mandiri | 1 | Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi | Persentase Desa Mandiri | % | 65,33 | 66,67 | 68,00 | 69,33 | 70,67 | 72,00 | 73,33 | |

## 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.2.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MENURUT TUJUAN DAN SASARAN

Strategi dan arah kebijakan adalah rencana lengkap untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 secara efisien dan efektif. Strategi memungkinkan transformasi, reformasi, dan peningkatan kinerja birokrasi secara keseluruhan. Perencanaan strategis tidak hanya mengatur inisiatif pembangunan tetapi juga mencakup inisiatif yang meningkatkan layanan publik, seperti meningkatkan kapasitas dan kinerja birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, strategi terdiri dari tindakan yang mencakup program-program prioritas pembangunan daerah dan perangkat daerah. Melalui pendekatan manajemen yang berorientasi pada strategi, pendekatan ini menjadi salah satu rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi terdiri dari pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang kemudian diperjelas dengan beberapa garis besar kebijakan.

Dalam mencapai sasaran RPJMD, perangkat daerah melaksanakan program pembangunan daerah sebagai instrumen utama dalam implementasi arah kebijakan. Program ini dibangun berdasarkan strategi program prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, program ini menggambarkan bagaimana program prioritas dan sasaran pembangunan berinteraksi dengan strategi yang dipilih, sehingga mampu memberikan dampak pembangunan daerah yang optimal.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 - 2029 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu priode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran pada setiap misi sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2025-2029 yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, pembangunan daerah, janji politik, serta pertimbangan strategis lainnya yang dinilai penting.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan per misi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 10
Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan misi

| Misi 1 Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| 1. Terwujudnya masyarakat yang beragama beradat dan berbudaya berbasis keluarga berkualitas | 1. Meningkatnya pembangunan keagamaan | 1. Memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat melalui program-program yang religius. | 1. Penguatan nilai-nilai agama pada lembaga pendidikan formal dan non formal |

| Misi 1 Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| | | | 2. Peningkatan program satu rumah satu hafidz/hafidzah dengan peningkatan kesejahteraan guru TPA dan tahfidz |
| | | | 3. Memfasilitasi sarana ibadah sebagai pusat kegiatan umat |
| | | | 4. Pengoptimalan fungsi alim ulama |
| | 2. Meningkatnya Pembangunan kebudayaan | 1. Memperkuat pemahaman adat salingka nagari | 1. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat dan budaya |
| | | | 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang untuk mengoptimalkan fungsi niniak mamak dan bundo kanduang |
| | | | 3. Pengoptimalan pendidikan adat dan budaya untuk generasi muda |
| | | 2. Memperkuat kapasitas, kolaborasi, serta inovasi lembaga budaya dalam pelestarian dan promosi budaya | 1. Digitalisasi dan promosi budaya daerah untuk meningkatkan daya tarik wisata religi dan budaya. |
| | | | 2. mengembalikan ikon Kota Batusangkar sebagai kota budaya |
| | | | 3. Mengembalikan fungsi benteng *Van Der Capellen* sebagai situs warisan sejarah |
| | 3. Meningkatnya keluarga berkualitas, dan masyarakat inklusif | 1. Membangun kesadaran, partisipasi, dan apresiasi terhadap nilai-nilai keluarga berkualitas | 1. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan keberagaman dan budaya berbasis masyarakat |
| | | | 2. Peningkatan ketahanan keluarga |
| | | | 3. Peningkatan akses informasi dan pendidikan keluarga |
| | 4. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | 1. Memperkuat program kesetaraan gender dan inklusifitas sosial | 1. Penguatan ketahanan keluarga, dan masyarakat inklusif. |
| | | | 2. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak |

| Misi 2. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| 1. Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing | 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1. Memperkuat akses layanan kesehatan yang berkualitas | 1. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan |
| | | | 2. Peningkatan kualitas SDM aparatur kesehatan |
| | | | 3. Pemanfaatan teknologi digital bidang kesehatan. |
| | | | 4. Peningkatan kualitas tatakelola pelayanan kesehatan dan melanjutkan program UHC |
| | | | 5. Pembangunan sarana prasarana olahraga (*sport center*) |
| | 2. Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Merata | 1. Memperkuat akses dan kualitas pendidikan berbasis teknologi yang merata untuk seluruh siswa | 1. Peningkatan pelayanan pendidikan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), kualitas pendidik dan tenaga kependidikan |
| | | | 2.Gerakan Toilet Bersih |
| | | | 3. Pemanfaatan teknologi digital bidang Pendidikan |
| | | | 4. Peningkatan pembelajaran implementasi nilai-nilai ABS-SBK |
| | | | 5. Penguatan pendidikan inklusif |
| | 3. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif | 1. Memperkuat program bantuan sosial yang tepat sasaran | 1. Peningkatan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan kabupaten |
| | | | 2. Penyempurnaan kebijakan transformasi sosial berbasis data dengan memanfaatkan teknologi digital |
| | | | 3. Peningkatan kompetensi penyandang disabilitas |
| | | | 4. Penanganan rumah tidak layak huni |

| Misi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| 1. Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah berbasis produk unggulan dan peningkatan investasi | 1. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pertanian | 1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian secara berkelanjutan | 1. Optimalisasi Lahan Pertanian<br>2. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian<br>3. Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan<br>4. Pengembangan Pertanian Modern<br>5. Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani |
| | | 2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha perikanan | 1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap<br>2. Peningkatan kapasitas SDM pelaku utama perikanan<br>3. Peningkatan inovasi, hilirisasi dan pemasaran produk perikanan<br>4. Peningkatan upaya Menjaga kelestarian sumber daya perikanan |
| | 2. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pariwisata, dan ekonomi kreatif | 1. Pengembangan destinasi wisata unggulan | 1. Revitalisasi objek wisata prioritas dan Pengembangan daya tarik serta event berbasis budaya dan alam<br>2. Pembangunan Sarana dan Prasarana wisata di Destinasi Wisata<br>3. Pariwisata budaya berbasis nagari |
| | | 2.Peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | 1. Pelatihan bagi pemandu wisata, pengelola wisata, dan Usaha Mikro kreatif dan Sertifikasi kompetensi Wisata<br>2. Pelatihan bagi pelaku usaha mikro kreatif |
| | | 3.Digitalisasi promosi dan pemasaran | 1. Pemanfaatan platform digital dan media sosial<br>2. Peningkatan branding destinasi |
| | | 4.Dukungan infrastruktur dan aksesibilitas wisata | Peningkatan akses jalan, penyediaan transportasi umum yang memadai, fasilitas umum, dan pusat layanan wisata |
| | | 5.Pengembangan ekonomi kreatif lokal | 1. Inkubasi produk kreatif unggulan dan Fasilitasi legalitas, kemasan, dan pemasaran<br>2. Pembangunan creative hub |

| Misi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| | | 6.Pengelolaan dan pengembangan *geopark* | 1. Konservasi, Edukasi dan penguatan peran masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan wisata *geopark*<br>2. Penyusunan regulasi dan rencana induk *geopark* |
| | | 7.Penguatan kolaborasi multipihak | 1. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Akademisi, Dunia Usaha, masyarakat,dan media dalam pengembangan pariwisata<br>2. Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) |
| | 3. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis Koperasi, Usaha Mikro/IKM, Industri Pengolahan dan BUMD | 1.Penguatan kelembagaan dan SDM pelaku usaha | 1. Pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi keuangan<br>2. Pendampingan koperasi, Koperasi Desa Merah Putih dan Usaha Mikroproduktif |
| | | 2.Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan | 1. Fasilitasi kemudahan permodalan dan subsidi bunga<br>2. Kemitraan usaha mikro dengan usaha menengah/besar |
| | | 3.Digitalisasi Usaha Mikro dan akses pasar | Peningkatan penggunaan *e-commerce*, *marketplace*, dan sistem informasi tunggal dan fasilitasi Promosi produk melalui pameran dan digital marketing |
| | | 4.Penguatan industri pengolahan | 1. Dukungan teknologi tepat guna dan inovasi produk IKM<br>2. Pengembangan kawasan sentra industri kecil berbasis potensi lokal |
| | | 5.Pengembangan BUMD sebagai motor ekonomi daerah | 1. Optimalisasi peran BUMD pada sektor strategis Daerah<br>2. Penguatan tata kelola dan profesionalisme BUMD |
| | | 6.Revitalisasi pasar rakyat | 1. Peningkatan sarana prasarana pasar rakyat<br>2. Penguatan tata kelola pasar rakyat dan digitalisasi sistem transaksi |

| Misi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| | 4. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja | 1.Penguatan pelatihan vokasi dan *link* & *match* dengan dunia kerja | 1. Pengembangan BLK berbasis kebutuhan industri<br>2. Kerja sama pelatihan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) |
| | | 2.Peningkatan keterampilan digital dan wirausaha | 1. Pelatihan digitalisasi bagi pencari kerja dan wirausahawan muda<br>2. Inkubasi wirausaha berbasis teknologi dan ekonomi kreatif |
| | | 3.Perluasan kesempatan kerja | 1. Pengembangan padat karya produktif<br>2. Fasilitasi penciptaan lapangan kerja sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata<br>3. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing global |
| | | 4.Perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja | Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan |
| | | 5.Optimalisasi informasi pasar kerja | Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu - Pemadanan data pencari kerja dan lowongan kerja secara digital |
| | 5. Meningkatnya Investasi | 1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor | Menyusun regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah |
| | | 2. Melakukan promosi investasi | Mengikuti event promosi dan temu bisnis |
| | | 3. Menyusun perencanaan dan strategi investasi | 1. Pengawasan, pembinaan dan fasilitasi penanaman modal<br>2. Membuat studi kelayakan investasi dan hilirisasi<br>3. Menyusun peta peluang dan potensi investasi |
| | 6. Terwujudnya masyarakat digital yang inklusif dan berdaya saing | 1. Menyediakan akses infrastruktur digital | 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur digital |
| | | 2. Memperkuat literasi digital masyarakat | 1. Meningkatkan keterlampilan digital masyarakat |

| Misi 4. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| 1. Terwujudnya tata kelola pemerintah | 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan | 1. Memperkuat Regulasi dan tata kelola yang | 1. Reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. |

| Misi 4. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas | melalui pelaksanaan reformasi birokrasi | berintegritas dan adaptif yang transparan dan akuntabel | |
| | | 2. Melakukan peningkatan pelayanan publik dan kapasitas aparatur yang berintegritas dan adaptif | 1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan transparansi keuangan daerah. |
| | | | 2. Optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan. |
| | | 3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, komunikasi dan informasi layanan publik | 1. Digitalisasi layanan pemerintahan untuk efisiensi pelayanan publik. |
| | | | 2. Evaluasi dan perbaikan kebijakan tata kelola pemerintahan. |
| | | 4. Pengelolaan keuangan yang baik, akurat dan transparan | 1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) |

| Misi 5. Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| 1. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, tangguh bencana dan ramah lingkungan | 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas | 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang mampu mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi | 1. Penguatan kapasitas perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi melalui perencanaan teknis yang adaptif dan ramah lingkungan |
| | | | 2. Penguatan Kolaborasi dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) |
| | | | 3. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi digital untuk mencatat kondisi infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) |
| | | | 4. Peningkatan kapasitas infrastruktur yang berbasis pada prinsip keberlanjutan |
| | | | 5. Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) |

| Misi 5. Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| | | | 6. Pengembangan pengelolaan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) |
| | | | 7. Evaluasi implementasi infrastruktur yang berbasis pada prinsip keberlanjutan |
| | | 2. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | 1. Fasilitasi peningkatan layanan air bersih |
| | | | 2. Pembangunan Instalasi pengolahan lumpur Tinja (IPLT) |
| | 2. Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup | 1. Peningkatan pengelolaan, penguatan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup dalam pelaksanaan regulasi yang berlaku | 1. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti pengendalian air limbah dan persampahan serta konservasi sumber daya alam (SDA) |
| | | 2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup | 1. Penguatan Kolaborasi untuk mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan dan konservasi sumber daya alam (SDA) |
| | | | 2.Penguatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemerintah Nagari dalam penanganan sampah yang baik dan berkelanjutan. |
| | | | 3. Pengelolaan sampah terpadu, satu nagari satu bank sampah |
| | | | 4. Pengembangan pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam (SDA) yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan dan *circular economic* |
| | | 3. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan kelompok pemerhati lingkungan hidup | 1. Pengembangan pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam (SDA) yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan |
| | 3. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bencana dan pasca bencana | 1. Menyusun rencana tanggap darurat untuk berbagai jenis bencana | 1. Peningkatan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta integrasi resiko bencana dalam pembangunan |

| Misi 5. Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| | | 2. Memperkuat kapasitas pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana | 1. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan mitigasi bencana |
| | | 3. Memperkuat peran masyarakat dalam menghadapi bencana | 1. Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana |
| | | | 2.Integrasi aspek mitigasi dan adaptasi bencana dalam pembangunan infrastruktur |
| | | | 3. Evaluasi Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana |

| Misi 6. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| 1. Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah | 1.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | 1. Memperkuat kolaborasi antar stakeholder, partisipasi aktif masyarakat | 1. Kerja sama dengan instansi/*stakeholder* terkait |
| | | | 2. Pembentukan Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) |
| | | | 3. Pemenuhan rasio/ jumlah aparat penegak Perda |
| | | | 4. Peningkatan kapasitas aparat penegak perda |
| | | | 5. Memperkuat edukasi masyarakat tentang hak demokrasi, pemilu yang bersih, dan partisipasi politik yang aktif |
| | | | 6. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol |
| 2. Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi Daerah | 1. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah | 1. Menjaga keseimbangan fiskal antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi | 1. Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah |
| | | | 2. Pengalokasian Belanja subsidi |
| | | | 3. Penguatan kelembagaan dan distribusi pangan |
| | | | 4.Penguatan stabilitas pasokan dan harga pangan |
| | | | 5.Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) |

| Misi 6. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| | | | 6. Mengintegrasikan data stok *real time* dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah |
| | | | 7.Optimalisasi program unggulan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi |
| | 2. Meningkatnya kapasitas riil keuangan daerah | 1. Peningkatan dana transfer dan kerja sama pendanaan | 1. Optimalisasi pemenuhan indikator fiskal untuk mendapatkan dana insentif fiskal |
| | | | 2. Mengoptimalkan pemanfaatan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil |
| | | | 3. Menjalin kemitraan dengan instansi vertikal dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah |
| | | 2. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi dan monetisasi aset | 1. Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah |
| | | | 2. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui digitalisasi pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak |
| | | | 3. penyempurnaan basis data pajak dan retribusi serta penyempurnaan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi |
| | | | 4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak |
| | | | 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur/SDM Perpajakan |
| | | | 6. Optimalisasi aset daerah untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah |
| | | 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan mengedepankan belanja produktif | 1. Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien serta menghindari defisit yang besar |
| | | | 2. Pengadaan barang/belanja modal dan pemeliharaan barang secara selektif sesuai dengan kebutuhan |
| | 3. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah | 1. Peningkatan Literasi, inklusi dan Edukasi serta | 1. Penguatan landasan hukum dan tata kelola koperasi Syariah |

| Misi 6. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| | | penguatan dana Keuangan Syariah | |
| | | | 2. Melaksanakan kemitraan strategis dengan kemitraan perguruan tinggi dan BAZNAZ |
| | | | 3. Penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, BUMD dan Bumnag Syariah |
| | | 2. Pengembangan Usaha Mikro/IKM syariah | 1.Pemberdayaan pelaku usaha berbasis syariah melalui pelatihan dan fasilitasi akses pembiayaan Syariah |
| | | | 2.Fasilitasi sertifikat halal |

| Misi 7 Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan | | | |
|---|---|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
| 1. Terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan | 1. Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi | 1. Menyediakan infrastruktur pendukung di pasar rakyat dan fasilitas perdagangan lainnya untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro | 1. Penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tata ruang. |
| | | 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung konektivitas antar wilayah | 2. Implementasi proyek infrastruktur kewilayahan dan optimalisasi penggunaan lahan. |
| | | 3. Mendorong inovasi pemasaran melalui teknologi (*digital marketing*) | 3. Percepatan penyelesaian konflik tata ruang dan perizinan investasi. |
| | | | 4. Optimalisasi kerja sama antar daerah untuk pemerataan pembangunan. |
| | | | 5. Evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan tahap berikutnya. |

### 3.2.2 ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP FOKUS PRIORITAS RPJMN TAHUN 2025-2029

#### 3.2.2.1 Arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk penurunan tingkat kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah, mengingat kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial, pendidikan, kesehatan, dan

kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Arah kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada upaya strategis dan terintegrasi untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Target penurunan kemiskinan secara nasional pada tahun 2025 sebesar 7,00%-8,00% dan ditargetkan pada tahun 2029 tingkat kemiskinan turun menjadi 4,5%-5%. Target penurunan kemiskinan nasional ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan menargetkan pada tahun 2025 sebesar 3,09%-3,36% dan pada tahun 2030 turun menjadi 2,58%-3,02%. Berikut target tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar untuk periode tahun 2025-2030.

Tabel 3. 11
Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar
untuk Periode Tahun 2025-2030

| Tingkat Kemiskinan(%) | Base Line (2025) | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Kabupaten | 3,4 | 3,28 | 3,16 | 3 | 2,86 | 2,72 |

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan kabupaten
2. Penyempurnaan kebijakan transformasi sosial berbasis data dengan memanfaatkan teknologi digital
3. Peningkatan kompetensi penyandang disabilitas
4. Penanganan rumah tidak layak huni

Program prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Penanganan Bencana

3.2.2.2 Arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Pemerintah Daerah menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas strategis yang mencakup peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan dan pelatihan, kesehatan, serta karakter masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan sumber daya manusia di tingkat daerah. IPM menggabungkan tiga dimensi dasar,

yaitu umur panjang dan hidup sehat (diukur melalui usia harapan hidup), pengetahuan (diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur melalui pengeluaran per kapita).

Pada tingkat nasional, indikator serupa dikenal dengan istilah Indeks Modal Manusia (IMM), yang secara metodologis identik dengan IPM. IMM merupakan penyebutan IPM dalam konteks kebijakan nasional, sebagaimana digunakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dokumen perencanaan makro lainnya. Dengan demikian, IMM pada dasarnya adalah IPM yang dirata-ratakan dan dianalisis pada skala nasional.

Penggunaan IPM sebagai indikator utama pembangunan manusia di daerah sejalan dengan IMM yang dijadikan target dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan IPM di tingkat kabupaten/kota memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian IMM nasional. Sinkronisasi antara target IPM daerah dan IMM nasional menjadi penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Target IMM nasional pada tahun 2025 sebesar 0,56 sedangkan pada tahun 2029 adalah 0,59. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 adalah 77,00 sedangkan tahun 2030 ditargetkan 78,64.

Untuk IPM Kabupaten Datar periode 2025-2030 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 12
IPM Kabupaten Datar periode 2025-2030

| Indikator | Baseline | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Indeks Pembangunan Manusia | 77,19 | 77,85 | 78,54 | 79,13 | 79,81 | 80,49 |

Untuk mencapai target tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada:

1. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan.
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur kesehatan.
3. Pemanfaatan teknologi digital bidang kesehatan.
4. Peningkatan kualitas tatakelola pelayanan kesehatan dan melanjutkan program UHC.
5. Pembangunan sarana prasarana olahraga (*sport center*).
6. Peningkatan pelayanan pendidikan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Gerakan Toilet Bersih.
8. Pemanfaatan teknologi digital bidang Pendidikan.
9. Peningkatan pembelajaran implementasi nilai-nilai ABS-SBK.
10. Penguatan pendidikan inklusif.

Program prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.

4. Program Pengelolaan Pendidikan.
5. Program Pengembangan Kurikulum.
6. Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

3.2.2.3 Arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi tujuan utama dalam pembangunan daerah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas, berkeadilan, ramah lingkungan, dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional tahun 2025 adalah sebesar 5,3% sedangkan target tahun 2029 adalah sebesar 8,00%. Untuk target LPE Kabupaten Tanah Datar untuk periode tahun 2025 5,18% untuk tahun 2030 sebesar 5,63%.

Untuk LPE Kabupaten Datar periode 2025-2030 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 13
LPE Kabupaten Datar periode 2025-2030

| LPE (%) | Baseline | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Kabupaten | 3,98 | 5,54 | 6,73 | 6,91 | 7,18 | 5,78 |

Untuk mencapai target tersebut, Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah difokuskan pada :

1. Optimalisasi Lahan Pertanian.
2. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian.
3. Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan.
4. Pengembangan Pertanian Modern.
5. Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani.
6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap.
7. Peningkatan kapasitas SDM pelaku utama perikanan.
8. Peningkatan inovasi, hilirisasi dan pemasaran produk perikanan.
9. Peningkatan upaya Menjaga kelestarian sumber daya perikanan.
10. Revitalisasi objek wisata prioritas dan Pengembangan daya tarik serta event berbasis budaya dan alam.
11. Pembangunan Sarana dan Prasarana wisata di Destinasi Wisata.
12. Pelatihan bagi pemandu wisata, pengelola wisata, dan Usaha Mikro kreatif dan Sertifikasi kompetensi Wisata.
13. Pelatihan bagi pelaku usaha mikro kreatif.
14. Pemanfaatan platform digital dan media sosial.
15. Peningkatan branding destinasi.
16. Peningkatan akses jalan, penyediaan transportasi umum yang memadai, fasilitas umum, dan pusat layanan wisata.
17. Inkubasi produk kreatif unggulan dan Fasilitasi legalitas, kemasan, dan pemasaran.
18. Pembangunan *creative hub*.
19. Konservasi, Edukasi dan penguatan peran masyarakat serta *stakeholder* dalam pengelolaan wisata *geopark*.

20. Penyusunan regulasi dan rencana induk *geopark*.
21. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Akademisi, Dunia Usaha, masyarakat,dan media dalam pengembangan pariwisata.
22. Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*).
23. Pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi keuangan.
24. Pendampingan koperasi, Koperasi Desa Merah Putih dan Usaha Mikroproduktif.
25. Fasilitasi kemudahan permodalan dan subsidi bunga.
26. Kemitraan usaha mikro dengan usaha menengah/besar.
27. Peningkatan penggunaan *e-commerce*, *marketplace*, dan sistem informasi tunggal dan fasilitasi Promosi produk melalui pameran dan *digital marketing*.
28. Dukungan teknologi tepat guna dan inovasi produk IKM.
29. Pengembangan kawasan sentra industri kecil berbasis potensi lokal.
30. Optimalisasi peran BUMD pada sektor strategis Daerah.
31. Penguatan tata kelola dan profesionalisme BUMD.
32. Peningkatan sarana prasarana pasar rakyat.
33. Penguatan tata kelola pasar rakyat dan digitalisasi sistem transaksi.
34. Pengembangan BLK berbasis kebutuhan industri.
35. Kerja sama pelatihan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
36. Pelatihan digitalisasi bagi pencari kerja dan wirausahawan muda.
37. Inkubasi wirausaha berbasis teknologi dan ekonomi kreatif.
38. Pengembangan padat karya produktif.
39. Fasilitasi penciptaan lapangan kerja sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata.
40. Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
41. Penguatan pengawasan dan fasilitasi hubungan industrial.
42. Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu - Pemadanan data pencari kerja dan lowongan kerja secara digital.
43. Menyusun regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah.
44. Mengikuti event promosi dan temu bisnis.
45. Pengawasan, pembinaan dan fasilitasi penanaman modal.
46. Membuat studi kelayakan investasi dan hilirisasi.
47. Menyusun peta peluang dan potensi investasi.
48. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur digital.
49. Meningkatkan keterampilan digital masyarakat.

Program prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
3. Program penyuluhan pertanian.
4. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
6. Program pengelolaan perikanan tangkap.
7. Program pengelolaan perikanan budidaya.
8. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan .
9. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
10. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
11. Program pemasaran pariwisata.
12. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
13. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
14. Program perencanaan dan pembangunan industri.

15. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota.
16. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.
17. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
18. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan.
19. Program pengembangan ekspor.
20. Program standardisasi dan perlindungan konsumen.
21. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
22. Program pemberdayaan UMKM.
23. Program pengembangan UMKM.
24. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.
25. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
26. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam.
27. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
28. Program pendidikan dan pelatihan koperasi.
29. Program penguatan Badan Hukum Koperasi.
30. Program perencanaan tenaga kerja.
31. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
32. Program penempatan tenaga kerja.
33. Program hubungan industrial.
34. Program pengawasan ketenagakerjaan.
35. Program pelayanan penanaman modal.
36. Program pengembangan iklim penanaman modal.
37. Program promosi penanaman modal.
38. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
39. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
40. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

### 3.2.3 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2026-2030

Pentahapan Pembangunan (Arah kebijakan) Tahun 2026-2030 berdasarkan Misi, Sasaran dan Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 14
Pentahapan Pembangunan (Arah kebijakan) Tahun 2026-2030 berdasarkan Misi, Sasaran dan Strategi RPJMD Tahun 2025-2029

Misi 1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Penguatan nilai-nilai agama melalui program pendidikan keagamaan pada lembaga pendidikan formal dan non formal | Penguatan nilai-nilai agama melalui program pendidikan keagamaan pada lembaga pendidikan formal dan non formal | Penguatan nilai-nilai agama melalui program pendidikan keagamaan pada lembaga pendidikan formal dan non formal | Penguatan nilai-nilai agama melalui program pendidikan keagamaan pada lembaga pendidikan formal dan non formal | Penguatan nilai-nilai agama melalui program pendidikan keagamaan pada lembaga pendidikan formal dan non formal |
| Peningkatan program satu rumah satu hafidz/hafidzah dengan peningkatan kesejahteraan guru TPA dan tahfidz | Peningkatan program satu rumah satu hafidz/hafidzah dengan peningkatan kesejahteraan guru TPA dan tahfidz | Peningkatan program satu rumah satu hafidz/hafidzah dengan peningkatan kesejahteraan guru TPA dan tahfidz | Peningkatan program satu rumah satu hafidz/hafidzah dengan peningkatan kesejahteraan guru TPA dan tahfidz | Peningkatan program satu rumah satu hafidz/hafidzah dengan peningkatan kesejahteraan guru TPA dan tahfiz |
| Memfasilitasi sarana ibadah sebagai pusat kegiatan umat | Memfasilitasi sarana ibadah sebagai pusat kegiatan umat | Memfasilitasi sarana ibadah sebagai pusat kegiatan umat | Memfasilitasi sarana ibadah sebagai pusat kegiatan umat | Memfasilitasi sarana ibadah sebagai pusat kegiatan umat |
| Pengoptimalan fungsi alim ulama | Pengoptimalan fungsi alim ulama | Pengoptimalan fungsi alim ulama | Pengoptimalan fungsi alim ulama | Pengoptimalan fungsi alim ulama |
| Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat dan budaya | Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat dan budaya | Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat dan budaya | Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat dan budaya | Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat dan budaya |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Peningkatan kapasitas kelembagaan KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang untuk mengoptimalkan fungsi niniak mamak dan bundo kanduang | Peningkatan kapasitas kelembagaan KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang untuk mengoptimalkan fungsi niniak mamak dan bundo kanduang | Peningkatan kapasitas kelembagaan KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang untuk mengoptimalkan fungsi niniak mamak dan bundo kanduang | Peningkatan kapasitas kelembagaan KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang untuk mengoptimalkan fungsi niniak mamak dan bundo kanduang | Peningkatan kapasitas kelembagaan KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang untuk mengoptimalkan fungsi niniak mamak dan bundo kanduang |
| Pengoptimalan pendidikan adat dan budaya untuk generasi muda | Pengoptimalan pendidikan adat dan budaya untuk generasi muda | Pengoptimalan pendidikan adat dan budaya untuk generasi muda | Pengoptimalan pendidikan adat dan budaya untuk generasi muda | Pengoptimalan pendidikan adat dan budaya untuk generasi muda |
| Digitalisasi dan promosi budaya daerah untuk meningkatkan daya tarik wisata religi dan budaya. | Digitalisasi dan promosi budaya daerah untuk meningkatkan daya tarik wisata religi dan budaya. | Digitalisasi dan promosi budaya daerah untuk meningkatkan daya tarik wisata religi dan budaya. | Digitalisasi dan promosi budaya daerah untuk meningkatkan daya tarik wisata religi dan budaya. | Digitalisasi dan promosi budaya daerah untuk meningkatkan daya tarik wisata religi dan budaya. |
| Mengembalikan ikon Kota Batusangkar sebagai kota budaya | Mengembalikan ikon Kota Batusangkar sebagai kota budaya | Mengembalikan ikon Kota Batusangkar sebagai kota budaya | Mengembalikan ikon Kota Batusangkar sebagai kota budaya | Mengembalikan ikon Kota Batusangkar sebagai kota budaya |
| Mengembalikan fungsi benteng *Van Der Capellen* sebagai situs warisan sejarah | Mengembalikan fungsi benteng *Van Der Capellen* sebagai situs warisan sejarah | Mengembalikan fungsi benteng *Van Der Capellen* sebagai situs warisan sejarah | Mengembalikan fungsi benteng *Van Der Capellen* sebagai situs warisan sejarah | Mengembalikan fungsi benteng *Van Der Capellen* sebagai situs warisan sejarah |
| Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan keberagaman dan budaya berbasis masyarakat | Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan keberagaman dan budaya berbasis masyarakat | Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan keberagaman dan budaya berbasis masyarakat | Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan keberagaman dan budaya berbasis masyarakat | Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan keberagaman dan budaya berbasis masyarakat |
| Peningkatan ketahanan keluarga | Peningkatan ketahanan keluarga | Peningkatan ketahanan keluarga | Peningkatan ketahanan keluarga | Peningkatan ketahanan keluarga |
| Peningkatan akses informasi dan pendidikan keluarga | Peningkatan akses informasi dan pendidikan keluarga | Peningkatan akses informasi dan pendidikan keluarga | Peningkatan akses informasi dan pendidikan keluarga | Peningkatan akses informasi dan pendidikan keluarga |
| Penguatan ketahanan keluarga, dan masyarakat inklusif. | Penguatan ketahanan keluarga, dan masyarakat inklusif. | Penguatan ketahanan keluarga, dan masyarakat inklusif. | Penguatan ketahanan keluarga, dan masyarakat inklusif. | Penguatan ketahanan keluarga, dan masyarakat inklusif. |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak. | Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak. | Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak. | Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak. | Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak. |

Misi 2. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan | Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan | Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan | Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan | Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan |
| Peningkatan kualitas SDM aparatur kesehatan | Peningkatan kualitas SDM aparatur kesehatan | Peningkatan kualitas SDM aparatur kesehatan | Peningkatan kualitas SDM aparatur kesehatan | Peningkatan kualitas SDM aparatur kesehatan |
| Pemanfaatan teknologi digital bidang kesehatan. | Pemanfaatan teknologi digital bidang kesehatan. | Pemanfaatan teknologi digital bidang kesehatan. | Pemanfaatan teknologi digital bidang kesehatan. | Pemanfaatan teknologi digital bidang kesehatan. |
| Peningkatan kualitas tatakelola pelayanan kesehatan dan melanjutkan UHC | Peningkatan kualitas tatakelola pelayanan kesehatan dan melanjutkan UHC | Peningkatan kualitas tatakelola pelayanan kesehatan dan melanjutkan UHC | Peningkatan kualitas tatakelola pelayanan kesehatan dan melanjutkan UHC | Peningkatan kualitas tatakelola pelayanan kesehatan dan melanjutkan UHC |
| Pembangunan sarana prasarana olahraga (*sport center*) | Pembangunan sarana prasarana olahraga (*sport center*) | Pembangunan sarana prasarana olahraga (*sport center*) | Pembangunan sarana prasarana olahraga (*sport center*) | Pembangunan sarana prasarana olahraga (*sport center*) |
| Peningkatan pelayanan pendidikan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | Peningkatan pelayanan pendidikan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | Peningkatan pelayanan pendidikan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | Peningkatan pelayanan pendidikan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | Peningkatan pelayanan pendidikan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), kualitas pendidik dan tenaga kependidikan |
| Gerakan Toilet Bersih | Gerakan Toilet Bersih | Gerakan Toilet Bersih | Gerakan Toilet Bersih | Gerakan Toilet Bersih |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Pemanfaatan teknologi digital bidang pendidikan | Pemanfaatan teknologi digital bidang pendidikan | Pemanfaatan teknologi digital bidang pendidikan | Pemanfaatan teknologi digital bidang pendidikan | Pemanfaatan teknologi digital bidang pendidikan |
| Peningkatan pembelajaran implementasi nilai-nilai ABS-SBK | Peningkatan pembelajaran implementasi nilai-nilai ABS-SBK | Peningkatan pembelajaran implementasi nilai-nilai ABS-SBK | Peningkatan pembelajaran implementasi nilai-nilai ABS-SBK | Peningkatan pembelajaran implementasi nilai-nilai ABS-SBK |
| Penguatan pendidikan inklusif | Penguatan pendidikan inklusif | Penguatan pendidikan inklusif | Penguatan pendidikan inklusif | Penguatan pendidikan inklusif |
| Peningkatan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan kabupaten | Peningkatan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan kabupaten | Peningkatan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan kabupaten | Peningkatan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan kabupaten | Peningkatan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan kabupaten |
| Penyempurnaan kebijakan transformasi sosial berbasis data dengan memanfaatkan teknologi digital | Penyempurnaan kebijakan transformasi sosial berbasis data dengan memanfaatkan teknologi digital | Penyempurnaan kebijakan transformasi sosial berbasis data dengan memanfaatkan teknologi digital | Penyempurnaan kebijakan transformasi sosial berbasis data dengan memanfaatkan teknologi digital | Penyempurnaan kebijakan transformasi sosial berbasis data dengan memanfaatkan teknologi digital |
| Peningkatan kompetensi penyandang disabilitas | Peningkatan kompetensi penyandang disabilitas | Peningkatan kompetensi penyandang disabilitas | Peningkatan kompetensi penyandang disabilitas | Peningkatan kompetensi penyandang disabilitas |
| Penanganan rumah tidak layak huni | Penanganan rumah tidak layak huni | Penanganan rumah tidak layak huni | Penanganan rumah tidak layak huni | Penanganan rumah tidak layak huni |

Misi 3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Optimalisasi Lahan Pertanian | Optimalisasi Lahan Pertanian | Optimalisasi Lahan Pertanian | Optimalisasi Lahan Pertanian | Optimalisasi Lahan Pertanian |
| Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian | Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian | Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian | Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian | Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan | Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan | Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan | Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan | Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan |
| Pengembangan Pertanian Modern | Pengembangan Pertanian Modern | Pengembangan Pertanian Modern | Pengembangan Pertanian Modern | Pengembangan Pertanian Modern |
| Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani | Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani | Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani | Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani | Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani |
| Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap | Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap | Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap | Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap | Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap |
| Peningkatan kapasitas SDM pelaku utama perikanan | Peningkatan kapasitas SDM pelaku utama perikanan | Peningkatan kapasitas SDM pelaku utama perikanan | Peningkatan kapasitas SDM pelaku utama perikanan | Peningkatan kapasitas SDM pelaku utama perikanan |
| Peningkatan inovasi, hilirisasi dan pemasaran produk perikanan | Peningkatan inovasi, hilirisasi dan pemasaran produk perikanan | Peningkatan inovasi, hilirisasi dan pemasaran produk perikanan | Peningkatan inovasi, hilirisasi dan pemasaran produk perikanan | Peningkatan inovasi, hilirisasi dan pemasaran produk perikanan |
| Peningkatan upaya Menjaga kelestarian sumber daya perikanan | Peningkatan upaya Menjaga kelestarian sumber daya perikanan | Peningkatan upaya Menjaga kelestarian sumber daya perikanan | Peningkatan upaya Menjaga kelestarian sumber daya perikanan | Peningkatan upaya Menjaga kelestarian sumber daya perikanan |
| Revitalisasi objek wisata prioritas dan Pengembangan daya tarik serta event berbasis budaya dan alam | Revitalisasi objek wisata prioritas dan Pengembangan daya tarik serta event berbasis budaya dan alam | Revitalisasi objek wisata prioritas dan Pengembangan daya tarik serta event berbasis budaya dan alam | Revitalisasi objek wisata prioritas dan Pengembangan daya tarik serta event berbasis budaya dan alam | Revitalisasi objek wisata prioritas dan Pengembangan daya tarik serta event berbasis budaya dan alam |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana wisata di Destinasi Wisata | Pembangunan Sarana dan Prasarana wisata di Destinasi Wisata | Pembangunan Sarana dan Prasarana wisata di Destinasi Wisata | Pembangunan Sarana dan Prasarana wisata di Destinasi Wisata | Pembangunan Sarana dan Prasarana wisata di Destinasi Wisata |
| Pariwisata budaya berbasis nagari | Pariwisata budaya berbasis nagari | Pariwisata budaya berbasis nagari | Pariwisata budaya berbasis nagari | Pariwisata budaya berbasis nagari |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Pelatihan bagi pemandu wisata, pengelola wisata, dan Usaha Mikro kreatif dan Sertifikasi kompetensi Wisata | Pelatihan bagi pemandu wisata, pengelola wisata, dan Usaha Mikro kreatif dan Sertifikasi kompetensi Wisata | Pelatihan bagi pemandu wisata, pengelola wisata, dan Usaha Mikro kreatif dan Sertifikasi kompetensi Wisata | Pelatihan bagi pemandu wisata, pengelola wisata, dan Usaha Mikro kreatif dan Sertifikasi kompetensi Wisata | Pelatihan bagi pemandu wisata, pengelola wisata, dan Usaha Mikro kreatif dan Sertifikasi kompetensi Wisata |
| Pelatihan bagi pelaku usaha mikro kreatif | Pelatihan bagi pelaku usaha mikro kreatif | Pelatihan bagi pelaku usaha mikro kreatif | Pelatihan bagi pelaku usaha mikro kreatif | Pelatihan bagi pelaku usaha mikro kreatif |
| Pemanfaatan platform digital dan media sosial | Pemanfaatan platform digital dan media sosial | Pemanfaatan platform digital dan media sosial | Pemanfaatan platform digital dan media sosial | Pemanfaatan platform digital dan media sosial |
| Peningkatan branding destinasi | Peningkatan branding destinasi | Peningkatan branding destinasi | Peningkatan branding destinasi | Peningkatan branding destinasi |
| Peningkatan akses jalan, penyediaan transportasi umum yang memadai, fasilitas umum, dan pusat layanan wisata | Peningkatan akses jalan, penyediaan transportasi umum yang memadai, fasilitas umum, dan pusat layanan wisata | Peningkatan akses jalan, penyediaan transportasi umum yang memadai, fasilitas umum, dan pusat layanan wisata | Peningkatan akses jalan, penyediaan transportasi umum yang memadai, fasilitas umum, dan pusat layanan wisata | Peningkatan akses jalan, penyediaan transportasi umum yang memadai, fasilitas umum, dan pusat layanan wisata |
| Pembangunan *creative hub* | Pembangunan *creative hub* | Pembangunan *creative hub* | Pembangunan *creative hub* | Pembangunan *creative hub* |
| Inkubasi produk kreatif unggulan dan Fasilitasi legalitas, kemasan, dan pemasaran | Inkubasi produk kreatif unggulan dan Fasilitasi legalitas, kemasan, dan pemasaran | Inkubasi produk kreatif unggulan dan Fasilitasi legalitas, kemasan, dan pemasaran | Inkubasi produk kreatif unggulan dan Fasilitasi legalitas, kemasan, dan pemasaran | Inkubasi produk kreatif unggulan dan Fasilitasi legalitas, kemasan, dan pemasaran |
| Konservasi, Edukasi dan penguatan peran masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan wisata *geopark* | Konservasi, Edukasi dan penguatan peran masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan wisata *geopark* | Konservasi, Edukasi dan penguatan peran masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan wisata *geopark* | Konservasi, Edukasi dan penguatan peran masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan wisata *geopark* | Konservasi, Edukasi dan penguatan peran masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan wisata *geopark* |
| Penyusunan regulasi dan rencana induk *geopark* | Penyusunan regulasi dan rencana induk *geopark* | Penyusunan regulasi dan rencana induk *geopark* | Penyusunan regulasi dan rencana induk *geopark* | Penyusunan regulasi dan rencana induk *geopark* |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Akademisi, Dunia Usaha, masyarakat,dan media dalam pengembangan pariwisata | Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Akademisi, Dunia Usaha, masyarakat,dan media dalam pengembangan pariwisata | Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Akademisi, Dunia Usaha, masyarakat,dan media dalam pengembangan pariwisata | Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Akademisi, Dunia Usaha, masyarakat,dan media dalam pengembangan pariwisata | Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Akademisi, Dunia Usaha, masyarakat,dan media dalam pengembangan pariwisata |
| Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) | Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) | Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) | Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) | Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) |
| Pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi keuangan | Pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi keuangan | Pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi keuangan | Pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi keuangan | Pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan literasi keuangan |
| Pendampingan koperasi, Koperasi Desa Merah Putih dan Usaha Mikroproduktif | Pendampingan koperasi, Koperasi Desa Merah Putih dan Usaha Mikroproduktif | Pendampingan koperasi, Koperasi Desa Merah Putih dan Usaha Mikroproduktif | Pendampingan koperasi, Koperasi Desa Merah Putih dan Usaha Mikroproduktif | Pendampingan koperasi, Koperasi Desa Merah Putih dan Usaha Mikroproduktif |
| Fasilitasi kemudahan permodalan dan subsidi bunga | Fasilitasi kemudahan permodalan dan subsidi bunga | Fasilitasi kemudahan permodalan dan subsidi bunga | Fasilitasi kemudahan permodalan dan subsidi bunga | Fasilitasi kemudahan permodalan dan subsidi bunga |
| Kemitraan usaha mikro dengan usaha menengah/besar | Kemitraan usaha mikro dengan usaha menengah/besar | Kemitraan usaha mikro dengan usaha menengah/ besar | Kemitraan usaha mikro dengan usaha menengah/ besar | Kemitraan usaha mikro dengan usaha menengah/ besar |
| Peningkatan penggunaan *e-commerce*, *marketplace*, dan sistem informasi tunggal dan fasilitasi Promosi produk melalui pameran dan digital marketing | Peningkatan penggunaan *e-commerce*, *marketplace*, dan sistem informasi tunggal dan fasilitasi Promosi produk melalui pameran dan digital marketing | Peningkatan penggunaan *e-commerce*, *marketplace*, dan sistem informasi tunggal dan fasilitasi Promosi produk melalui pameran dan digital marketing | Peningkatan penggunaan *e-commerce, marketplace*, dan sistem informasi tunggal dan fasilitasi Promosi produk melalui pameran dan digital marketing | Peningkatan penggunaan *e-commerce, marketplace*, dan sistem informasi tunggal dan fasilitasi Promosi produk melalui pameran dan digital marketing |
| Dukungan teknologi tepat guna dan inovasi produk IKM | Dukungan teknologi tepat guna dan inovasi produk IKM | Dukungan teknologi tepat guna dan inovasi produk IKM | Dukungan teknologi tepat guna dan inovasi produk IKM | Dukungan teknologi tepat guna dan inovasi produk IKM |
| Pengembangan kawasan sentra industri kecil berbasis potensi lokal | Pengembangan kawasan sentra industri kecil berbasis potensi lokal | Pengembangan kawasan sentra industri kecil berbasis potensi lokal | Pengembangan kawasan sentra industri kecil berbasis potensi lokal | Pengembangan kawasan sentra industri kecil berbasis potensi lokal |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Optimalisasi peran BUMD pada sektor strategis Daerah | Optimalisasi peran BUMD pada sektor strategis Daerah | Optimalisasi peran BUMD pada sektor strategis Daerah | Optimalisasi peran BUMD pada sektor strategis Daerah | Optimalisasi peran BUMD pada sektor strategis Daerah |
| Penguatan tata kelola dan profesionalisme BUMD | Penguatan tata kelola dan profesionalisme BUMD | Penguatan tata kelola dan profesionalisme BUMD | Penguatan tata kelola dan profesionalisme BUMD | Penguatan tata kelola dan profesionalisme BUMD |
| Peningkatan sarana prasarana pasar rakyat | Peningkatan sarana prasarana pasar rakyat | Peningkatan sarana prasarana pasar rakyat | Peningkatan sarana prasarana pasar rakyat | Peningkatan sarana prasarana pasar rakyat |
| Penguatan tata kelola pasar dan digitalisasi sistem transaksi | Penguatan tata kelola pasar dan digitalisasi sistem transaksi | Penguatan tata kelola pasar dan digitalisasi sistem transaksi | Penguatan tata kelola pasar dan digitalisasi sistem transaksi | Penguatan tata kelola pasar dan digitalisasi sistem transaksi |
| Pengembangan BLK berbasis kebutuhan industri | Pengembangan BLK berbasis kebutuhan industri | Pengembangan BLK berbasis kebutuhan industri | Pengembangan BLK berbasis kebutuhan industri | Pengembangan BLK berbasis kebutuhan industri |
| Kerja sama pelatihan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) | Kerja sama pelatihan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) | Kerja sama pelatihan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) | Kerja sama pelatihan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) | Kerja sama pelatihan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) |
| Pelatihan digitalisasi bagi pencari kerja dan wirausahawan muda | Pelatihan digitalisasi bagi pencari kerja dan wirausahawan muda | Pelatihan digitalisasi bagi pencari kerja dan wirausahawan muda | Pelatihan digitalisasi bagi pencari kerja dan wirausahawan muda | Pelatihan digitalisasi bagi pencari kerja dan wirausahawan muda |
| Inkubasi wirausaha berbasis teknologi dan ekonomi kreatif | Inkubasi wirausaha berbasis teknologi dan ekonomi kreatif | Inkubasi wirausaha berbasis teknologi dan ekonomi kreatif | Inkubasi wirausaha berbasis teknologi dan ekonomi kreatif | Inkubasi wirausaha berbasis teknologi dan ekonomi kreatif |
| Pengembangan padat karya produktif | Pengembangan padat karya produktif | Pengembangan padat karya produktif | Pengembangan padat karya produktif | Pengembangan padat karya produktif |
| Fasilitasi penciptaan lapangan kerja sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata | Fasilitasi penciptaan lapangan kerja sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata | Fasilitasi penciptaan lapangan kerja sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata | Fasilitasi penciptaan lapangan kerja sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata | Fasilitasi penciptaan lapangan kerja sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata |
| Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan | Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan | Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan | Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan | Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu - Pemadanan data pencari kerja dan lowongan kerja secara digital | Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu - Pemadanan data pencari kerja dan lowongan kerja secara digital | Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu - Pemadanan data pencari kerja dan lowongan kerja secara digital | Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu - Pemadanan data pencari kerja dan lowongan kerja secara digital | Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu - Pemadanan data pencari kerja dan lowongan kerja secara digital |
| Menyusun regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah | Menyusun regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah | Menyusun regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah | Menyusun regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah | Menyusun regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah |
| Mengikuti event promosi dan temu bisnis | Mengikuti event promosi dan temu bisnis | Mengikuti event promosi dan temu bisnis | Mengikuti event promosi dan temu bisnis | Mengikuti event promosi dan temu bisnis |
| Pengawasan, pembinaan dan fasilitasi penanaman modal | Pengawasan, pembinaan dan fasilitasi penanaman modal | Pengawasan, pembinaan dan fasilitasi penanaman modal | Pengawasan, pembinaan dan fasilitasi penanaman modal | Pengawasan, pembinaan dan fasilitasi penanaman modal |
| Membuat studi kelayakan investasi dan hilirisasi | Membuat studi kelayakan investasi dan hilirisasi | Membuat studi kelayakan investasi dan hilirisasi | Membuat studi kelayakan investasi dan hilirisasi | Membuat studi kelayakan investasi dan hilirisasi |
| Menyusun peta peluang dan potensi investasi | Menyusun peta peluang dan potensi investasi | Menyusun peta peluang dan potensi investasi | Menyusun peta peluang dan potensi investasi | Menyusun peta peluang dan potensi investasi |
| Pembangunan dan peningkatan infrastruktur digital | Pembangunan dan peningkatan infrastruktur digital | Pembangunan dan peningkatan infrastruktur digital | Pembangunan dan peningkatan infrastruktur digital | Pembangunan dan peningkatan infrastruktur digital |
| Meningkatkan keterampilan digital masyarakat | Meningkatkan keterampilan digital masyarakat | Meningkatkan keterampilan digital masyarakat | Meningkatkan keterampilan digital masyarakat | Meningkatkan keterampilan digital masyarakat |
| Pemantauan harga secara rutin | Pemantauan harga secara rutin | Pemantauan harga secara rutin | Pemantauan harga secara rutin | Pemantauan harga secara rutin |

Misi 4. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. | Reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. | Reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. | Reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. | Reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. |
| Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan transparansi keuangan daerah. | Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan transparansi keuangan daerah. | Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan transparansi keuangan daerah. | Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan transparansi keuangan daerah. | Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan transparansi keuangan daerah. |
| Optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan. | Optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan. | Optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan. | Optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan. | Optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan. |
| Digitalisasi layanan pemerintahan untuk efisiensi pelayanan publik. | Digitalisasi layanan pemerintahan untuk efisiensi pelayanan publik. | Digitalisasi layanan pemerintahan untuk efisiensi pelayanan publik. | Digitalisasi layanan pemerintahan untuk efisiensi pelayanan publik. | Digitalisasi layanan pemerintahan untuk efisiensi pelayanan publik. |
| Evaluasi dan perbaikan kebijakan tata kelola pemerintahan. | Evaluasi dan perbaikan kebijakan tata kelola pemerintahan. | Evaluasi dan perbaikan kebijakan tata kelola pemerintahan. | Evaluasi dan perbaikan kebijakan tata kelola pemerintahan. | Evaluasi dan perbaikan kebijakan tata kelola pemerintahan. |
| Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) | Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) | Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) | Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) | Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) |

Misi 5 Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Penguatan kapasitas perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi melalui perencanaan teknis yang adaptif dan ramah lingkungan | Penguatan kapasitas perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi melalui perencanaan teknis yang adaptif dan ramah lingkungan | Penguatan kapasitas perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi melalui perencanaan teknis yang adaptif dan ramah | Penguatan kapasitas perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi melalui perencanaan teknis yang adaptif dan ramah | Penguatan kapasitas perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi melalui perencanaan teknis yang adaptif dan ramah lingkungan |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | lingkungan | lingkungan | |
| Penguatan Kolaborasi dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Penguatan Kolaborasi dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Penguatan Kolaborasi dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Penguatan Kolaborasi dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Penguatan Kolaborasi dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) |
| Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi digital untuk mencatat kondisi infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi digital untuk mencatat kondisi infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi digital untuk mencatat kondisi infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi digital untuk mencatat kondisi infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi digital untuk mencatat kondisi infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) |
| Peningkatan kapasitas infrastruktur yang berbasis pada prinsip keberlanjutan | Peningkatan kapasitas infrastruktur yang berbasis pada prinsip keberlanjutan | Peningkatan kapasitas infrastruktur yang berbasis pada prinsip keberlanjutan | Peningkatan kapasitas infrastruktur yang berbasis pada prinsip keberlanjutan | Peningkatan kapasitas infrastruktur yang berbasis pada prinsip keberlanjutan |
| Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) |
| Pengembangan pengelolaan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Pengembangan pengelolaan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Pengembangan pengelolaan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Pengembangan pengelolaan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) | Pengembangan pengelolaan infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, air bersih dan lingkungan) |
| Evaluasi implementasi infrastruktur yang berbasis pada prinsip keberlanjutan | Evaluasi implementasi infrastruktur yang berbasis pada prinsip keberlanjutan | Evaluasi implementasi infrastruktur yang berbasis pada prinsip keberlanjutan | Evaluasi implementasi infrastruktur yang berbasis pada prinsip keberlanjutan | Evaluasi implementasi infrastruktur yang berbasis pada prinsip keberlanjutan |
| Fasilitasi peningkatan layanan air bersih | Fasilitasi peningkatan layanan air bersih | Fasilitasi peningkatan layanan air bersih | Fasilitasi peningkatan layanan air bersih | Fasilitasi peningkatan layanan air bersih |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) |
| Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti pengendalian air limbah dan persampahan serta konservasi sumber daya alam (SDA) | Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti pengendalian air limbah dan persampahan serta konservasi sumber daya alam (SDA) | Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti pengendalian air limbah dan persampahan serta konservasi sumber daya alam (SDA) | Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti pengendalian air limbah dan persampahan serta konservasi sumber daya alam (SDA) | Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti pengendalian air limbah dan persampahan serta konservasi sumber daya alam (SDA) |
| Penguatan kolaborasi untuk mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan dan konservasi sumber daya alam (SDA) | Penguatan kolaborasi untuk mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan dan konservasi sumber daya alam (SDA) | Penguatan kolaborasi untuk mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan dan konservasi sumber daya alam (SDA) | Penguatan kolaborasi untuk mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan dan konservasi sumber daya alam (SDA) | Penguatan kolaborasi untuk mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan dan konservasi sumber daya alam (SDA) |
| Penguatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemerintah Nagari dalam penanganan sampah yang baik dan berkelanjutan. | Penguatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemerintah Nagari dalam penanganan sampah yang baik dan berkelanjutan. | Penguatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemerintah Nagari dalam penanganan sampah yang baik dan berkelanjutan. | Penguatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemerintah Nagari dalam penanganan sampah yang baik dan berkelanjutan. | Penguatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemerintah Nagari dalam penanganan sampah yang baik dan berkelanjutan. |
| Pengelolaan sampah terpadu, satu nagari satu bank sampah | Pengelolaan sampah terpadu, satu nagari satu bank sampah | Pengelolaan sampah terpadu, satu nagari satu bank sampah | Pengelolaan sampah terpadu, satu nagari satu bank sampah | Pengelolaan sampah terpadu, satu nagari satu bank sampah |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Pengembangan pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam (SDA) yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan dan *circular economic* | Pengembangan pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam (SDA) yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan dan *circular economic* | Pengembangan pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam (SDA) yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan dan *circular economic* | Pengembangan pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam (SDA) yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan dan *circular economic* | Pengembangan pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam (SDA) yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan dan *circular economic* |
| Pengembangan pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam (SDA) yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan | Pengembangan pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam (SDA) yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan | Pengembangan pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam (SDA) yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan | Pengembangan pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam (SDA) yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan | Pengembangan pengelolaan persampahan, konservasi sumber daya alam (SDA) yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan |
| Peningkatan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta integrasi resiko bencana dalam pembangunan | Peningkatan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta integrasi resiko bencana dalam pembangunan | Peningkatan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta integrasi resiko bencana dalam pembangunan | Peningkatan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta integrasi resiko bencana dalam pembangunan | Peningkatan sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta integrasi resiko bencana dalam pembangunan |
| Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan mitigasi bencana | Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan mitigasi bencana | Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan mitigasi bencana | Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan mitigasi bencana | Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan mitigasi bencana |
| Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana | Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana | Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana | Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana | Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana |
| Integrasi aspek mitigasi dan adaptasi bencana dalam pembangunan infrastruktur | Integrasi aspek mitigasi dan adaptasi bencana dalam pembangunan infrastruktur | Integrasi aspek mitigasi dan adaptasi bencana dalam pembangunan infrastruktur | Integrasi aspek mitigasi dan adaptasi bencana dalam pembangunan infrastruktur | Integrasi aspek mitigasi dan adaptasi bencana dalam pembangunan infrastruktur |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Evaluasi Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana | Evaluasi Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana | Evaluasi Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana | Evaluasi Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana | Evaluasi Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana |

Misi 6. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Kerja sama dengan instansi/*stakeholder* terkait | Kerja sama dengan instansi/*stakeholder* terkait | Kerja sama dengan instansi/*stakeholder* terkait | Kerja sama dengan instansi/*stakeholder* terkait | Kerja sama dengan instansi/*stakeholder* terkait |
| Pembentukan Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) | Pembentukan Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) | Pembentukan Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) | Pembentukan Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) | Pembentukan Nagari Bersih Narkoba (Bersinar) |
| Pemenuhan rasio/jumlah aparat penegak Perda | Pemenuhan rasio/jumlah aparat penegak Perda | Pemenuhan rasio/jumlah aparat penegak Perda | Pemenuhan rasio/jumlah aparat penegak Perda | Pemenuhan rasio/jumlah aparat penegak Perda |
| Peningkatan kapasitas aparat penegak perda | Peningkatan kapasitas aparat penegak perda | Peningkatan kapasitas aparat penegak perda | Peningkatan kapasitas aparat penegak perda | Peningkatan kapasitas aparat penegak perda |
| Memperkuat edukasi masyarakat tentang hak demokrasi, pemilu yang bersih, dan partisipasi politik yang aktif | Memperkuat edukasi masyarakat tentang hak demokrasi, pemilu yang bersih, dan partisipasi politik yang aktif | Memperkuat edukasi masyarakat tentang hak demokrasi, pemilu yang bersih, dan partisipasi politik yang aktif | Memperkuat edukasi masyarakat tentang hak demokrasi, pemilu yang bersih, dan partisipasi politik yang aktif | Memperkuat edukasi masyarakat tentang hak demokrasi, pemilu yang bersih, dan partisipasi politik yang aktif |
| Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol | Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol | Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol | Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol | Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol |
| Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah | Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah | Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah | Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah | Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah |
| Pengalokasian Belanja subsidi | Pengalokasian Belanja subsidi | Pengalokasian Belanja subsidi | Pengalokasian Belanja subsidi | Pengalokasian Belanja subsidi |
| Penguatan kelembagaan dan distribusi pangan | Penguatan kelembagaan dan distribusi pangan | Penguatan kelembagaan dan distribusi pangan | Penguatan kelembagaan dan distribusi pangan | Penguatan kelembagaan dan distribusi pangan |
| Penguatan stabilitas pasokan dan harga pangan | Penguatan stabilitas pasokan dan harga pangan | Penguatan stabilitas pasokan dan harga pangan | Penguatan stabilitas pasokan dan harga pangan | Penguatan stabilitas pasokan dan harga pangan |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) |
| Pelaksanaan stabilisasi harga kebutuhan pangan pokok dan Gerakan pangan murah | Pelaksanaan stabilisasi harga kebutuhan pangan pokok dan Gerakan pangan murah | Pelaksanaan stabilisasi harga kebutuhan pangan pokok dan Gerakan pangan murah | Pelaksanaan stabilisasi harga kebutuhan pangan pokok dan Gerakan pangan murah | Pelaksanaan stabilisasi harga kebutuhan pangan pokok dan Gerakan pangan murah |
| Meningkatkan kelancaran distribusi kebutuhan pokok | Meningkatkan kelancaran distribusi kebutuhan pokok | Meningkatkan kelancaran distribusi kebutuhan pokok | Meningkatkan kelancaran distribusi kebutuhan pokok | Meningkatkan kelancaran distribusi kebutuhan pokok |
| Peningkatan Kerja sama dengan daerah lain | Peningkatan Kerja sama dengan daerah lain | Peningkatan Kerja sama dengan daerah lain | Peningkatan Kerja sama dengan daerah lain | Peningkatan Kerja sama dengan daerah lain |
| Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga | Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga | Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga | Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga | Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga |
| Mengintegrasikan data stok *real time* dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah | Mengintegrasikan data stok *real time* dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah | Mengintegrasikan data stok *real time* dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah | Mengintegrasikan data stok *real time* dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah | Mengintegrasikan data stok *real time* dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah |
| Meningkatkan kinerja indikator fiskal untuk mendapatkan dana insentif fiskal | Meningkatkan kinerja indikator fiskal untuk mendapatkan dana insentif fiskal | Meningkatkan kinerja indikator fiskal untuk mendapatkan dana insentif fiskal | Meningkatkan kinerja indikator fiskal untuk mendapatkan dana insentif fiskal | Meningkatkan kinerja indikator fiskal untuk mendapatkan dana insentif fiskal |
| Mengoptimalkan pemanfaatan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil | Mengoptimalkan pemanfaatan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil | Mengoptimalkan pemanfaatan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil | Mengoptimalkan pemanfaatan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil | Mengoptimalkan pemanfaatan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Menjalin kemitraan dengan instansi vertikal dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah | Menjalin kemitraan dengan instansi vertikal dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah | Menjalin kemitraan dengan instansi vertikal dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah | Menjalin kemitraan dengan instansi vertikal dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah | Menjalin kemitraan dengan instansi vertikal dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah |
| Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah | Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah | Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah | Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah | Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah |
| Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui digitalisasi pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak | Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui digitalisasi pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak | Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui digitalisasi pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak | Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui digitalisasi pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak | Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui digitalisasi pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak |
| Penyempurnaan basis data pajak dan retribusi serta penyempurnaan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi | Penyempurnaan basis data pajak dan retribusi serta penyempurnaan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi | Penyempurnaan basis data pajak dan retribusi serta penyempurnaan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi | Penyempurnaan basis data pajak dan retribusi serta penyempurnaan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi | Penyempurnaan basis data pajak dan retribusi serta penyempurnaan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi |
| Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak | Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak | Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak | Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak | Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur/SDM Perpajakan | Peningkatan Kapasitas Aparatur/SDM Perpajakan | Peningkatan Kapasitas Aparatur/SDM Perpajakan | Peningkatan Kapasitas Aparatur/SDM Perpajakan | Peningkatan Kapasitas Aparatur/SDM Perpajakan |
| Optimalisasi aset daerah untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah | Optimalisasi aset daerah untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah | Optimalisasi aset daerah untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah | Optimalisasi aset daerah untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah | Optimalisasi aset daerah untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah |
| Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien serta menghindari defisit yang besar | Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien serta menghindari defisit yang besar | Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien serta menghindari defisit yang besar | Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien serta menghindari defisit yang besar | Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien serta menghindari defisit yang besar |
| Pengadaan barang/belanja modal dan pemeliharaan barang secara selektif sesuai dengan kebutuhan | Pengadaan barang/belanja modal dan pemeliharaan barang secara selektif sesuai dengan kebutuhan | Pengadaan barang/belanja modal dan pemeliharaan barang secara selektif sesuai dengan kebutuhan | Pengadaan barang/belanja modal dan pemeliharaan barang secara selektif sesuai dengan kebutuhan | Pengadaan barang/belanja modal dan pemeliharaan barang secara selektif sesuai dengan kebutuhan |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Optimalisasi program unggulan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi | Optimalisasi program unggulan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi | Optimalisasi program unggulan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi | Optimalisasi program unggulan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi | Optimalisasi program unggulan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi |
| Melaksanakan kemitraan strategis dengan kemitraan perguruan tinggi dan BAZNAZ | Melaksanakan kemitraan strategis dengan kemitraan perguruan tinggi dan BAZNAZ | Melaksanakan kemitraan strategis dengan kemitraan perguruan tinggi dan BAZNAZ | Melaksanakan kemitraan strategis dengan kemitraan perguruan tinggi dan BAZNAZ | Melaksanakan kemitraan strategis dengan kemitraan perguruan tinggi dan BAZNAZ |
| Penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, BUMD dan Bumnag syariah | Penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, BUMD dan Bumnag syariah | Penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, BUMD dan Bumnag syariah | Penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, BUMD dan Bumnag syariah | Penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, BUMD dan Bumnag syariah |
| Pemberdayaan pelaku usaha berbasis syariah melalui pelatihan dan fasilitasi akses pembiayaan syariah | Pemberdayaan pelaku usaha berbasis syariah melalui pelatihan dan fasilitasi akses pembiayaan syariah | Pemberdayaan pelaku usaha berbasis syariah melalui pelatihan dan fasilitasi akses pembiayaan syariah | Pemberdayaan pelaku usaha berbasis syariah melalui pelatihan dan fasilitasi akses pembiayaan syariah | Pemberdayaan pelaku usaha berbasis syariah melalui pelatihan dan fasilitasi akses pembiayaan syariah |
| Fasilitasi serifikat halal | Fasilitasi serifikat halal | Fasilitasi serifikat halal | Fasilitasi serifikat halal | Fasilitasi serifikat halal |

Misi 7. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tata ruang. | Penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tata ruang. | Penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tata ruang. | Penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tata ruang. | Penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tata ruang. |
| Implementasi proyek infrastruktur kewilayahan dan optimalisasi penggunaan lahan. | Implementasi proyek infrastruktur kewilayahan dan optimalisasi penggunaan lahan. | Implementasi proyek infrastruktur kewilayahan dan optimalisasi penggunaan lahan. | Implementasi proyek infrastruktur kewilayahan dan optimalisasi penggunaan lahan. | Implementasi proyek infrastruktur kewilayahan dan optimalisasi penggunaan lahan. |

| ARAH KEBIJAKAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Percepatan penyelesaian konflik tata ruang dan perizinan investasi. | Percepatan penyelesaian konflik tata ruang dan perizinan investasi. | Percepatan penyelesaian konflik tata ruang dan perizinan investasi. | Percepatan penyelesaian konflik tata ruang dan perizinan investasi. | Percepatan penyelesaian konflik tata ruang dan perizinan investasi. |
| Optimalisasi kerja sama antar daerah untuk pemerataan pembangunan. | Optimalisasi kerja sama antar daerah untuk pemerataan pembangunan. | Optimalisasi kerja sama antar daerah untuk pemerataan pembangunan. | Optimalisasi kerja sama antar daerah untuk pemerataan pembangunan. | Optimalisasi kerja sama antar daerah untuk pemerataan pembangunan. |
| Evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan tahap berikutnya. | Evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan tahap berikutnya. | Evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan tahap berikutnya. | Evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan tahap berikutnya. | Evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan tahap berikutnya. |

PROGRAM PRIORITAS DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Program Prioritas daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah.

Tabel 3. 15
Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029
Misi 1 Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Misi 1 : Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang beragama, beradat dan berbudaya berbasis keluarga berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 1 Meningkatnya pembangunan keagamaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.02 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | | | | 6.305.148.330 | | 5.739.608.356 | | 7.386.428.209 | | 6.418.320.419 | | 8.242.099.860 | | 9.069.874.494 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemerintahan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah | 1.Efektivitas Kerja Sama Daerah | 24% | 15% | 8.969.000 | 15.50% | 60.000.000 | 16% | 61.000.000 | 16,50% | 62.020.000 | 17% | 63.060.400 | 17,5% | 66.213.420 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemerintahan) |
| | | | 2.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | - | 3,16 | 509.655.995 | 3,22 | 545.374.900 | 3,28 | 585.271.390 | 3,35 | 629.157.529 | 3,41 | 677.432.282 | 3,47 | 711.303.896 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemerintahan) |
| | | 2. Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat | 1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 100% | 100% | 5.336.632.635 | 100% | 4.411.632.635 | 100% | 5.945.295.899 | 100% | 4.852.795.899 | 100% | 6.539.825.489 | 100 % | 7.330.575.489 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemerintahan) |
| | | 3. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum | 1. Indeks Reformasi Hukum (IRH) | 92% | 92,97% | 449.890.700 | 93,07% | 722.600.821 | 93,12% | 794.860.920 | 93,17% | 874.346.991 | 93,22% | 961.781.689 | 93,27 % | 961.781.689 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemerintahan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.06.04 | Program rehabilitasi sosial | | | | | 14.456.445.108 | | 14.457.000.000 | | 14.458.000.000 | | 14.459.000.000 | | 14.460.000.000 | | 24.460.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya rehabilitasi sosial | 1.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 30% | 30% | 2.891.289.022 | 30% | 2.891.400.000 | 30% | 2.891.600.000 | 30% | 2.891.800.000 | 30% | 2.892.000.000 | 30% | 4.892.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | | 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 30% | 0,3 | 2.891.289.022 | 30% | 2.891.400.000 | 30% | 2.891.600.000 | 30% | 2.891.800.000 | 30% | 2.892.000.000 | 30% | 4.892.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | | 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarn ya | 30% | 0,3 | 2.891.289.022 | 30% | 2.891.400.000 | 30% | 2.891.600.000 | 30% | 2.891.800.000 | 30% | 2.892.000.000 | 30% | 4.892.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 0% | 0,02 | 2.891.289.022 | 5% | 2.891.400.000 | 10% | 2.891.600.000 | 20% | 2.891.800.000 | 20% | 2.892.000.000 | 20% | 4.892.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | | 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 30% | 0,3 | 2.891.289.022 | 30% | 2.891.400.000 | 30% | 2.891.600.000 | 30% | 2.891.800.000 | 30% | 2.892.000.000 | 30% | 4.892.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | 2.250.000 | | 50.000.000 | | 175.000.000 | | 185.000.000 | | 165.000.000 | | 185.000.000 | Kecamatan X Koto |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 2.250.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 175.000.000 | 100% | 185.000.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | 185.000.000 | Kecamatan X Koto |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | - | | 49.100.000 | | 178.200.000 | | 191.000.000 | | 187.455.000 | | 196.800.000 | Kecamatan Tanjuang Baru |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100,00 % | - | 100% | 49.100.000 | 100% | 178.200.000 | 100% | 191.000.000 | 100% | 187.455.000 | 100% | 196.800.000 | Kecamatan Tanjuang Baru |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | 18.750.000 | | 55.250.000 | | 66.300.000 | | 79.560.000 | | 95.472.000 | | 114.566.400 | Kecamatan Padang Ganting |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100,00 % | 18.750.000 | 100% | 55.250.000 | 100% | 66.300.000 | 100% | 79.560.000 | 100% | 95.472.000 | 100% | 114.566.400 | Kecamatan Padang Ganting |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | - | | 53.630.000 | | 35.000.000 | | 90.000.000 | | 50.000.000 | | 110.000.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | | - | 100% | 53.630.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 90.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 110.000.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | - | | 35.057.500 | | 110.000.000 | | 135.000.000 | | 110.000.000 | | 135.000.000 | Kecamatan Batipuh |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 35.057.500 | 100% | 110.000.000 | 100% | 135.000.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 135.000.000 | Kecamatan Batipuh |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | 51.900.000 | | 42.500.000 | | 110.000.000 | | 135.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | Kecamatan Rambatan |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 51.900.000 | 100% | 42.500.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 135.000.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 110.000.000 | Kecamatan Rambatan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | 74.392.500 | | 56.525.000 | | 90.000.000 | | 130.000.000 | | 110.000.000 | | 135.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 74.392.500 | 100% | 56.525.000 | 100% | 90.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 135.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | - | | 61.750.000 | | 61.750.000 | | 61.750.000 | | 61.750.000 | | 61.750.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 61.750.000 | 100% | 61.750.000 | 100% | 61.750.000 | 100% | 61.750.000 | 100% | 61.750.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | - | | 39.635.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 39.635.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | - | | 55.250.000 | | 115.000.000 | | 150.600.000 | | 115.000.000 | | 150.600.000 | Kecamatan Sungayang |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 55.250.000 | 100% | 115.000.000 | 100% | 150.600.000 | 100% | 115.000.000 | 100% | 150.600.000 | Kecamatan Sungayang |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | - | | 52.500.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 52.500.000 | 100% | 168.000.000 | 100% | 168.000.000 | 100% | 168.000.000 | 100% | 168.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | - | | 548.000.000 | | 558.960.000 | | 570.139.200 | | 575.840.592 | | 581.598.998 | Kecamatan Pariangan |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 548.000.000 | 100% | 558.960.000 | 100% | 570.139.200 | 100% | 575.840.592 | 100% | 581.598.998 | Kecamatan Pariangan |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | 5.835.750 | | 58.500.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 5.835.750 | 100% | 58.500.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | 165.000.000 | Kecamatan Salimpaung |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | - | | 40.500.000 | | 73.550.000 | | 78.750.000 | | 82.650.000 | | 85.250.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 40.500.000 | 100% | 73.550.000 | 100% | 78.750.000 | 100% | 82.650.000 | 100% | 85.250.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | Sasaran 2 Meningkatnya pembangunan kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.02 | Program Pengembangan Kebudayaan | | | | | 650.000.000 | | 1.350.000.000 | | 290.000.000 | | 307.000.000 | | 310.000.000 | | 330.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kebudayaan) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | 87,50% | 87,50% | 650.000.000 | 88,50% | 1.350.000.000 | 89,50% | 290.000.000 | 90,50% | 307.000.000 | 91,50% | 310.000.000 | 92,50 % | 330.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kebudayaan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.22.03 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | | | | ' | | 344.236.400 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kebudayaan) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | 1. Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan | 22,03% | | | 27,33% | 344.236.400 | 32,62% | 95.000.000 | 37,93% | 95.000.000 | 43,23% | 95.000.000 | 48,53 % | 95.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kebudayaan) |
| 2.22.04 | Program Pembinaan Sejarah | | | | | 65.700.000 | | 40.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kebudayaan) |
| | | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | 1. Tingkat partisipasi masyarakat teradap tinjauan sejarah lokal | 73,50% | 73,50% | 65.700.000 | 74,50% | 40.000.000 | 75,50% | 85.000.000 | 76,50% | 85.000.000 | 77,50% | 90.000.000 | 78,50 % | 90.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kebudayaan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.22.05 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | | | | ' | | | 200.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kebudayaan) |
| | | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | 1. Persentase warisan budaya yang diwariskan | 24,65% | | | 25,4% | 175.000.000 | 28,09% | 75.000.000 | 30,78% | 75.000.000 | 33,47% | 75.000.000 | 36,16 % | 75.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kebudayaan) |
| | | | 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | 24,65% | | | 25,4% | 25.000.000 | 28,09% | 120.000.000 | 30,78% | 120.000.000 | 33,47% | 120.000.000 | 36,16 % | 120.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kebudayaan) |
| 2.22.06 | Program Pengelolaan Permuseuman | | | | | ' | | - | | 84.000.000 | | 90.000.000 | | 110.000.000 | | 115.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kebudayaan) |
| | | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya tata kelola museum | 1. Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum | 23,39% | 23,39% | - | 25,39% | - | 27,39% | 84.000.000 | 29,39% | 90.000.000 | 31,39% | 110.000.000 | 33,39 % | 115.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kebudayaan) |
| 2.13.013 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | 821.053.125 | | 923.376.325 | | 969.545.141 | | 1.880.000.000 | | 2.065.000.000 | | 4.201.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | 1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | 85% | 85% | 410.526.563 | 85% | 461.688.163 | 85% | 484.772.571 | 85% | 940.000.000 | 85% | 1.032.500.000 | 85% | 2.100.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 2 .Persentase Fasilitasi pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | | 80% | 410.526.563 | 80% | 461.688.163 | 80% | 484.772.571 | 80% | 940.000.000 | 80% | 1.032.500.000 | 80% | 2.100.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| | Sasaran 3 Meningkatnya keluarga berkualitas. dan masyarakat inklusif | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.04 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | | | | | 2.121.999.195 | | 2.118.699.375 | | 2.224.634.344 | | 3.266.000.000 | | 3.480.000.000 | | 4.729.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | 1. Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | | 100% | 2.121.999.195 | 100% | 2.118.699.375 | 100% | 2.224.634.344 | 100% | 3.266.000.000 | 100% | 3.480.000.000 | 100% | 4.729.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| 2.14.03 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | | | | | 5.277.903.692 | | 5.202.428.692 | | 5.462.550.127 | | 7.080.000.000 | | 9.505.000.000 | | 13.297.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) | l.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ *Modem Contraceptive* (mCPR) | | 69,43 | 2.638.951.846 | 69,93 | 2.601.214.346 | 70,43 | 2.731.275.063 | 70,93 | 3.540.000.000 | 71,43 | 4.752.500.000 | 71,93 | 6.648.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| | | | 2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) | | 7,94% | 2.638.951.846 | 7,44% | 2.601.214.346 | 6,94% | 2.731.275.063 | 6,44% | 3.540.000.000 | 5,94% | 4.752.500.000 | 5,44% | 6.648.500.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| 2.14.02 | Program Pengendalian Penduduk | | | | | 31.542.580 | | 5.110.000 | | 260.000.000 | | 286.000.000 | | 420.000.000 | | 500.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk | 1. Angka Kelahiran Total *((Total Fertility Rate/* TFR) | | 2,31 | 15.771.290 | 2,28 | 2.555.000 | 2,25 | 130.000.000 | 2,22 | 143.000.000 | 2,2 | 210.000.000 | 2,18 | 250.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| | | | 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19) | | 8,4 | 15.771.290 | 7,9 | 2.555.000 | 7,4 | 130.000.000 | 6,9 | 143.000.000 | 6,4 | 210.000.000 | 5,9 | 250.000.000 | |
| 2.19.02 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | | | | 33.000.000 | | 27.392.000 | | 34.240.000 | | 90.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya daya saing kepemudaan | 1. Rasio Wirausaha Pemuda | 2,21 | 2,3 | 33.000.000 | 2,34 | 27.392.000 | 2,37 | 34.240.000 | 2,4 | 90.000.000 | 2,42 | 100.000.000 | 2,45 | 150.000.000 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga) |
| 2.19.03 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | | | | | 1.288.241.600 | | 766.261.600 | | 957.827.000 | | 5.750.000.000 | | 6.100.000.000 | | 8.500.000.000 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga | 1. Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | 52,63% | 50% | 1.288.241.600 | 47,62% | 766.261.600 | 113,64% | 957.827.000 | 108,70% | 5.750.000.000 | 104,17% | 6.100.000.000 | 140% | 8.500.000.000 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga) |
| 2.19.04 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | | | | | 450.000.000 | | 300.000.000 | | 375.000.000 | | 900.000.000 | | 950.000.000 | | 2.000.000.000 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Kepemudaan dan Olahraga) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas kepramukaan | 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | 6,37% | 6,37% | 450.000.000 | 6,38% | 300.000.000 | 6,38% | 375.000.000 | 6,39% | 900.000.000 | 6,39% | 950.000.000 | 6,4% | 2.000.000.000 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga) |
| | Sasaran 4 Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.08.02 | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan | | | | | 330.589.000 | | 331.000.000 | | 332.000.000 | | 333.000.000 | | 334.000.000 | | 535.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | 1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 22% | 22% | 165.294.500 | 100% | 165.500.000 | 100% | 166.000.000 | 100% | 166.500.000 | 100% | 167.000.000 | 100% | 267.500.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) |
| | | | 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | 71,23% | 71,23% | 165.294.500 | 100% | 165.500.000 | 100% | 166.000.000 | 100% | 166.500.000 | 100% | 167.000.000 | 100% | 267.500.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) |
| 1.08.06 | Program pemenuhan hak anak (PHA) | | | | | 47.720.000 | | 47.800.000 | | 47.900.000 | | 48.000.000 | | 49.000.000 | | 50.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | 1. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | 100% | 100% | 47.720.000 | 100% | 47.800.000 | 100% | 47.900.000 | 100% | 48.000.000 | 100% | 49.000.000 | 100% | 50.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) |
| 1.08.07 | Program perlindungan khusus anak | | | | | 468.162.800 | | 469.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | | 670.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. eksploitasi. penelantaran. perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | 1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100% | 100% | 234.081.400 | 100% | 234.500.000 | 100% | 235.000.000 | 100% | 235.000.000 | 100% | 235.000.000 | 100% | 335.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Perlindungan Anak) |
| | | | 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | 52,3 | 76,54 | 234.081.400 | 77,04 | 234.500.000 | 77,54 | 235.000.000 | 78,04 | 235.000.000 | 78,54 | 235.000.000 | 79,04 | 335.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) |
| 1.08.02 | Program perlindungan Perempuan | | | | | 78.547.200 | | 79.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | 1. Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | | 100% | 78.547.200 | 100% | 79.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Perempuan dan Perlindungan Anak) |
| 1.08.05 | Program pengelolaan sistem data gender dan anak | | | | | 7.600.000 | | 7.700.000 | | 7.800.000 | | 7.900.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | 1. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | | 100% | 7.600.000 | 100% | 7.700.000 | 100% | 7.800.000 | 100% | 7.900.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 8.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) |

Misi 2 Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Misi 2 Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | 57.362.497.862 | | 72.535.872.755 | | 73.551.070.846 | | 73.042.747.648 | | 78.038.747.648 | | 92.611.429.751 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | 1. Angka Kematian Ibu (AKI) | 7 orang | 6 orang | 17.208.749.359 | 5 orang | 22.135.942.740 | 4 orang | 22.437.981.881 | 3 orang | 22.644.436.442 | 2 orang | 24.394.436.442 | 1 orang | 28.790.371.249 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| | | | 2. Prelevansi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita | 18,5 | 6 | 17.208.749.359 | 15,2 | 22.135.942.740 | 14,4 | 22.425.981.881 | 13,6 | 22.644.436.442 | 12,8 | 24.394.436.442 | 12 | 28.790.371.249 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| | | | 3. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional | 95,98% | 98% | 22.944.999.145 | 98,40% | 28.263.987.276 | 98,80% | 28.687.107.085 | 99,20% | 27.753.874.765 | 99,60% | 29.249.874.765 | 100% | 35.030.687.254 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| 1.02.04 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | | | | | 516.375.000 | | 553.329.400 | | 553.329.400 | | 573.329.400 | | 2.573.329.400 | | 4.593.329.400 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi. alat kesehatan. dan makanan minuman | 1. Persentase Cakupan Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan. dan Makanan Minuman | 210 sarana | 210 sarana | 516.375.000 | 215 sarana | 553.329.400 | 215 sarana | 553.329.400 | 220 sarana | 573.329.400 | 220 sarana | 2.573.329.400 | 225 sarana | 4.593.329.400 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | | | | 1.625.777.250 | | 1.723.323.885 | | 1.723.323.885 | | 1.772.097.203 | | 1.820.870.520 | | 2.869.643.838 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan — 1. Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan | 100% | 100% | 1.625.777.250 | 100% | 1.723.323.885 | 100% | 1.723.323.885 | 100% | 1.772.097.203 | 100% | 1.820.870.520 | 100% | 2.869.643.838 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| 01.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | - | | 44.000.000 | | 50.000.000 | | 56.000.000 | | 60.000.000 | | 66.000.000 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan — 1. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan | - | - | - | 100% | 4.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 56.000.000 | 100% | 0.000.000 | 100% | 66.000.000 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.03.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD) | | | | 186.174.704.454 | | 118.235.900.977 | | 160.600.618.997 | | 123.495.033.853 | | 127.249.532.004 | | 135.294.522.644 | Rumah Sakit Umum Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| | | Outcome : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase capaian SPM | 96,10% | 100% | 111.764.822.672 | 100% | 70.941.540.586 | 100% | 92.360.371.398 | 100% | 73.807.578.826 | 100% | 76.349.719.202 | 100% | 79.176.713.586 | Rumah Sakit Umum Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| | | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat | 87,4 | 88 | 37.254.940.891 | 88,6 | 23.647.180.195 | 89,2 | 34.120.123.799 | 89,8 | 24.843.727.513 | 90,4 | 25.449.906.401 | 91 | 28.058.904.529 | Rumah Sakit Umum Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| | | 3. Prediket Akuntabilitas Kinerja | 71,2 | 71,4 | 37.154.940.891 | 71,6 | 23.547.180.195 | 71,8 | 34.020.123.799 | 72 | 24.743.727.513 | 72,2 | 25.349.906.401 | 72,4 | 27.958.904.529 | Rumah Sakit Umum Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 4. Kinerja Keuangan BLUD | <1 | <1 | 100.000.000 | >1 | 100.000.000 | >1 | 100.000.000 | >1 | 100.000.000 | >1 | 100.000.000 | >1 | 100.000.000 | Rumah Sakit Umum Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 2 Meningkatnya Pendidikan berkualitas yang merata | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | | 68.928.092.374 | | 66.311.808.022 | | 81.843.700.000 | | 83.443.240.000 | | 94.387.900.000 | | 111.309.400.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pendidikan) |
| | | 1. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS) | 68,55% | 55,84% | 9.145.108.316 | 58,88% | 8.019.230.000 | 61,92% | 10.138.200.000 | 64,96% | 12.165.840.000 | 68,00% | 15.780.200.000 | 71,04 % | 18.859.200.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pendidikan) |
| | | | Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) | 87,78% | 98,02% | 58.294.884.058 | 98,47% | 56.671.858.022 | 98,91% | 69.669.400.000 | 99,35% | 68.834.800.000 | 99,80% | 75.133.600.000 | 100% | 86.963.100.000 | Urusan Pendidikan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (APS) | 29,15% | 44,87% | 1.488.100.000 | 53,08% | 1.620.720.000 | 59,57% | 2.036.100.000 | 66,06% | 2.442.600.000 | 72,55% | 3.474.100.000 | 73,31 % | 5.487.100.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pendidikan) |
| 1.01.03 | Program Pengembangan Kurikulum | | | | | 33.890.000 | | 80.030.000 | | 136.000.000 | | 149.000.000 | | 160.000.000 | | 174.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pendidikan) |
| | | 1. Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | 1. Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | 9,92% | 9,92% | 33.890.000 | 27,55% | 80.030.000 | 49,59% | 136.000.000 | 52,07% | 149.000.000 | 82,37% | 160.000.000 | 100% | 174.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pendidikan) |
| 1.01.04 | Program Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | - | | - | | 115.000.000 | | 125.000.000 | | 140.000.000 | | 145.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pendidikan) |
| | | 1. Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | 1. Indeks Pemerataan Guru | | | - | | - | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 115.000.000 | | 120.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pendidikan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik | 60% | | - | 70% | - | 80% | 15.000.000 | 90% | 15.000.000 | 95,00% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pendidikan) |
| | Sasaran 3 Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | 57.362.497.862 | | 72.535.872.755 | | 73.551.070.846 | | 73.042.747.648 | | 78.038.747.648 | | 92.611.429.751 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| | | 1. Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat 1. Angka Kematian Ibu (AKI) | 7 orang | 6 orang | 17.208.749.359 | 5 orang | 22.135.942.740 | 4 orang | 22.437.981.881 | 3 orang | 22.644.436.442 | 2 orang | 24.394.436.442 | 1 orang | 28.790.371.249 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 2. Prelevansi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita | 18,5 | 6 | 17.208.749.359 | 15,2 | 22.135.942.740 | 14,4 | 22.425.981.881 | 13,6 | 22.644.436.442 | 12,8 | 24.394.436.442 | 12 | 28.790.371.249 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| | | | 3. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional | 95,98% | 98% | 22.944.999.145 | 98,40% | 28.263.987.276 | 98,80% | 28.687.107.085 | 99,20% | 27.753.874.765 | 99,60% | 29.249.874.765 | 100% | 35.030.687.254 | Dinas Kesehatan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesehatan) |
| 1.03.03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | | | 299.650.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 350.000.000 | | 1.500.000.000 | | 3.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | 1. Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota | 76,55% | 76,55% | 299.650.000 | 82% | 330.000.000 | 84% | 330.000.000 | 86% | 350.000.000 | 88% | 1.500.000.000 | 90% | 3.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| 1.03.05 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | | | | 6.191.640.000 | | 6.200.000.000 | | 7.300.000.000 | | 10.268.061.508 | | 14.647.562.598 | | 19.537.125.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | 1. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | 74,84% | 71,90% 6.191.640.000 | 86% | 6.200.000.000 | 88% | 7.300.000.000 | 90% | 10.268.061.508 | 92% | 14.647.562.598 | 94% | 19.537.125.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.04.02 | Program Pengembangan Perumahan | | | | 63.250.000 | | 1.070.500.000 | | 1.078.000.000 | | 1.140.500.000 | | 2.143.000.000 | | 1.245.500.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukinan) |
| | | 1. Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah<br>1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni | 100% | 100% | 46.500.000 | 100% | 843.000.000 | 100% | 848.000.000 | 100% | 903.000.000 | 100% | 1.903.000.000 | 100% | 903.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukinan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni | 100% | 100% | 8.000.000 | 100% | 127.500.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 137.500.000 | 100% | 140.000.000 | 100% | 142.500.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukinan) |
| | | 3. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 1 laporan | 1 laporan | 8.750.000 | 1 laporan | 50.000.000 | 1 laporan | 50.000.000 | 1 laporan | 50.000.000 | 1 laporan | 50.000.000 | 1 laporan | 100.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukinan) |
| | | 4. Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan | 1 dokumen | 1 dokumen | - | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 100.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah Yang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Mengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukinan) |
| 1.04.03 | Program Kawasan Permukiman | | | | 8.500.000 | | 1.035.000.000 | | 1.407.000.000 | | 1.422.700.000 | | 1.692.470.000 | | 2.000.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukinan) |
| | | 1. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman — 1. Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | 1,93% | 1,93% | 8.500.000 | 4,74% | 1.035.000.000 | 6,42% | 1.407.000.000 | 10,91% | 1.422.700.000 | 13,62% | 1.692.470.000 | 15,75 % | 2.000.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukinan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.06.02 | Program pemberdayaan sosial | | | | | 64.500.000 | | 65.000.000 | | 66.000.000 | | 67.000.000 | | 68.000.000 | | 69.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | 1. Meningkatnya pemberdayaan sosial | 1. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Daru rat dan Pasca Bencana Sesuai Standar | 100% | 100% | 22.575.000 | 100% | 22.750.000 | 100% | 23.100.000 | 100% | 23.450.000 | 100% | 23.800.000 | 100% | 24.150.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | | 2. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | 100% | 100% | 22.575.000 | 100% | 22.750.000 | 100% | 23.100.000 | 100% | 23.450.000 | 100% | 23.800.000 | 100% | 24.150.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | | 3. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial | 100% | 100% | 19.350.000 | 100% | 19.500.000 | 100% | 19.800.000 | 100% | 20.100.000 | 100% | 20.400.000 | 100% | 20.700.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Yang Mengampu Urusan Sosial) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.06.04 | Program rehabilitasi sosial | | | | | 14.456.445.108 | | 14.457.000.000 | | 14.458.000.000 | | 14.459.000.000 | | 14.460.000.000 | | 24.460.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | 1. Meningkatnya rehabilitasi sosial | 1.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 30% | 30% | 2.891.289.022 | 30% | 2.891.400.000 | 30% | 2.891.600.000 | 30% | 2.891.800.000 | 30% | 2.892.000.000 | 30% | 4.892.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | | 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 30% | 30% | 2.891.289.022 | 30% | 2.891.400.000 | 30% | 2.891.600.000 | 30% | 2.891.800.000 | 30% | 2.892.000.000 | 30% | 4.892.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | | 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarn ya | 30% | 30% | 2.891.289.022 | 30% | 2.891.400.000 | 30% | 2.891.600.000 | 30% | 2.891.800.000 | 30% | 2.892.000.000 | 30% | 4.892.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 0% | 2% | 2.891.289.022 | 5% | 2.891.400.000 | 10% | 2.891.600.000 | 20% | 2.891.800.000 | 20% | 2.892.000.000 | 20% | 4.892.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | | 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 30% | 30% | 2.891.289.022 | 30% | 2.891.400.000 | 30% | 2.891.600.000 | 30% | 2.891.800.000 | 30% | 2.892.000.000 | 30% | 4.892.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| 1.06.05 | Program perlindungan dan jaminan sosial | | | | | 620.473.500 | | 621.000.000 | | 622.000.000 | | 623.000.000 | | 624.000.000 | | 1.556.250.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | 1. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | 1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | 100% | 100% | 217.165.725 | 100% | 217.350.000 | 100% | 217.700.000 | 100% | 218.050.000 | 100% | 218.400.000 | 100% | 518.750.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi | 100% | 100% | 217.165.725 | 100% | 217.350.000 | 100% | 217.700.000 | 100% | 218.050.000 | 100% | 218.400.000 | 100% | 518.750.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | 3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data fakir miskin | 100% | 100% | 186.142.050 | 100% | 186.300.000 | 100% | 186.600.000 | 100% | 186.900.000 | 100% | 187.200.000 | 100% | 518.750.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| 1.06.06 | Program penanganan bencana | | | | 84.000.000 | | 85.000.000 | | 86.000.000 | | 87.000.000 | | 88.000.000 | | 89.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | 1. Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana<br>1. Persentase Korban Bencana Alam. Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | 100% | 100% | 42.000.000 | 100% | 42.500.000 | 100% | 43.000.000 | 100% | 43.500.000 | 100% | 44.000.000 | 100% | 44.500.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial | 100% | 100% | 42.000.000 | 100% | 42.500.000 | 100% | 43.000.000 | 100% | 43.500.000 | 100% | 44.000.000 | 100% | 44.500.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| 1.06.07 | Program pengelolaan taman makam pahlawan | | | | 28.000.000 | | 29.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |
| | | 1. Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan<br>1. Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | 100% | 100% | 28.000.000 | 100% | 29.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Sosial) |

Misi 3 Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian. pariwisata. Usaha Mikro dan peningkatan investasi

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Misi 3 Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian. pariwisata. Usaha Mikro dan peningkatan investasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah berbasis produk unggulan dan peningkatan investasi | PDRB per kapita | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 3.1 Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pertanian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Outcome*: Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | | | 4.865.980.200 | | 5.750.000.000 | | 7.575.000.000 | | 8.370.000.000 | | 11.215.000.000 | | 14.085.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya Produksi Pertanian | Indikator<br>1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton) | 333.872,71 | 334.086,89 | 2.674.319.800 | 3.455.991,27 | 4.170.000.000 | 352.763 ,43 | 5.675.000.000 | 362.131,34 | 6.125.000.000 | 370.368,56 | 7.600.000.000 | 374.730,98 | 9.100.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| | | | 2. Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton) | 48.350,21 | 48.829,50 | 631.707.400 | 45.127,92 | 500.000.000 | 46.030,48 | 550.000.000 | 46.951,09 | 650.000.000 | 47.890,11 | 750.000.000 | 48.847,91 | 850.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| | | | 3. Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton) | 18.858,28 | 19.046,87 | - | 19.056,76 | 150.000.000 | 19.068,28 | 175.000.000 | 19.079,80 | 200.000.000 | 19.091,50 | 225.000.000 | 19.104,00 | 250.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| | | | 4. Peningkatan Populasi Ternak (ekor) | 2.809.641 | 2.885.882 | 1.559.953.000 | 2.861.594 | 730.000.000 | 2.867.317,00 | 900.000.000 | 2.873.052 | 1.070.000.000 | 2.878.798 | 2.240.000.000 | 2.884.446 | 3.410.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 5. Peningkatan Hilirisasi dan Pemasaran (%) | 69% | 70% | - | 71% | 200.000.000 | 72% | 275.000.000 | 73% | 325.000.000 | 74% | 400.000.000 | 75% | 475.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| 3.27.03 | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | | | | 1.563.626.360 | | 8.050.000.000 | | 3.900.000.000 | | 10.725.000.000 | | 11.000.000.000 | | 12.275.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| | | Meningkatnya Produksi Pertanian Indikator 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Ton) | 333.872,71 | 334.086,89 | 1.350.000.000 | 3.455.991,27 | 5.800.000.000 | 352.763,43 | 2.800.000.000 | 362.131,34 | 9.300.000.000 | 370.368,56 | 9.550.000.000 | 374.730,98 | 10.800.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| | | 2. Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton) | 18.858,28 | 19.046,87 | 87.480.000 | 19.056,76 | 350.000.000 | 19.068,28 | 350.000.000 | 19.079,80 | 350.000.000 | 19.091,50 | 350.000.000 | 19.104,00 | 350.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| | | 3. Peningkatan Produksi Peternakan (Ton) | 17.668,00 | 17.693,43 | 126.146.360 | 17.764,21 | 1.600.000.000 | 17.835,26 | 650.000.000 | 17.906,60 | 975.000.000 | 17.978,23 | 1.000.000.000 | 18.050,15 | 1.025.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4. Persentase Perlindungan LP2B (%) | - | | - | 50% | 300.000.000 | 75% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| 3.27.07 | Program Penyuluhan Pertanian | | | | 868.553.542 | | 6.250.000.000 | | 4.225.000.000 | | 5.300.000.000 | | 6.375.000.000 | | 8.450.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| | | 1. Meningkatnya kapasitas SDM Penyuluh dan Lembaga Tani<br>Indikator<br>1. Persentase Penguatan SDM Penyuluh Pertanian | 100% | 100% | 568.345.542 | 100% | 600.000.000 | 100% | 650.000.000 | 100% | 700.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 800.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| | | 2. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani | 5 unit | 1 unit | 150.208.000 | 4 unit | 650.000.000 | 5 unit | 575.000.000 | 6 unit | 600.000.000 | 7 unit | 625.000.000 | 8 unit | 650.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| | | 3. Luas Penerapan Teknologi Jarwo (ha) | - | 140 ha | 150.000.000 | 2.500 ha | 5.000.000.000 | 3.000 ha | 3.000.000.000 | 3.500 ha | 4.000.000.000 | 4.000 ha | 5.000.000.000 | 4.500 ha | 7.000.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.27.04 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | 239.904.520 | | 1.030.000.000 | | 1.190.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.510.000.000 | | 2.500.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| | | 1. Menurunnya Kasus Penyakit Hewan — 1. Persentase penurunan kasus penyakit hewan | 1% | 1% | 239.904.520 | 1% | 1.030.000.000 | 2% | 1.190.000.000 | 3% | 1.350.000.000 | 4% | 1.510.000.000 | 5% | 2.500.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| 3.27.05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | | | 76.099.223 | | 1.040.000.000 | | 1.255.000.000 | | 1.385.000.000 | | 1.540.000.000 | | 2.670.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| | | 1. Terlaksanakanya Perlindungan Lahan Pertanian — 1. Persentase Perlindungan Lahan Pertanian | 100% | 100% | 76.099.223 | 100% | 1.040.000.000 | 100% | 1.255.000.000 | 100% | 1.385.000.000 | 100% | 1.540.000.000 | 100% | 2.670.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| 3.27.06 | Program Perizinan Usaha Pertanian | | | | - | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Meningkatnya jaminan keamanan produk hewan bagi konsumen dan daya saing produk<br>Indikator<br>1. Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | - | | - | 3 Unit | 50.000.000 | 3 Unit | 50.000.000 | 3 Unit | 50.000.000 | 3 Unit | 50.000.000 | 3 Unit | 50.000.000 | Dinas Pertanian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pertanian) |
| 3.25.03 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | | | | 18.224.800 | | 19.925.000 | | 35.720.608 | | 50.008.851 | | 70.012.392 | | 98.017.348 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan) |
| | | 1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap<br>1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 2.930,84 ton | 2.931,4 ton | 18.224.800 | 2.932,86 ton | 19.925.000 | 2.933,6 ton | 35.720.608 | 2.934,33 ton | 50.008.851 | 2.935,06 ton | 70.012.392 | 2.935,8 ton | 98.017.348 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan) |
| 3.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | | | | 375.673.800 | | 359.703.800 | | 359.703.800 | | 375.300.000 | | 431.595.000 | | 496.334.250 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya 1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 8119,86 ton | 6656,66 ton | 375.673.800 | 6658,32 ton | 359.703.800 | 6659,98 ton | 359.703.800 | 6661,65 ton | 375.300.000 | 6663,31 ton | 431.595.000 | 6664,98 ton | 496.334.250 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan) |
| 3.25.06 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | | 17.150.000 | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 25.000.000 | | 28.000.000 | | 30.000.000 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan) |
| | | 1. Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat 1. Angka Konsumsilkan | 42,21 Kg/kapita/th | 42,13 kg/kapita/th | 17.150.000 | 42,50 kg/kapita/th | 20.000.000 | 43,10 kg/kapita/th | 22.000.000 | 43,50 kg/kapita/th | 25.000.000 | 44,25 kg/kapita/th | 28.000.000 | 45,25 kg/kapita/th | 30.000.000 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kelautan dan Perikanan) |
| 1.03.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | | 2.887.965.100 | | 2.950.000.000 | | 2.953.000.000 | | 2.963.000.000 | | 4.626.000.000 | | 6.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Ruang) |
| | | 1. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | 1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | - | 1,50% | 340.471.800 | 2,50% | 340.000.000 | 3,75% | 340.000.000 | 4,75% | 350.000.000 | 6,25% | 700.000.000 | 8,25 % | 1.700.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | | 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob | - | 1,30% | 313.000.000 | 2,30% | 310.000.000 | 3,55% | 313.000.000 | 4,55% | 313.000.000 | 6,05% | 626.000.000 | 8,05 % | 1.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | | 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas | 58,74% | 60,74% | 2.234.493.300 | 62,99% | 2.300.000.000 | 65,49% | 2.300.000.000 | 68,24% | 2.300.000.000 | 71,24% | 3.300.000.000 | 74,49 % | 3.300.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah yang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | Sasaran 3.2 Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pariwisata. dan ekonomi kreatif | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Outcome*: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | | | 1.717.901.400 | | 7.090.000.000 | | 8.000.000.000 | | 8.500.000.000 | | 8.800.000.000 | | 12.200.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pariwisata) |
| | | 1. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata — 1. Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | 6,21% | 3,66% | 1.717.901.400 | 4,10% | 7.090.000.000 | 4,27% | 8.000.000.000 | 4,48% | 8.500.000.000 | 4,57% | 8.800.000.000 | 4,69 % | 12.200.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pariwisata) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.26.03 | Program Pemasaran Pariwisata | | | | | 478.000.000 | | 2.450.000.000 | | 2.150.000.000 | | 2.150.000.000 | | 2.150.000.000 | | 3.500.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pariwisata) |
| | | 1. Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | 1. Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | 7,14% | 6,67% | 478.000.000 | 12,50% | 2.450.000.000 | 11,11% | 2.150.000.000 | 10% | 2.150.000.000 | 9,09% | 2.150.000.000 | 8,33 % | 3.500.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pariwisata) |
| 3.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | | | | | - | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 125.000.000 | | 150.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pariwisata) |
| | | 1. Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | 1. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual | 5% | 5% | - | 9% | 50.000.000 | 12% | 75.000.000 | 15% | 100.000.000 | 17% | 125.000.000 | 20% | 150.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pariwisata) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.26.05 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | | | | 140.550.000 | | 110.570.000 | | 138.212.500 | | 500.000.000 | | 600.000.000 | | 1.000.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pariwisata) |
| | | 1. Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif — 1. Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi | 20% | 22% | 140.550.000 | 25% | 110.570.000 | 26% | 138.212.500 | 27% | 500.000.000 | 28% | 600.000.000 | 29% | 1.000.000.000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pariwisata) |
| | Sasaran 3.3 Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis. Koperasi. Usaha Mikro/IKM. Industri Pengolahan dan BUMD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Outcome*: Meningkatnya realisasi pembangunan industri | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.31.02 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | | | | 1.214.648.990 | | 732.432.997 | | 915.541.246 | | 1.400.000.000 | | 1.450.000.000 | | 2.500.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perindustrian) |
| | | Rasio PDRB Industri Pengolahan % 1. Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | 5,71% | 6,34% | 1.214.648.990 | 7,04% | 732.432.997 | 7,81% | 915.541.246 | 8,67% | 1.400.000.000 | 9,62% | 1.450.000.000 | 10,68 % | | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perindustrian) |
| 3.31.03 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | | | | - | | - | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perindustrian) |
| | | 1. Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian 1. Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan | 39,93% | 49,34% | - | 50,85% | - | 52,30% | 100.000.000 | 53,67% | 150.000.000 | 54,97% | 200.000.000 | 56,20 % | 250.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perindustrian) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.31.04 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | | | | - | | - | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perindustrian) |
| | | 1. Meningkatnya pemanfaatan informasi industri — 1. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini | 75,55% | 79,75% | - | 83,95% | - | 88,15% | 100.000.000 | 92,34% | 150.000.000 | 96,54% | 200.000.000 | 100,00% | 250.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perindustrian) |
| 3.30.02 | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | | | | - | | 3.000.000 | | 16.280.000 | | 26.640.000 | | 25.160.000 | | 20.720.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| | | 1. Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha — 1. Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi | 100% | | - | 70% | 1.500.000 | 80% | 8.140.000 | 100% | 13.320.000 | 90% | 12.580.000 | 85% | 10.360.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2. Proporsi pengawasan perdagangan untuk barang berbahaya dan sistem resi gudang | | | - | 45% | 1.500.000 | 75% | 8.140.000 | 100% | 13.320.000 | 100% | 12.580.000 | 90% | 10.360.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| 3.30.03 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 358.012.500 | | 362.520.000 | | 387.083.115 | | 414.178.933 | | 397.611.776 | | 413.516.247 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| | | 1. Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi — 1. Proporsi Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | 7,14% | 30% | 358.012.500 | 35% | 362.520.000 | 41% | 387.083.115 | 48% | 414.178.933 | 42% | 397.611.776 | 44% | 413.516.247 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| 3.30.04 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | | | | 35.951.900 | | 58.974.400 | | 42.120.000 | | 56.520.000 | | 42.120.000 | | 39.240.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1.Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 1. Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 7,14% | 13,33% | 17.975.950 | 14,13% | 29.487.200 | 14,98% | 21.060.000 | 16,03% | 28.260.000 | 15,99% | 21.060.000 | 15,96 % | 19.620.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| | | | 2. Proporsi terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi | 0,10% | 30% | 17.975.950 | 45% | 29.487.200 | 90% | 21.060.000 | 100% | 28.260.000 | 90% | 21.060.000 | 80% | 19.620.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| 3.30.05 | Program Pengembangan Ekspor | | | | | - | | 3.000.000 | | 48.600.000 | | 64.920.000 | | 48.600.000 | | 48.600.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| | | 1. Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Indikator<br>1. Jumlah pelaku usaha mikro produk/komoditi unggulan daerah yang siap dan atau sudah ekspor (proporsi) | | | - | 1 | 1.500.000 | 1 | 24.300.000 | 2 | 32.460.000 | 1 | 24.300.000 | 1 | 24.300.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 2. Meningkatnya Citra Produk Ekspor | | | | 2 produk | 1.500.000 | 3 produk | 24.300.000 | 6 produk | 32.460.000 | 7 produk | 24.300.000 | 9 produk | 24.300.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| 3.30.06 | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | | | | | 31.014.260 | | 42.048.520 | | 15.411.014 | | 82.448.923 | | 76.677.498 | | 71.310.073 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| | | 1. Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | 1. Proporsi jumlah tanda tera sah pada UTTP tahun berjalan | 4% | 2% | 31.014.260 | 4% | 21.024.260 | 7% | 7.705.507 | 9% | 74.204.031 | 6% | 72.843.623 | 6% | 64.179.066 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| | | | 2. Proporsi terlaksananya pengawasan perdagangan untuk UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran | - | 0,3 | - | 0,45 | 21.024.260 | 0,9 | 7.705.507 | 1 | 8.244.892 | 0,9 | 3.833.875 | 0,8 | 7.131.007 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.30.07 | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | | | | | 54.928.800 | | 61.938.800 | | 46.960.000 | | 56.960.000 | | 26.760.000 | | 46.960.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| | | 1. Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | 1. Proporsi jumlah tanda tera sah pada UTTP tahun berjalan | | 1,74% | 27.464.400 | 3,76% | 30.969.400 | 6,98% | 23.480.000 | 9,12% | 28.480.000 | 6% | 13.380.000 | 5,50 % | 23.480.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| | | | 2. Proporsi terlaksananya pengawasan perdagangan untuk UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran | | 30% | 27.464.400 | 45% | 30.969.400 | 90% | 23.480.000 | 100% | 28.480.000 | 90% | 13.380.000 | 80% | 23.480.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| 2.17.07 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | | | | | 3.000.000 | | 6.040.000 | | 18.250.000 | | 18.250.000 | | 18.250.000 | | 18.250.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Outcome<br>1. Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Indikator<br>1. Persentase pertumbuhan UMKM Non-Pertanian per tahun | 19.636 unit | 4% dari baseline | 1.500.000 | 4% dari 2025 | 3.020.000 | 6% dari 2026 | 9.125.000 | 6% dari 2027 | 9.125.000 | 6% dari 2029 | 9.125.000 | 3% dari 2029 | 9.125.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |
| | | | 2. Persentase Pertumbuhan wirausaha skala mikro Non Pertanian (Indeks Wirausaha) | 90 orang | 4,45% dari baseline | 1.500.000 | 4,50% dari 2025 | 3.020.000 | 4,80% dari 2026 | 9.125.000 | 5,00% dari 2027 | 9.125.000 | 5,22% dari 2028 | 9.125.000 | 5,50 % dari 2029 | 9.125.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |
| 2.17.08 | Program Pengembangan UMKM | | | | | 535.928.800 | | 288.928.800 | | 602.754.433 | | 603.538.014 | | 604.322.613 | | 605.108.233 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |
| | | 1. Meningkatnya daya saing UKM | 1. Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | 0,15% | 0,03% | 267.964.400 | 0,03% | 144.464.400 | 0,03% | 301.377.217 | 0,03% | 301.769.007 | 0,03% | 302.161.307 | 0,03 % | 302.554.116 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2. Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil | - | 1 unit | 267.964.400 | 1 unit | 144.464.400 | 1 unit | 301.377.217 | 1 unit | 301.769.007 | 1 unit | 302.161.307 | 1 unit | 302.554.116 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |
| 2.17.04 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | | | - | 28.722.311 | | 48.882.983 | | 18.980.000 | | 26.280.000 | | 29.200.000 | | 32.120.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |
| | | 1. Meningkatnya Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi — 1. Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya | 6,36% | 6,36% | 28.722.311 | 9,09% | 48.882.983 | 10,36% | 18.980.000 | 11,95% | 26.280.000 | 12,16% | 29.200.000 | 12,57 % | 32.120.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |
| 2.17.06 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian | | | - | 700.000 | | 17.088.000 | | 221.360.000 | | 22.072.000 | | 23.496.000 | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya produktivitas koperasi<br>1. Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | 6,81% | - | - | 8,51% | 700.000 | 10,21% | 17.088.000 | 12,77% | 21.360.000 | 13,19% | 22.072.000 | 14,04 % | 23.496.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |
| 2.17.02 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | | | | - | | 768.919 | | 17.520.000 | | 21.900.000 | | 22.630.000 | | 24.090.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |
| | | 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam<br>1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | 6,81 unit | 14 unit | - | 20 unit | 768.919 | 24 unit | 17.520.000 | 30 unit | 21.900.000 | 31 unit | 22.630.000 | 33 unit | 24.090.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |
| 2.17.03 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | | | | - | | 700.000 | | 18.512.000 | | 25.632.000 | | 28.480.000 | | 31.328.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi — 1. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 5,83% | 5,83% | - | 8,33% | 700.000 | 9,49% | 18.512.000 | 10,95% | 25.632.000 | 11,15% | 28.480.000 | 11,52 % | 31.328.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |
| 2.17.05 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | | | | - | | 700.000 | | 203.520.000 | | 215.731.200 | | 215.774.346 | | 215.817.501 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |
| | | 1. Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian — 1. Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitasi Pelatihan | 41,67% | - | - | 9,09% | 700.000 | 10,36% | 203.520.000 | 11,95% | 215.731.200 | 12,16% | 215.774.346 | 12,57 % | 215.817.501 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Koperasi UKM) |
| | Sasaran 3.4 Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Outcome*: Terkelolanya informasi tenaga kerja | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.07.02 | Program Perencanaan Tenaga Kerja | | | | | - | | - | | 525.000.000 | | 525.000.000 | | 600.000.000 | | 700.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Tenaga Kerja) |
| | | 1. Terkelolanya informasi tenaga kerja | 1. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja | 0,32% | 0,32% | - | 0,32% | - | 0,37% | 525.000.000 | 0,37% | 525.000.000 | 0,42% | 600.000.000 | 0,42 % | 700.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Tenaga Kerja) |
| 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | 558.217.750 | | 324.043.750 | | 372.650.313 | | 700.000.000 | | 750.000.000 | | 1.000.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Tenaga Kerja) |
| | | 1. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | 1. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya | 2,24% | 2,27% | 558.217.750 | 2,29% | 324.043.750 | 2,31% | 372.650.313 | 2,35% | 700.000.000 | 2,37% | 750.000.000 | 2,49 % | 1.000.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Tenaga Kerja) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja | | | | 52.876.800 | | 65.376.800 | | 75.183.320 | | 130.000.000 | | 135.000.000 | | 250.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Tenaga Kerja) |
| | | 1. Meningkatnya penempatan tenaga kerja — 1. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | 11,55% | 12,25% | 52.876.800 | 12,75% | 65.376.800 | 13,25% | 75.183.320 | 13,75% | 130.000.000 | 14,25% | 135.000.000 | 14,75 % | 250.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Tenaga Kerja) |
| 2.07.05 | Program Hubungan Industrial | | | | 4.250.000 | | 8.500.000 | | 10.625.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 400.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Tenaga Kerja) |
| | | 1. Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi — 1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial | 0 | 1 Perusahaan | 4.250.000 | 0 | 8.500.000 | 1 Perusahaan | 10.625.000 | 2 Perusahaan | 300.000.000 | 4 Perusahaan | 300.000.000 | 4 Perusahaan | 400.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Tenaga Kerja) |
| | Sasaran 3.5 Meningkatnya Investasi | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | *Outcome*: Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | | | | 533.760.000 | | 520.970.000 | | 800.000.000 | | 815.000.000 | | 870.000.000 | | 880.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penanaman Modal) |
| | | 1. Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko — 1. Persentase Pelaku Usahayang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | 60% | 65% | 533.760.000 | 70% | 520.970.000 | 75% | 800.000.000 | 80% | 815.000.000 | 85% | 870.000.000 | 90% | 880.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penanaman Modal) |
| 2.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | | | | 5.040.000 | | 700.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 525.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perangkat Daerah yang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Mengampu Urusan Penanaman Modal) |
| | | 1. Meningkatnya kemudahan berinvestasi 1. Realisasi Total terhadap Target Investasi | 231,97 M | 232 M | - | 237 M | 5.040.000 | 242 M | 700.000.000 | 247 M | 450.000.000 | 252 M | 450.000.000 | 257 M | 525.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penanaman Modal) |
| 2.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal | | | | 181.700.000 | | 180.010.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 500.000.000 | | 600.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penanaman Modal) |
| | | 1. Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal 1. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | | 5% | 181.700.000 | 5% | 180.010.000 | 5% | 450.000.000 | 5% | 450.000.000 | 5% | 500.000.000 | 5% | 600.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perangkat Daerah yang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Mengampu Urusan Penanaman Modal) |
| 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | | | | 533.760.000 | | 520.970.000 | | 800.000.000 | | 815.000.000 | | 870.000.000 | | 880.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penanaman Modal) |
| | | 1. Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko — 1. Persentase Pelaku Usahayang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | 60% | 65% | 533.760.000 | 70% | 520.970.000 | 75% | 800.000.000 | 80% | 815.000.000 | 85% | 870.000.000 | 90% | 880.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penanaman Modal) |
| 2.18.05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | 50.889.484 | | 44.448.400 | | 160.668.690 | | 318.000.000 | | 570.000.000 | | 600.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perangkat Daerah yang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Mengampu Urusan Penanaman Modal) |
| | | 1. Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | 1. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | 100% | 100% | 50.889.484 | 100% | 44.448.400 | 100% | 160.668.690 | 100% | 318.000.000 | 100% | 570.000.000 | 100% | 600.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penanaman Modal) |
| 2.18.06 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | | | | 4.330.000 | | 3.000.000 | | 27.000.000 | | 28.000.000 | | 30.000.000 | | 32.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penanaman Modal) |
| | | 1. Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | 1. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | 100% | - | 4.330.000 | 25% | 3.000.000 | 25% | 27.000.000 | 25% | 28.000.000 | 25% | 30.000.000 | 25% | 32.000.000 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penanaman |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Modal) |
| | Sasaran 3.6 Terwujudnya Masyarakat digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Outcome*: Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.02 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | | | | | 619.219.711 | | 581.053.800 | | 850.000.000 | | 900.000.000 | | 950.000.000 | | 1.500.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Komunikasi dan Informatika) |
| | | 1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | 1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) | 80% | 90% | 619.219.711 | 92% | 581.053.800 | 95% | 850.000.000 | 96% | 900.000.000 | 97% | 950.000.000 | 97% | 1.500.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Komunikasi dan Informatika) |

Misi 4 Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel. efektif dan efisien

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Misi 4 Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel. efektif dan efisien | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya tatakelola pemerintah yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 4. Meningkatnya tatakelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 35.724.161.787 | | 42.894.137.136 | | 43.662.195.668 | | 44.797.019.452 | | 46.086.734.426 | | 50.391.071.147 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 35.724.161.787 | 100% | 42.894.137.136 | 100% | 43.662.195.668 | 100% | 44.797.019.452 | 100% | 46.086.734.426 | 100% | 50.391.071.147 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |
| 4.01.02 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | | | | 6.305.148.330 | | 5.739.608.356 | | 7.386.428.208 | | 6.418.320.418 | | 8.242.099.859 | | 9.069.874.493 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |
| | | 1. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah | 1.Efektivitas Kerja Sama Daerah | 24% | 15% | 8.969.000 | 15,50% | 60.000.000 | 16% | 61.000.000 | 16,50% | 62.020.000 | 17% | 63.060.400 | 17,5% | 66.213.420 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |
| | | | 2.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | - | 3,16 | 509.655.995 | 3,22 | 545.374.900 | 3,28 | 585.271.390 | 3,35 | 629.157.529 | 3,41 | 677.432.282 | 3,47 | 711.303.896 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2. Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat — 1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 100% | 100% | 5.336.632.635 | 100% | 4.411.632.635 | 100% | 5.945.295.899 | 100% | 4.852.795.899 | 100% | 6.539.825.489 | 100% | 7.330.575.489 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |
| | | 3. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum — 1. Indeks Reformasi Hukum (IRH) | 92% | 92,97% | 449.890.700 | 93,07% | 722.600.821 | 93,12% | 794.860.920 | 93,17% | 874.346.991 | 93,22% | 961.781.689 | 93,27 % | 961.781.689 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |
| 4.01.03 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | | | | 436.652.598 | | 2.134.343.411 | | 2.332.908.251 | | 2.542.419.074 | | 2.761.380.979 | | 3.923.886.267 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |
| | | 1. Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan — 1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | 100% | 100% | 179.656.873 | 100% | 1.082.912.247 | 100% | 1.191.203.471 | 100% | 1.310.323.816 | 100% | 1.441.356.195 | 100% | 2.513.424.005 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 2. Hasil Penilaian Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal BAIK | 77,54% | 80% | 143.800.708 | 82,54% | 684.245.000 | 83,50% | 737.800.000 | 84,75% | 787.800.000 | 85,00% | 831.300.000 | 85,54 % | 872.865.000 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |
| | | | 3. Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan | 100% | 100% | 113.195.017 | 100% | 367.186.164 | 100% | 403.904.780 | 100% | 444.295.258 | 100% | 488.724.784 | 100% | 537.597.263 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |
| 2.16.02 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | | | | | 619.219.711 | | 581.053.800 | | 850.000.000 | | 900.000.000 | | 950.000.000 | | 1.500.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Komunikasi dan Informatika) |
| | | 1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | 1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) | 80% | 90% | 619.219.711 | 92% | 581.053.800 | 95% | 850.000.000 | 96% | 900.000.000 | 97% | 950.000.000 | 97% | 1.500.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Komunikasi dan Informatika) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.16.03 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | | | | 725.544.500 | | 860.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.150.000.000 | | 2.100.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Komunikasi dan Informatika) |
| | | 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | 1. Indeks SPBE 2,81 | 3,22 | 725.544.500 | 3,31 | 860.000.000 | 3,4 | 1.100.000.000 | 3,49 | 1.100.000.000 | 3,58 | 1.150.000.000 | 3,67 | 2.100.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Komunikasi dan Informatika) |
| 2.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik | | | | 55.928.818 | | 80.000.000 | | 175.000.000 | | 180.000.000 | | 185.000.000 | | 195.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Statistik) |
| | | Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral | Indikator, Indek Pembangungan Statistik (IPS) 2,32 | 2,6 | 55.928.818 | 2,65 | 80.000.000 | 2.70 | 175.000.000 | 2.75 | 180.000.000 | 2.80 | 185.000.000 | 2.85 | 195.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Statistik) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi | | | | 5.050.000 | | 18.500.000 | | 50.000.000 | | 51.500.000 | | 60.500.000 | | 72.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Persandian) |
| | | Meningkatnya pengamanan informasi — Indeks KAMI | 393 | 395 | 5.050.000 | 400 | 18.500.000 | 420 | 50.000.000 | 450 | 51.500.000 | 480 | 60.500.000 | 500 | 72.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Persandian) |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | | | | 1.223.560.660 | | 649.166.766 | | 779.000.119 | | 4.341.887.525 | | 4.776.076.277 | | 6.253.683.905 | Inspektorat Daerah |
| | | 1. Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan — 1. Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | 86% | 86% | 1.223.560.660 | 86% | 649.166.766 | 86% | 779.000.119 | 86% | 4.341.887.525 | 86% | 4.776.076.277 | 86% | 6.253.683.905 | Inspektorat Daerah |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | | | | | 34.200.000 | | 230.860.000 | | 277.032.000 | | 1.576.802.708 | | 1.734.482.978 | | 1.907.931.276 | Inspektorat Daerah |
| | | 1. Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | 1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level 3 | Level 3 | 17.100.000 | Level 3 | 115.430.000 | Level 3 | 138.516.000 | Level 3 | 788.401.354 | Level 3 | 867.241.489 | Level 3 | 953.965.638 | Inspektorat Daerah |
| | | | 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level 3 | Level 3 | 17.100.000 | Level 3 | 115.430.000 | Level 3 | 138.516.000 | Level 3 | 788.401.354 | Level 3 | 867.241.489 | Level 3 | 953.965.638 | Inspektorat Daerah |
| 2.12.02 | Program Pendaftaran Penduduk | | | | | 444.887.954 | | 444.887.954 | | 444.887.954 | | 444.887.954 | | 444.887.954 | | 844.887.954 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) |
| | | 1. Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk | 1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital | 6,03% | 10% | 244.887.954 | 11% | 244.887.954 | 12% | 244.887.954 | 13% | 244.887.954 | 14% | 244.887.954 | 15% | 444.887.954 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perangkat Daerah yang Mengampu |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) |
| | | 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | 85,15% | 86% | 200.000.000 | 88% | 200.000.000 | 90% | 200.000.000 | 92% | 200.000.000 | 94% | 200.000.000 | 95% | 400.000.000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) |
| 2.12.03 | Program Pencatatan Sipil | | | | 136.942.000 | | 136.942.000 | | 136.942.000 | | 136.942.000 | | 136.942.000 | | 231.800.000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | 1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100% | 60% | 30.000.000 | 70% | 30.000.000 | 80% | 30.000.000 | 90% | 30.000.000 | 95% | 30.000.000 | 100% | 50.000.000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) |
| | | | 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 99,38% | 99,4% | 55.000.000 | 99,5% | 55.000.000 | 99,6% | 55.000.000 | 99,7% | 55.000.000 | 99,8% | 55.000.000 | 99,9% | 100.000.000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) |
| | | | 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 80,43% | 81% | 36.942.000 | 82% | 36.942.000 | 83% | 36.942.000 | 84% | 36.942.000 | 85% | 36.942.000 | 86% | 51.800.000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 67,39% | 67,5% | 15.000.000 | 68% | 15.000.000 | 70% | 15.000.000 | 75% | 15.000.000 | 80% | 15.000.000 | 85% | 30.000.000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) |
| 2.12.04 | Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan | | | | | 8.200.000 | | 8.200.000 | | 8.200.000 | | 8.200.000 | | 8.200.000 | | 8.200.000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) |
| | | 1. Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | 1. Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | 100% | 100% | 8.200.000 | 100% | 8.200.000 | 100% | 8.200.000 | 100% | 8.200.000 | 100% | 8.200.000 | 100% | 8.200.000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.12.05 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | | | | 892.000 | | 892.000 | | 892.000 | | 892.000 | | 892.000 | | 892.000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) |
| | | 1. Meningkatnya kualitas profil kependudukan — 1. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | 3 Buku | 3 Buku | 892.000 | 3 Buku | 892.000 | 3 Buku | 892.000 | 3 Buku | 892.000 | 3 Buku | 892.000 | 3 Buku | 892.000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) |
| 5.01.02 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | 340.220.180 | | 330.220.180 | | 334.081.251 | | 367.489.376 | | 404.238.314 | | 444.662.145 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Perencanaan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | 1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 100% | 100% | 170.110.090 | 100% | 165.110.090 | 100% | 167.040.626 | 100% | 183.744.688 | 100% | 202.119.157 | 100% | 222.331.073 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Perencanaan) |
| | | | 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | 100% | 100% | 170.110.090 | 100% | 165.110.090 | 100% | 167.040.626 | 100% | 183.744.688 | 100% | 202.119.157 | 100% | 222.331.073 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Perencanaan) |
| 5.01.03 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 217.735.777 | | 343.235.777 | | 290.112.528 | | 319.123.781 | | 351.036.159 | | 386.139.775 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Perencanaan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100% | 100% | 72.578.592 | 100% | 114.411.926 | 100% | 96.704.176 | 100% | 106.374.594 | 100% | 117.012.053 | 100% | 128.713.258 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Perencanaan) |
| | | 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan | 1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100% | 100% | 72.578.592 | 100% | 114.411.926 | 100% | 96.704.176 | 100% | 106.374.594 | 100% | 117.012.053 | 100% | 128.713.258 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Perencanaan) |
| | | 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA | 1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | 100% | 100% | 72.578.592 | 100% | 114.411.926 | 100% | 96.704.176 | 100% | 106.374.594 | 100% | 117.012.053 | 100% | 128.713.258 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Unsur Pendukung Perencanaan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5.05.02 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | | | | | 342.000.000 | | 646.120.287 | | 775.000.000 | | 775.000.000 | | 775.000.000 | | 1.175.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan) |
| | | 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan | 1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan | 100% | 100% | 85.500.000 | 100% | 197.834.776 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 293.750.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan) |
| | | 2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan | 1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | 100% | 100% | 85.500.000 | 100% | 197.834.776 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 293.750.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | 1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | 100% | 100% | 85.500.000 | 100% | 197.834.776 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 293.750.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan) |
| | | 4. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah | 1. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah | 100% | 100% | 85.500.000 | 100% | 52.615.959 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 293.750.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan) |
| 5.03.02 | Program Kepegawaian Daerah | Indeks Profesioalitas ASN | | | | 893.728.600 | | 758.244.400 | | 947.805.500 | | 1.847.937.500 | | 1.876.437.500 | | 3.752.710.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kepegawaian) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | 1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi | | 80% | 195.037.500 | 80% | 196.096.000 | 80% | 245.120.000 | 80% | 377.500.000 | 80% | 402.500.0H/N 00 | 80% | 425.500.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kepegawaian) |
| | | 2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN | 1. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | | 95% | 453.999.700 | 95,50% | 289.100.000 | 96% | 361.375.000 | 96,50% | 949.937.500 | 97% | 949.937.500 | 97,50 % | 2.860.710.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kepegawaian) |
| | | 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN | 1. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya | | 92% | 212.638.000 | 92,50% | 240.995.000 | 93% | 301.243.750 | 93,50% | 437.000.000 | 94% | 443.000.000 | 94,50 % | 384.000.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kepegawaian) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | 1. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik | | 99% | 32.053.400 | 99,10% | 32.053.400 | 99,20% | 40.066.750 | 99,30% | 83.500.000 | 99,40% | 81.000.000 | 99,50 % | 82.500.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Kepegawaian) |
| 2.24.02 | Program Pengelolaan Kearsipan | | | | | 38.372.400 | | 56.500.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kearsipan) |
| | | 1. Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | 1. Tingkat Ketersediaan Arsip | 75,06% | 75,15% | - | 75,50% | 6.500.000 | 76,65% | 10.000.000 | 77,25% | 10.000.000 | 78,50% | 10.000.000 | 80% | 10.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kearsipan) |
| | | | 2. Indeks Pengawasan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar | 70 | 71 | 38.372.400 | 72 | 50.000.000 | 73 | 50.000.000 | 74 | 55.000.000 | 75 | 60.000.000 | 76 | 65.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kearsipan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.24.03 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | | | | | - | | 4.000.000 | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 144.000.000 | | 172.800.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kearsipan) |
| | | 1. Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | 1. Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | | | - | 1 kegiatan | 4.000.000 | 1 kegiatan | 100.000.000 | 1 kegiatan | 120.000.000 | 1 kegiatan | 144.000.000 | 1 kegiatan | 172.800.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kearsipan) |
| 2.24.04 | Program Perizinan Penggunaan Arsip | | | | | - | | - | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kearsipan) |
| | | 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup | 1. Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Terbuka | | | - | 1 daftar | - | 1 daftar | 10.000.000 | 1 daftar | 10.000.000 | 1 daftar | 10.000.000 | 1 daftar | 10.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kearsipan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.23.02 | Program Pembinaan Perpustakaan | | | | | 154.265.900 | | 150.269.590 | | 254.016.653 | | 284.619.151 | | 319.812.023 | | 360.283.827 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perpustakaan) |
| | | 1. Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | 1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | 62,07 | 65,15 | 154.265.900 | 67,25 | 100.000.000 | 68,75 | 204.016.653 | 69,85 | 234.619.151 | 70,15 | 269.812.023 | 72,00 | 310.283.827 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perpustakaan) |
| | | | 2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 67,81 | 68,75 | - | 69,60 | 50.269.590 | 71,50 | 50.000.000 | 72,30 | 50.000.000 | 73,80 | 50.000.000 | 75,00 | 50.000.000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perpustakaan) |
| 4.02.02 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | | | | | 11.023.619.000 | | 11.574.799.950 | | 12.153.539.947 | | 12.761.216.945 | | 13.399.277.792 | | 16.069.241.683 | Sekretariat DPRD |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan | 1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahunan | 100% | 100% | 7.971.438.200 | 100% | 8.370.010.110 | 100% | 8.788.510.616 | 100% | 9.227.936.147 | 100% | 9.689.332.954 | 100% | 12.173.799.602 | Sekretariat DPRD |
| | | | 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahunan | 100% | 100% | 1.869.059.600 | 100% | 1.962.512.580 | 100% | 2.060.638.209 | 100% | 2.163.670.120 | 100% | 2.271.853.626 | 100% | 2.385.446.307 | Sekretariat DPRD |
| | | 2.Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | 1.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100% | 100% | 1.183.121.200 | 100% | 1.242.277.260 | 100% | 1.304.391.123 | 100% | 1.369.610.680 | 100% | 1.438.091.214 | 100% | 1.509.995.774 | Sekretariat DPRD |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | | 23.364.400 | | 23.514.400 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | Kecamatan X Koto |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 23.364.400 | 100% | 23.514.400 | 100% | 37.000.000 | 100% | 37.000.000 | 100% | 37.000.000 | 100% | 37.000.000 | Kecamatan X Koto |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 5.500.000 | | 3.250.000 | | 21.750.000 | | 21.750.000 | | 21.750.000 | | 21.750.000 | Kecamatan X Koto |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 5.500.000 | 100% | 3.250.000 | 100% | 21.750.000 | 100% | 21.750.000 | 100% | 21.750.000 | 100% | 21.750.000 | Kecamatan X Koto |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum | | | | - | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | Kecamatan X Koto |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | | | | 28.000.000 | | 28.000.000 | 100% | 28.000.000 | 100% | 28.000.000 | 100% | 28.000.000 | Kecamatan X Koto |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 2.250.000 | | 50.000.000 | | 175.000.000 | | 185.000.000 | | 165.000.000 | | 185.000.000 | Kecamatan X Koto |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 2.250.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 175.000.000 | 100% | 185.000.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | 185.000.000 | Kecamatan X Koto |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 101.750.000 | | 72.090.000 | | 167.100.000 | | 167.100.000 | | 167.100.000 | | 167.100.000 | Kecamatan X Koto |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | | 100% | 50.875.000 | 100% | 36.045.000 | 100% | 83.550.000 | 100% | 83.550.000 | 100% | 83.550.000 | 100% | 83.550.000 | Kecamatan X Koto |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | | 100% | 50.875.000 | 100% | 36.045.000 | 100% | 83.550.000 | 100% | 83.550.000 | 100% | 83.550.000 | 100% | 83.550.000 | Kecamatan X Koto |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 45.728.800 | | 46.028.800 | | 59.028.800 | | 60.528.800 | | 60.528.800 | | 60.528.800 | Kecamatan Batipuh |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 45.728.800 | 100% | 46.028.800 | 100% | 59.028.800 | 100% | 60.528.800 | 100% | 60.528.800 | 100% | 60.528.800 | Kecamatan Batipuh |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 3.700.000 | | 3.250.000 | | 8.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | Kecamatan Batipuh |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 3.700.000 | 100% | 3.250.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 9.000.000 | 100% | 9.000.000 | 100% | 9.000.000 | Kecamatan Batipuh |
| 7.01.04 | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | Kecamatan Batipuh |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 30.000.000 | | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | Kecamatan Batipuh |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 35.057.500 | | 110.000.000 | | 135.000.000 | | 110.000.000 | | 135.000.000 | Kecamatan Batipuh |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 35.057.500 | 100% | 110.000.000 | 100% | 135.000.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 135.000.000 | Kecamatan Batipuh |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 92.575.000 | | 31.552.500 | | 64.100.000 | | 64.100.000 | | 64.100.000 | | 64.100.000 | Kecamatan Batipuh |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 46.287.500 | 100% | 15.776.250 | 100% | 32.050.000 | 100% | 32.050.0000 | 100% | 32.050.000 | 100% | 32.050.000 | Kecamatan Batipuh |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 46.287.500 | 100% | 15.776.250 | 100% | 32.050.000 | 100% | 32.050.000 | 100% | 32.050.000 | 100% | 32.050.000 | Kecamatan Batipuh |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 49.128.800 | | 48.528.800 | | 59.028.800 | | 60.528.800 | | 60.528.800 | | 60.528.800 | Kecamatan Rambatan |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 49.128.800 | 100% | 48.528.800 | 100% | 59.028.800 | 100% | 60.528.800 | 100% | 60.528.800 | 100% | 60.528.800 | Kecamatan Rambatan |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 49.128.800 | | 48.528.800 | | 59.028.800 | | 60.528.800 | | 60.528.800 | | 60.528.800 | Kecamatan Rambatan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 49.128.800 | 100% | 48.528.800 | 100% | 59.028.800 | 100% | 60.528.800 | 100% | 60.528.800 | 100% | 60.528.800 | Kecamatan Rambatan |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 3.500.000 | | 3.250.000 | | 8.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | Kecamatan Rambatan |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 3.500.000 | 100% | 3.250.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 9.000.000 | 100% | 9.000.000 | 100% | 9.000.000 | Kecamatan Rambatan |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum | | | | - | | 1.500.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | Kecamatan Rambatan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 1.500.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | Kecamatan Rambatan |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 51.900.000 | | 42.500.000 | | 110.000.000 | | 135.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | Kecamatan Rambatan |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 51.900.000 | 100% | 42.500.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 135.000.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 110.000.000 | Kecamatan Rambatan |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 99.764.400 | | 73.614.400 | | 151.464.400 | | 151.464.400 | | 151.464.400 | | 151.464.400 | Kecamatan Rambatan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 49.882.200 | 100% | 36.807.200 | 100% | 75.732.200 | 100% | 75.732.200 | 100% | 75.732.200 | 100% | 75.732.200 | Kecamatan Rambatan |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 49.882.200 | 100% | 36.807.200 | 100% | 75.732.200 | 100% | 75.732.200 | 100% | 75.732.200 | 100% | 75.732.200 | Kecamatan Rambatan |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 49.563.800 | | 50.291.300 | | 56.700.000 | | 57.200.000 | | 57.500.000 | | 58.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100,00 % | 100,00 % | 49.563.800 | 100% | 50.291.300 | 100% | 56.700.000 | 100% | 57.200.000 | 100% | 57.500.000 | 100% | 58.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 3.612.500 | | 3.250.000 | | 5.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 3.612.500 | 100% | 3.250.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 6.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum | | | | - | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 74.392.500 | | 56.525.000 | | 90.000.000 | | 130.000.000 | | 110.000.000 | | 135.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 74.392.500 | 100% | 56.525.000 | 100% | 90.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 135.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 74.392.500 | | 51.704.500 | | 94.250.000 | | 94.250.000 | | 97.000.000 | | 97.500.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 37.196.250 | 100% | 25.852.250 | 100% | 47.125.000 | 100% | 47.125.000 | 100% | 48.500.000 | 100% | 48.750.000 | Kecamatan Lima Kaum |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 37.196.250 | 100% | 25.852.250 | 100% | 47.125.000 | 100% | 47.125.000 | 100% | 48.500.000 | 100% | 48.750.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 54.019.300 | | 53.039.400 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% dan 1 laporan | 54.019.300 | 100% dan 1 laporan | 53.039.400 | 100% dan 1 laporan | 55.000.000 | 100% dan 1 laporan | 55.000.000 | 100% dan 1 laporan | 55.000.000 | 100% dan 1 laporan | 55.000.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 422.400 | | 1.500.000 | | 844.800 | | 844.800 | | 844.800 | | 844.800 | Kecamatan Tanjung Emas |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 422.400 | 100% | 1.500.000 | 100% | 844.800 | 100% | 844.800 | 100% | 844.800 | 100% | 844.800 | Kecamatan Tanjung Emas |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum | | | | 51.600.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 51.600.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 61.750.000 | | 61.750.000 | | 61.750.000 | | 61.750.000 | | 61.750.000 | Kecamatan Tanjung Emas |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 61.750.000 | 100% | 61.750.000 | 100% | 61.750.000 | 100% | 61.750.000 | 100% | 61.750.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 38.611.000 | | 70.654.400 | | 57.222.000 | | 57.222.000 | | 57.222.000 | | 57.222.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 28.611.000 | 100% | 35.327.200 | 100% | 28.611.000 | 100% | 28.611.000 | 100% | 28.611.000 | 100% | 28.611.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 10.000.000 | 100% | 35.327.200 | 100% | 28.611.000 | 100% | 28.611.000 | 100% | 28.611.000 | 100% | 28.611.000 | Kecamatan Tanjung Emas |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 68.293.200 | | 70.543.200 | | 95.000.000 | | 93.000.000 | | 93.000.000 | | 93.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 68.293.200 | 100% | 70.543.200 | 100% | 95.000.000 | 100% | 93.000.000 | 100% | 93.000.000 | 100% | 93.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 2.572.500 | | 3.250.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 2.572.500 | 100% | 3.250.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | - | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 39.635.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 39.635.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 60.433.974 | | 21.182.500 | | 46.500.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 30.216.987 | 100% | 10.591250 | 100% | 23.500.000 | 100% | 13.000.000 | 100% | 13.000.000 | 100% | 13.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 30.216.987 | 100% | 10.591250 | 100% | 23.000.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 25.564.400 | | 24.864.400 | | 41.000.000 | | 41.000.000 | | 41.000.000 | | 41.000.000 | Kecamatan Sungayang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 25.564.400 | 100% | 24.864.400 | 100% | 41.000.000 | 100% | 41.000.000 | 100% | 41.000.000 | 100% | 41.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 4.450.000 | | 3.700.000 | | 19.000.000 | | 19.000.000 | | 19.000.000 | | 19.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 4.450.000 | 100% | 3.700.000 | 100% | 19.000.000 | 100% | 19.000.000 | 100% | 19.000.000 | 100% | 19.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum | | | | - | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | Kecamatan Sungayang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 55.250.000 | | 115.000.000 | | 150.600.000 | | 115.000.000 | | 150.600.000 | Kecamatan Sungayang |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 55.250.000 | 100% | 115.000.000 | 100% | 150.600.000 | 100% | 115.000.000 | 100% | 150.600.000 | Kecamatan Sungayang |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 70.620.000 | | 49.500.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | Kecamatan Sungayang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 35.310.000 | 100% | 24.750.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 35.310.000 | 100% | 24.750.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 45.528.800 | | 46.428.800 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 45.528.800 | 100% | 46.428.800 | 100% | 58.000.000 | 100% | 58.000.000 | 100% | 58.000.000 | 100% | 58.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 3.165.000 | | 3.700.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 3.165.000 | 100% | 3.700.000 | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum | | | | - | | 750.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 750.000 | 100% | 36.000.000 | 100% | 36.000.000 | 100% | 36.000.000 | 100% | 36.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 52.500.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 52.500.000 | 100% | 168.000.000 | 100% | 168.000.000 | 100% | 168.000.000 | 100% | 168.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 113.000.000 | | 77.300.000 | | 147.000.000 | | 147.000.000 | | 147.000.000 | | 147.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 56.500.000 | 100% | 38.650.000 | 100% | 73.500.000 | 100% | 73.500.000 | 100% | 73.500.000 | 100% | 73.500.000 | Kecamatan Sungai Tarab |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 56.500.000 | 100% | 38.650.000 | 100% | 73.500.000 | 100% | 73.500.000 | 100% | 73.500.000 | 100% | 73.500.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 50.741.300 | | 47.028.800 | | 112.834.560 | | 135.401.472 | | 162.481.766 | | 194.978.120 | Kecamatan Pariangan |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 50.741.300 | 100% | 47.028.800 | 100% | 112.834.560 | 100% | 135.401.472 | 100% | 162.481.766 | 100% | 194.978.120 | Kecamatan Pariangan |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 5.000.000 | | 2.260.000 | | 24.000.000 | | 28.800.000 | | 34.560.000 | | 41.472.000 | Kecamatan Pariangan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 5.000.000 | 100% | 2.260.000 | 100% | 24.000.000 | 100% | 28.800.000 | 100% | 34.560.000 | 100% | 41.472.000 | Kecamatan Pariangan |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum | | | | - | | 2.500.000 | | 36.000.000 | | 43.200.000 | | 51.840.000 | | 62.208.000 | Kecamatan Pariangan |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 2.500.000 | 100% | 36.000.000 | 100% | 43.200.000 | 100% | 51.840.000 | 100% | 62.208.000 | Kecamatan Pariangan |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 548.000.000 | | 558.960.000 | | 570.139.200 | | 575.840.592 | | 581.598.998 | Kecamatan Pariangan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | | - | 100% | 548.000.000 | 100% | 558.960.000 | 100% | 570.139.200 | 100% | 575.840.592 | 100% | 581.598.998 | Kecamatan Pariangan |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 82.676.884 | | 55.710.000 | | 160.470.000 | | 192.564.000 | | 231.076.800 | | 277.292.160 | Kecamatan Pariangan |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 41.338.442 | 100% | 27.855.000 | 100% | 80.235.000 | 100% | 96.282.000 | 100% | 115.538.400 | 100% | 138.646.080 | Kecamatan Pariangan |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 41.338.442 | 100% | 27.855.000 | 100% | 80.235.000 | 100% | 96.282.000 | 100% | 115.538.400 | 100% | 138.646.080 | Kecamatan Pariangan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 68.293.200 | | 71.293.200 | | 78.400.000 | | 77.400.000 | | 77.400.000 | | 77.400.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 68.293.200 | 100% | 71.293.200 | 100% | 78.400.000 | 100% | 77.400.000 | 100% | 77.400.000 | 100% | 77.400.000 | Kecamatan Salimpaung |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 4.250.000 | | 3.250.000 | | 20.000.000 | | 21.500.000 | | 21.500.000 | | 21.500.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 4.250.000 | 100% | 3.250.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 21.500.000 | 100% | 21.500.000 | 100% | 21.500.000 | Kecamatan Salimpaung |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum | | | | - | | - | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | 28.000.000 | 100% | 28.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | Kecamatan Salimpaung |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 5.835.750 | | 58.500.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 5.835.750 | 100% | 58.500.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | 165.000.000 | Kecamatan Salimpaung |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 75.698.750 | | 55.810.000 | | 128.500.000 | | 128.500.000 | | 128.500.000 | | 128.500.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 37.849.375 | 100% | 11.350.000 | 100% | 64.250.000 | 100% | 64.250.000 | 100% | 64.250.000 | 100% | 64.250.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 37.849.375 | 100% | 44.460.000 | 100% | 64.250.000 | 100% | 64.250.000 | 100% | 64.250.000 | 100% | 64.250.000 | Kecamatan Salimpaung |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 22.764.400 | | 25.014.400 | | 30.017.280 | | 36.020.736 | | 43.224.883 | | 51.869.860 | Kecamatan Padang Ganting |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 22.764.400 | 100% | 25.014.400 | 100% | 30.017.280 | 100% | 36.020.736 | 100% | 43.224.883 | 100% | 51.869.860 | Kecamatan Padang Ganting |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | - | | 4.000.000 | | 4.800.000 | | 5.760.000 | | 6.912.000 | | 8.294.400 | Kecamatan Padang Ganting |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | | | 100% | 4.000.000 | 100% | 4.800.000 | 100% | 5.760.000 | 100% | 6.912.000 | 100% | 8.294.400 | Kecamatan Padang Ganting |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum | | | | - | | 1.360.000 | | 1.632.000 | | 1.958.400 | | 2.350.080 | | 2.820.096 | Kecamatan Padang Ganting |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | | 100% | 1.360.000 | 100% | 1.632.000 | 100% | 1.958.400 | 100% | 2.350.080 | 100% | 2.820.096 | Kecamatan Padang Ganting |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 18.750.000 | | 55.250.000 | | 66.300.000 | | 79.560.000 | | 95.472.000 | | 114.566.400 | Kecamatan Padang Ganting |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 18.750.000 | 100% | 55.250.000 | 100% | 66.300.000 | 100% | 79.560.000 | 100% | 95.472.000 | 100% | 114.566.400 | Kecamatan Padang Ganting |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 44.800.000 | | 33.120.000 | | 106.564.241 | | 127.877.089 | | 153.452.507 | | 184.143.008 | Kecamatan Padang Ganting |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Indikator<br>1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 22.400.000 | 100% | 10.500.000 | 100% | 53.282.120 | 100% | 63.938.544 | 100% | 76.726.253 | 100% | 92.071.504 | Kecamatan Padang Ganting |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 22.400.000 | 100% | 22.620.000 | 100% | 53.282.120 | 100% | 63.938.544 | 100% | 76.726.253 | 100% | 92.071.504 | Kecamatan Padang Ganting |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 23.664.400 | | 23.674.400 | | 58.520.000 | | 61.850.000 | | 67.588.500 | | 70.970.000 | Kecamatan Tanjuang Baru |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 23.664.400 | 100% | 23.674.400 | 100% | 58.520.000 | 100% | 61.850.000 | 100% | 67.588.500 | 100% | 70.970.000 | Kecamatan Tanjuang Baru |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 5.000.000 | | 3.260.000 | | 19.800.000 | | 20.350.000 | | 20.809.000 | | 21.850.000 | Kecamatan Tanjuang Baru |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 5.000.000 | 100% | 3.260.000 | 100% | 19.800.000 | 100% | 20.350.000 | 100% | 20.809.000 | 100% | 21.850.000 | Kecamatan Tanjuang Baru |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum | | | | - | | 10.000 | | 34.100.000 | | 34.750.000 | | 35.887.000 | | 37.685.000 | Kecamatan Tanjuang Baru |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 10.000 | 100% | 34.100.000 | 100% | 34.750.000 | 100% | 35.887.000 | 100% | 37.685.000 | Kecamatan Tanjuang Baru |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 49.100.000 | | 178.200.000 | | 191.000.000 | | 187.455.000 | | 196.800.000 | Kecamatan Tanjuang Baru |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 49.100.000 | 100% | 178.200.000 | 100% | 191.000.000 | 100% | 187.455.000 | 100% | 196.800.000 | Kecamatan Tanjuang Baru |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 42.900.000 | | 30.720.000 | | 126.500.000 | | 128.715.000 | | 132.861.000 | | 139.425.000 | Kecamatan Tanjuang Baru |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 21.450.000 | 100% | 8.100.000 | 100% | 63.250.000 | 100% | 64.357.500 | 100% | 66.430.500 | 100% | 69.712.500 | Kecamatan Tanjuang Baru |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 21.450.000 | 100% | 22.620.000 | 100% | 63.250.000 | 100% | 64.357.500 | 100% | 66.430.500 | 100% | 69.712.500 | Kecamatan Tanjuang Baru |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 69.324.200 | | 68.313.200 | | 82.570.000 | | 86.850.000 | | 90.550.000 | | 93.500.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 69.324.200 | 100% | 68.313.200 | 100,00% | 82.570.000 | 100% | 86.850.000 | 100% | 90.550.000 | 100% | 93.500.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 4.822.000 | | 3.260.000 | | 10.000.000 | | 12.500.000 | | 15.000.000 | | 17.500.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 4.822.000 | 100% | 3.260.000 | 100,00% | 10.000.000 | 100% | 12.500.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 17.500.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| 7.01.04 | Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | | | | - | | 10.000 | | 9.750.000 | | 10.750.000 | | 11.500.000 | | 12.550.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 10.000 | 100,00% | 9.750.000 | 100% | 10.750.000 | 100% | 11.500.000 | 100% | 12.550.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 40.500.000 | | 73.550.000 | | 78.750.000 | | 82.650.000 | | 85.250.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 40.500.000 | 100,00% | 73.550.000 | 100% | 78.750.000 | 100% | 82.650.000 | 100% | 85.250.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 72.635.000 | | 52.250.000 | | 92.635.000 | | 95.000.000 | | 97.000.000 | | 101.000.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 36.317.500 | 100% | 13.250.000 | 100,00% | 46.317.500 | 100% | 47.500.000 | 100% | 48.500.000 | 100% | 50.500.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 36.317.500 | 100% | 39.000.000 | 100,00% | 46.317.500 | 100% | 47.500.000 | 100% | 48.500.000 | 100% | 50.500.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 22.764.400 | | 22.600.000 | | 29.600.000 | | 29.600.000 | | 29.600.000 | | 29.600.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 22.764.400 | 100% | 22.600.000 | 100,00% | 29.600.000 | 100% | 29.600.000 | 100% | 29.600.000 | 100% | 29.600.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 4.000.000 | | 3.250.000 | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.500.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 4.000.000 | 100% | 3.250.000 | 100,00% | 6.000.000 | 100% | 7.000.000 | 100% | 7.000.000 | 100% | 7.500.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum | | | | - | | - | | 5.000.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 7.000.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | - | | - | 100,00% | 5.000.000 | 100% | 6.500.000 | 100% | 6.500.000 | 100% | 7.000.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 53.630.000 | | 35.000.000 | | 90.000.000 | | 50.000.000 | | 110.000.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | | - | 100% | 53.630.000 | 100,00% | 35.000.000 | 100% | 90.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 110.000.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 63.025.000 | | 47.645.000 | | 113.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 150.000.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 31.512.500 | 100% | 14.105.000 | 100,00% | 56.500.000 | 100% | 65.000.000 | 100% | 65.000.000 | 100% | 75.000.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 31.512.500 | 100% | 33.540.000 | 100,00% | 56.500.000 | 100% | 65.000.000 | 100% | 65.000.000 | 100% | 75.000.000 | Kecamatan Batipuah Selatan |
| 2.10.04 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan | 1. Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi | | | | 30,00% | 50.000.000 | 30,00% | 50.000.000 | 30,00% | 50.000.000 | 30,00% | 50.000.000 | 30,00 % | 100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |
| 2.10.05 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | | | | | - | | - | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |
| | | 1. Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | 1. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | - | | | | | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.10.06 | Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | | | | 10.000.000 | | - | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |
| | | 1. Meningkatnya penyelesaian Penggantian Kerugian tanah Maksimum dan Tanah Absentee 1. Persentase Penggantian Kerugian tanah Maksimum dan Tanah Absentee | - | 100% | 10.000.000 | | | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |
| 2.10.07 | Program Penetapan Tanah Ulayat | | | | - | | - | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya tata kelola tanah ulayat 1. Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan | - | | | | | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |
| 2.10.08 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | | | | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |
| | | 1. Meningkatnya pengelolaan tanah kosong 1. Persentase Tanah Kosong yang Dikelola | - | | | | | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.10.09 | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | | | | 217.570.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |
| | | 1. Meningkatnya tertib pertanahan 1. Persentase tanah aset Pemda yang bersertifikat | 44% | 46,55% | 217.570.000 | 49% | 225.000.000 | 51% | 225.000.000 | 53% | 225.000.000 | 55% | 225.000.000 | 57% | 100.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |
| 2.10.10 | Program Penatagunaan Tanah | | | | 72.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 200.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah<br>1. Jumlah kawasan lokasi penatagunaan tanah | 2 | 1 | 72.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 200.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pertanahan) |

Misi 5 Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Misi 5 Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas.tangguh bencana.dan ramah lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.10 | Program Penyelenggaraan Jalan | | | | 2.280.000.000 | | 25.500.000.000 | | 34.150.000.000 | | 58.050.000.000 | | 40.980.000.000 | | 36.320.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman — 1. Tingkat Kemantapan Jalan | 69,89% | 69,99% | 2.280.000.000 | 71,46% | 25.500.000.000 | 73,89% | 34.150.000.000 | 76,29% | 58.050.000.000 | 78,89% | 40.980.000.000 | 80,89 % | 36.320.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| 1.03.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | | 2.887.965.100 | | 2.950.000.000 | | 2.953.000.000 | | 2.963.000.000 | | 4.626.000.000 | | 6.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi — 1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | - | 1,50% | 340.471.800 | 2,50% | 340.000.000 | 3,75% | 340.000.000 | 4,75% | 350.000.000 | 6,25% | 700.000.000 | 8,25 % | 1.700.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Umum dan Penataan Ruang) |
| | | 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob | - | 1,30% | 313.000.000 | 2,30% | 310.000.000 | 3,55% | 313.000.000 | 4,55% | 313.000.000 | 6,05% | 626.000.000 | 8,05 % | 1.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas | 58,74% | 60,74% | 2.234.493.300 | 62,99% | 2.300.000.000 | 65,49% | 2.300.000.000 | 68,24% | 2.300.000.000 | 71,24% | 3.300.000.000 | 74,49 % | 3.300.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| 1.03.03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | | 299.650.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 350.000.000 | | 1.500.000.000 | | 3.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum — 1. Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota | 76,55% | 76,55% | 299.650.000 | 82,00% | 330.000.000 | 84,00% | 330.000.000 | 86,00% | 350.000.000 | 88,00% | 1.500.000.000 | 90,00 % | 3.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| 1.03.05 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | | | | 6.191.640.000 | | 6.200.000.000 | | 7.300.000.000 | | 9.668.124.008 | | 16.000.000.000 | | 20.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah — 1. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) | 74,84% | 71,90% | 6.191.640.000 | 86% | 6.200.000.000 | 88% | 7.300.000.000 | 90% | 9.668.124.008 | 92% | 16.000.000.000 | 94% | 20.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| 1.03.06 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | | | | 292.164.400 | | 300.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | 2.500.000.000 | | 3.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | *Outcome* : — Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan — 1. Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | 80% | 83% | 292.164.400 | 83% | 300.000.000 | 83% | 310.000.000 | 83% | 310.000.000 | 83% | 2.500.000.000 | 83% | 3.500.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum dan Penataan Ruang) |
| 1.04.03 | Program Kawasan Permukiman | | | | | 8.500.000 | | 1.035.000.000 | | 557.000.000 | | 622.700.000 | | 1.692.470.000 | | 2.000.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | 1. Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | 1,93% | 1,93% | 8.500.000 | 4,74% | 1.035.000.000 | 6,42% | 557.000.000 | 10,91% | 622.700.000 | 13,62% | 1.692.470.000 | 15,75 % | 2.000.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.03.08 | Program Penataan Bangunan Gedung | | | | 2.222.830.700 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 3.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas bangunan gedung 1. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik | 85% | 100% | 2.222.830.700 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| 1.03.09 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | | | | - | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Peningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata — 1. Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| 1.03.11 | Program Pengembangan Jasa Kontruksi | | | | 2.746.948 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | 1. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | | 100% | 2.746.948 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |
| 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | | | | 12.604.652.487 | | 12.715.149.496 | | 14.022.629.367 | | 15.025.779.367 | | 15.459.948.877 | | 20.232.946.321 | Dinas Perhubungan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perhubungan) |
| | | 1. Meningkatnya kualitas layanan transportasi | 1. Konektivitas darat | 0,14 | 0,14 | - | 0,14 | 567.378.400 | 0,14 | 63.000.000 | 0,14 | 66.150.000 | 0,14 | 69.457.500 | 0,14 | 72.930.375 | Dinas Perhubungan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perhubungan) |
| | | | 2. Persentase kelengkapan Jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal | 76,58% | 77,56% | 12.604.652.487 | 78,56% | 12.147.771.096 | 79,56% | 13.959.629.367 | 80,56% | 14.959.629.367 | 81,56% | 15.390.491.377 | 82,56 % | 20.160.015.946 | Dinas Perhubungan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perhubungan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Sasaran 2 Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.02 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | | | | - | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 550.000.000 | | 750.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP 1. Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | | | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 550.000.000 | | 750.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |
| 2.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan | | | | 37.700.000 | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 140.000.000 | | 160.000.000 | | 300.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup | 1. Indeks Kualitas air | 40,71% | 77,06% | 18.850.000 | 77,26% | 50.000.000 | 77,46% | 60.000.000 | 77,66% | 70.000.000 | 77,86% | 80.000.000 | 78,06 % | 150.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |
| | | | 2. Indeks Kualitas Udara | 91,82% | 78,04% | 18.850.000 | 78,34% | 50.000.000 | 78,64% | 60.000.000 | 78,94% | 70.000.000 | 79,24% | 80.000.000 | 79,54 % | 150.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.11.04 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | | | | 547.500.000 | | 2.832.500.000 | | 848.500.000 | | 780.000.000 | | 857.000.000 | | 2.064.700.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati 1. Persentase RTH | 83% | 83% | 547.500.000 | 84,88% | 2.832.500.000 | 84,88% | 848.500.000 | 84,88% | 780.000.000 | 84,88% | 857.000.000 | 84,88 % | 2.064.700.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |
| 2.11.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | | | | 30.000.000 | | 130.000.000 | | 196.000.000 | | 192.600.000 | | 229.860.000 | | 337.846.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan — 1. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan. Izin PPLH dan PUU LH | 52,17% | 53,33% | 30.000.000 | 56,67% | 130.000.000 | 58,82% | 196.000.000 | 58,82% | 192.600.000 | 64,10% | 229.860.000 | 69,23 % | 337.846.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.05 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | | | | 7.483.500 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 100.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1. Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) — 1. Persentase limbah B3 yang terkelola | 62,50% | 62,50% | 7.483.500 | 64,50% | 50.000.000 | 70,50% | 55.000.000 | 72,00% | 55.000.000 | 74,00% | 55.000.000 | 75,00 % | 100.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |
| 2.11.11 | Program Pengelolaan Persampahan | | | | 6.856.690.839 | | 11.662.616.750 | | 10.512.604.591 | | 10.612.604.591 | | 16.673.499.330 | | 25.075.236.884 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya tata kelola persampahan — 1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | 62,40% | 62,40% | 6.856.690.839 | 62,50% | 11.662.616.750 | 63% | 10.512.604.591 | 64% | 10.612.604.591 | 65% | 16.673.499.330 | 66% | 25.075.236.884 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perangkat Daerah yang |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Mengampu Urusan Lingkungan Hidup) |
| | Sasaran 3 Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. bencana dan pasca bencana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penanggulangan Bencana | | | | 959.051.709 | | 907.715.707 | | 1.263.726.067 | | 1.516.471.280 | | 1.819.765.536 | | 3.183.718.644 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas layanan pencengahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana — 1. Persentase Cakupan Penyebaran lnformasi dan Edukasi Rawan Bencana | | 100% | 8.515.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 189.558.910 | 100% | 227.470.692 | 100% | 272.964.830 | 100% | 327.557.797 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja Program (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2024) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Perlindungan Masyarakat) |
| | | 2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat | 1. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | | 100% | 537.607.700 | 100% | 521.020.000 | 100% | 315.931.517 | 100% | 379.117.820 | 100% | 454.941.384 | 100% | 545.929.661 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat) |
| | | 3. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | 1. Persentase Penanganan Pasca Bencana | | 100% | 412.929.009 | 100% | 376.695.707 | 100% | 758.235.640 | 100% | 909.882.768 | 100% | 1.091.859.322 | 100% | 2.310.231.186 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat) |

Misi 6 Memantapkan keamanan daerah. demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | Misi 6 Memantapkan keamanan daerah. demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan 1 Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.02 | Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum | | | | 926.197.043 | | 1.326.514.000 | | 122.359.852 | | 1.011.056.895 | | 1.028.556.895 | | 1.119.056.895 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat) |
| | | 1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | 1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100% | 872.197.043 | 100% | 1.260.188.300 | 100% | 43.859.852 | 100% | 921.056.895 | 100% | 926.056.895 | 100% | 941.056.895 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | serta Perlindungan Masyarakat) |
| | | 2. Meningkatnya panganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 1. Persentase Penyelenggaraan Tribumtransmas | 100% | 100% | 16.500.000 | 100% | 19.897.710 | 100% | 26.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 48.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat) |
| | | 3. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | 1. Persentase cakupan perlindungan masyarakat | 100% | 100% | 35.000.000 | 100% | 39.795.420 | 100% | 45.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% | 100.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat) |
| | | 4. Meningkatnya kapasitas SDM PPNS | 1. Persentase PPNS yang ditingkat kompetensinya | 100% | 100% | 2.500.000 | 100% | 6.632.570 | 100% | 7.500.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 12.500.000 | 100% | 30.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 1.05.04 | Program Pencegahan Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | | | | 1.718.077.000 | | 2.610.890.000 | | 2.012.500.000 | | 2.020.000.000 | | 3.025.000.000 | | 4.030.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat) |
| | | 1. Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran | 1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran | 100% | 2.500.000 | 100% | 7.500.000 | 100% | 12.500.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 30.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat) |
| | | 2. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100% | 1.715.577.000 | 100% | 2.603.390.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 8.01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | | | | | 764.503.210 | | 764.503.210 | | 764.503.210 | | 764.503.210 | | 764.503.210 | | 1.564.503.210 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik) |
| | | 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | 1. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 13 upacara/70 orang Paskibraka | 13 upacara/70 orang Paskibraka | 764.503.210 | 13 upacara/70 orang Paskibraka/10 sekolah | 764.503.210 | 13 upacara/70 orang Paskibraka/10 sekolah | 764.503.210 | 13 upacara/70 orang Paskibraka/10 sekolah | 764.503.210 | 13 upacara/70 orang Paskibraka/10 sekolah | 764.503.210 | 13 upacara/70 orang Paskibraka/10 sekolah | 1.564.503.210 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik) |
| 8.01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | | 975.497.400 | | 975.497.400 | | 975.497.400 | | 2.190.973.000 | | 28.039.000.000 | | 1.075.497.400 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik) |
| | | 1. Meningkatnya etika dan budaya politik | 1. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik | 11 Partai Politik | 11 Partai Politik | 975.497.400 | 11 Partai Politik | 975.497.400 | 11 Partai Politik | 975.497.400 | 11 Partai Politik . 2 Dokumen | 2.190.973.000 | 11 Partai Politik . 5 Dokumen | 28.039.000.000 | 11 Partai Politik | 1.075.497.400 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 8.01.04 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik) |
| | | 1. Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | 1. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | 35 Ormas | 35 Ormas | 2.200.000 | 35 Ormas | 2.200.000 | 35 Ormas | 2.200.000 | 35 Ormas | 2.200.000 | 35 Ormas | 2.200.000 | 35 Ormas | 2.200.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik) |
| 8.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | | | | | 18.500.000 | | 19.500.000 | | 19.500.000 | | 19.500.000 | | 19.500.000 | | 19.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik) |
| | | 1. Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat | 1. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di | - | 1 Dokumen Ranperda narkotika | 18.500.000 | 1 Dokumen Perda | 19.500.000 | 10 Sekolah | 19.500.000 | 5 Sekolah | 19.500.000 | 15 Sekolah | 19.500.000 | 20 Sekolah | 19.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | | Daerah yang Dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | | | 608.234.950 | | 608.234.950 | | 608.234.950 | | 608.234.950 | | 608.234.950 | | 808.234.950 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik) |
| | | 1. Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan — 1. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 608.234.950 | 34 Dokumen | 608.234.950 | 34 Dokumen | 608.234.950 | 34 Dokumen | 608.234.950 | 34 Dokumen | 608.234.950 | 34 Dokumen | 808.234.950 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik) |
| | Tujuan 2 Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 1 Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.04 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | | | | 35.951.900 | | 58.974.400 | | 42.120.000 | | 56.520.000 | | 42.120.000 | | 39.240.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perdagangan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | | 1.Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting — 1. Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 7,14% | 13,33 % | 17.975.950 | 14,13% | 29.487.200 | 14,98 % | 21.060.000 | 16,03 % | 28.260.000 | 15,99 % | 21.060.000 | 15,96 % | 19.620.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| | | 2. Proporsi terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi | 0,10% | 30% | 17.975.950 | 45% | 29.487.200 | 90% | 21.060.000 | 100% | 28.260.000 | 90% | 21.060.000 | 80% | 19.620.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Perdagangan) |
| 2.09.03 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | - | | 25.030.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 50.000.000 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pangan) |
| | | 1. Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat — 1. Skor Pola Pangan Harapan | 90,22 % | - | - | 2 klp | 25.030.000 | 3 klp | 25.000.000 | 4 klp | 30.000.000 | 6 klp | 35.000.000 | 7 klp | 50.000.000 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pangan) |
| 2.09.04 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | | | | 27.500.000 | | 20.000.000 | | 40.000.000 | | 42.500.000 | | 45.000.000 | | 80.000.000 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pangan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | | 1. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | 1. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | 58% | 40% | 27.500.000 | 60% | 20.000.000 | 70% | 40.000.000 | 75% | 42.500.000 | 80% | 45.000.000 | 90% | 80.000.000 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pangan) |
| 2.09.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | | | | | 26.240.039 | | 10.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 280.000.000 | | 380.000.000 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pangan) |
| | | 1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | 1. Jumlah Cadangan Pangan | 1,7 ton | 2 ton | 26.240.039 | 12 ton | 10.000 | 12 ton | 175.000.000 | 12 ton | 175.000.000 | 12 ton | 280.000.000 | 12 ton | 380.000.000 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pangan) |
| 2.09.05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | | | | | - | | 10.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 37.000.000 | | 80.000.000 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pangan) |
| | | 1. Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | 1. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | - | - | - | 3 kali | 10.000 | 5 kali | 30.000.000 | 7 kali | 35.000.000 | 8 kali | 37.000.000 | 10 kali | 80.000.000 | Dinas Pangan dan Perikanan (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Pangan) |
| | Sasaran 2 Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 5.02.04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 883.480.906 | | 5.356.750.000 | | 5.370.000.000 | | 5.320.000.000 | | 5.430.000.000 | | 9.570.000.000 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Keuangan) |
| | | 1. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan — 1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | | 13,73 % | 441.740.453 | 13,78% | 2.678.375.000 | 14,05 % | 2.685.000.000 | 14,37 % | 2.660.000.000 | 14,73 % | 2.715.000.000 | 15,09 % | 4.785.000.000 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Keuangan) |
| | | 2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan — 1. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan | | 100% | 441.740.453 | 100% | 2.678.375.000 | 100% | 2.685.000.000 | 100% | 2.660.000.000 | 100% | 2.715.000.000 | 100% | 4.785.000.000 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Keuangan) |
| 5.02.02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 194.926.054.787 | | 174.753.768.061 | | 175.156.220.777 | | 175.578.517.171 | | 176.021.648.033 | | 176.486.653.682 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Keuangan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | | 1. Meningkatnya tata kelola anggaran | 1. Terlaksananya Penyusunan Anggaran Daerah tepat waktu | 100% | 100% | 988.500.807 | 100% | 993.443.311 | 100% | 998.410.528 | 100% | 1.003.402.580 | 100% | 1.008.419.593 | 100% | 1.013.461.691 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Keuangan) |
| | | 2. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan | 1. Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 100% | 100% | 127.500.000 | 100% | 128.137.500 | 100% | 128.778.188 | 100% | 129.422.078 | 100% | 130.069.189 | 100% | 130.719.535 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Keuangan) |
| | | 3. Meningkatnya tata kelola sistem informasi keuangan | 1. Terlaksananya pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah | 100% | 100% | 117.644.700 | 100% | 118.232.924 | 100% | 118.824.088 | 100% | 119.418.209 | 100% | 120.015.300 | 100% | 120.615.376 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Keuangan) |
| | | 4. Terlaksananya kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelola keuangan daerah | 1. Terlaksananya kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah | 100% | 100% | 193.692.409.280 | 100% | 173.513.954.326 | 100% | 173.910.207.974 | 100% | 174.326.274.304 | 100% | 174.763.143.951 | 100% | 175.221.857.080 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Keuangan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | | 5. Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan 1. Terkoordinirnya Pengelolaan Kuangan Daerah | 100% | 100% | 130.393.557 | 100% | 131.045.525 | 100% | 131.700.752 | 100% | 132.359.256 | 100% | 133.021.052 | 100% | 133.686.158 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Keuangan) |
| 5.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 1.603.813.950 | | 1.310.104.520 | | 1.316.655.043 | | 1.323.238.318 | | 1.329.854.509 | | 2.336.503.782 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Keuangan) |
| | | Meningkatnya tata kelola aset daerah 1. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | 100% | 100% | 1.603.813.950 | 100% | 1.310.104.520 | 100% | 1.316.655.043 | 100% | 1.323.238.318 | 100% | 1.329.854.509 | 100% | 2.336.503.782 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Urusan Keuangan) |
| | Sasaran 3 Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.03 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | | | | 436.652.598 | | 2.134.343.411 | | 2.332.908.251 | | 2.542.419.074 | | 2.761.380.979 | | 3.923.886.267 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | 1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | 100% | 100% | 179.656.873 | 100% | 1.082.912.247 | 100% | 1.191.203.471 | 100% | 1.310.323.816 | 100% | 1.441.356.195 | 100% | 2.513.424.005 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |
| | | | 2. Hasil Penilaian Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal BAIK | 77,54 % | 80% | 143.800.708 | 82,54% | 684.245.000 | 83,50 % | 737.800.000 | 84,75 % | 787.800.000 | 85% | 831.300.000 | 85,54 % | 872.865.000 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |
| | | | 3. Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan | 100% | 100% | 113.195.017 | 100% | 367.186.164 | 100% | 403.904.780 | 100% | 444.295.258 | 100% | 488.724.784 | 100% | 537.597.263 | Sekretariat Daerah (Perangkat Daerah Yang Mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) |

Misi 7 Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | Misi 7 : Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tujuan Terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.02 | Program Penataan Desa | | | | - | | 40.000 | | 46.000.000 | | 52.900.000 | | 60.835.000 | | 69.960.250 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| | | *Outcome* : Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas penataan desa — 1. Persentase Fasilitasi Penataan Desa | 85% | 85% | | 85% | 40.000 | 85% | 46.000.000 | 85% | 52.900.000 | 85% | 60.835.000 | 85% | 69.960.250 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| 2.13.04 | Program Administrasi Pemerintah Desa | | | | 1.745.286.250 | | 1.571.622.741 | | 1.728.785.015 | | 2.525.144.338 | | 2.805.474.295 | | 8.118.045.576 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 90% | 90% | 872.643.125 | 90% | 785.811.371 | 90% | 864.392.508 | 90% | 1.262.572.169 | 90% | 1.402.737.148 | 90% | 4.059.022.788 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |

| Kode | Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/*Impact*/*outcome*) | | Kondisi 2024 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Urusan Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | | | 2. Persentase Fasilitasi Tata kelola desa | 90% | 90% | 872.643.125 | 90% | 785.811.371 | 90% | 864.392.508 | 90% | 1.262.572.169 | 90% | 1.402.737.148 | 90% | 4.059.022.788 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| 2.13.03 | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | | | | | 1.500.000 | | 1.520.000 | | 11.500.000 | | 13.225.000 | | 15.208.750 | | 17.490.063 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) |
| | | *Outcome* : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | 1. Persentase Fasilitasi Kerja sama Desa | 85% | 85% | 1.500.000 | 85% | 1.520.000 | 85% | 11.500.000 | 85% | 13.225.000 | 85% | 15.208.750 | 85% | 17.490.063 | Perangkat Daerah yang Mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

### 3.2.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 didukung dengan Program Unggulan serta program strategis Daerah tahun 2025-2029, sehingga dirumuskan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

#### 3.2.4.1 Program Unggulan

1. Program Bantuan membajak lahan pertanian, pupuk bersubsidi, asuransi tani, Pembangunan irigasi, dan bantuan bertanam padi.
   a. Bantuan membajak lahan pertanian
      Bantuan membajak lahan pertanian bertujuan untuk mengurangi biaya produksi melalui layanan bajak oleh Pemerintah Daerah.
   b. Kuota subsidi pupuk
      Menjamin ketersediaan dan pemenuhan pupuk bagi petani
      Menjamin Pemenuhan kebutuhan dan distribusi pupuk bersubsidi serta pupuk organik kepada petani
   c. Asuransi Tani
      Asuransi tani adalah premi yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi usaha petani.
   d. Pembangunan Irigasi
      Memastikan ketersediaan jaringan irigasi dalam mendukung usaha pertanian.
   e. Program bantuan bertanam padi.
      Merupakan bantuan biaya menanam padi kepada petani sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
2. Program jaminan Kesehatan dan berobat gratis bagi Masyarakat (Tanah Datar Sehat, Merdeka Berobat)
   Tanah Datar Sehat, Merdeka Berobat merupakan program yang bertujuan untuk Memastikan setiap masyarakat Tanah Datar mendapatkan jaminan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan.
3. Program Satu Rumah Satu Hafizh/Hafizah, kesejahteraan Guru Surau/Tahfidz/TPA, serta optimalkan fungsi surau sebagai tempat belajar agama, adat, budaya dan silek
   a. Program Satu Rumah Satu Hafizh/Hafizah
      Gerakan untuk menghasilkan satu hafizh/hafizah dalam setiap rumah tangga
   b. Kesejahteraan Guru Surau/Tahfidz/TPA
      Peningkatan kesejahteraan guru TPA dan Guru Tahfidz adalah pemberian insentif kepada guru TPA dan Tahfidz
   c. Optimalkan Fungsi Surau Sebagai Tempat Belajar Agama, Adat, Budaya dan Silek
      Mengembalikan fungsi surau tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan dan pengembangan budaya masyarakat minangkabau.
4. Program Peningkatan kesejahteraan dan Kualitas ASN
   a. Kesejahteraan ASN
      Meningkatkan kesejahteraan ASN merupakan upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup ASN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
   b. Kualitas ASN
      Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN.
5. Optimalkan Fungsi niniak mamak, ulama, bundo kanduang untuk mewujudkan ABS-SBK dan melestarikan kebudayaan serta Mengupayakan Peningkatan Biaya Operasional KAN, LKAAM, bundo kanduang dan organisasi keagamaan.
   a. Mengoptimalkan fungsi niniak mamak, ulama, bundo kanduang untuk mewujudkan ABS-SBK dan melestarikan kebudayaan

Meningkatkan peran dan tanggung jawab niniak mamak, ulama, bundo kanduang dalam membimbing masyarakat sesuai dengan konsep ABS-SBK

b. Peningkatan Biaya Operasional KAN, LKAAM, bundo kanduang dan organisasi keagamaan
   Peningkatan biaya operasional untuk KAN. LKAAM. Bundo Kanduang dan Organisasi Keagamaan adalah kenaikan biaya operasional lembaga dalam rangka mendukung fungsinya.

6. Program Satu Nagari Satu Event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari menuju "*One Village One Product*"
   Satu Nagari Satu Event
   Satu Nagari Satu Event adalah event Pariwisata dan Olahraga berbasis kearifan dan potensi masing-masing Nagari, untuk meningkatkan perekonomian di Nagari dan mendukung produk lokal.
7. Membangun Pusat Kreativitas Anak Muda (*creative hub*) dan Sarana Olahraga di Nagari-nagari.
   Pusat Kreativitas Anak Muda atau *Creative hub* adalah sebuah ruang yang dirancang untuk mendukung kreatifitas, inovasi dan kolaborasi anak muda dalam berbagai bidang seperti seni, olahraga, teknologi, bisnis dan budaya untuk memberdayakan generasi muda, menciptakan sumber pendapatan baru dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
8. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan.
   a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan kabupaten
      Meningkatkan kemantapan jalan kabupaten melalui kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan pelebaran jalan
   b. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan Provinsi dan Nasional dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk peningkatan kemantapan jalan nasional dan provinsi melalui kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan pelebaran jalan.
9. Meningkatkan Investasi dan Peningkatan Kualitas Usaha Mikro untuk Membuka Lapangan Pekerjaan
   a. Peningkatan Investasi
      Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan sektor swasta, maupun masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan memperluas investasi di daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja
   b. Peningkatan Kualitas Usaha Mikro
      Peningkatan kapasitas dan daya saing Usaha Mikro melalui pelatihan, digitalisasi, inovasi produk, serta peningkatan standar kualitas
10. Mewujudkan Tanah Datar Bersih *Zero Waste* dengan melaksanakan Program Satu Nagari Satu Bank Sampah, Menghidupkan Gotong Royong dan Gerakan Toilet Bersih di Rumah Ibadah, Sekolah dan Fasilitas Umum.
    a. Satu Nagari Satu Bank Sampah
       Ketersediaan lembaga/program di level nagari yang memiliki tujuan untuk mengelola dan mengolah sampah.
    b. Menghidupkan Gotong Royong
       Gerakan untuk membangkitkan kembali semangat kebersamaan dan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai urusan/ permasalahan yang menyangkut kepentingan umum.
    c. Gerakan Toilet Bersih di Rumah Ibadah, Sekolah dan Fasilitas Umum
       Gerakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, kesehatan dan mendukung pariwisata.

3.2.4.2 Program Strategis

1. Pembangunan *Sport Center*
   Penyediaan fasilitas olahraga untuk event olahraga berstandar nasional dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Tanah Datar akan fasilitas olahraga terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas lainnya.
2. Revitalisasi Benteng *Van Der Capellen* yang difungsikan sebagai museum.
   Kegiatan ini direncanakan untuk mengembalikan fungsi Benteng *Van Der Capellen* sebagai museum yang digunakan sebagai salah satu ikon pariwisata Kabupaten Tanah Datar.
3. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dalam mendukung program unggulan satu nagari satu bank sampah.
   Sebagai pendukung pelaksanaan Program Tanah Datar Bersih maka dibutuhkan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang berfungsi mengurangi kebutuhan lahan TPA dan meningkatkan kualitas lingkungan.
4. Revitalisasi Pasar Batusangkar
   Revitalisasi Pasar Batusangkar dilaksanakan untuk meningkatkan atau menghidupkan kembali pasar rakyat dengan tujuan untuk membuat pasar rakyat menjadi lebih modern, bersih dan menarik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung dan daya saing yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan pendapatan para pedagang. Hal ini dilakukan dengan intervensi sebagai berikut:
   1) Modernisasi Pasar melalui pembenahan bangunan pasar dan peningkatan kualitas fasilitas pendukung, seperti toilet, drainase dan sanitasi pasar, serta fasilitas pendukung lainnya.
   2) Revitalisasi sosial budaya melalui upaya mempromosikan nilai-nilai sosial budaya pasar rakyat.
   3) Peningkatan daya saing pasar rakyat melalui peningkatan kualitas produk, promosi dan kemitraan.

5. Kapal Wisata/Restoran Terapung di Danau Singkarak untuk peningkatan wisata
   Kapal wisata merupakan kapal yang dipakai secara khusus untuk rekreasi yang nanti pengunjung dapat menikmati keindahan danau singkarak utuh dan menikmati kuliner khas Tanah Datar.
6. Pembangunan Industri pengolahan produk pertanian (pakan ternak, tepung mocaf /*Modified Cassava Flour*) untuk hilirisasi produk pertanian
7. Pembangunan *Fly Over* RSUD Dr. Ali Hanafiah. SM
   RSUD Dr. Ali Hanafiah. SM merupakan rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Tanah Datar. Ketersediaan akses jalan yang cepat. aman dan bebas hambatan menjadi kebutuhan mendesak, terutama dari pusat kota Batusangkar. Akses *Fly Over* akan memperlancar mobilisasi pasien baik melalui ambulans maupun kendaran pribadi sehingga memperkuat posisi RSUD sebagai rumah sakit regional unggulan.

# BAB IV
# PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

## 4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam perencanaan kinerja, program Perangkat Daerah semestinya berkorelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu, program program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif disertai target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif setiap bidang urusan pemerintahan Tahun 2025-2030 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilengkapi dengan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

| NO | PERANGKAT DAERAH | PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 504.920.506.616 | 447.195.336.005 | 477.376.410.091 | 486.912.604.293 | 533.592.400.000 | 552.589.900.000 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 160.786.030.898 | 179.176.348.249 | 183.327.141.006 | 187.830.151.844 | 200.049.236.611 | 223.112.049.431 |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah | 186.274.704.454 | 118.235.900.977 | 160.600.618.997 | 123.495.033.853 | 127.249.532.004 | 135.294.522.644 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | 24.017.107.046 | 46.405.000.000 | 56.428.000.000 | 83.556.061.508 | 76.368.562.598 | 83.805.747.830 |
| 5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 12.181.878.910 | 22.745.349.678 | 22.069.810.812 | 22.915.381.434 | 31.883.503.857 | 43.028.724.864 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 9.838.717.251 | 10.183.060.798 | 11.507.595.561 | 12.872.429.389 | 14.386.998.013 | 17.999.170.068 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4.538.871.958 | 3.860.468.014 | 5.577.353.392 | 6.261.461.338 | 7.039.254.600 | 9.925.156.614 |
| 8 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 20.851.431.976 | 20.861.500.000 | 20.879.700.000 | 20.894.900.000 | 20.911.000.000 | 33.247.250.000 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 6.271.883.172 | 5.750.802.358 | 7.395.499.879 | 8.827.000.000 | 9.281.000.000 | 12.169.500.000 |
| 10 | Dinas Pangan dan Perikanan | 4.380.406.060 | 4.192.902.360 | 5.053.041.829 | 5.323.426.272 | 5.742.224.813 | 7.254.969.019 |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.221.594.912 | 4.421.594.912 | 4.821.594.912 | 4.821.594.912 | 5.221.594.912 | 6.916.452.912 |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, | 14.075.192.302 | 13.224.094.726 | 14.960.814.627 | 19.469.069.338 | 22.817.408.045 | 36.495.984.889 |

| NO | PERANGKAT DAERAH | PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | |
| 13 | Dinas Perhubungan | 17.872.813.039 | 17.530.955.037 | 20.552.309.971 | 21.124.333.726 | 21.863.430.953 | 27.956.602.501 |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5.352.931.218 | 4.920.743.936 | 6.175.000.000 | 6.431.500.000 | 6.845.500.000 | 9.567.000.000 |
| 15 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan | 5.185.466.587 | 4.446.440.174 | 6.099.795.361 | 6.399.326.514 | 5.998.784.992 | 6.731.128.744 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4.980.700.742 | 4.530.718.637 | 7.317.668.690 | 7.626.000.000 | 7.797.000.000 | 8.814.000.000 |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3.762.314.249 | 3.360.327.763 | 4.950.311.051 | 5.509.581.374 | 6.138.044.716 | 6.845.369.538 |
| 18 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 9.785.020.446 | 16.946.223.600 | 17.892.279.500 | 24.162.000.000 | 26.007.000.000 | 35.732.000.000 |
| 19 | Dinas Pertanian | 23.249.898.607 | 48.246.000.000 | 31.325.000.000 | 40.602.000.000 | 46.124.000.000 | 55.476.000.000 |
| 20 | Sekretariat Daerah | 42.465.962.715 | 50.768.088.903 | 53.381.532.127 | 53.757.758.944 | 57.090.215.264 | 63.384.831.907 |
| 21 | Sekretariat DPRD | 34.031.725.689 | 35.733.311.974 | 37.519.977.572 | 39.395.976.451 | 41.365.775.274 | 49.434.064.039 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 7.513.157.914 | 7.131.160.016 | 7.835.556.190 | 8.111.360.070 | 8.264.744.336 | 9.833.467.029 |
| 23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 214.270.814.910 | 194.286.135.886 | 186.771.372.262 | 187.551.323.858 | 188.257.688.498 | 190.966.644.776 |
| 24 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 7.338.648.625 | 12.991.273.656 | 13.233.298.915 | 13.350.003.733 | 13.689.974.562 | 18.986.686.961 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4.951.351.874 | 5.025.947.274 | 6.783.992.034 | 7.619.943.447 | 8.207.154.802 | 11.634.145.792 |
| 26 | Inspektorat Daerah | 8.955.248.825 | 7.880.218.270 | 12.675.140.584 | 18.699.709.544 | 20.569.680.498 | 26.626.648.548 |

| NO | PERANGKAT DAERAH | PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 27 | Kecamatan X Koto | 2.028.167.709 | 1.725.561.490 | 2.642.014.830 | 2.652.014.830 | 2.632.014.830 | 3.652.014.830 |
| 28 | Kecamatan Batipuh | 1.723.469.000 | 1.803.255.084 | 1.986.552.078 | 2.030.552.078 | 1.998.752.078 | 3.020.752.078 |
| 29 | Kecamatan Rambatan | 1.627.789.171 | 1.610.248.050 | 1.943.844.646 | 2.098.182.000 | 2.082.882.000 | 3.100.050.888 |
| 30 | Kecamatan Lima Kaum | 1.925.538.494 | 1.506.412.096 | 2.108.049.594 | 2.206.619.594 | 2.035.217.594 | 3.076.717.594 |
| 31 | Kecamatan Tanjung Emas | 1.768.276.442 | 1.427.611.650 | 1.816.407.165 | 1.895.986.683 | 1.946.121.780 | 2.980.547.879 |
| 32 | Kecamatan Lintau Buo | 1.619.531.808 | 1.739.287.964 | 3.082.000.000 | 3.178.500.000 | 3.267.645.000 | 4.328.857.900 |
| 33 | Kecamatan Sungayang | 1.562.577.180 | 1.494.246.930 | 2.580.550.000 | 2.359.150.000 | 2.203.550.000 | 3.239.150.000 |
| 34 | Kecamatan Sungai Tarab | 1.721.371.277 | 1.706.871.032 | 2.531.500.000 | 2.251.500.000 | 2.207.500.000 | 3.207.500.000 |
| 35 | Kecamatan Pariangan | 1.839.517.134 | 2.686.659.306 | 3.693.170.461 | 3.855.037.750 | 4.871.391.655 | 5.627.762.275 |
| 36 | Kecamatan Salimpaung | 1.800.445.890 | 1.640.868.754 | 2.374.268.190 | 2.374.768.190 | 2.376.768.190 | 3.395.768.190 |
| 37 | Kecamatan Padang Ganting | 1.629.733.961 | 1.443.765.853 | 1.799.339.265 | 2.159.207.117 | 2.591.048.541 | 4.109.258.249 |
| 38 | Kecamatan Tanjuang Baru | 1.686.457.244 | 1.546.434.952 | 2.330.792.359 | 2.443.248.500 | 2.539.237.925 | 3.666.153.000 |
| 39 | Kecamatan Lintau Buo Utara | 1.735.816.345 | 1.543.562.121 | 2.555.005.000 | 2.749.600.000 | 2.962.550.000 | 4.266.650.000 |
| 40 | Kecamatan Batipuah Selatan | 1.916.295.905 | 1.948.275.283 | 2.407.770.148 | 2.593.228.656 | 2.623.132.516 | 3.776.133.491 |
| 41 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4.722.627.371 | 4.723.627.371 | 4.723.627.371 | 5.958.427.091 | 31.787.129.971 | 6.823.627.371 |
| Jumlah | | 1.371.381.995.926 | 1.318.597.091.138 | 1.420.785.706.482 | 1.464.325.954.340 | 1.580.886.651.436 | 1.742.098.961.858 |

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2030

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Urusan Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 435.242.824.242 | | 378.869.261.583 | | 394.532.710.091 | | 402.423.364.293 | | 438.104.500.000 | | 440.136.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pendidikan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 435.242.824.242 | 100% | 378.869.261.583 | 100% | 394.532.710.091 | 100% | 402.423.364.293 | 100% | 438.104.500.000 | 100% | 440.136.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pendidikan |
| 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan | | | | 68.928.092.374 | | 66.311.808.022 | | 81.843.700.000 | | 83.443.240.000 | | 94.387.900.000 | | 111.309.400.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pendidikan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS) | 68,55% | 55,84% | 9.145.108.316 | 58,88% | 8.019.230.000 | 61,92% | 10.138.200.000 | 64,96% | 12.165.840.000 | 68,00% | 15.780.200.000 | 71,04% | 18.859.200.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pendidikan |
| | | Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) | 87,78% | 98,02% | 58.294.884.058 | 98,47% | 56.671.858.022 | 98,91% | 69.669.400.000 | 99,35% | 68.834.800.000 | 99,80% | 75.133.600.000 | 100,00% | 86.963.100.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pendidikan |
| | | Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (APS) | 29,15% | 44,87% | 1.488.100.000 | 53,08% | 1.620.720.000 | 59,57% | 2.036.100.000 | 66,06% | 2.442.600.000 | 72,55% | 3.474.100.000 | 73,31% | 5.487.100.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pendidikan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.03 | Program Pengembangan Kurikulum | | | | 33.890.000 | | 80.030.000 | | 136.000.000 | | 149.000.000 | | 160.000.000 | | 174.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pendidikan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | 1. Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal | 9,92% | 9,92% | 33.890.000 | 27,55% | 80.030.000 | 49,59% | 136.000.000 | 52,07% | 149.000.000 | 82,37% | 160.000.000 | 100,00% | 174.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pendidikan |
| 1.01.04 | Program Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | - | | - | | 115.000.000 | | 125.000.000 | | 140.000.000 | | 145.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pendidikan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | 1. Indeks Pemerataan Guru | | | ' | | ' | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 115.000.000 | | 120.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pendidikan |
| | | 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik | 60% | | ' | 70% | ' | 80% | 15.000.000 | 90% | 15.000.000 | 95% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pendidikan |
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02 | Urusan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 101.281.380.786 | | 104.319.822.210 | | 107.449.416.876 | | 112.385.977.594 | | 117.556.289.043 | | 122.971.646.443 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 101.281.380.786 | 100% | 104.319.822.210 | 100% | 107.449.416.876 | 100% | 112.385.977.594 | 100% | 117.556.289.043 | 100% | 122.971.646.443 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | 57.362.497.862 | | 72.535.872.755 | | 73.551.070.846 | | 73.042.747.648 | | 78.038.747.648 | | 92.611.429.751 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | 1. Angka Kematian Ibu (AKI) | 7 orang | 6 orang | 17.208.749.359 | 5 orang | 22.135.942.740 | 4 orang | 22.437.981.881 | 3 orang | 22.644.436.442 | 2 orang | 24.394.436.442 | 1 orang | 28.790.371.249 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan |
| | | 2. Prelevansi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita | 18,5 | 6 | 17.208.749.359 | 15,2 | 22.135.942.740 | 14,4 | 22.425.981.881 | 13,6 | 22.644.436.442 | 12,8 | 24.394.436.442 | 12 | 28.790.371.249 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan |
| | | 3. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional | 95,98% | 98% | 22.944.999.145 | 98,40% | 28.263.987.276 | 98,80% | 28.687.107.085 | 99,20% | 27.753.874.765 | 99,60% | 29.249.874.765 | 100% | 35.030.687.254 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | - | | 44.000.000 | | 50.000.000 | | 56.000.000 | | 60.000.000 | | 66.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | 1. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan | - | - | - | 100% | 44.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 56.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 66.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.04 | Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | | | | 516.375.000 | | 553.329.400 | | 553.329.400 | | 573.329.400 | | 2.573.329.400 | | 4.593.329.400 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi. alat kesehatan. dan makanan minuman | 1. Persentase Cakupan Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan. dan Makanan Minuman | 210 sarana | 210 sarana | 516.375.000 | 215 sarana | 553.329.400 | 215 sarana | 553.329.400 | 220 sarana | 573.329.400 | 220 sarana | 2.573.329.400 | 225 sarana | 4.593.329.400 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | | | | 1.625.777.250 | | 1.723.323.885 | | 1.723.323.885 | | 1.772.097.203 | | 1.820.870.520 | | 2.869.643.838 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 1. Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan | 100% | 100% | 1.625.777.250 | 100% | 1.723.323.885 | 100% | 1.723.323.885 | 100% | 1.772.097.203 | 100% | 1.820.870.520 | 100% | 2.869.643.838 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 1.03.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD) | | | | 186.174.704.454 | | 118.235.900.977 | | 160.600.618.997 | | 123.495.033.853 | | 127.249.532.004 | | 135.294.522.644 | RSUD |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase capaian SPM | 96,10% | 100% | 111.764.822.672 | 100% | 70.941.540.586 | 100% | 92.360.371.398 | 100% | 73.807.578.826 | 100% | 76.349.719.202 | 100% | 79.176.713.586 | RSUD |
| | | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat | 87,4 | 88 | 37.254.940.891 | 88,6 | 23.647.180.195 | 89,2 | 34.120.123.799 | 89,8 | 24.843.727.513 | 90,4 | 25.449.906.401 | 91 | 28.058.904.529 | RSUD |
| | | 3. Prediket Akuntabilitas Kinerja | 71,2 | 71,4 | 37.154.940.891 | 71,6 | 23.547.180.195 | 71,8 | 34.020.123.799 | 72 | 24.743.727.513 | 72,2 | 25.349.906.401 | 72,4 | 27.958.904.529 | RSUD |
| | | 4. Kinerja Keuangan BLUD | <1 | <1 | 100.000.000 | >1 | 100.000.000 | >1 | 100.000.000 | >1 | 100.000.000 | >1 | 100.000.000 | >1 | 100.000.000 | RSUD |
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 1.03 | Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 9.149.380.874 | | 9.150.000.000 | | 9.150.000.000 | | 9.175.000.000 | | 9.175.000.000 | | 10.175.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 9.149.380.874 | 100% | 9.150.000.000 | 100% | 9.150.000.000 | 100% | 9.175.000.000 | 100% | 9.175.000.000 | 100% | 10.175.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | | 2.887.965.100 | | 2.950.000.000 | | 2.953.000.000 | | 2.963.000.000 | | 4.626.000.000 | | 6.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | 1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir | - | 1,50% | 340.471.800 | 2,50% | 340.000.000 | 3,75% | 340.000.000 | 4,75% | 350.000.000 | 6,25% | 700.000.000 | 8,25% | 1.700.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob | - | 1,30% | 313.000.000 | 2,30% | 310.000.000 | 3,55% | 313.000.000 | 4,55% | 313.000.000 | 6,05% | 626.000.000 | 8,05% | 1.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Penataan Ruang |
| | | 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas | 58,74% | 60,74% | 2.234.493.300 | 62,99% | 2.300.000.000 | 65,49% | 2.300.000.000 | 68,24% | 2.300.000.000 | 71,24% | 3.300.000.000 | 74,49% | 3.300.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | | 299.650.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 350.000.000 | | 1.500.000.000 | | 3.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | 1. Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota | 76,55% | 76,55% | 299.650.000 | 82% | 330.000.000 | 84% | 330.000.000 | 86% | 350.000.000 | 88% | 1.500.000.000 | 90% | 3.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.05 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | | | | 6.191.640.000 | | 6.200.000.000 | | 7.300.000.000 | | 10.268.061.508 | | 14.647.562.598 | | 19.537.125.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | 1. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman} | 74,84% | 71,90% | 6.191.640.000 | 86% | 6.200.000.000 | 88,00% | 7.300.000.000 | 90% | 10.268.061.508 | 92% | 14.647.562.598 | 94% | 19.537.125.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.06 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | | | | 292.164.400 | | 300.000.000 | | 310.000.000 | | 310.000.000 | | 2.500.000.000 | | 3.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | 1. Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik | 80% | 83% | 292.164.400 | 83% | 300.000.000 | 83% | 310.000.000 | 83% | 310.000.000 | 83% | 2.500.000.000 | 83% | 3.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.08 | Program Penataan Bangunan Gedung | | | | 2.222.830.700 | | 1.300.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 3.000.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas bangunan gedung | 1. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik | 85% | 100% | 2.222.830.700 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 1.500.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.09 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | | | | - | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Peningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | 1. Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.10 | Program Penyelenggaraan Jalan | | | | 2.280.000.000 | | 25.500.000.000 | | 34.150.000.000 | | 58.050.000.000 | | 40.980.000.000 | | 36.320.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman | 1. Tingkat Kemantapan Jalan | 69,89% | 69,99% | 2.280.000.000 | 71,46% | 25.500.000.000 | 73,89% | 34.150.000.000 | 76,29% | 58.050.000.000 | 78,89% | 40.980.000.000 | 80,89% | 36.320.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.11 | Program Pengembangan Jasa Kontruksi | | | | 2.746.948 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Penataan Ruang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | 1. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | | 100% | 2.746.948 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.12 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | 391.159.024 | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 148.622.830 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | 1. Persentase Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan. penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang | 93% | 93% | 391.159.024 | 93% | 100.000.000 | 93% | 110.000.000 | 93% | 110.000.000 | 93% | 110.000.000 | 93% | 148.622.830 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 1 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04 | Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 1.04.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 4.580.754.571 | | 5.129.732.928 | | 5.642.706.221 | | 6.206.976.843 | | 6.827.674.527 | | 7.510.441.980 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 4.580.754.571 | 100% | 5.129.732.928 | 100% | 5.642.706.221 | 100% | 6.206.976.843 | 100% | 6.827.674.527 | 100% | 7.510.441.980 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.02 | Program Pengembangan Perumahan | | | | 63.250.000 | | 1.070.500.000 | | 1.078.000.000 | | 1.140.500.000 | | 2.143.000.000 | | 1.245.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | 1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni | 100% | 100% | 46.500.000 | 100% | 843.000.000 | 100% | 848.000.000 | 100% | 903.000.000 | 100% | 1.903.000.000 | 100% | 903.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh | 100% | 100% | 8.000.000 | 100% | 127.500.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 137.500.000 | 100% | 140.000.000 | 100% | 142.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 1 laporan | 1 laporan | 8.750.000 | 1 laporan | 50.000.000 | 1 laporan | 50.000.000 | 1 laporan | 50.000.000 | 1 laporan | 50.000.000 | 1 laporan | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | 4. Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan | 1 dokumen | 1 dokumen | - | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.03 | Program Kawasan Permukiman | | | | 8.500.000 | | 1.035.000.000 | | 1.407.000.000 | | 1.422.700.000 | | 1.692.470.000 | | 2.000.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | 1. Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | 1,93% | 1,93% | 8.500.000 | 4,74% | 1.035.000.000 | 6,42% | 1.407.000.000 | 10,91% | 1.422.700.000 | 13,62% | 1.692.470.000 | 15,75% | 2.000.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 1.04.04 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | - | | 180.000.000 | | 1.030.000.000 | | 1.080.000.000 | | 1.330.000.000 | | 1.550.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | | 5 unit | - | 5 unit | 150.000.000 | 5 unit | 1.000.000.000 | 5 unit | 1.050.000.000 | 5 unit | 1.300.000.000 | 5 unit | 1.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | 2. Jumlah orang yang mengikuti Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh | | | - | 180 orang | 30.000.000 | 180 orang | 30.000.000 | 180 orang | 30.000.000 | 180 orang | 30.000.000 | 180 orang | 50.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.05 | Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | | | | 15.000.000 | | 105.000.000 | | 705.000.000 | | 805.000.000 | | 1.105.000.000 | | 1.705.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Meningkatnya Penyediaan PSU Perukiman | 1. Persentase Pemukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum) | 12,97% | 21,26% | 15.000.000 | 22,62% | 105.000.000 | 24,83% | 705.000.000 | 26,08% | 805.000.000 | 26,98% | 1.105.000.000 | 31,29% | 1.705.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.05 | Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan layanan administrasi yang tertata | | | 7.194.443.208 | | 6.245.656.798 | | 9.372.735.709 | | 9.841.372.494 | | 10.333.441.118 | | 12.850.113.173 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 7.194.443.208 | 100% | 6.245.656.798 | 100% | 9.372.735.709 | 100% | 9.841.372.494 | 100% | 10.333.441.118 | 100% | 12.850.113.173 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.02 | Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum | | | | 926.197.043 | | 1.326.514.000 | | 122.359.852 | | 1.011.056.895 | | 1.028.556.895 | | 1.119.056.895 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | 1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100% | 100% | 872.197.043 | 100% | 1.260.188.300 | 100% | 43.859.852 | 100% | 921.056.895 | 100% | 926.056.895 | 100% | 941.056.895 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | 2. Meningkatnya panganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 1. Persentase Penyelenggaraan Tribumtransmas | 100% | 100% | 16.500.000 | 100% | 19.897.710 | 100% | 26.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 48.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | 3. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | 1. Persentase cakupan perlindungan masyarakat | 100% | 100% | 35.000.000 | 100% | 39.795.420 | 100% | 45.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | 4. Meningkatnya kapasitas SDM PPNS | 1. Persentase PPNS yang ditingkat kompetensinya | 100% | 100% | 2.500.000 | 100% | 6.632.570 | 100% | 7.500.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 12.500.000 | 100% | 30.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.03 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.579.820.249 | | 2.952.752.307 | | 4.313.627.325 | | 4.744.990.058 | | 5.219.489.064 | | 6.741.437.970 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 3.579.820.249 | 100% | 2.952.752.307 | 100% | 4.313.627.325 | 100% | 4.744.990.058 | 100% | 5.219.489.064 | 100% | 6.741.437.970 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penanggulangan Bencana | | | | 959.051.709 | | 907.715.707 | | 1.263.726.067 | | 1.516.471.280 | | 1.819.765.536 | | 3.183.718.644 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas layanan pencengahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | | 100% | 8.515.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 189.558.910 | 100% | 227.470.692 | 100% | 272.964.830 | 100% | 327.557.797 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | 2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat | 1. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | | 100% | 537.607.700 | 100% | 521.020.000 | 100% | 665.931.517 | 100% | 829.117.820 | 100% | 954.941.384 | 100% | 1.545.929.661 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 3. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | 1. Persentase Penanganan Pasca Bencana | | 100% | 412.929.009 | 100% | 376.695.707 | 100% | 408.235.640 | 100% | 459.882.768 | 100% | 591.859.322 | 100% | 1.310.231.186 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.04 | Program Pencegahan Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | | | | 1.718.077.000 | | 2.610.890.000 | | 2.012.500.000 | | 2.020.000.000 | | 3.025.000.000 | | 4.030.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran | 1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran | 100% | 100% | 2.500.000 | 100% | 7.500.000 | 100% | 12.500.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 30.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| | 2. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100% | 100% | 1.715.577.000 | 100% | 2.603.390.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 2.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | 100% | 4.000.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.06 | Urusan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 1.06.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | | | 4.665.394.368 | | 4.670.000.000 | | 4.680.000.000 | | 4.690.000.000 | | 4.700.000.000 | | 5.700.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 4.665.394.368 | 100% | 4.670.000.000 | 100% | 4.680.000.000 | 100% | 4.690.000.000 | 100% | 4.700.000.000 | 100% | 5.700.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.02 | Program pemberdayaan sosial | | | | 64.500.000 | | 65.000.000 | | 66.000.000 | | 67.000.000 | | 68.000.000 | | 69.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pemberdayaan sosial | 1. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Daru rat dan Pasca Bencana Sesuai Standar | 100% | 100% | 22.575.000 | 100% | 22.750.000 | 100% | 23.100.000 | 100% | 23.450.000 | 100% | 23.800.000 | 100% | 24.150.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 2. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | 100% | 100% | 22.575.000 | 100% | 22.750.000 | 100% | 23.100.000 | 100% | 23.450.000 | 100% | 23.800.000 | 100% | 24.150.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | | 3. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial | 100% | 100% | 19.350.000 | 100% | 19.500.000 | 100% | 19.800.000 | 100% | 20.100.000 | 100% | 20.400.000 | 100% | 20.700.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.04 | Program rehabilitasi sosial | | | | 14.456.445.108 | | 14.457.000.000 | | 14.458.000.000 | | 14.459.000.000 | | 14.460.000.000 | | 24.460.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya rehabilitasi sosial | 1.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 30% | 30% | 2.891.289.022 | 30% | 2.891.400.000 | 30% | 2.891.600.000 | 30% | 2.891.800.000 | 30% | 2.892.000.000 | 30% | 4.892.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | | 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 30% | 30% | 2.891.289.022 | 30% | 2.891.400.000 | 30% | 2.891.600.000 | 30% | 2.891.800.000 | 30% | 2.892.000.000 | 30% | 4.892.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarn ya | 30% | 30% | 2.891.289.022 | 30% | 2.891.400.000 | 30% | 2.891.600.000 | 30% | 2.891.800.000 | 30% | 2.892.000.000 | 30% | 4.892.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | | 4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 0% | 2% | 2.891.289.022 | 5% | 2.891.400.000 | 10% | 2.891.600.000 | 20% | 2.891.800.000 | 20% | 2.892.000.000 | 20% | 4.892.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | | 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | 30% | 0,3 | 2.891.289.022 | 30% | 2.891.400.000 | 30% | 2.891.600.000 | 30% | 2.891.800.000 | 30% | 2.892.000.000 | 30% | 4.892.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.05 | Program perlindungan dan jaminan sosial | | | | 620.473.500 | | 621.000.000 | | 622.000.000 | | 623.000.000 | | 624.000.000 | | 1.556.250.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial | 1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar | 100% | 100% | 217.165.725 | 100% | 217.350.000 | 100% | 217.700.000 | 100% | 218.050.000 | 100% | 218.400.000 | 100% | 518.750.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi | 100% | 100% | 217.165.725 | 100% | 217.350.000 | 100% | 217.700.000 | 100% | 218.050.000 | 100% | 218.400.000 | 100% | 518.750.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | | 3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data fakir miskin | 100% | 100% | 186.142.050 | 100% | 186.300.000 | 100% | 186.600.000 | 100% | 186.900.000 | 100% | 187.200.000 | 100% | 518.750.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.06 | Program penanganan bencana | | | | 84.000.000 | | 85.000.000 | | 86.000.000 | | 87.000.000 | | 88.000.000 | | 89.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | 1. Persentase Korban Bencana Alam. Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | 100% | 100% | 42.000.000 | 100% | 42.500.000 | 100% | 43.000.000 | 100% | 43.500.000 | 100% | 44.000.000 | 100% | 44.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | | 2. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial | 100% | 100% | 42.000.000 | 100% | 42.500.000 | 100% | 43.000.000 | 100% | 43.500.000 | 100% | 44.000.000 | 100% | 44.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 1.06.07 | Program pengelolaan taman makam pahlawan | | | | 28.000.000 | | 29.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan | 1. Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | 100% | 100% | 28.000.000 | 100% | 29.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Sosial |
| 1.08 | Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.08.02 | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan | | | | 330.589.000 | | 331.000.000 | | 332.000.000 | | 333.000.000 | | 334.000.000 | | 535.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembedeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | 1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 22% | 22% | 165.294.500 | 100% | 165.500.000 | 100% | 166.000.000 | 100% | 166.500.000 | 100% | 167.000.000 | 100% | 267.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembedeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | 71,23% | 71,23% | 165.294.500 | 100% | 165.500.000 | 100% | 166.000.000 | 100% | 166.500.000 | 100% | 167.000.000 | 100% | 267.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembedeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.08.02 | Program perlindungan Perempuan | | | | 78.547.200 | | 79.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembedeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | 1. Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | | 100% | 78.547.200 | 100% | 79.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 80.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembedeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.08.05 | Program pengelolaan sistem data gender dan anak | | | | 7.600.000 | | 7.700.000 | | 7.800.000 | | 7.900.000 | | 8.000.000 | | 8.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembedeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender. pemenuhan hak. serta perlindungan perempuan dan anak | 1. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sestiai Standar | | 100% | 7.600.000 | 100% | 7.700.000 | 100% | 7.800.000 | 100% | 7.900.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 8.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembedeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 1.08.06 | Program pemenuhan hak anak (PHA) | | | | 47.720.000 | | 47.800.000 | | 47.900.000 | | 48.000.000 | | 49.000.000 | | 50.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembedeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | 1. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | 100% | 100% | 47.720.000 | 100% | 47.800.000 | 100% | 47.900.000 | 100% | 48.000.000 | 100% | 49.000.000 | 100% | 50.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembedeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.08.07 | Program perlindungan khusus anak | | | | 468.162.800 | | 469.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | | 470.000.000 | | 670.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembedeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. eksploitasi. penelantaran. perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | 1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khususyang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100% | 100% | 234.081.400 | 100% | 234.500.000 | 100% | 235.000.000 | 100% | 235.000.000 | 100% | 235.000.000 | 100% | 335.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembedeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | 52,3 | 76,54 | 234.081.400 | 77,04 | 234.500.000 | 77,54 | 235.000.000 | 78,04 | 235.000.000 | 78,54 | 235.000.000 | 79,04 | 335.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembedeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07 | Urusan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.02 | Program Perencanaan Tenaga Kerja | | | | - | | - | | 525.000.000 | | 525.000.000 | | 600.000.000 | | 700.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Tenaga Kerja |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Terkelolanya informasi tenaga kerja | 1. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja | 0,32% | 0,32% | - | 0,32% | - | 0,37% | 525.000.000 | 0,37% | 525.000.000 | 0,42% | 600.000.000 | 0,42% | 700.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Tenaga Kerja |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | 558.217.750 | | 324.043.750 | | 372.650.313 | | 700.000.000 | | 750.000.000 | | 1.000.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Tenaga Kerja |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | 1. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya | 2,24% | 2,27% | 558.217.750 | 2,29% | 324.043.750 | 2,31% | 372.650.313 | 2,35% | 700.000.000 | 2,37% | 750.000.000 | 2,49% | 1.000.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Tenaga Kerja |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja | | | | 52.876.800 | | 65.376.800 | | 75.183.320 | | 130.000.000 | | 135.000.000 | | 250.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Tenaga Kerja |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya penempatan tenaga kerja | 1. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | 11,55% | 12,25% | 52.876.800 | 12,75% | 65.376.800 | 13,25% | 75.183.320 | 13,75% | 130.000.000 | 14,25% | 135.000.000 | 14,75% | 250.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Tenaga Kerja |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.07.05 | Program Hubungan Industrial | | | | 4.250.000 | | 8.500.000 | | 10.625.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 400.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Tenaga Kerja |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi | 1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial | 0 | 1 Perusahaan | 4.250.000 | 0 | 8.500.000 | 1 Perusahaan | 10.625.000 | 2 Perusahaan | 300.000.000 | 4 Perusahaan | 300.000.000 | 4 Perusahaan | 400.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Tenaga Kerja |
| 2.09 | Urusan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 2.09.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.915.617.421 | | 3.748.223.560 | | 4.365.617.421 | | 4.590.617.421 | | 4.815.617.421 | | 6.040.617.421 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 3.915.617.421 | 100% | 3.748.223.560 | 100% | 4.365.617.421 | 100% | 4.590.617.421 | 100% | 4.815.617.421 | 100% | 6.040.617.421 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | | | | 26.240.039 | | 10.000 | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | 280.000.000 | | 380.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | 1. Jumlah Cadangan Pangan | 1.7 ton | 2 ton | 26.240.039 | 12 ton | 10.000 | 12 ton | 175.000.000 | 12 ton | 175.000.000 | 12 ton | 280.000.000 | 12 ton | 380.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.03 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | - | | 25.030.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 50.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | 1. Skor Pola Pangan Harapan | 90,22% | - | - | 2 klp | 25.030.000 | 3 klp | 25.000.000 | 4 klp | 30.000.000 | 6 klp | 35.000.000 | 7 klp | 50.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pangan |
| 2.09.04 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | | | | 27.500.000 | | 20.000.000 | | 40.000.000 | | 42.500.000 | | 45.000.000 | | 80.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | 1. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | 58% | 40% | 27.500.000 | 60% | 20.000.000 | 70% | 40.000.000 | 75% | 42.500.000 | 80% | 45.000.000 | 90% | 80.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.05 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | | | | - | | 10.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 37.000.000 | | 80.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | 1. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | - | - | - | 3 kali | 10.000 | 5 kali | 30.000.000 | 7 kali | 35.000.000 | 8 kali | 37.000.000 | 10 kali | 80.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pangan |
| 2.10 | Urusan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.04 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | - | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan | 1. Persentase Terselesaikanny a Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi | | | | 30% | 50.000.000 | 30% | 50.000.000 | 30% | 50.000.000 | 30% | 50.000.000 | 30% | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.05 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | | | | - | | - | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | 1. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | - | | | | | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.06 | Program Redistribusi Tanah. Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | | | | 10.000.000 | | - | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 200.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya penyelesaian Penggantian Kerugian tanah Maksimum dan Tanah Absentee | 1. Persentase Penggantian Kerugian tanah Maksimum dan Tanah Absentee | - | 100% | 10.000.000 | | | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 200.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 2.10.07 | Program Penetapan Tanah Ulayat | | | | - | | - | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya tata kelola tanah ulayat | 1. Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan | - | | | | | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.08 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | | | | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pengelolaan tanah kosong | 1. Persentase Tanah Kosong yang Dikelola | - | | | | | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.09 | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | | | | 217.570.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 225.000.000 | | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya tertib pertanahan | 1. Persentase tanah aset Pemda yang bersertifikat | 44% | 46,55% | 217.570.000 | 49% | 225.000.000 | 51% | 225.000.000 | 53% | 225.000.000 | 55% | 225.000.000 | 57% | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.10 | Program Penatagunaan Tanah | | | | 72.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 80.000.000 | | 200.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah | 1. Jumlah kawasan lokasi penatagunaan tanah | 2 | 1 | 72.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 200.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanahan |
| 2.11 | Urusan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.02 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | | | | - | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 550.000.000 | | 750.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | 1. Persentase Rekomendas Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | | | | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 250.000.000 | 100% | 550.000.000 | | 750.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | 37.700.000 | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 140.000.000 | | 160.000.000 | | 300.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup | 1. Indeks Kualitas air | 40,71% | 77,06% | 18.850.000 | 77,26% | 50.000.000 | 77,46% | 60.000.000 | 77,66% | 70.000.000 | 77,86% | 80.000.000 | 78,06% | 150.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | | 2. Indeks Kualitas Udara | 91,82% | 78,04% | 18.850.000 | 78,34% | 50.000.000 | 78,64% | 60.000.000 | 78,94% | 70.000.000 | 79,24% | 80.000.000 | 79,54% | 150.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.04 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | | | | 547.500.000 | | 2.832.500.000 | | 848.500.000 | | 780.000.000 | | 857.000.000 | | 2.064.700.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | 1. Persentase RTH | 83% | 83% | 547.500.000 | 84,88% | 2.832.500.000 | 84,88% | 848.500.000 | 84,88% | 780.000.000 | 84,88% | 857.000.000 | 84,88% | 2.064.700.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.05 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | | | | 7.483.500 | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 1. Persentase limbah B3 yang terkelola | 62,50% | 62,50% | 7.483.500 | 64,50% | 50.000.000 | 70,50% | 55.000.000 | 72% | 55.000.000 | 74% | 55.000.000 | 75% | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | | | | 30.000.000 | | 130.000.000 | | 196.000.000 | | 192.600.000 | | 229.860.000 | | 337.846.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | 1. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan. Izin PPLH dan PUU LH | 52,17% | 53,33% | 30.000.000 | 56,67% | 130.000.000 | 58,82% | 196.000.000 | 58,82% | 192.600.000 | 64,10% | 229.860.000 | 69,23% | 337.846.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.07 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH | | | | - | | 30.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 30.000.000 | | 50.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal. pengetahuan tradisional dan hak | 1. Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | - | 100% | 30.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 50.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | MHA yang terkait dengan PPLH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.09 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | | | 30.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 300.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 1. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 100% | 100% | 30.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 300.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.10 | Program Penanganan Penyadaran Lingkungan Hidup | | | | 5.000.000 | | 20.000.000 | | 25.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 40.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup | 1. Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana lingkungan hidup | | 100% | 5.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 40.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.11 | Program Pengelolaan Persampahan | | | | 6.856.690.839 | | 11.662.616.750 | | 10.512.604.591 | | 10.612.604.591 | | 16.673.499.330 | | 25.075.236.884 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya tata kelola persampahan | 1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | 62,40% | 62,40% | 6.856.690.839 | 62,50% | 11.662.616.750 | 63% | 10.512.604.591 | 64% | 10.612.604.591 | 65% | 16.673.499.330 | 66% | 25.075.236.884 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup |
| 2.12 | Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan layanan administrasi yang tertata | | | 3.630.672.958 | | 3.830.672.958 | | 3.930.672.958 | | 4.230.672.958 | | 4.630.672.958 | | 5.830.672.958 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdendudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 3.630.672.958 | 100% | 3.830.672.958 | 100% | 3.930.672.958 | 100% | 4.230.672.958 | 100% | 4.630.672.958 | 100% | 5.830.672.958 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdendudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.02 | Program Pendaftaran Penduduk | | | | 444.887.954 | | 444.887.954 | | 444.887.954 | | 444.887.954 | | 444.887.954 | | 844.887.954 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdendudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk | 1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital | 6,03% | 10% | 244.887.954 | 11% | 244.887.954 | 12% | 244.887.954 | 13% | 244.887.954 | 14% | 244.887.954 | 15% | 444.887.954 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdendudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | 85,15% | 86% | 200.000.000 | 88% | 200.000.000 | 90% | 200.000.000 | 92% | 200.000.000 | 94% | 200.000.000 | 95% | 400.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdendudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.03 | Program Pencatatan Sipil | | | | 136.942.000 | | 136.942.000 | | 136.942.000 | | 136.942.000 | | 136.942.000 | | 231.800.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdendudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | 1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100% | 60% | 30.000.000 | 70% | 30.000.000 | 80% | 30.000.000 | 90% | 30.000.000 | 95% | 30.000.000 | 100% | 50.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdendudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagiyang Melaporkan | 99,38% | 99,4% | 55.000.000 | 99,5% | 55.000.000 | 99,6% | 55.000.000 | 99,7% | 55.000.000 | 99,8% | 55.000.000 | 99,9% | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdendudukan dan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pencatatan Sipil |
| | | 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 80,43% | 81% | 36.942.000 | 82% | 36.942.000 | 83% | 36.942.000 | 84% | 36.942.000 | 85% | 36.942.000 | 86% | 51.800.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdendudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 67,39% | 67,5% | 15.000.000 | 68% | 15.000.000 | 70% | 15.000.000 | 75% | 15.000.000 | 80% | 15.000.000 | 85% | 30.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdendudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.04 | Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan | | | | 8.200.000 | | 8.200.000 | | 8.200.000 | | 8.200.000 | | 8.200.000 | | 8.200.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdendudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | 1. Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | 100% | 100% | 8.200.000 | 100% | 8.200.000 | 100% | 8.200.000 | 100% | 8.200.000 | 100% | 8.200.000 | 100% | 8.200.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdendudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 2.12.05 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | | | | 892.000 | | 892.000 | | 892.000 | | 892.000 | | 892.000 | | 892.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdenduduka n dan Pencatatan Sipil |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas profil kependudukan | 1. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | 3 Buku | 3 Buku | 892.000 | 3 Buku | 892.000 | 3 Buku | 892.000 | 3 Buku | 892.000 | 3 Buku | 892.000 | 3 Buku | 892.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Administrasi Kepdenduduka n dan Pencatatan Sipil |
| 2 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4.075.907.460 | | 3.401.297.593 | | 4.257.800.000 | | 4.365.800.000 | | 4.465.890.000 | | 5.563.489.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 4.075.907.460 | 100% | 3.401.297.593 | 100% | 4.257.800.000 | 100% | 4.365.800.000 | 100% | 4.465.890.000 | 100% | 5.563.489.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 2.13.02 | Program Penataan Desa | | | | ' | | 40.000 | | 46.000.000 | | 52.900.000 | | 60.835.000 | | 69.960.250 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas penataan desa | 1. Persentase Fasilitasi Penataan Desa | 85% | 85% | | 85% | 40.000 | 85% | 46.000.000 | 85% | 52.900.000 | 85% | 60.835.000 | 85% | 69.960.250 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.03 | Program Peningkatan Kerjasama Desa | | | | 1.500.000 | | 1.520.000 | | 11.500.000 | | 13.225.000 | | 15.208.750 | | 17.490.063 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | 1. Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | 85% | 85% | 1.500.000 | 85% | 1.520.000 | 85% | 11.500.000 | 85% | 13.225.000 | 85% | 15.208.750 | 85% | 17.490.063 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.04 | Program Administrasi Pemerintah Desa | | | | 1.745.286.250 | | 1.571.622.741 | | 1.728.785.015 | | 2.525.144.338 | | 2.805.474.295 | | 8.118.045.576 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 90% | 90% | 872.643.125 | 90% | 785.811.371 | 90% | 864.392.508 | 90% | 1.262.572.169 | 90% | 1.402.737.148 | 90% | 4.059.022.788 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | 2. Persentase Fasilitasi Tata kelola desa | 90% | 90% | 872.643.125 | 90% | 785.811.371 | 90% | 864.392.508 | 90% | 1.262.572.169 | 90% | 1.402.737.148 | 90% | 4.059.022.788 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.013 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 821.053.125 | | 923.376.325 | | 969.545.141 | | 1.880.000.000 | | 2.065.000.000 | | 4.201.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | 1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | 85% | 85% | 410.526.563 | 85% | 461.688.163 | 85% | 484.772.571 | 85% | 940.000.000 | 85% | 1.032.500.000 | 85% | 2.100.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | 2 .Persentase Fasilitasi pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | | 80% | 410.526.563 | 80% | 461.688.163 | 80% | 484.772.571 | 80% | 940.000.000 | 80% | 1.032.500.000 | 80% | 2.100.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.14 | Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 2.14.02 | Program Pengendalian Penduduk | | | | 31.542.580 | | 5.110.000 | | 260.000.000 | | 286.000.000 | | 420.000.000 | | 500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk | 1. Angka Kelahiran Total ((*Total Fertility Rate*/ TFR) | | 2,31 | 15.771.290 | 2,28 | 2.555.000 | 2,25 | 130.000.000 | 2,22 | 143.000.000 | 2,2 | 210.000.000 | 2,18 | 250.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19) | | 8,4 | 15.771.290 | 7,9 | 2.555.000 | 7,4 | 130.000.000 | 6,9 | 143.000.000 | 6,4 | 210.000.000 | 5,9 | 250.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.03 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | | | | 5.277.903.692 | | 5.202.428.692 | | 5.462.550.127 | | 7.080.000.000 | | 9.505.000.000 | | 13.297.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) | l.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ *Modem Contraceptive* (mCPR) | | 69,43 | 2.638.951.846 | 69,93 | 2.601.214.346 | 70,43 | 2.731.275.063 | 70,93 | 3.540.000.000 | 71,43 | 4.752.500.000 | 71,93 | 6.648.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) | | 7,94% | 2.638.951.846 | 7,44% | 2.601.214.346 | 6,94% | 2.731.275.063 | 6,44% | 3.540.000.000 | 5,94% | 4.752.500.000 | 5,44% | 6.648.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.04 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | | | | 2.121.999.195 | | 2.118.699.375 | | 2.224.634.344 | | 3.266.000.000 | | 3.480.000.000 | | 4.729.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | 1. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | | 100% | 2.121.999.195 | 100% | 2.118.699.375 | 100% | 2.224.634.344 | 100% | 3.266.000.000 | 100% | 3.480.000.000 | 100% | 4.729.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 2 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15 | Urusan Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5.268.160.552 | | 4.815.805.541 | | 6.529.680.605 | | 6.098.554.359 | | 6.403.482.077 | | 7.723.656.181 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perhubungan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 5.268.160.552 | 100% | 4.815.805.541 | 100% | 6.529.680.605 | 100% | 6.098.554.359 | 100% | 6.403.482.077 | 100% | 7.723.656.181 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perhubungan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | | | 12.604.652.487 | | 12.715.149.496 | | 14.022.629.367 | | 15.025.779.367 | | 15.459.948.877 | | 20.232.946.321 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perhubungan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas layanan transportasi | 1. Konektivitas darat | 0,14 | 0,14 | ' | 0,14 | 567.378.400 | 0,14 | 63.000.000 | 0,14 | 66.150.000 | 0,14 | 69.457.500 | 0,14 | 72.930.375 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perhubungan |
| | | 2. Persentase kelengkapan Jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal | 76,58% | 77,56% | 12.604.652.487 | 78,56% | 12.147.771.096 | 79,56% | 13.959.629.367 | 80,56% | 14.959.629.367 | 81,56% | 15.390.491.377 | 82,56% | 20.160.015.946 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perhubungan |
| 2 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16 | Urusan Komunikasi Dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 2.16.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.947.188.189 | | 3.381.190.136 | | 4.000.000.000 | | 4.200.000.000 | | 4.500.000.000 | | 5.700.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Komunikasi Dan Informatika |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 3.947.188.189 | 100% | 3.381.190.136 | 100% | 4.000.000.000 | 100% | 4.200.000.000 | 100% | 4.500.000.000 | 100% | 5.700.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Komunikasi Dan Informatika |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.02 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | | | | 619.219.711 | | 581.053.800 | | 850.000.000 | | 900.000.000 | | 950.000.000 | | 1.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Komunikasi Dan Informatika |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | 1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) | 80% | 90% | 619.219.711 | 92% | 581.053.800 | 95% | 850.000.000 | 96% | 900.000.000 | 97% | 950.000.000 | 97% | 1.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Komunikasi Dan Informatika |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.03 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | | | | 725.544.500 | | 860.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.150.000.000 | | 2.100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Komunikasi Dan Informatika |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya kualitas pengelolaanaplikasi informatika | 1. Indeks SPBE | 2,81 | 3,22 | 725.544.500 | 3,31 | 860.000.000 | 3,4 | 1.100.000.000 | 3,49 | 1.100.000.000 | 3,58 | 1.150.000.000 | 3,67 | 2.100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Komunikasi Dan Informatika |
| 2.17 | Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4.137.908.016 | | 3.568.237.752 | | 4.646.716.808 | | 4.764.967.447 | | 4.441.126.760 | | 5.140.572.692 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 4.137.908.016 | 100% | 3.568.237.752 | 100% | 4.646.716.808 | 100% | 4.764.967.447 | 100% | 4.441.126.760 | 100% | 5.140.572.692 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.02 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | | | | - | | 768.919 | | 17.520.000 | | 21.900.000 | | 22.630.000 | | 24.090.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | 6,81 unit | 14 unit | - | 20 unit | 768.919 | 24 unit | 17.520.000 | 30 unit | 21.900.000 | 31 unit | 22.630.000 | 33 unit | 24.090.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 2.17.03 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | | | | - | | 700.000 | | 18.512.000 | | 25.632.000 | | 28.480.000 | | 31.328.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi | 1. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 5,83% | 5,83% | - | 8,33% | 700.000 | 9,49% | 18.512.000 | 10,95% | 25.632.000 | 11,15% | 28.480.000 | 11,52% | 31.328.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.04 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | | | - | 28.722.311 | | 48.882.983 | | 18.980.000 | | 26.280.000 | | 29.200.000 | | 32.120.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi | 1. Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya | 6,36% | 6,36% | 28.722.311 | 9,09% | 48.882.983 | 10,36% | 18.980.000 | 11,95% | 26.280.000 | 12,16% | 29.200.000 | 12,57% | 32.120.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.05 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | | | | - | | 700.000 | | 203.520.000 | | 215.731.200 | | 215.774.346 | | 215.817.501 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | 1. Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitasi Pelatihan | 41,67% | - | - | 9,09% | 700.000 | 10,36% | 203.520.000 | 11,95% | 215.731.200 | 12,16% | 215.774.346 | 12,57% | 215.817.501 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.06 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian | | | | - | | 700.000 | | 17.088.000 | | 21.360.000 | | 22.072.000 | | 23.496.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya produktivitas koperasi | 1. Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | 6,81% | - | - | 8,51% | 700.000 | 10,21% | 17.088.000 | 12,77% | 21.360.000 | 13,19% | 22.072.000 | 14,04% | 23.496.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.07 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | | | | 3.000.000 | | 6.040.000 | | 18.250.000 | | 18.250.000 | | 18.250.000 | | 18.250.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Outcome 1. Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Indikator 1. Persentase pertumbuhan UMKM Non-Pertanian per tahun | 19.636 unit | 4% dari baseline | 1.500.000 | 4% dari 2025 | 3.020.000 | 6% dari 2026 | 9.125.000 | 6% dari 2027 | 9.125.000 | 6% dari 2029 | 9.125.000 | 3% dari 2029 | 9.125.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | | 2. Persentase Pertumbuhan wirausaha skala mikro Non Pertanian | 90 orang | 4,45% dari baseline | 1.500.000 | 4,50% dari 2025 | 3.020.000 | 4,80% dari 2026 | 9.125.000 | 5,00% dari 2027 | 9.125.000 | 5,22% dari 2028 | 9.125.000 | 5,50% dari 2029 | 9.125.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | (Indeks Wirausaha) | | | | | | | | | | | | | | Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.08 | Program Pengembangan UMKM | | | | 535.928.800 | | 288.928.800 | | 602.754.433 | | 603.538.014 | | 604.322.613 | | 605.108.233 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya daya saing UKM | 1. Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | 0,15% | 0,03% | 267.964.400 | 0,03% | 144.464.400 | 0,03% | 301.377.217 | 0,03% | 301.769.007 | 0,03% | 302.161.307 | 0.03% | 302.554.116 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| | | 2. Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil | - | 1 | 267.964.400 | 1 | 144.464.400 | 1 | 301.377.217 | 1 | 301.769.007 | 1 | 302.161.307 | 1 | 302.554.116 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah |
| 2.18 | Urusan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan administrasi yang tertata | | | 4.210.021.258 | | 3.777.250.237 | | 5.180.000.000 | | 5.565.000.000 | | 5.377.000.000 | | 6.177.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 4.210.021.258 | 100% | 3.777.250.237 | 100% | 5.180.000.000 | 100% | 5.565.000.000 | 100% | 5.377.000.000 | 100% | 6.177.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | | | | 5.040.000 | | 700.000.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 525.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kemudahan berinvestasi | 1. Realisasi Total terhadap Target Investasi | 231,97 M | 232 M | ' | 237 M | 5.040.000 | 242 M | 700.000.000 | 247 M | 450.000.000 | 252 M | 450.000.000 | 257 M | 525.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal | | | | 181.700.000 | | 180.010.000 | | 450.000.000 | | 450.000.000 | | 500.000.000 | | 600.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal | 1. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | | 5% | 181.700.000 | 5% | 180.010.000 | 5% | 450.000.000 | 5% | 450.000.000 | 5% | 500.000.000 | 5% | 600.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | | | | 533.760.000 | | 520.970.000 | | 800.000.000 | | 815.000.000 | | 870.000.000 | | 880.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko | 1. Persentase Pelaku Usahayang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | 60% | 65% | 533.760.000 | 70% | 520.970.000 | 75% | 800.000.000 | 80% | 815.000.000 | 85% | 870.000.000 | 90% | 880.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | 50.889.484 | | 44.448.400 | | 160.668.690 | | 318.000.000 | | 570.000.000 | | 600.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal | 1. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | 100% | 100% | 50.889.484 | 100% | 44.448.400 | 100% | 160.668.690 | 100% | 318.000.000 | 100% | 570.000.000 | 100% | 600.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.06 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | | | 4.330.000 | | 3.000.000 | | 27.000.000 | | 28.000.000 | | 30.000.000 | | 32.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | 1. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | 100% | - | 4.330.000 | 25% | 3.000.000 | 25% | 27.000.000 | 25% | 28.000.000 | 25% | 30.000.000 | 25% | 32.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal |
| 2.19 | Urusan Kepemudaan Dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.02 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | | | 33.000.000 | | 27.392.000 | | 34.240.000 | | 90.000.000 | | 100.000.000 | | 150.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya daya saing kepemudaan | 1. Rasio Wirausaha Pemuda | 2,21 | 2,3 | 33.000.000 | 2,34 | 27.392.000 | 2,37 | 34.240.000 | 2,4 | 90.000.000 | 2,42 | 100.000.000 | 2,45 | 150.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.03 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | | | | 1.288.241.600 | | 766.261.600 | | 957.827.000 | | 5.750.000.000 | | 6.100.000.000 | | 8.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga | 1. Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | 52,63% | 50% | 1.288.241.600 | 47,62% | 766.261.600 | 113,64% | 957.827.000 | 108,70% | 5.750.000.000 | 104,17% | 6.100.000.000 | 140% | 8.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 2.19.04 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | | | | 450.000.000 | | 300.000.000 | | 375.000.000 | | 900.000.000 | | 950.000.000 | | 2.000.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas kepramukaan | 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | 6,37% | 6,37% | 450.000.000 | 6,38% | 300.000.000 | 6,38% | 375.000.000 | 6,39% | 900.000.000 | 6,39% | 950.000.000 | 6,4% | 2.000.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga |
| 2.20 | Urusan Statistik | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20.02 | Program Penyelenggaraan Statistik | | | | 55.928.818 | | 80.000.000 | | 175.000.000 | | 180.000.000 | | 185.000.000 | | 195.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Statistik |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral | Indeks Pembangungn Statistik (IPS) | 2,32 | 2,6 | 55.928.818 | 2,65 | 80.000.000 | 2,70 | 175.000.000 | 2,75 | 180.000.000 | 2,80 | 185.000.000 | 2,85 | 195.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Statistik |
| 2.21 | URUSAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.02 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi | | | | 5.050.000 | | 18.500.000 | | 50.000.000 | | 51.500.000 | | 60.500.000 | | 72.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Statistik |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Meningkatnya pengamanan informasi | Indeks KAMI | 393 | 395 | 5.050.000 | 400 | 18.500.000 | 420 | 50.000.000 | 450 | 51.500.000 | 480 | 60.500.000 | 500 | 72.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Statistik |
| 2.22 | Urusan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.02 | Program Pengembangan Kebudayaan | | | | 650.000.000 | | 1.350.000.000 | | 290.000.000 | | 307.000.000 | | 310.000.000 | | 330.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kebudayaan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | 87,50% | 87,50% | 650.000.000 | 88,50% | 1.350.000.000 | 89,50% | 290.000.000 | 90,50% | 307.000.000 | 91,50% | 310.000.000 | 92,50% | 330.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kebudayaan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.03 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | | | | - | | 344.236.400 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | | 95.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kebudayaan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | 1. Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan | 22,03% | | | 27,33% | 344.236.400 | 32,62% | 95.000.000 | 37,93% | 95.000.000 | 43,23% | 95.000.000 | 48,53% | 95.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kebudayaan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 2.22.04 | Program Pembinaan Sejarah | | | | 65.700.000 | | 40.000.000 | | 85.000.000 | | 85.000.000 | | 90.000.000 | | 90.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kebudayaan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | 1. Tingkat partispasi masyarakat teradap tinjauan sejarah lokal | 73,50% | 73,50% | 65.700.000 | 74,50% | 40.000.000 | 75,50% | 85.000.000 | 76,50% | 85.000.000 | 77,50% | 90.000.000 | 78,50% | 90.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kebudayaan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.05 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | | | | - | | 200.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | | 195.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kebudayaan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | 1. Persentase warisan budaya yang diwariskan | 24,65% | | | 25,4% | 175.000.000 | 28,09% | 75.000.000 | 30,78% | 75.000.000 | 33,47% | 75.000.000 | 36,16% | 75.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kebudayaan |
| | | 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | 24,65% | | - | 25,4% | 25.000.000 | 28,09% | 120.000.000 | 30,78% | 120.000.000 | 33,47% | 120.000.000 | 36,16% | 120.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kebudayaan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.06 | Program Pengelolaan Permuseuman | | | | - | | - | | 84.000.000 | | 90.000.000 | | 110.000.000 | | 115.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kebudayaan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya tata kelola museum | 1. Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum | 23,39% | 23,39% | - | 25,39% | - | 27,39% | 84.000.000 | 29,39% | 90.000.000 | 31,39% | 110.000.000 | 33,39% | 115.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kebudayaan |
| 2.23 | Urusan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.02 | Program Pembinaan Perpustakaan | | | | 154.265.900 | | 150.269.590 | | 254.016.653 | | 284.619.151 | | 319.812.023 | | 360.283.827 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perpustakaan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | 1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | 62,07 | 65,15 | 154.265.900 | 67,25 | 100.000.000 | 68,75 | 204.016.653 | 69,85 | 234.619.151 | 70,15 | 269.812.023 | 72 | 310.283.827 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perpustakaan |
| | | 2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 67,81 | 68,75 | - | 69,60 | 50.269.590 | 71,50 | 50.000.000 | 72,30 | 50.000.000 | 73,80 | 50.000.000 | 75 | 50.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perpustakaan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.03 | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | | | | - | | 4.500.000 | | 115.000.000 | | 132.250.000 | | 152.087.500 | | 174.900.625 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perpustakaan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | 1. Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | | | - | 1 dokumen | 4.500.000 | 1 | 115.000.000 | 2 | 132.250.000 | 2 | 152.087.500 | 2 | 174.900.625 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perpustakaan |
| 2.24 | Urusan Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 2.24.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3.569.675.949 | | 3.145.558.173 | | 4.411.294.400 | | 4.897.712.225 | | 5.442.145.193 | | 6.052.385.087 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kearsipan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 3.569.675.949 | 100% | 3.145.558.173 | 100% | 4.411.294.400 | 100% | 4.897.712.225 | 100% | 5.442.145.193 | 100% | 6.052.385.087 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kearsipan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.24.02 | Program Pengelolaan Kearsipan | | | | 38.372.400 | | 56.500.000 | | 60.000.000 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kearsipan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | 1. Tingkat Ketersediaan Arsip | 75,06% | 75,15% | - | 75,50% | 6.500.000 | 76,65% | 10.000.000 | 77,25% | 10.000.000 | 78,50% | 10.000.000 | 80% | 10.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kearsipan |
| | | 2. Indeks Pengawasan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar | 70 | 71 | 38.372.400 | 72 | 50.000.000 | 73 | 50.000.000 | 74 | 55.000.000 | 75 | 60.000.000 | 76 | 65.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kearsipan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.24.03 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | | | | - | | 4.000.000 | | 100.000.000 | | 120.000.000 | | 144.000.000 | | 172.800.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kearsipan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | 1. Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | | | - | 1 kegiatan | 4.000.000 | 1 kegiatan | 100.000.000 | 1 kegiatan | 120.000.000 | 1 kegiatan | 144.000.000 | 1 kegiatan | 172.800.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kearsipan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.24.04 | Program Perizinan Penggunaan Arsip | | | | - | | - | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kearsipan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup | 1. Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Terbuka | | | - | 1 daftar | - | 1 daftar | 10.000.000 | 1 daftar | 10.000.000 | 1 daftar | 10.000.000 | 1 daftar | 10.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kearsipan |
| 3 | Urusan Pemerintahan Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25 | Urusan Kelautan Dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.03 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | | | | 18.224.800 | | 19.925.000 | | 35.720.608 | | 50.008.851 | | 70.012.392 | | 98.017.348 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kelautan Dan Perikanan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap | 1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 2.930,84 ton | 2.931,4 ton | 18.224.800 | 2.932,86 ton | 19.925.000 | 2.933,6 ton | 35.720.608 | 2.934,33 ton | 50.008.851 | 2.935,06 ton | 70.012.392 | 2.935,8 ton | 98.017.348 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kelautan Dan Perikanan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 3.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | | | | 375.673.800 | | 359.703.800 | | 359.703.800 | | 375.300.000 | | 431.595.000 | | 496.334.250 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kelautan Dan Perikanan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya | 1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 8119,86 ton | 6656,66 ton | 375.673.800 | 6658,32 ton | 359.703.800 | 6659,98 ton | 359.703.800 | 6661,65 ton | 375.300.000 | 6663,31 ton | 431.595.000 | 6664,98 ton | 496.334.250 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kelautan Dan Perikanan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.25.06 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | | 17.150.000 | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 25.000.000 | | 28.000.000 | | 30.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kelautan Dan Perikanan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | 1. Angka Konsumsilkan | 42,21 Kg/kapita/ th | 42,13 kg/kapita/ th | 17.150.000 | 42,50 kg/kapita/th | 20.000.000 | 43,10 kg/kapita/th | 22.000.000 | 43,50 kg/kapita/th | 25.000.000 | 44,25 kg/kapita/th | 28.000.000 | 45,25 kg/kapita/ th | 30.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kelautan Dan Perikanan |
| 3.26 | Urusan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan layanan administrasi yang tertata | | | 5.677.327.446 | | 6.152.000.000 | | 6.162.000.000 | | 6.172.000.000 | | 7.182.000.000 | | 8.232.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pariwisata |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 5.677.327.446 | 100% | 6.152.000.000 | 100% | 6.162.000.000 | 100% | 6.172.000.000 | 100% | 7.182.000.000 | 100% | 8.232.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pariwisata |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | | | 1.717.901.400 | | 7.090.000.000 | | 8.000.000.000 | | 8.500.000.000 | | 8.800.000.000 | | 12.200.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pariwisata |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | 1. Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan | 6,21% | 3,66% | 1.717.901.400 | 4,10% | 7.090.000.000 | 4,27% | 8.000.000.000 | 4,48% | 8.500.000.000 | 4,57% | 8.800.000.000 | 4,69% | 12.200.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pariwisata |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.03 | Program Pemasaran Pariwisata | | | | 478.000.000 | | 2.450.000.000 | | 2.150.000.000 | | 2.150.000.000 | | 2.150.000.000 | | 3.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pariwisata |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | 1. Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | 7,14% | 6,67% | 478.000.000 | 12,50% | 2.450.000.000 | 11,11% | 2.150.000.000 | 10,00% | 2.150.000.000 | 9,09% | 2.150.000.000 | 8,33% | 3.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pariwisata |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 3.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | | | | - | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 100.000.000 | | 125.000.000 | | 150.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pariwisata |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | 1. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual | 5% | 5% | - | 9% | 50.000.000 | 12% | 75.000.000 | 15% | 100.000.000 | 17% | 125.000.000 | 20% | 150.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pariwisata |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26.05 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | | | | 140.550.000 | | 110.570.000 | | 138.212.500 | | 500.000.000 | | 600.000.000 | | 1.000.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pariwisata |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | 1. Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi | 20% | 22% | 140.550.000 | 25% | 110.570.000 | 26% | 138.212.500 | 27% | 500.000.000 | 28% | 600.000.000 | 29% | 1.000.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pariwisata |
| 3.27 | Urusan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 15.635.734.762 | | 26.076.000.000 | | 13.130.000.000 | | 13.422.000.000 | | 14.434.000.000 | | 15.446.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 15.635.734.762 | 100% | 26.076.000.000 | 100% | 13.130.000.000 | 100% | 13.422.000.000 | 100% | 14.434.000.000 | 100% | 15.446.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | | 4.865.980.200 | | 5.750.000.000 | | 7.575.000.000 | | 8.370.000.000 | | 11.215.000.000 | | 14.085.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya Produksi Pertanian | Indikator<br>1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton) | 333.872,71 | 334.086,89 | 2.674.319.800 | 3.455.991,27 | 4.170.000.000 | 352.763,43 | 5.675.000.000 | 362.131,34 | 6.125.000.000 | 370.368,56 | 7.600.000.000 | 374.730,98 | 9.100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | 2. Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton) | 48.350,21 | 48.829,50 | 631.707.400 | 45.127,92 | 500.000.000 | 46.030,48 | 550.000.000 | 46.951,09 | 650.000.000 | 47.890,11 | 750.000.000 | 48.847,91 | 850.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | 3. Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton) | 18.858,28 | 19.046,87 | - | 19.056,76 | 150.000.000 | 19.068,28 | 175.000.000 | 19.079,80 | 200.000.000 | 19.091,50 | 225.000.000 | 19.104,00 | 250.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | 4. Peningkatan Populasi Ternak (ekor) | 2.809.641 | 2.885.882 | 1.559.953.000 | 2.861.594 | 730.000.000 | 2.867.317,00 | 900.000.000 | 2.873.052 | 1.070.000.000 | 2.878.798 | 2.240.000.000 | 2.884.446 | 3.410.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 5. Peningkatan Hilirisasi dan Pemasaran (%) | 69% | 70% | - | 71% | 200.000.000 | 72% | 275.000.000 | 73% | 325.000.000 | 74% | 400.000.000 | 75% | 475.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | 1.563.626.360 | | 8.050.000.000 | | 3.900.000.000 | | 10.725.000.000 | | 11.000.000.000 | | 12.275.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Produksi Pertanian | Indikator 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Ton) | 333.872,71 | 334.086,89 | 1.350.000.000 | 3.455.991,27 | 5.800.000.000 | 352.763,43 | 2.800.000.000 | 362.131,34 | 9.300.000.000 | 370.368,56 | 9.550.000.000 | 374.730,98 | 10.800.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | 2. Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton) | 18.858,28 | 19.046,87 | 87.480.000 | 19.056,76 | 350.000.000 | 19.068,28 | 350.000.000 | 19.079,80 | 350.000.000 | 19.091,50 | 350.000.000 | 19.104,00 | 350.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | 3. Peningkatan Produksi Peternakan (Ton) | 17.668,00 | 17.693,43 | 126.146.360 | 17.764,21 | 1.600.000.000 | 17.835,26 | 650.000.000 | 17.90660 | 975.000.000 | 17.978,23 | 1.000.000.000 | 18.050,15 | 1.025.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | 4. Persentase Perlindungan LP2B (%) | - | | - | 50% | 300.000.000 | 75% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | 100% | 100.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 3.27.04 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | 239.904.520 | | 1.030.000.000 | | 1.190.000.000 | | 1.350.000.000 | | 1.510.000.000 | | 2.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Menurunnya Kasus Penyakit Hewan | 1. Persentase penurunan kasus penyakit hewan | 1% | 1% | 239.904.520 | 1% | 1.030.000.000 | 2% | 1.190.000.000 | 3% | 1.350.000.000 | 4% | 1.510.000.000 | 5% | 2.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | | | 76.099.223 | | 1.040.000.000 | | 1.255.000.000 | | 1.385.000.000 | | 1.540.000.000 | | 2.670.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Terlaksanakanya Perlindungan Lahan Pertanian | 1. Persentase Perlindungan Lahan Pertanian | 100% | 100% | 76.099.223 | 100% | 1.040.000.000 | 100% | 1.255.000.000 | 100% | 1.385.000.000 | 100% | 1.540.000.000 | 100% | 2.670.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.06 | Program Perizinan Usaha Pertanian | | | | - | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Meningkatnya jaminan keamanan produk hewan bagi konsumen dan daya saing produk | Indikator<br>1. Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | - | | - | 3 Unit | 50.000.000 | 3 Unit | 50.000.000 | 3 Unit | 50.000.000 | 3 Unit | 50.000.000 | 3 Unit | 50.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.07 | Program Penyuluhan Pertanian | | | | 868.553.542 | | 6.250.000.000 | | 4.225.000.000 | | 5.300.000.000 | | 6.375.000.000 | | 8.450.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kapasitas SDM Penyuluh dan Lembaga Tani | Indikator<br>1. Persentase Penguatan SDM Penyuluh Pertanian | 100% | 100% | 568.345.542 | 100% | 600.000.000 | 100% | 650.000.000 | 100% | 700.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 800.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | 2 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani | 5 unit | 1 unit | 150.208.000 | 4 unit | 650.000.000 | 5 unit | 575.000.000 | 6 unit | 600.000.000 | 7 unit | 625.000.000 | 8 unit | 650.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| | | 3. Luas Penerapan Teknologi Jarwo (ha) | - | 140 | 150.000.000 | 2.500 | 5.000.000.000 | 3000 | 3.000.000.000 | 3.500 | 4.000.000.000 | 4.000 | 5.000.000.000 | 4.500 | 7.000.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pertanian |
| 3.29 | Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 3.29.05 | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | | | | 4.000.000 | | 10.000.000 | | 42.000.000 | | 56.000.000 | | 63.000.000 | | 70.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemenfaatan langsung panas bumi | 1. Hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi | | 1 Objek | 4.000.000 | 2 Objek | 5.000.000 | 3 Objek | 12.000.000 | 3 Objek | 16.000.000 | 4 Objek | 18.000.000 | 4 Objek | 20.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| | 2. Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan | 1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT | 0 | 0 | - | 0,25% | 5.000.000 | 0,30% | 30.000.000 | 0,35% | 40.000.000 | 0,40% | 45.000.000 | 0,45% | 50.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 3.30 | Urusan Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.02 | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | | - | | - | | 3.000.000 | | 16.280.000 | | 26.640.000 | | 25.160.000 | | 20.720.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | 1. Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi | 100% | | - | 70% | 1.500.000 | 80% | 8.140.000 | 100% | 13.320.000 | 90% | 12.580.000 | 85% | 10.360.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | | 2. Proporsi pengawasan perdagangan untuk barang berbahaya dan sistem resi gudang | | | - | 45% | 1.500.000 | 75% | 8.140.000 | 100% | 13.320.000 | 100% | 12.580.000 | 90% | 10.360.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 3.30.03 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 358.012.500 | | 362.520.000 | | 387.083.115 | | 414.178.933 | | 397.611.776 | | 413.516.247 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien merata dan terintegrasi | 1. Proporsi Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | 7,14% | 30% | 358.012.500 | 35% | 362.520.000 | 41% | 387.083.115 | 48% | 414.178.933 | 42% | 397.611.776 | 44% | 413.516.247 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.04 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | | | | 35.951.900 | | 58.974.400 | | 42.120.000 | | 56.520.000 | | 42.120.000 | | 39.240.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 1. Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 7,14% | 13,33% | 17.975.950 | 14,13% | 29.487.200 | 14,98% | 21.060.000 | 16,03% | 28.260.000 | 15,99% | 21.060.000 | 15,96% | 19.620.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | | 2. Proporsi terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi | 0,10% | 30% | 17.975.950 | 45% | 29.487.200 | 90% | 21.060.000 | 100% | 28.260.000 | 90% | 21.060.000 | 80% | 19.620.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.05 | Program Pengembangan Ekspor | | | | - | | 3.000.000 | | 48.600.000 | | 64.920.000 | | 48.600.000 | | 48.600.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Indikator<br>1. Jumlah pelaku usaha mikro produk/komoditi unggulan daerah yang siap dan atau sudah ekspor (proporsi) | | | - | 1 | 1.500.000 | 1 | 24.300.000 | 2 | 32.460.000 | 1 | 24.300.000 | 1 | 24.300.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | | 2. Meningkatnya Citra Produk Ekspor | | | | 2 produk | 1.500.000 | 3 produk | 24.300.000 | 6 produk | 32.460.000 | 7 produk | 24.300.000 | 9 produk | 24.300.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.06 | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | | | | 31.014.260 | | 42.048.520 | | 15.411.014 | | 82.448.923 | | 76.677.498 | | 71.310.073 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | 1. Proporsi jumlah tanda tera sah pada UTTP tahun berjalan | 4% | 2% | 31.014.260 | 4% | 21.024.260 | 7% | 7.705.507 | 9% | 74.204.031 | 6% | 72.843.623 | 6% | 64.179.066 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | | 2. Proporsi terlaksananya pengawasan perdagangan untuk UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran | - | 0,3 | - | 0,45 | 21.024.260 | 0,9 | 7.705.507 | 1 | 8.244.892 | 0,9 | 3.833.875 | 0,8 | 7.131.007 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.30.07 | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | | | | 54.928.800 | | 61.938.800 | | 46.960.000 | | 56.960.000 | | 26.760.000 | | 46.960.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | 1. Proporsi jumlah tanda tera sah pada UTTP tahun berjalan | | 1,74% | 27.464.400 | 3,76% | 30.969.400 | 6,98% | 23.480.000 | 9,12% | 28.480.000 | 6% | 13.380.000 | 5,50% | 23.480.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| | | 2. Proporsi terlaksananya pengawasan perdagangan untuk UTTP. BDKT. dan Satuan Ukuran | | 30% | 27.464.400 | 45% | 30.969.400 | 90% | 23.480.000 | 100% | 28.480.000 | 90% | 13.380.000 | 80% | 23.480.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perdagangan |
| 2 | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Urusan Pemerintahan Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.31 | Urusan Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4.437.889.632 | | 4.610.448.811 | | 5.254.500.000 | | 5.416.000.000 | | 5.583.000.000 | | 6.749.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perindustrian |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 4.437.889.632 | 100% | 4.610.448.811 | 100% | 5.254.500.000 | 100% | 5.416.000.000 | 100% | 5.583.000.000 | 100% | 6.749.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perindustrian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 3.31.02 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | | | | 1.214.648.990 | | 732.432.997 | | 915.541.246 | | 1.400.000.000 | | 1.450.000.000 | | 2.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perindustrian |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | 5,71% | 6,34% | 1.214.648.990 | 7,04% | 732.432.997 | 7,81% | 915.541.246 | 8,67% | 1.400.000.000 | 9,62% | 1.450.000.000 | 10,68% | 2.500.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perindustrian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.03 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | | | | - | | - | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perindustrian |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | 1. Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan | 39,93% | 49,34% | - | 50,85% | - | 52,30% | 100.000.000 | 53,67% | 150.000.000 | 54,97% | 200.000.000 | 56,20% | 250.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perindustrian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.31.04 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | | | | - | | - | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 200.000.000 | | 250.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perindustrian |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya pemanfaatan informasi industri | 1. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap. Akurat. dan Terkini | 75,55% | 79,75% | - | 83,95% | ' | 88,15% | 100.000.000 | 92,34% | 150.000.000 | 96,54% | 200.000.000 | 100% | 250.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perindustrian |
| 4 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SETDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 35.724.161.787 | | 42.894.137.136 | | 43.662.195.668 | | 44.797.019.452 | | 46.086.734.426 | | 50.391.071.147 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 35.724.161.787 | 100% | 42.894.137.136 | 100% | 43.662.195.668 | 100% | 44.797.019.452 | 100% | 46.086.734.426 | 100% | 50.391.071.147 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.02 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | | | 6.305.148.330 | | 5.739.608.356 | | 7.386.428.209 | | 6.418.320.419 | | 8.242.099.860 | | 9.069.874.494 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah | 1.Efektivitas Kerja Sama Daerah | 24% | 15% | 8.969.000 | 15,50% | 60.000.000 | 16% | 61.000.000 | 16,50% | 62.020.000 | 17% | 63.060.400 | 17,5% | 66.213.420 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 2.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | - | 3,16 | 509.655.995 | 3,22 | 545.374.900 | 3,28 | 585.271.390 | 3,35 | 629.157.529 | 3,41 | 677.432.282 | 3,47 | 711.303.896 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |
| | 2. Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat | 1.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 100% | 100% | 5.336.632.635 | 100% | 4.411.632.635 | 100% | 5.945.295.899 | 100% | 4.852.795.899 | 100% | 6.539.825.489 | 100% | 7.330.575.489 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |
| | 3. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum | 1. Indeks Reformasi Hukum (IRH) | 92,00% | 92,97% | 449.890.700 | 93,07% | 722.600.821 | 93,12% | 794.860.920 | 93,17% | 874.346.991 | 93,22% | 961.781.689 | 93,27% | 961.781.689 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.03 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | | | | 436.652.598 | | 2.134.343.411 | | 2.332.908.251 | | 2.542.419.074 | | 2.761.380.979 | | 3.923.886.267 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | 1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan | 100% | 100% | 179.656.873 | 100% | 1.082.912.247 | 100% | 1.191.203.471 | 100% | 1.310.323.816 | 100% | 1.441.356.195 | 100% | 2.513.424.005 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |
| | | 2. Hasil Penilaian Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal BAIK | 77,54% | 80% | 143.800.708 | 82,54% | 684.245.000 | 83,50% | 737.800.000 | 84,75% | 787.800.000 | 85% | 831.300.000 | 85,54% | 872.865.000 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 3. Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan | 100% | 100% | 113.195.017 | 100% | 367.186.164 | 100% | 403.904.780 | 100% | 444.295.258 | 100% | 488.724.784 | 100% | 537.597.263 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |
| 4 | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sekretariat DPRD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 23.008.106.689 | | 24.158.512.024 | | 25.366.437.625 | | 26.634.759.506 | | 27.966.497.482 | | 33.364.822.356 | Sekretariat DPRD |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 23.008.106.689 | 100% | 24.158.512.024 | 100% | 25.366.437.625 | 100% | 26.634.759.506 | 100% | 27.966.497.482 | 100% | 33.364.822.356 | Sekretariat DPRD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.02 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | | | | 11.023.619.000 | | 11.574.799.950 | | 12.153.539.948 | | 12.761.216.947 | | 13.399.277.794 | | 16.069.241.683 | Sekretariat DPRD |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan | 1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahunan | 100% | 100% | 7.971.438.200 | 100% | 8.370.010.110 | 100% | 8.788.510.616 | 100% | 9.227.936.147 | 100% | 9.689.332.954 | 100% | 12.173.799.602 | Sekretariat DPRD |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahunan | 100% | 100% | 1.869.059.600 | 100% | 1.962.512.580 | 100% | 2.060.638.209 | 100% | 2.163.670.120 | 100% | 2.271.853.626 | 100% | 2.385.446.307 | Sekretariat DPRD |
| | 2.Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | 1.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100% | 100% | 1.183.121.200 | 100% | 1.242.277.260 | 100% | 1.304.391.123 | 100% | 1.369.610.680 | 100% | 1.438.091.214 | 100% | 1.509.995.774 | Sekretariat DPRD |
| 5 | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 6.613.201.957 | | 5.811.583.771 | | 6.436.362.411 | | 6.649.746.912 | | 6.734.469.864 | | 7.827.665.110 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perencanaan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 6.613.201.957 | 100% | 5.811.583.771 | 100% | 6.436.362.411 | 100% | 6.649.746.912 | 100% | 6.734.469.864 | 100% | 7.827.665.110 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perencanaan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.02 | Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | 340.220.180 | | 330.220.180 | | 334.081.251 | | 367.489.376 | | 404.238.314 | | 444.662.145 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perencanaan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | 1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 100% | 100% | 170.110.090 | 100% | 165.110.090 | 100% | 167.040.626 | 100% | 183.744.688 | 100% | 202.119.157 | 100% | 222.331.073 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perencanaan |
| | | 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | 100% | 100% | 170.110.090 | 100% | 165.110.090 | 100% | 167.040.626 | 100% | 183.744.688 | 100% | 202.119.157 | 100% | 222.331.073 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perencanaan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.03 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 217.735.777 | | 343.235.777 | | 290.112.528 | | 319.123.781 | | 351.036.159 | | 386.139.775 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perencanaan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100% | 100% | 72.578.592 | 100% | 114.411.926 | 100% | 96.704.176 | 100% | 106.374.594 | 100% | 117.012.053 | 100% | 128.713.258 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perencanaan |
| | 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilavahan | 1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100% | 100% | 72.578.592 | 100% | 114.411.926 | 100% | 96.704.176 | 100% | 106.374.594 | 100% | 117.012.053 | 100% | 128.713.258 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perencanaan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA | 1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | 100% | 100% | 72.578.592 | 100% | 114.411.926 | 100% | 96.704.176 | 100% | 106.374.594 | 100% | 117.012.053 | 100% | 128.713.258 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Perencanaan |
| 5.02 | Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 17.610.552.616 | | 18.091.217.780 | | 10.166.795.688 | | 10.517.209.113 | | 10.773.164.904 | | 12.009.801.154 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 17.610.552.616 | 100% | 18.091.217.780 | 100% | 10.166.795.688 | 100% | 10.517.209.113 | 100% | 10.773.164.904 | 100% | 12.009.801.154 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 194.926.054.787 | | 174.753.768.061 | | 175.156.220.777 | | 175.578.517.171 | | 176.021.648.033 | | 176.486.653.682 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya tata kelola anggaran | 1. Terlaksananya Penyusunan Anggaran Daerah tepat waktu | 100% | 100% | 988.500.807 | 100% | 993.443.311 | 100% | 998.410.528 | 100% | 1.003.402.580 | 100% | 1.008.419.593 | 100% | 1.013.461.691 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Meningkatnya tata kelola dan Pelaporan | 1. Terkoordinirnya akuntansi dan pelaporan kuangan | 100% | 100% | 127.500.000 | 100% | 128.137.500 | 100% | 128.778.188 | 100% | 129.422.078 | 100% | 130.069.189 | 100% | 130.719.535 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | 3. Meningkatnya tata kelola sistem informasi keuangan | 1. Terlaksananya pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah | 100% | 100% | 117.644.700 | 100% | 118.232.924 | 100% | 118.824.088 | 100% | 119.418.209 | 100% | 120.015.300 | 100% | 120.615.376 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | 4. Terlaksananya kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelola keuangan daerah | 1. Terlaksananya kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah | 100% | 100% | 193.692.409.280 | 100% | 173.513.954.326 | 100% | 173.910.207.974 | 100% | 174.326.274.304 | 100% | 174.763.143.951 | 100% | 175.221.857.080 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | 5. Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan | 1. Terkoordinirnya Pengelolaan Kuangan Daerah | 100% | 100% | 130.393.557 | 100% | 131.045.525 | 100% | 131.700.752 | 100% | 132.359.256 | 100% | 133.021.052 | 100% | 133.686.158 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 5.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 1.603.813.950 | | 1.310.104.520 | | 1.316.655.043 | | 1.323.238.318 | | 1.329.854.509 | | 2.336.503.782 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya tata kelola aset daerah | 1. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | 100% | 100% | 1.603.813.950 | 100% | 1.310.104.520 | 100% | 1.316.655.043 | 100% | 1.323.238.318 | 100% | 1.329.854.509 | 100% | 2.336.503.782 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 6.455.167.719 | | 7.634.523.656 | | 7.863.298.916 | | 8.030.003.734 | | 8.259.974.562 | | 9.416.686.961 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 6.455.167.719 | 100% | 7.634.523.656 | 100% | 7.863.298.916 | 100% | 8.030.003.734 | 100% | 8.259.974.562 | 100% | 9.416.686.961 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.02.04 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | 883.480.906 | | 5.356.750.000 | | 5.370.000.000 | | 5.320.000.000 | | 5.430.000.000 | | 9.570.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan | 1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | | 13,73% | 441.740.453 | 13,78% | 2.678.375.000 | 14,05% | 2.685.000.000 | 14,37% | 2.660.000.000 | 14,73% | 2.715.000.000 | 15,09% | 4.785.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| | 2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan | 1. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan | | 100% | 441.740.453 | 100% | 2.678.375.000 | 100% | 2.685.000.000 | 100% | 2.660.000.000 | 100% | 2.715.000.000 | 100% | 4.785.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Keuangan |
| 5.03 | Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4.057.623.274 | | 4.267.702.874 | | 5.836.186.534 | | 5.772.005.947 | | 6.330.717.302 | | 7.881.435.792 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kepegawaian |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 4.057.623.274 | 100% | 4.267.702.874 | 100% | 5.836.186.534 | 100% | 5.772.005.947 | 100% | 6.330.717.302 | 100% | 7.881.435.792 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.02 | Program Kepegawaian Daerah | Indeks Profesioalitas ASN | | | 893.728.600 | | 758.244.400 | | 947.805.500 | | 1.847.937.500 | | 1.876.437.500 | | 3.752.710.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kepegawaian |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | 1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi | | 80% | 195.037.500 | 80% | 196.096.000 | 80% | 245.120.000 | 80% | 377.500.000 | 80% | 402.500.000 | 80% | 425.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kepegawaian |
| | 2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN | 1. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | | 95% | 453.999.700 | 95,50% | 289.100.000 | 96% | 361.375.000 | 96,50% | 949.937.500 | 97% | 949.937.500 | 97,50% | 2.860.710.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kepegawaian |
| | 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN | 1. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya | | 92% | 212.638.000 | 92,50% | 240.995.000 | 93% | 301.243.750 | 93,50% | 437.000.000 | 94% | 443.000.000 | 94,50% | 384.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kepegawaian |
| | 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | 1. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik | | 99% | 32.053.400 | 99,10% | 32.053.400 | 99,20% | 40.066.750 | 99,30% | 83.500.000 | 99,40% | 81.000.000 | 99,50% | 82.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan urusan Kepegawaian |
| 5.05 | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.05.02 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | | | | 342.000.000 | | 646.120.287 | | 775.000.000 | | 775.000.000 | | 775.000.000 | | 1.175.000.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penelitian dan Pengembangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan | 1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam | 100% | 100% | 85.500.000 | 100% | 197.834.776 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 293.750.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penelitian dan Pengembangan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | Implementasi Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan | 1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | 100% | 100% | 85.500.000 | 100% | 197.834.776 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 293.750.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penelitian dan Pengembangan |
| | 3. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | 1. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | 100% | 100% | 85.500.000 | 100% | 197.834.776 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 293.750.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penelitian dan Pengembangan |
| | 4. Meningkatnya fasilitasi. pembinaan. bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian. pengembangan. pengkajian dan penerapan di daerah | 1. Persentase Fasilitasi. Pembinaan. Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian. Pengembangan. Pengkajian dan Penerapan di Daerah | 100% | 100% | 85.500.000 | 100% | 52.615.959 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 193.750.000 | 100% | 293.750.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Penelitian dan Pengembangan |
| 6 | Unsur Pengawas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | Inspektorat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 6.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 7.697.488.165 | | 7.000.191.504 | | 11.619.108.465 | | 12.781.019.312 | | 14.059.121.243 | | 18.465.033.367 | Inspektorat Daerah |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 7.697.488.165 | 100% | 7.000.191.504 | 100% | 11.619.108.465 | 100% | 12.781.019.312 | 100% | 14.059.121.243 | 100% | 18.465.033.367 | Inspektorat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | | | | 1.223.560.660 | | 649.166.766 | | 779.000.119 | | 4.341.887.525 | | 4.776.076.277 | | 6.253.683.905 | Inspektorat Daerah |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan. baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | 1. Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | 86 | 86 | 1.223.560.660 | 86 | 649.166.766 | 86% | 779.000.119 | 86% | 4.341.887.525 | 860% | 4.776.076.277 | 86 | 6.253.683.905 | Inspektorat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi | | | | 34.200.000 | | 230.860.000 | | 277.032.000 | | 1.576.802.708 | | 1.734.482.978 | | 1.907.931.276 | Inspektorat Daerah |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | 1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level 3 | Level 3 | 17.100.000 | Level 3 | 115.430.000 | Level 3 | 138.516.000 | Level 3 | 788.401.354 | Level 3 | 867.241.489 | Level 3 | 953.965.638 | Inspektorat Daerah |
| | | 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level 3 | Level 3 | 17.100.000 | Level 3 | 115.430.000 | Level 3 | 138.516.000 | Level 3 | 788.401.354 | Level 3 | 867.241.489 | Level 3 | 953.965.638 | Inspektorat Daerah |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kecamatan X Koto | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.895.303.309 | | 1.576.707.090 | | 2.213.164.830 | | 2.213.164.830 | | 2.213.164.830 | | 3.213.164.830 | Kecamatan X Koto |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.895.303.309 | 100% | 1.576.707.090 | 100% | 2.213.164.830 | 100% | 2.213.164.830 | 100% | 2.213.164.830 | 100% | 3.213.164.830 | Kecamatan X Koto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 23.364.400 | | 23.514.400 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | 37.000.000 | Kecamatan X Koto |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 23.364.400 | 100% | 23.514.400 | 100% | 37.000.000 | 100% | 37.000.000 | 100% | 37.000.000 | 100% | 37.000.000 | Kecamatan X Koto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 5.500.000 | | 3.250.000 | | 21.750.000 | | 21.750.000 | | 21.750.000 | | 21.750.000 | Kecamatan X Koto |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 5.500.000 | 100% | 3.250.000 | 100% | 21.750.000 | 100% | 21.750.000 | 100% | 21.750.000 | 100% | 21.750.000 | Kecamatan X Koto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum | | | | - | | - | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 28.000.000 | Kecamatan X Koto |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | | | | | | 28.000.000 | 100% | 28.000.000 | 100% | 28.000.000 | 100% | 28.000.000 | Kecamatan X Koto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 2.250.000 | | 50.000.000 | | 175.000.000 | | 185.000.000 | | 165.000.000 | | 185.000.000 | Kecamatan X Koto |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 2.250.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 175.000.000 | 100% | 185.000.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | 185.000.000 | Kecamatan X Koto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 101.750.000 | | 72.090.000 | | 167.100.000 | | 167.100.000 | | 167.100.000 | | 167.100.000 | Kecamatan X Koto |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | | 100% | 50.875.000 | 100% | 36.045.000 | 100% | 83.550.000 | 100% | 83.550.000 | 100% | 83.550.000 | 100% | 83.550.000 | Kecamatan X Koto |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | | 100% | 50.875.000 | 100% | 36.045.000 | 100% | 83.550.000 | 100% | 83.550.000 | 100% | 83.550.000 | 100% | 83.550.000 | Kecamatan X Koto |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kecamatan Batipuh | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.551.465.200 | | 1.655.813.784 | | 1.651.323.278 | | 1.667.823.278 | | 1.661.023.278 | | 2.658.023.278 | Kecamatan Batipuh |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.551.465.200 | 100% | 1.655.813.784 | 100% | 1.651.323.278 | 100% | 1.667.823.278 | 100% | 1.661.023.278 | 100% | 2.658.023.278 | Kecamatan Batipuh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 45.728.800 | | 46.028.800 | | 59.028.800 | | 60.528.800 | | 60.528.800 | | 60.528.800 | Kecamatan Batipuh |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 45.728.800 | 100% | 46.028.800 | 100% | 59.028.800 | 100% | 60.528.800 | 100% | 60.528.800 | 100% | 60.528.800 | Kecamatan Batipuh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 3.700.000 | | 3.250.000 | | 8.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | Kecamatan Batipuh |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 3.700.000 | 100% | 3.250.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 9.000.000 | 100% | 9.000.000 | 100% | 9.000.000 | Kecamatan Batipuh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi ketentramaan dan ketertiban umum | | | | 30.000.000 | | - | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | Kecamatan Batipuh |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 30.000.000 | | - | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | Kecamatan Batipuh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 35.057.500 | | 110.000.000 | | 135.000.000 | | 110.000.000 | | 135.000.000 | Kecamatan Batipuh |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 35.057.500 | 100% | 110.000.000 | 100% | 135.000.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 135.000.000 | Kecamatan Batipuh |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 92.575.000 | | 63.105.000 | | 128.200.000 | | 128.200.000 | | 128.200.000 | | 128.200.000 | Kecamatan Batipuh |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 46.287.500 | 100% | 31.552.500 | 100% | 64.100.000 | 100% | 64.100.000 | 100% | 64.100.000 | 100% | 64.100.000 | Kecamatan Batipuh |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 46.287.500 | 100% | 31.552.500 | 100% | 64.100.000 | 100% | 64.100.000 | 100% | 64.100.000 | 100% | 64.100.000 | Kecamatan Batipuh |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Kecamatan Rambatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.423.495.971 | | 1.440.854.850 | | 1.585.351.446 | | 1.707.188.800 | | 1.716.888.800 | | 2.734.057.688 | Kecamatan Rambatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.423.495.971 | 100% | 1.440.854.850 | 100% | 1.585.351.446 | 100% | 1.707.188.800 | 100% | 1.716.888.800 | 100% | 2.734.057.688 | Kecamatan Rambatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 49.128.800 | | 48.528.800 | | 59.028.800 | | 60.528.800 | | 60.528.800 | | 60.528.800 | Kecamatan Rambatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 49.128.800 | 100% | 48.528.800 | 100% | 59.028.800 | 100% | 60.528.800 | 100% | 60.528.800 | 100% | 60.528.800 | Kecamatan Rambatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 3.500.000 | | 3.250.000 | | 8.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | | 9.000.000 | Kecamatan Rambatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 3.500.000 | 100% | 3.250.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 9.000.000 | 100% | 9.000.000 | 100% | 9.000.000 | Kecamatan Rambatan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum | | | | - | | 1.500.000 | | 30.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | Kecamatan Rambatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 1.500.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | Kecamatan Rambatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 51.900.000 | | 42.500.000 | | 110.000.000 | | 135.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | Kecamatan Rambatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 51.900.000 | 100% | 42.500.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 135.000.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 110.000.000 | Kecamatan Rambatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 99.764.400 | | 73.614.400 | | 151.464.400 | | 151.464.400 | | 151.464.400 | | 151.464.400 | Kecamatan Rambatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 49.882.200 | 100% | 36.807.200 | 100% | 75.732.200 | 100% | 75.732.200 | 0% | 75.732.200 | 100% | 75.732.200 | Kecamatan Rambatan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 49.882.200 | 100% | 36.807.200 | 100% | 75.732.200 | 100% | 75.732.200 | 0% | 75.732.200 | 100% | 75.732.200 | Kecamatan Rambatan |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Kecamatan Lima Kaum | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.723.577.194 | | 1.344.641.296 | | 1.857.099.594 | | 1.914.169.594 | | 1.759.717.594 | | 2.775.217.594 | Kecamatan Lima Kaum |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.723.577.194 | 100% | 1.344.641.296 | 100% | 1.857.099.594 | 100% | 1.914.169.594 | 100% | 1.759.717.594 | 100% | 2.775.217.594 | Kecamatan Lima Kaum |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 49.563.800 | | 50.291.300 | | 56.700.000 | | 57.200.000 | | 57.500.000 | | 58.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 49.563.800 | 100% | 50.291.300 | 100% | 56.700.000 | 100% | 57.200.000 | 100% | 57.500.000 | 100% | 58.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 3.612.500 | | 3.250.000 | | 5.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 3.612.500 | 100% | 3.250.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 6.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum | | | | - | | - | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 74.392.500 | | 56.525.000 | | 90.000.000 | | 130.000.000 | | 110.000.000 | | 135.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 74.392.500 | 100% | 56.525.000 | 100% | 90.000.000 | 100% | 130.000.000 | 100% | 110.000.000 | 100% | 135.000.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Indikator : | | | 74.392.500 | | 51.704.500 | | 94.250.000 | | 94.250.000 | | 97.000.000 | | 97.500.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | Outcome : | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 37.196.250 | 100% | 25.852.250 | 100% | 47.125.000 | 100% | 47.125.000 | 100% | 48.500.000 | 100% | 48.750.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 37.196.250 | 100% | 25.852.250 | 100% | 47.125.000 | 100% | 47.125.000 | 100% | 48.500.000 | 100% | 48.750.000 | Kecamatan Lima Kaum |
| 7.01 | Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kecamatan Tanjung Emas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.623.623.742 | | 1.240.667.850 | | 1.591.590.365 | | 1.671.169.883 | | 1.721.304.980 | | 2.755.731.079 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.623.623.742 | 100% | 1.240.667.850 | 100% | 1.591.590.365 | 100% | 1.671.169.883 | 100% | 1.721.304.980 | 100% | 2.755.731.079 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 54.019.300 | | 53.039.400 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | | 55.000.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% dan 1 laporan | 54.019.300 | 100% dan 1 laporan | 53.039.400 | 100% dan 1 laporan | 55.000.000 | 100% dan 1 laporan | 55.000.000 | 100% dan 1 laporan | 55.000.000 | 100% dan 1 laporan | 55.000.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 422.400 | | 1.500.000 | | 844.800 | | 844.800 | | 844.800 | | 844.800 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 422.400 | 100% | 1.500.000 | 100% | 844.800 | 100% | 844.800 | 100% | 844.800 | 100% | 844.800 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum | | | | 51.600.000 | | - | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 51.600.000 | 100% | - | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 61.750.000 | | 61.750.000 | | 61.750.000 | | 61.750.000 | | 61.750.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | ' | 100% | 61.750.000 | 100% | 61.750.000 | 100% | 61.750.000 | 100% | 61.750.000 | 100% | 61.750.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 38.611.000 | | 70.654.400 | | 57.222.000 | | 57.222.000 | | 57.222.000 | | 57.222.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 28.611.000 | 100% | 35.327.200 | 100% | 28.611.000 | 100% | 28.611.000 | 100% | 28.611.000 | 100% | 28.611.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 10.000.000 | 100% | 35.327.200 | 100% | 28.611.000 | 100% | 28.611.000 | 100% | 28.611.000 | 100% | 28.611.000 | Kecamatan Tanjung Emas |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Kecamatan Lintau Buo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.488.232.134 | | 1.583.494.764 | | 2.830.000.000 | | 2.971.500.000 | | 3.060.645.000 | | 4.121.857.900 | Kecamatan Lintau Buo |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.488.232.134 | 100% | 1.583.494.764 | 100% | 2.830.000.000 | 100% | 2.971.500.000 | 100% | 3.060.645.000 | 100% | 4.121.857.900 | Kecamatan Lintau Buo |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | 68.293.200 | | 70.543.200 | | 95.000.000 | | 93.000.000 | | 93.000.000 | | 93.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 68.293.200 | 100% | 70.543.200 | 100% | 95.000.000 | 100% | 93.000.000 | 100% | 93.000.000 | 100% | 93.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | 2.572.500 | | 3.250.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 2.572.500 | 100% | 3.250.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | - | | - | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 39.635.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 39.635.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 60.433.974 | | 42.365.000 | | 93.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 30.216.987 | 100% | 21.182.500 | 100% | 46.500.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 30.216.987 | 100% | 21.182.500 | 100% | 46.500.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | Kecamatan Lintau Buo |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Kecamatan Sungayang | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.461.942.780 | | 1.360.932.530 | | 2.237.550.000 | | 1.980.550.000 | | 1.860.550.000 | | 2.860.550.000 | Kecamatan Sungayang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.461.942.780 | 100% | 1.360.932.530 | 100% | 2.237.550.000 | 100% | 1.980.550.000 | 100% | 1.860.550.000 | 100% | 2.860.550.000 | Kecamatan Sungayang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 25.564.400 | | 24.864.400 | | 41.000.000 | | 41.000.000 | | 41.000.000 | | 41.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 25.564.400 | 100% | 24.864.400 | 100% | 41.000.000 | 100% | 41.000.000 | 100% | 41.000.000 | 100% | 41.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 4.450.000 | | 3.700.000 | | 19.000.000 | | 19.000.000 | | 19.000.000 | | 19.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 4.450.000 | 100% | 3.700.000 | 100% | 19.000.000 | 100% | 19.000.000 | 100% | 19.000.000 | 100% | 19.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum | | | | - | | - | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 55.250.000 | | 115.000.000 | | 150.600.000 | | 115.000.000 | | 150.600.000 | Kecamatan Sungayang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 55.250.000 | 100% | 115.000.000 | 100% | 150.600.000 | 100% | 115.000.000 | 100% | 150.600.000 | Kecamatan Sungayang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 70.620.000 | | 49.500.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 35.310.000 | 100% | 24.750.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 35.310.000 | 100% | 24.750.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 75.000.000 | Kecamatan Sungayang |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 7.01 | Kecamatan Sungai Tarab | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.559.677.477 | | 1.526.192.232 | | 2.104.500.000 | | 1.824.500.000 | | 1.780.500.000 | | 2.780.500.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.559.677.477 | 100% | 1.526.192.232 | 100% | 2.104.500.000 | 100% | 1.824.500.000 | 100% | 1.780.500.000 | 100% | 2.780.500.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 45.528.800 | | 46.428.800 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | | 58.000.000 | KECAMATAN SUNGAI TARAB |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 45.528.800 | 100% | 46.428.800 | 100% | 58.000.000 | 100% | 58.000.000 | 100% | 58.000.000 | 100% | 58.000.000 | KECAMATAN SUNGAI TARAB |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 3.165.000 | | 3.700.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 18.000.000 | KECAMATAN SUNGAI TARAB |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 3.165.000 | 100% | 3.700.000 | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.000.000 | KECAMATAN SUNGAI TARAB |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum | | | | - | | 750.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | | 36.000.000 | KECAMATAN SUNGAI TARAB |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 750.000 | 100% | 36.000.000 | 100% | 36.000.000 | 100% | 36.000.000 | 100% | 36.000.000 | KECAMATAN SUNGAI TARAB |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 52.500.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | | 168.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 52.500.000 | 100% | 168.000.000 | 100% | 168.000.000 | 100% | 168.000.000 | 100% | 168.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 113.000.000 | | 77.300.000 | | 147.000.000 | | 147.000.000 | | 147.000.000 | | 147.000.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 56.500.000 | 100% | 38.650.000 | 100% | 73.500.000 | 100% | 73.500.000 | 100% | 73.500.000 | 100% | 73.500.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 56.500.000 | 100% | 38.650.000 | 100% | 73.500.000 | 100% | 73.500.000 | 100% | 73.500.000 | 100% | 73.500.000 | Kecamatan Sungai Tarab |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Kecamatan Pariangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.701.098.950 | | 2.031.160.506 | | 2.800.905.901 | | 2.884.933.078 | | 3.815.592.497 | | 4.470.212.997 | Kecamatan Pariangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.701.098.950 | 100% | 2.031.160.506 | 100% | 2.800.905.901 | 100% | 2.884.933.078 | 100% | 3.815.592.497 | 100% | 4.470.212.997 | Kecamatan Pariangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 50.741.300 | | 47.028.800 | | 112.834.560 | | 135.401.472 | | 162.481.766 | | 194.978.120 | Kecamatan Pariangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 50.741.300 | 100% | 47.028.800 | 100% | 112.834.560 | 100% | 135.401.472 | 100% | 162.481.766 | 100% | 194.978.120 | Kecamatan Pariangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 5.000.000 | | 2.260.000 | | 24.000.000 | | 28.800.000 | | 34.560.000 | | 41.472.000 | Kecamatan Pariangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 5.000.000 | 100% | 2.260.000 | 100% | 24.000.000 | 100% | 28.800.000 | 100% | 34.560.000 | 100% | 41.472.000 | Kecamatan Pariangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum | | | | - | | 2.500.000 | | 36.000.000 | | 43.200.000 | | 51.840.000 | | 62.208.000 | Kecamatan Pariangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 2.500.000 | 100% | 36.000.000 | 100% | 43.200.000 | 100% | 51.840.000 | 100% | 62.208.000 | Kecamatan Pariangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 548.000.000 | | 558.960.000 | | 570.139.200 | | 575.840.592 | | 581.598.998 | Kecamatan Pariangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | ' | 100% | 548.000.000 | 100% | 558.960.000 | 100% | 570.139.200 | 100% | 575.840.592 | 100% | 581.598.998 | Kecamatan Pariangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 82.676.884 | | 55.710.000 | | 160.470.000 | | 192.564.000 | | 231.076.800 | | 277.292.160 | Kecamatan Pariangan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 41.338.442 | 100% | 27.855.000 | 100% | 80.235.000 | 100% | 96.282.000 | 100% | 115.538.400 | 100% | 138.646.080 | Kecamatan Pariangan |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 41.338.442 | 100% | 27.855.000 | 100% | 80.235.000 | 100% | 96.282.000 | 100% | 115.538.400 | 100% | 138.646.080 | Kecamatan Pariangan |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Kecamatan Salimpaung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.646.368.190 | | 1.452.015.554 | | 1.954.368.190 | | 1.954.368.190 | | 1.954.368.190 | | 2.973.368.190 | Kecamatan Salimpaung |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.646.368.190 | 100% | 1.452.015.554 | 100% | 1.954.368.190 | 100% | 1.954.368.190 | 100% | 1.954.368.190 | 100% | 2.973.368.190 | Kecamatan Salimpaung |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 68.293.200 | | 71.293.200 | | 78.400.000 | | 77.400.000 | | 77.400.000 | | 77.400.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 68.293.200 | 100% | 71.293.200 | 100% | 78.400.000 | 100% | 77.400.000 | 100% | 77.400.000 | 100% | 77.400.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 4.250.000 | | 3.250.000 | | 20.000.000 | | 21.500.000 | | 21.500.000 | | 21.500.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 4.250.000 | 100% | 3.250.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 21.500.000 | 100% | 21.500.000 | 100% | 21.500.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum | | | | - | | - | | 28.000.000 | | 28.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | ' | 100% | ' | 100% | 28.000.000 | 100% | 28.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 5.835.750 | | 58.500.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 5.835.750 | 100% | 58.500.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | 165.000.000 | 100% | 165.000.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 75.698.750 | | 55.810.000 | | 128.500.000 | | 128.500.000 | | 128.500.000 | | 128.500.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 37.849.375 | 100% | 11.350.000 | 100% | 64.250.000 | 100% | 64.250.000 | 100% | 64.250.000 | 100% | 64.250.000 | Kecamatan Salimpaung |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 37.849.375 | 100% | 44.460.000 | 100% | 64.250.000 | 100% | 64.250.000 | 100% | 64.250.000 | 100% | 64.250.000 | Kecamatan Salimpaung |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 7.01 | Kecamatan Padang Ganting | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.543.419.561 | | 1.325.021.453 | | 1.590.025.744 | | 1.908.030.892 | | 2.289.637.071 | | 3.747.564.485 | Kecamatan Padang Ganting |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.543.419.561 | 100% | 1.325.021.453 | 100% | 1.590.025.744 | 100% | 1.908.030.892 | 100% | 2.289.637.071 | 100% | 3.747.564.485 | Kecamatan Padang Ganting |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 22.764.400 | | 25.014.400 | | 30.017.280 | | 36.020.736 | | 43.224.883 | | 51.869.860 | Kecamatan Padang Ganting |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 22.764.400 | 100% | 25.014.400 | 100% | 30.017.280 | 100% | 36.020.736 | 100% | 43.224.883 | 100% | 51.869.860 | Kecamatan Padang Ganting |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | - | | 4.000.000 | | 4.800.000 | | 5.760.000 | | 6.912.000 | | 8.294.400 | Kecamatan Padang Ganting |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | | | 100% | 4.000.000 | 100% | 4.800.000 | 100% | 5.760.000 | 100% | 6.912.000 | 100% | 8.294.400 | Kecamatan Padang Ganting |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum | | | | - | | 1.360.000 | | 1.632.000 | | 1.958.400 | | 2.350.080 | | 2.820.096 | Kecamatan Padang Ganting |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | | 100% | 1.360.000 | 100% | 1.632.000 | 100% | 1.958.400 | 100% | 2.350.080 | 100% | 2.820.096 | Kecamatan Padang Ganting |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 18.750.000 | | 55.250.000 | | 66.300.000 | | 79.560.000 | | 95.472.000 | | 114.566.400 | Kecamatan Padang Ganting |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | 18.750.000 | 100% | 55.250.000 | 100% | 66.300.000 | 100% | 79.560.000 | 100% | 95.472.000 | 100% | 114.566.400 | Kecamatan Padang Ganting |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 44.800.000 | | 33.120.000 | | 106.564.241 | | 127.877.089 | | 153.452.507 | | 184.143.008 | Kecamatan Padang Ganting |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indikator<br>1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang | 100% | 100% | 22.400.000 | 100% | 10.500.000 | 100% | 53.282.120 | 100% | 63.938.544 | 100% | 76.726.253 | 100% | 92.071.504 | Kecamatan Padang Ganting |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | dilaksanakan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 22.400.000 | 100% | 22.620.000 | 100% | 53.282.120 | 100% | 63.938.544 | 100% | 76.726.253 | 100% | 92.071.504 | Kecamatan Padang Ganting |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Kecamatan Tanjung Baru | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.614.892.844 | | 1.439.670.552 | | 1.913.672.359 | | 2.006.583.500 | | 2.094.637.425 | | 3.199.423.000 | Kecamatan Tanjung Baru |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan layanan administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.614.892.844 | 100% | 1.439.670.552 | 100% | 1.913.672.359 | 100% | 2.006.583.500 | 100% | 2.094.637.425 | 100% | 3.199.423.000 | Kecamatan Tanjung Baru |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 23.664.400 | | 23.674.400 | | 58.520.000 | | 61.850.000 | | 67.588.500 | | 70.970.000 | Kecamatan Tanjung Baru |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 23.664.400 | 100% | 23.674.400 | 100% | 58.520.000 | 100% | 61.850.000 | 100% | 67.588.500 | 100% | 70.970.000 | Kecamatan Tanjung Baru |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 5.000.000 | | 3.260.000 | | 19.800.000 | | 20.350.000 | | 20.809.000 | | 21.850.000 | Kecamatan Tanjung Baru |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 5.000.000 | 100% | 3.260.000 | 100% | 19.800.000 | 100% | 20.350.000 | 100% | 20.809.000 | 100% | 21.850.000 | Kecamatan Tanjung Baru |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum | | | | - | | 10.000 | | 34.100.000 | | 34.750.000 | | 35.887.000 | | 37.685.000 | Kecamatan Tanjung Baru |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 10.000 | 100% | 34.100.000 | 100% | 34.750.000 | 100% | 35.887.000 | 100% | 37.685.000 | Kecamatan Tanjung Baru |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 49.100.000 | | 178.200.000 | | 191.000.000 | | 187.455.000 | | 196.800.000 | Kecamatan Tanjung Baru |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 49.100.000 | 100% | 178.200.000 | 100% | 191.000.000 | 100% | 187.455.000 | 100% | 196.800.000 | Kecamatan Tanjung Baru |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 42.900.000 | | 30.720.000 | | 126.500.000 | | 128.715.000 | | 132.861.000 | | 139.425.000 | Kecamatan Tanjung Baru |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 21.450.000 | 100% | 8.100.000 | 100% | 63.250.000 | 100% | 64.357.500 | 100% | 66.430.500 | 100% | 69.712.500 | Kecamatan Tanjung Baru |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 21.450.000 | 100% | 22.620.000 | 100% | 63.250.000 | 100% | 64.357.500 | 100% | 66.430.500 | 100% | 69.712.500 | Kecamatan Tanjung Baru |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Kecamatan Lintau Buo Utara | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.589.035.145 | | 1.379.228.921 | | 2.286.500.000 | | 2.465.750.000 | | 2.665.850.000 | | 3.956.850.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan layanan administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.589.035.145 | 100% | 1.379.228.921 | 100% | 2.286.500.000 | 100% | 2.465.750.000 | 100% | 2.665.850.000 | 100% | 3.956.850.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 69.324.200 | | 68.313.200 | | 82.570.000 | | 86.850.000 | | 90.550.000 | | 93.500.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 69.324.200 | 100% | 68.313.200 | 100% | 82.570.000 | 100% | 86.850.000 | 100% | 90.550.000 | 100% | 93.500.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 4.822.000 | | 3.260.000 | | 10.000.000 | | 12.500.000 | | 15.000.000 | | 17.500.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 4.822.000 | 100% | 3.260.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 12.500.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 17.500.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi ketentramaan dan ketertiban umum | | | | - | | 10.000 | | 9.750.000 | | 10.750.000 | | 11.500.000 | | 12.550.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | - | 100% | 10.000 | 100% | 9.750.000 | 100% | 10.750.000 | 100% | 11.500.000 | 100% | 12.550.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 40.500.000 | | 73.550.000 | | 78.750.000 | | 82.650.000 | | 85.250.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | 100% | - | 100% | 40.500.000 | 100% | 73.550.000 | 100% | 78.750.000 | 100% | 82.650.000 | 100% | 85.250.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 72.635.000 | | 52.250.000 | | 92.635.000 | | 95.000.000 | | 97.000.000 | | 101.000.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 36.317.500 | 100% | 13.250.000 | 100% | 46.317.500 | 100% | 47.500.000 | 100% | 48.500.000 | 100% | 50.500.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 36.317.500 | 100% | 39.000.000 | 100% | 46.317.500 | 100% | 47.500.000 | 100% | 48.500.000 | 100% | 50.500.000 | Kecamatan Lintau Buo Utara |
| 7 | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Kecamatan Batipuh Selatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | | | 1.826.506.505 | | 1.821.150.283 | | 2.219.170.148 | | 2.330.128.656 | | 2.400.032.516 | | 3.472.033.491 | Kecamatan Batipuh Selatan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan layanan administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 1.826.506.505 | 100% | 1.821.150.283 | 100% | 2.219.170.148 | 100% | 2.330.128.656 | 100% | 2.400.032.516 | 100% | 3.472.033.491 | Kecamatan Batipuh Selatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | 22.764.400 | | 22.600.000 | | 29.600.000 | | 29.600.000 | | 29.600.000 | | 29.600.000 | Kecamatan Batipuh Selatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kewilayahan | 100% | 100% | 22.764.400 | 100% | 22.600.000 | 100% | 29.600.000 | 100% | 29.600.000 | 100% | 29.600.000 | 100% | 29.600.000 | Kecamatan Batipuh Selatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 4.000.000 | | 3.250.000 | | 6.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.500.000 | Kecamatan Batipuh Selatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Nagari/Desa dengan Kategori Minimal Maju | 100% | 100% | 4.000.000 | 100% | 3.250.000 | 100% | 6.000.000 | 100% | 7.000.000 | 100% | 7.000.000 | 100% | 7.500.000 | Kecamatan Batipuh Selatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum | | | | - | | - | | 5.000.000 | | 6.500.000 | | 6.500.000 | | 7.000.000 | Kecamatan Batipuh Selatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | | 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | - | | - | 100% | 5.000.000 | 100% | 6.500.000 | 100% | 6.500.000 | 100% | 7.000.000 | Kecamatan Batipuh Selatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | - | | 53.630.000 | | 35.000.000 | | 90.000.000 | | 50.000.000 | | 110.000.000 | Kecamatan Batipuh Selatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Penurunan Potensi Konflik | 100% | | - | 100% | 53.630.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 90.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 110.000.000 | Kecamatan Batipuh Selatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 63.025.000 | | 47.645.000 | | 113.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 150.000.000 | Kecamatan Batipuh Selatan |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 31.512.500 | 100% | 14.105.000 | 100% | 56.500.000 | 100% | 65.000.000 | 100% | 65.000.000 | 100% | 75.000.000 | Kecamatan Batipuh Selatan |
| | | 2. Persentase Administrasi Pemerintahan Nagari yang dilaksanakan sesuai standar | 100% | 100% | 31.512.500 | 100% | 33.540.000 | 100% | 56.500.000 | 100% | 65.000.000 | 100% | 65.000.000 | 100% | 75.000.000 | Kecamatan Batipuh Selatan |
| 8 | Unsur Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 8.01 | Kesatuan Bangsa Dan Politik | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2.353.691.811 | | 2.353.691.811 | | 2.353.691.811 | | 2.353.691.811 | | 2.353.691.811 | | 3.353.691.811 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Layanan Administrasi yang tertata | Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah | 100% | 100% | 2.353.691.811 | 100% | 2.353.691.811 | 100% | 2.353.691.811 | 100% | 2.353.691.811 | 100% | 2.353.691.811 | 100% | 3.353.691.811 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.02 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | | | | 764.503.210 | | 764.503.210 | | 764.503.210 | | 764.503.210 | | 764.503.210 | | 1.564.503.210 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | 1. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 13 upacara/70 orang Paskibraka | 13 upacara/70 orang Paskibraka | 764.503.210 | 13 upacara/70 orang Paskibraka/ 10 sekolah | 764.503.210 | 13 upacara/70 orang Paskibraka/ 10 sekolah | 764.503.210 | 13 upacara/70 orang Paskibraka /10 sekolah | 764.503.210 | 13 upacara/70 orang Paskibraka/ 10 sekolah | 764.503.210 | 13 upacara/70 orang Paskibraka/10 sekolah | 1.564.503.210 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.03 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | 975.497.400 | | 975.497.400 | | 975.497.400 | | 2.210.297.120 | | 28.039.000.000 | | 1.075.497.400 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya etika dan budaya politik | 1. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik | 11 Partai Politik | 11 Partai Politik | 975.497.400 | 11 Partai Politik | 975.497.400 | 11 Partai Politik | 975.497.400 | 11 Partai Politik. 2 Dokumen | 2.210.297.120 | 11 Partai Politik. 5 Dokumen | 28.039.000.000 | 11 Partai Politik | 1.075.497.400 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.04 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | 2.200.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | 1. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | 35 Ormas | 35 Ormas | 2.200.000 | 35 Ormas | 2.200.000 | 35 Ormas | 2.200.000 | 35 Ormas | 2.200.000 | 35 Ormas | 2.200.000 | 35 Ormas | 2.200.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya | | | | 18.500.000 | | 19.500.000 | | 19.500.000 | | 19.500.000 | | 19.500.000 | | 19.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program | Indikator Kinerja Program (*outcome*) | Realisasi 2024 | Baseline | | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | Penanggung Jawab Urusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| | 1. Meningkatnya ketahanan ekonomi. sosial. dan budaya masyarakat | 1. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | - | 1 Dokumen Ranperda narkotika | 18.500.000 | 1 Dokumen Perda | 19.500.000 | 10 Sekolah | 19.500.000 | 5 Sekolah | 19.500.000 | 15 Sekolah | 19.500.000 | 20 Sekolah | 19.500.000 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.06 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | | | 608.234.950 | | 608.234.950 | | 608.234.950 | | 608.234.950 | | 608.234.950 | | 808.234.950 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Outcome : | Indikator : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan | 1. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 608.234.950 | 34 Dokumen | 608.234.950 | 34 Dokumen | 608.234.950 | 34 Dokumen | 608.234.950 | 34 Dokumen | 608.234.950 | 34 Dokumen | 808.234.950 | Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Jumlah | | | | | 1.371.381.995.926 | | 1.318.597.091.138 | | 1.420.785.706.482 | | 1.464.325.954.340 | | 1.580.886.651.436 | | 1.742.098.961.858 | |

## 4.2. KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Kinerja merupakan gambaran kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang dikuatifikasi melalui indikator kinerja. Secara terminologi indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Berlandaskan perspektif tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diukur melalui dua indikator, yaitu; 1) Indikator Kinerja Utama dan 2) Indikator Kinerja Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Indikator Kinerja Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### 4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 didasari atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021-2026, SPM dan TPB serta memperhatikan target indikator kinerja prioritas RPJMN 2025-2029 berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Penetapan target indikator IKU Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 2029 merujuk kepada baseline tahun 2024 dan berpedoman kepada target tahun 2030 yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sekaligus sebagai tahun transisi serta menjadi kinerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya dan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Indikator Makro Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2024-2030

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi | % | 3,85 | 3,98 | 5,54 | 6,73 | 6,91 | 7,18 | 5,78 |
| 2. | PDRB perkapita ADHB | Ribu | 45.070 | 49.320 | 54.650 | 60.630 | 67.010 | 73.980 | 81.650 |
| 3. | PDRB perkapita ADHK | Ribu | 28.778 | 29.580 | 30.860 | 32.580 | 34.450 | 36.540 | 38.250 |
| 4. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 5,30 | 5,01 | 4,85 | 4,68 | 4,56 | 4,43 | 4,32 |
| 5. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | % | 76,49 | 77,19 | 77,85 | 78,54 | 79,13 | 79,81 | 80,49 |
| | Usia Harapan Hidup | % | 74,26 | 74,58 | 74,76 | 75,01 | 75,20 | 75,45 | 75,64 |
| | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,05 | 15,27 | 15,5 | 15,74 | 15,97 | 16,2 | 16,44 |
| | Rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,29 | 9,42 | 9,48 | 9,63 | 9,78 | 9,87 | 10,01 |
| | Pengeluaran per kapita | Ribu | 11.223 | 11.391 | 11.564 | 11.744 | 11.929 | 12.121 | 12.320 |
| 6. | Tingkat Kemiskinan | % | 4,28 | 3,4 | 3,28 | 3,16 | 3 | 2,86 | 2,72 |
| 7. | Indeks Gini Rasio | | 0,258 | 0,256 | 0,255 | 0,254 | 0,253 | 0,252 | 0,251 |

Tabel 4.4

Target Indikator Kinerja Utama Sasaran Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2030

| No. | Sasaran Utama Visi/Indikator | Realisasi | Baseline | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Peningkatan pendapatan perkapita | | | | | | | |
| | PDRB perkapita ADHB (Rp ribu) | 45.070 | 49.320 | 54.650 | 60.630 | 67.010 | 73.980 | 81.650 |
| | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | 10,38 | 10,63 | 10,82 | 11,01 | 11,2 | 11,39 | 11,48 |
| 2. | Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang | | | | | | | |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 4,28 | 3,4 | 3,28 | 3,16 | 3 | 2,86 | 2,72 |
| | Rasio Gini | 0,258 | 0,256 | 0,255 | 0,254 | 0,253 | 0,252 | 0,251 |
| | Pertumbuhan Ekonomi | 3,85 | 3,98 | 5,54 | 6,73 | 6,91 | 7,18 | 5,78 |
| 3. | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | | | | | | | |
| | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 3,30 | 3,168 | 3,171 | 3,173 | 3,176 | 3,179 | 3,182 |
| 4. | Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia | | | | | | | |
| | Indeks Pembangunan Manusia | 76,49 | 77,19 | 77,85 | 78,54 | 79,13 | 79,81 | 80,49 |
| | Tingkat Produktivitas Kerja% | 54,35 | 66,04 | 66,72 | 67,40 | 68,08 | 68,76 | 69,44 |
| 5. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 65,32 | 76,15 | 76,36 | 76,58 | 76,79 | 77,00 | 77,21 |

Tabel 4.5
Target Indikator Kinerja Utama Sasaran Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2030

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | BASELINE | TAHUN DAN TARGET KINERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| Misi 1: Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya pembangunan keagamaan | 1. Jumlah rumah tangga yang memiliki satu hafiz/hafizah | Rumah Tangga | 6.305 | 7.305 | 8.305 | 9.305 | 10.305 | 11.305 | 12.305 |
| | | 2. Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan umat | Unit | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | 3. Tingkat Moderasi Beragama | % | - | 6,67 | 13,3 | 20 | 26,67 | 33,33 | 40 |
| 2 | Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan | Jumlah peraturan Nagari terkait adat salingka Nagari yang ditetapkan | Jumlah | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 62 | 75 |
| 3 | Meningkatnya keluarga berkualitas, dan masyarakat inklusif | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 62,42 | 62,92 | 63,42 | 63,97 | 64,49 | 64,99 | 65,49 |
| 4 | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | 1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,336 | 0,30-0,29 | 0,29-0,28 | 0,28-0,27 | 0,27-0,26 | 0,26-0,25 | 0,25-0,23 |
| | | 2. Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 52,3 | 76,54 | 77,04 | 77,54 | 78,04 | 78,54 | 79,04 |
| Misi 2 : Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1.Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74,26 | 74,66 | 75,06 | 75,46 | 75,86 | 76,26 | 76,29 |
| | | 2. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | % | 22,4 | 20,70 | 19,00 | 17,30 | 15,50 | 13,80 | 12,00 |
| 2 | Pendidikan berkualitas yang merata | 1.Rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,29 | 9,42 | 9,58 | 9,73 | 9,89 | 10,04 | 10,2 |
| | | 2. Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,05 | 15,39 | 15,43 | 15,47 | 15,52 | 15,56 | 15,6 |
| 3 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif | Tingkat Kemiskinan | % | 4,28 | 3,09-3,36 | 3,07-3,35 | 3,04-3,32 | 2,89-3,19 | 2,74-3,05 | 2,58-3,02 |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | BASELINE | TAHUN DAN TARGET KINERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| Misi 3 : Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, UMKM dan peningkatan investasi | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pertanian | Nilai PDRB (ADHK) Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan | (Dalam Milyar) | 3.151,72 | 3.268,33 | 3.387,63 | 3.507,89 | 3629,22 | 3.750,87 | 3.873,79 |
| 2 | Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pariwisata, dan ekonomi kreatif | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 0,8 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 1,07 |
| | | Kontribusi sektor pariwisata | (Dalam Milyar) | 140,23 | 140,35 | 159,86 | 206,13 | 265,03 | 340,75 | 434,71 |
| 3 | Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis, Koperasi, Usaha Mikro/IKM, Industri Pengolahan dan BUMD | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 10,38 | 10,63 | 10,80 | 10,97 | 11,14 | 11,31 | 11,48 |
| 4 | Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Juta/Orang | 54,35 | 66,04 | 66,72 | 67,40 | 68,08 | 68,76 | 69,44 |
| 5 | Peningkatan Investasi | Jumlah Realisasi Investasi Daerah | (Milyar/Tahun) | 231,97 | 232 | 265 | 325 | 326 | 327 | 328 |
| 6 | Terwujudnya masyarakat digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi | Indeks masyarakat digital Indonesia | Indeks | 43,27 | 56,14 | 57,33 | 58,52 | 59,71 | 60,9 | 62,11 |
| Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi | 1. Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 78,05 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
| | | 3. Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 45,95 | 49,23 | 50,71 | 52,19 | 53,67 | 55,15 | 56,61 |
| Misi 5: Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) | Indeks | - | 62,51-65,61 | 65,62-68,81 | 68,82-72,61 | 72,62-75,61 | 75,62-78,61 | 78,62-81,61 |
| 2 | Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 65,32 | 76,15 | 76,36 | 76,58 | 76,79 | 77,00 | 77,21 |
| 3 | Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 125,20 | 123,92 | 123,91-122,64 | 122,63-121,36 | 121,35-120,08 | 121,07-118,80 | 118,79-117,52 |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | BASELINE | TAHUN DAN TARGET KINERJA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| | dan kesiapsiagaan bencana, bencana dan pasca bencana | | | | | | | | | |
| Misi 6 : Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas | Indeks | - | 50,01 | 55,01 | 60,01 | 65,01 | 70,01 | 75,01 |
| 2 | Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 3,85 | 5,18 | 5,27 | 5,36 | 5,45 | 5,54 | 5,63 |
| | | 2. Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,3 | 5,19 | 5,11 | 5,03 | 4,95 | 4,87 | 4,79 |
| 3 | Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah | 1. Rasio PAD terhadap total pendapatan/Derajat Otonomi Fiskal | % | 12,27 | 14,56 | 17,57 | 21,32 | 25,92 | 31,45 | 37,92 |
| | | 2. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | 0,15 | 0,21 | 0,39 | 0,48 | 0,59 | 0,74 | 0,95 |
| 4 | Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah | Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Syariah | Unit | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Misi 7 : Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan | | | | | | | | | | |
| 1 | Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi | Persentase Desa Mandiri | % | 65,33 | 66,67 | 68,00 | 69,33 | 70,67 | 72,00 | 73,33 |

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci (*key performance indicator*) atau dikenal juga sebagai *Key Success Indicators* (KSI) digunakan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, diantaranya; a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), b) Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan c) target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan atau Indikator Kinerja Kunci. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Tahun 2025-2030 merujuk pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sedangkan penetapan target capaian indikator kinerja daerah Tahun 2025-2029 dan tahun 2030 sebagai tahun transisi merupakan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan kewenangan menurut urusan pemerintahan daerah. Sehingga menjadi pedoman dalam evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD setiap tahun berjalan berlandaskan hasil evaluasi pencapaian pembangunan daerah Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | BASELINE | TAHUN DAN TARGET KINERJA | | | | | *Perangkat Daerah Pengampu/Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| I | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | | | | | | | | | |
| 1 | Konsumsi listrik per kapita | KWH | 411,86 | 367 | 402,8 | 438,6 | 474,4 | 510,2 | 546 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian/PLN |
| 2 | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) | % | 9,10 | 8,51 | 7,98 | 7,46 | 6,93 | 5,87 | 5,35 | Dinas Pangan dan Perikanan |
| 3 | Kapasitas Air Baku ($m^3$/detik) | $M^3$/Detik | 0,397 | 0,442 | 0,472 | 0,502 | 0,522 | 0,532 | 0,542 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| 4 | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Daya Air Minum Aman | % | 23 | 27,25 | 32 | 37 | 42,25 | 48 | 53 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| 5 | Indeks tutupan lahan | Indeks | 58,89 | 60,34 | 62,34 | 64,59 | 67,09 | 69,84 | 71,44 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 6 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 65,32 | 76,15 | 76,36 | 76,58 | 76,79 | 77 | 77,21 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 7 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | % | 4,89 | 6,15 | 7,84 | 9,58 | 11,33 | 13,07 | 16,81 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| 8 | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah | % | 20,44 | 26,62 | 30,10 | 33,73 | 36,96 | 40,73 | 39,77 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 9 | Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % | 36 | 48,92 | 49,35 | 49,92 | 50,62 | 44 | 48,92 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 10 | Indeks Risiko Bencana (IRB) | % | 125,20 | 123,92 | 123,91 - 122,64 | 122,63 - 121,36 | 121,35 - 120,08 | 120,07 - 118,8 | 118,79 - 117,52 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | BASELINE | TAHUN DAN TARGET KINERJA | | | | | *Perangkat Daerah Pengampu/Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 11 | Jumlah Penduduk | Ribu Jiwa | 406,06 | 410,37 | 414,6 | 418,74 | 422,79 | 426,75 | 430,58 | BPS/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 12 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,21 | 1,16 | 1,11 | 1,1 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | BPS/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 13 | Rasio Jenis Kelamin Penduduk | % | 101,74 | 102.05 | 102.32 | 102.59 | 102.86 | 103.12 | 103.38 | BPS/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 14 | Rasio Ketergantungan Penduduk | % | 43,01 | 41,62 | 40,23 | 38,84 | 37,45 | 36,06 | 34,68 | BPS/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 15 | Kepadatan Penduduk | Jiwa/Km$^2$ | 281,92 | 285,2 | 288,37 | 291,54 | 294,72 | 297,89 | 301,07 | BPS/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16 | Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap (%) | % | 69,89 | 69,99 | 71,46 | 73,89 | 76,29 | 78,89 | 80,89 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| 17 | Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) | % | 58,74 | 60,74 | 62,99 | 65,49 | 68,24 | 71,24 | 74,49 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |
| 18 | Indeks Ketahanan Pangan | indeks | 89,4 | 90,64 | 91,88 | 93,12 | 94,36 | 95,6 | 96,84 | Badan Ketahanan Pangan/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| II | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 3,85 | 3,98 | 5,54 | 6,73 | 6,91 | 7,18 | 5,78 | BPS/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 4,28 | 3,4 | 3,28 | 3,16 | 3 | 2,86 | 2,72 | BPS/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 3 | PDRB Perkapita ADHB | Ribu/Orang | 45,06 | 49,320 | 54,650 | 60,630 | 67,010 | 73,980 | 81,650 | BPS/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 4 | PDRB Perkapita ADHK | Ribu/Orang | 28,778 | 29,580 | 30,860 | 32,580 | 34,450 | 36,540 | 38,250 | BPS/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | Pengeluaran Perkapita | Ribu/Orang | 11.223 | 11.391 | 11.564 | 11.744 | 11.929 | 12.121 | 12.320 | BPS/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | BASELINE | TAHUN DAN TARGET KINERJA | | | | | *Perangkat Daerah Pengampu/Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,3 | 5,01 | 4,85 | 4,68 | 4,56 | 4,43 | 4,32 | BPS/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 7 | Indeks Gini | Indeks | 0,258 | 0,256 | 0,255 | 0,254 | 0,253 | 0,252 | 0,251 | BPS/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 8 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 76,49 | 77,19 | 77,85 | 78,54 | 79,13 | 79,81 | 80,49 | BPS/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 9 | Usia Harapan Hidup (tahun) | tahun | 74,26 | 74,58 | 74,76 | 75,01 | 75,20 | 75,45 | 75,64 | Dinas Kesehatan/BPS |
| 10 | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | orang | 7 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 100 | Dinas Kesehatan |
| 11 | Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | % | 26,90 | 24,20 | 22,95 | 21,70 | 20,45 | 19,20 | 17,95 | Dinas Kesehatan |
| 12 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) | % | 38,31 | 55,00 | 61,90 | 68,80 | 75,70 | 82,60 | 89,50 | Dinas Kesehatan |
| 13 | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate*) | % | 91 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional | % | 95,96 | 98 | 98,10 | 98,20 | 98,30 | 98,40 | 98,50 | Dinas Kesehatan |
| 15 | Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi dan Numerasi) | Literasi (%) | 55,89 | 57,50 | 58,08 | 58,66 | 59,24 | 59,82 | 60,40 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Numerasi (%) | 50,1 | 50,00 | 50,59 | 51,18 | 51,77 | 52,36 | 52,95 | |
| 16 | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional | Literasi (%) | | 55,00 | 59,88 | 64,76 | 69,64 | 74,52 | 76,64 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Numerasi (%) | | 16,00 | 18,56 | 21,12 | 23,68 | 26,24 | 27,84 | |
| 17 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,29 | 9,24 | 9,48 | 9,63 | 9,78 | 9,87 | 10,01 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/BPS |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | BASELINE | TAHUN DAN TARGET KINERJA | | | | | *Perangkat Daerah Pengampu/Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 18 | Harapan Lama Sekolah (tahun) | Tahun | 15,05 | 15,27 | 15,5 | 15,74 | 15,97 | 16,2 | 16,44 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/BPS |
| 19 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | % | 12,2 | 14,00 | 14,12 | 14,24 | 14,36 | 14,47 | 14,58 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/BPS |
| 20 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | % | - | 78,11 | 78,69 | 79,27 | 79,84 | 80,42 | 81,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/BPS |
| 21 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | % | 19,05 | 25,79 | 28,48 | 31,16 | 33,84 | 36,52 | 39,2 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 22 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) | % | 1,0 | 10,2 | 11,66 | 13,12 | 14,58 | 16,04 | 17,5 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 23 | Tingkat Moderasi Beragama | % | - | 6,67 | 11,2 | 15,73 | 20,27 | 24,8 | 29,33 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Kementerian Agama |
| 24 | Persentase Cagar Budaya ditetapkan | % | 22 | 25,11 | 26,11 | 27,11 | 28,11 | 29,11 | 30,11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/BPS |
| 25 | Persentase Warisan Tak Benda yang ditetapkan | % | - | 4,86 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,06 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/BPS |
| 26 | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 62,42 | 65,92 | 69,42 | 72,92 | 76,42 | 79,92 | 83,42 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 27 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 29 | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | Indeks | 52,3 | 67,91 | 68,096 | 68,282 | 68,468 | 68,654 | 68,84 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 30 | Jumlah hafiz/hafizah yang bersertifikat | orang | 19,75 | 20,75 | 21,75 | 22,75 | 23,75 | 24,75 | 25,75 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | BASELINE | TAHUN DAN TARGET KINERJA | | | | | *Perangkat Daerah Pengampu/Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 31 | IKAD (Indeks Akses Keuangan Daerah) | Indeks | 4,91 | 4.94 | 4.95 | 4.97 | 4.98 | 5.00 | 5.01 | OJK/Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 32 | Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi | Unit Layanan | | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/ Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 33 | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan | Orang | | 90 | 133 | 190 | 241 | 294 | 351 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| III | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Ketergantungan | % | 47,29 | 47,86 | 48,67 | 49,48 | 50,28 | 51,07 | 51,85 | BPS/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 10,38 | 8,45 | 8,6625 | 8,875 | 9,0875 | 9,3 | 11,48 | BPS/ Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 3 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 0,8 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 1,07 | BPS/Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 4 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara | Ribu orang | - | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 75 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 5 | Jumlah Tamu Wisatawan Domestik | orang | 1.166.652 | 1.209.979 | 1.260.052 | 1.314.252 | 1.373.552 | 1.436.802 | 1.504.602 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 6 | Jumlah Objek Wisata Yang dikembangkan | Unit | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 35 | 40 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 7 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional | % | 2,07 | 2,04 | 2,03 | 2,02 | 2 | 1,99 | 2,270 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 8 | Proporsi jumlah UKM non pertanian | % | 65.88 | 13,33 | 13,35 | 13,37 | 13,39 | 13,41 | 21,890 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan |
| 9 | Proporsi jumlah IKM (%) | % | 6,72 | 3,65 | 3,73 | 3,81 | 3,88 | 3,96 | 4,04 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | BASELINE | TAHUN DAN TARGET KINERJA | | | | | *Perangkat Daerah Pengampu/Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 10 | Rasio Kewirausahaan (%) | % | 2,7 | 4,57 | 4,7 | 4,84 | 4,97 | 5,1 | 5,26 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 11 | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB | % | 2,41 | 1,675 | 1,717 | 1,759 | 1,801 | 1,843 | 2,130 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan |
| 12 | Persentase jumlah pelaku usaha mikro ekonomi digital | % | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan |
| 13 | Jumlah IKM bersertifikat Halal | Jumlah | 39 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 14 | RoA BUMD (%) | % | - | 0,25475 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30135 | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah |
| 15 | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal | % | 27,09 | 27,43 | 28,63 | 29,83 | 31,03 | 32,23 | 41,95 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 16 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 58,91 | 59,39-60,77 | 59,70-61,31 | 60,00-61,85 | 60,31-62,39 | 60,61-62,93 | 60,92-63,47 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian /BPS |
| 17 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 45,95 | 49,23 | 50,71 | 52,18 | 53,66 | 55,13 | 56,61 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 18 | Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan | % | 27,18 | 26,65 | 26,2 | 25,75 | 25,3 | 24,85 | 24,41 | Dinas Pertanian |
| 19 | Tingkat Produktifitas tenaga kerja | Juta/orang | 54,35 | 66,04 | 66,72 | 67,4 | 68,08 | 68,76 | 69,44 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 20 | Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | Juta/orang | 37,13 | 35,75 | 36,12 | 36,49 | 36,86 | 37,23 | 37,59 | Dinas Pertanian |
| 21 | Indeks masyarakat digital Indonesia | Indeks | 43,27 | 56,14 | 57,33 | 58,52 | 59,71 | 60,9 | 62,11 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 22 | Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Pokok | % | -1,16 | -1,08 | -1,01 | -0,94 | -0,87 | -0,8 | -0,73 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan |
| 23 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | % PDRB | 28,71 | 32,11 | 32,20 | 32,29 | 32,37 | 32,46 | 32,55 | BPS |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | BASELINE | TAHUN DAN TARGET KINERJA | | | | | *Perangkat Daerah Pengampu/Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 24 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | % PDRB | 11,57 | 50,92 | 51,36 | 51,80 | 52,23 | 52,67 | 58,89 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan/BPS |
| 25 | Persentase Desa Mandiri (%) | % | 65,33 | 66,67 | 68,00 | 69,33 | 70,67 | 72,00 | 73,33 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 26 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | % | 0,15 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah/BPS |
| 27 | Tingkat Inflasi (%) | % | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah |
| 28 | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%) | % | 9,2 | 6,04 | 8,83 | 11,62 | 14,41 | 17,20 | 20,00 | OJK/ Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah /Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 29 | Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Kabupaten | Rupiah | 465.558 | 2.857.666 | 3.443.170 | 3.443.170 | 4.028.674 | 4.614.179 | 5.785.187 | OJK/ Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah /Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 30 | Total Kredit/PDRB (%) | % | 16,72 | 18,28 | 19,31 | 20,35 | 21,38 | 22,42 | 23,46 | OJK/ Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah /Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 31 | Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan (%) | % | 2,62 | 2,56 | 2,56 | 2,57 | 2,57 | 2,58 | 2,58 | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah /BPS |
| 32 | Jumlah Koperasi syariah | Unit | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan |
| 33 | Jumlah Kajian | Kajian | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 34 | Persentase Inovasi yang diterapkan | Persentase | 72 | 80,00 | 82,50 | 85,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | BASELINE | TAHUN DAN TARGET KINERJA | | | | | *Perangkat Daerah Pengampu/Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 35 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan | % | 60,71 | 61,31 | 63,65 | 65,99 | 68,33 | 71,01 | 73,44 | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 36 | Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | Persentase | | 13,33 | 13,35 | 13,37 | 13,39 | 13,41 | 13,43 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan |
| IV | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Reformasi Hukum | indeks | 92,9 | 86,85 | 87,08 | 87,31 | 87,54 | 87,77 | 88 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| 2. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | indeks | 2,81 | 2,81 | 3,22 | 3,31 | 3,40 | 3,49 | 3,67 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3. | Indek Pemerintah Digital | indeks | 2,82 | - | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 4. | Indeks Pelayanan Publik | indeks | 4,26 | 4,28 | 4,29 | 4,30 | 4,31 | 4,32 | 4,55 | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| 5. | Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai) | (Nilai) | 77,95 | 78,95 | 79,95 | 80,95 | 81,5 | 82,5 | 83 | Inspektorat Daerah |
| 6. | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Trantibum | % | 100 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Satua Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 7. | Rasio Angka Kriminalitas | % | 5,90% | 7,8 | 7,74 | 7,68 | 7,62 | 7,56 | 7,5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8. | Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu | | | | | | | | | |
| | a. Pemilu (Pilpres & pileg) | % | 66,17 | 70 | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 71,6 | 72 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | b. Pilkada | % | 59,25 | 65 | 65,4 | 65,8 | 66,2 | 66,6 | 67 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 9. | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan | % | 0 | 14,29% | 14,29% | 0,1429 | 14,29% | 14,29% | 100 | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah |
| 10. | Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana | % | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 11 | Fasilitasi Penanganan konflik sosial | Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | REALISASI | BASELINE | TAHUN DAN TARGET KINERJA | | | | | *Perangkat Daerah Pengampu/Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 12 | Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika | Jumlah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 13 | Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat Daerah |
| 14 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Sekretariat DPRD |
| 15 | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 84,56 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 16 | Indeks Zakat Nasional | Indeks | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah |

Tabel 4.7
Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030

| INDIKATOR KINERJA KUNCI | | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun dan Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1) | Pendidikan | | | | | | | | |
| 1. | Tingkat partisipasi warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | % | 67,55 | 55,84 | 58,88 | 61,92 | 64,96 | 68 | 71,04 |
| 2. | Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | % | 97,32 | 98,02 | 98,47 | 98,91 | 99,35 | 99,8 | 100 |
| 3. | Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | % | 81,85 | 44,87 | 53,08 | 59,57 | 66,06 | 72,55 | 73,31 |
| 2) | Kesehatan | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Daya Tampung RS Rujukan | % | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2 | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 97,96 | 98,94 | 99,93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentasebayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 31,21 | 37,45 | 44,94 | 53,93 | 64,72 | 77,66 | 93,19 |
| 8 | Persentase orang usia 15 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 20,58 | 24,7 | 29,64 | 35,56 | 42,67 | 51,21 | 61,45 |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI | | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun dan Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 9 | Persentase orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 59,98 | 65,98 | 72,58 | 79,83 | 87,82 | 96,6 | 100 |
| 10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3) | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten | % | 7,62 | 8,62 | 9,87 | 11,37 | 13,12 | 15,12 | 17,37 |
| 2 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman Pantai di WS kewenangan kabupaten | % | 0 | 5,65 | 6,65 | 7,85 | 9,25 | 10,85 | 12,65 |
| 3 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | 31,08 | 32,33 | 33,38 | 35,58 | 37,58 | 39,38 | 42,33 |
| 4 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten | % | 76,55 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI | | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun dan Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 5 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestiK | % | 85,97 | 87 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| 6 | Rasio kepatuhan IMB kabupaten | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | % | 69,89 | 69,99 | 70,09 | 70,19 | 70,29 | 70,39 | 70,49 |
| 8 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 6,73 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 9 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Ahli | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4) | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang | % | 98,07 | 98,07 | 95,26 | 93,58 | 89,09 | 86,38 | 84,25 |
| 4 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Unit | 10,25 | 10,25 | 10,24 | 10,24 | 10,23 | 10,23 | 10,22 |
| 5 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | % | 19,27 | 21,26 | 22,62 | 24,83 | 26,08 | 26,98 | 31,29 |
| 5) | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | 2,13 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI | | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun dan Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | % | 95,55 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| 4 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana | % | 1,662 | 1,7 | 1,78 | 1,86 | 1,94 | 2 | 2 |
| 5 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 71,23 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 95 |
| 7 | Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran | Menit | 11,16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 6) | Sosial | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7) | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| 1 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | % | 33,33 | 34,31 | 34,62 | 34,93 | 35,24 | 35,55 | 35,86 |
| 2 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | % | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| 3 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Juta/Orang | 54.350.226,69 | 66,04 | 66,72 | 67,4 | 68,08 | 68,76 | 69,44 |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI | | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun dan Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 |
| 5 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | % | 12,84 | 12,91 | 13,33 | 13,75 | 14,17 | 14,59 | 15,01 |
| 8) | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | |
| 1 | Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD | % | 2,47 | 2,48 | 2,49 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | % | 10,46 | 10,47 | 10,48 | 10,49 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 9) | Pangan | | | | | | | | |
| 1 | Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) | % | 17,63 | 37 | 47 | 57 | 77 | 100 | 100 |
| 10) | Pertanahan | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase pemanfaatan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | % | 35,5 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal | persil | - | - | - | - | - | - | - |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI | | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun dan Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4 | Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | persil | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Tersedianya tanah untuk masyarakat | persil | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | % | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11) | Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten | Indeks | 65,32 | 76,15 | 76,36 | 76,58 | 76,79 | 77 | 77,21 |
| 2 | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten | % | 56,43 | 57,59 | 59,99 | 65,19 | 70,38 | 75,58 | 83,77 |
| 3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | Jumlah | 42 | 53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 |
| 12) | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital | % | 6,03 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | 85,15 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| 3 | Persentase penerbitan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun | % | 99,38 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 |
| 4 | Persentase penerbitan akta kematian dari penduduk yang berstatus meninggal | % | 100 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 5 | Persentase penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang berstatus menikah | % | 80,43 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI | | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun dan Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 6 | Persentase penerbitan akta perceraian bagi penduduk yang berstatus cerai | % | 67,39 | 67,5 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 13) | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pengentasan desa tertinggal | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Persentase peningkatan status desa mandiri | % | 65,33 | 66,67 | 68 | 69,33 | 70,67 | 72 | 73,33 |
| 14) | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | |
| 1 | TFR (AngkaKelahiran Total) | % | 0,18 | 2,31 | 2,28 | 2,25 | 2,22 | 2,2 | 2,18 |
| 2 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR) | % | 66,96 | 69,43 | 69,93 | 70,43 | 70,93 | 71,43 | 71,93 |
| 3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) | % | 8,44 | 7,94 | 7,44 | 6,94 | 6,44 | 5,94 | 5,44 |
| 15) | Perhubungan | | | | | | | | |
| 1 | Rasio konektivitas Kabupaten | % | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | V/C Ratio di jalan Kabupaten | % | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 16) | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | |
| 1 | Indek Masyarakat Digital | % | 43,27 | 45,22 | 48,3 | 56,18 | 59,71 | 60,9 | 62,11 |
| 2 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 76,47 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 |
| 3 | Indek Keterbukaan Informasi | % | 80 | 90 | 92 | 95 | 96 | 97 | 97 |
| 4 | Indek Pembangunan Statistik (IPS) | % | 2,32 | 2,6 | 2,65 | 2,7 | 2,75 | 2,8 | 2,85 |
| 17) | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | % | 6,81 | 7,02 | 8,51 | 10,21 | 12,77 | 13,19 | 14,04 |
| 2 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha | % | 3,39 | 4,45 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,22 | 5,5 |
| 18) | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 2,21 | 2,3 | 2,34 | 2,37 | 2,4 | 2,42 | 2,45 |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI | | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun dan Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 5,55 | 5,65 | 5,66 | 5,69 | 5,72 | 5,74 | 6 |
| 3 | Peningkatan prestasi olahraga | medali | 45 | 64 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 19) | Penanaman Modal | | | | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten | % | 5,84 | 6 | 14,224 | 22,642 | 0,308 | 0,307 | 0,306 |
| 20) | Statistik | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21) | Persandian | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Indeks | 393 | 395 | 400 | 420 | 450 | 480 | 500 |
| 22) | Kebudayaan | | | | | | | | |
| 1 | Terlestarikannya Cagar Budaya | % | 50,24 | 50,24 | 51,24 | 52,24 | 53,24 | 54,24 | 55,24 |
| 2 | Jumlah peraturan Nagari terkait adat dan budaya yang ditetapkan | % | - | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 |
| 23) | Perpustakaan | | | | | | | | |
| 1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai | 62,07 | 65,15 | 67,25 | 68,75 | 69,85 | 70,15 | 72 |
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Nilai | 67,81 | 68,75 | 69,6 | 71,5 | 72,3 | 73,8 | 75 |
| 24) | Kearsipan | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | % | 75,06 | 75,15 | 75,5 | 76,65 | 77,25 | 78,5 | 80 |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI | | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun dan Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Jumlah | 1787 | 1807 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 |
| 25) | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten di (sumber data: *one data* KKP) | Ton | 9.586,11 | 9.588,05 | 9.591,18 | 9.593,58 | 9.595,98 | 9.598,38 | 9.600,78 |
| 26) | Pariwisata | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | % | 44,3 | 2,09 | 3 | 3,28 | 3,41 | 3,52 | 3,73 |
| 2 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten | % | 5,28 | 3,71 | 4,14 | 4,3 | 4,51 | 4,6 | 4,72 |
| 3 | Tingkat hunian akomodasi | % | 13,63 | 13,67 | 13,86 | 13,9 | 13,95 | 13,98 | 14 |
| 4 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | % | 15,29 | 15,32 | 15,36 | 15,39 | 15,42 | 15,46 | 15,49 |
| 5 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | % | 5,39 | 6,29 | 6,32 | 6,31 | 6,31 | 6,41 | 6,58 |
| 27) | Pertanian | | | | | | | | |
| 1 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | % | 5,02 | 5,34 | 5,40 | 5,50 | 5,55 | 5,6 | 5,65 |
| 2 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | % | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28) | Perdagangan | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | % | 52,87% | 59,00% | 62,37% | 65,49% | 66,22% | 64,60% | 69,15% |
| 2 | Persentase kinerja realisasi pupuk | % | 20,58% | 32,15% | 34,55% | 44,88% | 40,12% | 38,18% | 36,27% |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI | | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun dan Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3 | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | 3,62% | 3,33% | 3,73% | 4,18% | 4,51% | 4,83% | 5,02% |
| 29) | Perindustrian | | | | | | | | |
| 1 | Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten | JML IKM | 400 | 450 | 510 | 570 | 630 | 700 | 760 |
| 2 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | % | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 3 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 40 | 49,34 | 50,85 | 52,3 | 53,67 | 54,97 | 56,2 |
| 4 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | % | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 100 |
| 30) | Perencanaan dan Keuangan | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | | 34,36 | 34,53 | 34,7 | 34,88 | 35,05 | 35,23 | 35,4 |
| 2 | Rasio PAD | % | 12,27 | 14,55 | 16,99 | 20,12 | 23,97 | 25,77 | 28,01 |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI | | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun dan Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | - | 2,80 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4 | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 5 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*) | % | 88,32 | 89,32 | 89,77 | 90,22 | 90,67 | 91,12 | 91,58 |
| 6 | Opini Laporan Keuangan | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 31) | Pemerintahan | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokasi | Indeks | 78,05 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
| 2 | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai | - | 3.300 | 3.310 | 3.320 | 3.330 | 3.340 | 3.350 |
| 32) | Pengadaan | | | | | | | | |
| 1 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | 7,96 | 7,96 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Rasio Belanja yang dilakukan melalui pengadaan | 8,52 | 25,93 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah | 10,82 | 10,82 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 33) | Kepegawaian | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 414,95 | 415 | 415,1 | 415,2 | 415,3 | 415,4 | 415,5 |
| 2 | Rasio Pegawai Fungsional (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 26,66 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | 27 | 27,1 | 27,2 |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI | | Satuan | Realisasi | Baseline | Tahun dan Target Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URUSAN | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 39,91 | 39,95 | 40 | 40,05 | 40,1 | 40,15 | 40,2 |
| 34) | Manajemen Keuangan | | | | | | | | |
| 1 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | | -0,05 | -0,025 | 0 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1125 |
| 2 | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | % | -1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | *Assets management* | | -0,004 | -0,002 | -0,001 | 0,001 | 0,0015 | 0,0023 | 0,0033 |
| 4 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | % | 6,04 | 6,25 | 6,28 | 6,31 | 6,35 | 6,38 | 6,41 |
| 35) | Transparansi dan Partisipasi Publik | | | | | | | | |
| 1 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | | | - | - | - | - | - | - |

# BAB V
# PENUTUP

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memuat visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2025-2029 mendatang yaitu; “Tanah Datar Maju, Berkelanjutan dan Berbudaya Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Visi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, akan terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan.

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terpadu. Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pencapaian visi RPJMD dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang memadai. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Komunikasi publik yang efektif penting dalam rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Upaya mewujudkan visi daerah juga memerlukan lingkungan pembiayaan yang kondusif untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

## 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Visi Kabupaten Tanah Datar terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. RPJMD menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan diantaranya melalui konsistensi antara perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian melalui manajemen risiko, mekanisme perubahan dan komunikasi publik, mekanisme pembiayaan pembangunan daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif.

### 5.1.1 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan, yang terdiri dari unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, kelompok masyarakat lainnya dan media. Untuk mendorong partisipasi semua pelaku pembangunan perlu diberi sistem insentif yang baik. Adanya sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan dan partispasi aktifnya sehingga dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sistem insentif bagi pelaku pembangunan diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Untuk pelaku pembangunan, sistem insentif berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

5.1.2 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti perubahan geopolitik, geoekonomi dan bencana. Perubahan dilaksanakan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

5.1.3 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif dan komunikatif. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah, penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik dan mudah dimanfaatkan, serta keterlibatan semua kelompok masyarakat dengan metode komunikasi yang sesuai. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat dan objektif. Komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan.

5.1.4 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan lainnya serta penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tanah Datar.

Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

5.2 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi yang Efektif melalui Manajemen Risiko

Dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontiniu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Manajemen risiko merupakan suatu proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan untuk meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian. Pelaksanaan manajemen risiko diperlukan untuk membantu pencapaian target RPJMD. Manajemen risiko sebagai upaya untuk meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan.

Kerangka manajemen risiko dalam pengendalian pembangunan daerah meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian tingkat risiko, perencanaan langkah mitigasi, pelaksanaan mitigasi, serta pemantauan

dan evaluasi efektivitasnya. Tahapan ini perlu terintegrasi dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah sehingga setiap potensi hambatan dapat diantisipasi sejak dini. Selain itu, diperlukan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara Perangkat Daerah, pimpinan daerah, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan tindak lanjut hasil evaluasi risiko benar-benar dijalankan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas kegiatan prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan anggaran. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini memerlukan mekanisme pelaporan berkala yang transparan dan berbasis data, sehingga setiap penyimpangan dari target atau jadwal dapat segera dikoreksi. Sistem pengendalian harus memanfaatkan teknologi informasi seperti *dashboard monitoring*, *e-planning*, dan *e-budgeting* untuk mempermudah pemantauan *real-time*.

Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mencakup pemantauan pelaksanaan proyek prioritas, pemantauan mitigasi risiko pembangunan, monitoring dan evaluasi sasaran prioritas pembangunan nasional, dan evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama serta program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Agar kerangka pengendalian dan evaluasi ini efektif, perlu diterapkan prinsip *continuous improvement*, yaitu pembelajaran berkelanjutan dari setiap siklus pembangunan. Hasil evaluasi risiko dan capaian pembangunan harus menjadi bahan perbaikan kebijakan, penyempurnaan perencanaan, serta penyesuaian strategi pelaksanaan di tahun berikutnya. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi dini, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola pembangunan daerah yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi hasil.

## 5.3 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Pada tingkat kabupaten, tata kelola SDI menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis bukti. Implementasi SDI di tingkat kabupaten mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang mengatur mekanisme koordinasi, peran, dan tanggung jawab antar instansi. Tata kelola SDI di kabupaten dilakukan dengan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan master data yang seragam, sehingga setiap data yang dihasilkan oleh perangkat daerah memiliki kualitas yang konsisten dan dapat diintegrasikan.

Dalam pelaksanaannya, struktur tata kelola SDI di kabupaten melibatkan pembina data yang biasanya dijabat oleh Kepala Bappeda sebagai penentu kebijakan dan koordinator utama, walidata yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pihak yang

memeriksa kesesuaian dan keterpaduan data, produsen data yang berasal dari perangkat daerah teknis sebagai pengumpul dan pengolah data sesuai bidangnya, serta pengguna data yang mencakup instansi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.

Pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi mulai dari perencanaan data sesuai kebutuhan prioritas pembangunan daerah, pengumpulan data oleh produsen menggunakan metode standar nasional, validasi dan verifikasi oleh walidata, integrasi ke dalam portal satu data kabupaten yang terhubung dengan provinsi dan pusat, diseminasi melalui kanal resmi agar dapat diakses oleh publik dan instansi terkait, hingga pemutakhiran berkala untuk menjamin akurasi dan relevansi data. Manfaat dari tata kelola SDI di tingkat kabupaten sangat signifikan, antara lain menghindari duplikasi pengumpulan data, mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi indikator kinerja pembangunan, mendorong keterbukaan informasi publik, dan memperkuat integrasi data daerah ke dalam sistem nasional.

Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas SDM, kualitas dan konsistensi data yang belum seragam, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, serta komitmen antar perangkat daerah yang belum optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya penguatan melalui pelatihan teknis, penyusunan regulasi turunan di tingkat kabupaten, peningkatan infrastruktur TI, dan optimalisasi koordinasi melalui forum data daerah. Dengan penerapan tata kelola SDI yang baik, kabupaten akan mampu memperkuat sistem informasi pembangunan yang terintegrasi, transparan, akuntabel, dan adaptif, sehingga setiap kebijakan publik dapat disusun dan dilaksanakan secara tepat sasaran berdasarkan data yang valid dan terpercaya.

## 5.4 Pembiayaan Pembangunan

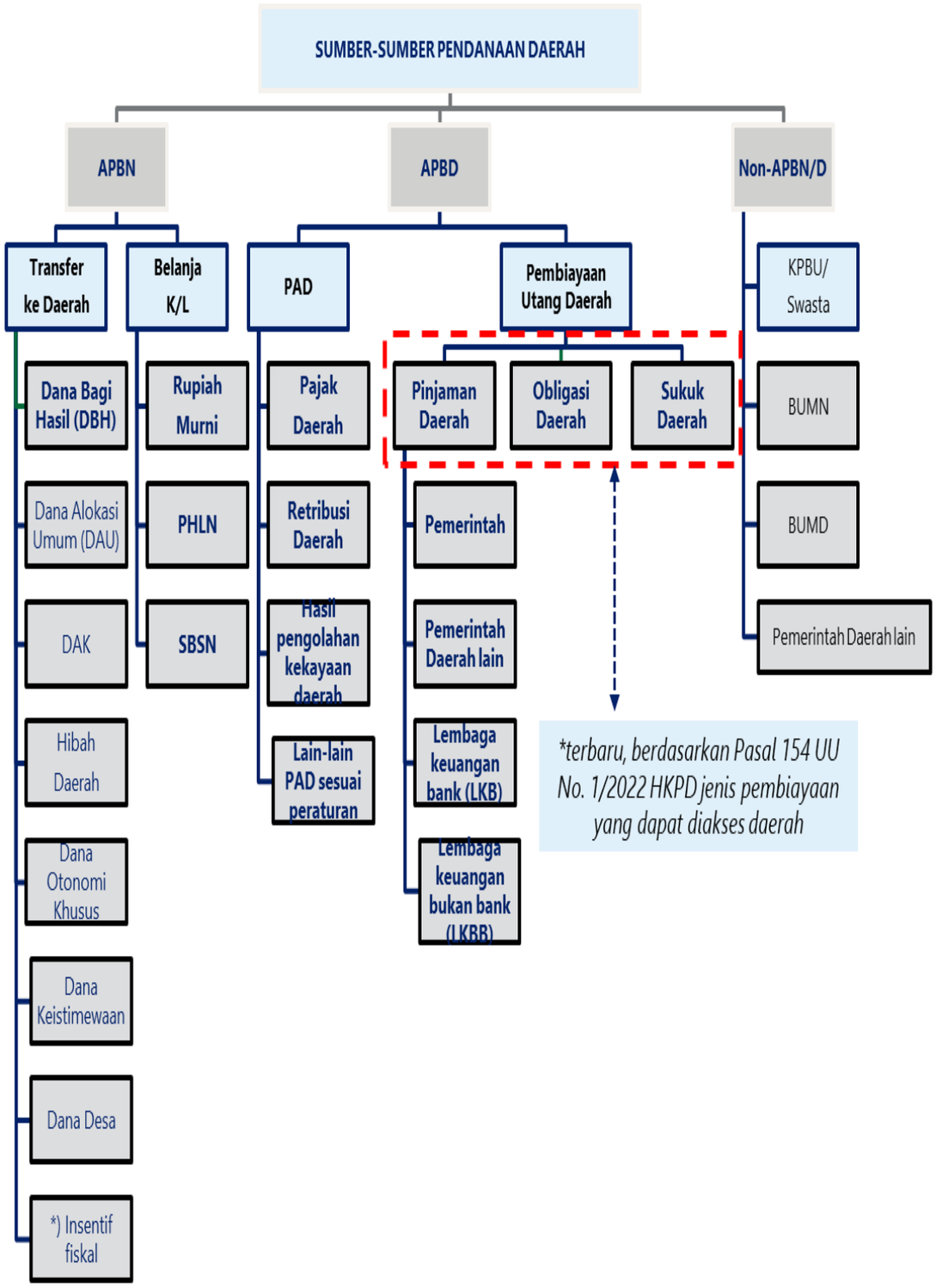
Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Tanah Datar dibutuhkan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Terdapat 5 (lima) instrumen pendanaan dari berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah seperti Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), belanja dari Kementerian, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah dan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU) dan Non APBD/APBN.

Skema pembiayaan lain yang akan dikembangkan yaitu skema *blended finance*. Skema ini fokus pada gabungan pendanaan dari pemerintah, pihak swasta untuk mengatasi hambatan investasi swasta dalam proyek infrastruktur.

Gambar 5.1

Sumber-Sumber Pendanaan Daerah



Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu perlu sinergi dan kerja sama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Datar 2025-2029: "Tanah Datar Maju, Berkelanjutan dan Berbudaya Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001

# METADATA INDIKATOR KINERJA PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025-2029

I. Indikator Kinerja Makro

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Laju Pertumbuhan Ekonomi |
| Definisi | Laju pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan persentase Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Ini adalah indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di masa depan. |
| Rumus Penghitungan | $laju\ Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDBt - PDB(\mathrm{t}-1)}{PDB(t-1)} X\ 100\%$<br>$PDB_t$ = Produk Domestik Bruto pada tahun ke-t (tahun berjalan)<br>$PDB_{t-1}$ = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya |
| Interpretasi | Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peertumbuhan barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

b. PDRB per Kapita

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta). |
| Definisi | PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku ataupun harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. |
| Rumus Perhitungan | $PDRB\ per\ kapita = \frac{\mathrm{PDRB}\ ADHB/\mathrm{ADHK}}{populasi}$<br>Keterangan:<br>PDRBADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku<br>PDRBADHK = PDRB Atas Dasar Harga Konstan<br><br>Populasi = jumlah penduduk regional<br>t = periode |
| Interpretasi | Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Manusia (skor) |
| Definisi | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. |
| Rumus Penghitungan | $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$ |
| Interpretasi | IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, |

| | |
|---|---|
| | pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli)<br>Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori :<br>- Rendah: IPM < 60<br>- Sedang: 60 <= IPM < 70<br>- Tinggi: 70 <= IPM < 80<br>- Sangat tinggi: IPM >= 80 |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Satu kali satu tahun |

d. Usia Harapan Hidup

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) |
| Definisi | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. |
| Rumus Perhitungan | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack* |
| Interpretasi | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | SP: 10 tahunan dan SUPAS: 10 tahunan |

e. Harapan Lama Sekolah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Harapan Lama Sekolah |
| Definisi | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. |
| Rumus Perhitungan | $Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$<br><br>Keterangan:<br>$FK$ = Faktor koreksi pesantren<br>$Et$ = Jumlah penduduk usia $i$ yang berkolah pada tahun $t$<br>i<br>$Pt$ = Jumlah penduduk usia $i$ pada tahun $t$<br>i<br>$i$ = Usia (7, 8, …, $n$) |
| Interpretasi | Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu.<br>Misal: HLS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan menamatkan jenjang pendidikan SLTA. |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya) |

f. Rata-rata lama sekolah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) |
| Definisi | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:<br><br>Tidak punya ijazah = 0 tahun;<br>SD = 6 tahun;<br>SMP = 9 tahun;<br>SMA = 12 tahun;<br>D1/D2 = 14 tahun;<br>D3 = 15 tahun;<br>D4 = 16 tahun;<br>S1 = 17 tahun;<br>S2 = 19 tahun;<br>S3 = 22 tahun.<br><br>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:<br>Tidak pernah sekolah = 0 tahun;<br>Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;<br>Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;<br>Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;<br>Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1 |
| Rumus Perhitungan | $Rata-rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$<br><br>Keterangan:<br>$P15+$ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas<br>$xi$ = Lama sekolah penduduk ke- $i$ |
| Interpretasi | Misal: RLS 15+ Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 = 8,57 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Datar yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,57 tahun atau belum menamatkan jenjang Pendidikan SLTP. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya) |

g. Pengeluaran perkapita

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Pengeluaran perkapita |
| Definisi | pengeluaran per kapita adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat setiap tahunnya, yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* – PPP) |
| Rumus Penghitungan | $\text{Pengeluaran per kapita} = \frac{Total\ pengeluaran\ rumah\ tangga}{jumlah\ anggota\ rumah\ tangga}$ |
| Interpretasi | Nilai tinggi → menggambarkan daya beli dan tingkat konsumsi lebih besar, menunjukkan kesejahteraan stuktur lebih tinggi.<br>Nilai rendah → menandai ekonomi rentan atau memiliki daya beli terbatas.<br>Tren naik (riil) → menunjukkan peningkatan standar hidup masyarakat. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

h. Tingkat kemiskinan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Kemiskinan (%) |
| Definisi | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). |
| Rumus Perhitungan | $P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^\alpha$<br>Dimana :<br>$\alpha = 0$<br>z = garis kemiskinan.<br>yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z<br>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.<br>n = jumlah penduduk. |
| Interpretasi | Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia.<br>Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Maret dan September) |

i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
| Definisi | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. |
| Rumus Perhitungan | $TPT = PP \quad x\ 100\%$ |

| | |
|---|---|
| | $PAK$<br>Keterangan:<br>TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)<br>PP = Jumlah pengangguran (orang)<br>PAK = Jumlah angkatan kerja (orang) |
| Interpretasi | Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

j. Indeks Gini

| Nama Indikator | Indeks Gini |
|---|---|
| Definisi | Indeks Gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis. |
| Rumus Penghitungan | Rasio Gini = $1 - \sum n\ (pi - pi)()(Yi - Yi)()$<br>i'(<br>dimana:<br>$pi$ = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i<br>$Yi$ = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i<br>$n$ = jumlah observasi |
| Interpretasi | Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:<br>Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.<br>Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang.<br>Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik.<br>Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.<br>Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| Frekuensi | Tahunan |

II. Metadata Indikator Sasaran Visi

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta) |
| Definisi | PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. |
| Rumus Perhitungan | $PDRB\ per\ kapita$ = PDRB $ADHB$ / $populasi$<br>Keterangan:<br>PDRBADHB = PDRB Atas Dasar Harga berlaku<br>populasi = jumlah penduduk regional<br>t = periode |
| Interpretasi | Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) |
| Definisi | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. |
| Metode Perhitungan | Kontribusi $PDRB\ Sektor\ Industri\ Pengolahan$<br><br>= $Nilai$ tambah $sektor\ Industri\ pengolahan$ x 100%<br>$Nilai\ PDRB$ Kabupaten |
| Interpretasi | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

2. Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang

a. Tingkat Kemiskinan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat kemiskinan (%) |
| Definisi | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^\alpha$$<br>Dimana :<br>$\alpha = 0$<br>z = garis kemiskinan.<br>yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z<br>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.<br>n = jumlah penduduk. |
| Interpretasi | Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia.<br>Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Maret dan September) |

b. Rasio Gini

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio gini |
| Definisi | Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis. |
| Rumus Penghitungan | Rasio Gini = $1 - \sum n\ (pi - pi)()(Yi - Yi)()$<br>i'(<br>dimana:<br>$pi$ = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i<br>$Yi$ = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i<br>$n$ = jumlah observasi |
| Interpretasi | Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:<br>Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.<br>Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang.<br>Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik.<br>Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.<br>Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| Frekuensi | Tahunan |

c. Pertumbuhan Ekonomi

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Pertumbuhan ekonomi |
| Definisi | Pertumbuhan Ekonomi adalah Proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara/daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP Riil/PDRB Riil di negara atau daerah tersebut |
| Rumus Penghitungan |  |
| Interpretasi | Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah atau pembangunan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin baik perkembangan ekonomi daerah tersebut. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (skor) |
| Definisi | Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk. |
| Rumus Penghitungan | Perhitungan skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
| Interpretasi | Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk melihat keberhasilan dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengetahui pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambil dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas Pemerintahan Daerah. |
| Sumber Data | Kementerian Dalam Negeri |
| Frekuensi | Satu kali satu tahun |

4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Manusia (skor) |
| Definisi | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. |
| Rumus Penghitungan | $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$ |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli)<br>Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori :<br>- Rendah: IPM < 60<br>- Sedang: 60 <= IPM < 70<br>- Tinggi: 70 <= IPM < 80<br>- Sangat tinggi: IPM >= 80 |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Satu kali satu tahun |

b. Tingkat Produktivitas Kerja

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja ((juta/orang) |
| Definisi | Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{\text{PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$ |
| Interpretasi | Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik: |
| Frekuensi | Tahunan |

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks kualitas lingkungan hidup (skor) |
| Definisi | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). |
| Rumus Penghitungan | $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ |
| Interpretasi | Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |

| Nomor | Kategori | Angka Rentang |
|---|---|---|
| 1 | Sangat Baik | $90 \leq x \leq 100$ |
| 2 | Baik | $70 \leq x < 90$ |
| 3 | Sedang | $50 \leq x < 70$ |
| 4 | Kurang | $25 \leq x < 50$ |

| | |
|---|---|
| | 5 \| Sangat Kurang \| 0 ≤ x < 25 |
| Sumber Data | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| Frekuensi | Satu kali satu tahun |

III. Meta Data Indikator Kinerja Utama

A. MISI I : Meningkatkan Kehidupan Beragama, Beradat dan Berbudaya

1. Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Satu Hafiz/Hafizah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rumah tangga yang memiliki satu hafiz/hafizah |
| Definisi | Rumah tangga yang memiliki minimal 1 orang anggota keluarga yang hafizh minimal 1 Juz yang sudah bersertifikat yang di keluarkan oleh Forum Komunikasi Rumah Tahfizh (FKRT) Kecamatan dan Lajnah Tahfizul Qur'an Kabupaten Tanah Datar |
| Rumus Penghitungan | Jumlah rumah tangga yang memiliki minimal 1 orang anggota keluarga yang hafizh minimal 1 Juz yang sudah bersertifikat yang di keluarkan oleh FKRT Kecamatan dan Lajnah Tahfizul Qur'an Kabupaten Tanah Datar |
| Interpretasi | Semakin banyak rumah tangga yang memiliki Hafizh/Hafizhah, menandakan semakin meningkat pembangunan keagamaan |
| Sumber Data | FKRT dan Lajnah Kabupaten Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

2. Jumlah Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Umat

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan umat |
| Definisi | Mesjid binaan merupakan lembaga keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan sosial keagamaan, ibadah dan toleransi beragama. |
| Rumus Penghitungan | 1 Mesjid binaan per kecamatan |
| Interpretasi | Setelah dilakukan pembinaan terhadap masjid binaan yang ada di Kabupaten Tanah Datar selama 2 tahun kriteria mesjid dinaikkan menjadi mesjid paripurna. |
| Sumber Data | 1. Nagari<br>2. Kementerian Agama<br>Lembaga Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Kabupaten Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

3. Tingkat Moderasi Beragama

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat moderasi beragama (%) |
| Definisi | Tingkat moderasi beragama merupakan pembentukan dan pembinaan kepada masyarakat melalui kelompok kelembagaan agama dan pesantren di setiap Nagari/Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. |
| Metode Perhitungan | Tingkat moderasi beragama = $\frac{\text{Jumlah Nagari/Desa dibentuk dan dibina moderasi beragama}}{\text{Jumlah Nagari/Desa}}$ X 100% |
| Interpretasi | Moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementaskannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan karena seorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan. |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Kementerian Agama Republik Indonesia |
| Frekuensi | Tahunan |

4. Jumlah Peraturan Nagari terkait Adat Salingka Nagari Ditetapkan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah peraturan nagari terkait adat salingka nagari yang ditetapkan |
| Definisi | Jumlah nagari yang menetapkan peraturan nagari terkait adat salingka nagari |
| Rumus Penghitungan | Jumlah nagari yang memiliki peraturan nagari terkait adat salingka nagari |
| Interpretasi | Semakin banyak nagari menetapkan peraturan nagari terkait adat salingka nagari menandakan peningkatan pembangunan kebudayaan |
| Sumber Data | Dinas PMDPPKB |
| Frekuensi | Setahun |

5. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) |
| Definisi | IPK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. |
| Rumus Perhitungan | IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi. |
| Interpretasi | Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. |
| Sumber Data | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Frekuensi | Tahunan |

6. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
| Definisi | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. |
| Rumus Perhitungan | Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:<br>1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki<br>$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_p \times SE_p\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$<br>$G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 1<br>2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonik |

| | |
|---|---|
| | $$HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$$<br>3. Menghitung indeks masing – masing dimensi<br>$$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$$<br>$$IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$$<br>$$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$$<br>4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik<br>$$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$$<br>5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender<br>$$Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$$<br>6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender<br>$$IKG = 1 - \frac{HARM\left(G_P, G_L\right)}{G_{P,L}}$$<br>$G_P$ = Indeks Perempuan<br>$G_L$ = Indeks Laki-laki<br>MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan<br>MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun<br>$PR_P$ = Persentase perempuan di legislatif<br>$PR_L$ = Persentase laki-laki di legislatif<br>$SE_P$ = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br>$SE_L$ = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br>$TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja<br>$TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja<br>$HARM(G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik<br>IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi<br>IP = Indeks dimensi pemberdayaan<br>IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja<br>$G_{PL}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik<br>IKG = Indeks Ketimpangan Gender |
| Interpretasi | IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yangemakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. |
| Sumber Data | BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| Frekuensi | Tahunan |

7. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
| Definisi | IPA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya |
| Rumus Perhitungan | $$IPHA = \sum_{j=1}^{4} (W_j \ x \ Indeks\ K_j)$$<br>dimana<br>*IPA* : Indeks Perlindungan Anak<br>*IPHA* : Indeks Pemenuhan Hak Anak<br>$W_j$ : Bobot Klaster ke-j<br>*Indeks* $K_j$ : nilai indeks Klaster ke-j |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Nilai IPKA berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKA yang semakin besar menunjukkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak semakin meningkat dan sebaliknya. |
| Sumber Data | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Frekuensi | Tahunan |

B. MISI II: Mewujudkan Transformasi Sosial Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) |
| Definisi | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. |
| Rumus Perhitungan | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack* |
| Interpretasi | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | SP: 10 tahunan dan SUPAS: 10 tahunan |

2. Prevalansi *Stunting*

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) |
| Definisi | *Stunting* (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-*score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 :<br>Sangat pendek: Z*score* < -3,0<br>Pendek: Z*score* ≥ -3,0 s/d Z*score* < -2,0 |
| Rumus Perhitungan | Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).<br>$PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$<br>Keterangan PAB(5) P *stunting* : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (*stunting*)<br>JAB(5 )P *stunting* : Jumlah anak balita pendek (*stunting*) pada waktu tertentu<br>JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama |
| Interpretasi | Prevalensi *stunting* yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:<br>1. Kekurangan Gizi: *Stunting* adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi *stunting* yang tinggi menunjukkan.<br>2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi *stunting* yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan |

| | |
|---|---|
| | kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.<br>3. Kemiskinan: *Stunting* sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan *stunting*.<br>4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi *stunting*. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.<br>Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi *stunting*. |
| Sumber Data | Kementerian Kesehatan |
| Frekuensi | SSGI: tahunan dan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan |

3. Rata-Rata Lama Sekolah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) |
| Definisi | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:<br>a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;<br>b. SD = 6 tahun;<br>c. SMP = 9 tahun;<br>d. SMA = 12 tahun;<br>e. D1/D2 = 14 tahun;<br>f. D3 = 15 tahun;<br>g. D4 = 16 tahun;<br>h. S1 = 17 tahun;<br>i. S2 = 19 tahun;<br>j. S3 = 22 tahun.<br><br>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:<br>a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;<br>b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;<br>c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;<br>d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;<br>e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1 |
| Rumus Perhitungan | $$Rata-rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$$<br>Keterangan:<br>$P_{15+}$ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas<br>$x_i$ = Lama sekolah penduduk ke- $i$ |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Misal: RLS 15+ Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 = 8,57 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Datar yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,57 tahun atau belum menamatkan jenjang Pendidikan SLTP. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya) |

4. Harapan Lama Sekolah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Harapan Lama Sekolah |
| Definisi | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. |
| Rumus Perhitungan | $$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$<br>Keterangan:<br>$FK$ = Faktor koreksi pesantren<br>$Et_i$ = Jumlah penduduk usia $i$ yang berkolah pada tahun $t$<br>$Pt_i$ = Jumlah penduduk usia $i$ pada tahun $t$<br>$i$ = Usia (7, 8, ..., $n$) |
| Interpretasi | Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu.<br>Misal: HLS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan menamatkan jenjang pendidikan SLTA. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya) |

5. Tingkat Kemiskinan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat kemiskinan (%) |
| Definisi | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). |
| Rumus Perhitungan | $$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$$<br>Dimana :<br>$\alpha = 0$<br>$z$ = garis kemiskinan.<br>$yi$ = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z<br>$q$ = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.<br>$n$ = jumlah penduduk. |
| Interpretasi | Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. |

| | |
|---|---|
| | Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Maret dan September) |

C. MISI III: Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, UMKM dan peningkatan investasi

1. Nilai PDRB (ADHK) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (dalam milyar) |
| Definisi | Nilai PDRB (ADHK) yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHK |
| Metode Perhitungan | PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan = Nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik |
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDRB ADHK yang dihasilkan oleh aktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan mengedepankan ekonomi hijau mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

2.

(a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) |
| Definisi | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional (PDRB) yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi:<br>1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan<br>2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum. |
| Metode Perhitungan | Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum = $\frac{\text{Nilai tambah penyediaan akomodasi makan dan minum}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100% |
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional. Sehingga perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Frekuensi | Tahunan |

(b) Kontribusi Sektor Pariwisata (miliyar rupiah)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Kontribusi Sektor Pariwisata |
| Definisi | Nilai PDRB (ADHB) yang bersumber dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencerminkan proporsi |

| | |
|---|---|
| | nilai tambah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB ADHB |
| Metode Perhitungan | PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum = Nilai tambah penyediaan akomodasi dan makan minum yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik |
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDRB ADHB dari aktivitas sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, semakin mencerminkan adanya peningkatan pada sektor pariwisata. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Frekuensi | Tahunan |

3. Rasio PDRB Industri Pengolahan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio PDRB industri pengolahan (%) |
| Definisi | Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. |
| Metode Perhitungan | Rasio PDRB Industri Pengolahan = $\frac{\text{Nilai tambah sektor industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100% |
| Interpretasi | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

4. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat produktivitas tenaga kerja (juta/orang) |
| Definisi | Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. |
| Rumus Penghitungan | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja = $\frac{\text{PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$ |
| Interpretasi | Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

5. Jumlah Realisasi Investasi Daerah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah realisasi investasi daerah |
| Definisi | Jumlah realisasi investasi adalah nilai yang menggambarkan penambahan nilai investasi dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu yang mencakup Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) |
| Rumus Penghitungan | Nilai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pelaku usaha dan nilai investasi dari izin yang diterbitkan untuk kategori usaha kecil, menengah dan besar |
| Interpretasi | Investasi yang besar di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan investasi juga meningkatkan lebih banyak peluang usaha dan mempercepat pembangunan infrastruktur. |
| Sumber Data | *Online Single Submission-Risk Based Approach* (QSS-RBA) |
| Frekuensi | Tahunan |

6. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks masyarakat digital Indonesia (skor) |
| Definisi | Indeks masyarakat digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam pengunaan teknologi digital, baik dalm kehidupan sehari-hari maupun terkait dengan pekerjaan. |
| Metode Perhitungan | Survei kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner terdiri dari responden individu dan responden industri, selanjutnya data tersebut diolah melalui *computer-assisted personel interviewing* (CAPI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| Interpretasi | Semakin tinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang dilihat dari dimensi; 1) infrastuktur dan ekosistem dan 2) keterampilan digital. Sehingga menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital serta kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi |
| Sumber Data | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| Frekuensi | Tahunan |

D. MISI IV : Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

1. Indeks Reformasi Birokrasi

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Reformasi Birokrasi |
| Definisi | Gambaran sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas |
| Rumus Penghitungan | Indeks = Nilai RB General + Nilai RB Tematik. Nilai RB General diperoleh dari nilai capaian strategi pelaksanaan RB General ditambah nilai tingkat implementasi kebijakan ditambah nilai capaian strategis. RB Tematik diperoleh dari nilai strategi membangun RB Tematik ditambah nilai capaian dampak RB Tematik. |
| Interpretasi | Kategori Indeks Kategori Indeks<br>AA = 90 - 100<br>A = 80 - 90 |

| | |
|---|---|
| | BB = 70 - 80<br>B = 60 - 70<br>C = 30 - 50<br>CC = 50 - 60<br>D = 0 - 30 |
| Sumber Data | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| Frekuensi | Tahunan |

2. Indeks Inovasi Daerah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Inovasi Daerah (skor) |
| Definisi | Indeks Inovasi Daerah sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan daerah dalam melaksanakan segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara cepat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. |
| Rumus Perhitungan | Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendagri melalui website http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan/ |
| Interpretasi | Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun |
| Sumber Data | Kementerian Dalam Negeri |
| Frekuensi | Tahunan |

E. MISI V : Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) |
| Definisi | Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.<br><br>Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), yaitu :<br>1. Ketersediaan Fisik (*availability*)<br>2. Kualitas Fisik (quality)<br>3. Kesesuaian (Appropriateness)<br>4. Efektifitas Pemanfaatan (Utility)<br>5. Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation)<br>6. Kontribusi pada Perekonomian |
| Rumus Perhitungan | $IKLI = \frac{Total\ nilai\ persepsi\ per\ urusan}{Total\ nilai\ terisi}\ x\ nilai\ penimbang$ |
| Interpretasi | Nilai interval kepuasan berada dengan nilai dan indeks sebagai berikut : |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi | |
| | | 1-1.75 | 25.00-43.75 | Tidak Puas |
| | | 1.76-2.5 | 43.76-62.50 | Kurang Puas |
| | | 2.51-3.25 | 62.51-81.25 | Puas |
| | | 3.26-4.00 | 81.26-100.00 | Sangat puas |
| Sumber data | Survei dan Pengolahan Data | | | |
| Frekuensi | Tahunan | | | |

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor) |
| Definisi | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). |
| Rumus Penghitungan | $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ |
| Interpretasi | Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |

| Nomor | Kategori | Angka Rentang |
|---|---|---|
| 1 | Sangat Baik | 90 ≤ x ≤ 100 |
| 2 | Baik | 70 ≤ x < 90 |
| 3 | Sedang | 50 ≤ x < 70 |
| 4 | Kurang | 25 ≤ x < 50 |
| 5 | Sangat Kurang | 0 ≤ x < 25 |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| Frekuensi | Satu kali satu tahun |

3. Indeks Risiko Bencana (IRB) (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Risiko Bencana (persen) |
| Definisi | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. |
| Rumus Perhitungan | $Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$<br><br>Keterangan<br>*Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.<br><br>*Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. |

| | |
|---|---|
| | Kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) pengembangan sistem pemulihan bencana |
| Interpretasi | Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.<br><br>Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:<br>• lndeks <13 adalah Rendah<br>• lndeks 13 - 144 adalah Sedang<br>lndeks >144 adalah Tinggi |
| Sumber Data | BNPB |
| Frekuensi | Tahunan |

F. MISI VI : Memantapkan Keamanan Daerah, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas |
| Definisi | Indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban umum (trantib), ketentraman masyarakat (bum) dan perlindungan masyarakat (linmas) |
| Rumus Perhitungan | Indeks Penyenggaraan Trantibumlinmas $= \frac{Skor\ Kinerja\ Trantibumlinmas}{Jumlah\ Program\ Trantibumlinmas}\ x\ 100$<br><br>Keterangan :<br>• Skor Kinerja Program Trantibumlinmas diukur berdasarkan penilaian terhadap sejumlah faktor, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam program keamanan, efektivitas patroli dan penegakan hukum, serta hasil survei kepuasan publik.<br>• Jumlah Program Trantibumlinmas adalah jumlah program yang dievaluasi dalam pengukuran ini (misalnya program keamanan, kegiatan bimbingan sosial, pengawasan ketertiban umum, dll.) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin efektif pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan trantibumlinmas.<br>Kriteria Penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas : |
| Sumber Data | Dinas Satpol PP dan Damkar, Kepolisian, Bappedalitbang, Dinas Sosial PPPA, Polda, Instansi Pemerintah Daerah terkait |
| Frekuensi | Tahunan |

| Rentang Nilai | Kategori |
|---|---|
| 0,00 – 20,00 | Buruk |
| 20,02 – 40,00 | Kurang Baik |
| 40,01 – 60,00 | Cukup Baik |
| 60,01 – 80,00 | Baik |
| 80,01 - 100 | Sangat Baik |

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase pertumbuhan ekonomi |
| Definisi | Pertumbuhan Ekonomi adalah Proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara/daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP Riil/PDRB Riil di negara atau daerah tersebut |
| Rumus Penghitungan |  |
| Interpretasi | Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah atau pembangunan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin baik perkembangan ekonomi daerah tersebut. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase pengangguran terbuka (%) |
| Definisi | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. |
| Rumus Perhitungan | $TPT = \frac{PP}{PAK} \; x \; 100\%$<br>Keterangan:<br>TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)<br>PP = Jumlah pengangguran (orang)<br>PAK = Jumlah angkatan kerja (orang) |
| Interpretasi | Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

4. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan/Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio PAD terhadap total pendapatan / Derajat Otonomi Fiskal |
| Definisi | Rasio PAD terhadap total pendapatan / derajat otonomi fiskal daerah merupakan indikator menganalisis kemampuan keuangan daerah yang diukur melalui kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini juga terkait dengan kemandirian keuangan Pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah. |
| Rumus Penghitungan | $DOF = \frac{total\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ pendapatan\ daerah}\ x\ 100\%$ |
| Interpretasi | |

| DOF (%) | Kategori |
|---|---|
| 0 – 10 | Sangat Kurang |
| 10 – 20 | Kurang |
| 20 – 30 | Sedang |
| 30 – 40 | Cukup |
| 40 – 50 | Baik |
| > 50 | Sangat Baik |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Badan Pendapatan Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

5. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) |
| Definisi | • Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<br>• PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.<br>• Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah |
| Rumus Perhitungan | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB = $\frac{\text{Penerimaan pajak daerah}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100% |
| Interpretasi | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. |
| Sumber Data | Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

6. Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Syariah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah lembaga jasa keuangan syariah |
| Definisi | Jumlah lembaga keuangan yang menerapkan sistem keuangan syariah |
| Rumus Penghitungan | Jumlah lembaga jasa keuangan yang menerapkan sistem syariah |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah lembaga keuangan yang menerapkan sistem keuangan syariah menandakan peningkatan pembangunan keagamaan |
| Sumber Data | Bagian Perekonomian dan SDA Setda |
| Frekuensi | Setahun |

G. MISI VII : Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

1. Persentase Desa Mandiri

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Desa Mandiri |
| Definisi | Pengukuranterhadap tingkat kemajuan/pembangunan Desa/Nagari. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.<br>Pengukuran Indeks Desa :<br>$ID = \sqrt[6]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5 \times D_6}$<br>Keterangan:<br>ID : Indeks Desa<br>D : Dimensi |
| Rumus Perhitungan | Persentase Desa Mandiri = $\frac{\text{Jumlah Desa/Nagari Mandiri}}{\text{Jumlah Desa/Nagari}}$ X 100% |
| Interpretasi | Klasifikasi Status Desa<br>• Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.<br>• Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik.<br>• Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.<br>• Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas.<br>• Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas. |
| Sumber Data | Kementerian Desa PDTT |
| Frekuensi | Tahunan |

IV. Metadata Indikator Kinerja Daerah

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Konsumsi Listrik per Kapita

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Konsumsi listrik per kapita (kWh) |
| Definisi | Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (*kilo Watt hours*) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. |
| Rumus Perhitungan | $KLPK = \frac{KLpln + KLnonpln}{p}$<br><br>Keterangan:<br>KLpk : Konsumsi listrik per kapita<br>KLpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN<br>KLnonpln : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN<br>P: Jumlah penduduk<br><br>Catatan:<br>1. Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan;<br>2. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha PT. PLN. |
| Interpretasi | Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. |
| Sumber Data | Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

2. Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) |
| Definisi | Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.<br>Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya |
| Rumus Perhitungan | $PoU = \int_{x<MDER} f(x)\,dx$<br><br>Keterangan:<br>PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal.<br>MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy Requirement*).<br>f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu |

| | |
|---|---|
| | dalam suatu populasi tertentu |
| Interpretasi | Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

3. Kapasitas Air Baku (m3/detik)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Kapasitas air baku (m3/detik ) |
| Definisi | Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya |
| Rumus Perhitungan | Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya |
| Interpretasi | Semakin tingginya kapasitas air baku menunjukkan ketersediaan air untuk pemanfaatan keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain dapat terpenuhi secara maksimal. |
| Sumber Data | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| Frekuensi | Tahunan |

4. Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Aman

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Akses rumah tangga terhadap air minum aman (%) |
| Definisi | Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut; 1) rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); 3) tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. |
| Rumus Perhitungan | $$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \; x \; 100\%$$<br>• PASMPP : Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan.<br>• JRTASMPP: Jumlah rumah tangga perkotaanyang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan.<br>JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan. |
| Interpretasi | Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target kinerja rencanan pembangunan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. |
| Sumber Data | Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan, Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
| Frekuensi | SKAM RT : Tahunan<br>Susenas KOR : Tahunan |

5. Indeks Tutupan Lahan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks kualitas tutupan lahan |
| Definisi | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. |
| Rumus Perhitungan | $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3}$<br>Keterangan :<br>IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan<br>TH : Tutupan Hutan |
| Interpretasi | Kategori indeks kualitas tutupan lahan<br>No. Kategori Angka Rentang<br>1. Sangat Baik 90 <= x <= 100<br>2. Baik 70 <= x < 90<br>3. Sedang 50 <= x < 70<br>4. Kurang 25 <= x < 50<br>5. Sangat Kurang 0 <= x < 25 |
| Sumber Data | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| Frekuensi | Tahunan |

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks kualitas lingkungan hidup (skor) |
| Definisi | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). |
| Rumus Penghitungan | $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ |
| Interpretasi | Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |

| Nomor | Kategori | Angka Rentang |
|---|---|---|
| 1 | Sangat Baik | 90 ≤ x ≤ 100 |
| 2 | Baik | 70 ≤ x < 90 |
| 3 | Sedang | 50 ≤ x < 70 |
| 4 | Kurang | 25 ≤ x < 50 |
| 5 | Sangat Kurang | 0 ≤ x < 25 |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| Frekuensi | Satu kali satu tahun |

7. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) |
| Definisi | Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \; x \; 100\%$$<br><br>PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman<br>JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T<br>JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)<br>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya |
| Interpretasi | Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat |
| Sumber Data | Kementerian PUPR |
| Frekuensi | Tahunan |

8. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) |
| Definisi | Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.<br>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<br>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan:<br>a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, *vermi composting*, biodigester, dsb.<br>b. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari |

| | |
|---|---|
| | pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.<br>c. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. |
| Rumus Perhitungan | Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah<br>Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah:<br>**Cara (1)**<br>$SO = ST - MFPA + RDP$<br>Keterangan:<br>SO : Sampah terolah (ton/hari)<br>ST : Sampah terkumpul (ton/hari)<br>MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari)<br>RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)<br>**Cara (2)**<br>$SO = MFPD + DPA - RPD$<br>Keterangan:<br>SO : Sampah terolah (ton/hari)<br>MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)<br>DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari)<br>RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)<br>Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah<br>$TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$<br>Keterangan:<br>TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP<br>: Total populasi (orang)<br>TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)<br>TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)<br>Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah<br>$\%SO = \frac{SO}{TS}\ X\ 100\%$<br>Keterangan:<br>%SO : Tingkat sampah terolah (%)<br>SO : Sampah ter olah (ton/hari)<br>TS : Timbulan sampah (ton/hari) |
| Interpretasi | Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi/Kabupaten/Kota |
| Sumber Data | 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)<br>2. Kementerian PUPR SI INSAN |
| Frekuensi | Tahunan |

9. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | 3. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT) |
| Definisi | Pengumpulan Sampah<br>Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari- |

| | |
|---|---|
| | hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<br><br>Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:<br>• Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau<br>• Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.<br><br>Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa; (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda.<br><br>Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.<br><br>Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah. |
| Rumus Perhitungan | $$PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS} \; X \; 100\%$$<br><br>Keterangan:<br>PRTLA : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah<br>JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah<br>JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya |
| Interpretasi | Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Provinsi/Kabupaten/Kota. |
| Sumber Data | BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
| Frekuensi | Tahunan |

10. Indeks Risiko Bencana (IRB)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Risiko Bencana |
| Definisi | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. |
| Rumus Perhitungan | $$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$$<br>Keterangan<br>*Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.<br><br>*Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.<br><br>Kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu; (1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) pengembangan sistem pemulihan bencana |
| Interpretasi | Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.<br><br>Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:<br>• lndeks <13 adalah Rendah<br>• lndeks 13 - 144 adalah Sedang<br>lndeks >144 adalah Tinggi |
| Sumber Data | BNPB |
| Frekuensi | Tahunan |

11. Jumlah Penduduk

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Jumlah penduduk adalah banyaknya orang berdomisili di suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu baik laki-laki maupun perempuan |
| Rumus Penghitungan | Jumlah penduduk = (jumlah penduduk awal tahun) +(kelahiran) –(kematian) +(migrasi masuk) – (migrasi keluar)<br><br>Atau bisa menggunakan hasil sensus/survei<br>Jumlah penduduk = Hasil Sensus Penduduk (SP)/Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) |
| Interpretasi | Adanya data jumlah penduduk, bisa membantu pemerintah |

| | |
|---|---|
| | dalam mengambil kebijakan baik ekonomi, sosial dan kesehatan |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Sensus Penduduk setiap 10 tahun dan SUPAS setiap 5 tahun |

12. Laju Pertumbuhan Penduduk

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Laju Pertumbuhan Penduduk |
| Definisi | Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai peresentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu arimatrik, geometri, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan adalah metode geometrik. |
| Rumus Penghitungan | $\text{LPP} = ((\frac{\text{pt}}{\text{P0}})^{1/t} - 1)\ x\ 100\%$<br>• LPP = Laju Pertumbuhan Penduduk (% per tahun)<br>• Pt = Jumlah penduduk pada tahun akhir<br>• P0 = Jumlah penduduk pada tahun awal<br>• t = Jangka waktu (dalam tahun)<br>• r = Laju pertumbuhan (dalam bentuk desimal) |
| Interpretasi | a. LPP > 0 berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya<br>b. LPP = 0 berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<br>c. Pt,0 < 100 berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan sebelumnya. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

13. Rasio Jenis Kelamin Penduduk

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio jenis kelamin penduduk |
| Definisi | Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. |
| Rumus Penghitungan | $\text{Rasio Jenis Kelamin} = \frac{jumlah\ penduduk\ laki - laki}{jumlah\ penduduk\ perempuan}\ x\ 100$ |
| Interpretasi | a. SR > 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.<br>b. SR = 100 berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.<br>c. SR < 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

14. Rasio Ketergantungan Penduduk (Angka Ketergantungan)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio ketergantungan penduduk |
| Definisi | Angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun), yang dinyatakan dalam persen. Ini mengukur beban ekonomi yang |

| | |
|---|---|
| | ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk mendukung penduduk usia non-produktif. |
| Rumus Penghitungan | $\frac{Angka\ Ketergantungan}{jumlah\ penduduk\ usia\ 0-14\ th + jumlah\ penduduk\ usia\ 65\ th\ ke\ atas} \over {jumlah\ penduduk\ usia\ 15-65\ tahun} x\ 100$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, karena mereka harus menopang kebutuhan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Sebaliknya, semakin rendah angka ketergantungan, maka beban penduduk usia produktif semakin ringan |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

15. Kepadatan Penduduk

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka kepadatan penduduk |
| Definisi | Kepadatan penduduk dibagai menjadi 3 jenis :<br>a. Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*), yaitu menunjukan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.<br>b. Kepadatan Fisiologis (*Physiological Density*), yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah lahan yang ditanami<br>c. Kepadatan Agraris (*Agriculture Density*) |
| Rumus Penghitungan | $Kepadatan\ penduduk = \frac{Jumlah\ penduduk}{Luas\ wilayah\ (km2)}$ |
| Interpretasi | Angka kepadatan penduduk menunjukan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

16. Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap (%) |
| Definisi | Persentase panjang jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah |
| Rumus Penghitungan | Persentase Jalan Mantap (%) = (Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik + Sedang : Total Panjang Jalan) X 100 |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase jalan mantap, maka semakin baik kinerja infrastruktur jalan dalam mendukung mobilitas, konektivitas antar wilayah, dan pertumbuhan ekonomi. |
| Sumber Data | Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Datar, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PU Ditjen Bina Marga |
| Frekuensi | Tahunan |

17. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) |
| Definisi | Persentase panjang atau luas jaringan irigasi kewenangan kabupaten yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi optimal, terhadap total jaringan irigasi kabupaten |
| Rumus Penghitungan | Irigasi dalam kondisi baik (%) = (Panjang/Luas Irigasi dalam Kondisi Baik : Total Panjang/Luas Irigasi Kabupaten) X 100 |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase irigasi dalam kondisi baik, maka semakin efektif sistem irigasi mendukung pertanian, ketahanan pangan, dan produktivitas lahan |
| Sumber Data | Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Datar, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumatera Barat, Kementerian PU Ditjen SDA |
| Frekuensi | Tahunan |

18. Indeks Ketahanan Pangan

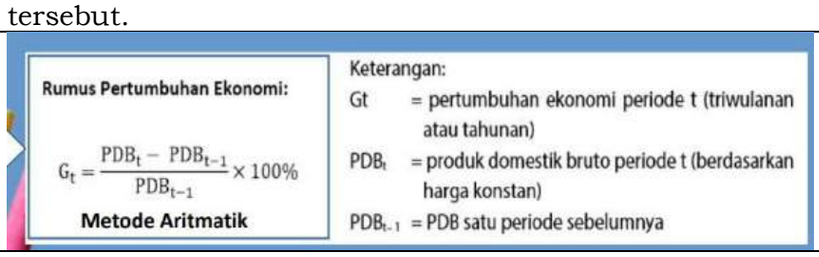
| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks ketahanan pangan |
| Definisi | Indeks Ketahanan Pangan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, negara, atau komunitas berdasarkan beberapa indikator utama yang berkaitan dengan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, serta stabilitas dari ketiga aspek tersebut. |
| Rumus Penghitungan | $IKP = \frac{persentase\ ketersediaan + persentase\ akses + persentase\ pemanfaatan}{3}$ |
| Interpretasi | |

| Kategori | Nilai IKP (%) | Makna |
|---|---|---|
| Ketahanan Pangan Tinggi | ≥ 80% | Wilayah sangat mampu memenuhi kebutuhan pangan warganya |
| Ketahanan Pangan Sedang | 60% - < 80% | Wilayah cukup mampu, tetapi masih ada masalah tertentu |
| Rentan Pangan | 40% - < 60% | Wilayah menghadapi tantangan serius dalam ketahan |
| Rawan Pangan | 40% | Wilayah sangat rentan terhadap kelangkaan atau krisis pangan |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase laju pertumbuhan ekonomi |
| Definisi | Pertumbuhan Ekonomi adalah Proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara/daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP Riil/PDRB Riil di negara atau daerah tersebut. |
| Rumus Penghitungan |  |
| Interpretasi | Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah atau pembangunan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin baik perkembangan ekonomi daerah tersebut. |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

2. Tingkat Kemiskinan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase tingkat kemiskinan |
| Definisi | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). |
| Rumus Perhitungan | $P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^\alpha$<br>Dimana :<br>$\alpha = 0$<br>z = garis kemiskinan.<br>yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ....., q), yi < z<br>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.<br>n = jumlah penduduk. |
| Interpretasi | Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia.<br>Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Maret dan September) |

3. PDRB per Kapita

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta) |
| Definisi | PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku ataupun harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. |
| Rumus Perhitungan | $PDRB\ per\ kapita = \frac{\text{PDRB } ADHB/\text{ADHK}}{populasi}$<br>Keterangan:<br>PDRBADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku<br>PDRBADHK = PDRB Atas Dasar Harga Konstan<br><br>Populasi = jumlah penduduk regional<br>t = periode |
| Interpretasi | Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

4. Pengeluaran per Kapita

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Pengeluaran perkapita |
| Definisi | Pengeluaran per kapita adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat setiap tahunnya, yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* – PPP). |
| Rumus Penghitungan | $\text{Pengeluaran per kapita} = \frac{Total\ pengeluaran\ rumah\ tangga}{jumlah\ anggota\ rumah\ tangga}$ |
| Interpretasi | • Nilai tinggi → menggambarkan daya beli dan tingkat konsumsi lebih besar, menunjukkan kesejahteraan stuktur lebih tinggi.<br>• Nilai rendah → menandai ekonomi rentan atau memiliki daya beli terbatas.<br>• Tren naik (riil) → menunjukkan peningkatan standar hidup masyarakat. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat pengangguran terbuka (%) |
| Definisi | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. |
| Rumus Perhitungan | $TPT = \frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$<br>Keterangan:<br>TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%)<br>PP = Jumlah pengangguran (orang)<br>PAK = Jumlah angkatan kerja (orang) |
| Interpretasi | Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

6. Indeks Gini

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks gini |
| Definisi | Indeks gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis. |

| | |
|---|---|
| Rumus Penghitungan | Rasio Gini = $1 - \sum_{i=1}^{n} (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$<br>dimana:<br>$p_i$ = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i<br>$Y_i$ = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i<br>$n$ = jumlah observasi |
| Interpretasi | Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:<br>1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.<br>2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang.<br>3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik.<br>Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.<br>Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| Frekuensi | Tahunan |

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Manusia (skor) |
| Definisi | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. |
| Rumus Penghitungan | $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$ |
| Interpretasi | IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi; umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM. Merujuk kepada dimensi pembangunan manusia tersebut, maka IPM dihitung melalui komponen-komponen yaitu; 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah dan 4) pengeluaran perkapita disesuaikan (paritas daya beli)<br>Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori :<br>- Rendah: IPM < 60<br>- Sedang: 60 <= IPM < 70<br>- Tinggi: 70 <= IPM < 80<br>- Sangat tinggi: IPM >= 80 |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |

| | |
|---|---|
| Frekuensi | Satu kali satu tahun |

8. Usia Harapan Hidup (tahun)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) |
| Definisi | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. |
| Rumus Perhitungan | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack* |
| Interpretasi | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | SP: 10 tahunan dan SUPAS: 10 tahunan |

9. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) |
| Definisi | Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. |
| | AKI = (JKI/JLH) x 100.000<br>Keterangan:<br>AKI : Angka kematian ibu<br>JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu<br>JLH : Jumlah kelahiran hidup |
| Interpretasi | Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.<br><br>Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:<br>1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan.<br>2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.<br>3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang |

| | |
|---|---|
| | kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.<br>4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.<br>5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan<br>Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan |

10. Prevalansi *Stunting* Pada Balita

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) |
| Definisi | *Stunting* (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z*score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010 :<br>a. Sangat pendek: Z*score* < -3,0<br>b. Pendek: Z*score* ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0 |
| Rumus Perhitungan | Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).<br>$$PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} X\ 100\%$$<br>Keterangan PAB(5) P: Prevalensi anak balita yang *stunting* menderita pendek (*stunting*)<br>JAB(5 )P stunting : Jumlah anak balita pendek (*stunting*) pada waktu tertentu<br>JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama |
| Interpretasi | Prevalensi *stunting* yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:<br>1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi *stunting* yang tinggi menunjukkan.<br>2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi *stunting* yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.<br>3. Kemiskinan: *Stunting* sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan *stunting*.<br>4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi *stunting*. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.<br>5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi *stunting*. |
| Sumber Data | Kementerian Kesehatan |

| | |
|---|---|
| Frekuensi | SSGI: tahunan dan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan |

11. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%) |
| Definisi | Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu |
| Rumus Perhitungan | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:<br>1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.<br>2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis. |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan |
| Frekuensi | Tahunan |

12. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%) |
| Definisi | Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap |
| Rumus Perhitungan | Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. |
| Interpretasi | Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan |
| Frekuensi | Tahunan |

13. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) |
| Definisi | Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. |
| Rumus Perhitungan | Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk di daerah dikali 100%.<br>$\text{Cakupan kepersetaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk}} \text{ X } 100\%$ |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan dan BPJS |

| | |
|---|---|
| Frekuensi | Tahunan |

14. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Literasi dan Numerasi)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>i. Literasi membaca<br>ii. Numerasi |
| Definisi | Jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah.<br><br>Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:<br>1. Perlu intervensi khusus<br>2. Dasar<br>3. Cakap<br>4. Mahir<br>Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". |
| Rumus Perhitungan | $$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$$<br>$satdik\ min.\ SKM$ = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi<br>$n$ = Jumlah satuan pendidikan |
| Interpretasi | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numenasi |
| Sumber Data | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| Frekuensi | Tahunan |

15. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>i. Literasi membaca<br>ii. Numerasi |
| Definisi | Jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah.<br><br>Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan |

| | |
|---|---|
| | tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:<br>1. Perlu intervensi khusus<br>2. Dasar<br>3. Cakap<br>4. Mahir<br>Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". |
| Rumus Perhitungan | $\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$<br>$satdik\ min.SKM$ = Satuan pendidikan yangmencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi<br>$n$ = Jumlah satuan pendidikan |
| Interpretasi | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numenasi |
| Sumber Data | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| Frekuensi | Tahunan |

16. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rata-rata lama sekolah (tahun) |
| Definisi | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:<br>a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;<br>b. SD = 6 tahun;<br>c. SMP = 9 tahun;<br>d. SMA = 12 tahun;<br>e. D1/D2 = 14 tahun;<br>f. D3 = 15 tahun;<br>g. D4 = 16 tahun;<br>h. S1 = 17 tahun;<br>i. S2 = 19 tahun;<br>j. S3 = 22 tahun.<br><br>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:<br>a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;<br>b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;<br>c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;<br>d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;<br>e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1 |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $$Rata - rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$$<br><br>Keterangan:<br>$P_{15+}$ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas<br>$x_i$ = Lama sekolah penduduk ke- $i$ |
| Interpretasi | Misal: RLS 15+ Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 = 8,57 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Datar yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,57 tahun atau belum menamatkan jenjang Pendidikan SLTP. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya) |

17. Harapan Lama Sekolah (tahun)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase harapan lama sekolah |
| Definisi | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. |
| Rumus Perhitungan | $$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$<br><br>Keterangan:<br>$FK$ = Faktor koreksi pesantren<br>$Et$ = Jumlah penduduk usia $i$ yang berkolah pada tahun $t$ i<br>$P^t$ = Jumlah penduduk usia $i$ pada tahun $t$ i<br>$i$ = Usia (7, 8, …, $n$) |
| Interpretasi | Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu.<br>Misal: HLS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan menamatkan jenjang pendidikan SLTA. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya) |

18. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%) |
| Definisi | • Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.<br>• Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi).<br>• Jenjang pendidikan tinggi mencakup:<br>  ○ Diploma I-IV<br>  ○ S1<br>  ○ S2<br>  ○ S2 Terapan<br>  ○ S3 |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi = $\frac{\text{Jumlah penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk berusia 15 Tahun ke atas}}$ X 100% |
| Interpretasi | • Positif<br>• Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

19. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) |
| Definisi | • Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. |

| Tingkat Pendidikan Rendah | Tingkat Pendidikan Menengah | Tingkat Pendidikan Tinggi |
|---|---|---|
| • Tidak/belum tamat SD<br>• SD/MI/SDLB/ Paket A<br>• SMP/MTs/ SMPLB/Paket B | • SMA/MA/SMLB/ Paket C<br>• SMK<br>• MAK | • Diploma I/II/III<br>• Diploma IV<br>• S1<br>• S2<br>• S2 Terapan<br>• S3 |

| | |
|---|---|
| | • Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.<br>• Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.<br>• Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi |
| Rumus Perhitungan | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi = $\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja}}$ X 100% |
| Interpretasi | • Positif<br>• Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi |

| | |
|---|---|
| | menggambarkan peningkatan link and match tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), digunakan adalah publikasi Agustus. |

20. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan |
| Definisi | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. |
| Rumus Penghitungan | $$Cakupan\ Jamsos\ Naker = \frac{Jumlah\ peserta\ BPJS\ Ketenagakerjaan}{Jumlah\ semesta\ penduduk\ bekerja} \times 100\%$$<br>Dimana:<br>*Peserta*= Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah<br>*Semesta penduduk bekerja* = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun |
| Interpretasi | Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. |
| Sumber Data | BPJS Ketenagakerjaan. |
| Frekuensi | Tahunan. |

21. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal |
| Definisi | Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4) persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat. |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} x\ 100\%$<br><br>Keterangan:<br>$PD_{formal}$ : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal<br>AKPD : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas |
| Interpretasi | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |

22. Tingkat Moderasi Beragama

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase tingkat moderasi beragama |
| Definisi | Tingkat moderasi beragama merupakan pembentukan dan pembinaan kepada masyarakat melalui kelompok kelembagaan agama dan pesantren di setiap Nagari/Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. |
| Metode Perhitungan | Tingkat moderasi beragama = $\frac{\text{Jumlah Nagari/Desa dibentuk dan dibina moderasi beragama}}{\text{Jumlah Nagari/Desa}}$ X 100% |
| Interpretasi | Moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan karena seorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan. |
| Sumber Data | Kementerian Agama Republik Indonesia |
| Frekuensi | Tahunan |

23. Persentase Cagar Budaya Ditetapkan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase cagar budaya yang ditetapkan |
| Definisi | Jumlah cagar budaya/entitas budaya atau situs tertentu yang telah diakui secara resmi dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai cagar budaya diwilayahnya |
| Rumus Perhitungan | Persentase Cagar Budaya ditetapkan = $\frac{\text{Cagar Budaya yang ditetapkan}}{\text{Objek diduga Cagar Budaya yang Terdata}}$ X 100% |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah cagar budaya ditetapkan oleh pemerintah daerah, semakin besar perhatian dan komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelestarian budaya diwilayahnya. |
| Sumber Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Frekuensi | Tahunan |

24. Persentase Warisan Tak Benda yang Ditetapkan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan |
| Definisi | Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan - serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai cagar budaya diwilayahnya |
| Rumus Perhitungan | Tingkat Warisan Budaya ditetapkan = (Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan / Warisan Budaya Tak Benda yang terdata) X 100% |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, semakin besar perhatian dan komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelestarian budaya diwilayahnya. |
| Sumber Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Frekuensi | Tahunan |

25. Indeks Pembangunan Keluarga

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) |
| Definisi | IPK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. |
| Rumus Perhitungan | IPK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi. |
| Interpretasi | Nilai IPK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. |
| Sumber Data | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Frekuensi | Tahunan |

26. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
| Definisi | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. |
| Rumus Perhitungan | Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:<br>1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki |

| | |
|---|---|
| | $G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_P \times SE_P\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_P}$<br><br>$G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$<br>2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic<br>$HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$<br>3. Menghitung indeks masing – masing dimensi<br>$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$<br><br>$IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$<br><br>$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$<br>4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik<br>$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$<br>5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender<br>$Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$<br>6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender<br>$IKG = 1 - \frac{HARM\left(G_P, G_L\right)}{G_{P,L}}$<br>$G_P$ = Indeks Perempuan<br>$G_L$ = Indeks Laki-laki<br>MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan<br>MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun<br>$PR_P$ = Persentase perempuan di legislatif<br>$PR_L$ = Persentase laki-laki di legislatif<br>$SE_P$ = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br>$SE_L$ = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br>$TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja<br>$TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja<br>$HARM(G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik<br>IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi<br>IP = Indeks dimensi pemberdayaan<br>IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja<br>$G_{PL}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik<br>IKG = Indeks Ketimpangan Gender |
| Interpretasi | IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yangemakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. |
| Sumber Data | BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| Frekuensi | Tahunan |

27. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks perlindungan khusus anak (IPKA) |
| Definisi | IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $IPHA = \sum_{j=1}^{4} (W_j \; x \; Indeks \; K_j)$<br>dimana<br>*IPA* : Indeks Perlindungan Anak<br>*IPHA* : Indeks Pemenuhan Hak Anak<br>$W_j$ : Bobot Klaster ke-j<br>*Indeks* $K_j$ : nilai indeks Klaster ke-j |
| Interpretasi | Nilai IPKA berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKA yang semakin besar menunjukkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak semakin meningkat dan sebaliknya. |
| Sumber Data | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Frekuensi | Tahunan |

28. Jumlah Hafiz/Hafizah yang bersertifikat

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah hafiz/hafizah yang bersertifikat |
| Definisi | Hafizh/Hafizah yang telah di Validasi oleh Tim Forum Komunikasi Rumah Tahfizh (FKRT) Kecamatan dan Tim Lajnah Tahfizul Qur'an KabupatenTanah Datar |
| Rumus Penghitungan | Jumlah Hafizh/Hafizah di Kabupaten Tanah Datar yang memiliki sertifikat |
| Interpretasi | Semakin banyak Hafizh/Hafizah, menandakan semakin meningkat pembangunan keagamaan |
| Sumber Data | FKRT dan Lajnah Kabupaten Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

29. IKAD (Indeks Akses Keuangan Daerah)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks akses keuangan daerah |
| Definisi | Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di kabupaten/kota yang dihitung dari data *supply* dan *demand*. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi nilai indeks berkisar antara 0-10 |
| Rumus Penghitungan | $IKADm = \left( \sum_{t=1}^{14} atZtm \right) x \; 10$<br>Dimana ɑt merupakan bobot dari masing-masing indicator yang telah disesuaikan menjadi skala. |
| Interpretasi | Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan |
| Sumber Data | Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) |
| Frekuensi | Tahunan |

30. Jumlah Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan ditingkat Kab/Kota/Provinsi

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan ditingkat Kab/Kota/Provinsi |
| Definisi | Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan adalah unit yang dibentuk oleh pemerintah daerah |

| | |
|---|---|
| | (Kab/Kota/Provinsi) untuk memberikan layanan fasilitasi dan mediasi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, pemberi kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. |
| Rumus Penghitungan | Jumlah total ULD ketenagakerjaan yang telah dibentuk dan beroperasi secara resmi di suatu wilayah administratif (Kab/Kota/Provinsi) dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Semakin banyak ULD ketenagakerjaan yang tersedia di tingkat daerah, maka semakin baik pula kapasitas daerah dalam mendukung penyandang disabilitas untuk mengakses pekerjaan yang layak. |
| Sumber Data | ▪ Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota<br>▪ Kementerian Ketenagakerjaan RI<br>▪ Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK)<br>▪ Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Frekuensi | Tahunan |

31. Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan dan/atau dari dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan. |
| Definisi | Jumlah individu penyandang disabilitas yang menerima layanan fasilitasi, pendampingan, mediasi, pelatihan, akses informasi ketenagakerjaan, penempatan kerja, atau bentuk dukungan lainnya dari ULD ketenagakerjaan dan/atau dinas ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi |
| Rumus Penghitungan | Jumlah total penyandang disabilitas yang terdata menerima layanan atau fasilitas ketenagakerjaan dari ULD atau Dinas Ketenagakerjaan dalam periode pelaporan tertentu. |
| Interpretasi | Angka yang meningkat menunjukkan efektivitas ULD atau Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan akses layanan kepada penyandang disabilitas, serta meningkatnya kesadaran dan keterlibatan kelompok disabilitas dalam pasar kerja. |
| Sumber Data | ▪ Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota<br>▪ Kementerian Ketenagakerjaan RI<br>▪ Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK)<br>▪ Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana |
| Frekuensi | Tahunan |

C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Angka Ketergantungan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase angka ketergantungan |
| Definisi | Angka ketergantungan (*dependency ratio*) menurut adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun), yang dinyatakan dalam persen. Ini mengukur beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk mendukung penduduk usia non-produktif. |
| Rumus Penghitungan | $\frac{Angka\ Ketergantungan}{jumlah\ penduduk\ usia\ 0-14\ th + jumlah\ penduduk\ usia\ 65\ th\ ke\ atas}{jumlah\ penduduk\ usia\ 15-65\ tahun}\ x\ 100$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, karena mereka harus menopang kebutuhan penduduk usia non- |

| | |
|---|---|
| | produktif (anak-anak dan lansia). Sebaliknya, semakin rendah angka ketergantungan, maka beban penduduk usia produktif semakin ringan |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

2. Rasio PDRB Industri Pengolahan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) |
| Definisi | Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. |
| Metode Perhitungan | $\text{Rasio PDRB Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai tambah sektor industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik RegiRasio PDRB Industri Pengolahan onal Bruto per daerah. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum |
| Definisi | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi:<br>1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan<br>2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum. |
| Metode Perhitungan | $\text{Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum} = \frac{\text{Nilai tambah penyediaan akomodasi makan dan minum}}{\text{Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional. Sehingga perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| Frekuensi | Tahunan |

4. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah tamu wisatawan mancanegara (orang) |
| Definisi | Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung (berwisata) di daerah |
| Metode Perhitungan | Data jumlah tamu wisatawan mancanegara |
| Interpretasi | Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang berkunjung di daerah, maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik/Dinas Parpora Kabupaten Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

5. Jumlah Tamu Wisatawan Domestik

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah tamu wisatawan domestik |
| Definisi | • Wisatawan dapat didefinisikan sebagai:<br>- Orang (WNI) yang melakukan perjalanan ke tempat lain selain tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, liburan, atau kegiatan lain di luar pekerjaan atau bisnis yang dibayar di tempat yang dikunjungi.<br>- Individu atau kelompok (WNI) yang melakukan perjalanan wisata untuk beristirahat, berbisnis, berobat, atau melakukan kunjungan keagamaan dan studi .<br>- Orang (WNI) yang mengunjungi suatu daerah atau negara dengan tujuan melancong atau berlibur.<br>• Wisatawan domestik adalah orang yang melakukan perjalanan wisata di dalam negara tempat tinggalnya sendiri, tanpa menyeberangi batas negara |
| Rumus Penghitungan | Jumlah tamu wisatawan domestik = ∑ Tamu WNI yang berwisata melalui survei akomodari dan atau survei pengunjung di tempat-tempat wisata atau pusat informasi wisata |
| Interpretasi | Jumlah tamu wisatawan domestik yang semakin besar menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat untuk berwisata di dalam negeri, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan negara seperti peningkatan pendapatan daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas produk dan layanan, pengembangan infrastruktur, promosi budaya dan potensi daerah. Begitu pula sebaliknya. |
| Sumber Data | BPS/Kementerian Pariwisata/Survei khusus yang dilakukan lembaga terkait |
| Frekuensi | Tahunan |

6. Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah objek wisata yang dikembangkan |
| Definisi | Objek wisata adalah tempat yang dikunjungi wisatawan karena memiliki daya tarik, baik alami maupun buatan manusia, seperti keindahan alam, bangunan bersejarah, atau kegiatan budaya. |
| Rumus Penghitungan | Persentase objek wisata yang dikembangkan (%) = (jumlah objek wisata yang dikembangkan : total objek wisata) x 100% |
| Interpretasi | Semakin banyak objek wisata yang dikembangkan, maka potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pariwisata akan semakin besar, serta dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pengembangan objek wisata juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya dan lingkungan serta menjadi sarana promosi daerah. |
| Sumber Data | Instansi Pemerintah (BPS, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga), Lembaga Survei dan Penelitian (Survei oleh lembaga independen dan Penelitian akademis) |
| Frekuensi | Tahunan |

7. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Proporsi PDRB ekonomi kreatif terhadap PDB ekonomi kreatif nasional (%) |
| Definisi | PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau |

| | |
|---|---|
| | merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk:<br>1. Fesyen<br>2. Kuliner<br>3. Kriya<br>4. Film, Animasi dan Video<br>5. Pengembang Permainan<br>6. Aplikasi<br>7. Musik<br>8. Seni Pertunjukan<br>9. Fotografi<br>10. Desain Komunikasi Visual<br>11. Televisi dan Radio<br>12. Seni Rupa<br>13. Desain Produk<br>14. Periklanan<br>15. Penerbitan<br>16. Arsitektur<br>17. Desain Interior |
| Metode Perhitungan | Rasio PDRB ekonomi kreatif = $\frac{\text{Nilai tambah sektor jasa lainnya}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100% |
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh sektor jasa lainnya (sub sektor ekonomi kreatif), semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB sub sektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

8. Proporsi Jumlah UKM non Pertanian

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian (%) |
| Definisi | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. |
| Metode Perhitungan | Proporsi jumlah UKM non pertanian = $\frac{\text{Jumlah unit UKM non pertanian}}{\text{Total unit UKM}}$ X 100% |
| Interpretasi | Usaha kecil dan menengah (UKM) non pertanian merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. |
| Sumber Data | Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM<br>Data UMKM yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM |
| Frekuensi | Tahunan |

9. Proporsi Jumlah IKM (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%) |
| Definisi | Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. |
| Metode Perhitungan | Rasio jumlah IKM = $\frac{\text{Jumlah unit IKM}}{\text{Total unit industri}}$ X 100% |
| Interpretasi | Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. |
| Sumber Data | 1. Data IKM yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Perindustrian<br>2. Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

10. Rasio Kewirausahaan (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio kewirausahaan (%) |
| Definisi | Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. |
| Metode Perhitungan | Rasio kewirausahaan = $\frac{\text{Jumlah usaha dibantu tenaga kerja tetap}}{\text{Total Angkatan kerja}}$ X 100% |
| Interpretasi | Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). |
| Frekuensi | Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus. |

11. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) |
| Definisi | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. |
| Metode Perhitungan | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB = $\frac{\text{Total volume koperasi}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100% |
| Interpretasi | Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | 1. Data volume koperasi yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM<br>2. Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

12. Persentase Jumlah Pelaku Usaha Mikro Ekonomi Digital

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase jumlah pelaku usaha mikro ekonomi digital |
| Definisi | Indikator ini merupakan turunan dari misi (Asta Cita) Presiden terpilih 2025-2029 yang kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui, salah satunya pengembangan ekonomi digital. Secara spesifik indikator ini memperlihatkan peran pemerintah daerah dalam menciptakan dan mendorong pelaku usaha mikro untuk mengadopsi dan beroperasi dalam ekosistem ekonomi digital. Pelaku usaha mikro yang menjadi kriteria adalah usaha dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 miliar. Sedangkan untuk faktor pendukung ekonomi digital yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah pemberdayaan usaha mikro secara digital melalui peningkatan pendataan digital, kemitraan dengan *platform e-commerce*, kemudahan perizinan berbasis sistem, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Bentuk realisasi indikator ini yaitu:<br>1. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan literasi digital meliputi pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan konsultasi, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan sehingga mulai memasarkan barang atau jasa secara digital, menerapkan keuangan digital dalam pencatatan bisnis dan traksaksi pembayaran, serta memahami edukasi keamanan digital.<br>2. Pembukaan akses pasar digital merupakan fasilitasi pemerintah sehingga adanya kemitraan antara pelaku usaha dengan *platform e-commerce* (*onboarding*), terciptanya (menginisiasi) *e-commerce* produk unggulan daerah secara kolektif, serta mendorong pedagang pasar rakyat masuk ke platform digital untuk pasar yang lebih luas.<br>3. Fasilitasi permodalan digital adalah bentuk fasiltasi pemerintah sehingga teredukasi dan terhubungnya pelaku usaha dengan *fintech lending* atau *crowfunding* yang resmi sesuai peraturan yang berlaku.<br>4. Penyusunan kebijakan dan regulasi adaptif dalam bentuk produk hukum daerah yang berpihak terhadap pemberdayaan usaha dan perlindungan konsumen.<br>5. Kolaborasi berbagai pihak terkait adalah koordinasi pemerintah daerah sehingga terciptanya sinergi dengan akademisi, komunitas, swasta, BUMN, BUMD untuk mendukung proses digitalisasi usaha. |
| Rumus Penghitungan | Persentase jumlah pelaku usaha mikro ekonomi digital = $\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang mengadopsi dan beroperasi dalam ekosistem ekonomi digital dalam tahun berjalan ditambah realisasi tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang terdaftar di dalam Sistem Informasi Data Tunggal milik Kementerian UMKM pada tahun berjalan}}$ X 100% |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Semakin besar persentase jumlah pelaku usaha mikro ekonomi digital memperlihatkan peran pemerintah daerah yang semakin efektif dan berhasil dalam menciptakan ekosistem yang kondusif untuk transformasi digital di tingkat usaha mikro. Indikator ini bersifat proporsional, memastikan bahwa keberhasilan upaya digitalisasi usaha mikro dapat terukur secara konsisten seiring waktu. |
| Sumber Data | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;<br>5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; dan<br>6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 |
| Frekuensi | Tahunan, tidak dapat dilakukan secara semesteran, triwulanan, atau bulanan |

13. Jumlah IKM Bersertifikat Halal

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah IKM bersertifikat halal |
| Definisi | IKM bersertifikat halal adalah Industri Kecil dan Menengah yang produknya telah dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) |
| Rumus Penghitungan | Total IKM Pangan per Desember 2024 adalah 2052 IKM<br><br>Jumlah IKM pangan yang telah bersertifikat halal adalah 983 IKM<br><br>Jumlah IKM pangan yang belum bersertifikat halal adalah 1069 IKM |
| Interpretasi | Semakin banyak jumlah target kinerja, maka semakin banyak IKM yang bersertifikat halal. |
| Sumber Data | Dinas Nakerin Kabupaten Tanah Datar (Bidang Perindustrian)<br>Menindaklanjuti amanat UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 yaitu Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal |

14. RoA BUMD

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | *Return on Asset* (RoA) BUMD (%) |
| Definisi | *Return on Asset* adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Sehingga *Return on Asset* dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total nilai aset yang dimiliki perusahaan. |
| Metode Perhitungan | $\textit{Return on Asset} \quad \frac{\text{Total laba bersih}}{\text{Total nilai asset}} \text{ X } 100\%$ |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | *Return on Asset* (RoA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat RoA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Sehingga data RoA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. |
| Sumber Data | Laporan keuangan BUMD |
| Frekuensi | Tahunan |

15. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Proporsi penciptaan lapangan kerja formal |
| Definisi | Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai. |
| Rumus Perhitungan | $Tenaga\ Kerja\ Formal = \left(\frac{\sum_{i=3}^{4} y_i}{\sum_{i=1}^{7} y_i}\right) x\ 100\% ; i = 1,2,3, \dots ,7$<br>**Keterangan :**<br>$Tenaga\ Kerja\ Formal$ = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal<br>$y_i$ = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i<br>*1* = Berusaha sendiri<br>*2* = Berusaha dibantu buruh tidak tetap<br>*3* = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar<br>*4* = Buruh/karyawan/pegawai<br>*5* = Pekerja bebeas di pertanian<br>*6* = Pekerja bebas di nonpertanian<br>*7* = Pekerja keluarga/tak dibayar |
| Interpretasi | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menununjukan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) |
| Definisi | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. |

| | |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $TPAK_p = \frac{PAK_p}{P((15+,p)} \times 100\%$<br><br>Keterangan:<br>TPAKp = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)<br>PAKp = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)<br>P(15+p) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang) |
| Interpretasi | TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| Frekuensi | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

17. Indek Inovasi Daerah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks inovasi daerah (skor) |
| Definisi | Indeks inovasi daerah sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan daerah dalam melaksanakan segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara cepat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. |
| Rumus Perhitungan | Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendagri melalui website http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan/ |
| Interpretasi | Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun |
| Sumber Data | Kementerian Dalam Negeri |
| Frekuensi | Tahunan |

18. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) |
| Definisi | Rasio PDRB yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB. |
| Metode Perhitungan | Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan = $\frac{\text{Nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100% |
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan mengedepankan ekonomi hijau mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

19. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja |
| Definisi | Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. |
| Rumus Penghitungan | $\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{\text{PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$ |
| Interpretasi | Produktivitas tenaga kerja dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi cukup rendah karena keterbatasan keahlian dalam mengelola lapangan usaha untuk menghasilkan nilai tambah produk yang bernilai tinggi |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

20. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rpjuta/orang) |
| Definisi | Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan |
| Metode Perhitungan | $\text{Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan} = \frac{\text{Nilai tambah PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{Total tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikana}}$ |
| Interpretasi | Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

21. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks masyarakat digital Indonesia (skor) |
| Definisi | Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam pengunaan teknologi digital, baik dalm kehidupan sehari-hari maupun terkait dengan pekerjaan. |
| Metode Perhitungan | Survei kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner terdiri dari responden individu dan responden industri, selanjutnya data tersebut diolah melalui *computer-assisted personel interviewing* (CAPI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika |

| | |
|---|---|
| Interpretasi | Semakin tinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang dilihat dari dimensi; 1) infrastuktur dan ekosistem dan 2) keterampilan digital. Sehingga menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital serta kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi |
| Sumber Data | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| Frekuensi | Tahunan |

22. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Pokok

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok |
| Definisi | Data yang menggambarkan variasi harga barang kebutuhan pokok pada satu rentang waktu, yang mencakup 11 barang yaitu beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar. |
| Metode Perhitungan | *Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok* = $\frac{\text{Standar deviasi per barang bahan pokok kabupaten 1 tahun}}{\text{Rata-rata harga per barang bahan pokok kabupaten selama 1 tahun}}$ X 100% |
| Interprestasi | Semakin kecil hasil dari persentase koefisien variasi harga antar waktu berarti mengindikasikan variasi harga barang kebutuhan pokok selama tahun tersebut di suatu wilayah adalah rendah atau memiliki disparitas harga sesuai harapan (stabil). |
| Penjelasan Rumus | 1. Standar deviasi adalah nilai rata-rata dari kenaikan atau penurunan harga per barang bahan pokok<br>2. Harga rata-rata per barang bahan pokok selama 1 tahun adalah jumlah harga per barang bahan pokok selama 1 tahun dibagi 12 bulan. |
| Penjelasan tambahan | 1. Indikator ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<br>2. Indikator ini menjadi tanggung jawab Bidang Perdagangan setiap tahunnya, tetapi baru bisa diolah sejak tahun 2023 karena baru diperintahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk melaksanakan pemantauan harga barang bahan pokok secara berkala.<br>3. Selain persentase koefisien variasi harga antar waktu, di Bidang Perdagangan juga langsung mengolah rata-rata persentase koefisien variasi harga antar waktu, dengan cara membagi hasil persentase koefisien variasi harga antar waktu per barang bahan pokok dengan jumlah barang bahan pokok.<br>4. Rata-rata Persentase koefisien variasi harga antar waktu untuk keseluruhan barang bahan pokok pada tahun 2023 adalah sebesar -3,58%.<br>5. Untuk jumlah bahan pokok yang dihitung menggunakan rumus ini mengacu kepada jumlah barang bahan pokok pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.<br>6. Berdasarkan SP2KP, untuk tahun 2023 terdapat 14 jenis barang bahan pokok. |

| | |
|---|---|
| Asumsi Proyeksi | 1. Proyeksi pertumbuhan indikator ini menggunakan pendekatan nilai acuan pertumbuhan rata-rata (compound annual growth rate (CAGR)) target inflasi nasional selama 10 tahun terakhir, dengan data sebagai berikut:<br>2. Jumlah barang bahan pokok yang digunakan untuk proyeksi ini adalah sebanyak 14 jenis.<br>3. Nilai dasar yang digunakan adalah nilai koefisien variasi harga antar waktu tahun 2023.<br>4. Pasar yang menjadi acuan dalam pemantauan harga adalah sebanyak satu unit yaitu pada Pasar Serikat C Batusangkar.<br>5. Khusus barang bahan pokok minyak goreng sudah memiliki harga eceren tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.<br>6. Untuk tahun 2024 perhitungan sudah disesuaikan dengan Keputusan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahun 2024, di mana jumlah barang yang diatur adalah 43 jenis.<br>7. Proyeksi untuk 29 jenis barang bahan kebutuhan pokok lainnya sesuai butir 6 tersebut, tidak bisa diproyeksikan karena masih baru dilakukan pemantauan per Januari 2024 sehingga dapat diabaikan.<br>8. Perhitungan proyeksi dimaksud masih menggunakan satu parameter yang mempengaruhi yaitu inflasi nasional dan parameter yang lainnya di anggap tidak mempengaruhi (hukum ceteris paribus).<br>9. Terlampir proyeksi persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 2025-2045. |
| Sumber Data | Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,50% | 3,50% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,0 |

23. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB) |
| Definisi | Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB. |
| Rumus Perhitungan | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) $= \frac{\text{Total PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$<br><br>Keterangan:<br>Pembentukan Modal Tetap Bruto Berdasar-kan PDRB Sisi Pengeluaran = Total PMTB (Miliar Rupiah)<br>$PDRB\ ADHK$ = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) |
| Interpretasi | PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal |

| | |
|---|---|
| | mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Triwulanan dan Tahunan |

24. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Ekspor barang dan jasa (% PDRB) |
| Definisi | Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.<br>Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa merupakan *share* ekspor barang dan jasa terhadap PDRB. |
| Rumus Perhitungan | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) = $\frac{\text{Nett ekspor barang dan jasa}}{\text{PDRB ADHK}}$ X 100%<br><br>Keterangan:<br>Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)<br>PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) |
| Interpretasi | Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, karena ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Tahunan |

25. Persentase Desa Mandiri (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase desa mandiri |
| Definisi | Pengukuranterhadap tingkat kemajuan/pembangunan Desa/Nagari. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.<br>Pengukuran Indeks Desa : |

| | |
|---|---|
| | $ID = \sqrt[6]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5 \times D_6}$<br>Keterangan:<br>ID : Indeks Desa<br>D : Dimensi |
| Rumus Perhitungan | Persentase Desa Mandiri = $\frac{\text{Jumlah Desa/Nagari Mandiri}}{\text{Jumlah Desa/Nagari}}$ X 100% |
| Interpretasi | Klasifikasi Status Desa<br>• Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.<br>• Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik.<br>• Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.<br>• Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas.<br>• Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas. |
| Sumber Data | Kementerian Desa PDTT |
| Frekuensi | Tahunan |

26. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) |
| Definisi | • Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<br>• PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.<br>• Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah |
| Rumus Perhitungan | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB = $\frac{\text{Penerimaan pajak daerah}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100% |
| Interpretasi | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah<br>daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. |

| | |
|---|---|
| Sumber Data | Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan BPS |
| Frekuensi | Tahunan |

27. Tingkat Inflasi (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat inflasi (%) |
| Definisi | Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. |
| Rumus Perhitungan | $$Tingkat\ inflasi = \frac{IHK\ pada\ periode\ t - IHK\ pada\ periode\ (t-1)}{IHK\ pada\ periode\ (t-1)} x\ 100\%$$<br><br>Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK. |
| Interpretasi | Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK.<br>Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga:<br>1. Inflasi *m-t-m* membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).<br>2. Inflasi *y-t-d* membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan.<br>3. Inflasi *y-o-y* membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

28. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Total dana pihak ketiga/PDRB (%) |
| Definisi | Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi.<br>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.<br>Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB tersebut pada suatu waktu tertentu. |

| | |
|---|---|
| Rumus Penghitungan | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB $\frac{\text{Total Dana Pihak}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100% |
| Interpretasi | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. |
| Sumber Data | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

29. Nilai Transaksi Saham per Kapita per Kabupaten

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Nilai transaksi saham perkapita per kabupaten |
| Definisi | Nilai transaksi saham per Kabupaten adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili. Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. |
| Rumus Perhitungan | Nilai transaksi saham Perkapita = $\frac{\text{nilai transaksi investor saham per Kabupaten selama setahun}}{12}$ |
| Interpretasi | Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan. |
| Sumber Data | Otoritas (OJK) |
| Frekuensi | Tahunan |

30. Total Kredit/PDRB (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Total kredit/PDRB (%) |
| Definisi | Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah.<br>Total Kredit /PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. |
| Rumus Perhitungan | Total Kredit/PDRB $\frac{\text{Total Kredit}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100% |
| Interpretasi | Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha- usaha dalam perekonomian daerah tersebut. |
| Sumber Data | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulanan dan Tahunan |

31. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio PDRB sektor jasa keuangan (%) |
| Definisi | Rasio PDRB yang bersumber dari sektor jasa keuangan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor jasa keuangan terhadap PDRB ADHB. |
| Metode Perhitungan | Rasio PDRB sektor jasa keuangan = $\frac{\text{Nilai tambah sektor jasa keuangan}}{\text{Nilai PDRB ADHB}}$ X 100% |
| Interpretasi | Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor jasa keuangan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah agar bertumbuhnya perekonomian daerah dan berdaya saing. |
| Sumber Data | Badan Pusat Statistik Daerah |
| Frekuensi | Tahunan |

32. Jumlah Koperasi Syariah

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah koperasi syariah |
| Definisi | Jumlah badan usaha koperasi yang didirikan dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keberkahan. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kriteria Koperasi Syariah sesuai aturan yang berlaku yaitu memenuhi:<br>1. Prinsip operasional didasarkan prinsip syariah;<br>2. Anggaran dasar secara jelas menyatakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;<br>3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS);<br>4. Jenis usaha bergerak disektor simpan pinjam, konsumsi, produksi, atau jasa, yang tetap meenjalankan prinsip syariah. |
| Rumus Penghitungan | Jumlah Unit Koperasi Syariah (per akhir) Tahun N = Data mutakhir jumlah unit Koperasi Syariah yang terdaftar dan masih aktif pada akhir tahun N |
| Interprestasi | Memperlihatkan jumlah riil koperasi syariah yang legal dan masih menjalankan aktivitasnya di penghujung tahun tersebut. Data ini tidak mencerminkan kualitas dan kesehatan koperasi syariah. |
| Sumber Data | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; |
| Frekuensi | Tahunan, tidak dapat dilakukan secara semesteran, triwulanan, atau bulanan |

33. Jumlah Kajian yang dilaksanakan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah Kajian yang Dilaksanakan |
| Definisi | Jumlah kajian yang dilaksanakan merujuk pada banyaknya kegiatan kajian yang telah dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu |

| | |
|---|---|
| Rumus Penghitungan | Jumlah kajian = ∑ kajian yang selesai dalam periode X |
| Interpretasi | Semakin tinggi jumlah kajian, semakin aktif dan produktif individu atau institusi tersebut di bidang riset |
| Sumber Data | Bappedalitbang Kabupaten Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

34. Persentase Inovasi yang Diterapkan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Inovasi yang diterapkan |
| Definisi | Presentase jumlah inovasi yang diterapkan dibandingkan dengan inovasi yang dusulkan |
| Rumus Penghitungan | $\frac{Jumlah\ kebijakan\ inovasi\ yang\ diterapkan}{Jumlah\ inovasi\ yang\ diusulkan} x100$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase maka semakin tinggi tingkat keberhasilan daerah |
| Sumber Data | Bappedalitbang |
| Frekuensi | Tahunan |

35. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak terjangkau dan berkelanjutan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak terjangkau dan berkelanjutan |
| Definisi | Indikator ini mengukur proporsi rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi kriteria kelayakan, keterjangkauan biaya, dan keberlanjutan lingkungan maupun sosial, dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga di suatu wilayah.<br>Layak: memenuhi standar minimum luas, bahan bangunan, kondisi sanitasi, air bersih, dan pencahayaan.<br>Terjangkau: biaya hunian (cicilan/sewa) ≤ 30% pendapatan rumah tangga.<br>Berkelanjutan: mempertimbangkan efisiensi energi, akses transportasi publik, dan integrasi sosial. |
| Rumus Penghitungan | $\frac{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ dengan\ akses\ terhadap\ hunian\ layak, terjangkau\ dan\ berlanjutan}{Total\ Jumlah\ Rumah\ Tangga} x100$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses ke tempat tinggal yang aman, terjangkau, dan memenuhi standar kelayakan dan keberlanjutan. Ini merupakan indikator penting bagi kesejahteraan sosial dan pengurangan ketimpangan. |
| Sumber Data | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) – BPS<br>• Data dari Kementerian PUPR<br>• Survei Khusus Perumahan<br>• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Frekuensi | Tahunan |

D. Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Reformasi Hukum

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indeks reformasi hukum</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:<br>a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.<br>b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.<br>c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%.<br>d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.<br>Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.<br>Kategori penilaian IRH:<br><table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table><br>Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self-assesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Hukum dan HAM</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. |
| Definisi | SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. |
| Rumus Perhitungan | Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: |

| | |
|---|---|
| | $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij} \times BA_{ij}$<br><br>dimana:<br>• NDj adalah nilai indeks domain ke-j;<br>BDj adalah nilai bobot domain ke-j. |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan. |
| Sumber Data | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. |
| Frekuensi | Tahunan |

3. Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Pemerintah Digital |
| Definisi | Indeks Pemerintah Digital merupakan nilai yang menggambarkan kinerja penerapan pemerintah digital di suatu instansi. |
| Rumus Penghitungan | Merupakan akumulasi dari nilai 35 indikator/kriteria yang telah ditetapkan. |
| Interpretasi | Semakin tinggi capaian nilai Indeks Pemerintah Digital suatu instansi maka dapat dikatakan bahwa instasi tersebut telah berhasil melakukan transformasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. |
| Sumber Data | KEMENPAN RB |
| Frekuensi | Tahunan |

4. Indeks Pelayanan Publik

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks pelayanan publik. |
| Definisi | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.<br>Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. |
| Rumus Perhitungan | Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.<br>1. Menentukan nilai untuk setiap indikator<br>$Nilai\ per\ indikator: (\frac{nilai\ FO1 + Nilai\ FO2 + nilai\ FO3}{3}) \times bobot\ per\ indikator$<br>2. Menentukan nilai setiap aspek<br>$Nilai\ per\ aspek: \sum nilai\ per\ indikator$<br>3. Menentukan indeks<br>$Nilai\ indeks: \sum (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$ |
| Interpretasi | Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.<br>Prinsip-prinsip tersebut adalah:<br>1. Keadilan (*Fairness*); |

<table>
<tr><td></td><td>2. Partisipasi (Participation);<br>3. Akuntabilitas (Accountability);<br>4. Transparansi (transparency);<br>5. Berdayaguna (useful);<br>6. Aksesibilitas (accessibility)<br>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:
<table>
<tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
<tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

5. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Survei penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai) |
| Definisi | Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei tersebut, melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemerintah Daerah serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman dan instansi yang terkait. Sedangkan untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi. |
| Rumus Perhitungan | Mengumpulkan data survei melalui aplikasi pesan *Whatsapp* dan *email* kepada responden terpilih, serta melalui *Computer Assisted Personal Interview* (CAPI) berdasarkan 7 penilaian meliputi; transparansi; Integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); *trading in influence* (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis); pengelolaan anggaran; dan sosialisasi antikorupsi. |
| Interpretasi | Semakin tingginya nilai survei penilaian integritas (SPI) KPK menunjukkan semakin baiknya integritas Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan |
| Sumber Data | Komisi Pemberantasan Korupsi. |
| Frekuensi | Tahunan |

6. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Trantibum

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran trantibum |
| Definisi | Tingkat penyelesaian kasus pelanggaran Trantibum merupakan perbandingan antara kasus tindakan pelanggaran trantibum yang diselesaikan oleh Aparat Penegak Hukum dengan jumlah kasus tindakan pelanggaran yang terjadi yang terjadi. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat Penyelesaian Tindakan Pidana} = \frac{\text{Jumlah tindak pelanggaran diselesaikan}}{\text{Jumlah tindak pelanggaran}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tingginya tingkat penyelesaian kasus pelanggaran trantibum menunjukkan membaiknya Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran, sehingga memberikan dampak positif terhadap iklim investasi yang berkeadilan dari sisi kepastian. |
| Sumber Data | Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

7. Rasio Angka Kriminalitas

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Rasio angka kriminalitas |
| Definisi | Rasio Angka Kriminalitas merupakan alat ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat kriminalitas disuatu daerah dibandingkan per 10.000 jumlah penduduk |
| Rumus Perhitungan | $\text{Rasio Angka Kriminalitas} = \frac{\text{Jumlah Tindak Pidana}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$ |
| Interpretasi | Semakin kecil angka Rasio Kriminalitas menunjukkan semakin kecil pula tindakan kejahatan/kriminal di daerah sehingga menandakan daerah tersebut merupakan daerah yang aman bagi orang-orang. |
| Sumber Data | Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar dan Polres Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

8. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum |
| Definisi | Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan keikutsertaan warga negara dalam memberikan hak suara dalam setiap Pemilu yang dilaksanakan. Pemilu dalam indikator ini dibagi menjadi 2 yakni :<br>1. Pemilihan Presiden dan Legislatif (DPR RI, DPRD dan DPD)<br>2. Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) |
| Rumus Perhitungan | $\text{Tingkat Partisipasi Pemilih} = \frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah Daftar Pemilih Tetap}} \times 100\%$<br>$\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih} = \text{Jumlah Suara Sah} + \text{Jumlah Suara Tidak Sah}$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi tingkat partipasi pemilih menunjukkan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat dalam berdemokrasi sehingga semakin baik pula kualitas penyelenggara negara dalam bernegara |
| Sumber Data | Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

9. Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan |
| Definisi | Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki ekternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efesien jika dikelola bersama. |
| Rumus Perhitungan | $= \frac{\text{Jumlah Kesber + Jumlah PKS}}{21} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Kesber (Kesepakatan Bersama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.<br>PKS (Perjanjian Kerja Sama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain yang memuat hak dan kewajiban.<br>21 merupakan target Kerja Sama Wajib Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2045 berupa Dokumen Kerja Sama Daerah yang terdiri dari 1 Kesepatan Bersama dan 2 Perjanjian Kerja Sama dengan Masing - Masing Kabupaten/Kota Berbatasan yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang. |
| Sumber Data | Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

10. Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tingkat penyelesaian tindak pidana |
| Definisi | Tingkat penyelesaian tindak pidana menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai ditingkat kepolisian apabila:<br>1. Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaaan<br>2. Dalam hal delik aduan, pengaduaannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut Undang-Undang<br>3. Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan asas *plichmatigheid* (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum)<br>4. Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian<br>5. Tersangka meninggal dunia<br>6. Kasus Kadaluarsa |
| Rumus Penghitungan | $\text{Persentase Penyelesaian Tindak Pidana} = \frac{\text{Jumlah Kasus Pidana yang diselesaikan}}{\text{Total Kasus Pidana}} \times 100\%$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin baiknya kinerja kepolisian diwilayah hukumnya. |
| Sumber Data | BPS dan Kepolisian Resort Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

11. Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Jumlah fasilitas penanganan konflik sosial |
| Definisi | Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik |

| | |
|---|---|
| Rumus Penghitungan | $\frac{Jumlah\ total\ konflik}{Konflik\ yang\ difasilitasi}\ x\ 100\%$ |
| Interpretasi | Fasilitasi penanganan konflik sosial adalah proses membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk berkomunikasi, memahami akar masalah, dan mencari solusi bersama dengan bantuan seorang fasilitator. Fasilitator berperan sebagai pihak netral yang memandu proses dialog dan negosiasi, bukan sebagai pengambil keputusan |
| Sumber Data | Polres Tanah Datar, Kodim 0307 Tanah Datar, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

12. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika |
| Definisi | Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika adalah upaya untuk menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memberantas peredaran narkoba dan prekursor narkotika. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, penyediaan informasi, dan membangun sistem yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tersebut<br>Prekursor Narkotika adalah bahan atau zat kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Pengendalian prekursor narkotika juga merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan narkoba |
| Rumus Penghitungan | $\frac{\text{Jumlah total pencegahan/ pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba}}{\text{fasilitasi yang ditangani}} x100\%$ |
| Interpretasi | Dengan adanya proses fasilitasi mengindikasikan adanya peranan dari pemerintahan daerah untuk mencegah dan mengantisipasi peredaran kasus Narkotika di Daerah |
| Sumber Data | Polres Tanah Datar, Kodim 0307 Tanah Datar, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

13. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM |
| Definisi | Indikator ini mengukur persentase realisasi pelaksanaan rencana aksi HAM oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) sesuai dengan target kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Aksi HAM nasional dan daerah pada tahun berjalan. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Jumlah Aksi HAM yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Aksi HAM yang direncanakan}}\right) \times 100\%$ |
| Interpretasi | Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak aksi HAM yang berhasil direalisasikan dibandingkan dengan yang direncanakan, menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan RANHAM.<br>100%: Seluruh aksi HAM yang direncanakan telah dilaksanakan.<br><100%: Masih terdapat aksi HAM yang belum terlaksana.<br>0%: Tidak ada aksi HAM yang dilaksanakan. |
| Sumber Data | Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar |
| Frekuensi | Tahunan |

14. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat kelengkapan DPRD |
| Definisi | "Dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD (AKD), yang memuat rencana kegiatan, jadwal, dan target kinerja dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan selama satu tahun anggaran." |
| Rumus Perhitungan | Tidak Menggunakan Rumus Perhitungan hanya memasukkan "Ada/Tidak" |
| Interpretasi | Indikator ini menunjukkan adanya keseriusan, kesiapan, dan akuntabilitas masing-masing AKD dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan melalui dokumen rencana kerja tahunan yang disusun secara tertulis dan terdokumentasi. |
| Sumber Data | Sekretariat Dewan |
| Frekuensi | Tahunan |

15. Indeks Profesionalitas ASN

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks profesionalitas ASN |
| Definisi | Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik dari ASN di suatu instansi pemerintah. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ASN memenuhi standar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. |
| Rumus Perhitungan | $\text{Indeks Profesionalitas ASN} = \frac{\sum(\text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin})}{\text{Jumlah ASN}}$ |
| Interpretasi | Semakin tinggi skor, semakin profesional ASN pada instansi tersebut |
| Sumber Data | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) |
| Frekuensi | Tahunan |

16. Indeks Zakat Nasional

| | |
|---|---|
| Nama Indikator | Indeks Zakat Nasional (IZN) |
| Definisi | Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik. |
| Rumus Penghitungan | Indeks Zakat Nasional (IZN) = 0,30X1 + 0,70X2<br>Ket:<br>• X1 : Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan<br>Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat)<br>• X2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat) |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka poin indeks, menunjukkan semakin baiknya kondisi pengelolaan zakat |
| Sumber Data | BAZNAS |
| Frekuensi | Tahunan |

IDENTIFIKASI RESIKO STRATEGIS PEMERINTAHAN DAERAH
RPJMD TAHUN 2025-2029

| NO | Tujuan /sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Resiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | Analisis Resiko | Resiko Prioritas | Rencana Tindak Lanjut Pengendalian | Rencana Komunikasi RTP | Rencana Pemantauan RTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Resiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena | | | | | |
| Misi 1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya masyarakat yang beragama, beradat dan berbudaya berbasis keluarga berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga | Rendahnya rata-rata lama sekolah | | | Kurangnya akses pendidikan, rendahnya kesadaran orang tua, faktor ekonomi | | | IPM rendah, daya saing SDM menurun | | Tinggi | 1 | Perluasan akses sekolah, program beasiswa, pendidikan non-formal | Sosialisasi via sekolah, desa, dan media lokal | Monitoring data pendidikan per semester, evaluasi capaian |
| | | | Pudarnya nilai agama dan budaya lokal | | | Pengaruh budaya luar, kurangnya pembinaan adat | | | Menurunnya kualitas sosial-budaya, mempengaruhi kualitas hidup | | Sedang | 2 | Pembinaan rutin, festival budaya, pelibatan tokoh adat/agama | Rapat koordinasi, media promosi budaya | Pemantauan partisipasi kegiatan budaya tahunan |
| | | | Lemahnya peran keluarga dalam pembentukan karakter | | | Minimnya edukasi parenting, tekanan ekonomi | | | Kualitas SDM rendah, masalah sosial meningkat | | Sedang | 3 | Program parenting, pemberdayaan ekonomi keluarga, konseling | Sosialisasi melalui posyandu, PKK, media sosial | Survei karakter & ketahanan keluarga setiap tahun |
| 1 | Meningkatnya pembangunan keagamaan | Jumlah rumah tangga yang memiliki satu hafiz/hafizah | Jumlah Hafiz/Hafizah yang diwisuda jumlahnya tidak memenuhi target. | | KDH | Adanya kemungkinan hafiz/hafizah yang akan didaftarkan untuk diwisuda tidak memenuhi persyaratan | Eksternal | | Target jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda tidak terpenuhi. | KDH dan Bagian Kesra | Sedang | 3 | Program motivasi & pembinaan keagamaan, pemberian beasiswa bagi calon hafiz/hafizah | Koordinasi dengan tokoh agama, majelis taklim, dan lembaga tahfiz | Monitoring jumlah peserta pembinaan tiap bulan |
| | | Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan umat | Tidak terlaksananya mesjid sebagai pusat kegiatan umat | | KDH | Kurangnya Sumber Daya baik Manuasi maupun infrastruktur dalam pelaksanaan pengelolaan mesjid percontohan | Eksternal | | tidak adanya mesjid percontohan sebagai pusat kegiatan umat | KDH, Bagian Kesra, Dinas Sosial | Sedang | 2 | Pembinaan bertahap, bantuan sarana prasarana, pelatihan pengurus | Koordinasi dengan Dinas terkait, MUI, BKPRMI | Monitoring perkembangan tiap 3 bulan |
| | | Tingkat Moderasi Beragama | Munculnya radikalisme dan intoleransi dalam perbedaan pendapat dan keyakinan | | KDH | Minimnya konten edukasi dan literasi mengenai konsep dan kagiatan moderasi beragama | Eksternal | | Tidak tercapainya moderasi agama | KDH, Bagian Kesra, Dinas Sosial, Kesbangpol | Tinggi | 1 | Sosialisasi nilai moderasi beragama, pelatihan tokoh agama & guru, pengawasan konten digital | Koordinasi dengan Kemenag, FKUB, ormas keagamaan, media lokal | Survei moderasi beragama tahunan, evaluasi kegiatan sosialisasi |
| 2 | Meningkatnya pembangunan kebudayaan | Jumlah peraturan Nagari terkait adat dan budaya yang ditetapkan tidak memenuhi target | Jumlah peraturan Nagari terkait adat dan budaya yang ditetapkan tidak memenuhi target | | KDH | Kurangnya Kemampuan dan kapasitas perangkat nagari dalam penyusuna n Peraturan Nagari dan adanya konflik kepentingan | Eksternal | | Kurang nya nagari yang menetapakan peraturan nagari terkait adan dan budaya | KDH. DPMPPKB, KAN, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Badan Pelestaraian Kebudayaan | Tinggi | 1 | Inventarisasi dan dokumentasi adat-budaya secara sistematis | Sosialisasi hasil dokumentasi kepada perangkat nagari | Laporan progres dokumentasi setiap semester |
| 3 | Meningkatnya keluarga berkualitas, dan masyarakat inklusif | Indeks Pembangunan Keluarga | 1. Rendahnya nilai Indeks Pembangunan Keluarga<br>2. Tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga<br>3. Minimnya akses keluarga terhadap layanan sosial dasar (kesehatan, pendidikan, ekonomi)<br>4. Tidak adanya data keluarga yang mutakhir dan akurat | | KDH | 1. Kurangnya program pembinaan keluarga dan edukasi ketahanan keluarga<br>2. Minimnya layanan konseling keluarga dan lemahnya peran lembaga masyarakat<br>3. Keterbatasan infrastruktur layanan dan distribusi program bantuan tidak merata<br>4. Pemutakhiran data keluarga tidak rutin dan tidak dimanfaatkan secara optimal | Eksternal | | 1. Ketahanan sosial masyarakat melemah, meningkatkan risiko konflik dan perceraian<br>2. Menurunnya aspek ketentraman dalam indeks pembangunan keluarga<br>3. Meningkatnya ketimpangan antar keluarga, memperlemah aspek kemandirian<br>4. Kebijakan tidak tepat sasaran, perencanaan pembangunan keluarga tidak akurat | KDH, Masyarakat OPD Terkait | 1. Rendahnya nilai Indeks Pembangunan Keluarga (SEDANG)<br>2. Tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (TINGGI)<br>3. Minimnya akses keluarga terhadap layanan sosial dasar (kesehatan, pendidikan, ekonomi) (SANGAT TINGGI)<br>4. Tidak adanya data keluarga yang mutakhir dan akurat (TINGGI) | Prioritas: 1. Minimnya akses keluarga terhadap layanan sosial dasar (kesehatan, pendidikan, ekonomi) . 2. Tidak adanya data keluarga yang mutakhir dan akurat, 3. Tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, 4. Rendahnya nilai Indeks Pembangunan Keluarga | Program edukasi parenting; penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA),<br>Layanan konseling pranikah & pascanikah; mediasi keluarga,<br>Penguatan layanan keluarga rentan; pendataan keluarga inklusif | Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, PKK, Kemenag, LSM | Survei kualitas pengasuhan keluarga setiap tahun<br>Laporan tahunan angka perceraian dan penyebabnya<br>Laporan layanan keluarga rentan tiap triwulan |
| 4 | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Masih tingginyan angka Indeks Ketimpangan Gender | | KDH | 1. Minimnya program afirmasi untuk perempuan dan remaja perempuan | | | Ketimpangan gender terus terjadi di berbagai sektor terutama bidang pendidikan, pekerjaan dan Politik | | Tinggi | 2 | Program pelatihan kepemimpinan perempuan; kuota representasi di lembaga publik | Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, DPRD, organisasi perempuan | Monitoring persentase perempuan di jabatan strategis setiap tahun |
| | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Anak - anak rentan terhadap eksploitasi, pernikahan dini dan putus sekolah | | KDH | Kurangnya edukasi hak anak, minimnya pengawasan sosial dan keterbatasan ekonomi keluarga | | | Hilangnya masa depan generasi muda, meningkatnya kemiskinan dan rendahnya Indeks Perlindungan Anak | | Sangat Tinggi | 1 | Penguatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan & Anak (UPT PPA); kampanye anti kekerasan | Koordinasi dengan kepolisian, sekolah, tokoh masyarakat | Laporan kasus kekerasan & tindak lanjut tiap triwulan |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | Tujuan /sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Resiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | Analisis Resiko | Resiko Prioritas | Rencana Tindak Lanjut Pengendalian | Rencana Komunikasi RTP | Rencana Pemantauan RTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Resiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena | | | | | |
| Misi 2 : Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing | Indek Pembangunan Manusia (IPM) | IPM tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. | | | 1) Akses pendidikan dan kesehatan belum merata.<br>2) Kualitas guru dan tenaga kesehatan rendah.<br>3) Angka pengangguran tinggi dan lapangan kerja produktif terbatas.<br>4) Ketidaksesuaian kompetensi SDM dengan kebutuhan pasar kerja.<br>5) Kesenjangan infrastruktur antarwilayah. | | | 1) Pembangunan manusia berjalan lambat.<br>2) Daya saing daerah menurun.<br>3) Meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi.<br>4) Citra daerah di tingkat nasional/internasional melemah. | | | | 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui beasiswa, pembangunan sekolah, pelatihan guru.<br>2) Memperluas layanan kesehatan primer, program gizi, dan pengendalian penyakit.<br>3) Mengembangkan pelatihan vokasi dan kemitraan industri.<br>4) Menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.<br>5) Pemerataan sarana dan prasarana di seluruh wilayah. | 1) Melakukan koordinasi lintas OPD terkait (Dinas Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Bappeda).<br>2) Menyampaikan progres capaian IPM melalui rapat triwulanan.<br>3) Publikasi capaian dan program strategis melalui media massa dan kanal resmi pemerintah.<br>4) Sosialisasi kebijakan ke masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. | 1) Pemantauan capaian IPM setiap tahun.<br>2) Evaluasi indikator turunan (rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita).<br>3) Audit program dan realisasi anggaran sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.<br>4) Pelaporan hasil pemantauan kepada pimpinan daerah dan DPRD secara berkala. |
| 1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | Target Usia Harapan Hidup (UHH) tidak tercapai sesuai yang ditetapkan dalam RPJMD. | | KDH | 1) Akses layanan kesehatan belum merata, khususnya di daerah terpencil.<br>2) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).<br>3) Prevalensi penyakit menular dan tidak menular masih tinggi.<br>4) Rendahnya gizi pada ibu hamil, bayi, dan balita.<br>5) Infrastruktur dan SDM kesehatan terbatas.<br>6) Faktor lingkungan seperti air bersih, sanitasi, dan polusi belum optimal. | Eksternal | | 1) Penurunan kualitas kesehatan masyarakat.<br>2) Peningkatan angka kematian bayi, balita, dan usia produktif.<br>3) Beban pembiayaan kesehatan meningkat.<br>4) Pembangunan manusia terhambat sehingga IPM ikut terpengaruh. | KDH, DINKES | Tinggi | 3 | 1) Memperluas dan memeratakan layanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk di daerah terpencil.<br>2) Menguatkan program pencegahan dan promosi kesehatan (PHBS, imunisasi, skrining penyakit).<br>3) Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kualitasnya melalui pelatihan dan insentif.<br>4) Menjalankan program gizi seimbang untuk ibu hamil, bayi, dan balita.<br>5) Memperbaiki infrastruktur sanitasi, air bersih, dan pengendalian lingkungan. | 1) Koordinasi lintas OPD terkait (Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, Bappeda, PUPR).<br>2) Pelaporan perkembangan capaian UHH kepada pimpinan daerah dan DPRD setiap triwulan.<br>3) Sosialisasi dan edukasi kesehatan ke masyarakat melalui media massa, media sosial, dan kegiatan lapangan.<br>4) Pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal dalam kampanye kesehatan. | 1) Pemantauan UHH dan indikator pendukung (angka kematian bayi, balita, dan kematian akibat penyakit tidak menular) setiap tahun.<br>2) Monitoring capaian program kesehatan melalui dashboard kinerja OPD.<br>3) Audit program dan penggunaan anggaran kesehatan secara berkala.<br>4) Evaluasi dan revisi strategi pengendalian berdasarkan hasil pemantauan. |
| | | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | Target penurunan prevalensi stunting balita tidak tercapai sesuai RPJMD. | | KDH | 1) Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap.<br>2) Gizi buruk dan asupan nutrisi yang tidak seimbang pada ibu hamil, bayi, dan balita.<br>3) Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pola makan bergizi.<br>4) Kondisi sanitasi dan air bersih yang belum memadai.<br>5) Akses layanan kesehatan dan posyandu tidak merata.<br>6) Kemiskinan dan keterbatasan daya beli pangan bergizi.<br>7) Perkawinan usia dini yang berdampak pada kesehatan ibu dan anak. | Eksternal | | 1) Pertumbuhan dan perkembangan balita terganggu.<br>2) Penurunan kualitas sumber daya manusia di masa depan.<br>3) Meningkatnya beban biaya kesehatan.<br>4) Turunnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan daya saing daerah.<br>5) Gangguan produktivitas jangka panjang masyarakat. | KDH, DINKES,PMDPP KB, KECAMATAN | Tinggi | 1 | 1. Peningkatan edukasi gizi melalui posyandu, penyediaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)<br>2. Subsidi atau bantuan pangan bergizi untuk keluarga rawan stunting<br>3. Penambahan tenaga kesehatan kontrak, layanan kesehatan keliling, telemedisin | 1. Sosialisasi masif melalui media lokal, desa, dan sekolah<br>2. Koordinasi lintas OPD & laporan ke kepala daerah<br>3. Penyampaian informasi melalui kader desa dan bidan | 1. Monitoring bulanan di posyandu dan evaluasi triwulan<br>2. Pemantauan distribusi bantuan dan survei gizi setiap semester<br>3. Pemantauan bulanan cakupan ANC (*Antenatal Care*) |

| NO | Tujuan /sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Resiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | Analisis Resiko | Resiko Prioritas | Rencana Tindak Lanjut Pengendalian | Rencana Komunikasi RTP | Rencana Pemantauan RTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Resiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Pendidikan berkualitas yang merata | Rata-rata lama sekolah | Angka putus sekolah tetap tinggi atau tidak menurun sesuai target RPJMD. | | KDH | 1) Faktor ekonomi keluarga (kemiskinan dan keterbatasan biaya pendidikan).<br>2) Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan.<br>3) Akses sekolah sulit di daerah terpencil.<br>4) Kualitas lingkungan belajar yang rendah sehingga siswa kurang termotivasi.<br>5) Perkawinan usia dini.<br>6) Anak terpaksa bekerja membantu ekonomi keluarga.<br>7) Kurangnya dukungan program beasiswa atau bantuan pendidikan tepat sasaran. | Eksternal | | Membatasi kemampuan seseorang dalam memperoleh pekerjaan layak, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan taraf hidup. Secara kolektif, hal ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia, produktivitas nasional, dan daya saing bangsa. Dalam jangka panjang, rendahnya angka rata-rata lama sekolah juga memperlambat pembangunan manusia, memperbesar ketimpangan sosial, dan menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif. | KDH, DIKBUD | Tinggi | 1 | Bantuan beasiswa miskin; sekolah terbuka; kampanye anti putus sekolah<br>Program wajib belajar 12 tahun; bimbingan karir; penyuluhan orang tua<br>Pembangunan sekolah di daerah terpencil; subsidi transportasi siswa | Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, sekolah, dan desa<br>Kerja sama sekolah, PKK, karang taruna | Survei partisipasi pendidikan tahunan<br>Monitoring data putus sekolah tiap semester<br>Evaluasi ketersediaan akses pendidikan setiap tahun |
| | | Harapan Lama Sekolah | Terganggunya proses peningkatan kualitas generasi muda. Harapan lama sekolah yang rendah berarti banyak anak tidak akan menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atau tinggi, | | KDH | Keterbatasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini secara langsung berdampak pada rendahnya daya saing individu di dunia kerja dan menurunkan produktivitas tenaga kerja nasional. | Eksternal | | Rendahnya daya saing individu di dunia kerja dan menurunkan produktivitas tenaga kerja nasional. dapat memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Dari sisi sosial, individu yang tidak menyelesaikan pendidikan dengan baik lebih rentan terhadap pengangguran, pekerjaan informal, serta kurang aktif dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan. | KDH, DIKBUD | Tinggi | 2 | Program PAUD gratis; beasiswa miskin; penyediaan transportasi siswa<br>Program pemerataan guru; pelatihan berkelanjutan<br>Wajib belajar 12 tahun; kampanye anti putus sekolah; bimbingan konseling | Koordinasi Dinas Pendidikan, PAUD, desa<br>Sosialisasi ke orang tua, sekolah, tokoh masyarakat<br>Forum koordinasi OPD, camat, kepala desa | Laporan partisipasi sekolah tiap semester<br>Evaluasi ketersediaan sarana tiap tahun<br>Data putus sekolah diverifikasi tiap semester |
| 3 | Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif | Tingkat Kemiskinan (%) | 1. Bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat krisis atau bencana<br>2.Penurunan tingkat kemiskinan tidak mencapai target RPJMD<br>3. Program bantuan sosial tidak efektif atau tidak merata | | | 1. Program pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan<br>2. Ketergantungan ekonomi pada sektor rentan (pertanian, informal), serta minimnya perlindungan sosial<br>3. Data penerima tidak akurat dan tidak diperbarui | Eksternal | | 1. Tingkat kemiskinan melonjak secara tiba-tiba, tekanan terhadap APBD meningkat<br>2. Ketimpangan sosial tetap tinggi, kredibilitas pemerintah daerah menurun<br>3. Banyak masyarakat miskin tidak menerima bantuan, atau terjadi kebocoran program | KDH, Dinas Sosial | 1. Bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat krisis atau bencana (SANGAT TINGGI)<br>2.Penurunan tingkat kemiskinan tidak mencapai target RPJMD (SEDANG)<br>3. Program bantuan sosial tidak efektif atau tidak merata (TINGGI) | Prioritas: 1. Bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat krisis atau bencana, 2. Program bantuan sosial tidak efektif atau tidak merata, 3. Penurunan tingkat kemiskinan tidak mencapai target RPJMD | 1. Penguatan penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan pengembangan sektor unggulan daerah.<br><br>2. Pelatihan keterampilan kerja berbasis kebutuhan pasar, termasuk sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja.<br><br>3. Perluasan akses permodalan dan pendampingan UMKM, termasuk kredit mikro dan program wirausaha baru.<br><br>4. Integrasi program pengentasan kemiskinan antar-OPD melalui One Data dan One Planning yang sinkron.<br><br>5. Peningkatan ketahanan sektor pertanian melalui modernisasi teknologi, diversifikasi produk, dan asuransi pertanian.<br><br>6. Perluasan perlindungan sosial adaptif, terutama bagi kelompok rentan, agar mampu bertahan dari guncangan ekonomi dan bencana. | Internal Pemerintah Daerah:<br>1. Laporan triwulan pencapaian indikator kemiskinan dalam forum pimpinan OPD.<br><br>2. Diskusi teknis antar-bidang Bappeda dan OPD pengampu program.<br><br>Eksternal (Publik):<br>1. Publikasi capaian dan program kemiskinan melalui media daerah dan media sosial.<br><br>2. Dialog publik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (LSM, perguruan tinggi, sektor swasta).<br><br>3. Penyampaian capaian di Musrenbang dan forum konsultasi publik. | Indikator Pemantauan:<br>1. Persentase penduduk miskin (data BPS/Susenas) per semester.<br><br>2. Jumlah rumah tangga penerima program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.<br><br>3. Tingkat partisipasi program pelatihan kerja dan UMKM.<br><br>Metode Pemantauan:<br>1. Analisis data rutin BPS dan OPD terkait.<br><br>2. Survey lapangan dan focus group discussion dengan masyarakat sasaran.<br><br>3. Evaluasi tahunan dan penyesuaian strategi program berdasarkan hasil pemantauan. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misi 3 : Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | Tujuan /sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Resiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | Analisis Resiko | Resiko Prioritas | Rencana Tindak Lanjut Pengendalian | Rencana Komunikasi RTP | Rencana Pemantauan RTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Resiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena | | | | | |
| 1 | Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah berbasis produk unggulan dan peningkatan investasi | PDRB per kapita | 1. Produk unggulan daerah belum mampu bersaing di pasar nasional/internasional<br>2. Realisasi investasi rendah atau tidak sesuai target | | | 1. Kualitas produk unggulan belum memenuhi standar pasar<br>2. Kurangnya promosi dan branding produk daerah<br>3. Infrastruktur penunjang investasi kurang memadai<br>4. Proses perizinan yang lambat dan kurang ramah investor<br>5. Ketersediaan SDM terampil terbatas<br>6. Ketidakpastian iklim usaha akibat regulasi yang sering berubah | | | 1. Daya saing produk daerah rendah<br>2. Minat investor menurun<br>3. Pertumbuhan ekonomi melambat<br>4. Penyerapan tenaga kerja rendah<br>5. Kontribusi PDRB dari sektor unggulan tidak optimal | KDH, Investor, masyarakat,Pemerintah daerah, BUMD, | 1. Produk unggulan daerah belum mampu bersaing di pasar nasional/internasional (TINGGI)<br>2. Realisasi investasi rendah atau tidak sesuai target (SANGAT TINGGI) | Prioritas: 1. Realisasi investasi rendah atau tidak sesuai target, 2. Produk unggulan daerah belum mampu bersaing di pasar nasional/internasional | 1. Meningkatkan kualitas produk unggulan melalui inovasi, sertifikasi, dan standarisasi<br>2. Mengoptimalkan promosi investasi dan produk unggulan melalui pameran, media digital, dan jejaring internasional<br>3. Memperbaiki infrastruktur pendukung (jalan, pelabuhan, listrik, internet)<br>4. Menyederhanakan proses perizinan dan memberikan insentif bagi investor<br>5. Meningkatkan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi<br>6. Menjalin kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan | 1. Koordinasi lintas-OPD terkait investasi, perdagangan, dan industri<br>2. Dialog rutin dengan pelaku usaha dan investor<br>3. Publikasi pencapaian dan peluang investasi di website resmi daerah dan media sosial | 1. Monitoring triwulan capaian realisasi investasi<br><br>2. Evaluasi kinerja produk unggulan tiap semester<br><br>3. Survei kepuasan investor dan pelaku usaha |
| 1 | Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pertanian | Nilai PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (dalam Milyar) | 1. Produksi dan produktivitas sektor pertanian/perikanan masih rendah<br>2. Harga produk/hasil pertanian/perikanan anjlok | | KDH | 1. Program unggulan di bidang pertanian belum optimal<br>2. Keterbatasan lahan pertanian untuk melakukan ekstensifikasi pertanian<br>3. Intervensi pemerintah belum efektif<br>4. Kurangnya akses petani pada teknologi, modal, dan pasar | Internal | | 1. Pendapatan petani masih rendah<br>2. Produksi tidak meningkat<br>3. Pendpatan petani berkurang/turun<br>4. Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | KDH, Kadinas Pertanian, Kadinas Pangan Perikanan, Kabag Perekonomian, Petani | 1. Produksi dan produktivitas sektor pertanian/perikanan masih rendah (TINGGI)<br>2. Harga produk/hasil pertanian/perikanan anjlok (SANGAT TINGGI) | Prioritas: 1. Harga produk/hasil pertanian/perikanan anjlok, 2.Produksi dan produktivitas sektor pertanian/perikanan masih rendah | 1. Penguatan program unggulan sektor pertanian dengan teknologi modern dan bibit unggul<br>2. Diversifikasi komoditas pertanian untuk mengurangi risiko harga anjlok<br>3. Pengembangan sistem irigasi dan infrastruktur pendukung pertanian<br>4. Pelatihan dan pendampingan teknis bagi petani dan nelayan<br>5. Penguatan rantai pasok dan akses pasar melalui kemitraan dengan pelaku usaha | 1. Koordinasi rutin antar-OPD terkait pertanian, perikanan, dan perdagangan<br><br>2. Publikasi program bantuan, pelatihan, dan peluang pemasaran produk<br><br>3. Sosialisasi kepada kelompok tani dan nelayan tentang inovasi pertanian | 1. Monitoring triwulan produksi dan harga komoditas pertanian<br><br>2. Evaluasi program pertanian dan perikanan setiap semester<br><br>3. Pelaporan capaian target ke Kepala Daerah dan DPRD |
| 2 | Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pariwisata, dan ekonomi kreatif | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | Rendahnya Rasio PDRB dari sektor Pariwisata | | KDH | 1. Terjadinya bencana alam dan ketidakstabilan politik<br>2. Ketergantungan pada musim tertentu (musim liburan atau cuaca)<br>3. Keterbatasan promosi dan inovasi produk wisata/kreatif<br>4. Infrastruktur pendukung pariwisata yang kurang memadai | Eksternal | | 1. Menurunnya rasio PDRB dari sektor pariwisata<br>2. Penurunan jumlah wisatawan dan pelaku usaha kreatif kehilangan pendapatan<br>3. Berkurangnya daya saing destinasi daerah<br>4. Berkurangnya multiplier effect terhadap UMKM lokal | Pelaku usaha Dinas Parpora, | Tinggi | 1 | 1. Diversifikasi atraksi wisata untuk mengurangi ketergantungan musim<br>2. Peningkatan promosi digital (media sosial, website resmi, marketplace wisata)<br>3. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal<br>4. Perbaikan infrastruktur pendukung wisata (akses transportasi, fasilitas umum)<br>5. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku kreatif melalui pelatihan | 1. Publikasi event pariwisata dan ekonomi kreatif<br>2. Koordinasi dengan pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif<br>3. Sosialisasi inovasi produk wisata dan kreatif | 1. Monitoring jumlah kunjungan wisata dan kontribusi PDRB<br>2. Evaluasi efektivitas promosi dan event<br>3. Survei kepuasan wisatawan |
| 3 | Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis, Koperasi, Usaha Mikro/IKM, Industri Pengolahan dan BUMD | Rasio PDRB Industri Pengolahan % | Penurunan ratio PDRB Indutri Pengolahan dari tahun ketahun | | KDH | 1. Harga Komoditas global yang tidak stabil<br>2. Dominasi satu jenis industri<br>3. Ketimpangan infrastruktur antar wilayah | Eksternal | | Menurunnya kontribusi industri terhadap PDRB, Pusat pertumbuhan ekonomi tidak merata dan penurunan daya saing industri yang menjadi hambatan investasi dan ekspansi | KDH, Dinas PMTPS, Nakerin, Pelaku Usaha, Investor | Sedang | 1 | 1. Peningkatan daya saing produk melalui inovasi dan teknologi<br>2. Diversifikasi produk dan perluasan pasar<br>3. Penguatan koperasi dan IKM melalui akses modal dan pendampingan<br>4. Promosi produk daerah di pasar nasional dan internasional | 1. Sosialisasi peluang pembiayaan dan pemasaran<br>2. Koordinasi lintas OPD dan pelaku usaha<br>3. Publikasi kisah sukses pelaku industri lokal | 1. Monitoring perkembangan industri pengolahan dan IKM per semester<br>2. Evaluasi kontribusi sektor industri terhadap PDRB<br>3. Penyesuaian strategi pengembangan industri berdasarkan tren pasar |
| 4 | Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | 1. Rendahnya pertumbuhan produktivitas tenaga kerja<br>2. Tingginya angka pekerja sektor informal dengan produktivitas rendah<br>3. Kurangnya investasi di sektor padat karya produktif | | KDH | 1. Kurangnya pelatihan dan pendidikan vokasional<br>2. Struktur ekonomi lokal belum bertransformasi ke sektor formal<br>3. Iklim investasi belum kondusif atau insentif belum menarik | Eksternal | | 1. Target indikator produktivitas tidak tercapai dalam RPJMD<br>2. Tingkat pengangguran meningkat, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah<br>3. Penyerapan tenaga kerja produktif terhambat | KDH, Pencari Kerja, Pelaku Usaha, PMTSP, NAkerin, DKUKMP | Sedang | 1 | 1. Program pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar<br>2. Peningkatan akses informasi lowongan kerja<br>3. Penguatan kerja sama dengan dunia usaha untuk penyerapan tenaga kerja<br>4. Pembangunan pusat pelatihan kerja terpadu | 1. Sosialisasi pelatihan kerja melalui media massa dan online<br>2. Koordinasi dengan perusahaan untuk rekrutmen tenaga kerja lokal<br>3. Publikasi peluang kerja secara berkala | 1. Monitoring tingkat penyerapan tenaga kerja<br>2. Evaluasi efektivitas pelatihan kerja<br>3. Penyesuaian program pelatihan sesuai tren industri |
| 5 | Meningkatnya Investasi | Jumlah realisasi investasi daerah. | 1. Target realisasi investasi tidak tercapai<br>2. Minimnya minat investor masuk ke daerah<br>3. Proyek strategis daerah tidak menarik secara ekonomi | | KDH | 1. Iklim investasi kurang kondusif (regulasi rumit, perizinan lambat)<br>2. Infrastruktur belum memadai, informasi peluang investasi kurang tersosialisasi<br>3. Analisis kelayakan lemah atau tidak sesuai kebutuhan pasar | Eksternal | | 1. Menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan potensi PAD<br>2. Realisasi investasi rendah, lapangan kerja baru tidak tercipta<br>3. Investor tidak tertarik, proyek mandek, dan penggunaan anggaran tidak efisien | KDH, Investor, DPMTPSP, Bapenda | 1. Target realisasi investasi tidak tercapai (SANGAT TINGGI)<br>2. Minimnya minat investor masuk ke daerah (TINGGI)<br>3. Proyek strategis daerah tidak menarik secara ekonomi (TINGGI) | Prioritas: 1. Target realisasi investasi tidak tercapai<br>2. Proyek strategis daerah tidak menarik secara ekonomi<br>3. Minimnya minat investor masuk ke daerah | 1. Penyederhanaan perizinan dan layanan investasi<br>2. Promosi potensi investasi daerah secara nasional dan internasional<br>3. Penguatan infrastruktur pendukung investasi<br>4. Insentif bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal | 1. Publikasi peluang investasi melalui website resmi dan pameran<br>2. Koordinasi dengan KADIN, BKPM, dan asosiasi pengusaha<br>3. Promosi terpadu lintas sektor | 1. Monitoring realisasi investasi setiap triwulan<br>2. Evaluasi hambatan investasi di daerah<br>3. Pelaporan perkembangan investasi ke Kepala Daerah |

| NO | Tujuan /sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Resiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | Analisis Resiko | Resiko Prioritas | Rencana Tindak Lanjut Pengendalian | Rencana Komunikasi RTP | Rencana Pemantauan RTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Resiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena | | | | | |
| 6 | Terwujudnya Masyarakat digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi | Indeks masyarakat digital Indonesia | 1. Rendahnya capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia<br>2. Rendahnya literasi digital masyarakat<br>3. Minimnya pemanfaatan layanan digital pemerintahan (e-government)<br>4. Terbatasnya anggaran untuk transformasi digital daerah | | KDH | 1. Akses internet belum merata, terutama di daerah terpencil atau 3T<br>2. Kurangnya edukasi dan pelatihan digital, terutama untuk kelompok rentan<br>3. Sistem layanan publik belum terintegrasi dan tidak user-friendly<br>4. Prioritas anggaran belum mendukung program literasi dan infrastruktur digital | Eksternal | | 1. Ketimpangan digital meningkat, memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi<br>2. Masyarakat tidak mampu memanfaatkan teknologi secara produktif<br>3. Efektivitas pelayanan publik menurun, partisipasi digital masyarakat rendah<br>4. Target peningkatan IMDI tidak tercapai | KDH, Masyarakat, OPD | Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi | Tinggi | 1. Perluasan infrastruktur internet di daerah 3T bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi<br>2. Program literasi digital berkelanjutan untuk semua segmen masyarakat<br>3. Penguatan sistem layanan publik digital yang terintegrasi dan user-friendly<br>4. Peningkatan anggaran dan sumber daya untuk program transformasi digital daerah<br>5. Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi untuk inovasi layanan digital<br>6. Pelatihan keterampilan teknologi untuk pelaku UMKM dan kelompok rentan | 1. Sosialisasi manfaat literasi digital dan layanan e-government melalui media massa dan sosial<br>2. Koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan untuk percepatan transformasi digital<br>3. Publikasi capaian dan inovasi digital daerah secara berkala<br>4. Kampanye inklusi digital untuk menjangkau masyarakat rentan dan wilayah terpencil | 1. Monitoring triwulan terhadap capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)<br>2. Evaluasi tahunan terhadap kualitas dan jangkauan layanan publik digital<br>3. Survei literasi digital masyarakat oleh Dinas Kominfo<br>4. Penyesuaian program apabila capaian IMDI turun ≥ 5% dari target tahunan |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintah yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas | Indeks Reformasi Birokrasi | Proses perbaikan birokrasi terhambat karena belum semua ASN memahami dan mendukung perubahan yang diperlukan. | | KDH | 1. Kurangnya sosialisasi terkait substansi reformasi birokrasi<br>2. Masih ada anggapan bahwa reformasi hanya beban administrasi<br>3. Tidak adanya insentif bagi ASN yang berinovasi | Internal | | 1. Layanan kepada masyarakat tetap lambat<br>2. Penilaian pemerintah pusat terhadap daerah menurun<br>3. Masyarakat menjadi kurang puas dan kurang percaya | KDH, Masyarakat, ASN, OPD Terkait | Sedang | 1 | 1. Meningkatkan sosialisasi reformasi birokrasi secara rutin melalui workshop, forum ASN, dan media internal.<br><br>2. Memberikan pelatihan inovasi pelayanan publik kepada seluruh ASN, khususnya yang terlibat langsung dengan masyarakat.<br><br>3. Menyusun skema penghargaan dan insentif untuk ASN yang berhasil membuat inovasi atau mempercepat proses layanan.<br><br>4. Memasukkan indikator partisipasi reformasi birokrasi dalam penilaian kinerja ASN setiap tahun.<br><br>5. Melakukan pendampingan oleh tim reformasi birokrasi bagi unit kerja yang memiliki capaian rendah. | 1. Membuat kampanye internal "Reformasi Birokrasi untuk Pelayanan Terbaik" melalui banner, infografis, dan media sosial resmi pemerintah daerah.<br><br>2. Mengadakan forum komunikasi bulanan antara pimpinan OPD dan pegawai untuk menyampaikan perkembangan dan kendala implementasi.<br><br>3. Menyampaikan capaian reformasi birokrasi kepada masyarakat melalui laporan kinerja dan publikasi di media massa.<br><br>4. Membentuk tim humas internal yang bertugas mengklarifikasi isu atau hoaks terkait reformasi birokrasi. | 1. Monitoring kemajuan capaian indeks reformasi birokrasi setiap triwulan.<br><br>2. Evaluasi implementasi aksi reformasi birokrasi di setiap OPD secara semesteran.<br><br>3. Survey kepuasan ASN terhadap proses dan manfaat reformasi birokrasi setiap tahun.<br><br>4. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan daerah serta Kementerian PANRB sebagai bahan pembinaan dan perbaikan. |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi | Kegiatan pembenahan birokrasi tidak konsisten dan tidak merata di semua instansi daerah | | KDH | 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi kurang ketat<br>2. Pembagian peran antar OPD belum jelas<br>3. Aturan dari pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi daerah | Internal | | 1. Pola kerja ASN tidak banyak berubah<br>2. Pelayanan publik masih lambat dan tidak efisien<br>3. Kepercayaan terhadap pemerintah daerah menurun | KDH, Masyarakat, ASN, Instansi Pengawas | Tinggi | 1 | 1. Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala di seluruh OPD.<br><br>2. Menyusun panduan pembagian peran yang jelas antar OPD dalam pelaksanaan reformasi.<br><br>3. Mengadakan koordinasi rutin lintas OPD untuk menyamakan langkah dan mengatasi hambatan.<br><br>4. Menyesuaikan kebijakan dan aturan pusat dengan kondisi daerah melalui penyusunan regulasi turunan yang adaptif.<br><br>5. Memberikan pendampingan teknis bagi OPD yang capaian reformasinya masih rendah. | 1. Menyampaikan hasil evaluasi reformasi birokrasi secara transparan kepada seluruh OPD.<br><br>2. Membuat buletin internal reformasi birokrasi yang memuat capaian, hambatan, dan solusi.<br><br>3. Menggelar forum koordinasi reformasi birokrasi setiap triwulan dengan melibatkan pimpinan OPD.<br><br>4. Menyebarkan materi edukasi dan panduan reformasi melalui media internal, email, dan grup komunikasi resmi ASN. | 1. Memantau kemajuan capaian reformasi birokrasi setiap triwulan menggunakan indikator terukur.<br><br>2. Melakukan evaluasi kinerja OPD berdasarkan penerapan reformasi birokrasi minimal dua kali setahun.<br><br>3. Menyusun laporan perkembangan yang disampaikan kepada pimpinan daerah dan Kementerian PANRB.<br><br>4. Melibatkan Inspektorat Daerah dalam memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dijalankan secara konsisten. |

| NO | Tujuan /sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Resiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | Analisis Resiko | Resiko Prioritas | Rencana Tindak Lanjut Pengendalian | Rencana Komunikasi RTP | Rencana Pemantauan RTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Resiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena | | | | | |
| | | Indeks Inovasi Daerah | Ide dan inovasi dari perangkat daerah tidak berkembang atau tidak dicatat sehingga tidak diketahui | | KDH | 1. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis tentang inovasi<br>2. Sistem pelaporan inovasi masih rumit dan belum terintegrasi<br>3. Minimnya dukungan anggaran dan sumber daya untuk mendukung inovasi | Internal | | 1. Program pemerintah jadi monoton dan tidak menarik<br>2. Sulit menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah<br>3. Daerah kurang dilirik untuk kerja sama atau investasi | KDH, OPD, Masyarakat, Stakeholder Eksternal | Tinggi | 1 | 1. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis inovasi bagi perangkat daerah minimal dua kali setahun.<br><br>2. Menyederhanakan dan mendigitalisasi sistem pelaporan inovasi agar mudah diakses dan digunakan.<br><br>3. Menyusun mekanisme penghargaan bagi OPD yang memiliki inovasi unggulan.<br><br>4. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dan implementasi inovasi.<br><br>5. Membentuk tim penilai inovasi lintas OPD untuk mengawal ide dari tahap konsep hingga implementasi. | 1. Menyampaikan informasi peluang dan prosedur pelaporan inovasi melalui surat edaran dan media internal.<br><br>2. Mengadakan forum inovasi daerah untuk memamerkan ide-ide unggulan dari OPD.<br><br>3. Mengunggah profil inovasi daerah di website resmi pemerintah daerah dan media sosial.<br><br>4. Mengajak media lokal untuk meliput inovasi daerah sebagai bentuk promosi dan motivasi bagi perangkat daerah lain. | 1. Memantau perkembangan inovasi setiap triwulan melalui laporan kemajuan OPD.<br><br>2. Mengintegrasikan indikator inovasi dalam evaluasi kinerja OPD tahunan.<br><br>3. Melakukan verifikasi lapangan terhadap inovasi yang dilaporkan.<br><br>4. Menyusun laporan perkembangan inovasi untuk dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan dipublikasikan ke masyarakat. |
| Misi 5 : Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas,tangguh bencana,dan ramah lingkungan | IKLI (indeks kepuasan layanan infrastruktur | Rendahnya kualitas infrastruktur yang mengakibatkan infrastruktur tidak tahan terhadap bencana | | KDH | tidak mempertimbangkan berbagai kajian dalam pembangunan infrastruktur termasuk kajian resiko bencana | | | 1. Kerusakan fisik infrastruktur 2. Biaya perbaikan tinggi | Masyarakat | Sangat Tinggi | 1 | 1. Melaksanakan audit teknis berkala terhadap kualitas infrastruktur sesuai standar konstruksi yang berlaku (SNI dan ketentuan teknis terkait). 2. Mewajibkan penggunaan material dan teknologi konstruksi yang tahan terhadap bencana sesuai karakteristik wilayah 3. Memasukkan indikator ketahanan bencana sebagai salah satu persyaratan utama dalam proses perencanaan dan pengadaan proyek infrastruktur. | 1. Menyampaikan hasil audit teknis infrastruktur kepada pimpinan daerah, DPRD, dan instansi terkait untuk memastikan tindak lanjut yang tepat. 2. Melakukan sosialisasi kepada kontraktor, konsultan, dan pelaksana teknis mengenai standar kualitas infrastruktur tahan bencana. 3. Menyediakan laporan terbuka kepada publik melalui website resmi pemerintah daerah terkait kualitas dan ketahanan infrastruktur yang dibangun. | 1. Melakukan inspeksi lapangan secara periodik untuk memantau kualitas dan kondisi infrastruktur, terutama di wilayah rawan bencana 2. Memanfaatkan teknologi pemantauan, seperti drone dan sensor struktural, untuk mendeteksi kerusakan dini. 3. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pengendalian risiko setiap tahun dan melakukan revisi strategi jika diperlukan. |
| 1 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas | IKLI (indeks kepuasan layanan infrastruktur | 1. Terbatasnya akses masyarakat pada infrastruktur yang berkualitas 2. Kesenjangan akses antar wilayah 3. Biaya pemanfaatan infrastruktur terlalu tinggi | | KDH | 1. Perencanaan tidak berbasis data dan kebutuhan masyarakat 2. Fokus pembangunan belum merata 3. Tidak ada skema subsidi untuk pemanfaatan infrastruktur | | | 1. Masyarakat tertentu tertinggal dari layanan dasar 2. Meningkatnya ketimpangan wilayah 3. Infrastruktur hanya dinikmati kelompok tertentu | | 1. Terbatasnya akses masyarakat pada infrastruktur yang berkualitas (TINGGI) 2. Kesenjangan akses antar wilayah (TINGGI) 3. Biaya pemanfaatan infrastruktur terlalu tinggi (TINGGI) | Prioritas: 1. Terbatasnya akses masyarakat pada infrastruktur yang berkualitas 2. Kesenjangan akses antar wilayah 3. Biaya pemanfaatan infrastruktur terlalu tinggi | 1. Melaksanakan pemetaan wilayah prioritas yang memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur berkualitas. 2. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, listrik, internet) ke dalam program prioritas daerah dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah 3. Mengalokasikan anggaran yang proporsional dan berkeadilan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur | 1. Menyampaikan rencana dan capaian pembangunan infrastruktur secara transparan melalui laporan resmi pemerintah daerah, forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan media daring. 2. Menyelenggarakan forum diskusi publik dan sosialisasi di wilayah prioritas untuk menjaring aspirasi serta memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam rencana pembangunan 3. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme pemeliharaan infrastruktur agar manfaatnya berkelanjutan. | 1. Memantau progres pembangunan dan perbaikan infrastruktur melalui laporan teknis dan inspeksi lapangan secara berkala 2. Memanfaatkan teknologi informasi (dashboard pemantauan dan GIS) untuk memetakan tingkat akses dan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah 3. Menyusun laporan evaluasi tahunan yang digunakan sebagai dasar penyesuaian program dan anggaran pembangunan infrastruktur. |
| 2 | Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%) | 1. Alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan terbangun 2.Degradasi kualitas Air, Udara dan Tanah di sekitar proyek infrastruktur | | KDH | 1. Lemahnya pengawasan dan penegakan aturan terutama dalam penataan ruang, lemahnya koordinasi antar sektor 2. Kurangnya pengelolaan limbah dan emisi saat pelaksanaan konstruksi dan operasional | | | 1. Peningkatan resiko bencana alam 2. Gangguan ekosistem 3. Penurunan Kualitas Lingkungan | | 1. Alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan terbangun (SANGAT TINGGI) 2.Degradasi kualitas Air, Udara dan Tanah di sekitar proyek infrastruktur (SANGAT TINGGI) | Prioritas: 1. Degradasi kualitas Air, Udara dan Tanah di sekitar proyek infrastruktur, 2. 2. Alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan terbangun | 1. Pelaksanaan AMDAL secara ketat sebelum proyek infrastruktur dimulai, dan memastikan rekomendasi lingkungan diimplementasikan. 2. Menerapkan teknologi ramah lingkungan serta metode konstruksi yang meminimalkan polusi air, udara, dan tanah. 3. Menetapkan zona perlindungan dan penyangga di sekitar proyek untuk mengurangi dampak langsung terhadap ekosistem | 1. Menyampaikan hasil kajian dan pengendalian dampak lingkungan kepada pihak terkait, termasuk dinas lingkungan hidup, pemerintah pusat, dan masyarakat terdampak. 2. Melakukan sosialisasi kepada warga sekitar mengenai potensi dampak lingkungan dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan. 3. Menyampaikan laporan pemantauan lingkungan secara berkala melalui media resmi pemerintah daerah dan papan informasi di lokasi proyek | 1. Melakukan pengukuran kualitas air, udara, dan tanah secara berkala menggunakan metode laboratorium terakreditasi. 2. Memanfaatkan sensor dan peralatan real-time monitoring untuk deteksi dini pencemaran di sekitar proyek. 3. Melakukan inspeksi lapangan rutin bersama tim gabungan untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana pengelolaan lingkungan. |

| NO | Tujuan /sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Resiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | Analisis Resiko | Resiko Prioritas | Rencana Tindak Lanjut Pengendalian | Rencana Komunikasi RTP | Rencana Pemantauan RTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Resiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena | | | | | |
| 3 | Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bencana dan pasca bencana | Indeks Risiko Bencana (IRB) (%) | 1. Meningkatnya Indeks Resiko Bencana 2.Rendahnya ketangguhan infrastruktur terhadap bencana | | KDH | 1. Ketidakhadiran kajian resiko bencana dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur 2. Pengabaian kawasan bencana 3. Desain bangunan dan infrastruktur tidak memenuhi standar ketahanan bencana | | | 1. Korban jiwa 2. Kerusakan infrastruktur 3. Terganggunya pelayanan publik 4. Peningkatan biaya pemulihan pasca bencana | | 1. Meningkatnya Indeks Resiko Bencana (SANGAT TINGGI) 2.Rendahnya ketangguhan infrastruktur terhadap bencana (SANGAT TINGGI) | Prioritas: 1. Rendahnya ketangguhan infrastruktur terhadap bencana, 2. Meningkatnya Indeks Resiko Bencana | 1. Mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan program pembangunan daerah. 2. Meningkatkan kualitas dan jumlah sarana prasarana mitigasi bencana seperti sistem peringatan dini (early warning system), jalur evakuasi, dan tempat pengungsian. 3. Mengalokasikan anggaran khusus untuk program pengurangan risiko bencana di daerah rawan. | 1. Melaksanakan sosialisasi dan simulasi kebencanaan secara rutin di wilayah rawan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat 2. Menyediakan saluran komunikasi darurat yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam untuk pelaporan dan informasi peringatan bencana. 3. Menyusun laporan perkembangan indeks risiko bencana dan menyampaikannya secara berkala kepada pimpinan daerah dan DPRD untuk pengambilan keputusan strategis. | 1. Melakukan evaluasi tahunan terhadap faktor-faktor penyebab peningkatan IRB dan efektivitas program pengurangan risiko bencana. 2. Memantau kondisi fisik lingkungan dan infrastruktur mitigasi bencana secara berkala melalui inspeksi lapangan dan teknologi pemantauan jarak jauh 3. Mengintegrasikan hasil pemantauan risiko bencana ke dalam sistem informasi daerah agar dapat diakses secara terbuka oleh publik. |
| Misi 6 : Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah | Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas | 1. Meningkatnya angka gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah 2. Penurunan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban | | Satpol PP & BPBD | 1. Rendahnya patroli dan pengawasan di daerah rawan 2. Kurangnya program sosialisasi dan kemitraan dengan warga | Internal (program belum masif) | | 1. Menurunnya rasa aman masyarakat, meningkatnya kriminalitas 2. Lemahnya sistem deteksi dini gangguan keamanan | Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah | Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi | Tinggi | 1. Menambah jumlah personil patroli, koordinasi dengan kepolisian, edukasi masyarakat 2. Program kemitraan keamanan berbasis RT/RW, pelatihan linmas | 1. Laporan rutin kepada kepala daerah & rapat koordinasi keamanan 2. Penyebaran informasi melalui media sosial dan tatap muka | 1. Monitoring bulanan angka kejadian dan survei rasa aman masyarakat 2. Evaluasi partisipasi dan jumlah kegiatan kemasyarakatan per triwulan |
| 1 | Meningkatknya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat | Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas | 1. Rendahnya nilai indeks Trantibumlinmas 2. Tingginya angka pelanggaran perda/perkada dan ketidaktertiban umum 3. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum dan ketahanan lingkungan 4. Tidak optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan dan respons | | KDH | 1. Kurangnya kapasitas dan jumlah personel Satpol PP dan Linmas 2. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan 3. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat masih rendah 4. Belum adanya sistem pemantauan digital atau command center daerah | Eksternal | | 1. Pengendalian gangguan ketertiban dan bencana sosial tidak optimal 2. Gangguan ketertiban meningkat, citra pemerintah daerah menurun 3. Ketergantungan hanya pada aparat, tingkat kepedulian sosial masyarakat rendah 4. Respons terhadap insiden lambat, pengambilan keputusan tidak berbasis data 5. Menurunnya rasa aman, terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial | KDH, Masyarakat nagari, Pemerintahan Nagari, OPD terkait | Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi | Tinggi | 1 .Peningkatan patroli dan pengawasan terpadu; 2. Optimalisasi patroli rutin di daerah rawan konflik sosial 3. Sosialisasi sadar hukum; sinergi TNI/Polri, Satpol PP, dan masyarakat 4. Pemutakhiran data potensi kerawanan sosial setiap triwulan | 1.Menyelenggarakan forum komunikasi publik antara pemerintah daerah, aparat dan masyarakat 2. Sosialisasi aturan ketertiban umum melalui media sosial, radio, baliho dan forum masyarakat 3. Membentuk tim humas krisis untuk respon cepat isu keamanan di media | 1.Monitoring data gangguan kamtibmas per bulan; evaluasi triwulan 2. Monitoring mingguan oleh satpol PP & keplisian untuk wilayah prioritas |
| 2 | Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi Daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan ekonomi daerah melambat | | KDH | 1. Penurunan permintaan pasar, 2. Investasi rendah, 3. ketidakpastian global | Internal & Eksternal | | 1. Menurunnya PDRB, 2. Daya beli masyarakat rendah | Masyarakat, pelaku usaha, pemerintah | Tinggi | 1 | 1. Diversifikasi ekonomi 2. Insentif investasi, 3. Promosi sektor unggulan | Laporan rutin ke kepala daerah, DPRD, dan pelaku usaha | Monitoring PDRB, investasi, konsumsi rumah tangga tiap triwulan |
| 1 | Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | 1. Laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari target RPJMD 2. Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu yang tidak stabil 3. Lemahnya kontribusi UMKM dan ekonomi lokal terhadap PDRB 4. Terhambatnya pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi 5. Kurangnya sinergi antar OPD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah | | KDH | 1. Investasi daerah rendah, daya saing rendah, atau produktivitas sektor utama stagnan 2. Struktur ekonomi tidak terdiversifikasi (misalnya terlalu bergantung pada pertanian/perdagangan) 3. Kurangnya akses pembiayaan, teknologi, dan pasar bagi pelaku usaha lokal 4. Keterbatasan anggaran, proses pengadaan lambat, atau konflik lahan 5. Perencanaan sektoral tidak terintegrasi | Eksternal | | 1. Target pembangunan tidak tercapai, menurunnya kesejahteraan masyarakat 2. Jika sektor utama terdampak (cuaca, harga pasar), pertumbuhan ekonomi langsung terpengaruh 3. Potensi pertumbuhan tidak tergali optimal, distribusi manfaat pembangunan tidak merata 4. Kegiatan ekonomi masyarakat terganggu, investor enggan menanamkan modal 5. Program saling tumpang tindih atau tidak mendukung prioritas ekonomi | KDH, Pelaku UMKM, OPD terkait | Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi | Tinggi | 1. Mendorong investasi melalui kemudahan perizinan 2. Diversifikasi sektor ekonomi 3. Stabilisasi harga dan pengendalian inflasi 4. Peningkatan produktivitas melalui pelatihan dan teknologi 5. Percepatan realisasi proyek strategis 6. Penguatan stok pangan lokal; 7. Operasi pasar; 8. Diversifikasi sumber pasokan | 1. Publikasi peluang investasi Koordinasi dengan pelaku usaha, KADIN, UMKM 2. Sosialisasi program pemerintah untuk peningkatan daya beli | 1.Monitoring triwulan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2. Evaluasi capaian target PDRB oleh Bappeda 3. Laporan perkembangan ke Kepala Daerah 4. Penyesuaian strategi jika LPE turun ≥ 1% dari target |

| NO | Tujuan /sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Resiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | Analisis Resiko | Resiko Prioritas | Rencana Tindak Lanjut Pengendalian | Rencana Komunikasi RTP | Rencana Pemantauan RTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Resiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena | | | | | |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 1. Tingginya tingkat pengangguran terbuka<br>2. Rendahnya mobilitas dan akses kerja di wilayah tertentu<br>3. Terbatasnya program pemerintah dalam penempatan kerja dan kewirausahaan | | KDH | 1. Pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja<br>2. Ketimpangan infrastruktur dan informasi pasar kerja antar wilayah<br>3. Anggaran dan koordinasi antar instansi belum optimal | Eksternal | | 1. Target RPJMD tidak tercapai, meningkatnya beban sosial dan potensi gangguan sosial<br>2. Pengangguran terkonsentrasi di wilayah tertentu, memperlebar ketimpangan regional<br>3. Upaya pengurangan pengangguran tidak berdampak signifikan | KDH, masyarakat usia kerja, OPD terkait | Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi | Tinggi | 1. Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya dan wirausaha<br>2. Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri<br>3. Peningkatan akses informasi lowongan kerja melalui pusat layanan ketenagakerjaan<br>4. Penguatan kerja sama dengan dunia usaha untuk magang dan penempatan kerja<br>5. Pembangunan infrastruktur pendukung mobilitas tenaga kerja<br>6. Pemberian insentif bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal | 1. Publikasi peluang kerja melalui media cetak, online, dan radio lokal<br>2. Sosialisasi program pelatihan dan rekrutmen melalui dinas ketenagakerjaan<br>3. Koordinasi dengan asosiasi pengusaha, KADIN, dan lembaga pelatihan | 1. Monitoring triwulan tingkat pengangguran terbuka oleh BPS dan Bappeda<br>2.Evaluasi efektivitas program pelatihan dan penempatan kerja<br>3.Laporan perkembangan ke Kepala Daerah dan DPRD<br>4. Penyesuaian strategi apabila tingkat pengangguran terbuka meningkat ≥ 1% dari target |
| 2 | Meningkatnya kapasitas riil keuangan daerah | Rasio PAD terhadap total pendapatan/Derajat Otonomi Fiskal | 1. Rendahnya rasio PAD terhadap total pendapatan daerah<br>2. PAD tidak tumbuh signifikan dari tahun ke tahun<br>3. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah<br>4. Kinerja ekonomi daerah tidak mendukung peningkatan basis pajak | | KDH | 1. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pusat<br>2. Optimalisasi pajak/retribusi daerah lemah, potensi belum digali maksimal<br>3. Sosialisasi lemah, sistem pembayaran belum digital, atau penegakan hukum tidak tegas<br>4. Pertumbuhan ekonomi rendah, investasi minim, konsumsi masyarakat lemah | Eksternal | | 1. Derajat otonomi fiskal lemah, fleksibilitas belanja daerah rendah<br>2. Pendapatan asli daerah stagnan, belanja pembangunan terhambat<br>3. Kebocoran penerimaan daerah, kehilangan potensi pendapatan<br>4. Basis penerimaan pajak sempit, pertumbuhan PAD tidak signifikan | KDH, Bapenda | Probabilitas: Sedang ; Dampak: Tinggi | Prioritas tinggi – Menyangkut kemandirian fiskal daerah | 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah<br>2. Optimalisasi pendapatan dari aset daerah<br>3. Peningkatan sistem informasi pajak<br>4. Pelatihan petugas pajak dan retribusi<br>5. Pemutakhiran data objek pajak | 1. Sosialisasi kewajiban pajak ke masyarakat<br>2. Publikasi transparansi penggunaan PAD<br>3. Forum koordinasi antar perangkat daerah | 1. Monitoring bulanan realisasi PAD<br>2. Evaluasi triwulan strategi intensifikasi pajak<br>3. Laporan perkembangan ke Bappeda dan Kepala Daerah |
| | | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | 1. Rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB<br>2. Kurangnya inovasi dan digitalisasi dalam pemungutan pajak daerah<br>3. Basis data perpajakan tidak akurat dan tidak diperbarui secara berkala<br>4. Tidak adanya sinergi antar pemda, OPD teknis, dan pelaku usaha dalam | | KDH | 1. Potensi pajak belum tergali optimal, terutama sektor informal dan UMKM<br>2. SDM terbatas, sistem informasi belum mendukung optimalisasi dan pengawasan pajak<br>3. Tidak adanya sistem database terintegrasi antar OPD dan instansi vertikal<br>4. Dominasi PAD dari satu-dua jenis pajak seperti PBB-P2 atau BPHTB yang rentan pasar properti<br>5. Minimnya forum kemitraan dan partisipasi wajib pajak dalam perencanaan dan pengawasan pajak | Eksternal | | 1. Daerah gagal memaksimalkan penerimaan dari aktivitas ekonomi, kemampuan fiskal melemah<br>2. Efisiensi pemungutan rendah, potensi kebocoran tinggi<br>3. Perencanaan target pajak tidak akurat, strategi pemungutan tidak efektif<br>4. Saat sektor tersebut melemah, rasio pajak terhadap PDRB langsung turun drastis<br>5. Tidak terciptanya budaya pajak yang sehat, target peningkatan rasio sulit tercapai | KDH, Wajib Pajak, Bapenda | Probabilitas: Sedang ; Dampak: Sedang | Prioritas sedang – Berpengaruh pada pembiayaan pembangunan | 1. Pembaruan dan validasi data wajib pajak<br>2. Digitalisasi sistem pembayaran pajak<br>3. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum pajak<br>4. Edukasi kesadaran pajak kepada pelaku usaha | 1. Kampanye sadar pajak melalui media massa<br>2. Kerja sama dengan asosiasi usaha<br>3. Laporan terbuka penerimaan pajak | 1. Monitoring triwulan realisasi pajak terhadap PDRB<br>2. Evaluasi efektivitas kebijakan pemungutan<br>3. Pelaporan kepada DPRD setiap semester |
| 3 | Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah | Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Syariah | 1. Jumlah lembaga jasa keuangan syariah tidak bertambah sesuai target<br>2. Lambatnya proses perizinan dan legalitas lembaga keuangan syariah<br>3. Dominasi lembaga konvensional yang lebih mapan dan kompetitif<br>4. Ketidakterpaduan antara program OPD dengan pengembangan ekonomi syariah daerah | | KDH | 1. Kurangnya minat pelaku usaha membuka LJKS karena keterbatasan pasar atau regulasi<br>2. Regulasi daerah belum mendukung secara optimal, koordinasi dengan OJK/BI belum sinergis<br>3. Lembaga keuangan syariah kalah dalam teknologi, promosi, dan jaringan pelayanan<br>4. Tidak ada sinergi antara dinas koperasi, ekonomi, dan perbankan syariah | Eksternal | | 1. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah terbatas<br>2. Pengembangan sektor keuangan syariah terhambat<br>3. Pertumbuhan LJKS stagnan, pangsa pasar keuangan syariah kecil<br>4. Program pengembangan LJKS berjalan sendiri-sendiri, tidak berdampak terhadap peningkatan jumlah LJKS | KDH, Lembaga Keuangan Syariah, OPD terkait | Probabilitas: Sedang ; Dampak: Sedang ; | Prioritas sedang – Berdampak pada pengembangan ekonomi syariah | 1. Pemberian insentif bagi pelaku usaha membuka LKS<br>2. Kerja sama promosi dengan OJK dan BI<br>3. Edukasi masyarakat tentang keuangan syariah<br>4. Fasilitasi kemudahan perizinan | 1. Sosialisasi manfaat LKS melalui media massa<br>2. Kerja sama dengan tokoh agama dan komunitas<br>3. Publikasi kisah sukses usaha berbasis syariah | 1. Monitoring triwulan jumlah LKS<br>2. Evaluasi efektivitas insentif<br>3. Laporan ke Bappeda dan OJK setiap semester |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | Tujuan /sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Resiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | | Analisis Resiko | Resiko Prioritas | Rencana Tindak Lanjut Pengendalian | Rencana Komunikasi RTP | Rencana Pemantauan RTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Resiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang terkena | | | | | |
| Misi 7 : Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan | Persentase Desa Mandiri | Kegiatan pemberdayaan desa tidak berjalan maksimal sehingga penguatan kelembagaan dan ekonomi desa sulit berkembang | | KDH | 1. Fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik belum merata<br>2. Koordinasi antar instansi pemerintah kurang efektif<br>3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah | Internal | | 1. Pembangunan antar wilayah tdak seimbang<br>2. Layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak merata<br>3. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun | KDH, Masyarakat, dan OPD Terkait | Tinggi | 1 | 1. Meningkatkan koordinasi lintas instansi melalui forum pembangunan desa yang terjadwal rutin.<br><br>2. Mengalokasikan anggaran prioritas untuk penyediaan fasilitas dasar di desa tertinggal.<br><br>3. Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada perangkat desa terkait manajemen pembangunan.<br><br>4. Mendorong program padat karya tunai untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.<br><br>5. Melakukan monitoring khusus terhadap capaian indikator Desa Mandiri di wilayah prioritas. | 1. Menyampaikan rencana pembangunan desa secara transparan melalui musyawarah desa dan media publik.<br><br>2. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat partisipasi dalam pembangunan melalui media lokal dan penyuluhan langsung.<br><br>3. Menyebarkan informasi capaian pembangunan desa secara berkala di website resmi pemerintah daerah dan papan informasi desa.<br><br>4. Mengundang media untuk meliput kegiatan pembangunan desa sebagai bentuk promosi keberhasilan. | 1. Memantau progres pembangunan desa setiap triwulan melalui laporan resmi perangkat desa.<br><br>2. Melakukan verifikasi lapangan terhadap penggunaan dana desa dan hasil pembangunan.<br><br>3. Mengintegrasikan indikator pembangunan desa dalam evaluasi kinerja OPD terkait.<br><br>4. Menyusun laporan perkembangan persentase Desa Mandiri untuk dilaporkan kepada pimpinan daerah dan kementerian terkait. |
| | Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi | Persentase Desa Mandiri | Potensi ekonomi nagari tidak dimanfaatkan karena terbatasnya dukungan dan pemanfaatan sumber daya lokal | | KDH | 1. Akses pelatihan kewirausahaan masih terbatas<br>2. Permodalan dan pendampingan usaha belum merata<br>3. Teknologi belum dimanfaatkan secara optimal<br>4. Jenis usaha ekonomi di nagari masih belum beragam | Internal | | 1. Ekonomi nagari tumbuh lambat<br>2. Warga sulit keluar dari kemiskinan<br>3. Anak muda enggan tinggal atau berwirausaha di nagari | KDH, Pelaku Usaha, Masyarakat | Tinggi | 1 | 1. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha secara berkala bagi masyarakat nagari.<br><br>2. Memperluas akses permodalan melalui kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro.<br><br>3. Mengembangkan pendampingan usaha berbasis sektor unggulan nagari.<br><br>4. Mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran, produksi, dan manajemen usaha.<br><br>5. Memfasilitasi diversifikasi jenis usaha sesuai potensi sumber daya lokal. | 1. Menginformasikan peluang usaha dan pelatihan kepada masyarakat melalui media desa, baliho, dan media sosial.<br><br>2. Menyelenggarakan *expo* atau pameran produk nagari untuk memperkenalkan hasil usaha lokal.<br><br>3. Mengundang tokoh sukses lokal untuk memotivasi warga berwirausaha.<br><br>4. Menyebarkan kisah sukses pelaku usaha nagari sebagai inspirasi dan promosi. | 1. Memantau perkembangan jumlah dan keberlanjutan usaha di nagari setiap triwulan.<br><br>2. Mengevaluasi efektivitas pelatihan dan pendampingan usaha setiap semester.<br><br>3. Memantau perkembangan nilai ekonomi produk lokal dan jumlah tenaga kerja yang terserap.<br><br>4. Menyusun laporan capaian pertumbuhan ekonomi nagari untuk disampaikan kepada pimpinan daerah dan stakeholder terkait. |